

# DAFTAR ISI

## DAFTAR TABEL

## DAFTAR GAMBAR

<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	I-2
1.3. Maksud Dan Tujuan .....	I-3
1.4. Hubungan Antara Dokumen .....	I-4
1.5 Tahapan Penusunan RKPD .....	I-5
1.5. Sistematika Penulisan .....	I-6
<b>Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah .....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografi Dan Administrasi .....	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-9
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .....	II-30
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-117
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-12
2.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi.....	II-12
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .....	II-27
2.3. Aspek Daya Saing Daerah .....	II-33
2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	II-33
2.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur .....	II-43
2.3.3. Fokus Iklim Investasi.....	II-44
2.3.4. Fokus Sumber Daya Manusia .....	II-46
2.4. Aspek Pelayanan Umum .....	II-47
2.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib .....	II-47
2.4.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan .....	II-107
2.4.3. Fokus Layanan Urusan Pendukung.....	II-118
2.4.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang.....	II-119
2.4.5. Fokus Layanan Urusan Pengawasan .....	II-124
2.4.6 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Umum.....	II-124
2.5. Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....	II-125
2.6. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Spm Dan Sdgs.....	II-131
<b>Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Tahun 2021, 2022 dan perkiraan 2023 .....	III-1
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024	III-6

3.1.2.1 Analisa Kondisi Internal dan Eksternal terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah .....	III-6
3.1.2.2 Identifikasi Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024.....	III-9
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Padang Panjang .....	III-10
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III-12
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-13
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-18
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III-20
<b>Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024.....	IV-1
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 ...	IV-1
4.1.2. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 .....	IV-3
4.1.3 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024 .....	IV-5
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024 .....	IV-9
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 .....	IV-9
4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 .....	IV-13
4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 .....	IV-19
4.3 Inovasi Daerah .....	IV-30
<b>Bab V Rencana Kerja Dan Kerangka Pendanaan.....</b>	<b>V-1</b>
5.1. Tujuan .....	V-1
5.2. Sasaran.....	V-2
<b>Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....</b>	<b>VI-1</b>
6.1. Indikator Kinerja Makro.....	VI-1
6.2. Indikator Kinerja Utama .....	VI-2
6.3. Indikator Kinerja Daerah .....	VI-3
<b>Bab VII. Penutup.....</b>	<b>VII-1</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang disebut RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pemerintahan Daerah diwajibkan untuk menyusun RKPD sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta RKPD Provinsi.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni :

1. Secara substansial menjadi arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah (PD) penanggung jawab program kegiatan;
2. Secara normatif menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintahan Kabupaten Sambas serta landasan bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional berfungsi sebagai arahan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan menjadi tanggung jawab SKPD sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) PD dan
4. Secara faktual berfungsi sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

RKPD disusun melalui 4 (empat) tahapan yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan utamanya melalui mekanisme Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *bottom-up* dan *up-bottom* dilakukan secara berjenjang mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Nasional. Selain menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut, perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan

Disamping itu RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. RPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang disusun bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonomi baru.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar hukum penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 4 tentang Cipta Kerja.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- g. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
- h. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2014;
- i. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- j. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor xx Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
- q. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026;
- r. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- s. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
- t. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032;
- u. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah untuk menyiapkan pedoman bagi Pemerintah Kota Padang Panjang dan *stakeholders* lainnya dalam menyelenggarakan pembangunan di Kota Padang Panjang tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya RKPD adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan dan bersinergi baik antar pelaku pembangunan, maupun antar sektor dan bidang pembangunan.

- b. Menjabarkan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.
- c. Sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran 2024.
- d. Menyiapkan dasar penyusunan rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- e. Menyediakan pedoman sebagai tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan pembangunan.

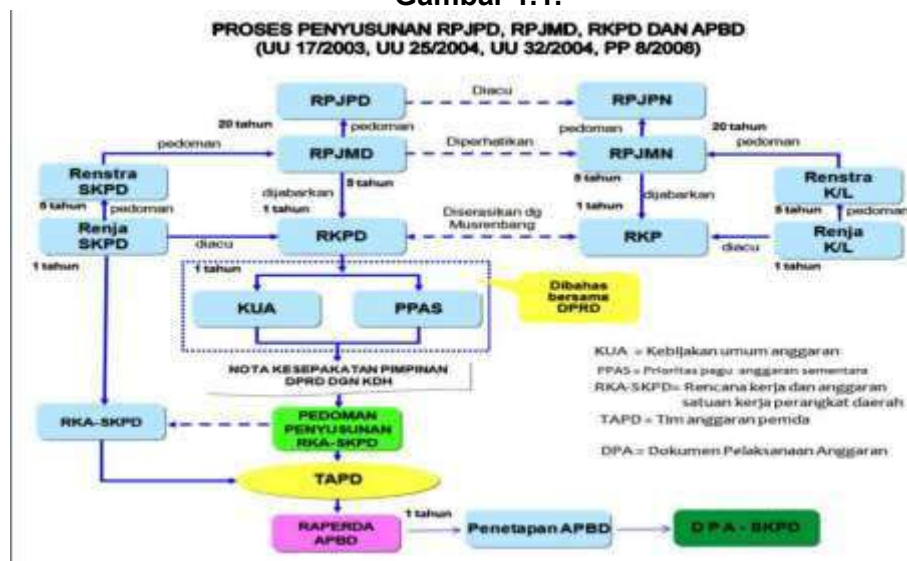
**1.4. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 memperhatikan dan disinergikan dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032, RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, Rencana Pembnagunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 serta Program Prioritas Nasional dalam RKP 2024.

Sinergitas perencanaan pembangunan dimaksudkan terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan Kota Padang Panjang. Oleh sebab itu, maka hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan, khususnya dalam penyusunan RKPD Kota Padang Panjang tahun 2024 adalah bersifat saling mengisi dan melengkapi, sehingga RKPD mampu menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang pada tahun 2024.

Untuk lebih jelasnya, berikut digambarkan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Padang Panjang dengan dokumen perencanaan lainnya.

**Gambar 1.1.**



### 1.5. TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD

Penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 dilaksanakan dengan tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni mulai dari persiapan sampai dengan penetapan dengan Peraturan Kepala Daerah. Secara detail tahapan dan tata cara penyusunan RKPD dapat digambarkan pada Gambar berikut.

Gambar 1.2



Untuk jelasnya tahapan dan jadwal penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Jadwal Penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	uraian	jadwal
1.	Persiapan Penyusunan RKPD	Minggu I Desember 2022
2.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD	Minggu I Desember 2022 s/d Minggu II Februari 2023
3.	Penyampaian Pokok-pokok pikiran DPRD kepada Pemerintah Kota Padang Panjang	Minggu III Maret 2023
4.	Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	Minggu I Januari s/d Minggu I Maret 2023
5.	Penyampaian Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah kepada Walikota melalui Bappeda	Minggu I Maret 2023
6.	Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD	Minggu II Februari 2023

No	uraian	jadwal
7.	Pengajuan rancangan awal RKPD kepada Walikota dan Konsep Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	Minggu III Februari 2023
8.	Penyampaian Surat Edaran penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah	Minggu IV Februari 2023
9.	Penyampaian Rancangan Renja Perangkat Daerah (dilampirkan Pra RKA)	Minggu I Maret 2023
10.	Pembahasan/Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah	Minggu III Maret 2023
11.	Penyusunan Rancangan RKPD	Minggu IV Maret 2023
12.	Pengajuan dan persetujuan Walikota terhadap rancangan RKPD dan pelaksanaan Musrenbang RKPD	Minggu IV Maret 2023
13.	Perumusan Rancangan Akhir RKPD	Minggu V Maret 2023
14.	Penyampaian Rancangan Akhir RKPD kepada Sekretaris Daerah dan pembahasan dengan Kepala Perangkat Daerah	Minggu I April s/d Minggu IV Mei 2023
15.	Penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi	Minggu III Juni 2023
16.	Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD	Minggu I Juli 2023
17.	Penyempurnaan Rancangan Perwako Renja Perangkat Daerah	Minggu II Juli 2023
18.	Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Renja Perangkat Daerah	Minggu IV Juli 2023

## 1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan** yang menjabarkan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, tahapan penyusunan RKPD serta sistematika RKPD
- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah**, yang menjabarkan Kondisi Umum Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022 dan Realisasi RPJMD tahun keempat, serta Permasalahan Pembangunan Daerah.
- Bab III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah**, yang menjabarkan tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
- Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**, yang menjabarkan



secara eksplisit Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 serta hubungan antara Program pada RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang mendukung pencapaian program prioritas nasional tahun 2024.

**Bab V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah**, yang menjabarkan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

**Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, yang menjabarkan Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

**Bab VII Penutup**

# BAB II

## GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1. KONDISI UMUM DAERAH

#### 2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

##### A. Administrasi

Padang Panjang merupakan salah satu kota yang berada di wilayah Sumatera Barat dengan luas 2.300 Ha, mencakup 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Masing-masing kecamatan terdiri dari 8 (delapan) kelurahan. Adapun rincian wilayah administrasi Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Luas Wilayah Kota Padang Panjang

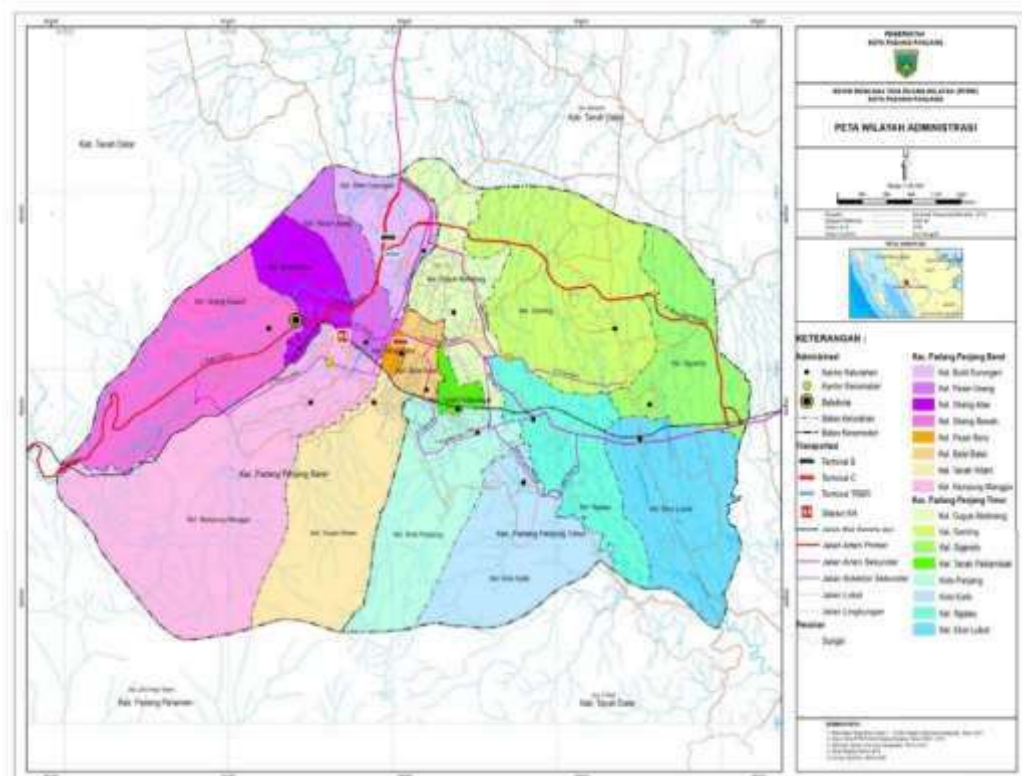
Wilayah	Luas	
	Ha	%
<b>I. Kecamatan Padang Panjang Timur</b>	<b>1.325</b>	<b>57,61</b>
Kelurahan Koto Panjang	133	5,78
Kelurahan Koto Katik	101	4,39
Kelurahan Ngalau	145	6,30
Kelurahan Ekor Lubuk	280	12,17
Kelurahan Sigando	140	6,09
Kelurahan Ganting	310	13,48
Kelurahan Guguk Malintang	190	8,26
Kelurahan Tanah Pak Lambik	26	1,13
<b>II. Kecamatan Padang Panjang Barat</b>	<b>975</b>	<b>42,39</b>
Kelurahan Silaing Bawah	261	11,35
Kelurahan Silaing Atas	54	2,35
Kelurahan Pasar Usang	59	2,57
Kelurahan Kampung Manggis	316	13,74
Kelurahan Tanah Hitam	72	3,13
Kelurahan Pasar Baru	23	1,00
Kelurahan Bukit Surungan	121	5,26
Kelurahan Balai-Balai	69	3,00
<b>Padang Panjang</b>	<b>2.300</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kota Padang Panjang, 2023

Secara administrasi Kota Padang Panjang mempunyai batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah Datar)
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batipuh (Kabupaten Tanah Datar)
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah Datar)
- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah Datar)

**Gambar 2.1**  
**Peta Administratif Kota Padang Panjang**



Sumber: Dinas PUPR Kota Padang Panjang, 2023

## B. Astronomi

Secara astronomis, Kota Padang Panjang terletak antara  $0^{\circ}27'-0^{\circ}32'$  Lintang Selatan dan  $100^{\circ}20'-100^{\circ}30'$  Bujur Timur.

## C. Geostrategis

Kota Padang Panjang merupakan kota persinggahan yang berada pada jalur lintasan strategis. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2009-2029, Kota Padang Panjang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal yang berada pada Kawasan Strategis Poros Barat – Timur (Jalur Padang – batas Provinsi Riau).

#### D. Topografi

Kota Padang Panjang terletak pada ketinggian berkisar antara 650-850 meter di atas permukaan laut dengan lebih dari 40 persen lahannya berada pada kemiringan > 40 persen.

#### E. Geologi

Hasil Kajian Penilaian Resiko Bencana Gempa Bumi dan Bahaya Gunung Berapi di Kota Padang Panjang tahun 2006 (Pusat Survei Geologi dan Bappeda Kota Padang Panjang), menunjukkan secara umum formasi Geologi Kota Padang Panjang terdiri dari batuan malihan, batuan tufaan aliran piroklastik, batuan tufaan, dan lahar II. Kemudian dari struktur geologinya terdapat satu sesar aktif yang melewati Kota Padang Panjang yaitu sesar Bukit Jarat dan satu lagi berdekatan dengan Kota Padang Panjang (pada bagian timur) yaitu Sesar Sumatera.

#### F. Klimatologi

Kota Padang Panjang terletak pada kawasan pegunungan (Gunung Marapi, Singgalang dan Tandikat), sehingga udaranya sejuk dan mempunyai curah hujan yang tinggi atau sering disebut sebagai kota hujan. Periode Januari-Desember 2022, curah hujan tercatat sekitar 4.619,4 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 239 hari, lebih tinggi dari tahun 2021 yang tercatat sekitar 4.331,8 mm dengan total hari hujan 231 hari. Temperatur udara pada tahun 2022 berkisar dari 14°C sampai 30°C dengan rata-rata temperatur udara selama tahun 2022 adalah 21,8°C. Kelembaban relatif selama tahun 2022 paling tinggi mencapai 100 persen pada bulan Januari, Juni, Juli, Agustus, Oktober, November dan Desember sedangkan paling rendah 50 persen terjadi di bulan Februari dan Maret. Kelembaban rata-rata adalah 89,9 persen. Selama tahun 2022 Kota Padang Panjang mempunyai tekanan udara rata-rata 930,5 mb dan penguapan air rata-rata 3,06 mm. Penyinaran matahari di Kota Padang Panjang selama tahun 2022 mencapai 37,8 persen. Kecepatan rata-rata angin tahun 2022 sebesar 3,7 m/s.

#### G. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Padang Panjang yang terbesar untuk lahan pertanian dengan luas 1.350 Ha atau 58,70 persen. Adapun rincian penggunaan lahan di Kota Padang Panjang dapat dijelaskan pada tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.2**

**Luas Lahan Kota Padang Panjang Menurut Jenis Penggunaannya**

Jenis Penggunaan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase terhadap Luas Kota
<b>I. Lahan Pertanian</b>	<b>1350</b>	<b>58,70</b>
a. Sawah/ Wetland	552	24,00
b. Tegal/ Kebun/ Garden	264	11,48

Jenis Penggunaan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase terhadap Luas Kota
c. Ladang/ huma/ Farm Land/ Bareland	95	4,13
d. Hutan Rakyat/ Woods Forest	213	9,26
e. Kolam/ Tebet/ Empang/ Water Pond/ Fish Pond	87	3,78
f. Sementara Tidak Diusahakan/ Not Cultivated Land	139	6,04
<b>II. Lahan Bukan Pertanian/ Non Agriculture Land</b>	<b>950</b>	<b>41,30</b>
<b>Padang Panjang</b>	<b>2300</b>	<b>100</b>

Sumber: Padang Panjang dalam Angka, 2023

## H. Wilayah Rawan Bencana

Hasil kajian penilaian resiko bencana gempa bumi dan gunung berapi di Kota Padang Panjang tahun 2006 (Kerjasama Pusat Survei Geologi Bandung dengan Bappeda Kota Padang Panjang) dan hasil observasi lapangan, maka potensi bencana alam di Kota Padang Panjang terdiri dari:

### 1. Bencana Gempa Bumi

Kota Padang Panjang dapat dibagi atas lima zona kerentanan yakni:

- a. Zona I (Kerentanan resiko bahaya gempa bumi sangat tinggi)  
Bentang alam lajur ini merupakan bagian dari bentang alam struktural vulkanik (gunung api) dengan kemiringan lereng 2 – 15° yang secara dominan berlokasi Kelurahan Silaing atas, Kampung Manggis, Pasar Usang, Balai-Balai, Tanah Pak Lambik dan Guguk Malintang.
- b. Zona IA (Kerentanan resiko bahaya gempa bumi tinggi)  
Bentang alam lajur ini merupakan bagian bentang alam struktural vulkanik (gunung api) dengan kemiringan lereng bervariasi 0 – 15 persen yang secara dominan berlokasi di Kelurahan Ganting, Sigando dan Ekor Lubuk.
- c. Zona IB (Kerentanan resiko bahaya gempa bumi tinggi – sedang)  
Bentang alamnya merupakan bagian dari bentang alam bentukan asal vulkanik (gunung api) dengan kemiringan lereng bervariasi antara 0 – 12 persen dan 2 – 15 persen yang secara dominan berlokasi di Kelurahan Ganting, Sigando dan Ekor Lubuk.
- d. Zona II (Kerentanan resiko bahaya gempa bumi sedang)  
Zona II ini secara dominan berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah, Kampung Manggis, Pasar Usang, Bukit Surungan, Pasar Baru, Balai-Balai, Guguk Malintang, Ganting, Ngalau dan Koto Panjang.
- e. Zona III (Kerentanan resiko bahaya gempa bumi sedang – rendah)  
Zona III ini secara dominan berlokasi pada seluruh Kelurahan di Kota Padang Panjang, kecuali Silaing Atas dan Tanah Pak Lambik.

## **2. Bencana Letusan Gunung Api**

Sebagian besar wilayah Kota Padang Panjang termasuk dalam kawasan III (radius 8 – 14 Km) bencana letusan gunung api berupa aliran lahar dan abu vulkanik. Daerah potensi resiko bahaya aliran Gunung Marapi yang akan datang ditentukan berdasarkan kondisi bentang alam wilayah yang dicerminkan konfigurasi topografi masa kini. Daerah-daerah tersebut dicirikan oleh lembah-lembah sungai yang berhulu langsung dari puncak Marapi. Di Kota Padang Panjang daerah-daerah potensi tersebut dapat dijumpai di sepanjang aliran Sungai Batang Anai (DAS Anai), Sungai Pasar Baru dan Sungai Tanang (DAS Andok), Sungai Kendangan- Sibunian (DAS Rupit), Sungai Batang Gadis dan Sungai Batang Sikakeh (DAS Sikakeh).

## **3. Bencana Longsor (Gerakan Tanah)**

Bencana longsor di Kota Padang Panjang cukup sering terjadi terutama pada saat musim hujan pada daerah dengan kemiringan > 40 persen. Kemudian berdasarkan data wilayah potensi gerakan tanah di Provinsi Sumatera Barat bulan Maret 2010 (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi), wilayah Kota Padang Panjang terbagi atas 2 potensi gerakan tanah yaitu potensi menengah – tinggi di Kecamatan Padang Panjang Barat dan potensi menengah di Kecamatan Padang Panjang Timur. Daerah yang mempunyai potensi Menengah untuk terjadi Gerakan Tanah akan mengalami pergerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan. Daerah yang mempunyai potensi Tinggi untuk terjadi Gerakan Tanah, akan mengalami pergerakan Tanah jika curah hujan di atas normal, sedangkan gerakan tanah lama dapat aktif kembali.

### **I. Potensi Pengembangan Wilayah**

Potensi pengembangan wilayah Kota Padang Panjang dibuat berdasarkan hasil analisa daya dukung fisik Kota Padang Panjang. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang, terdapat beberapa potensi pengembangan wilayah dalam rangka meningkatkan pelayanan, antara lain:

1) Pusat pelayanan kota meliputi:

- Kawasan Pasar Pusat Kota Padang Panjang yang berlokasi di sebagian Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Usang dan Kelurahan Balai-Balai, dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa; dan
- Kawasan Kantor Walikota Padang Panjang yang berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kota.

2) Sub pusat pelayanan kota bertujuan untuk meningkatkan pelayanan internal yang tersebar di 5 (lima) lokasi, meliputi:

- Kawasan Bukit Surungan yang berlokasi di Kelurahan Bukit Surungan dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa serta simpul

transportasi berupa terminal;

- Kawasan Rumah Sakit Umum Daerah yang berlokasi di Kelurahan Ganting dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan kesehatan;
- Kawasan simpang objek wisata tematik yang berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah dengan fungsi utama sebagai pusat wisata serta perdagangan dan jasa;
- Kawasan GOR Bancah Laweh yang berlokasi di Kelurahan Koto Panjang dengan fungsi utama sebagai pusat olahraga dan wisata;
- Kawasan Simpang Gunung yang berlokasi di Kelurahan Ekor Lubuk dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan serta perdagangan dan jasa.

3) Pusat lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan lingkungan tersebar pada 8 (delapan) kelurahan, meliputi:

- Pusat lingkungan di Kelurahan Ganting;
- Pusat lingkungan di Kelurahan Sigando;
- Pusat lingkungan di Kelurahan Ekor Lubuk;
- Pusat lingkungan di Kelurahan Ngalau;
- Pusat lingkungan di Kelurahan Guguk Malintang;
- Pusat lingkungan di Kelurahan Koto Katik;
- Pusat lingkungan di Kelurahan Pasar Usang;
- Pusat lingkungan di Kelurahan Kampung Manggis.

Berdasarkan analisa RTRW Kota Padang Panjang, potensi pengembangan perkotaan di wilayah Kota Padang Panjang secara ideal tidak terlalu besar, hanya meliputi  $\pm$  31,09 persen dari luas wilayah Kota Padang Panjang (daya dukung tinggi dan sedang). Namun dengan adanya rekayasa teknologi bangunan dan infrastruktur, maka masalah keterbatasan daya dukung fisik ini bisa diatasi, sehingga potensi pengembangan perkotaan Kota Padang Panjang cukup besar.

## **J. Demografi**

Aspek demografi merupakan aspek yang penting dalam perencanaan pembangunan, karena demografi menggambarkan komposisi dan distribusi penduduk, yang akan mempengaruhi segala aspek kehidupan baik kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat. Untuk itu, maka informasi tentang aspek demografi berperan penting dalam penentuan kebijakan.

Penduduk Kota Padang Panjang tahun 2022 tercatat sebanyak 57.850 jiwa yang terdiri dari 29.078 laki-laki dan 28.772 jiwa perempuan dengan rasio jenis kelamin 101,06. Rata-rata Laju pertumbuhan penduduk dalam lima tahun (2018-2022) sebesar 2,00 persen. Tingkat kepadatan penduduk Kota Padang Panjang tahun 2022 sebesar 2.515 orang per km<sup>2</sup>.

Jumlah penduduk Kota Padang Panjang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 2018 penduduk Kota Padang Panjang berjumlah 52.994 jiwa, kemudian bertambah menjadi 57.850 jiwa pada tahun 2022. Sedangkan jika dilihat

dari kepadatan penduduk dapat dijelaskan bahwa kepadatan penduduk Kota Padang Panjang tahun 2022 adalah 2.515 jiwa/km<sup>2</sup> dengan kecamatan yang paling padat adalah Padang Panjang Barat yakni sebesar 3.369 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan relatif tidak jauh berbeda dibandingkan dengan jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki. Hal ini ditunjukkan oleh hasil perbandingan jenis kelamin (*sex ratio*), yaitu sebesar 101,06 SR. Sehingga setiap 101 jiwa penduduk laki-laki berbanding lurus dengan 100 jiwa jumlah penduduk perempuan.

Jumlah penduduk per kecamatan dan perkembangan jumlah penduduk Kota Padang Panjang tahun 2018-2022 dapat dilihat tabel berikut.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Penduduk Per Kecamatan, Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Tahun 2022**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan				
1	Padang Panjang Barat	16.369	16.481	32.850	9,75	3.369	99,32
2	Padang Panjang Timur	12.709	12.291	25.000	13,25	1.887	103,40
<b>Jumlah Total</b>		<b>29.078</b>	<b>28.772</b>	<b>57.850</b>	<b>23,00</b>	<b>2.515</b>	<b>101,06</b>

Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2023

**Tabel. 2.4**  
**Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan (%)
2018	52.994	1,09
2019	53.693	1,32
2020	56.311	4,88
2021	56.971	1,17
2022	57.850	1,54
<b>Rata – rata</b>		<b>2,00</b>

Sumber: BPS Kota Padang Panjang, 2023

Perkembangan jumlah penduduk di Kota Padang Panjang disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yakni akibat pertumbuhan secara alami (fertilitas) dan adanya migrasi penduduk disekitar wilayah Kota Padang Panjang.

Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2022 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk merupakan penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) yaitu sebanyak 37.991 jiwa. Realita ini merupakan



bonus demografi dalam pembangunan, dimana Pemerintah Kota Padang panjang perlu melakukan peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia baik pendidikan, kesehatan sehingga dapat mewujudkan penduduk usia produktif yang benar-benar produktif serta memiliki kualitas yang unggul. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Komposisi Penduduk Kota Padang Panjang Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2022**

Kelompok Umur	Jenis kelamin		Jumlah	dependency ratio (%)	Ket.
	Laki-laki	Perempuan			
0 - 4	2.735	2.690	5.425	39,69	Penduduk Muda
5 - 9	2.445	2.255	4.700		
10 - 14	2.592	2.361	4.953		
15 - 19	2.495	2.284	4.779	-	Usia Produktif
20 - 24	2.501	2.437	4.938		
25 - 29	2.433	2.524	4.957		
30 - 34	2.307	2.243	4.550		
35 - 39	2.030	1.986	4.016		
40 - 44	1.968	1.814	3.782		
45 - 49	1.693	1.715	3.408		
50 - 54	1.533	1.544	3.077		
55 - 59	1.280	1.284	2.564		
60 - 64	941	979	1.920		
65 - 69	667	797	1.464		
70 - 74	316	484	800		
75 +	1.142	1.375	2.517		
<b>Jumlah</b>	<b>29.078</b>	<b>28.772</b>	<b>57.850</b>	<b>52,27</b>	

Sumber: BPS Kota Padang Panjang, 2023

Selanjutnya Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif adalah sebesar 52,27 persen. Artinya dalam setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 52 jiwa penduduk dengan usia non-produktif. Rasio sebesar 52,27 ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 39,69 persen dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 12,58 persen. Ini artinya penduduk Padang Panjang masih dibebani tanggungjawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggungjawab terhadap penduduk tua.

Jumlah ataupun persentase penduduk menurut kelompok pendidikan juga perlu dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun. Hal ini dibutuhkan untuk perencanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bila diperhatikan secara

cermat di Kota Padang Panjang, ternyata sekarang ini jumlah penduduk berdasarkan pada kelompok tingkat pendidikan didominasi oleh kelompok pendidikan tingkat SMA keatas. Kondisi yang demikian memberikan gambaran bahwa secara umum kinerja pengelolaan pendidikan di Kota Padang Panjang sudah bagus. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Kota Padang Panjang dapat dirinci pada Tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi**

Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1. Tidak Mempunyai Ijazah	4,17	3,17	3,67
2. SD/ sederajat	12,66	8,09	10,37
3. SLTP/ sederajat	19,63	16,28	17,95
4. SMA keatas	63,54	72,46	68,02

Sumber: BPS Kota Padang Panjang, 2023

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kota Padang Panjang berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMA keatas yaitu mencapai 68,02 persen, kemudian diikuti oleh SLTP/ sederajat sebesar 17,95 persen dan SD/ sederajat sebanyak 10,37 persen. Sedangkan sisanya adalah tidak mempunyai ijazah sebesar 3,67 persen.

### 2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana untuk menilai tingkat keberhasilan capaian tujuan pembangunan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat, yang merupakan capaian hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut digambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang selama tahun 2018-2022 yang meliputi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.

#### A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

##### 1) Pertumbuhan PDRB

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah untuk memacu percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai salah satu alat ukur untuk melihat perkembangan pembangunan ekonomi suatu daerah. Terjadinya peningkatan dan pemerataan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan kondisi ekonomi di suatu daerah dalam

suatu periode tertentu. Terdapat dua jenis penilaian PDRB, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas “harga konstan”. PDRB ADHB digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur perekonomian, sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

PDRB Kota Padang Panjang, baik PDRB-ADHB maupun PDRB-ADHK mengalami perkembangan yang fluktuatif selama periode 2018-2022. Pada tahun 2018, nilai PDRB-ADHB Kota Padang Panjang sebesar 3,20 triliun rupiah dan kemudian meningkat menjadi 4,09 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal ini berarti secara rata-rata pertumbuhan PDRB menurut harga berlaku selama periode 2018-2022 mencapai 6,64 persen per tahun. Selama periode 2018-2022 ternyata laju pertumbuhan ekonomi menurut harga berlaku yang tertinggi terjadi pada tahun 2022 dimana mencapai 11,93 persen. Relatif tingginya laju pertumbuhan ekonomi menurut harga berlaku pada tahun 2022 itu menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan sumber daya ekonomi di kota Padang Panjang cukup bagus. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi yang terendah menurut ADHB terjadi pada tahun 2020, dimana turun sebesar 0,04 persen. Hal ini terjadi karena pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia.

Adapun perkembangan PDRB menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan tahun 2010 di Kota Padang Panjang selama periode 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel. 2.7**  
**Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018-2022**

Tahun	PDRB ADHK	
	Nilai (Rp.Juta)	Pertumbuhan (%)
2018	2.444.773,80	5,71
2019	2.580.605,64	5,56
2020	2.543.404,42	-1,44
2021	2.631.518,09	3,46
2022	2.747.106,89	4,39
	<b>Rata-rata</b>	<b>3,54</b>

*Sumber: BPS Kota Padang Panjang 2023, diolah*

Selanjutnya, bila dilihat perkembangan PDRB ADHK pada tahun 2018 mencapai 2,44 triliun rupiah, kemudian meningkat menjadi 2,75 triliun rupiah di tahun 2022. Hal ini berarti PDRB ADHK untuk Kota Padang Panjang selama periode 2018-2022 mengalami pertumbuhan secara rata-rata sebesar 3,54 persen per tahun. Kenyataan ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang secara rata-rata selama periode tersebut lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi nasional maupun laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Sebab selama periode tersebut laju pertumbuhan ekonomi nasional

maupun Sumatera Barat secara rata-rata hanya mencapai 3,42 persen dan 3,24 persen.

Untuk lebih jelasnya perkembangan PDRB ADHK Kota Padang Panjang selama periode 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.8**  
**Perkembangan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 (Rp. Juta)**

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	117.964,56	122.269,19	123.842,32	130.017,71	137.216,04
B. Pertambangan dan Penggalian	6.095,00	6.127,73	5.966,07	6.099,11	6.233,46
C. Industri Pengolahan	248.284,38	241.455,54	235.644,28	241.397,20	247.178,70
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1.583,88	1.621,24	1.510,37	1.554,77	1.601,17
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.189,36	6.476,61	6.564,68	6.855,54	7.146,31
F. Konstruksi	230.115,44	244.007,93	236.081,92	238.498,42	244.353,25
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	448.895,23	472.369,41	467.602,56	482.561,70	508.022,67
H. Transportasi dan Pergudangan	339.153,16	363.050,28	322.675,93	336.194,00	346.924,81
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55.740,97	59.772,28	52.578,26	56.459,69	62.368,42
J. Informasi dan Komunikasi	260.026,19	281.564,11	305.022,81	321.555,05	342.553,77
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	94.785,46	96.863,71	97.800,68	106.324,87	111.134,84
L. Real Estate	83.956,20	88.534,67	88.634,80	90.558,18	95.468,55
M,N Jasa Perusahaan	1.961,69	2.061,95	1.970,27	1.990,96	2.116,47
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	215.883,60	230.124,84	228.457,41	1.230.125,15	227.701,11
P. Jasa Pendidikan	199.496,37	218.108,93	230.999,86	234.487,96	246.707,85
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	33.390,34	35.557,72	38.096,20	40.084,82	41.860,11
R,S,T,U Jasa Lainnya	101.251,97	110.639,50	99.955,97	106.752,98	118.519,37
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>2.444.773,80</b>	<b>2.580.605,64</b>	<b>2.543.404,42</b>	<b>2.631.518,09</b>	<b>2.747.106,89</b>

Sumber: BPS Kota Padang Panjang 2023, diolah

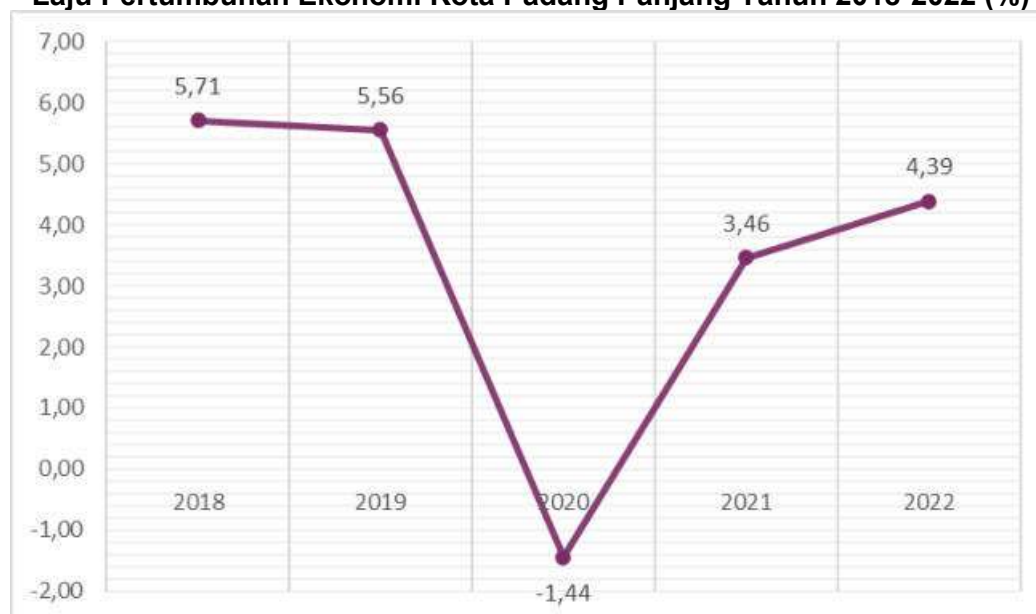
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi kenaikan PDRB menurut harga konstan yang terjadi pada tahun tahun 2022. Sektor yang memiliki kontribusi besar pada PDRB Kota Padang Panjang tahun 2022 yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai Rp.508,02 milyar kemudian sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp.346,92 milyar dan sektor Informasi dan Komunikasi dengan nilai Rp.342,55 milyar. Disamping ketiga sektor tersebut, sektor PDRB lain yang juga memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan PDRB Kota Padang Panjang tahun 2022 adalah sektor Industri Pengolahan dengan nilai Rp.247,19 milyar kemudian sektor Jasa Pendidikan dengan nilai sebesar Rp.246,71 milyar serta sektor Konstruksi dengan nilai sebesar Rp.244,35 milyar.

#### a) **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang selama periode 2018-2022 cenderung stabil, dimana pada tahun 2018 dan 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang berada pada posisi 5,71 persen dan 5,56 persen. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang mengalami pertumbuhan negatif atau terkontraksi sebesar -1,44 persen, yang disebabkan oleh menurunnya perekonomian dunia dan nasional yang sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 dan 2022 perekonomian Kota Padang Panjang mulai mengalami perbaikan secara bertahap, dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dan 2022 yang mencapai angka berturut-turut 3,46 persen dan 4,39 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.2**

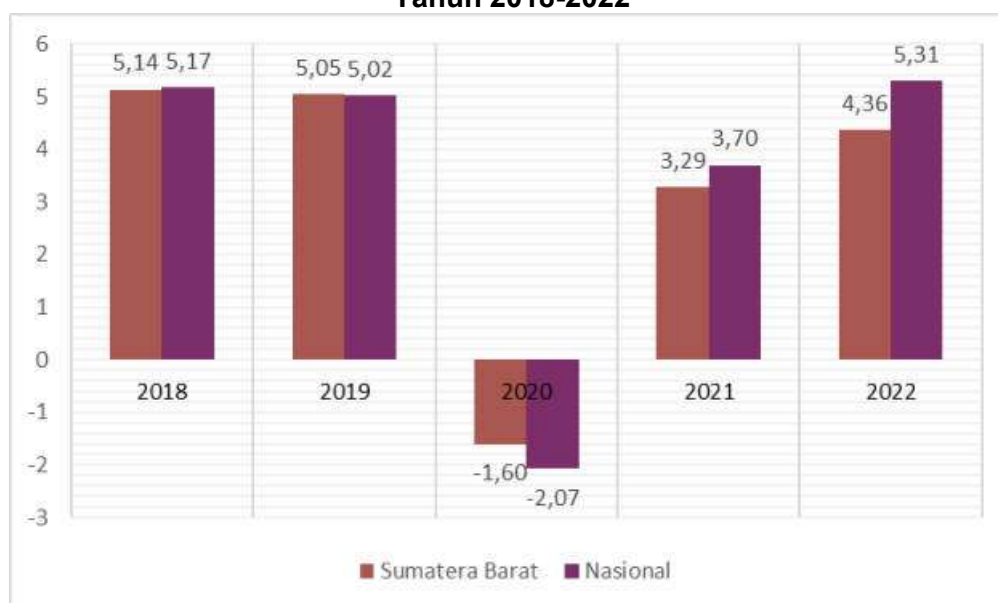
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 (%)**



Sumber: BPS Kota Padang Panjang 2023, diolah

Secara rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang selama periode 2018-2022 adalah sebesar 3,54 persen. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang lebih besar dari laju pertumbuhan rata-rata PDRB Provinsi Sumatera Barat maupun PDB Indonesia, dimana rata-rata laju pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat dan Indonesia selama periode 2018-2022 masing-masing hanya mencapai sebesar 3,24 persen dan 3,42 persen. Untuk lebih jelasnya mengenai pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dan Nasional selama periode 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar berikut.

**Gambar 2.3**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dan Nasional (%)**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber: BPS Kota Padang Panjang 2023, diolah

Selanjutnya bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, selama periode 2018-2022 terdapat beberapa lapangan usaha utama yang memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi, antara lain lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dengan pertumbuhan rata-rata 7,44 persen, sektor Jasa Pendidikan dengan pertumbuhan rata-rata 5,97 persen, dan sektor Jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan pertumbuhan sebesar 5,91 persen. Kenyataan ini menunjukkan bahwa beberapa sektor lapangan usaha tersebut memiliki potensi yang bagus untuk ditumbuh kembangkan pada masa yang akan datang. Disamping beberapa sektor PDRB seperti di atas, sektor PDRB lain yang juga memiliki potensi dan prospek yang cerah untuk dikembangkan dimasa mendatang adalah sektor Jasa Lainnya dengan pertumbuhan rata-rata 5,01 persen, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan rata-rata 4,07 persen serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,64 persen, seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.9**  
**Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kota Padang**  
**Panjang Tahun 2018-2022 (%)**

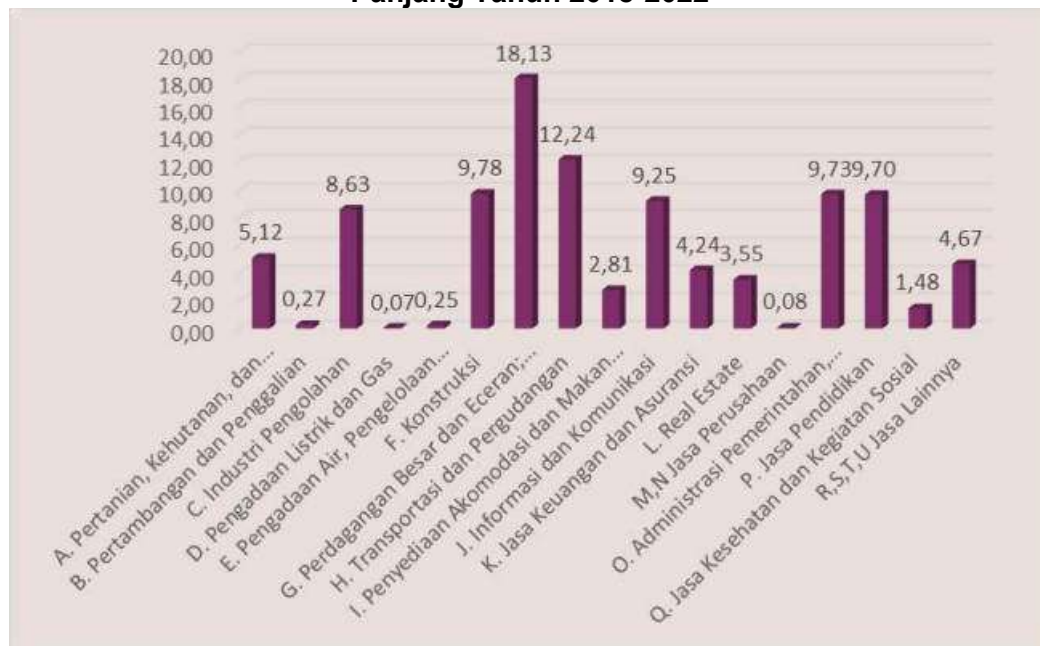
Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	Rerata
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,35	3,65	1,29	4,99	5,54	3,36
B. Pertambangan dan Penggalian	0,35	0,54	-2,64	2,23	2,20	0,54
C. Industri Pengolahan	1,63	-2,75	-2,41	2,44	2,40	0,26
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,16	2,36	-6,84	2,94	2,98	1,12
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,87	4,64	1,36	4,43	4,24	3,11
F. Konstruksi	6,93	6,04	-3,25	1,02	2,45	2,64
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,57	5,23	-1,01	3,20	5,28	3,65
H. Transportasi dan Pergudangan	6,99	7,05	-11,12	4,19	3,19	2,06
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,30	7,23	-12,04	7,38	10,47	4,07
J. Informasi dan Komunikasi	8,63	8,28	8,33	5,42	6,53	7,44
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,62	2,19	0,97	8,72	4,52	3,40
L. Real Estate	4,68	5,45	0,11	2,17	5,42	3,57
M,N Jasa Perusahaan	4,87	5,11	-4,45	1,05	6,30	2,58
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,41	6,60	-0,72	0,73	-1,05	2,39
P. Jasa Pendidikan	7,90	9,33	5,91	1,51	5,21	5,97
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,26	6,49	7,14	5,22	4,43	5,91
R,S,T,U Jasa Lainnya	7,60	9,27	-9,66	6,80	11,02	5,01
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>5,71</b>	<b>5,56</b>	<b>-1,44</b>	<b>3,46</b>	<b>4,39</b>	<b>3,54</b>

Sumber: BPS Kota Padang Panjang 2023, diolah

**b) Perkembangan Struktur Ekonomi**

Perkembangan struktur ekonomi Kota Padang Panjang selama periode 2018-2022 didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor Konstruksi. Kenyataan ini adalah wajar dan rasional sebab sebagai salah satu daerah perkotaan, maka ketiga sektor tersebut merupakan sektor yang selalu cepat perkembangannya dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Perkembangan beberapa sektor ekonomi yang cepat ini memberikan indikasi bahwa sektor ini merupakan sektor yang potensial untuk menjadi daya ungkit bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang dimasa mendatang. Adapun kontribusi masing-masing sektor dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.4**  
**Rerata Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB ADHB Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**



Sumber: BPS Kota Padang Panjang, 2023

Disamping ketiga sektor yang memberikan kontribusi yang paling besar tersebut terhadap PDRB, beberapa sektor lapangan usaha lainnya yang juga cukup tinggi kontribusinya adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan rerata sebesar 9,73 persen, sektor Jasa Pendidikan sebesar 9,70 persen, sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 9,25 persen serta sektor Industri Pengolahan sebesar 8,63 persen. Sedangkan beberapa sektor lainnya seperti sektor Real Estate, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman serta sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial kontribusi masing-masingnya lebih kecil dari 4 persen. Hal ini berarti untuk beberapa sektor yang kontribusinya tidak begitu besar tersebut tentu akan kurang menarik bagi para calon investor untuk berinvestasi di sektor lapangan usaha tersebut.

Sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki kontribusi yang rendah bersamaan dengan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, dimana masing-masingnya hanya memberikan kontribusi sebesar 0,27 persen dan 0,25 Persen. Sedangkan disisi lain, sektor Jasa Perusahaan serta sektor Pengadaan Listrik dan Gas disamping pertumbuhannya yang kurang stabil, kontribusinya terhadap PDRB juga sangat rendah sekali, dimana hanya mencapai 0,08 persen dan 0,07 persen saja. Adapun perkembangan kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.10**  
**Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB ADHB Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018-2022 (%)**

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,16	5,05	5,15	5,12	5,14
B. Pertambangan dan Penggalian	0,30	0,27	0,27	0,27	0,26
C. Industri Pengolahan	9,50	8,41	8,43	8,48	8,31
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
F. Konstruksi	9,98	9,95	9,83	9,62	9,51
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,59	18,43	17,96	17,51	18,14
H. Transportasi dan Pergudangan	12,79	12,86	11,77	11,82	11,94
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,87	2,95	2,64	2,75	2,82
J. Informasi dan Komunikasi	8,51	8,79	9,52	9,65	9,78
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,14	4,04	4,15	4,46	4,42
L. Real Estate	3,61	3,55	3,59	3,53	3,50
M,N Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,21	9,49	10,09	10,28	9,60
P. Jasa Pendidikan	9,04	9,55	10,14	9,89	9,89
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,34	1,39	1,54	1,59	1,55
R,S,T,U Jasa Lainnya	4,57	4,87	4,51	4,65	4,76
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kota Padang Panjang 2023, diolah

## 2) Laju Inflasi

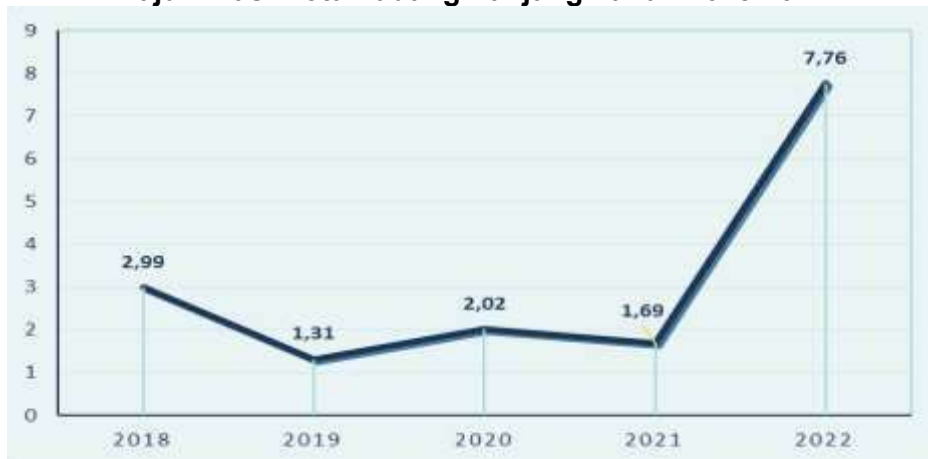
Inflasi merupakan satu kondisi dimana terjadi peningkatan harga barang-barang secara umum dan terus menerus dalam waktu tertentu sehingga menimbulkan penurunan nilai mata uang yang berlaku di masyarakat. dengan kata lain inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi adalah gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan, namun dapat dikendalikan, yang memberikan dampak positif dan negatif bagi suatu negara maupun rakyat yang dapat dilihat melalui beberapa aspek kehidupan masyarakat.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Perhitungan tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat dilakukan pada dua kota, yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi. inflasi Kota Padang Panjang mengacu ke inflasi Kota Bukittinggi.

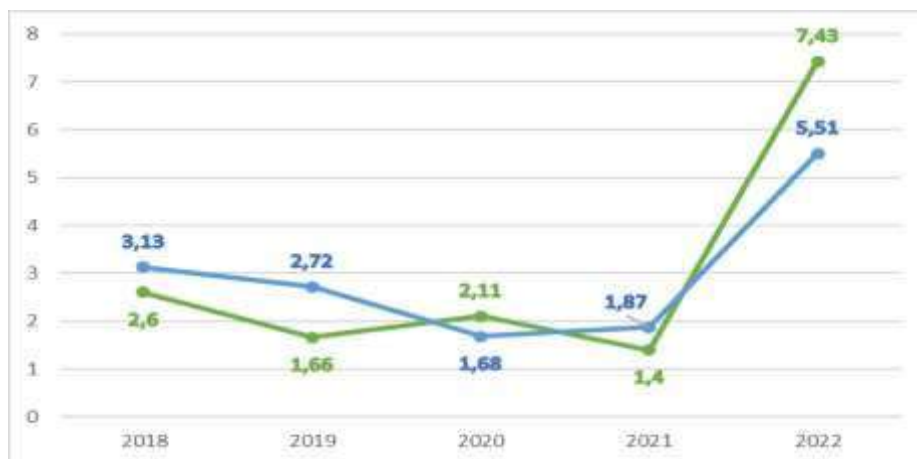
Inflasi yang terjadi di Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 2018-2022 cenderung berfluktuasi. Tahun 2018 inflasi Kota Padang Panjang berada di angka 2,99 persen dan turun menjadi angka 1,31 persen tahun 2019. Pada tahun 2020 inflasi di Kota Padang Panjang mengalami kenaikan pada angka 2,02 persen, sebagai akibat dari pandemi Covid-19, dan seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian, pada tahun 2021 inflasi di Kota Padang Panjang kembali turun menjadi 1,69. Pada tahun 2022 terjadi lonjakan inflasi yang mencapai angka 7,76 persen, lebih tinggi dari inflasi Provinsi Sumatera Barat yang mencapai angka 7,43 persen dan nasional pada angka 5,51 persen. Untuk lebih jelasnya, inflasi Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Gambar berikut.

**Gambar 2.5**  
**Laju Inflasi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2023, diolah

**Gambar 2.6**  
**Laju Inflasi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022 (%)**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2023, diolah

### 3) PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah, dimana PDRB per Kapita ini merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang menunjukkan nilai rata-rata pendapatan dari seluruh sektor produksi. PDRB per Kapita dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan nilai PDRB. PDRB per Kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Secara umum selama lima tahun terakhir yakni 2018-2022 PDRB per kapita Kota Padang Panjang mengalami peningkatan, dimana tahun 2018 PDRB perkapita Kota Padang Panjang adalah sebesar 60,35 juta rupiah yang kemudian meningkat menjadi 64,19 juta rupiah tahun 2019. Selanjutnya tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 61,92 juta rupiah. Pada Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 64,09 juta rupiah. Tahun 2022 meningkat hingga mencapai 70,64 juta rupiah. PDRB perkapita Kota Padang Panjang 2018-2022 dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.11**  
**Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Perkapita Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat Tahun 2018-2022 (Rp. Juta)**

Tahun	ADHB		ADHK	
	Padang Panjang	Sumatera Barat	Padang Panjang	Sumatera Barat
2018	60,35	42,80	46,13	30,47
2019	64,19	44,89	47,67	31,43
2020	61,92	43,83	45,34	30,70
2021	64,09	45,36	46,19	31,36
2022	70,64	50,59	47,49	32,38

Sumber: BPS Kota Padang Panjang 2023, diolah

### 4) Indeks Gini

Indeks Gini (Gini Ratio) merupakan indeks yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Secara umum angka GR berada pada kisaran nilai 0 (nol) hingga 1 (satu). GR bernilai 0 (nol) menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan GR bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan yang sempurna, artinya satu orang memiliki segalanya sementara lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan demikian GR diupayakan agar mendekati 0 (nol). Hal ini dilakukan untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Adapun klasifikasi ketimpangan pendapatan dibagi atas kategori rendah (<0,4), kategori sedang (0,4-0,5) dan kategori tinggi (>0,5).

Indeks Gini di Kota Padang Panjang selama periode 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 Indeks Gini Kota Padang Panjang tercatat sebesar

0,290, mengalami kenaikan menjadi 0,322 pada tahun 2019 kemudian tahun 2020 kembali naik menjadi 0,394, atau sebesar 22,36 persen. Kenaikan Indeks Gini ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Rentang waktu 2021 sampai dengan 2022, seiring dengan melandainya pandemi Covid-19, Indeks Gini Kota Padang Panjang pada tahun 2021 turun menjadi 0,306 dan terus membaik menjadi 0,296 di tahun 2022.

Secara umum kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pengeluaran penduduk di Kota Padang Panjang hampir sama dengan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat yang masih tergolong kategori “rendah”, dengan kata lain tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Kota Padang Panjang tidak terlalu besar. Jika dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2019 dan 2020 Indeks Gini Kota Padang Panjang lebih tinggi dari Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi pada tahun 2022 Indeks Gini Kota Padang Panjang lebih rendah dari Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,004 point. Capaian Indeks Gini Kota Padang Panjang pada tahun 2022 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indeks Gini Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Barat.

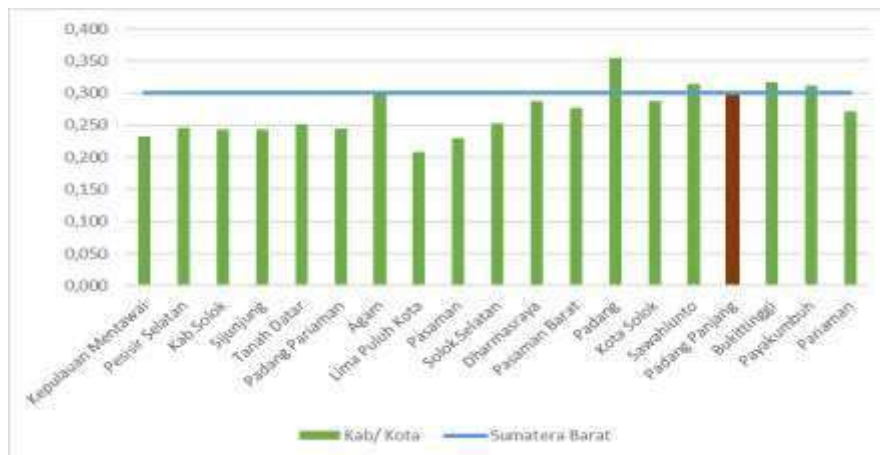
Adapun perbandingan Indeks Gini Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut.

**Gambar 2.7**  
**Indeks Gini Padang Panjang dan Sumatera Barat Tahun 2018-2022**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2023, diolah

**Gambar 2.8**  
**Indeks Gini Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2022**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2023, diolah

### 5) Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fokus permasalahan di Indonesia termasuk Kota Padang Panjang. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk dapat hidup secara layak di daerah tempat tinggalnya atau suatu rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan. Berkurangnya jumlah penduduk miskin pada suatu daerah mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang selama tahun 2018-2022 menunjukkan tren yang menurun walaupun pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 8,23 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020. Tahun 2018 persentase penduduk miskin di Kota Padang Panjang tercatat sebesar 5,88 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 sampai 2020 berturut-turut sebesar 5,60 dan 5,24, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 5,92 persen. Kenaikan ini terjadi akibat pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Lalu pada tahun 2022 turun lagi menjadi 5,14 persen.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, angka kemiskinan di Kota Padang Panjang masih tinggi dibanding dengan kabupaten/kota yang relatif memiliki karakter wilayah yang sama dengan Kota Padang Panjang, meskipun beberapa program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan seperti pemberian bantuan modal usaha berupa bantuan ternak, gerobak, peralatan industri, bedah warung; rehab rumah tidak layak huni, pemberian beasiswa bagi keluarga miskin, dan berbagai program lainnya, namun belum memberikan dampak yang cukup signifikan, sehingga untuk

kedepannya perlu dilakukan terobosan-terobosan yang lebih optimal dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Padang Panjang.

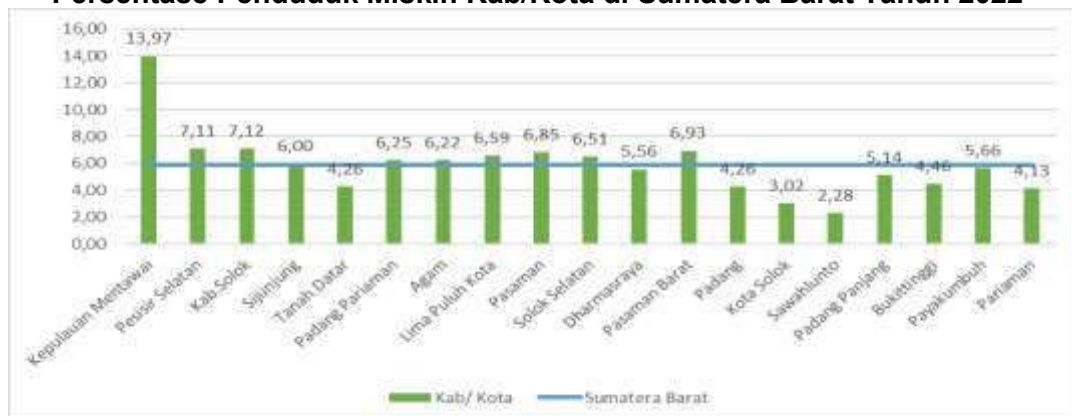
Persentase Penduduk Miskin Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumbar Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar-gambar berikut.

**Gambar 2.9**  
**Persentase Penduduk Miskin Padang Panjang dan Sumatera Barat Tahun 2018-2022**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2023, diolah

**Gambar 2.10**  
**Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2023, diolah

**a) Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)**

Tingkat Kedalaman Kemiskinan (Proverty Gap Index,P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Semakin besar nilai indeks, maka kedalaman kemiskinan semakin jauh, artinya jarak antara garis kemiskinan dengan pengeluaran penduduk miskin semakin besar. Berikut dapat dijelaskan indeks P1 Kota Padang Panjang.

**Gambar 2.11**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Padang Panjang 2018-2022**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2023, diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 2018-2022 cenderung menurun dari tahun ke tahun, walaupun pada tahun 2021 sempat terjadi kenaikan Tingkat Kedalaman Kemiskinan dari tahun 2020 sebesar 0,30 point, akan tetapi pada tahun 2022 Tingkat Kedalaman Kemiskinan di Kota Padang Panjang kembali mengalami penurunan menjadi 0,41 persen. Penurunan P1 ini mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan yang mengindikasikan berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan.

Jika dibandingkan dengan Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 yang berada pada angka 0,80 persen, Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Padang Panjang berada jauh dibawah Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat.

Pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Padang Panjang adalah sebesar 0,41. Jika dibandingkan dengan Sumatera Barat dengan Indeks P1 adalah 0,80, berarti penduduk miskin di Kota Padang Panjang secara rata-rata pengeluarannya cukup jauh dari garis kemiskinan.

#### **b) Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)**

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index,P2) menjelaskan penyebaran pengeluaran antara penduduk miskin. Tingkat Keparahan Kemiskinan ini merupakan nilai rata-rata jarak masing-masing pengeluaran penduduk miskin sesuai dengan bobot masing-masing pengeluaran penduduk miskin. Kriteria penilaiannya, semakin tinggi nilai indeks, maka ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin tinggi. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota

Padang Panjang dan Indeks P2 Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar berikut.

**Gambar 2.12**  
**Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2022, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 2018-2022 cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Tingkat Keparahan Kemiskinan pada tahun 2021 sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 0,08 point menjadi 0,16 karena menurunnya perekonomian masyarakat sebagai imbas dari pandemi Covid-19, dan kembali menurun sebesar 0,11 point menjadi 0,05 persen pada tahun 2022. Penurunan P2 ini menunjukkan berkurangnya ketimpangan kemiskinan, dengan arti penyebaran rata-rata pengeluaran diantara penduduk miskin sebesar 0,05 persen.

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Padang Panjang tahun 2022 sebesar 0,05. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, indeks keparahan kemiskinan dengan angka 0,16. Artinya gab pengeluaran antar penduduk miskin di Kota Padang Panjang jauh berbeda dengan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan kedua gambar di atas dapat dijelaskan bahwa secara umum penduduk miskin di Kota Padang Panjang memiliki jarak yang cukup jauh dengan garis kemiskinan, begitu juga dengan jarak pengeluaran antara sesama penduduk miskin pun juga dikategorikan sedang.

## **B. Fokus Kesejahteraan Sosial**

### **1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

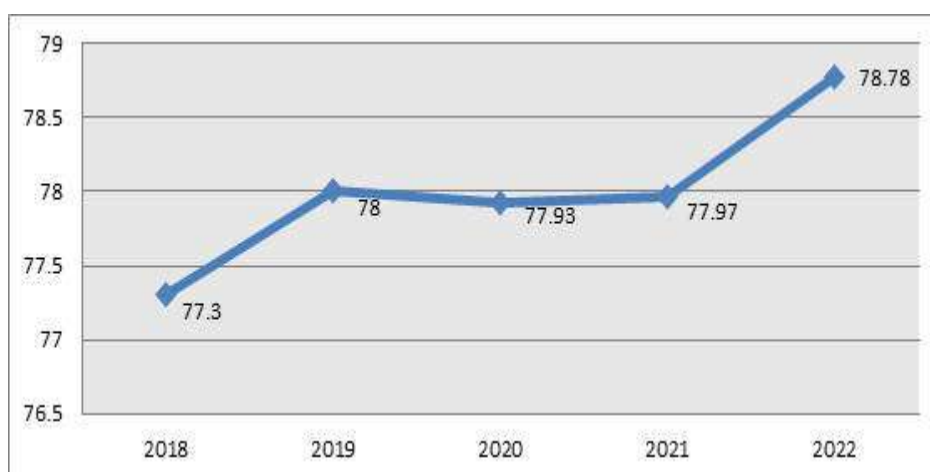
Keberhasilan pembangunan pada suatu daerah, tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga dari segi kualitas manusianya. Secara



umum, keberhasilan pembangunan kualitas manusia pada suatu daerah dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertumbuhan IPM Kota Padang Panjang pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,04 persen dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021.

Jika dibandingkan IPM Sumatera Barat yang mencapai 73,26, maka capaian IPM Kota Padang Panjang lebih tinggi 5,52 point dari IPM Provinsi Sumatera Barat. Ini menunjukkan bahwa pergerakan IPM Kota Padang Panjang melebihi kondisi rata-rata IPM Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat, dan menduduki peringkat kelima di Sumatera Barat. Perkembangan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padang Panjang kurun waktu 2018-2022 dapat dilihat:

**Gambar 2.13**  
**IPM Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**



Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2023

Dari gambar diatas, terlihat bahwa capaian IPM Kota Padang Panjang secara umum mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, walaupun pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 0,7 point dari capaian tahun 2019, pada tahun 2021 IPM Kota Padang Panjang kembali mengalami kenaikan sebesar 0,4 point dan tahun 2022 capaian IPM Kota Padang Panjang mengalami lonjakan kenaikan yang cukup signifikan yakni sebesar 5,52 point atau sebesar 1,04 persen dari capaian tahun 2021.

Pada dasarnya terdapat tiga dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak dan dimensi tersebut diwakili oleh empat indikator, yaitu Umur Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita.

**a) Dimensi Hidup Sehat dan Umur Panjang**

Dimensi hidup sehat dan umur panjang diwakili oleh indikator Umur

Harapan Hidup merupakan rata-rata perkiraan lamanya waktu (dalam tahun) yang dapat dijalani oleh seseorang selama hidupnya, yang menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir mempunyai harapan untuk dapat menjalani hidup yang lebih panjang.

Pada tahun 2022 Angka Harapan Hidup Kota Padang Panjang mencapai 73,02 tahun, naik sebesar 0,20 poin dari tahun 2021. Selama kurun waktu 2018-2022, perkembangan capaian Umur Harapan Hidup Kota Padang Panjang tumbuh secara konsisten dari tahun ke tahun, terlihat dari capaian tahun tahun 2018 sebesar 72,58 tahun, tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 72,77 tahun, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 capaian umur harapan hidup tetap pada angka 72,82 tahun, dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 73,02 tahun, dengan pertumbuhan tertinggi umur harapan hidup Kota Padang Panjang terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 0,27%.

**Gambar 2.14**  
**Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2023

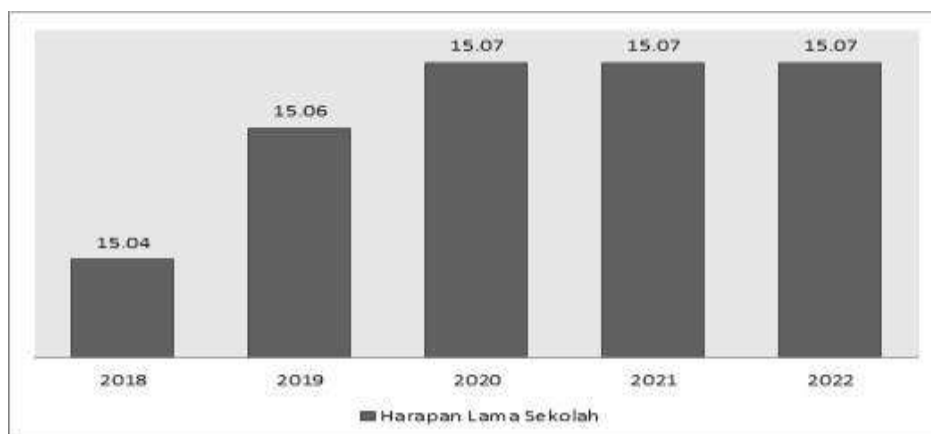
#### b) Dimensi Pengetahuan

Dalam menghitung dimensi pengetahuan diwakili oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah menggambarkan kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal, yaitu lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 tahun, yang dihitung berdasarkan penduduk usia 7 tahun keatas agar konsisten dengan referensi umur program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah.

HLS Kota Padang Panjang pada tahun 2022 mencapai 15,07 tahun, tidak berhasil mencapai target 15,08 tahun, dengan capaian kinerja sebesar 99,93 persen. Walaupun tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, capaian kinerja tahun 2022 ini jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023

telah mencapai 99,86 persen dari target 15,09 tahun, dan jika dibandingkan dengan capaian HLS Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar 14,10, maka capaian HLS Kota Padang Panjang lebih tinggi sebesar 0,97 point, dan menduduki peringkat kedua se-Provinsi Sumatera Barat dibawah Kota Padang. Perkembangan Angka HLS Kota Padang Panjang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.15**  
**Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2023

Perkembangan capaian Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang sepanjang tahun 2018-2022, cenderung stabil dan tidak mengalami pertumbuhan yang cukup berarti, dimana pergerakan pertumbuhan HLS Kota Padang Panjang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 0,13 persen pada tahun 2019, sedangkan dari tahun 2019 ke tahun 2020 perkembangan HLS sebesar 0,07 persen dan sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2021 perkembangan HLS Kota Padang Panjang sebesar 0 persen, dan naik sebesar 0,20 persen pada tahun 2022 menjadi 73,02 tahun.

Seperti halnya Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator dari dimensi pengetahuan yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rata-rata Lama Sekolah menggambarkan kualitas modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah, yaitu rata-rata lamanya waktu yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, dengan cakupan penduduk usia 25 tahun keatas, dengan asumsi bahwa proses pendidikan seseorang telah selesai sebelum berusia 25 tahun.

Adapun capaian kinerja indikator Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2022 adalah sebesar 11,92 tahun atau naik sebesar 2,49% dari capaian tahun 2021.

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 2018-2022 terus mengalami pertumbuhan yang positif setiap

tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahun sebesar 0,85 persen, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2022 sebesar 2,49 persen.

Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang Panjang ini jauh diatas capaian RLS Provinsi yang berada pada angka 9,18 tahun, dan merupakan capaian RLS yang tertinggi pada tahun 2022 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat.

Pertumbuhan Rata-rata lama Sekolah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar berikut:

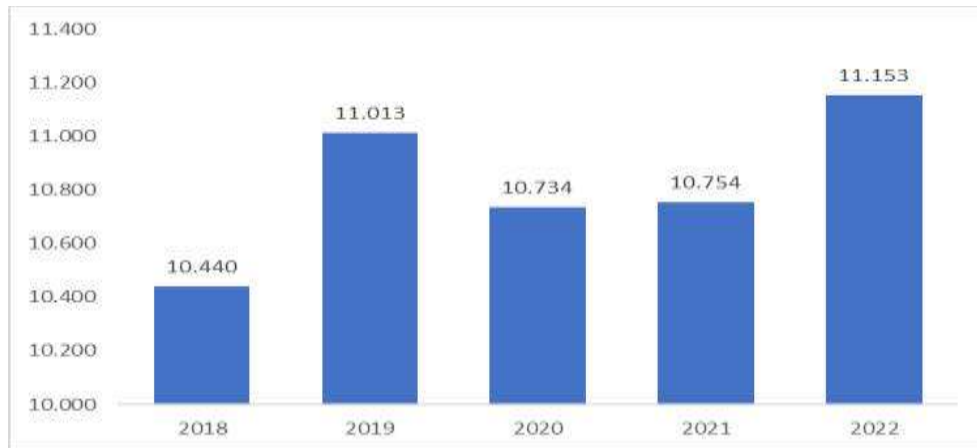


Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2023

**c) Dimensi Standar Hidup Layak**

Dimensi standar hidup layak diukur dengan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan. Pengeluaran per kapita di Kota Padang Panjang selama 2018-2022 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2018 Pengeluaran per kapita di Kota Padang Panjang sebesar Rp.10.440.000,- naik menjadi Rp.11.013.000,- pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi Rp.10.734.000,-. Tahun 2021 dan 2022 kembali mengalami kenaikan berturut-turut sebesar Rp.10.754.000,- dan Rp.11.153.000,-. Untuk lebih jelasnya pengeluaran per kapita Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar berikut.

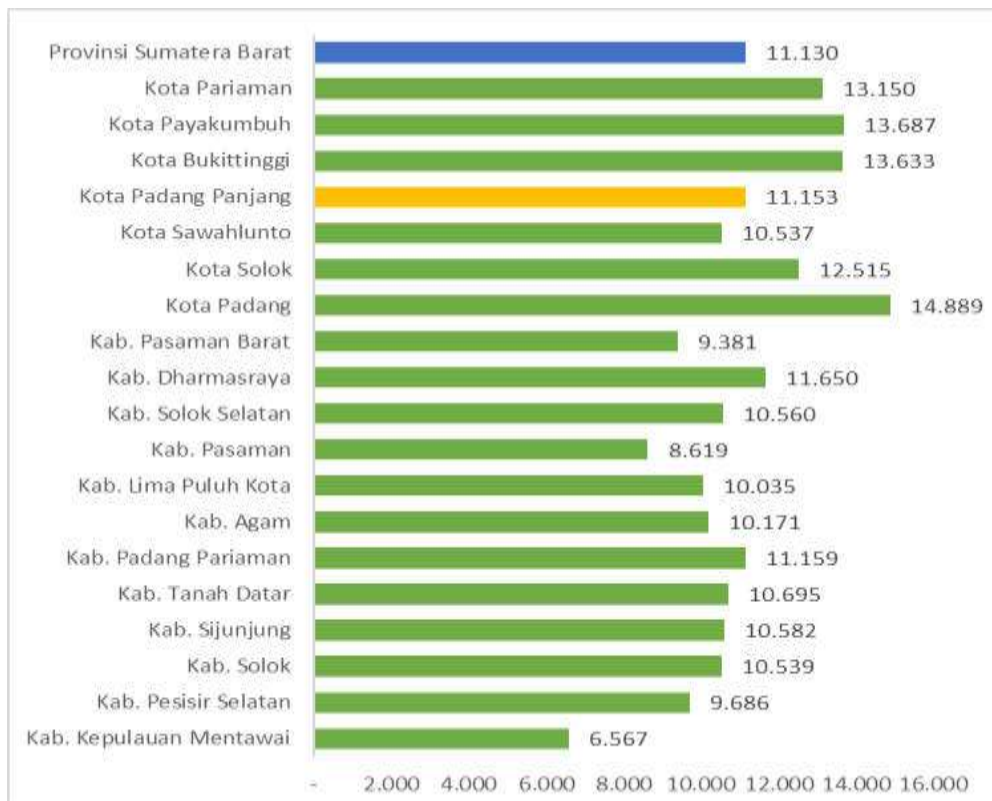
**Gambar 2.17**  
**Pengeluaran Per Kapita Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**  
**(Rp.Ribu/Org/Tahun)**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2023, diolah

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lain yang ada di Sumatera Barat, pengeluaran per kapita Kota Padang Panjang tahun 2022 masih tergolong rendah yakni urutan ke 8 dari 19 Kabupaten/ Kota sesuai dengan gambar berikut.

**Gambar 2.18**  
**Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2022**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2023, diolah

## 2) Kesempatan Kerja

### a) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kota Padang Panjang pada tahun 2022 berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dari 4,94 persen pada tahun 2021 menjadi 4,84 persen pada tahun 2022.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,38 persen, menurun secara signifikan sebesar 18,13 persen dibandingkan dengan Tingkat pengangguran Terbuka tahun 2018 yang berada pada angka 5,35 persen. Akibat pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Padang Panjang mengalami kenaikan yang cukup tinggi menjadi 7,22 persen atau sebesar 64,84 persen, dan seiring mulai melandainya pandemic COVID-19 pada tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Padang Panjang pun mengalami penurunan menjadi 4,9 persen atau sebesar 32,13 persen. Seiring dengan terjadinya pemulihan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Padang Panjang terus menurun dilihat dari capaian tahun 2022 sebesar 4,84 persen, menurun sebesar 1,22 persen dari capaian tahun 2021.

Jika dilihat dari capaian kinerja pada tahun 2022, capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah sebesar 6,80 persen, capaian kinerja ini sudah berhasil melebihi target sebesar 28,82 persen.

Capaian tingkat pengangguran Terbuka di kota Padang Panjang dapat dilihat pada Gambar berikut.

**Gambar 2.19**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

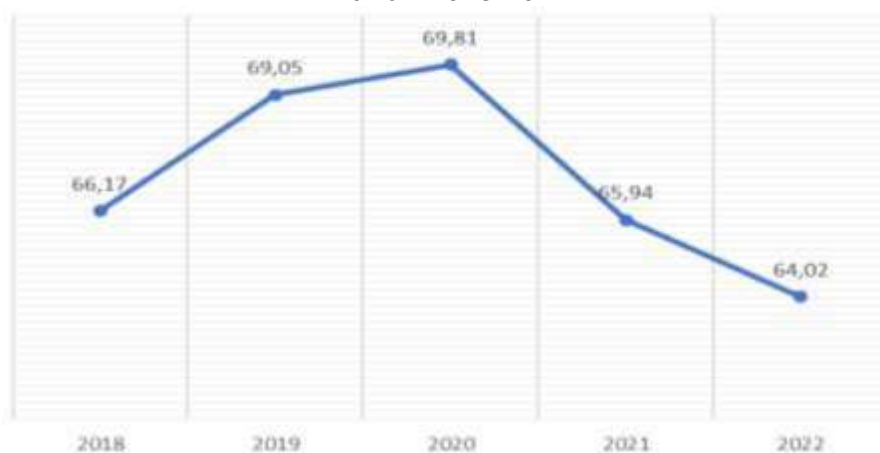


Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2023

## b) **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja digunakan untuk mengetahui persentase penduduk yang bekerja ataupun sedang mencari kerja. Pada tahun 2018, TPAK Kota Padang Panjang tercatat sebesar 66,17 persen kemudian pada tahun 2019 dan 2020 naik berturut-turut menjadi 69,05 dan 69,81. Akan tetapi, pada tahun 2021 dan 2022 TPAK Kota Padang Panjang mengalami penurunan berturut-turut menjadi 65,94 dan 64,02. Untuk lebih jelasnya tingkat partisipasi Angkatan kerja di Kota Padang Panjang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.20**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2023, diolah

### 2.1.3 **ASPEK PELAYANAN UMUM**

Aspek pelayanan umum merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kota Padang Panjang. Aspek ini terdiri atas pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi wewenang Perangkat Daerah terkait sesuai urusan yang diembannya.

#### **A. Fokus Layanan Urusan Wajib**

##### **1) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

###### **a) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di Kota Padang Panjang, pelayanan pendidikan diarahkan pada pemerataan kualitas Pendidikan

disemua jenjang. Hal tersebut dapat dilihat melalui indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja pelaksanaan pelayanan pendidikan seperti : Angka Partisipasi Sekolah (APS); Angka Partisipasi Murni (APM); Rata-rata Lama Sekolah (RLS); Angka Partisipasi Kasar (APK); Angka Putus Sekolah (APS); Kelulusan; Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/Madrasah; Persentase Guru yang Kompeten; Persentase Sekolah Terakreditasi A; Persentase Sekolah yang Memiliki Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Angka Partisipasi Sekolah menggambarkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah menggambarkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya Angka Partisipasi Sekolah pada setiap kelompok umur. Berikut digambarkan capaian kinerja pelayanan Pendidikan di Kota Padang Panjang kurun waktu 2018-2022.

#### **i. Capaian Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Usia dini merupakan usia emas tumbuh kembang anak, dan investasi pada usia ini merupakan investasi yang paling tinggi memberikan *rate of return* dibandingkan dengan investasi diseluruh periode siklus hidup lainnya. Oleh sebab itu maka Pendidikan Anak Usia Dini ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal dan non formal.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini bahwa Satuan PAUD dikategorikan pada jalur pendidikan formal yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK) target usia 4-6 tahun, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) target usia 4-6 tahun dengan prioritas 5-6 tahun; dan jalur pendidikan non formal yang meliputi Kelompok Bermain (KB) target usia 2-6 tahun dengan prioritas usia 3-4 tahun, Taman Penitipan Anak (TPA) target usia sejak lahir - 6 tahun dengan prioritas usia sejak lahir – 4 tahun, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) yang merupakan pendidikan non formal mandiri terintegrasi dengan layanan kesehatan, gizi, keagamaan dan atau kesejahteraan sosial menargetkan usia sejak lahir - 6 tahun.

Perkembangan PAUD Formal (TK dan RA) di Kota Padang Panjang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.12**  
**Perkembangan PAUD Formal (TK dan RA), Jumlah Lembaga, Murid, Guru**  
**Kota Padang panjang Tahun 2018-2022**

Perkembangan Data TK/RA		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah TK/RA	23	23	22	22	22
2	Jumlah Guru	162	145	107	111	145
3	Jumlah Murid	1394	1377	1030	1030	1380
4	Jumlah Rombel	85	89	71	71	95
5	Rasio Guru dan Murid	8,6	9,5	9,6	9,3	9,5

Sumber : Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Padang Panjang, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terjadi penurunan jumlah murid PAUD dari tahun 2019 sampai dengan 2021, hal ini merupakan dampak dari Pandemi Covid 19. Namun seiring dengan berakhirnya pandemi dimana pergerakan masyarakat mulai berangsur normal, sehingga pada tahun 2022 kembali jumlah murid PAU mengalami kenaikan sesuai dengan kondisi sebelum terjadi pandemic Covid-19. Begitu juga dengan jumlah guru dan rombel berbanding lurus dengan jumlah murid.

**ii. Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Angka Partisipasi Kasar merupakan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok umur pada setiap jenjang pendidikan terhadap penduduk berdasarkan kelompok usia sekolah. APK merupakan indikator untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Selain itu APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan tidak hanya pada daerah itu saja tetapi juga ada partisipasi daerah lain, dimana ada penduduknya yang sekolah pada daerah tersebut. Secara umum APK Kota Padang Panjang berada pada angka di atas 100 persen, hal ini terjadi dikarenakan banyaknya penduduk usia sekolah berasal dari Kabupaten/Kota lain dan banyaknya anak sekolah yang bersekolah pada masing-masing jenjang pendidikan (SD/SMP) yang umurnya diluar tingkatan usia jenjang pendidikan tersebut, sedangkan APK PAUD paling tinggi terjadi pada tahun 2019 dan terendah pada tahun 2021 disebabkan oleh perubahan data dapodik.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Padang Panjang untuk penduduk usia 5-6 tahun tercatat 98,0 persen pada tahun 2021 yang cukup meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, bahkan Padang Panjang menerima penghargaan kota dengan nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi ketiga se-Sumatera Barat tahun 2021. Disamping pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah juga harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. Masih perlu dilakukan peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan baik pada pendidikan PAUD, Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama. Berikut dijelaskan

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Padang Panjang tahun 2018-2022.

**Tabel 2.13**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

Angka Partisipasi Kasar (APK)	2018	2019	2020	2021	2022
PAUD	47,87%	47,20%	40,57%	45,00%	47,00%
SD/MI	106,91	111,02	106,65	108,25	106,51
SMP/MTs	103,56	119,67	107,15	102,22	82,02%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang, 2023

iii. **Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)**

Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah. Indikator ini juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja melalui tenaga kerja melalui kualifikasi pendidikan angkatan kerja tersebut. Berikut ditampilkan data pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk usia sekolah tahun 2020-2022.

**Tabel 2.14**  
**Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2022 (%)**

Jenjang pendidikan	2020		2021		2022	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
SD ke bawah	3.39	3.58	3.48	4.03	2.66	-
SLTP	5.46	4.92	5.97	6.31	4.90	-
SLTA	5.12	8.38	6.88	7.71	7.52	-
SMK	7.74	10.58	7.81	8.80	11.16	-
Diploma I/II/III	4.02	9.12	11.65	8.35	12.41	-
Universitas	8.11	11.50	11.42	8.09	8.43	-

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa lulusan Universitas masyarakat Kota Padang panjang masih tergolong rendah, sehingga implikasi kebijakan yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah adalah, perlunya mendorong masyarakat untuk mengikuti pendidikan sampai jenjang pendidikan sarjana atau pasca sarjana.

iv. **Angka Partisipasi Murni (APM)**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. APM Kota Padang Panjang cenderung

mengarah kepada angka menuju seratus persen. Secara umum APM pada setiap jenjang Pendidikan di Kota Padang Panjang sudah cukup tinggi, artinya kepedulian masyarakat untuk sekolah sesuai usia sekolah pada masing-masing jenjang sudah cukup tinggi. Untuk jelasnya perkembangan APM Kota Padang Panjang tahun 2018-2022 dapat digambarkan melalui gambar berikut ini.

**Tabel 2.15**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2018–2022 (%)**

Angka Partisipasi Murni	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI	95,3	96,19	96,68	99,6	106,51%
SMP/MTs	81,1	88,67	81,35	79,63	82,02%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang, 2023

**v. Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan layanan pendidikan yang berkualitas. APS didapatkan dari proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Pada tahun 2021, tingkat APS 7-12 tahun (SD/MI) mencapai 99,6, sedangkan APS 13-15 tahun (SMP/ MTs) mencapai 79,63, seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.16**  
**Angka Partisipasi Sekolah Kota Padang Panjang 2018-2022**

Angka Partisipasi Sekolah	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI	94,67	93,78	93,79	93,9	99,4
SMP/MTs	97,25	97,73	97,56	97,2	97,3

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang, 2023

**vi. Angka Putus Sekolah**

Angka Putus Sekolah menunjukkan jumlah dan persentase siswa setiap tingkatan pendidikan yang tidak menyelesaikan pendidikannya. Indikator angka putus sekolah menggambarkan seberapa besar angka putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Berikut adalah kondisi angka putus sekolah di Kota Padang Panjang tahun 2018-2022.

**Tabel 2.17**  
**Angka Putus Sekolah Pada Pendidikan Dasar dan Menengah**  
**Tahun 2018-2022**

Angka Putus Sekolah	2018	2019	2020	2021	2022
<b>SD/MI</b>					
Jumlah Murid	6527	6471	6383	6324	6119
Jumlah Murid Putus Sekolah	1	0	1	5	0
Persentase Putus Sekolah	0,02	0,00	0,02	0,08	0
<b>SMP/MTs</b>					
Jumlah Murid	3563	3563	3499	3437	3395
Jumlah Murid Putus Sekolah	0	1	3	1	0
Persentase Putus Sekolah	0,00	0,03	0,09	0,03	0

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang, 2023

**vii. Angka Kelulusan**

Angka kelulusan merupakan salah satu indikator pembangunan bidang pendidikan. Semakin tinggi angka kelulusan siswa pada masing-masing jenjang pendidikan, semakin baik kinerja capaian bidang pendidikan. Pada tahun 2021, angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs sudah 100 persen. Berikut ditampilkan perkembangan angka lulusan siswa pada jenjang Pendidikan Dasar dan menengah di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.

**Tabel 2.18**  
**Angka Lulusan Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah**  
**Tahun 2018-2022**

Angka Kelulusan Siswa	2018	2019	2020	2021	2022
<b>SD/MI</b>					
Peserta UN	1021	1097	1141	1121	-
Jumlah Lulusan (Orang)	1021	1097	1141	1121	1004
Persentase Lulusan	100	100	100	100	100
<b>SMP/MTs</b>					
Peserta UN	1134	1150	1173	1141	-
Jumlah Lulusan (Orang)	1134	1150	1173	1141	1125
Persentase Lulusan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang, 2023

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa semenjak tahun 2018 sampai dengan 2021 persentase kelulusan siswa AD dan SMP sudah mencapai 100 persen. Ini merupakan kondisi yang cukup baik.

viii. **Rasio Ketersediaan Sekolah**

Rasio ketersediaan sekolah digunakan untuk menunjukkan kemampuan satuan pendidikan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Berikut ditampilkan data rasio ketersediaan sekolah tahun 2018-2022.

**Tabel 2.19**  
**Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2018-2021**

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah	2018	2019	2020	2021	2022
<b>SD/MI</b>					
Jumlah Sekolah	38	38	38	39	39
Jumlah Penduduk Usia 7-12	7.215	6.817	6.947	6.932	6904
Rasio SD dengan Penduduk Usia 7-12	189,87	179,39	182,82	177,74	177,03
<b>SMP/MTs</b>					
Jumlah Sekolah	14	14	15	15	15
Jumlah Penduduk Usia 13-15	5.424	4.940	5.416	5.537	4.409
Rasio Sekolah dengan Penduduk Usia 13-15	387,43	352,86	361,07	369,13	293,63

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Tabel di atas dapat diartikan pada rentang tahun 2018-2022, setiap 10.000 jiwa penduduk pada kelompok usia 7-12 tahun telah tersedia sekolah SD/MI baik negeri maupun swasta sebanyak rentang 38-39 sekolah. Sedangkan untuk kelompok usia 13-15 tahun, setiap 10.000 jiwa penduduk dapat ditampung pada rentang 14-15 sekolah SMP/MTs baik negeri maupun swasta.

Selanjutnya terkait dengan perkembangan rombongan belajar (Rombel) dari tingkat TK sampai dengan SLTP sederajat dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.20**  
**Perkembangan Rombongan Belajar Di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

Perkembangan Data TK/RA	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Murid	1.122	1.126	1.030	1.030	1.030*
Jumlah Rombel	70	74	71	71	71*
<b>Perkembangan Data Kelompok Bermain (TK)</b>					
Jumlah Murid	748	773	807	722	722*
Jumlah Rombel	86	89	93	83	83*
<b>Perkembangan Data SD/MI</b>					

Perkembangan Data TK/RA	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Murid	6.527	6.471	6.383	6.324	6119
Jumlah Rombel	254	256	263	267	248
Perkembangan Data SMP/MTs					
Jumlah Murid	3563	3563	3499	3437	3395
Jumlah Rombel	137	135	133	127	134

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata rasio peserta didik/murid per rombongan belajar baik ditingkat Pendidikan TK, SD maupun SMP sudah mencapai standar nasional Pendidikan (SNP), dimana rata-rata rasio murid per rombongan belajar dari tahun 2018-2022 adalah 8,6 untuk tingkat TK, 24,68 untuk tingkat SD dan 26,22 untuk tingkat SMP. Diharapkan dengan rasio yang cukup baik tersebut akan memberikan dampak terhadap peningkatan nilai dan kualitas lulusan sekolah.

**ix. Rasio Guru terhadap Murid**

Rasio guru murid adalah perbandingan jumlah guru dibagi jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Jumlah peserta didik yang besar akan mempengaruhi kualitas pengajaran. Oleh karena itu, dengan berkurangnya rasio guru terhadap murid diharapkan dapat menghasilkan anak didik yang berkualitas.

**Tabel 2.21**  
**Rasio Guru dan Murid Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

Rasio Guru dan Murid	2018	2019	2020	2021	2022
<b>SD/MI</b>					
Jumlah Guru	379	379	337	342	336
Jumlah Murid	6527	6471	6383	6324	6119
Rasio Guru dan Murid	17,22	17,07	18,94	18,49	18,21
<b>SMP/MTs</b>					
Jumlah Guru	325	302	301	279	305
Jumlah Murid	3563	3563	3499	3437	3395
Rasio Guru dan Murid	10,96	11,80	11,62	12,32	11,13

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

**x. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**

Kualitas pendidikan akan sangat ditentukan oleh kualitas tenaga pengajarnya. Semakin tinggi pendidikan dan kualitas guru diharapkan dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

**Tabel 2.22**  
**Jumlah Guru Yang Berkualifikasi S1/D4 Menurut Jenjang Pendidikan**  
**Tahun 2018-2022**

Jumlah Guru yang Berkualifikasi S1/D4	2018	2019	2020	2021	2022
<b>SD/MI</b>					
Jumlah Guru Berkualifikasi	362	362	335	331	322
Jumlah Guru	379	379	337	342	336
<b>SMP/MTs</b>					
Jumlah Guru Berkualifikasi	307	288	292	274	274
Jumlah Guru	325	302	301	279	305

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang, 2023

Dari tabel diatas terlihat rata-rata guru yang mengajar di Kota Padang Panjang yang telah berkualifikasi S1/D4 telah melebihi 90 dari 100 guru yang mengajar, hanya tingkat TK/RA dan SLB yang jumlahnya dibawah 90 pada tahun 2021, hal ini disebabkan penambahan jumlah guru namun tidak dengan kualifikasi S.1/D.IV. Diharapkan kedepan untuk tenaga pengajar ini dapat sepenuhnya memenuhi kualifikasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Padang Panjang.

Selain tingkat pendidikan, untuk meningkatkan kualifikasi guru, pemerintah telah menetapkan standar tertentu bagi seorang guru yang dikenal dengan sertifikasi guru. Berikut perkembangan jumlah guru bersertifikasi di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.

**Tabel 2.23**  
**Jumlah Guru Bersertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2022**

Jumlah Guru yang Bersertifikasi	2018	2019	2020	2021	2022
<b>SD/MI</b>					
Jumlah Guru Bersertifikasi	220	186	180	172	205
Jumlah Guru	379	379	337	342	336
<b>SMP/MTs</b>					
Jumlah Guru Bersertifikasi	200	173	166	157	173
Jumlah Guru	325	302	301	279	305

sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang, 2023

Jika mengikuti standar sertifikasi guru yang ditetapkan pemerintah, maka dari tabel diatas diketahui bahwa lebih dari 50 persen jumlah guru yang telah bersertifikasi seperti misalnya pada tingkat SMP/ MTs dimana dari 300 guru yang ada, Sebagian besar guru yang tergolong guru sertifikasi, namun demikian, kualitas pendidikan tetap harus ditingkatkan terutama dengan adanya pengawas sekolah yang telah bersertifikasi.

**xi. Akreditasi Sekolah**

Akreditasi merupakan pengakuan terhadap Lembaga Pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa Lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu. Akreditasi sekolah bertujuan untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu serta menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan. Dengan demikian akreditasi sekolah menjadi acuan dalam meningkatkan mutu dan pengembangan sekolah. Upaya peningkatan akreditasi sekolah ini dilakukan melalui peningkatan capaian 8 (delapan) standar pendidikan, meliputi standarisasi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan serta standar penilaian. Berikut gambaran perkembangan akreditasi sekolah di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.

**Tabel 2.24**  
**Data Akreditasi Sekolah Dasar dan Menengah Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018-2022**

Data Akreditasi Sekolah	2018	2019	2020	2021	2022
<b>SD/MI</b>					
Berakreditasi A	31	31	31	31	30
Berakreditasi B	7	7	7	7	7
Berakreditasi C	0	0	0	0	0
Belum terakreditasi	0	0	0	0	1
<b>SMP/MTs</b>					
Berakreditasi A	6	6	6	6	7
Berakreditasi B	3	3	2	3	2
Berakreditasi C	4	5	4	5	4
Belum terakreditasi	1	0	0	0	2

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang, 2023

Pada tahun 2022, Sekolah Dasar yang sudah terakreditasi A mencapai 30 unit dan SMP baru 7 unit. Masih terdapat beberapa Sekolah Dasar yang berakreditasi B pada Tahun 2022, dan SMP/MTs masih ada 2 Unit yang berakreditasi B dan 4 unit yang berakreditasi C. Untuk itu maka masih perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sekolah agar dapat meningkatkan mutu sekolah dalam memberikan pelayanan Pendidikan kepada masyarakat.

**xii. Muatan Pendidikan Karakter**

Secara umum, pendidikan karakter pada kurikulum sekolah telah disusun, namun dari segi pandangan masyarakat masih relatif rendah, sehingga kesempatan ini digunakan oleh sekolah swasta untuk menambahkan muatan pendidikan karakter pada daftar kurikulum pendidikan mereka.



## **b) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**

Pembangunan Kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Padang Panjang. Derajat kesehatan masyarakat merupakan tolak ukur yang digunakan dalam pencapaian keberhasilan program kesehatan masyarakat dengan berbagai upaya yang berkesinambungan, terpadu dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang kesehatan. Cerminan derajat kesehatan suatu masyarakat adalah Umur Harapan Hidup (UHH), UHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

Derajat kesehatan masyarakat memberikan sumbangan yang nyata dalam peningkatan pembangunan kesehatan mencapai indikator Umur Harapan Hidup (UHH) yang lebih tinggi yang ditentukan oleh mortalitas (angka kematian) dan morbiditas (angka kesakitan). Capaian pembangunan Kesehatan di Kota Padang Panjang dapat dilihat dari capaian indikator-indikator berikut:

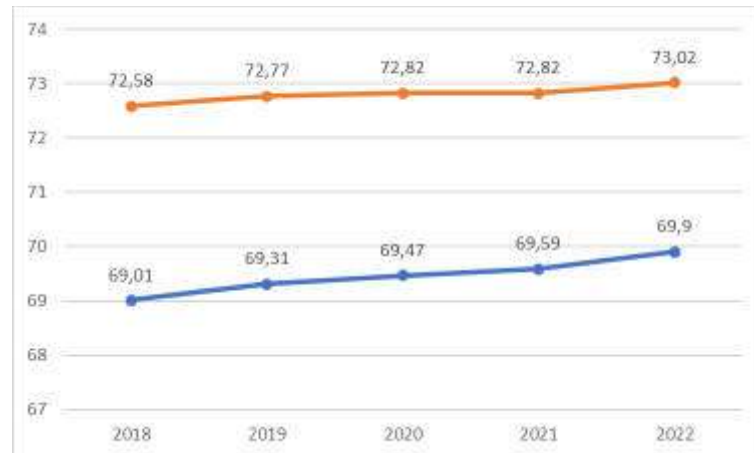
### **i. Umur Harapan Hidup (UHH)**

Umur Harapan hidup (UHH) merupakan indikator yang digunakan dalam mencapai tujuan meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat. Capaian kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tahun 2018-2022 diukur melalui angka usia harapan hidup. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terjadi peningkatan UHH Kota Padang Panjang. Jika dibandingkan dengan UHH pada Provinsi Sumatera Barat, maka UHH Kota Padang Panjang lebih tinggi, dimana pada tahun 2022 UHH kota Padang Panjang sebesar 73,02 tahun sedangkan Provinsi Sumatera Barat dengan 69,9 tahun.

Hal ini mencerminkan adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat di Kota Padang Panjang. Pencapaian indikator ini dapat diwujudkan dengan berbagai strategi dan pemanfaatan sumber daya dalam pengelolaan urusan kesehatan di Kota Padang Panjang. Pendekatan pemahaman terhadap 4 (empat) faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat menurut **Hendrik L. Bloom** yaitu mulai dari gaya hidup, keturunan, lingkungan serta sistem pelayanan kesehatan menjadi pemahaman awal agar dapat mengimplementasikannya dalam berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian UHH sebagai indikator derajat kesehatan masyarakat.

Disamping itu, dalam rangka pencapaian UHH, 4 (empat) faktor tersebut diatas diintegrasikan melalui pendekatan pemahaman terhadap indikator yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yaitu Angka Kematian (Mortalitas), Angka Kesakitan (Morbiditas) dan Status Gizi agar dapat mengimplementasikannya dalam berbagai program dan kegiatan sebagai upaya penurunan angka kematian dan angka kesakitan serta upaya meningkatkan status gizi masyarakat. Perkembangan UHH di Kota Padang Panjang selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.21**  
**Umur Harapan Hidup Kota Padang Panjang, 2018-2022**



Sumber : BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2023

**ii. Indeks Keluarga Sehat**

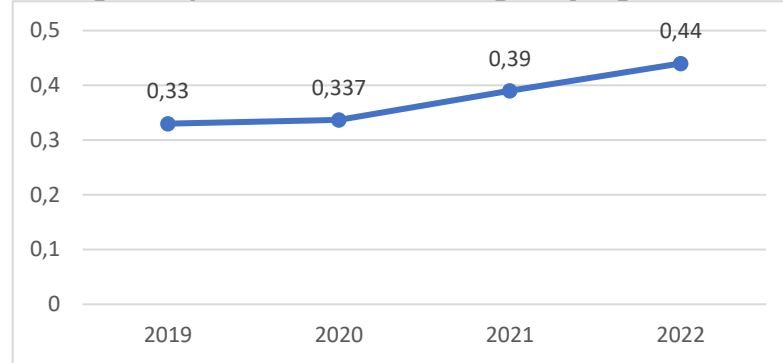
Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari agenda nawacita, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Program ini menjadikan puskesmas sebagai pelopor pelaksanaan dengan mengedepankan pendekatan keluarga. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan jangkauan, sasaran, dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) juga menekankan esensi fungsi puskesmas pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dalam upaya promotif dan preventif.

Indek Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan yang diambil dari rekapitulasi data dari 12 indikator Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Kategori IKS terdiri dari:

- a. Keluarga Sehat, bila IKS > 0,800;
- b. Keluarga Pra Sehat, bila IKS = 0,500 0,800;
- c. Keluarga Tidak Sehat, bila IKS < 0,500

Perkembangan capaian IKS Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 dapat digambarkan pada gambar berikut.

**Gambar 2.22**  
**Perkembangan Capaian IKS Kota Padang Panjang Tahun 2019-2022**



Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

**iii. Angka Kematian**

Angka mortalitas dapat dilihat dari Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Padang Panjang tidak dapat ditentukan. Menurut WHO Angka Kematian Ibu dihitung berdasarkan 100.000 kelahiran hidup. Di Kota Padang Panjang jumlah kelahiran hidup jauh dari 100.000 kelahiran hidup, yaitu masih berfluktuatif dibawah dan diatas 1000 kelahiran hidup. Untuk menentukan pencapaian Indikator ini menjadi sulit ditentukan, sehingga untuk menganalisisnya digunakan jumlah kasus kematian Ibu, bayi dan balita.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir masih terdapat kasus kematian bayi, balita dan ibu. Jumlah kasus kematian bayi pada tahun 2018 sebanyak 5 kasus, 2019 sebanyak 7 kasus, namun sejak tahun 2020 menurun sebanyak 2 kasus sampai dengan tahun 2021 dan 2022.

Kasus kematian balita relatif tidak banyak berfluktuatif, pada tahun 2018 nol kasus, tahun 2019 dan 2020 meningkat menjadi 2 kasus, tahun 2021 menurun sebanyak 1 kasus dan meningkat lagi pada tahun 2022 sebanyak 3 kasus. Kasus kematian ibu juga berfluktuatif dimana pada tahun 2018 dan 2019 dengan nol kasus dan meningkat lagi di tahun 2020 dan 2021 sebanyak 4 kasus dan dapat diturunkan pada tahun 2021 hanya dengan 1 kasus kematian ibu.

Untuk lebih jelasnya perkembangan kasus kematian bayi, balita, ibu dan jmlah bayi lahir selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.23**  
**Perkembangan Kasus Kematian Bayi, Balita, Ibu dan Jumlah Bayi Lahir**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

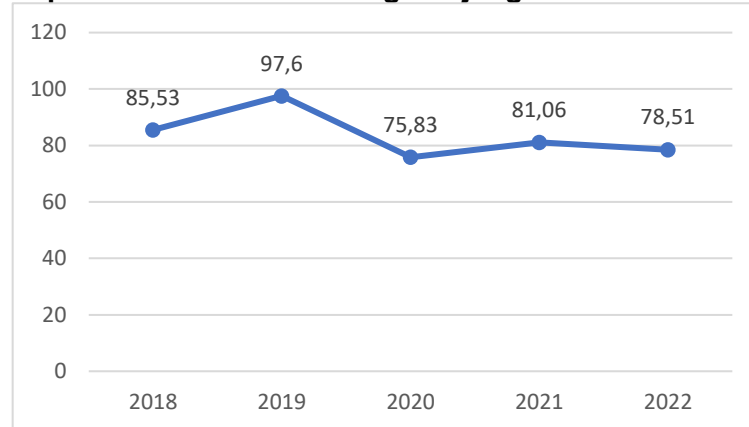
**iv. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)**

Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) adalah imunisasi yang diberikan kepada bayi usia nol sampai sebelas bulan yaitu HB0 1 dosis, BCG 1 dosis, DPT-HB-Hib 3 dosis, Polio tetes, (OPV) 4 dosis, Polio suntik (IPV) 1 dosis, Campak Rubela 1 dosis.

Capaian IDL di Kota Padang Panjang cenderung menurun dari tahun 2019 ke tahun 2022. Pada tahun 2019 capaian IDL adalah 97,60 persen menurun menjadi 78,51 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2020 adalah capaian terendah dalam kurun waktu 6 tahun. Hal ini terjadi karena kondisi Pandemi COVID-19 dimana terjadi pembatasan pergerakan masyarakat termasuk operasional posyandu yang tidak buka pada puncak terjadinya kasus dan adanya kekhawatiran masyarakat untuk mengunjungi Sarana Kesehatan.

Rendahnya cakupan imunisasi ini menyebabkan munculnya beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti campak, difteri dan polio. Faktor yang mempengaruhi rendahnya cakupan imunisasi mencakup sisi suplai maupun permintaan. Secara nasional Dari sisi suplai, hanya 70 persen dari rantai dingin (cold-chain) dalam kondisi yang sempurna, 18 persen cukup memadai dan 12 persen membutuhkan perbaikan. Dari sisi permintaan, ada penolakan terhadap imunisasi dengan berbagai alasan, termasuk di Kota Padang Panjang penolakan terhadap imunisasi menjadi penyebab masalah terbanyak. Untuk lebih jelasnya capaian IDL di Kota Padang Panjang selama tahun 2018-2022 dapat digambarkan pada gambar berikut.

**Gambar 2.24**  
**Capaian IDL di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

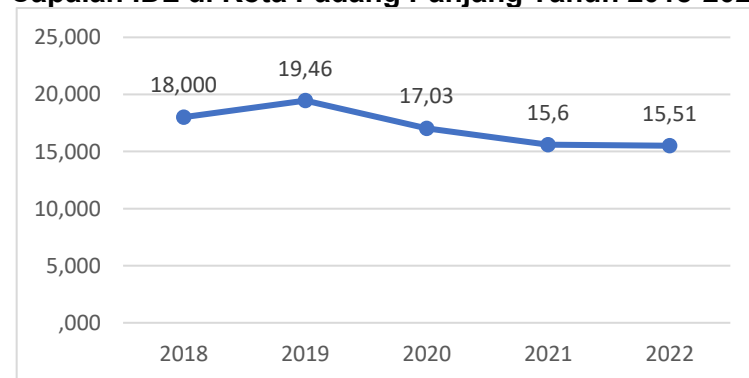


Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

**v. Prevalensi Stunting**

Gizi kurang masih menjadi permasalahan di Indonesia, termasuk di Kota Padang Panjang. Kelompok gizi kurang di antaranya adalah stunting. Peralensi stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Di Kota Padang Panjang persentase stunting dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun. Dimana terjadi penurunan balita stunting sampai tahun 2022 sampai dengan 15,51 persen. Meskipun pada tahun 2019 terjadi peningkatan dari 18,00 pada tahun 2018 menjadi 19,46 persen pada tahun 2019. Pencapaian ini dinilai realtif masih tinggi, karena masih berada diatas target yang ditetapkan Pemerintah yaitu sebesar 14 persen. Untuk lebih jelasnya perkembangan prevalensi stunting di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.25**  
**Capaian IDL di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

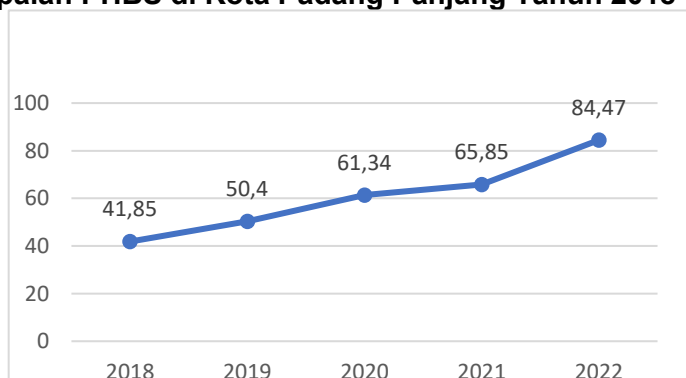
**vi. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**

PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri

pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Tujuan utama dari gerakan PHBS adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Manfaat PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan.

Persentase PHBS meningkat pada tahun 2019 (50,40 persen) dibanding pada tahun 2018 (41,85 persen), dan terus meningkat sampai dengan tahun 2022 yaitu sebesar 84,47 persen. Untuk lebih jelasnya perkembangan penerapan PHBS di Kota Padang Panjang selama tahun 2018-2022 dapat digambarkan pada gambar berikut.

**Gambar 2.26**  
**Capaian PHBS di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

#### vii. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Permendagri Nomor 19 tahun 2011 menyatakan bahwa posyandu adalah bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan untuk memberdayakan masyarakat dan memberi kemudahan pada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar/social dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak

Berdasarkan stratanya, posyandu dibagi menjadi 4 strata diawali dengan strata pratama, madya, purnama dan mandiri. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi penambahan jumlah posyandu dari 92 posyandu menjadi 94 posyandu pada tahun 2022, yang terdiri dari posyandu dengan strata purnama sebanyak 91 posyandu (96,8%) dan strata mandiri sebanyak 3 posyandu (3,2%). Seiring dengan pertumbuhan penduduk usia balita, maka rasio posyandu per 1000 balita adalah menurun sampai tahun 2022 yaitu 15,82 Posyandu, artinya setiap 1000 balita dilayani oleh 15,82 posyandu balita.

viii. **Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per-satuan Penduduk**

Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu persatuan penduduk adalah ketersediaan puskesmas, poliklinik dan pustu untuk setiap 1000 orang penduduk. Puskesmas, Poliklinik, Pustu menjadi gambaran Fasilitas Kesehatan yang ada pada suatu wilayah. Berikut adalah gambaran Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per-satuan Penduduk yaitu per 1000 penduduk di wilayah Kota Padang Panjang tahun 2018-2022.

**Tabel 2.24**  
**Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Puskesmas	4	4	4	4	4
Jumlah Poliklinik	4	4	4	4	4
Jumlah Pustu	6	6	6	6	6
Jumlah Penduduk	52.994	53.693	56.311	56.971	57.850
Rasio puskesmas, klinik, dan pustu persatuan penduduk (1000)	0,30	0,30	0,28	0,28	0,27

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2023

Berdasarkan tabel diatas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat bahwa jumlah puskesmas, poliklinik dan pustu sejak tahun 2018-2022 tidak ada penambahan yaitu sebanyak 14 unit. Puskemas sebanyak 4 (empat) unit, Poliklinik sebanyak 4 (empat) unit dan Pustu (Puskkesmas Pembantu) sebanyak 6 (enam) unit. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 1000 penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2018 adalah 0,30. Rasio ini dari tahun ketahun menurun sampai dengan tahun 2022 yaitu 0,27. Hal ini tentu karena jumlah penduduk yang terus bertambah tidak diikuti oleh penambahan puskesmas, poliklinik dan pustu sebagai fasilitas Kesehatan yang tersedia. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi fasilitas kesehatan agar dapat terus menjangkau pelayanan kepada masyarakat yang terus bertambah.

ix. **Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk**

Rasio rumah sakit per-satuan penduduk adalah ketersediaan rumah sakit setiap 1000 orang penduduk. Berikut adalah gambaran Rasio Rumah Sakit Per-satuan Penduduk yaitu per 1000 penduduk di wilayah Kota Padang Panjang tahun 2018-2022.

**Tabel 2.25**  
**Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018-2022**

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
RSUD Padang Panjang	1	1	1	1	1
RS Yarsi	1	1	1	1	1
Jumlah Penduduk	52.994	53.693	56.311	56.971	57.850
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk (1000)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk pada tahun 2018-2022 adalah cenderung tetap yaitu 0,04 dan sedikit menurun 0,03 pada akhir tahun 2022. Ini artinya pada tahun 2022 dalam 1000 penduduk Kota Padang Panjang tersedia 0,03 Rumah Sakit.

**x. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk**

Rasio tenaga medis per satuan penduduk adalah menunjukkan jumlah ketersediaan tenaga medis bagi setiap 1000 orang penduduk. Tenaga Medis yang dimaksud dalam data ini adalah tenaga Kesehatan yang terdiri dari Dokter, Perawat dan Bidan. Berikut adalah gambaran Rasio Tenaga Medis Per-satuan Penduduk di wilayah Kota Padang Panjang tahun 2022.

**Tabel 2.26**  
**Jumlah Tenaga Medis (Perawat, Bidan dan Tenaga Kefarmasian)**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
Dokter	63	1,2	76	1,4	92	1,6	101	1,8	109	1,9
Perawat	264	5,0	248	4,6	239	4,2	242	4,2	251	4,3
Bidan	64	1,2	74	1,4	76	1,3	73	1,3	82	1,4

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio Tenaga Medis (Dokter, Perawat dan Bidan) persatuan penduduk (1000)

**xi. Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**

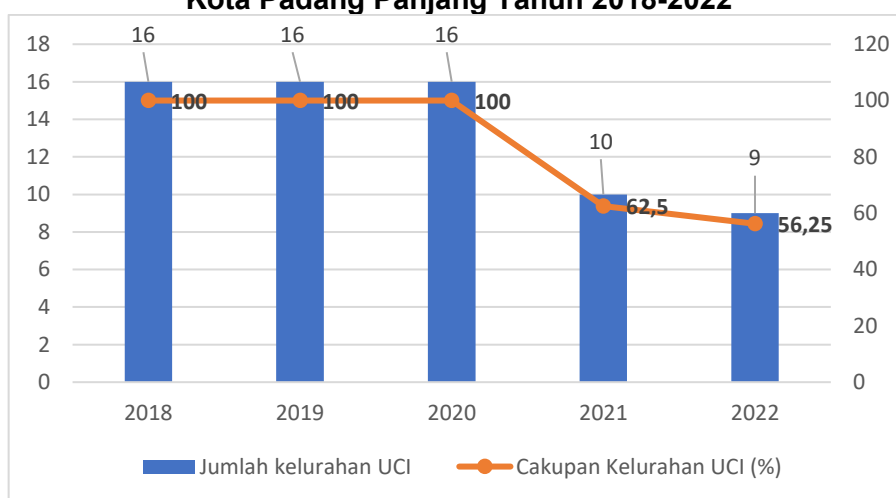
Kelurahan UCI adalah kelurahan dimana 80 persen dari jumlah bayi yang ada di kelurahan tersebut sudah mendapatkan Imunisas Dasar Lengkap dalam waktu satu tahun. Cakupan UCI merupakan salah satu capaian pelayanan kesehatan dasar. Pada tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan cakupan



Kelurahan UCI di Kota Padang Panjang. Capaian ini seiring dengan capaian IDL pada bayi dan balita yang juga menurun pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Hal ini terjadi dipengaruhi oleh status Pandemi Covid-19 dimana terjadi pembatasan pergerakan masyarakat termasuk operasional posyandu yang tidak buka pada puncak terjadinya kasus, adanya kekhawatiran masyarakat untuk mengunjungi Fasilitas Kesehatan dan semakin khawatirnya masyarakat dengan isu vaksin yang tidak halal.

Berikut adalah gambaran cakupan kelurahan UCI di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.

**Gambar 2.27**  
**Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2023

**xii. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan**

Balita Gizi Buruk adalah salah satu kategori status gizi pada balita. Gizi buruk adalah suatu keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus, disertai atau tidak edema pada kedua punggung kaki, berat badan menurut panjang badan atau berat badan dibanding tinggi badan kurang dari (-3) standar deviasi dan/atau lingkaran atas kurang dari 11,5 cm pada Anak usia 6-59 bulan (kemenkes RI).

Berikut adalah Persentase Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan difasilitas Kesehatan di wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.

**Tabel 2.27**  
**Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Balita Gizi buruk	N/A	13	5	7	9
Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	N/A	13	5	7	9

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	N/A	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang 2023

**xiii. Cakupan Kunjungan Bayi ke Posyandu**

Kunjungan Bayi balita ke Posyandu mengindikasikan tingkat partisipasi aktif masyarakat memanfaatkan Upaya Kesehatan yang Bersumber Daya Masyarakat. Semakin tinggi cakupan kunjungan posyandu, maka akan semakin banyak masyarakat terutama balita yang dipantau kesehatannya. Berikut adalah gambaran cakupan Kunjungan Bayi Balita ke Posyandu di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.

**Tabel 2.28**  
**Cakupan Kunjungan Bayi Ke Posyandu Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018-2022**

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Bayi Balita	N/A	5260	5244	5060	5042
Jumlah Posyandu	93	93	94	94	94
Jumlah Kunjungan Bayi Balita ke Posyandu	N/A	3439	2897	3210	3309
Cakupan Kunjungan bayi Balita	N/A	65,38	55,24	63,44	65,63

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan kunjungan bayi balita di Kota Padang Panjang berada dibawah 70 persen. Kunjungan terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 55,24 persen bayi dan balita. Hal ini terjadi karena kondisi Pandemi COVID-19 dimana terjadi pembatasan pergerakan masyarakat termasuk operasional posyandu yang tidak buka pada puncak terjadinya kasus, adanya kekhawatiran masyarakat untuk mengunjungi Sarana Kesehatan.

**xiv. Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu**

Cakupan puskesmas merupakan persentase jumlah puskesmas setiap jumlah seluruh kecamatan. Sejak tahun 2018-2022 jumlah puskesmas yang ada di Kota Padang Panjang adalah sebanyak 4 (empat) Puskesmas yang berada pada 2 (dua) Kecamatan. Masing-masing Kecamatan terdapat 2 puskesmas dengan cakupan mecapai 200 persen. Sedangkan cakupan puskesmas pembantu yang merupakan persentase jumlah puskesmas setiap jumlah seluruh kelurahan, dimana cakupan Puskesmas Pembantu diwilayah Kota Padang Panjang sejak tahun 2018-2022 adalah tetap yaitu 38 persen.

#### xv. Prevalensi Penyakit

Penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan penting. Dalam waktu yang bersamaan morbiditas dan mortalitas Penyakit Tidak Menular makin meningkat. Keadaan ini menjadi beban ganda dalam pelayanan kesehatan yang menjadi tantangan dalam pembangunan kesehatan Indonesia. Berikut adalah 10 penyakit terbanyak di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.

**Tabel 2.29**  
**10 Penyakit Terbanyak di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	Jenis Diagnosis Penyakit	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Commod Cold	9082 (1)	8976(1)	4270 (2)	3567 (2)	4540(2)
2	Hipertensi	5090 (2)	4942 (2)	4867(1)	5272(1)	4790(1)
3	ISPA	2590 (5)	2919 (4)	1022(10)	741(10)	2350(3)
4	Reumatik	1880 (9)	n/a	1313 (6)	1471 (5)	1355(7)
5	Gastritis	2289 (6)	2102 (8)	1402 (4)	1199 (7)	1288(8)
6	Kelainan Refraks	2830 (3)	2557(6)	1190 (8)	1011 (8)	-
7	Diabetes Melitus	2118 (8)	2697 (5)	2539(3)	2191 (3)	1869(5)
8	Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal	2227 (7)	2163 (7)	1376 (5)	1978 (4)	1736(6)
9	Pharingitis Akut	2615 (4)	3075(3)	1266 (7)	921 (9)	2098(4)
10	Penyakit Kulit Alergi	1849 (10)	2078 (9)	1087 (9)	1215 (6)	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 10 penyakit terbanyak terdiri dari Penyakit Menular (PM) dan Penyakit Tidak Menular (PTM). Penyakit Hipertensi sebagai PTM menjadi penyakit tertinggi pertama dan kedua dalam kurun waktu 6 tahun. Pada kurun 2 tahun terakhir yaitu tahun 2021 dan 2022 Diabetes mellitus yang merupakan salah satu PTM terjadi peningkatan kasus, berada pada penyakit tertinggi peringkat ke 3. Hal tersebut menguatkan bahwa adanya beban ganda penyakit, dimana disatu sisi Penyakit Menular belum bisa dikendalikan, namun disisi lain Penyakit Tidak Menular terus meningkat kasusnya secara regional maupun Global.

Penyakit Menular yang menjadi perhatian besar oleh Pemerintah adalah Penyakit TBC dan HIV karena angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi dibanding penyakit menular lainnya. Perhatian khusus juga ditujukan untuk penyakit-penyakit infeksi baru yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat seperti kondisi Pandemi Covid-19 yang telah di nyatakan oleh Pemerintah Indonesia sejak Maret 2020 yang lalu. Berikut adalah gambaran penyakit menular di Kota Padang Panjang tahun 2018-2022.

**Tabel 2.30**  
**Data Prevalensi HIV/ AIDS di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

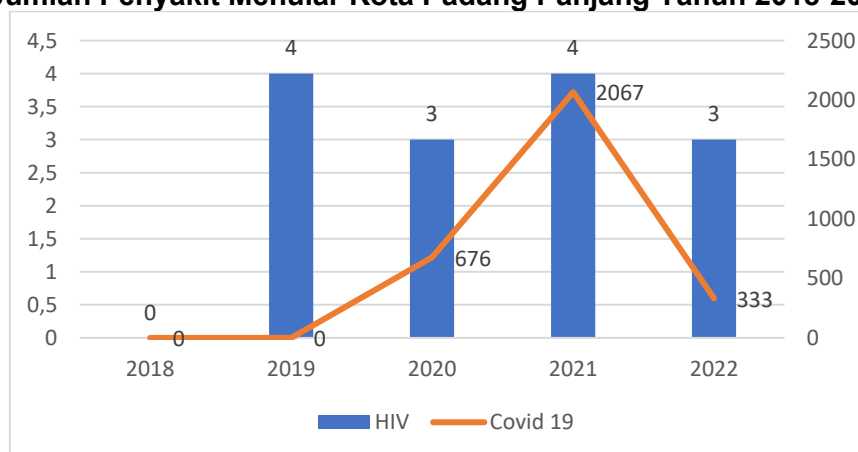
No	Permasalahan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penderita HIV/AIDS	0	4	3	4	1
2	Jumlah Penderita HIV/AIDS yang memeriksakan ke Faskes	0	4	3	4	1
3	Jumlah penduduk	52994	53693	56311	56971	59998
4	Prevalensi jumlahpenderita HIV/AIDS (x100%)	0,000	0,015	0,011	0,014	0,003

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang 2023

Penurunan prevalensi HIV/AIDS sebenarnya cukup baik dan diharapkan tidak adanya kasus HIV/AIDS di Kota Padang Panjang, namun penurunan ini terjadi karena rendahnya kemauan masyarakat untuk memeriksakan diri terkait penyakit HIV/AIDS ke fasilitas layanan kesehatan serta karena adanya pembatasan sosial dan pengalihan beberapa kegiatan untuk percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 yang menyebabkan tidak terjaringnya data kasus HIV/AIDS secara maksimal.

Berikut digambarkan perkembangan jumlah kasus penyakit menular di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.

**Gambar 2.28**  
**Jumlah Penyakit Menular Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

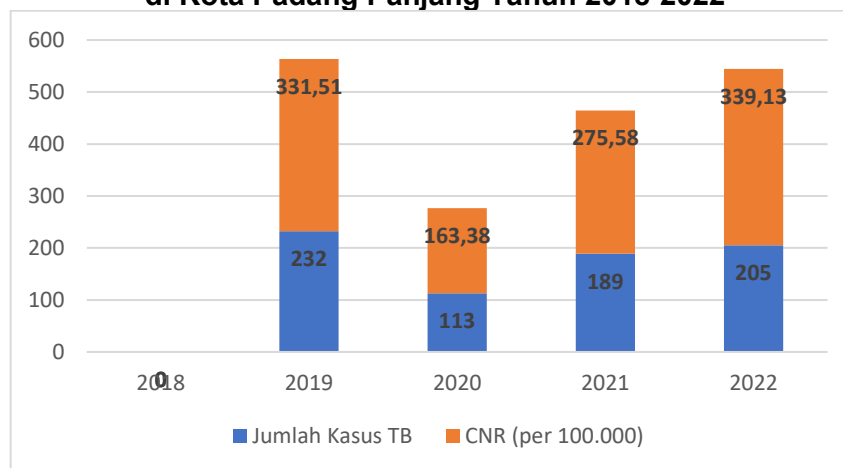


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2023

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa puncak kasus COVID-19 terjadi pada tahun 2021. Hal ini tidak saja terjadi di wilayah Kota Padang Panjang, namun peningkatan kasus pada tahun 2021 juga terjadi secara nasional bahkan tingkat global dunia. Pada tahun 2022 terjadi penurunan kasus yang sangat signifikan. Selain sudah mulainya masyarakat beradaptasi dengan kebiasaan baru masa pandemic Covid-19 dan peningkatan sumber daya kesehatan. Disamping itu, hal

yang paling berpengaruh adalah suksesnya program pemerintah dalam vaksinasi Covid-19 di wilayah Kota Padang Panjang bahkan secara nasional dengan terbentuknya Herd Imunity bagi masyarakat khususnya masyarakat Kota Padang Panjang.

**Gambar 2.29**  
**Case Notification Rate (CNR) Penyakit Tuberkulosis**  
**di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**



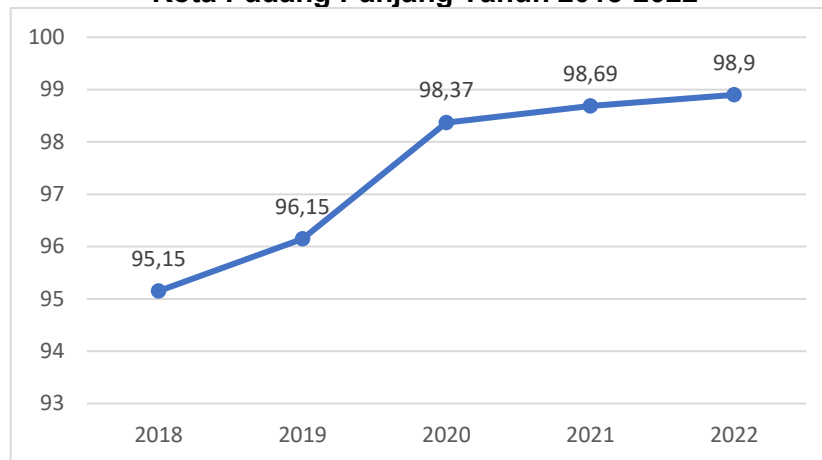
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang 2023

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa CNR Tuberkulosis sejak tahun 2018-2022 fluktuatif. Pada tahun 2020 CNR menurun sebesar 163,38. Hal ini disebabkan karena kondisi Pandemi COVID-19 membuat masyarakat takut memeriksakan diri ke fasilitas Kesehatan setiap adanya keluhan batuk, demam yang menyerupai gejala COVID-19. Namun pada tahun 2021 CNR naik Kembali sebesar 275,58 dan terus naik tahun 2022 sebesar 339,13. Kenaikan CNR ini mengindikasikan pengendalian penyakit Tuberkulosis kembali membaik dimana penemuan kasus tuberkulosis merupakan salah satu strategi dalam kegiatan penanggulangan tuberkulosis yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian dengan menemukan kasus sebanyak-banyaknya untuk mencegah penularan.

**xvi. Jaminan Kesehatan Nasional**

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC) adalah kombinasi antara kecukupan fasyankes dan cakupan kepesertaan JKN. Komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam mendaftarkan seluruh penduduknya ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berjalan dengan sangat baik, hal tersebut tergambar dengan cakupan kepesertaan JKN dari tahun 2018-2022, seperti gambar berikut.

**Gambar 2.30**  
**Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2023

Cakupan Kepesertaan JKN mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Peningkatan Cakupan Kepesertaan JKN di Kota Padang Panjang sebagai bentuk besarnya komitmen Pemerintah Daerah dalam menjaminkan pembiayaan kesehatan masyarakatnya. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan terus mengupayakan kesinambungan program pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat di kota Padang Panjang (JKMPP) yang sudah berjalan semenjak tahun 2017 sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Padang Panjang dan Peraturan Walikota Nomor 33 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Padang Panjang.

Keberadaan program JKMP ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang Panjang agar dapat menyelesaikan permasalahan kesehatannya melalui kemudahan pembiayaan dan akses pelayanan guna menjamin kecepatan dan ketepatan mendapatkan pelayanan kesehatan, tanpa memikirkan biaya lagi.

**c) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Capaian Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dijabarkan melalui beberapa capaian indikator sebagai berikut :

**i. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**

Secara umum tujuan pembangunan sanitasi adalah dalam rangka peningkatan akses sanitasi layak. Kegiatan ini merupakan salah satu prioritas

penanggulangan kawasan kumuh di Kota Padang Panjang. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/Kota dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota juga merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum yang harus dipenuhi. Jumlah rumah tinggal di Kota Padang Panjang yang memiliki akses sanitasi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, seiring dengan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.31**  
**Capaian Akses Sanitasi Rumah Tinggal di Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	8,427	7.553	9.287	9.896	10.296
2.	Jumlah Rumah Tinggal	11,094	15.499	10.739	11.262	11.562
3.	Persentase	75,96	48,73	86,47	87,87	89,05

Sumber : Dinas PUPR Kota Padang Panjang, 2023

Tahun 2021, dilaksanakan Pembangunan IPAL Komunal di 3 Kelurahan (Tanah Hitam, Sigando dan Ganting) dengan kapasitas minimal 50 KK per IPAL dan Penambahan Sambungan Rumah di Kelurahan Ekor Lubuk, sehingga terjadi peningkatan persentase rumah tinggal berakses sanitasi menjadi 86,47 persen. Pada tahun 2022 dilaksanakan penambahan SR masing-masing 50 unit di Kelurahan Ekor Lubuk dan Bukit Surungan, serta pembangunan IPAL Komunal di Kelurahan Sigando, Ganting, Koto Panjang, Tanah Hitam, Balai-Balai, dan Guguk Malintang dengan kapasitas masing-masing IPAL yaitu sebanyak 50 KK melalui dana DAK Tahun 2022 dan dana penunjang berasal dari APBD Kota Padang Panjang sehingga akses sanitasi layak meningkat menjadi 89,05 persen.

**ii. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang**

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Padang Panjang pada tahun 2022 mengalami penurunan dari 97,18 menjadi 96,83. Hal ini menunjukkan terjadinya pemanfaatan ruang diluar rencana yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2022. Luas wilayah Kota Padang Panjang yang kecil tidak sebanding dengan kebutuhan ruang untuk perumahan/permukiman yang cenderung meningkat. Disamping itu, tingginya harga tanah menyebabkan masyarakat Kota Padang Panjang cenderung membeli lahan untuk membangun rumah di kawasan yang tidak direkomendasikan untuk dijadikan sebagai kawasan terbangun. Kondisi pemanfaatan ruang Kota Padang Panjang tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.32**  
**Capaian Pemanfaatan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2028-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Luas pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (ha)	2.832,125	2.832,125	2.832,125	2.832,125	2.822,120
2.	Luas Pemanfaatan Ruang (ha)	2.914,216	2.914,216	2.914,216	2.914,216	2.914,216
3.	Persentase	97,18	97,18	97,18	97,18	96,83

Sumber: Dinas PUPR Kota Padang Panjang, 2023

**iii. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 /PRT/M/2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan, bahwa dalam rangka mengalirkan kelebihan air yang berasal dari air hujan agar tidak terjadi genangan yang berlebihan pada suatu kawasan tertentu serta seiring dengan pertumbuhan kota dan perkembangan industri, perlu dibuat suatu sistem pengeringan dan pengaliran air yang baik, yaitu melalui Sistem Drainase Perkotaan.

Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas Sistem Teknis dan Sistem Non Teknis. Sistem teknis drainase perkotaan merupakan jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya. Sedangkan Sistem non teknis drainase perkotaan merupakan dukungan terhadap sistem teknis drainase perkotaan terkait dengan pembiayaan, peran masyarakat, peraturan perundang-undangan, institusi, sosial ekonomi dan budaya, dan kesehatan lingkungan permukiman. Kondisi drainase Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.33**  
**Kondisi Drainase Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang Jalan Kota yang memiliki drainase skala kota (km)	81,233	83,121	84,066	85,010	85.510
2	Panjang Jalan Kota keseluruhan (km)	94,456	94,456	94,456	94,456	94,456
	Persentase	86	88	89	90	91

Sumber : Dinas PUPR Kota Padang Panjang, 2023

Berdasarkan tabel diatas panjang drainase perkotaan Kota Padang Panjang sudah mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Namun demikian pada



saat intensitas hujan sangat tinggi masih sering terjadi genangan di beberapa titik di Kota Padang Panjang walaupun dengan durasi yang kurang dari 1 jam. Hal ini disebabkan oleh tingginya *run off* akibat semakin banyaknya lingkungan terbangun dan terjadinya penyumbatan saluran di beberapa titik.

**iv. Jaringan Jalan dalam kondisi baik**

Jaringan jalan yang ada di Kota Padang Panjang adalah Jalan Kota sepanjang 94.465 km dan jalan Nasional sepanjang 11.829. Salah satu capaian kinerja Bina Marga pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah cakupan jalan dalam kondisi baik. Dari tabel dibawah ini terlihat bahwa rata-rata jalan Kota Padang dalam kondisi baik selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 terjadi refocusing anggaran untuk kegiatan-kegiatan fisik akibat pandemi Covid-19.

**Tabel 2.34**  
**Tabel Kondisi Jalan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	Kondisi Jalan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kondisi Baik	78.8	73.89	72.713	79.393	80.433
2	Kondisi Rusak Sedang	1.814	3.214	7.702	5.402	4.352
3	Kondisi Rusak/Rusak Berat	13.843	17.352	14.041	9.661	9.661
4	Panjang Jalan Kota	94.457	94.456	94.456	94.456	94.456
5	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)	106.286	106.285	106.285	106.285	106.285

Sumber: Dinas PUPR Kota Padang Panjang. 2023

**v. Panjang Jalan Kota yang memiliki trotoar**

Ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki yang telah disebut dalam Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ. Trotoar berfungsi membantu keselamatan jalan dengan meminimalkan interaksi antara pejalan kaki dan lalu lintas bermotor. Secara umum pertambahan panjang trotoar di Kota Padang Panjang tidak menunjukkan perubahan yang signifikan karena kegiatan yang dilaksanakan lebih dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas trotoar yang ada menjadi trotoar yang ramah disabilitas. Penambahan panjang jalan yang memiliki trotoar di tahun 2021 dan 2022 merupakan pembangunan trotoar ramah disabilitas di kawasan pasar pusat Kota Padang Panjang. Kondisi jalan Kota Padang Panjang yang telah memiliki trotoar disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.35**  
**Kondisi jalan Kota Padang Panjang yang Telah Memiliki Trotoar**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang jalan Kota yang memiliki trotoar (km)	26.59	26.59	26.59	27.59	28.09
2	Panjang jalan seluruhnya (km)	94.457	94.456	94.456	94.456	94.456
	<b>Persentase (%)</b>	28.15	28.15	28.15	29.21	29.74

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2023

**vi. Rasio Jaringan Irigasi Kota**

Rasio jaringan irigasi merupakan perbandingan antara luas lahan pertanian dengan panjang jaringan irigasi. Pada tahun 2021 terjadi penurunan jaringan irigasi dalam kondisi baik mengingat bahwa di tahun 2021 terjadi refocusing anggaran kegiatan fisik pasca pandemi Covid-19.

Tabel dibawah menunjukkan bahwa secara umum panjang dan jaringan irigasi Kota Padang Panjang cenderung tetap dari tahun ke tahun mengingat bahwa kegiatan terkait infrastruktur irigasi lebih diarahkan ke peningkatan kualitas jaringan irigasi yang sudah ada sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.36**  
**Kondisi jaringan irigasi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang jaringan irigasi (m')	96509,36	96809,36	97483.86	97483.86	97483.86
2	Luas lahan pertanian (ha)	488,5	488,5	382	382	382
	<b>Rasio</b>	0,005051685	0,00040446	0.0039	0.0039	0.0039

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2023

**vii. Akses Air Minum**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa yang termasuk dalam pelayanan dasar adalah pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Nilai SPM Air Minum ditetapkan berdasarkan persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum. Secara umum capaian penduduk Kota Padang Panjang yang dilayani air minum terus meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana disajikan

pada tabel berikut.

**Tabel 2.37**  
**Capaian Pelayanan Air Minum Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penduduk yang dilayani air minum	42.135	43.578	45.935	48.360	51.704
Jumlah penduduk	52.994	53.693	56.311	56.971	60.137
Persentase Pelayanan Air Minum	79.51%	81.16%	81.57%	84.89%	85,98%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2023

**viii. Rasio ketersediaan Ruang Terbuka Hijau**

Penyediaan ruang hijau kota berfungsi untuk memperbaiki kualitas udara, menjaga keberlanjutan ekosistem alami, menciptakan kenyamanan thermal, sekaligus meningkatkan daya dukung lahan, area mitigasi bencana, serta meningkatkan kualitas dan identitas suatu kawasan. Pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen melaksanakan upaya optimalisasi fungsi ruang hijau di Kota Padang Panjang. Secara umum tidak banyak terjadi penambahan ruang terbuka hijau di Kota Padang Panjang mengingat bahwa luas wilayah Kota Padang Panjang relatif kecil dan hampir 24 persen luas wilayah merupakan hutan lindung. Perubahan signifikan di tahun 2020 terjadi akibat perbedaan definisi perhitungan RTH, dimana sebelumnya dihitung berdasarkan luas wilayah administrasi, sedangkan sejak tahun 2020 dihitung berdasarkan luas area terbangun.

**Tabel 2.38**  
**Capaian Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Luas Ruang Terbuka Hijau (ha)	55.89	59.8	53.307306	62.128846	62.128846
Luas wilayah (ha)	2300	2300	1260.22	1260.22	1260.22
Rasio ruang terbuka hijau	2.43%	2.60%	4.23%	4.93%	4.93%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2023

**ix. Rasio bangunan ber-IMB**

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tanah dan bangunan pemilik properti. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) memungkinkan pemilik usaha untuk mengurus perizinan, seperti izin tempat usaha, izin lokasi, dan lain-lain. Rasio bangunan ber-IMB Kota Padang Panjang masih relatif kecil. Hal ini terjadi berdasarkan ketersediaan bukti fisik dokumen IMB yang masih tersedia di Dinas PUPR Kota

Padang Panjang. Perkembangan capaian bangunan ber-IMB Kota Padang Panjang dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2.39**  
**Perkembangan capaian bangunan ber-IMB Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018-2022**

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Bangunan ber-IMB	114	4043	4157	4228	4259
Jumlah Bangunan	149	9178	9362	9226	9257
Rasio bangunan ber-IMB	0.766	0.441	0.444	0.458	0.460

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

**d) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Capaian Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan perumahan dan Kawasan permukiman dapat dijabarkan melalui beberapa capaian indikator sebagai berikut :

**i. Rumah Layak Huni**

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni (penjelasan pasal 24 huruf a UU Perumahan dan Kawasan Permukiman). Capaian rumah layak huni Kota Padang Panjang meningkat dari tahun ke tahun dan sudah mencapai angka 96.63 persen di tahun 2022. Hal ini terjadi dengan adanya program rehab rumah tidak layak huni baik melalui dana APBD, APBD Provinsi dan APBN. Pada Tabel berikut dijelaskan perkembangan Rumah layak huni di Kota Padang Panjang tahun 2018-2022.

**Tabel 2.40**  
**Perkembangan Rumah Layak Huni Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Rumah	10470	10595	10693	10795	10909
2	Jumlah rumah tidak layak huni	720	610	410	356	368
3	Jumlah Rumah Layak Huni	9750	9985	10283	10439	10541
4	Rasio rumah layak huni terhadap total jumlah rumah	93.12%	94.24%	96.17%	96.70%	96.63%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2023

ii. **Luas Permukiman Kumuh**

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. (UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Kawasan Kumuh Kota Padang Panjang pertama kali ditetapkan melalui Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 050/357/Wako-PP/2014 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Padang Panjang dengan status kekumuhan mulai dari berat sampai ringan. Melalui kolaborasi pendanaan (ABPD dan APBN) dan kolaborasi aktor (Pemko, Pemprov, Program Kotaku, BKM), status kekumuhan ini bisa dituntaskan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 dilakukan identifikasi ulang terhadap kawasan kumuh yang tersisa dan terdata 47,718 Ha kawasan berada pada status kumuh ringan sesuai dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 189 Tahun 2020. Dari luasan kumuh 47,718 Ha ini pada tahun 2020 telah dilakukan pengurangan kumuh sebesar 5,5 persen sehingga luasan kumuh di tahun 2020 tinggal sebesar 45.09 Ha. Pada tahun 2021 terjadi pengurangan luasan kumuh sebesar 56,59 persen yang bersumber dari penuntasan kegiatan skala kawasan Kotaku (kawasan kumuh tepi air Kelurahan Bukit Surungan) dan penanganan kumuh melalui kegiatan Cash For Work untuk 5 kelurahan di Kota Padang Panjang. Kolaborasi penanganan kumuh ini terus berlanjut pada tahun 2022 sebesar 73,98 persen sehingga luasan kumuh Kota Padang Panjang tinggal 12.4171 Ha. Gambaran umum tentang kondisi dan pengelolaan kawasan kumuh Kota Padang Panjang 2018-2022 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.41**

**Perkembangan Luas Permukiman Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Luas Permukiman Kumuh berdasarkan SK Kumuh	52.1797	52.1797	47.7179	47.7179	47.7179
Luas Pengurangan Permukiman Kumuh	31.975	14.5658	2.623	24.4291	12.012
Capaian pengurangan permukiman kumuh	37.6139	52.1797	2.623	27.0521	35.3008
Sisa Luas Kawasan Kumuh	14.5658	0	45.0949	20.6658	12.4171
Persentase pengurangan kawasan kumuh	72.09%	100.00%	5.50%	56.69%	73.98%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2023

iii. **Ketersediaan Sarana Prasarana Umum Permukiman**

Sarana Prasarana Umum (PSU) kawasan permukiman terdiri dari jalan lingkungan, drainase lingkungan dan bangunan pengamanan permukiman. Kuantitas dan kualitas sarana prasarana umum di Kota Padang Panjang cenderung meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana digambarkan dalam Tabel berikut.

**Tabel 2.42**  
**Persentase Ketersediaan Prasarana Sarana Permukiman Umum**  
**Dalam Kondisi Baik Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase ketersediaan prasarana sarana permukiman umum dalam kondisi baik	78,99	83,61	83,61	83,61	84,51

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2023

e) **Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat**

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaannya melayani masyarakat melalui pembinaan wawasan kebangsaan, politik dan kerukunan beragama dan juga pengendalian ketertiban dan keamanan lingkungan. Capaian Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dapat dijabarkan melalui beberapa capaian indikator sebagai berikut:

i. **Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)**

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk mencerminkan kapasitas dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menjamin, memelihara, menjalankan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah. Semakin tinggi rasio jumlah Polisi Pamong Praja, semakin besar ketersediaannya dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penegakan Peraturan Daerah.

**Tabel 2.43**  
**Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Petugas Pol PP	116	128	131	131	130
Jumlah Petugas Satpol PP PNS	34	31	32	32	30
Jumlah Petugas Satpol PP Non PNS	82	97	99	99	100
Jumlah Penduduk	52.994	53.693	56.311	56.971	57.850
Rasio (:10000)	21,89	23,84	23,26	22,99	22,47

Sumber : Satpol Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tahun 2023

Perlindungan masyarakat adalah komponen khusus pertahanan keamanan negara yang mampu berfungsi untuk membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil resiko kerugian. Perlindungan masyarakat berfungsi menyelenggarakan pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat. Rasio Jumlah polisi Pamong praja Kota Padang Panjang pada tahun 2022 adalah 22,47. Cakupan petugas perlindungan masyarakat di Kota Padang Panjang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2.44**  
**Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018-2022**

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Linmas (orang)	270	354	246	307	305
Luas Wilayah (ha)	23 KM <sup>2</sup>	23 KM <sup>2</sup>	23 KM <sup>2</sup>	23 KM <sup>2</sup>	23 KM <sup>2</sup>
Jumlah RT	222	228	231	231	231
Persentase	122%	155%	106%	133%	132%

Sumber : Satpol Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tahun 2023

Pada Tabel diatas terlihat bahwa pada Tahun 2018 terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk cakupan petugas perlindungan masyarakat di Kota Padang Panjang, dan bertambah petugas perlindungan di tahun 2021 ini disebabkan karena adanya perekrutan linmas untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.

**ii. Cakupan ketentraman dan ketertiban Masyarakat**

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan untuk memastikan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat. Pos Kamling adalah salah satu penyelenggaraan keamanan masyarakat dengan pola peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kota Padang Panjang masih tinggi dan bervariasi tiap tahun dari tahun 2018-2022, total pelanggaran tiap tahunnya tahun 2018 sebanyak 84 kasus dan tahun 2022 menurun menjadi 238 kasus menurun dari tahun 2021. Dari kasus pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi tahun 2022 yang dapat tertangani seluruhnya (100 persen).

**Tabel 2.45**  
**Tingkat Pelanggaran Kota Padang Panjang dari Tahun 2018-2022**

No	KategoriKasus	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pelanggaran Perda Pekat	78	35	81	7	2

No	Kategori Kasus	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
2	Selain Pelanggaran Perda Pekat	3	99	62	139	118
3	Jumlah Pelanggaran	81	134	143	146	120
4	Jumlah Pelanggaran yang di Proses/ tertangani	84	233	205	285	238
5	Persentase Perda yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Satpol Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tahun 2023

Untuk kasus kebakaran, pada tahun 2022 terjadi sebanyak 21 kasus dan telah tertangani seluruhnya, dan kasus tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 63 kasus. Kebanyakan diakibatkan konsleting listrik, karena umumnya Instalasi listrik yang sudah lama. Berikut ditampilkan data kasus kebakaran kurun waktu 2018-2022.

**Tabel 2.46**  
**Tingkat Waktu Tanggap terhadap Bencana Wilayah**  
**Manajemen Kebakaran (MK) Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kasus kebakaran (kejadian)	63	31	41	15	21
2	Kebakaran yang tertangani dalam waktu 10 menit (kejadian)	63	31	41	15	21
3	Persentase kebakaran yang tertangani dalam waktu 10 menit (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tahun 2023

Disamping kasus kebakaran, di Padang Panjang juga terdapat kasus bencana alam, dimana pada tahun 2018-2022 terdiri dari 3 (tiga) jenis bencana yaitu : angin kencang, badai/puting beliung; banjir; dan longsor. Bencana alam tersebut trennya cenderung meningkat sampai tahun 2020 dan mengalami penurunan di tahun 2021 dan tahun 2022. Pada tahun 2021 terjadi 44 kejadian, tahun 2022 terjadi 30 kejadian, yaitu angin kencang, badai/puting beliung dan tidak ada terjadi banjir dan longsor. Berikut kondisi kasus bencana yang pernah terjadi dan capaian kinerja penanggulangan bencana di Kota Padang Panjang tahun 2018-2022.

**Tabel 2.47**  
**Bencana Alam di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Angin Kencang, Badai/Puting Beliung (Kejadian)	Kejadian	48	61	81	44	30



No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
2	Banjir (Kejadian)	Kejadian	10	18	17	10	4
3	Longsor (Kejadian)	Kejadian	19	17	16	14	1

Sumber : Satpol Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tahun 2023

**.Tabel 2.48**  
**Capaian kinerja Penanggulangan Bencana**  
**di Kota Padang Panjang tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	25%	30%	30%	30%	35%
2	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana rendah karena belum adanya kajian resiko bencana yang memuat peta daerah rawan bencana.

**f) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, program-program kesejahteraan sosial mencakup 4 (empat) kriteria: Rehabilitasi Sosial; Jaminan Sosial; Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial. Capaian kinerja urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.49**  
**Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Anak balita terlantar	Anak	0	1	0	0	0
2	Anak terlantar	Anak	26	19	16	16	13
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	Anak	0	6	7	2	1
4	Anak jalanan	Anak	0	0	0	0	0
5	Anak dengan disabilitas	Anak	79	51	85	91	97

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
6	Anak korban tindak kekerasan	Anak	0	0	0	0	0
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Anak	0	0	0	0	0
8	Lanjut usia terlantar	Orang	318	266	280	324	352
9	Penyandang disabilitas	Orang	255	211	254	259	310
10	Tuna Sosial	Orang	0	0	0	0	0
11	Gelandangan	Orang	1	0	1	1	0
12	Pengemis	Orang	5	3	3	2	2
13	Pemulung	Orang	5	1	4	5	8
14	Kelompok minoritas	Orang	0	0	0	0	0
15	Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP)	Orang	3	0	3	3	0
16	Orang dengan HIV/AIDS	Orang	0	0	0	0	0
17	Korban penyalahgunaan NAPZA	Orang	3	13	7	6	3
18	Korban Trafficking	Orang	0	0	0	0	0
19	Korban tindak kekerasan	Orang	0	0	0	0	0
20	Pekerja migran bermasalah sosial	Orang	0	0	0	0	0
21	Korban bencana alam	Orang	0	0	0	0	0
22	Korban bencana sosial	Orang	0	0	0	0	0
23	Perempuan rawan sosial ekonomi	Orang	279	259	272	256	278
24	Fakir miskin	KK	3414	2985	2907	3280	2219
25	Keluarga bermasalah sosial psikologi	KK	4	3	7	2	2
26	Komunitas adat terpencil	KK	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>			<b>4.392</b>	<b>3.818</b>	<b>3.846</b>	<b>11.171</b>	<b>3.285</b>

Sumber : Dinas Sosial PPKBP3A Kota Padang Panjang, Tahun 2023

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang baik melalui dana APBD, APBD Provinsi dan APBN untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Salah satu Program Nasional yang diberikan untuk menanggulangi kemiskinan yaitu pemberian beras miskin (Raskin) pada penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Meningkatnya fakir miskin di Kota Padang Panjang disebabkan oleh satuan pada aplikasi SIKS-NG pada tahun 2020 adalah RUTA (Rumah Tangga)

sedangkan pada tahun 2021 berubah menjadi KK (Kepala keluarga) dimana dalam satu RUTA bisa jadi lebih dari 1 KK. Besaran yang diterima KPM setiap bulan adalah sebesar Rp. 200.000,-. Pada tahun 2021 Jumlah disabilitas yang memperoleh program sembako adalah 35 orang dan tahun 2022 berjumlah 90 orang. Sedangkan untuk Lansia pada tahun 2021 diberikan kepada 40 orang Lansia dan tahun 2022 diberikan kepada 90 orang Lansia.

**Tabel 2.50**  
**Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Aktif Tahun 2022**

No	Jenis PSKS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
<b>1</b>	<b>Pekerja Sosial Masyarakat</b>	<b>3</b>	<b>89</b>	<b>92</b>
	Kec. Padang Panjang Timur	0	45	45
	Kec. Padang Panjang Barat	3	44	47
<b>2</b>	<b>Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	Kec. Padang Panjang Timur	0	1	1
	Kec. Padang Panjang Barat	0	1	1

Sumber : Dinas Sosial PPKBP3A Kota Padang Panjang, Tahun 2023

PSM dan TKSK adalah mitra kerja dalam penanganan masalah Sosial, yang bekerja menurut wilayah kerja masing-masing. TKSK memiliki wilayah kerja Kecamatan, sedangkan PSM memiliki wilayah kerja di Kelurahan.

**2) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

**a) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**

Kinerja urusan pertanahan salah satunya dilihat dari capaian sertifikasi aset tanah dan bangunan pemerintah. Capaian pensertifikatan aset tanah dan bangunan Kota Padang Panjang terus meningkat sejak tahun 2018. Hal ini merupakan tindak lanjut dari hasil temuan BPK bahwa semua OPD diinstruksikan untuk mengamankan aset masing-masing melalui pensertifikatan. Dari tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait Pendaftaran Tanah Lengkap dan Sistematis (PTSL) dimana masyarakat bisa mensertifikatkan tanahnya secara gratis. Capaian sertifikasi aset tanah dan bangunan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.51**  
**Capaian sertifikasi aset tanah dan Bangunan Pemerintah**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko	29	31	32	43	77

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

**b) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**

Beberapa indikator yang menunjukkan kinerja lingkungan hidup kota Padang Panjang 2018-2022 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.52**  
**Indikator Kinerja Lingkungan Hidup kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Air	40,88	37,37	43,68	31,86	46,07
2	Indek Kualitas Udara	92,41	91,52	91,88	91,07	91,29
3	Indek Kualitas Tutupan Lahan	65,26	65,26	65,26	56,18	56,18
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,09	64,77	67,93	61,16	66,60
5	Persentase ketersediaan RTH Publik	2,43	2,60	4,23	4,93	4,93
6	Persentase penanganan sampah	85,87	86,39	87,31	89,65	82,72
7	Persentase pengurangan sampah	13,87	13,29	12,06	7,34	15,17
8	Sampah terkelola	99,74	99,68	99,37	96,99	97,89
9	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	25,73	29,11	31,4	52,4	62,68

Sumber : Dinas Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2023

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup kota Padang Panjang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dari data tahun 2018 hingga tahun 2022 angka IKLH berkisar antara 61 sampai 67 sesuai dengan kondisi kualitas air Sungai, Kualitas Udara dan Kualitas Tutupan lahan setiap tahunnya. Dari tiga komponen penyumbang IKLH, Indek Kualitas Air merupakan point penting yang harus menjadi perhatian karena masih berada pada angka rendah. Salah satu factor penyebab rendahnya kualitas air sungai adalah kandungan bakteri coli yang melebihi baku mutu hampir pada 7 aliran sungai di Kota Padang Panjang. Selain itu, sebagian besar hulu sungai yang ada di Kota Padang Panjang berasal dari Kabupaten Tanah Datar sehingga pemerintah kota mengalami kesulitan untuk melakukan tindakan pengendalian pencemarannya.

Persentase Sampah terkelola di Kota Padang Panjang, berdasarkan data

dari dokumen Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga masih terbilang tinggi diatas angka 95 persen. Kegiatan penanganan sampah yang dilakukan pemerintah Kota di TPA Sungai Andok menjadi penyumbang terbesar tingginya angka tersebut sedangkan persentase pengurangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat masih fluktuatif berkisar antara 2 persen sampai dengan 15 persen. Yang harus menjadi perhatian serius adalah TPA tersebut pada tahun 2023 diprediksi telah over capacity sehingga pemerintah Kota harus mencari alternative pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang kedepannya.

Persentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Padang Panjang cenderung meningkat namun masih jauh dari standar ideal Kementerian PUPR (10 persen dari luas wilayah). Turunnya luas RTH publik di tahun 2020 disebabkan oleh revitalisasi beberapa ruas jalur hijau trotoar yang ada di Kota Padang Panjang. Peningkatan yang terjadi di tahun 2021 sesungguhnya bukanlah karena penambahan luasan RTH publik, tapi lebih kepada penyesuaian definisi operasional RTH dimana pada tahun-tahun sebelumnya pembanding luasan adalah wilayah administrasi sedangkan sejak tahun 2021 pembanding luasan yang digunakan adalah luas kawasan terbangun (hasil konsultasi penyusunan dokumen RTRW dengan Kementerian ATR).

Ketaatan pelaku usaha untuk mengurus dan mematuhi ketentuan rekomendasi izin lingkungan juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun walaupun capaiannya baru mencapai 54,83 persen di 2022. Hal ini terjadi berkat intensifnya pengawasan yang dilakukan oleh OPD pengelolaan lingkungan dan penegakan perda lingkungan.

### **c) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil berupa penerbitan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil dari tahun 2018 sampai dengan 2020 cenderung meningkat, seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan. Kecuali untuk KTP menurun di tahun 2021 dikarenakan hanya penduduk yang baru memiliki KTP yang membuat KTP baru. Untuk melihat persentase penduduk yang telah mengurus dokumen kependudukannya dapat dilihat dari rasio penduduk ber-KTP. Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah.

Rasio penduduk ber-KK adalah perbandingan jumlah penduduk yang ber-KK terhadap jumlah penduduk yang telah menikah, dan Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Sedangkan rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah.

**Tabel 2.53**  
**Penerbitan Dokumen dan Akta Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018 - 2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kartu Tanda Penduduk	38.151	39.666	40.985	41.640	42.020
2	Akta Kelahiran	2.810	2.972	2.810	3.361	1.466
3	Akta Kematian	279	456	321	391	417
4	Akta Perkawinan	437	389	420	419	2
5	Akta Perceraian	86	102	103	102	0
6	Akta Pengakuan dan Pengangkatan Adopsi Anak	0	0	0	0	1
7	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	1.0626	1.2846	1.5119	1.5383	17.330

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerbitan dokumen kependudukan bersifat dinamis, tergantung dengan peristiwa kependudukan (pindah, datang) dan peristiwa penting lainnya (lahir, meninggal, perkawinan, perceraian) yang dialami warga masyarakat.

Layanan administrasi kependudukan di Kota Padang Panjang memiliki keunggulan dalam hal upaya pelayanan administrasi yang berdasarkan ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan.

Layanan ini melayani penduduk untuk penerbitan dokumen kependudukan hanya membutuhkan waktu 10 (sepuluh) menit apabila dokumen persyaratan administrasinya mencukupi.

Untuk percepatan pencatatan kematian penduduk Kota Padang Panjang yang telah meninggal dunia dilaksanakan melalui beberapa inovasi dan program, salah satu nya adalah melalui inovasi PADUKO ( Pelayanan Administrasi Kependudukan Online). Untuk Penerbitan Dokumen Akta Ganti pada tahun 2021 nama cukup tinggi, salah satu penyebab adalah perubahan nama untuk keperluan sekolah dan dunia kerja.

**Tabel 2.54**  
**Persentase Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir,**  
**Akte Nikah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio penduduk ber-KTP per-satuan penduduk	95,53	99,21	99,87	99,86	99,99
2	Rasio Bayi ber-akte kelahiran	94,16	97,01	98,81	99,98	99,99
3	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	100	100	100	100	100

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
4	Cakupan penerbitan KTP	95,53	99,14	99,93	99,98	99,99
5	Cakupan Penerbitan akte kelahiran	78,07	97,01	98,81	99,98	99,99
6	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan pendaftaran penduduk	-	89,62	98,84	97,11	98,75
7	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan catatan sipil	-	89,62	95,84	97,11	98,75

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, Tahun 2023

Untuk layanan dan penerbitan dokumen kependudukan di Kota Padang Panjang, Dinas Kependudukan dan catatan Sipil memerlukan strategi khusus diantaranya adalah bagaimana meningkatkan penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan dan meningkatkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Disamping upaya peningkatan layanan yang akan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang tersebut masih ada beberapa permasalahan diantaranya adalah :

- a. Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan layanan kependudukan dan catatan sipil secara online melalui penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- b. Bagaimana menyelenggarakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD dan pihak lainnya yang membutuhkan;
- c. Bagaimana melaksanakan pengolahan dan penyajian data kependudukan;

**d) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Jumlah penduduk Kota Padang Panjang mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Trend pertumbuhan penduduk tersebut menunjukkan bahwa perkembangan penduduk Kota Padang Panjang tumbuh secara linier.

**i. Laju Pertumbuhan Penduduk**

Berdasarkan tabel di bawah ini, terlihat bahwa setiap Kecamatan di Kota Padang Panjang mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk, pada tahun 2021 dengan angka pertumbuhan sebesar 1,15 persen.

Pertambahan atau pengurangan penduduk setiap tahunnya dipengaruhi oleh proses alami, dan migrasi penduduk; masuk atau keluar dari suatu daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, pertumbuhan penduduk bernilai positif, yang diartikan sebagai

tingkat kelahiran dan migrasi masuk di Kota Padang Panjang lebih besar dibandingkan tingkat kematian dan migrasi keluar Kota Padang Panjang.

**Tabel 2.55**  
**Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kec. Padang Panjang Timur	23.817	24.360	24.151	25.601	25.000
2	Kec. Padang Panjang Barat	29.177	29.333	32.160	34.397	32.850
3	Laju pertumbuhan Penduduk Kec. Padang Panjang Timur	2,56	2,28	-0,86	2,16	1,93
4	Laju pertumbuhan Penduduk Kec. Padang Panjang Barat	0,63	0,53	9,64	1,48	1,25

Sumber :BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2023

Prediksi untuk pola pertumbuhan penduduk melalui pertumbuhan alami, dan melalui migrasi merupakan pola perhitungan yang kompleks yang tidak hanya memperhitungkan satu indeks pengukuran saja, karena dalam perhitungan pertumbuhan penduduk didasarkan dari tingkat kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penarik dari kota yang dituju maupun yang ditinggalkan.

**ii. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)**

*Contraceptive Prevalence Rate* merupakan persentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2021, untuk Kota Padang Panjang nilainya turun dari tahun sebelumnya sebesar 67,57 persen, artinya rasionya masih di bawah 80 persen, seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.56**  
**Tingkat Kepesertaan KB Aktif Kota Padang Panjang tahun 2018-2022**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pasangan usia subur (PUS)	7.527	6.397	6.276	6.944	7.073
2	Tingkat kepesertaan KB aktif (CPR)	73,97	66,12	76,10	67,57	56,1

Sumber : Dinas Sosial PPKBP3A, 2023

**iii. Rasio Akseptor KB**

Rasio akseptor KB merupakan perbandingan jumlah akseptor KB (peserta KB aktif) dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS). Perkembangan rasio akseptor KB ini cenderung mengalami fluktuasi, namun penambahan jumlah akseptor KB tidak sebanding dengan penambahan PUS



sendiri. Pemerintah Kota Padang Panjang melaksanakan program Keluarga Berencana dan pendataan Pasangan Usia Subur (PUS) setiap tahun.

**Tabel 2.57**  
**Perkembangan Peserta KB Aktif Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Indikator	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah akseptor KB (Pasang)	5.568	4.230	4.776	4.692	4.002
2	Jumlah PUS (pasang)	7.527	6.397	6.276	6.944	7.073
3	Rasio Akseptor KB (%)	73,97	66,12	76,10	67,57	56,60

Sumber : Dinas Sosial PPKBP3A, 2023

Sejak tahun 2018 - 2022 terjadi fluktuasi dalam Rasio Akseptor KB, dimana pada tahun 2018 Rasio Akseptor KB sebesar 73,97 %, dan pada tahun 2019 turun menjadi 66,12%, lalu naik kembali pada tahun 2020 yaitu 76,10% akan tetapi pada tahun 2021 dan 2022 turun terus sampai pada 56,60%. Sementara itu pencapaian peserta KB juga fluktuasi dimana pada tahun 2018 sebanyak 7.527 pasang, lalu turun pada tahun tahun 2019 dan tahun 2020, namun ditahun 2021 sampai dengan 2022 meningkat sedikit sampai di angka 7.

**Tabel 2.58**  
**Pencapaian Peserta KB Baru di Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018 – 2022**

No	Mix Kontrasepsi	2018		2019		2020		2021		2022	
		PPM	Pencapaian	PPM	Pencapaian	PPM	Pencapaian	PPM	Pencapaian	PPM	Pencapaian
1	IUD	455	480	552	457	380	467	258	433	407	308
2	MOW	90	93	119	88	27	85	15	57	24	66
3	MOP	1	1	1	1	1	1	5	0	0	0
4	KONDOM	135	118	133	176	121	203	93	136	320	107
5	IMPLAN	109	119	95	82	39	39	67	37	50	12
6	SUNTIK	255	247	306	297	233	325	222	311	394	195
7	PIL	157	141	244	227	198	127	234	57	473	47
8	Jumlah Pencapaian	1.359	1.199	1.450	1.328	999	1.247	894	1.031	1668	735

Sumber : Dinas Sosial PPKBP3A, 2023

Sementara itu, capaian peserta KB baru di tahun 2021 menurun dibandingkan tahun 2020, dari 1.247 menjadi 1.031 walaupun Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) lebih sedikit, namun ini merupakan target realistis

yang ditetapkan sesuai dengan kondisi PUS di Kota Padang Panjang, dan pengaruh wabah covid-19 yang membuat masyarakat enggan untuk datang ke Pusat pelayanan KB.

**iv. Petugas dan Kader KB**

Selanjutnya terkait perbandingan antara petugas KB dengan kader, tabel berikut ini menggambarkan bahwa rata-rata 1 (satu) orang petugas KB melayani 3 (tiga) sampai 4 (empat) kelurahan. Petugas KB dibantu oleh kader KB. Kader adalah seorang yang mampu dan suka rela berpartisipasi menyumbangkan pemikiran tenaga dan waktunya untuk membantu pengelolaan kegiatan program KB di kelurahan. Secara kuantitas dapat dilihat jumlah kader KB ini telah mencukupi, namun secara kualitas perlu dilakukan evaluasi dan pembinaan untuk peningkatan kualitas SDM kader KB tersebut.

**Tabel 2.59**  
**Jumlah Petugas dan Kader Keluarga Berencana Kota Padang Panjang, 2021**

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Petugas KB	Jumlah Kader KB
1	Kec. Padang Panjang Timur	8	4	159
2	Kec. Padang Panjang Barat	8	3	147

Sumber : Dinas Sosial PPKBP3A, 2023

Jumlah petugas KB mengalami kenaikan karena 2 (dua) orang petugas KB memasuki masa pensiun telah digantikan oleh petugas KB yang baru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat. Sementara itu Jumlah Kader KB tetap dipertahankan sebanyak 306 kader KB se-Kota Padang Panjang.

**e) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**

Rasio izin trayek angkutan umum Kota Padang Panjang relatif kecil cenderung menurun dari tahun ke tahun, demikian juga halnya dengan perbandingan arus penumpang dengan kendaraan. Hal ini disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk tidak sejalan dengan pertumbuhan jumlah trayek/angkutan umum sebagaimana disajikan tabel berikut.

**Tabel 2.60**  
**Perbandingan Pertambahan Jumlah Penduduk dengan Pertumbuhan Jumlah Trayek Angkutan umum di Kota Padang panjang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Izin Trayek (Dokumen)	110	110	110	110	110
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	56562	58415	60840	63265	65690

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
3	Rasio Trayek dengan Jumlah Penduduk (%)	0.001944769	0.001883078	0.001808021	0.001738718	0.001674532

Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

Jumlah angkutan umum Kota Padang Panjang tidak bertambah dari tahun ke tahun (110 angkutan). Pertambahan juga tidak signifikan karena hanya sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk. Hal ini disebabkan terus meningkatnya jumlah pengguna angkutan pribadi maupun penggunaan angkutan pribadi menjadi angkutan umum non formal. Disamping itu, dengan tidak signifikannya pertambahan pengguna angkutan umum, menyebabkan lesunya pengusaha angkutan dan tidak optimalnya pemeliharaan dan layanan angkutan umum. Secara umum perkembangan arus penumpang angkutan umum Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.61**  
**Jumlah Arus Penumpang Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Angkutan Darat	110	110	110	110	110
2	Jumlah Penumpang	132.451	108.799	123.516	125.847	131.395
3	Persentase Perbandingan	0,083	0,101	0,089	0,088	0,084

Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

Kinerja urusan perhubungan juga ditunjang dengan ketersediaan sarana prasarana perhubungan seperti dibidang lalu lintas terutama terkait ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas. Kota Padang Panjang terus melengkapi ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas dari tahun ke tahun. Walaupun secara umum kondisi fasilitas keselamatan lalu lintas terpasang sudah cukup baik 82,75 persen namun tetap diperlukan peningkatan kualitas seperti rambu, cermin tikung, marka jalan traffic light, waarning light dan lain sebagainya mempunyai usia pakai sehingga diperlukan pergantian, rehabilitasi maupun perbaikan, begitu juga dengan kuantitas fasilitas keselamatan lalu lintas dimana pertumbuhan kota dan perekonomian menyebabkan perubahan pada tatanan lalu lintas sehingga peningkatan kuantitas ketersediaan fasilitas keselamatan ini juga harus ditambah dari tahun ke tahun. Perubahan aturan dan perkembangan teknologi juga membuat perkembangan dari sisi teknologi pada sarana dan prasarana lalu lintas seperti contoh ketersediaan *Area Traffic Control System* untuk pengatutan lalu lintas yang diterapkan pada system Traffic Light yang ada serta belum adanya

suatu system informasi manajemen lalu lintas yang memadai, namun demikian pada kondisi yang ada sekarang ini ketersediaan sarana pehubungan Kota Padang Panjang dari tahun 2018-2022 dapat disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.62**  
**Jumlah Prasarana Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018–2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah rambu (buah)	847	877	680	485	493
2	Jumlah traffic light (tiang)	7	7	7	7	7
3	Jumlah warning light (tiang)	25	25	27	33	34
4	Jumlah halte (buah)	21	21	21	21	21
5	Jumlah pagar pembatas jalan portable (buah)	na	na	na	na	1136
6	Jumlah Cermin Tikung	27	33	33	30	33
7	Zoss	3	3	3	3	3
8	Gerbang KTL	3	3	3	3	3
9	Running Text	2	2	2	2	2
10	Persentase ketersediaan rambu dalam kondisi baik	80,25	80,40	81,99	82,50	82,75

Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

Untuk mendukung kegiatan pengujian kendaraan bermotor di Kota Padang Panjang, maka Dinas Perhubungan berupaya memenuhi fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor guna memeriksa persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan tersebut. Jumlah Kendaraan yang melakukan wajib uji di UPTD PKB Dinas perhubungan tidak selalu menunjukkan kenaikan signifikan, disebabkan beberapa faktor antara lain seperti kendaraan melakukan numpang uji di daerah lain, tidak lolos uji atau tidak melakukan keur. Pada tahun 2022, dari total kendaraan yang seharusnya melakukan keur, baru 66,75% yang melakukan uji keur di Kota Padang Panjang. Gambaran perkembangan uji keur kendaraan di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 disajikan dalam tabel. 2.96 berikut:

**Tabel 2.63**  
**Jumlah Prasarana Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018–2022**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	jumlah kendaraan wajib keur	1168.000	1175.000	1180.000	1180.000	1197.000

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
2	jumlah kendaraan yang melakukan keur	778.000	776.000	775.000	778.000	799.000
3	Persentase kendaraan yang melakukan keur	66.61%	66.04%	65.68%	65.93%	66.75%

Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

**f) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**

**i. Penyediaan Layanan internet Kota**

Sebagai sebuah kota berstatus *Smart City* (kota cerdas), Padang Panjang bertekad mewujudkan *Smart Society* (masyarakat cerdas) yang bisa membantu kepintaran pada segala bidang dengan memanfaatkan media dan teknologi. Sebagai salah satu upaya mewujudkan smart society dimaksud, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menyediakan layanan internet gratis untuk seluruh OPD sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 2.64**

**Jumlah Hotspot yang Tersedia di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Hotspot	60	60	80	113	119

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

**ii. Layanan aplikasi yang terintegasi**

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan implementasi pemerintahan berbasis elektronik, Pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan integrasi berbagai layanan. Beberapa layanan internal pemerintah daerah ataupun layanan publik yang telah terintegasi sejak tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut

**Tabel 2.65**

**Layanan Internal Pemerintah Daerah ataupun Layanan Publik yang Telah Terintegasi Sejak Tahun 2018-2022**

No	Nama Aplikasi	2018	2019	2020	2021	2022
1	SIMAK	√	√	√	√	√
2	e-Office		√	√	√	√
3	TPP		√	√	√	√
4	JDIH		√	√	√	√
5	PPID		√	√	√	√
6	Simbangda v2			√	√	√
7	Udajang (android, ios, web)			√	√	√

No	Nama Aplikasi	2018	2019	2020	2021	2022
8	Lakon			√	√	√
9	Siap			√	√	√
10	Paduko			√	√	√
11	Kabawarga Camat Barat			√	√	√
12	e-Sakip			√	√	√
13	UMKM			√	√	√
14	Tambo			√	√	√
15	Serambi Satu Data				√	√
16	Info Pangan				√	√
17	Palito				√	√
18	Datuks				√	√

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

**g) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

Pengembangan koperasi di Kota Padang Panjang, menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat, yang sebagian besar bergerak dalam bidang jasa dan perdagangan. Jumlah koperasi aktif mengalami kecenderungan penurunan hingga tahun 2022 mengalami 5,42 %, hal ini merupakan dampak dari pandemic Covid-19, dimana beberapa koperasi tidak melaksanakan RAT. Koperasi dikatakan koperasi aktif bila tetap melaksanakan RAT setiap tahunnya. Dari data 2018 hingga 2022, ada 4 koperasi yang tidak melaksanakan RAT 2 tahun berturut-turut sehingga terkategori koperasi tidak aktif. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan yang lebih intensif agar persentase ini Kembali mengalami kenaikan dan sinergitas dari berbagai sector dalam pengembangan koperasi perlu ditingkatkan dalam optimalisasi fungsi dan manfaat koperasi.

**Tabel 2.66**  
**Persentase Koperasi Aktif dan Sehat di Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah koperasi aktif	48	46	48	45	44
Jumlah koperasi	60	61	61	60	59
Persentase koperasi aktif	80,00	75,41	78,69	75,00	74,58
Persentase koperasi sehat	8,57	8,57	8,57	20,00	40,00

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, 2023

Jenis koperasi yang berkembang di Kota Padang Panjang, sebagian besar adalah koperasi pegawai negeri, hampir 54 persen dari jumlah koperasi aktif yang ada di Padang Panjang. Dari Jumlah keseluruhan terjadi pengurangan satu koperasi karena menjadi koperasi primer provinsi. Untuk jumlah jenis koperasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.67**  
**Jenis Koperasi Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Koperasi Unit desa	2	2	2	2	2
2	Koperasi Fungsional	0	0	0	0	0
3	Koperasi Karyawan	3	3	3	3	3
4	Koperasi serba Usaha	12	12	12	12	12
5	Koperasi wanita	1	1	1	1	1
6	Koperasi Tani	0	0	0	0	0
7	Koperasi Pondok Pesantren	3	3	3	3	3
8	Koperasi Simpan Pinjam	7	7	7	7	7
9	Koperasi Angkutan Darat	2	3	3	3	2
10	Koperasi Pasar	2	2	2	2	2
11	Koperasi Peternak Sapi	1	1	1	1	1
12	Koperasi PEPABRI	1	1	1	1	1
13	Koperasi WERDATAMA	0	0	0	0	0
14	Koperasi Veteran	0	0	0	0	0
15	Koperasi Kepolisian	1	1	1	1	1
16	Koperasi Pedagang Kaki Lima	0	0	0	0	0
17	Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah	0	0	0	0	0
18	Koperasi Produsen	0	0	0	0	0
19	KPRI	24	24	24	23	23
20	Kop. Angkutan Darat	1	1	1	1	1
	Jumlah	60	60	60	59	59

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, 2023

Dalam Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di kota Padang Panjang, juga terjadi perubahan yang signifikan, disebabkan oleh adanya pandemic Covid-19, dimana banyak usaha kecil yang mengalami penurunan penjualan sehingga tidak memiliki usaha. Setelah terjadi penurunan drastis jumlah UMKM hingga 40 persen dari jumlah UMKM yang ada sebelumnya. Namun kondisi ini mulai Kembali naik seiring dengan mulai memasuki masa pemulihan ekonomi pasca pandemic. Untuk perbandingan persentase UKM terhadap UMKM terjadi penurunan persentase yang cukup besar, hal ini disebabkan adanya penyesuaian kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dimana terjadi perubahan kriteria usaha mikro berubah dari aspek asset dan omsetnya, dari asset sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dari omsetnya dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun menjadi Rp.

2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pertahun. Dari perubahan kriteria asset dan omet yang di miliki oleh pelaku usaha ini, maka akan mempengaruhi pengelompokan pelaku usaha ini.

**Tabel 2.68**

**Persentase UKM terhadap UMKM Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Usaha Mikro	18054	14551	12444	13688	13825
2	Usaha Kecil	1380	987	857	60	65
3	Usaha Menengah-Besar	120	105	98	7	7
4	Persentase UKM terhadap UMKM	7,67	6,98	7,67	0,49	0,52
	Total UMKM	19554	15643	12444	13688	13825

Sumber: Perdagangan, Koperasi, UKM, 2023

**h) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**

Secara umum jumlah investor dan nilai investasi yang ada di Kota Padang Panjang bertambah dari tahun ke tahun. Secara umum hal ini disebabkan oleh implementasi perizinan terpadu (One Single Submission) sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan dan juga semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengurusan izin usaha. Namun demikian pada tahun 2021 jumlah investasi drastis menurun walaupun jumlah investor bertambah (masih ada investor baru) akibat pandemi Covid-19. Secara rinci kondisi investasi Kota Padang Panjang tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.69**

**Perkembangan Kondisi Investasi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	4	26	10	24	20
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	3,85	17,57	26,59	14,38	30,200
3	Nilai realisasi investasi	3,85	17,57	26,59	14,38	30,200
4	Kenaikan /penurunan nilai realisasi investasi	-	13,72	12,87	-12,21	15,82
5	Lama proses perijinan	7	7	7	7	7

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

**i) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

Merujuk kepada Peraturan Daerah kota Padang Panjang nomor 5 tahun 2022 tentang Pembangunan Kepemudaan bahwa pembangunan kepemudaan diperlukan untuk mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri,



demokratis, bertanggung-jawab serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Pengembangan potensi dan peran kepemudaan dilakukan melalui 3 (tiga) pilar yaitu Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga sejak tahun 2017 berupaya menjamin terpenuhinya hak dan layanan pemuda melalui atribut Kabupaten/Kota Layak Pemuda. Indikator pengembangan mengacu pada 4 (empat) Kluster yaitu *Live, Play, Work/School* dan *Health/Welfare*, yang dibagi ke dalam 15 (lima) belas Indikator. Kategori Kabupaten/Kota Layak Pemuda dibagi dengan tingkatan Utama, Madya dan Pratama. Kota Padang Panjang diproyeksikan untuk mampu memenuhi seluruh indikator dan mendapatkan predikat kota Layak Pemuda tingkat Pratama pada tahun 2026.

Pengembangan olahraga nasional dan daerah merujuk kepada Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang meliputi pengembangan Olahraga Rekreasi, Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi dan Industri Olahraga. DBON diselenggarakan secara bertahap dalam 5 (lima) tahap untuk periode tahun 2021-2045 (dua puluh lima tahun). Saat ini penyelenggaraan DBON berada di Tahap Pertama Tahun 2021 – 2024. Pemerintah Daerah dituntut untuk menyusun Desain Olahraga Daerah (DOD) yang merupakan rencana induk kebijakan keolahragaan kabupaten/kota yang disusun berdasarkan DBON dengan rujukan tahapan yang sama.

Konteks pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang dituju meliputi:

1. Partisipasi aktif berolahraga dan kebugaran masyarakat
2. Sistem festival dan kompetisi olahraga berkualitas, terencana, berjenjang dan berkelanjutan
3. Tenaga keolahragaan berkualitas dan kuantitas cukup
4. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagai faktor pendukung utama
5. Fasilitas prasarana dan sarana olahraga standar nasional dan internasional
6. Kesejahteraan, jaminan masa depan serta kehidupan olahragawan dan tenaga keolahragaan
7. Tata kelola keolahragaan
8. Regulasi dan dukungan dunia usaha
9. Sistem informasi keolahragaan berbasis *Big Data Analytic*.

Kondisi eksisting kinerja urusan pemuda dapat dilihat dari beberapa indikator seperti tingkat partisipasi pemuda baik dalam kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial, sedangkan kinerja urusan olah raga salah satunya dapat dilihat dari prestasi olah raga yang didapat. Capaian kinerja urusan kepemudaan dan

olahraga Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 disajikan dalam berikut:

**Tabel 2.70**  
**Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,015	0,185	0.19	0.246	0.247
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,005	0,005	0.559	1,878	1,894
3	Peningkatan prestasi olahraga	1	1	0	1	1

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2023

**j) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**

Urusan pemerintahan daerah bidang statistik meliputi Pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data dan informasi seluruh perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan daerah. Tugas utama OPD yang menyelenggarakan urusan statistik sektoral adalah : Sebagai walidata terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan urusan kewenangan daerah dari masing-masing perangkat daerah yang menyelenggarakan kewenangan daerah. Hal tersebut juga diarahkan untuk mendukung Satu Data Indonesia dan bagi kepentingan perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Padang Panjang telah memiliki portal satu data sejak tahun 2021 dan sudah mulai dimanfaatkan oleh seluruh OPD yang ada di Kota Padang Panjang. Kinerja penyelenggaraan statistik daerah Kota Padang Panjang 2018-2022 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.71**  
**Kinerja Penyelenggaraan Statistik Daerah Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah OPD yang mempublikasikan data statistik melalui portal satu data	-	-	-	24	24
2.	Jumlah dokumen statistik sektoral yang diadakan	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

**k) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

Persandian merupakan kegiatan di bidang pengamanan sistem informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi. Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi. Pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan pengukuran indeks KAMI secara self assesment (belum diverifikasi oleh BSSN) sejak tahun 2021 dengan nilai sebagaimana disajikan tabel berikut:

**Tabel 2.72**

**Tingkat KAMI (Keamanan Informasi) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat KAMI (keamanan Informasi)	-	-	-	277	338

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

**l) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**

Perkembangan urusan kebudayaan di Kota Padang Panjang dapat dilihat dari indikator kinerja jumlah pameran/expo, jumlah sarana dan penyelenggaraan festival seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan serta jumlah grup kesenian yang ada di Kota Padang Panjang. Untuk kondisi 2021 terdapat perkembangan jumlah pelaksanaan festival seni dan budaya dari tahun 2020 yang tidak dilaksanakan, pada tahun 2021 dilaksanakan 1 kali, hal ini dikarenakan mulai melandainya kasus positif covid-19, sementara itu akibat pelaksanaan PPKM, masyarakat lebih banyak melakukan kegiatan di rumah sehingga menimbulkan minat masyarakat untuk kembali menghidupkan kesenian daerah yang biasanya mati suri.

Pada tahun 2021 dan tahun 2022 peningkatan jumlah kesenian yang aktif sebanyak 30 grup dari 27 tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.73**

**Perkembangan Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pameran/ Expo per tahun	1	1	-	1	-
2	Jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya	3	5	-	1	1

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
3	Jumlah Sarana penyelenggaraan Seni dan Budaya	4	4	4	4	4
4	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan	11	11	13	13	14
5	Total benda, situs dan kawasan yg dimiliki	14	14	14	14	14
6	Jumlah Grup Kesenian yang Aktif	27	27	27	30	30

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

#### m) **Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**

Seiring dengan perkembangan multi media yang memberikan kemudahan akses terhadap data, berita dan informasi, sehingga menyebabkan perpustakaan daerah harus menghadapi tantangan dalam pemanfaatannya. Berkaitan dengan hal tersebut, perpustakaan harus menjadi sarana aktif/interaktif dan menjadi tempat dihasilkannya berbagai hal baru. Untuk mewujudkan kondisi perpustakaan sesuai dengan fungsi dan peranannya, maka perpustakaan harus diubah sistem operasionalnya dari perpustakaan manual/tradisional menjadi perpustakaan yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi (perpustakaan digital).

Konsep pengembangan kepastakaan di Kota Padang Panjang mengambil prinsip "**Literasi digital**", prinsip ini mengupayakan peningkatan budaya baca di tengah masyarakat baik dengan bukubacaan perpustakaan maupun dengan membaca literasi digital.

Dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan setiap perpustakaan secara bertahap dapat mengejar ketertinggalannya dari perpustakaan-perpustakaan yang lebih maju dan lebih modern serta dapat mengoptimalkan fungsi perpustakaan bagi masyarakat. Selain hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan yang sesuai dengan standar dalam mengelola perpustakaan.

Untuk tahun 2021, terlihat bahwa judul koleksi buku yang ada di perpustakaan dibandingkan dengan jumlah buku, persentasenya masih rendah yaitu dibawah 44,8%. Hal ini berarti masih terbatasnya judul koleksi buku yang ada diperpustakaan. Kemudian dari jumlah perpustakaan yang ada ternyata masih jauh dari target populasi yang harus dilayani. Pada tahun 2021 terdapat penambahan buku pada Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang melalui pengadaan bahan pustaka sebanyak 9.798 judul buku/27.697 eksemplar dan tahun 2022 sebanyak 14.747 judul buku/27.689 eksemplar. Populasi yang harus dilayani adalah penduduk Kota Padang Panjang usia antara 5 s/d 69 tahun atau 57.850 orang, dengan tidak menutup pelayanan untuk masyarakat dari luar kota.

Jumlah perpustakaan adalah perpustakaan yang berada di bawah kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang yang

terdiri dari 1 (satu) unit Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang dan beberapa unit TBM (Taman Bacaan Masyarakat) / Perpustakaan Kelurahan, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.74**  
**Perkembangan Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eks)	5.271	8.630	9.798	9.798	14.747
2	Jumlah Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eks)	23.994	25.676	27.697	27.697	27.689
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	21,97	33,61	35,38	35,38	53,26
4	Kunjungan perpustakaan (org)	22.120	24.198	25.343	25.720	28.920
5	Orang dalam populasi yang harus dilayani (org)	52.994	53.693	56.311	56.971	57.850
6	Persentase Pengunjung perpustakaan (%)	41,74	45,07	41,45	45,15	50,76
7	Persentase Peningkatan Kunjungan masyarakat ke perpustakaan (%)	Na	9	8	8,50	-
8	Indeks pembangunan Literasi masyarakat	-	-	-	-	86,54
9	Nilai LAKE	-	-	-	-	79,89
10	Jumlah perpustakaan (unit)	153	169	169	169	169

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

Tahun 2021 kunjungan perpustakaan terus meningkat, dimana Jumlah Pengunjung Perpustakaan pada tahun 2021 sebanyak 25.720 orang, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 25.343 orang, sementara tahun 2022 pengunjung Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang sebanyak 28.920 orang.

Peningkatan minat baca masyarakat di Kota Padang Panjang juga dilakukan dengan menggunakan buku-buku digital yang telah di sediakan pada laman <https://kubuku.id> dengan menggunakan 2 metode yaitu menggunakan Komputer Desktop dan menggunakan *mobile phone*. sampai pada tahun 2022 jumlah koleksi buku digital (e-book) yang telah disediakan adalah sebanyak 562 e-book. Penggunaan platform digital ini sudah dimulai sejak Tahun 2018.

Tabel berikut menggambarkan perkembangan tentang tingkat keteraksesan e-book sejak tahun 2018 sampai Tahun 2022.

**Tabel 2.75**  
**Tingkat Keteraksesan e-book Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Keteraksesan E-Book	37	45	23	1	175
2	Persentase	6,58	8,01	4,09	0,18	31,14

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 tingkat keteraksesan e-book pada laman <https://kubuku.id> sebanyak 175 e-book dari 562 e-book dengan capaian 31,14 %. Capaian ini mengindikasikan bahwa tingkat keteraksesan masih tergolong rendah, sehingga membutuhkan upaya peningkatan baik dari segi jenis dan variasi judul e-book maupun menumbuh kembangkan minat dan keinginan masyarakat untuk mengakses e-book secara *online*.

#### **n) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**

Arsip merupakan dokumen otentik dan legal tercipta karena pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Arsip juga merupakan akuntabilitas kinerja aparatur yang dapat dijadikan sebagai saksi abadi terhadap keberhasilan dan kegagalan tugas aparatur negara. Arsip juga dapat dijadikan sebagai budaya dan sejarah. Untuk itu arsip harus diselamatkan dan dikelola dengan baik.

Di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, urusan kearsipan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pengelolaan kearsipan bertujuan untuk *tracking* surat/arsip serta memudahkan pencarian, pendokumentasian data secara baik, tepat dan akurat dapat menjaga data tersimpan dengan baik.

#### **i. Pengelolaan Arsip**

Berdasarkan tabel 2.76, di tahun 2021 baru 15 OPD Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang telah menerapkan arsip secara baku tahun 2021, hal ini disebabkan karena sumber daya yang mengelola kearsipan di masing- masing Perangkat Daerah masih terbatas. Yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari SDM yang mengelola arsip di setiap Perangkat Daerah.

**Tabel 2.76**  
**Perkembangan Kearsipan di Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2022**

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	OPD	12	13	14	15	16
2	Jumlah Perangkat Daerah	OPD	24	24	24	24	24
3	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	%	50,00	54,19	58,33	62,5	66,66
4	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

**ii. SDM Pengelola Kearsipan**

Merupakan dokumen yang harus tersimpan sebagai bukti historis dari kegiatan- kegiatan yang telah dilaksanakan. Jumlah arsip yang harus dikelola di Kota Padang Panjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 meningkat dari 14.461 berkas menjadi 15.105 berkas, terjadi peningkatan 724 berkas. Namun kondisi ini tidak sebanding dengan jumlah pejabat fungsional arsiparis yang tersedia.

Jumlah pejabat arsiparis pada tahun 2018 sampai tahun 2021 hanya tersedia 1 orang, baru mengalami penambahan pada tahun 2022, yaitu menjadi 3 orang. Kondisi ini sangat tidak ideal di saat jumlah arsip yang dikelola selalu meningkat setiap tahunnya. Jumlah ini sangat tidak ideal untuk satu kota, untuk ini perlu dilaksanakan penambahan pegawai fungsional arsiparis. Akan tetapi penambahan jumlah fungsional arsiparis tergantung dari peminatan pegawai.

**Tabel 2.77**  
**Jumlah Arsip dan Pejabat Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Arsip Daerah yang Harus Dikelola	berkas	14.641	14.766	14.595	14.753	15.105
2	Jumlah Pejabat Fungsional Arsiparis	orang	1	1	1	1	3

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

**o) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dapat dilihat melalui capaian indikator kinerja sebagai berikut.

**i. Rasio Penduduk Bekerja**

Rasio Penduduk Bekerja Kota Padang Panjang mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke 2019 namun menurun di tahun 2020. Pandemi covid-19 yang disertai dengan pembatasan aktivitas masyarakat dan adaptasi kebiasaan baru menyebabkan banyak tenaga kerja yang dirumahkan/kehilangan pekerjaannya. Namun kondisi ini sudah kembali mulai membaik di tahun 2021.

**Tabel 2.78**  
**Rasio Angkatan Kerja Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angkatan Kerja (orang)	24.28	25.863	27.619	26.511	26.172
2	Penduduk Yang Bekerja (orang)	22.999	24.739	25.625	25.212	24.904
3	Jumlah Pengangguran	1.281	1.124	1.994	1.299	1.268
4	Rasio (%)	94,7 %	95,6 %	92,7 %	95,1 %	93,9 %

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

**ii. Kesempatan Kerja**

Kesempatan kerja dilihat dari pendekatan jumlah perusahaan. Jumlah perusahaan yang ada di Kota Padang Panjang cenderung meningkat sejak tahun 2018 kecuali tahun 2020. Namun demikian, dari total jumlah perusahaan ini didominasi oleh usaha mikro dan menengah yang tidak begitu banyak menyerap tenaga kerja. Gambaran jumlah perusahaan dan serapan tenaga kerja Kota Padang Panjang tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.79**  
**Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perusahaan (unit)	580	590	484	675	716
2	Jumlah tenaga kerja (orang)	1375	1412	1093	1494	1258

Sumber : Kota Padang Panjang Dalam Angka, Tahun 2023

**iii. Kompetensi dan Penempatan Tenaga Kerja**

Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja, Pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan yang dikolaborasikan dengan 6 Balai Besar Latihan



Kerja yang ada di Indonesia seperti pelatihan pramuniaga dan junior sekretaris dengan BBPVP Semarang, pelatihan operator listrik industri dan plat welder smaw dengan BPPVP Serang, pelatihan pariwisata, desain multimedia dan elektronika pemrograman dengan BBVPD Bekasi, pelatihan desain grafis, perawatan AC residensial dan pembuatan model Kode 3D dengan BBVP Bandung serta pelatihan pariwisata/barista dan coocery perhotelan dengan BBVP Medan. Namun demikian persentase serapan tenaga kerja yang telah mendapatkan pelatihan cukup fluktuatif dan menurun di tahun 2022. Gambaran peningkatan kompetensi tenaga kerja dan jumlah penempatan tenaga kerja tahun 2018-2022 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.80**  
**Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018-2022**

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	45	194	87	112	125
2	jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	31	183	78	107	90
3	Persentase serapan tenaga kerja yang dilatih	69%	94%	90%	96%	72%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

**iv. Perlindungan Tenaga Kerja**

Disamping itu, dalam rangka peningkatan perlindungan tenaga kerja, sejak tahun 2018 Pemerintah Kota Padang Panjang memberikan bantuan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dengan tingkat capaian yang sudah baik. Gambaran beberapa kondisi ketenagakerjaan Kota Padang Panjang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.81**  
**Perlindungan Tenaga Kerja Tahun 2018-2022**

NO	INDIKATOR KINERJA OPD	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah tenaga kerja	22999	24739	25625	25212	24904
2	Jumlah tenaga kerja sektor informal	6362	5975	7757	7435	8453
3	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat BPJS Ketenagakerjaan	5540	13202	6457	6592	17641
4	Jumlah Tenaga Kerja sektor informal yang mendapat BPJS Ketenagakerjaan (APBD)	1000	1000	1000	8283	8283

NO	INDIKATOR KINERJA OPD	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
5	Persentase tenaga kerja yang mendapat BPJS ketenagakerjaan	53.37	25.20	26.15	70.84	70.84
6	Persentase tenaga kerja sektor informal yang mendapat BPJS ketenagakerjaan	16.74	12.89	13.45	97.99	97.99

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

**p) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat melalui capaian beberapa indikator berikut.

**i. Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan**

Dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, telah dilakukan berbagai upaya antara lain dengan penetapan kuota perempuan dan sebagainya. Keberhasilan pembangunan manusia berawal dari pendidikan dalam keluarga yang peran terbesarnya ada pada ibu. Untuk melihat sejauh mana peran perempuan dan keluarga dalam perlindungan anak maka dapat dilihat dari beberapa indikator.

Berdasarkan tabel di bawah ini terlihat bahwa nilai IPG meningkat setiap tahunnya, indeks IPG merupakan cerminan dari meningkatnya taraf hidup masyarakat yang dikoreksi dengan gender. Untuk tahun 2018 IPG dilakukan pengukuran 97,77 , dan tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 97,50. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 97,70 tahun 2021 yaitu 97,78, sedangkan tahun 2022 naik kembali menjadi yaitu 98,24, ini dapat dipahami bahwa tidak ada perbedaan kesejahteraan/ kondisi yang diterima antara lelaki dan perempuan, baik dari distribusi pendapatan, angka harapan hidup dan angka rata-rata lama.

**Tabel 2.82**  
**Indikator Peran Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kota Padang Panjang 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,77	97,50	97,70	97,78	98,24
2	IndeksPemberdayaan Gender (IDG)	74,45	66,57	65,24	66,62	69,44
3	Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	20,00	10,00	20,00	20,00	20,00

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
4	Rasio KDRT	0,000074	0,0006	0,0005	0,00045	0,00045

Sumber : Dinas Sosial PPKBP3A, 2023

**Tabel 2.83**  
**Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak**  
**di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kekerasan terhadap perempuan	6	15	8	11	8
2	Kekerasan terhadap anak	13	13	13	12	9

Sumber : Dinas Sosial PPKBP3A, 2023

Terdapat kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2021 dibanding dengan tahun 2020, namun kekerasan terhadap anak juga masih menunjukkan angka yg tinggi. Hal ini tentunya menuntut peningkatan peran pemerintah dan keterlibatan semua pihak terhadap kekerasan kepada anak dan perempuan, salah satunya dengan dibentuknya lembaga yang menanungi kasus kasus yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

## ii. Pemenuhan Hak-hak Anak

Terkait dengan pemenuhan hak anak dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

### a. Fasilitas umum yang ramah anak

Sebagai Kota ramah anak, tentunya fasilitas umum di Kota Padang Panjang diharapkan juga dilengkapi dengan fasilitas ramah anak, seperti tempat bermain anak baik itu di tempat- tempat pelayanan publik maupun fasilitas umum lainnya. Namun harus diakui kondisi ini belum optimal dilakukan. Tempat pelayanan publik seperti puskesmas, rumah sakit, tempat pelayanan publik seperti pencatatan sipil, pelayanan satu pintu, zona aman sekolah dan lain-lain masih minim dengan fasilitas yang ramah anak.

Beberapa fasilitas umum dan taman bermain di Kota Padang Panjang telah mulai dilengkapi dengan fasilitas bermain anak, diantaranya taman bermain Lembuti di depan Polres Kelurahan koto Panjang, Taman Bermain di kelurahan Kampung Manggis dan Taman bermain di Desa Baru di Kelurahan Tanah Hitam Kota Padang Panjang.

### b. Fasilitas Pojok ASI untuk ibu menyusui

Untuk fasilitas pojok ASI bagi ibu menyusui pada perkantoran juga masih minim. Dari 24 Perangkat daerah, yang memiliki fasilitas ruang ibu menyusui (pojok ASI) baru perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DPMPSTSP, Rumah Sakit dan

Puskesmas, dan semenjak tahun 2020 juga sudah mulai ada di Perangkat daerah yang tidak melakukan pelayanan Publik bahkan tidak menyediakan fasilitas Pojok ASI untuk ibu menyusui.

c. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran

Berdasarkan data dari Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan, jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran pada tahun 2021 adalah sebanyak 19.067 anak dari total 19.093 anak. Artinya cakupan kepemilikan akta kelahiran anak berusia 18 tahun kebawah adalah sebesar 99,86 %. Angka ini terus meningkat dari tahun 2018 yang hanya 94,11 %.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang Panjang untuk meningkatkan kepemilikan akta lahir bagi anak usia 18 tahun kebawah melalui program Inovasi PADUKO (Pelayanan Administrasi Kependudukan online) terpadu dalam layanan administrasikependudukan termasuk mendaftar dan membuat akta kelahiran secara online juga untuk penerbitan akte kelahiran usia 0-18 tahun seluruh penduduk Kota Padang Panjang dan Kartu Identitas Anak (KIA).

**Tabel 2.84**  
**Persentase anak (usia 0-18 tahun) yang memiliki akta kelahiran**  
**di Kota Padang Panjang tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anak usia (0-18 tahun)	20.036	20.087	20.306	20.100	19.093
2	Jumlah anak usia (0-18 tahun) yang memiliki Akta Kelahiran	18.857	19.491	19.872	20.060	19.067
3	Persentase usia (0-18 tahun) yang memiliki Akta Kelahiran	94,11	97,03	97,86	99,8	99,86

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2023

**Tabel 2.85**  
**Capaian terkait Kota Layak Anak di Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak (KLA)	MADYA	MADYA	MADYA	MADYA	NINDYA
2	Jumlah kebijakan terkait hak dan perlindungan anak	2	4	6	7	1
3	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk TPPO)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial PPKBP3A, 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk capaian Kota layak Anak (KLA), pada tahun 2021, tingkat kategori capaian Kota Layak Anak mendapat Madya dan jumlah kebijakan terkait hak dan perlindungan anak ada 7 dan Tahun 2022 tingkat kategori capaian Kota Layak Anak mendapat NINDYA dan jumlah kebijakan terkait hak dan perlindungan anak ada 1 indikator.

Di Kota Padang Panjang telah membentuk Forum Anak Kota Padang Panjang sebagai wadah yang memfasilitasi program perlindungan anak, dan membentuk Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan terkait program Kota Layak Anak. Berdasarkan data dari Dinas Sosial pada tahun 2021, terdapat 91 anak dengan penyandang disabilitas yang tersebar di 2 (dua) kecamatan. Bentuk program pemerintah dalam melayani anak penyandang disabilitas ini berupa bantuan BLT Kemensos, KIS, BPNT, PKH, KKS, dan JKN, yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi/Kota.

#### **q) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**

Pangan adalah kebutuhan hak asasi manusia dimana pemenuhan kebutuhannya bagi setiap individu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (UU Pangan No. 18 Tahun 2014).

Pembangunan Ketahanan Pangan memiliki peran yang strategis pembangunan Kota Padang Panjang karena (1) akses terhadap pangan dengan gizi yang cukup merupakan hak paling mendasar bagi manusia; (2) kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; dan (3) ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan nasional yang berkelanjutan. Pemerintah daerah wajib untuk memberikan perhatian khusus untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tahan pangan sampai ke tingkat rumah tangga dan perseorangan. Perwujudan ketahanan pangan dapat dicapai, melalui 4 pilar yaitu Ketersediaan pangan (produksi dan import), Cadangan pangan, Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dan Pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan. Terkait pembangunan ketahanan pangan Kota Padang Panjang sudah melakukan berbagai upaya. Berikut dijelaskan beberapa capaian kinerja pembangunan pada urusan bidang pangan.

#### **i. Ketersediaan Pangan**

Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua

sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak stabilan ekonomi. Untuk memenuhi ketersediaan Pangan dan konsumsi penduduk agar mencukupi maka dilaksanakan penyusunan Neraca Bahan Makanan. NBM menyajikan jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk perkapita, baik dalam satuan kg/tahun maupun dalam satuan gram/hari, dalam satuan kg/kapita/tahun. Selain hal tersebut, NBM juga menyajikan jumlah pangan yang tersedia dalam bentuk zat gizi tertentu yaitu energi (kkal/hari), protein (gram/hari) dan lemak (gram/hari).

**Tabel 2.86**  
**Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein Tahun 2018-2022**

No.	Tahun	Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)
1.	2018	2.812,12	78,93
2.	2019	2.695,53	74,31
3.	2020	2.855,36	78,56
4.	2021	2.486,84	50,52
5.	2022	2.820,34	73,65

Sumber : Olahan Data Dinas Pangan Dan Pertanian, 2023

**ii. Cadangan Pangan**

Cadangan pangan merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok yaitu berupa beras atau non beras yang digunakan untuk menangani atau mengatasi masalah keadaan darurat (transien) dan kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam dan gagal panen. Penetapan besarnya kebutuhan cadangan pangan dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui cadangan pangan.
- b. Kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah maka Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang adalah sebanyak 23 (Dua puluh tiga) Ton. Adapun Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sampai ini sebanyak 3.000 (*Tiga ribu*) Kg atau 3 (*Tiga*) Ton.

**Tabel. 2.87**  
**Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang**

No	Tahun	Cadangan Pangan
1	2018	-

No	Tahun	Cadangan Pangan
2	2019	-
3	2020	-
4	2021	-
5	2022	3.000 Kg

Sumber : Olahan Data Dinas Pangan Dan Pertanian, 2023

### iii. Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan

Tingkat Konsumsi Pangan di Kota Padang Panjang dapat dilihat dari Skor PPH yang merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk mencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. Untuk Tahun 2022 Skor PPH Kota Padang Panjang sebesar 87,3 terjadi peningkatan dibandingkan Skor PPH Kota Padang Panjang Tahun 2021 sebesar 85,7. Skor PPH Kota Padang Panjang ini masih dibawah target ideal Skor PPH yaitu 100, sehingga kedepan dibutuhkan upaya dan langkah yang tepat untuk merubah pola pikir masyarakat agar ikut dan mampu melaksanakan program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan mau menerapkan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

**Tabel 2.88**

#### **Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Padang Panjang**

No	Tahun	Skor PPH
1	2018	85
2	2019	80,2
3	2020	85,6
4	2021	85,7
5	2022	87,3

Sumber : Olahan Data Dinas Pangan Dan Pertanian, 2023

Keamanan pangan juga merupakan salah satu yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Untuk pengawasan keamanan pangan ini Kota Padang Panjang melakukan pengujian sampel pangan segar yang beredar dimasyarakat agar aman untuk dikonsumsi.

**Tabel 2.89**  
**Pengujian Sampel Pangan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	Tahun	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Aman	Jumlah Sampel Tidak Aman	Sampel Aman (%)
1	2018	21	19	2	90,47
2	2019	16	13	3	81,25
3	2020	-	-	-	-
4	2021	9	9	-	100
5	2022	7	6	1	85,71

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, 2023

**iv. Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan**

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kondisi rawan pangan dapat disebabkan karena (a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga; (d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein.

**Tabel. 2.90**  
**Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Tahun 2022**

NO	Nama Kelurahan	Keterangan
1	Sigando	Rentan
2	Koto Panjang	Agak Rentan
3	Ganting	Agak Rentan
4	Koto Katik	Agak Rentan
5	Ngalau	Agak Rentan
6	Ekor Lubuk	Agak Rentan
7	Silaing Bawah	Agak Tahan
8	Kampung Manggis	Agak Tahan
9	Tanah Hitam	Agak Tahan
10	Balai-Balai	Tahan
11	Pasar Usang	Tahan



NO	Nama Kelurahan	Keterangan
12	Guguak Malintang	Tahan
13	Tanah Pak Lambik	Tahan
14	Bukit Surungan	Sangat tahan
15	Silaing Atas	Sangat tahan
16	Pasar Baru	Sangat tahan

Sumber : Dinas Pangan Dan Pertanian, 2023

Kota Padang Panjang tidak ada daerah yang mengalami rawan Pangan yang ada rentan pangan di satu kelurahan yaitu sigando, sesuai dengan Peta Kerawanan dan kerentanan Pangan yang telah di buat. Berikut adalah gambaran kondisi Kota Padang Panjang dari Rentan pangan sampai aman.

### 3) Urusan Pemerintahan Pilihan

#### a) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Dengan luas wilayah sebesar 23 km<sup>2</sup>, Kota Padang Panjang memiliki potensi pengembangan kawasan perikanan yang cukup besar yang didukung dengan kondisi geografis maupun struktur wilayahnya. Pengembangan kawasan perikanan dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi perikanan yang ada di Kota Padang Panjang guna menunjang target produksi perikanan. Perkembangan produksi perikanan di Kota Padang Panjang dilihat dari peningkatan produksi budidaya perikanan konsumsi, peningkatan produksi benih, dan peningkatan penangkapan ikan di perairan umum.

Pada umumnya kegiatan perikanan lebih banyak untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sampai saat ini walaupun produksi perikanan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tetapi untuk pemenuhan kebutuhan Kota Padang Panjang sebagian besar masih didatangkan dari daerah lain, karena produksi yang ada belum mencukupi untuk kebutuhan dalam daerah. Dengan angka konsumsi ikan per kapita sebesar 41,82 kg, maka kebutuhan ikan konsumsi adalah 2.041 ton, sementara produksi baru mencapai 735,5 ton dengan jumlah penduduk kurang lebih 50.000 jiwa.

Aktivitas budidaya perikanan darat dilaksanakan melalui budidaya kolam air tenang, budidaya kolam air deras, budidaya ikan di kolam terpal dan perairan umum. Jenis ikan yang banyak dibudidayakan antara lain nila, lele, dan mas.

Dalam upaya peningkatan kegiatan budidaya untuk peningkatan produksi sudah diiringi dengan penyediaan benih unggul yang dihasilkan oleh UPTD BBI dan UPR serta pakan ikan yang murah. Jaminan pasar melalui kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di bawah bimbingan penyuluh perikanan dan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

Secara lebih lengkap perkembangan populasi produksi dan kegiatan perikanan dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2.91**  
**Perkembangan Populasi, Produksi dan Kegiatan Perikanan**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	<b>Produksi benih ikan</b>					
	Luas kolam (ha)	2,0	2,0	4,0	2,0	3,5
	Produksi (ribu ekor)	90.530	633.528	634.025	635.310	638.100
2.	<b>Produksi Pembudidayaan ikan rakyat (ikan konsumsi)</b>					
	Luas kolam (ha)	9,87	9,87	9,98	9,98	11,04
	Produksi (ribu ekor)	610,52	716,66	647,95	705,46	735,50
3.	<b>Produksi ikan di perairan umum</b>					
	Luas kolam (ha)	15,05	15,05	15,05	15,05	15,05
4.	Produksi (ribu ekor)	9,48	22,00	35,71	20,40	8,1

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, 2023

**Tabel 2.92**  
**Jumlah Produksi Perikanan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Produksi Perikanan (ton)	610,52	716,66	647,95	705,46	735,5
2.	Produksi olahan perikanan (ton)	0,98	1,1	0,4	0,5	0,6
3.	Benih perikanan (ribu ekor)	683.000	633.528	634.025	635.310	638.100

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga perikanan pembudidaya/ pengolahan tidak mengalami kenaikan, dengan luas lahan pembenihan adalah 3,5 Ha dengan produksi tahun 2022 sebanyak 638.100 ekor.

Dengan adanya UPTD BBI di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang maka diharapkan dapat meningkatkan produksi benih ikan unggul terutama benih ikan nila untuk kebutuhan masyarakat Kota Padang Panjang.

Produksi perikanan terutama ikan konsumsi mengalami kenaikan dari 705,46 ton menjadi 735,5 ton dengan produksi benih sebanyak 638.100 ekor yang dihasilkan dari UPTD BBI dan UPR di Kota Padang Panjang.

Di samping produksi perikanan dari perairan umum mengalami penurunan karena masih banyaknya masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan listrik yang mengakibatkan benih dan induk ikan mengalami kematian. Pada tahun 2021 telah dilakukan usaha konservasi dengan melakukan penebaran benih ikan garing di perairan umum di Kota Padang Panjang dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan di perairan umum.

Untuk itu dalam pengawasan perairan umum dilakukan kerjasama seluruh

masyarakat dalam mencegah terjadinya penggunaan alat tangkap yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan sehingga jumlah produksi dapat terjaga.

**b) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**

Merujuk kepada rancangan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPAR) kota Padang Panjang 2021 - 2025, pembangunan kepariwisataan di kota Padang Panjang meliputi pengembangan Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata dengan Isu Strategis pembangunan kepariwisataan mengenai Pariwisata Halal, Pariwisata Event, Pariwisata Berbasis Digital dan Ekonomi Kreatif, dan Penguatan Pengalaman Wisatawan melalui atraksi dan desain ruang (atmosfir) destinasi. Isu Strategis tersebut didasarkan pada prinsip Pariwisata Berkelanjutan, Pariwisata Berbasis Masyarakat dan Pariwisata Berbasis Norma Agama dan Budaya.

Potensi penerapan prinsip Pariwisata Berkelanjutan sangat mungkin dilakukan pada Destinasi Pariwisata di kota Padang Panjang dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) Kota Padang Panjang sebagai *pilot project*-nya. Melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nomor: 556-575-2021 tahun 2021 PDIKM telah ditetapkan sebagai 1 dari 19 Daya Tarik Wisata Unggulan (DTWU) di Sumbar. Pada tahun 2022 PDIKM mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata (*Clean, Healthy, Safe And Enviromentaly Sustainable*) yang berlaku selama 3 tahun.

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat tetap dilakukan secara intensif oleh Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang ada di kelurahan-kelurahan. Pada tahun 2022 Kampung Budaya dan Religi Sigando dengan daya tariknya Masjid Asasi menyusul capaian yang telah diraih sebelumnya pada tahun 2020 oleh Desa Wisata Kubu Gadang menjadi pemenang 1 Apresiasi Desa Wisata Sumatera Barat. Potensi pengembangan selanjutnya ada di Wisata Batu Limo, Agrowisata Gantiang, Stasiun Kereta Api Pasar Usang dan Jembatan Tinggi (bagian dari Warisan Tambang Batubara Sawahlunto/ WT BOS yang merupakan Warisan Budaya Dunia yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2019) dan banyak lainnya dengan keunikan dan keunggulan potensi daerah yang berbeda satu dan lainnya.

Peraturan Daerah Sumbar nomor 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal menimbang pembangunan pariwisata di wilayah Sumbar perlu dilakukan dengan menggali potensi budaya dan keluhuran adat dengan filosofi *adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah, syara' mangato adat mamakai* dalam bentuk penyelenggaraan pariwisata yang dilakukan secara terencana, terarah dan terpadu. Hal ini tentunya cocok untuk diterapkan di kota Padang Panjang karena sesuai dengan salah satu prinsip pembangunan pariwisata dalam

rancangan RIPPAN yaitu Pariwisata Berbasis Norma Agama dan Budaya. Keberadaan *Islamic Center* (terbaik II Destinasi Wisata Halal Sumatera Barat), Masjid Asasi, Pasar Kuliner dan berbagai macam pusat-pusat kuliner unggulan yang diharapkan memiliki standarisasi Halal (Bahan, Proses dan Penyajian) akan memperkuat posisi Padang Panjang dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal di Sumatera Barat dan Indonesia. Upaya-upaya untuk menerapkan standarisasi dan sertifikasi pada usaha pariwisata seperti Halal, CHSE, Keterampilan Sumber Daya Manusia harus dilakukan secara simultan dan menyeluruh. Hal ini diharapkan membangkitkan rasa kepercayaan, keamanan dan kenyamanan dari wisatawan saat berwisata di kota Padang Panjang.

**i. LPE Sektor Akomodasi dan Makan Minum**

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dilihat dari kontribusi sektor akomodasi dan makan minum. Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum Kota Padang Panjang tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.93**  
**PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum (dalam Milyar)	91,90	102,44	91,71	100,47	115,08

Sumber: BPS, 2023

Pandemi Global tahun 2019 berdampak terhadap hampir seluruh sektor. Merujuk kepada publikasi Padang Panjang Dalam Angka tahun 2021 Produk Domestik Regional Bruto pada Sektor Akomodasi dan Makan Minum justru tidak mengalami dampak penurunan yang terlalu signifikan. Hal ini ditengarai karena industri makan minum berevolusi membuka ruang dan cara baru dalam bertransaksi dengan jamaknya infrastruktur pemesanan elektronik dan jasa antar makanan. Ke depan tren ini diperkirakan akan terus bertahan dan diharapkan akan jauh lebih membaik dengan makin banyaknya pelaku usaha makan-minum baru di kota Padang Panjang (Basis Data Wisata dan Ekraf Kota Padang Panjang). Usaha peningkatan dan perbaikan layanan dari usaha akomodasi dan makan-minum dilakukan dengan upaya penerapan standarisasi dan sertifikasi seperti Halal, CHSE, pelatihan/ peningkatan keterampilan SDM dan lainnya.

**ii. Jumlah Kunjungan Wisata**

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang terdampak paling parah dengan terjadinya Pandemi Global Covid-19. Karena Pariwisata erat kaitannya dengan aktivitas berkunjung yang pasti terganggu karena banyaknya

pembatasan dan protokol yang harus diikuti untuk bisa melakukan aktivitas tersebut. Puncak penurunan terjadi pada tahun 2020, yang merupakan awal merebaknya pandemi ke seluruh dunia. Untuk kota Padang Panjang, destinasi wisata yang termasuk ke dalam perhitungan kunjungan wisata adalah MIFAN, PDIKM, Lubuk Mata Kucing, Serambi Milk, Kubu Gadang dan Akomodasi Hotel/Wisma/Homestay.

**Tabel 2.93**  
**Kunjungan Wisata ke Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kunjungan Wisata ke Kota Padang Panjang (dalam orang)	596.000	742.000	116.826	291.988	236.511

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2023

**iii. PAD Sektor Pariwisata**

Nilai perolehan dan kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap keseluruhan PAD Kota Padang Panjang menurun sejalan dengan berkurangnya jumlah kunjungan yang disebabkan oleh dampak Pandemi Global 2019. Saat ini Pemerintah Kota Padang Panjang terus melakukan perbaikan unsur 3A (atraksi, aksesibilitas dan amenities) pariwisata di Kota Padang Panjang yang diiringi dengan kembali meningkatnya kunjungan ke destinasi wisata di kota Padang Panjang. Salah satu harapan positif dari pariwisata Kota Padang Panjang adalah dengan masuknya Desa Wisata Kubu Gadang Kota Padang Panjang dalam nominasi 75 Anugrah Desa Wisata Indonesia Terbaik Tahun 2023.

**Tabel 2.94**  
**PAD Sektor Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Total PAD Kota Padang Panjang	79,752.373	79,752.373	79,428.80	93,078.60	85,713.05
2	PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD keseluruhan (dalam Juta Rupiah)	452,141	420,675	188,979	172,874	204,500
3	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD	0.57%	0.53%	0.24%	0.19%	0.24%

Sumber : BPS, 2023

**iv. Sub-Sektor Ekonomi Kreatif yang sudah dibina**

Sub-Sektor Ekonomi Kreatif di Kota Padang Panjang berkembang dengan baik dipengaruhi oleh keberadaan perguruan tinggi, sekolah, komunitas kreatif

yang didominasi oleh generasi muda. Sub-Sektor yang berkembang dan terdata dengan baik adalah Musik, Seni Rupa, Fesyen, Kuliner, Film Animasi Video, Fotografi, Desain Komunikasi Visual, Televisi Radio, Kriya, Periklanan, Seni Pertunjukan, Aplikasi dan yang terbaru adalah Desain Produk. Untuk Sub-Sektor yang belum adalah Pengembang Permainan, Arsitektur, Desain Interior (potensi penambahan ada) dan Penerbitan (Basis Data Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Padang Panjang). Bentuk pembinaan yang dilakukan berkisar pada pelatihan dan peningkatan kualitas produk, pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta penerapan standarisasi dan sertifikasi produk.

**Tabel 2.95**  
**Sub-Sektor Ekonomi Kreatif yang Sudah dibina di Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sub-Sektor Ekonomi Kreatif yang sudah dibina	12	12	12	12	13

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2023

**c) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**

**i. Produktivitas pertanian**

Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian sangat dipengaruhi oleh faktor – faktor produksi antara lain : lahan, tenaga kerja, modal dan manajemen. Dalam rangka menjamin ketersediaan pangan perlu untuk mempertahankan lahan agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian. Kementerian ATR/BPN mencatat rata-rata alih fungsi lahan sawah pertahun di Indonesia mencapai 150 ribu sampai 200 ribu hektar. Mengantisipasi hal tersebut Pemerintah telah melaksanakan upaya pencegahan alih fungsi lahan dengan menetapkan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Menindaklanjuti UU No. 41 Tahun 2009 tersebut, Kota Padang Panjang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luasan 147,05 Hektar yang tersebar di 4 (empat) kelurahan. Secara keseluruhan total luas lahan sawah eksisting di Padang Panjang adalah seluas 552 hektar.

**Tabel 2.96**  
**Produksi Komoditas Pertanian Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018 – 2022 (ton dan ton/ha)**

No	Komoditas	2018		2019		2020		2021		2022	
		Produksi	Produktivitas	Produksi	Produktivitas	Produksi	Produktivitas	Produksi	Produktivitas	Produksi	Produktivitas
1.	Produksi Padi	7.816,7	4,6	8.690,7	5,5	8.554,6	5,8	8.628,6	6,3	10.468,0	8,0
2.	Produksi Jagung	329,7	7,6	162,7	7,5	179,2	7,5	186,5	7,7	157,5	8,8
3.	Produksi Cabe	1.711,60	9,80	1.488,40	9,54	930,50	12,50	693,47	9,35	708,14	10,61
4.	Produksi Terung	1.488,10	24,02	1.643,10	21,62	1.341,50	18,65	1.024,10	18,41	1.394,00	22,05
5.	Produksi Kakao	8,28	0,80	3,10	0,65	3,40	0,70	2,96	0,74	2,94	0,77

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, 2023

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan produksi padi pada Tahun 2022 yang disebabkan oleh adanya peningkatan produktivitas padi dibanding tahun sebelumnya. Adapun faktor yang mendorong peningkatan produktivitas ini adalah penggunaan benih unggul, pengolahan tanah yang baik, pemakaian pupuk berimbang, pengendalian hama dan penyakit tumbuhan dan perbaikan sistem pengairan (irigasi). Namun demikian, diperlukan upaya yang berkesinambungan agar produksi dan produktivitas padi ini tetap terjaga dan bahkan ditingkatkan melalui intensifikasi pertanian. Komoditi jagung juga mengalami penurunan produksi sebagai akibat turunnya luas panen, namun secara produktivitasnya meningkat melalui penerapan pemupukan berimbang. Untuk komoditi lainnya seperti cabai, yang merupakan salah satu komoditi penyumbang inflasi khususnya di Sumatera Barat, produksinya mengalami fluktuasi bahkan cenderung menurun. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya biaya produksi terutama biaya pupuk dan pestisida. Terjadinya alih komoditi yang ditanam petani ke komoditi bawang merah yang mulai marak ditanam oleh petani 2 tahun terakhir ini juga menjadi satu faktor penyebab turunnya produksi cabai.

Keterbatasan lahan di Padang Panjang menjadi salah satu alasan fokus pengembangan pertanian pada komoditi yang bernilai ekonomis tinggi seperti pertanian organik, tanaman hias dan komoditi lainnya yang menguntungkan bagi petani. Hal ini seiring dengan ditetapkannya Padang Panjang sebagai Kawasan Tanaman Hias di Sumatera Barat oleh Gubernur melalui Surat Keputusan

Gubernur Sumatera Barat Nomor 525-757-2021 tentang Penetapan Kawasan Pertanian Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk pertanian organik, saat ini sudah ada 2 kelompok tani yang memproduksi padi organik yang telah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) Sumatera Barat, dan diharapkan dapat kita pertahankan dan bahkan dikembangkan lagi di kelompok tani lainnya.

**ii. Pemanfaatan teknologi pertanian dan perikanan**

Dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas di sektor pertanian dan perikanan, Pemerintah Kota Padang Panjang telah memfasilitasi kelompok masyarakat petani, peternak dan pembudidaya serta pengolah hasil perikanan dengan berbagai macam teknologi anjuran seperti pemakaian bibit unggul, pupuk berimbang, pengolahan tanah yang baik, pemberantasan hama penyakit, serta pengolahan pasca panen dan pemasaran untuk di sektor pertanian, untuk sector perikanan teknologi budidaya ikan yang baik serta pengolahan hasil perikanan tambah dengan pemakaian berbagai alsintan, jajar legowo 4:1 serta jajar legowo 2:1 yang disampaikan oleh penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dalam bentuk kegiatan demplot dan kaji terap.

**Tabel 2.97  
Jumlah Teknologi Anjuran yang Telah Diterapkan Tahun 2018-2022**

No	Sub Sektor	Jumlah Teknologi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tanaman Pangan	1	-	-	-	-
2.	Hortikultura	12	-	2	1	1
3.	Perkebunan	-	-	-	-	-
4.	Peternakan	-	-	-	-	-
5.	Perikanan	-	-	-	-	1

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, 2023

Untuk setor perikanan dari tahun 2018-2022 ada 3 teknologi yang telah disampaikan kepada kelompok pembudidaya ikan dalam bentuk kegiatan kaji terap serta demplot disamping teknologi lainnya yang disampaikan oleh Penyuluh Perikanan. Selain itu disektor hortikultura dari tahun 2018-2022 sebanyak 32 paket teknologi yang telah disampaikan kepada kelompok tani melalui Penyuluh Pertanian dan kegiatannya berupa demplot serta kaji terap.

**iii. Pelaku Sektor Pertanian dan Perikanan**

Di Kota Padang Panjang alih fungsi lahan setiap tahun selalu terjadi dari lahan pertanian ke lahan non pertanian seperti perumahan. Namun minat masyarakat terhadap pertanian masih cukup tinggi. Ini ditandai dengan jumlah



kelompok usaha yang mengelola sektor pertanian dan perikanan setiap tahunnya selalu bertambah.

**Tabel 2.98**  
**Perkembangan Kelompok Usaha Pertanian Tahun 2018-2022**

No	Jenis usaha/ Komoditi	Kelompok Yang Mengusahakan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi	47	48	49	49	49
2	Palawija	-	-	-	-	-
3	Hortikultura					
	- Sayuran	39	41	41	44	49
	- Buah-buahan	-	-	-	-	-
	- Tanaman Hias	30	30	30	30	30
	- Biofarmaka	-	-	-	-	-
4	Peternakan					
	- Ternak besar	11	11	11	10	11
	- Unggas	-	-	-	2	2
5	Perikanan	30	35	39	41	41
6	Poklahsar	1	1	2	3	4
7	UP3HP	1	1	1	1	1
8	Perkebunan	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, 2023

Dari tabel di atas kelompok usaha pertanian komoditi padi tahun 2022 adalah 49 kelompok hanya mengalami kenaikan sebanyak 2 kelompok saja sejak tahun 2018 karena alih fungsi lahan. Sedangkan yang mengalami kenaikan adalah kelompok usaha sayuran dari 39 kelompok pada tahun 2018 menjadi 49 kelompok pada tahun 2022 yang difokuskan dilahan pekarangan.

Untuk kelompok usaha peternakan didominasi oleh usaha peternakan sapi perah dan sapi potong yang berjumlah 11 kelompok dan 2 kelompok yang mengusahakan unggas seperti ayam dan itik. Sedangkan kelompok usaha perikanan didominasi oleh kelompok pembudidaya perikanan sebanyak 41 kelompok dan kelompok usaha pengolahan perikanan sebanyak 4 kelompok.

Unit Pelayanan Pengembangan dan Pengolahan Hasil Pertanian (UP3HP) terdapat 1 kelompok dan kelompok usaha perkebunan sebanyak 3 kelompok yang tidak mengalami kenaikan seperti kelompok usaha lainnya.

Pemerintah Kota Padang Panjang berupaya untuk terus melakukan pembinaan dan pengembangan usaha pada masing-masing kelompok agar kelompok-kelompok tersebut terus aktif dan dapat mengembangkan usahanya masing masing sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan anggota kelompok.

**Tabel 2.99**  
**Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 2018-2022**

No	Sektor	Tenaga Kerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tanaman pangan	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752
2	Hortikultura	782	830	929	1.003	1.106
3	Perkebunan	73	73	73	73	73
4	Peternakan	125	125	133	133	152

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, 2023

Dari tabel di atas yang mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja adalah yang menggeluti sektor hortikultura dan peternakan karena pemeliharannya dan teknologi yang sederhanasera dengan waktu yang singkat dan harga yang cukup tinggi sehingga masyarakat lebih tertarik untuk mengusDataahkan di sektor ini.

Sementara itu untuk sektor tanaman pangan dan perkebunan jumlah tenaga kerja tidak mengalami kenaikan karena lahan masing-masing anggota kelompok terbatas sehingga hasil yang didapatkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri.

#### iv. Produktifitas Peternakan

Kota Padang Panjang merupakan salah satu daerah yang ditetapkan sebagai kawasan ternak Sapi Perah dari kementerian Pertanian diluar pulau jawa dan berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Barat. Sehingga potensi yang menjadi unggulan daerah dibidang peternakan yaitu Sapi Perah. Tidak hanya Sapi Perahnya saja namun juga semua ikutan dari hasil Sapi Perah menjadi potensi pendapatan bagi Peternak dan Unit Pengolahan Susu di Kota Padang Panjang.

Selain Sapi Perah Kota Padang Panjang telah memiliki brand tersendiri terkait Daging yang dihasilkan dari Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) Padang Panjang di mata masyarakat di Sumatera Barat khususnya dan Provinsi tetangga Umumnya, dimana daging Sapinya sangat terkenal enak dan diminati oleh masyarakat Sumatera Barat.

Sehingga Produksi Daging dan Susu Sapi Perah di Kota Padang Panjang menjadi perhatian oleh Pemerintah guna meningkatkan pendapatan Peternak dan yang bergerak di pengolahan serta pemasaran dua produk ini. Dari data 3 tahun belakangan ini, memang Populasi Ternak, produksi Susu dan Daging mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dikarenakan adanya wabah Corona dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak masyarakat.

Dari data Produksi dari tahun 2020, 2021 dan 2022 untuk ternak sapi (Sapi potong dan Sapi Perah) terlihat penurunan dengan populasi; 431 ekor, 417 dan 402 ekor. Sedangkan produksi daging Sapi ditahun 2020; 559.517 ton pertahun, untuk tahun 2021 sebanyak 715.431 ton pertahun, sementara untuk tahun 2022 hampir sama dengan tahun 2021.

Dalam hal pengendalian penyakit hewan menular maupun Zoonosis di Kota Padang Panjang, dari 3 tahun belakangan ini mampu ditekan dan seiring dengan itu adanya peningkatan dan semakin membaiknya kualitas kesehatan hewan ternak maupun hewan kesayangan di masyarakat Kota Padang Panjang.

Untuk Produk olahan dari Susu Murni sudah memiliki Izin Edar (MD) berupa produk susu Pasteurisasi varian rasa Coklat, Yougurt rasa srowbery, coklat. Telah memiliki 5 Izin Edar untuk produk susu Pasteurisasi dan Yougurt. Sehingga dengan adanya Izin Edar ini memberi peluang pemasaran lebih luas produk susu yang dihasilkan oleh Unit Pengolahan Susu di Kota Padang Panjang.

**d) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**

Sektor perdagangan merupakan sektor yang memberkan kontribusi tertinggi untuk PDRB Kota Padang Panjang. Secara umum kenaikan volume perdagangan Kota Padang Panjang menunjukkan trend positif walaupun laju pertumbuhannya sedikit melambat pada tahun 2021 pasca pandemi covid-19. Hal ini juga ditunjang dengan ketersediaan sarana prasarana distribusi perdagangan yang cukup memadai. Gambaran kinerja kondisi perdagangan Kota Padang Panjang 2018-2023 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.100**  
**Gambaran Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan dan Volume Kota Padang Panjang 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Pasar (Pasar Tradisional, modern,swalayan, kios, toko)	2	2	2	2	2
2.	Pasar Tradisional	2	2	2	2	2
3.	Pasar Lokal (Pusat Pertokoan)	0	0	0	0	0
4.	Pasar Swalayan	16	16	18	18	21
5.	Kaki lima	320	330	350	360	370
6.	Persentase Kenaikan nilai volume perdagangan	6.5	7.89	15.34	16.9	23

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, 2023

**e) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**

Kinerja urusan industri salah satunya dapat dilihat dari produktivas IKM (berdasarkan aset dan omset). Produktivitas IKM Kota Padang Panjang cenderung meningkat sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 kecuali tahun 2021 akibat pengaruh pandemi Covid-19 dimana pemberlakuan pembatasan aktivitas membuat banyak IKM yang terpuruk. Namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup tajam yang disebabkan oleh semakin intensifnya pembinaan dan pendampingan IKM serta maraknya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk. Gambaran perkembangan produktivitas IKM serta fasilitasi

yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang disajikan pada tabel. berikut:

**Tabel 2.101**  
**Perkembangan produktivitas IKM serta fasilitas yang dilakukan oleh**  
**Pemerintah Kota Padang Panjang 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Peningkatan produktivitas IKM (peningkatan asset dan omset)	3	4	5	3,56	20
2	Persentase IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikat dan standarisasi produk industri (sertifikat halal,MD,GMP.SNI dan Merk)	2	2.5	3	3,5	4

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, 2023

#### 4) Fokus layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

##### a) Sekretariat Daerah

Sebagai unsur pendukung, Sekretariat Daerah mempunyai indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Pelaporan, Nilai LPPD, Nilai IKM, Persentase jumlah paket lelang yang melalui elektronik, Persentase penyelesaian masalah hukum yang diproses secara non litigasi, Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/Badan zakat/wakaf, Persentase lembaga keagamaan yang aktif. Capaian kinerja pelaksanaan unsur sekretariat daerah selama periode tahun 2018 s.d 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.102**  
**Kinerja Unsur Kesekretariatan Daerah Tahun 2018 - 2022**

No	uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Pelaporan	8,88 (B)	8,95 (B)	8,95 (B)	9,12 (A)	-
2	Nilai SAKIP	54,17 (CC)	60,64 (CC)	60,80 (B)	61,95 (B)	-
3	Nilai LPPD	3,0972	3,0142	3,0891	3,15	
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM )	NA	85,68 (Sangat Baik)	88,62 (Sangat Baik)	96,13 (Sangat Baik)	95,33 (Sangat Baik)
5	Persentase jumlah paket lelang yang melalui elektronik	100	100	100	100	100

No	uraian	2018	2019	2020	2021	2022
6	Persentase produk hukum yang di sahkan dan disebar luaskan	100	100	100	100	100
7	Persentase aktivitas kegiatan keagamaan di Masjid		46,04	52,62	67,05	76,11
8	Persentase pencapaian kegiatan pembangunan		97,26	98,67	97,62	98,06
9	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan	Na	70	75	80	90
10	Nilai rata-rata kualitas pelayanan publik	80,39	3,45	3,90	3,93	4,35
11	Persentase masalah hukum masyarakat dan pemerintahan daerah yang dapat di selesaikan	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2023

Untuk indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Pelaporan, Nilai LPPD, dan Nilai IKM baru tersedia pada tahun 2021, karena menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

**b) Sekretariat DPRD**

Sekretariat DPRD menjalankan urusan pendukung, dengan indikator kinerja Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan, dan Persentase aspirasi masyarakat yang ditanggapi DPRD, dengan capaian indikator selama periode 2018 s.d 2022 sebagai berikut :

**Tabel 2.103**  
**Indikator Kinerja Unsur Kesekretariatan DPRD Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam	82,00	83,00	83,28	78,56	83

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	memfasilitasi kegiatan					

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang, 2023

## 5) Fokus Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

### a) Perencanaan

Sesuai dengan sasaran strategis daerah pada RPJMD tahun 2018-2022, maka untuk urusan perencanaan ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu Persentase pagu belanja langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat, Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD dan Persentase indikator RPJMD yang tercapai. Capaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat digambarkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.104**  
**Tabel Capaian Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2022**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah	-	60,71	57,50	51,51	68,75
2	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	75	78	80	83	83
3	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	63	65	65	70	80
4	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	Na	na	na	50 (12 OPD)	83 (16 OPD)
5	Persentase inovasi pelayanan publik yang dihasilkan	50	55	60	60	70

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tahun 2023

Untuk mengukur capaian kinerja perencanaan, maka mulai tahun 2018 menggunakan indikator baru sesuai dengan yang ada dalam Perubahan RPJMD tahun 2018-2023, indikator 1 dan 2 tidak digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan perencanaan pembangunan, sehingga Bappeda tidak lagi melakukan pengukuran pada indikator ini.

Dari data di atas, indikator Persentase Konsistensi Program RKPD terhadap Program RPJMD sudah konsisten seluruhnya, sedangkan pagu belanja yang mengakomodir usulan masyarakat menurun disebabkan adanya prioritas pembangunan pada program skala besar seperti pengadaan tanah dan fasilitas umum perkotaan. Indikator Persentase indikator RPJMD yang tercapai tahun 2020

hanya 80 % dan tahun 2021 sebesar 83% ini disebabkan adanya dampak wabah Covid-19 yang menyebabkan beberapa program tidak dapat dilaksanakan dan anggarannya difokuskan untuk penanganan wabah.

**b) Keuangan**

Urusan Penunjang keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan 3 indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Opini laporan keuangan Pemerintah Daerah, Penetapan Perda APBD tepat waktu, dan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.

Opini laporan keuangan pemerintah daerah selama lima tahun terakhir dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditargetkan pada minggu keempat bulan Desember pada tahun sebelum tahun anggaran (n-1). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD sebesar 14,50 persen pada tahun 2020, mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2021 karena dampak Covid-19. Capaian kinerja unsur keuangan dapat dijelaskan pada table berikut.

**Tabel 2.105**  
**Tabel Capaian Keuangan Pembangunan Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018-2022**

No	uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Opini laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Penetapan Perda APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah	14,40%	13,37%	14,50%	16,32%	15,91%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2023

**c) Kepegawaian**

**i. Kedisiplinan pegawai**

Permasalahan kepegawaian di Kota Padang Panjang diidentifikasi terkait dengan pelanggaran kewajiban pegawai untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang- undangan (ayat 4) dan menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS (ayat 6) pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Disamping itu Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 15 PP Nomor 45 Tahun 1990 walaupun bersifat personal juga nantinya mempengaruhi kinerja PNS secara tidak langsung. Untuk meningkatkan disiplin PNS ini, mulai tahun 2018 pemerintah Kota Padang panjang menerapkan sistem *Finger Print* (Sidik Jari) dalam absensi serta perhitungan sanksi potongan sesuai dengan Peraturan Walikota Padang

Panjang. Aplikasi ini dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, dan mulai tahun 2019. Untuk meningkatkan sistem tersebut dengan Aplikasi Penilaian Kinerja (**Aplikasi E TPP Padang Panjang**) dengan menerapkan pemberian tambahan penghasilan sesuai dengan kinerja.

Salah satu ukuran Penegakan disiplin pegawai pada Pemerintah Kota Padang Panjang diukur melalui 3 jenis pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yaitu pelanggaran berat, sedang dan ringan dengan konsekuensi hukuman juga bertingkat, berikut merupakan data tentang pelanggaran sesuai jenis pelanggaran yang terjadi kurun waktu tahun 2018-2022.

**Tabel 2.106**  
**Capaian Pelanggaran Disiplin ASN Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase pembinaan terhadap penyusunan SKP PNS	50	65	65	80	90
2	Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100
3	Jumlah aparatur yang memperoleh sertifikat aparatur berprestasi	-	-	-	9	-

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2023

**Tabel 2.107**  
**Data Hukuman Disiplin PNS Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	Jenis Hukuman Disiplin	Jumlah				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Hukuman Disiplin tingkat ringan					
	1 Teguran Lisan	20	1	1	2	9
	2 Teguran Tertulis	12	5	10	5	9
	3 Pernyataan Tidak Puas	6	0	4	0	2
		38	6	15	7	20
2	Hukuman Disiplin tingkat sedang					
	1 Penundaan KGB selama 1 (satu) Tahun	0	2	1	3	0
	2 Penundaan Kenaikan pangkat	1	2	0	1	0



No	Jenis Hukuman Disiplin	Jumlah				
		2018	2019	2020	2021	2022
	selama 1 (satu) tahun					
3	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	2	1	0	0	0
		3	5	1	4	0
3	Hukuman Disiplin tingkat Berat					
1	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	2	2	1	1	0
2	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	0	1	0	0	0
3	Pembebasan dari Jabatan	0	0	0	0	0
4	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	0	1	0	0	0
		2	4	1	1	0
<b>JUMLAH</b>		<b>43</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>20</b>

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun ketahun terjadi fluktuasi pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus dari 12 kasus pada tahun 2021 menjadi 20 kasus pada tahun 2022, hal ini mengindikasikan bahwa perlunya peningkatan dan pengawasan yang berkelanjutan terkait penegakan disiplin ASN.

**d) Pendidikan dan Pelatihan**

**i. Pengembangan Kapasitas Kepegawaian**

Pada tahun 2020, Kota Padang Panjang hanya melaksanakan Diklat Jumlah pejabat yang telah mengikuti Diklat Struktural (PIM II, PIM III dan PIM IV) sebanyak 14 orang , sementara diikuti dengan pegawai yang telah mengikuti tes uji kompetensi dan Diklat lainnya. Berikut jumlah pejabat yang telah mengikuti Diklat Struktural sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.108**  
**Tabel Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat Struktural**  
**Tahun 2018 – 2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Profesionalitas ASN	Na	65,82	65,93	70,05	76,51
2	Jumlah pejabat yang telah mengikuti Diklat Struktural (PIM II, PIM III dan PIM IV )	16	4	14	0	0
3	Persentase pejabat struktural yang telah lulus Diklat Struktural	16	1	0	0	-
3	Jumlah pegawai yang telah mengikuti tes uji kompetensi	100	476	0	0	-

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2023

Dari tabel terlihat bahwa jumlah pejabat yang mengikuti Diklat Struktural cukup fluktuatif, hanya sampai tahun 2020 terdapat 14 orang yang mengikuti Diklat struktural.

**Tabel 2.109**  
**Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional Tertentu**  
**Tahun 2018 – 2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Diklat Pengadaan barang dan jasa (PBJ)	0	0	0	56	
2	Pelatihan teknis Bendahara	0	0	0	33	
3.	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti Diklat Tugas dan Fungsi	0	0	0	0	120
4	Jumlah CPNS yang telah lulus latsar CPNS	0	0	0	0	132
5	Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu	72	80	3	0	

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan tersebut yang dilaksanakan selama tahun 2021, sebagaimana jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 selanjutnya tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 dan tanggal 27 Mei 2021 yang diikuti oleh pejabat eselon III dan fungsional;
- b. Pelatihan teknis Bendahara dilaksanakan tanggal 23 sampai dengan 25 Juni 2021 yang diikuti oleh fungsional umum;
- c. Sosialisasi Peraturan Kepegawaian, dilaksanakan tanggal 10 Desember 2021;

**e) Penelitian dan Pengembangan**

Dengan adanya Bidang Penelitian dan Pengembangan di Bappeda Kota Padang Panjang, maka kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan semakin ditingkatkan baik kuantitas dan pendanaannya. Namun selama tahun 2020 anggaran kegiatan untuk penelitian dan pengembangan direfocusing untuk penanganan wabah Covid-19, sehingga di tahun 2020 tidak dilakukan kegiatan penelitian, hanya dilakukan diseminasi terhadap penelitian-penelitian yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi yang ada di Padang Panjang, seperti dari ISI Padang Panjang.

**Tabel 2.110**  
**Jumlah Kerjasama Litbang yang berkelanjutan di Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pengambilan Kebijakan (%)	25	70	35	10	20
2	Capaian Angka Pengukuran Indeks Inovasi Daerah	NA	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Terinovatif

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tahun 2023

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan mencapai 25 % dan 70% yang melibatkan Perguruan Tinggi yang ada di Sumatera Barat seperti dari Universitas Andalas (UNAND) di Padang, sedangkan pada tahun 2020 dan tahun 2021 melaksanakan kerjasama dan LAN, sementara tahun 2022 kerjasama dengan ISI Padang Panjang

Untuk penyebarluasan atau pemanfaatan terhadap hasil riset/penelitian sudah diupayakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pengembangan melalui pemasyarakatan teknologi tepat guna yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

**6) Fokus layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

**a) Inspektorat daerah**

Capaian kinerja pelaksanaan urusan pengawasan di Kota Padang Panjang dapat dijelaskan melalui table berikut.

**Tabel 2.111**  
**Capaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah temuan BPK	11	26	6	10	

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
2	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti (TLHP)	48,30	64,50	69,90	79,22	-
3	Persentase OPD yang menyatakan puas atas pelayanan Inspektorat	Na	Na	Na	83	98
4	Level Maturitas SPIP	-	-	-	Level 2	Level 2
5	Level Kapabilitas APIP	-	-	-	Level 3	Level 3

Sumber : Inspektorat, Tahun 2023

Untuk penindaklanjutan temuan laporan hasil pemeriksaan meningkat dari tahun ke tahun kecuali tahun 2018 yang hanya mencapai 48,30%. Pada tahun 2021, jumlah TLHP yang ditindaklanjuti sudah mencapai 79,22%, ini membuktikan bahwa kinerja Inspektorat Kota Padang Panjang makin tahun makin meningkat.

## 7) Fokus Layanan Unsur Kewilayahan

### a) Kecamatan

Urusan kewilayahan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan. Gambaran kinerja Kecamatan Tahun 2018-2022 secara umum meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.112**

#### **Data capaian Kinerja Kecamatan 2018 – 2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	83.90	88.97	97.80	98.09
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	31.01	31.52	33.93	38.07	38.28

Sumber : Kecamatan Padang Panjang Timur dan Padang Panjang Barat, Tahun 2023

## 8) Fokus Layanan Unsur Pemerintahan Umum

### a) Kesatuan Bangsa dan Politik

Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik mencakup aspek ideologi bernegara (Pancasila), karakter dan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa, organisasi masyarakat, ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, serta kerukunan antar umat beragama. Semua aspek ini bersinergi dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dan bersatu padu berdasarkan ideologi Pancasila.

Pelaksanaan unsur kesatuan bangsa dan politik diupayakan untuk diwujudkan melalui program/ kegiatan. Pemahaman tentang wawasan kebangsaan dilakukan kepada masyarakat baik melalui pendidikan di sekolah ataupun pendidikan politik di luar sekolah dan secara mandiri (media massa). Disamping itu juga dilakukan Kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan, dimana kemitraan ini merupakan alternatif perpanjangan tangan pemerintah untuk meningkatkan pemahaman Warga Negara Indonesia tentang karakter dan wawasan kebangsaan serta penerapannya dalam kehidupan.

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum di Padang Panjang cukup baik, yang melebihi angka 50 persen. Hal ini menunjukkan sebagian besar Warga Kota Padang Panjang sudah melek terhadap arti penting hak suaranya dan turut serta memilih pemimpin wilayah dan wakil rakyat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.113**

#### **Tingkat capaian kinerja Pelaksanaan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Pemilihan Kepala Daerah (2018)	Pemilihan Legislatif (2019)	Pemilihan Presiden (2019)	Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur (2020)
1	Daftar Pemilih tetap	-	38.781	38.781	21.259
2	Jumlah org yg menggunakan hak pilih	25.725	20.332	31.979	21.259
3	Tingkat Partisipasi Pemilih pada PEMILU (%)		52,43	82,46	100,00

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2023

#### **2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH**

##### **A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Dari aspek ekonomi, Kota Padang Panjang memiliki *keunggulan komparatif* yaitu posisi yang strategis di persimpangan jalur lintas transportasi darat wilayah Sumatera bagian tengah. Keunggulan komparatif ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh *stakeholder* untuk mengoptimalkan perekonomian kota.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi di tingkat lokal, nasional dan regional terus mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga memberi dampak pada pergeseran struktur perekonomian kota Padang Panjang.

Sejak 2020, Kota Padang Panjang sebagaimana daerah lain di Indonesia terdampak oleh krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid 19. Mobilitas penduduk yang dibatasi praktis membuat berbagai lapangan usaha yang menopang kehidupan masyarakat terganggu. Memasuki tahun 2023, aktifitas ekonomi kota Padang Panjang mulai bergerak kembali. Namun masih tetap dibayang-bayangi berbagai resiko ekonomi seperti sisa pandemi Covid-19 dan resiko kondisi ekonomi 5 (lima) tahun ke depan.

Berikut gambaran perkembangan makro ekonomi Kota Padang Panjang dengan menggunakan beberapa model analisis antara lain: 1) *Klassen typology*, 2) *Location question (LQ) model*, dan 3) *Shift Share Analysis*.

##### **1) Pertumbuhan dan Struktur Perekonomian Utama**

Kota Padang Panjang dalam 15 tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi daerah yang mirip dengan dinamika pergerakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Dalam rentang waktu 2008-2022, sebetulnya sudah terjadi 3 kali *shock* ekonomi yang bersifat global. Respon yang terjadi di Kota Padang Panjang memang tidak separah yang terjadi di tingkat provinsi, nasional dan internasional. Namun dalam proses pemulihan terhadap dampak krisis tersebut, Kota Padang Panjang relatif lebih lambat dibandingkan provinsi dan nasional, sebagaimana dapat dijelaskan melalui Gambar berikut.

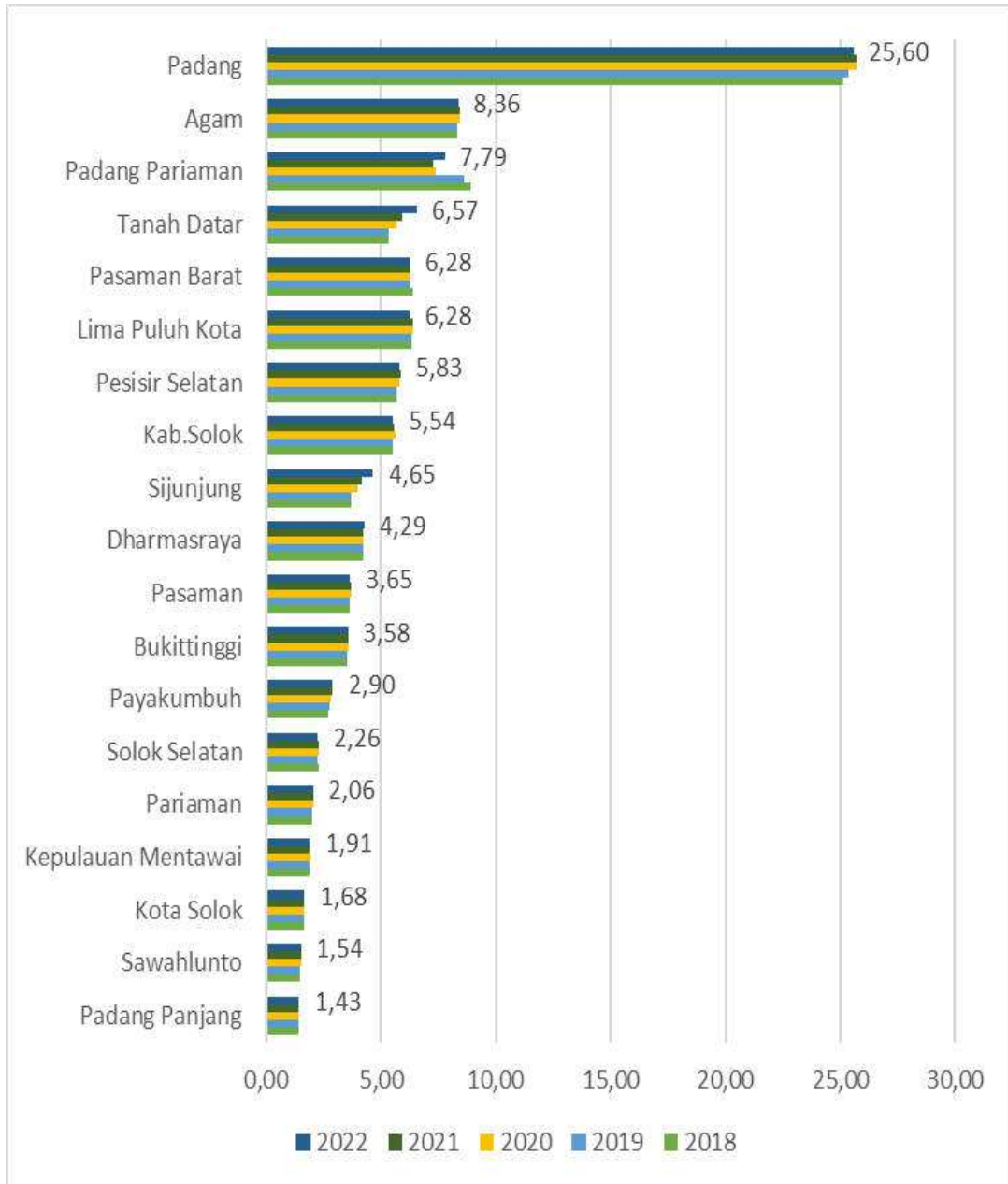
**Gambar 2.31**  
**Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang (yoy)**  
**dalam Dinamika Global Tahun 2008-2022**



*Keterangan: Data diolah*

Dari Gambar di atas terlihat bahwa struktur dan aktifitas ekonomi Kota Padang Panjang selama dua dekade terakhir berada dalam kategori aktifitas perekonomian lokal yang melayani kebutuhan internal ekonomi Padang Panjang dan wilayah sekitar. Sedangkan nilai tambah perekonomian kota Padang Panjang terhadap perkonomian Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir adalah sebesar 1,43 persen atau terendah di antara Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, sebagaimana terlihat pada Gambar berikut.

**Gambar 2.32**  
**Kontribusi PDRB Kab/Kota terhadap Perekonomian Sumatera Barat**  
**Tahun 2018-2022**



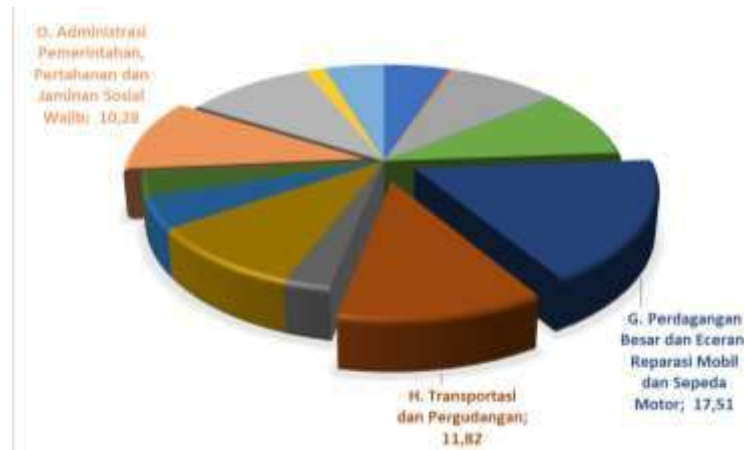
*Keterangan : Data diolah.*

Selanjutnya selama 10 tahun terakhir, terjadi transformasi struktural pada perekonomian Kota Padang Panjang. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Transportasi dan Pergudangan masih menjadi sektor andalan kota Padang Panjang walaupun mengalami penurunan kontribusi. Sedangkan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang juga merupakan Lapangan Usaha andalan masih memiliki kontribusi yang relatif tetap terhadap perekonomian Kota.

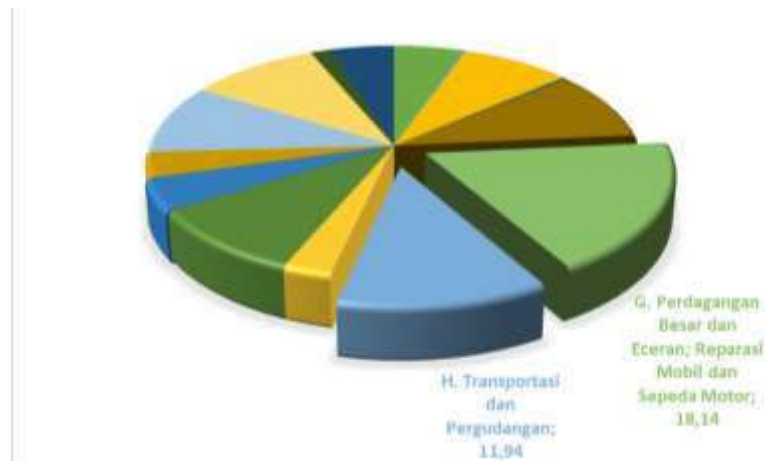


Di samping itu, Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang dianggap sebagai penciri ekonomi perkotaan tidak lagi menjadi sektor yang dominan dalam perekonomian Kota Padang Panjang pada 10 Tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dalam Gambar di bawah ini.

**Gambar 2.33**  
**Kontribusi Sektor Ekonomi Kota Padang Panjang 2021**



**Gambar 2.34**  
**Kontribusi Sektor Ekonomi Kota Padang Panjang 2022**



Sumber: BPS, Data diolah

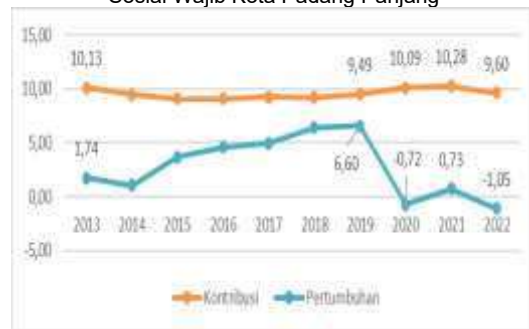
Gambar 2.34 a

Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha  
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan  
Sepeda Motor Kota Padang Panjang



Gambar 2.34 c

Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha  
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan  
Sosial Wajib Kota Padang Panjang



Gambar 2.34 b

Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha  
Transportasi dan Pergudangan Kota Padang Panjang



Gambar 2.34 d

Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri  
Pengolahan Kota Padang Panjang



Sumber: BPS, data di olah

Jika diasumsikan bahwa lapangan usaha utama perekonomian daerah adalah lapangan usaha yang memberikan kontribusi di atas 10 persen terhadap nilai tambah perekonomian daerah, maka terlihat kecenderungan yang terus menurun dari kontribusi masing-masing lapangan usaha utama di Kota Padang Panjang (Gambar 2.29a-d). Sampai tahun 2022 Lapangan Usaha Industri Pengolahan bahkan mengalami penurunan kontribusi hingga di bawah 10 persen terhadap PDRB Kota Padang Panjang. Permasalahan yang sama juga dihadapi Provinsi Sumatera Barat dalam 1 dekade terakhir. Berikut gambaran perkembangan makro ekonomi Kota Padang Panjang dengan menggunakan beberapa model analisis antara lain: 1) Klassen typology, 2) Location question (LQ) model, dan 3) Shift Share Analysis.

## 2) Analisis Tipologi Klassen

Secara umum, Tipologi Klassen juga dapat digunakan sebagai alat analisis terhadap pola dan struktur masing-masing sektor ekonomi suatu daerah. Berdasarkan hasil analisis menggunakan data PDRB Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat ditemukan hasil sebagai berikut:

**Tabel 2.114**  
**Hasil Analisis Perekonomian Kota Padang Panjang**  
**Menggunakan Tipologi Klassen**

Kelompok Kategori Lapangan Usaha	2013 - 2017	2018-2022
<p><b><u>Q1: Sektor Prima</u></b> <math>y_{i,1} &gt; y_{i,2}</math> dan <math>r_{i,1} &gt; r_{i,2}</math></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri Pengolahan</li> <li>• Konstruksi</li> <li>• Jasa Keuangan dan Asuransi</li> <li>• Jasa Pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportasi dan Pergudangan.</li> <li>• Jasa Pendidikan</li> <li>• Jasa Lainnya</li> </ul>
<p><b><u>Q2: Sektor Berkembang</u></b> <math>y_{i,1} &lt; y_{i,2}</math> dan <math>r_{i,1} &gt; r_{i,2}</math></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</li> <li>• Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</li> <li>• Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</li> <li>• Transportasi dan Pergudangan</li> <li>• Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</li> <li>• Informasi dan Komunikasi</li> <li>• Real Estate</li> <li>• Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</li> <li>• Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</li> <li>• Jasa lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;</li> <li>• Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.</li> <li>• Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.</li> <li>• Informasi dan Komunikasi</li> <li>• <b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b></li> <li>• Real Estate</li> <li>• Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</li> </ul>
<p><b><u>Q3: Sektor Potensial</u></b> <math>y_{i,1} &gt; y_{i,2}</math> dan <math>r_{i,1} &lt; r_{i,2}</math></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertambangan dan Penggalian</li> <li>• Pengadaan Listrik dan Gas</li> <li>• Jasa Perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan</b></li> </ul>

Kelompok Kategori Lapangan Usaha	2013 - 2017	2018-2022
<p><b><u>Q4: Sektor Tertinggal</u></b></p> <p><math>y_{i,1} &lt; y_{i,2}</math> dan <math>r_{i,1} &lt; r_{i,2}</math></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pertambangan dan Penggalian</b></li> <li>• <b>Industri Pengolahan</b></li> <li>• <b>Pengadaan Listrik dan Gas</b></li> <li>• <b>Konstruksi</b></li> <li>• <b>Jasa Perusahaan.</b></li> <li>• <b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b></li> </ul>

Keterangan:

$y_{i,t}$  adalah rata-rata kontribusi sector  $i$  di region  $t$ ,  $r_{i,1}$  adalah rata-rata pertumbuhan sector  $i$  di region  $t$ ,  $t$  adalah region (1= Kota Padang Panjang, 2=Provinsi Sumatera Barat),  $i$  adalah sector ekonomi dalam PDRB. Warna merah=terjadi penurunan kelompok katengori, warga hijau, terjadi peningkatan kelompok kategori, dan warna hitam adalah posisi kategori yang tetap

Tabel diatas memperlihatkan perubahan pola pertumbuhan dan struktur ekonomi Kota Padang Panjang dengan membandingkan PDRB Kota Padang Panjang dengan Sumatera Barat dalam dua fase, yaitu fase 2013-2017 dan 2018-2022. Hasil analisis ini membagi lapangan-lapangan usaha yang ada ke dalam 4 kelompok, yaitu : Prima, Berkembang, Potensial dan Tertinggal

- **Lapangan Usaha Prima:** Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan dan Jasa lainnya tampil menjadi Lapangan Usaha Prima baru di Kota Padang Panjang. Di samping itu, Lapangan Usaha Pendidikan bertahan sebagai Lapangan Usaha Prima di Kota Padang Panjang pada fase 2018-2022.
- **Lapangan Usaha Berkembang,** Lapangan Usaha yang bertahan sebagai Lapangan Usaha berkembang adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Real Estate dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sedangkan Lapangan Usaha Jasa keuangan dan asuransi baru masuk di posisi ini setelah sebelumnya menempati posisi prima dalam perekonomian Kota Padang Panjang. Hal ini adapat diartikan bahwa kebijakan pengembangan Lapangan Usaha Jasa keuangan dan Asuransi di Kota Padang Panjang belum mampu menjadikan Lapangan Usaha tersebut bertahan pada posisi prima, bahkan turun posisi 1 tingkat menjadi Lapangan Usaha yang Berkembang.

- **Lapangan Usaha Potensial**, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan dalam periode 2018-2022 turun kelas dari Lapangan Usaha Berkembang menjadi Lapangan Usaha Potensial. Temuan ini menjelaskan bahwa dalam 1 dekade terakhir bahwa Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan mengalami tekanan yang cukup kuat dari Lapangan Usaha lainnya. Hal ini salah satunya disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian ke Lapangan Usaha lainnya yang tidak sebanding dengan peningkatan nilai produksi yang diperoleh melalui intensifikasi pertanian.
- **Sektor Tertinggal**: Lapangan Usaha yang tertinggal dalam periode 2018-2022 adalah Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Jasa Perusahaan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Meskipun pada periode 2013-2017 kategori Lapangan Usaha yang tertinggal tidak ditemukan. Untuk mendorong Lapangan Usaha ini agar setidaknya berada pada posisi potensial membutuhkan kebijakan perencanaan Kota secara proporsional dalam untuk Lapangan Usaha yang bersangkutan.

### 3) Analisis Lapangan Usaha Unggulan

Penentuan potensi ekonomi suatu daerah dapat dilakukan dengan menggunakan 3 indikator utama yaitu: 1) Koefisien Lokasi, 2) Laju Pertumbuhan Produksi, dan 3) Kontribusi dalam perekonomian daerah. Penggabungan ketiga indikator ini dapat menentukan tingkat atau besaran potensi ekonomi suatu daerah.

Koefisien Lokasi (Location Quotien/LQ) merupakan teknik analisis yang didasarkan kepada tingkat daya saing daerah dengan menggunakan tingkat keuntungan komparatif. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan pembangunan daerah lebih efisien serta mempunyai daya saing. Pola pembangunan ini sangat bagus terutama dalam menghadapi tantangan dan persaingan global dewasa ini. Berdasarkan hasil analisis terhadap PDRB Kota Padang Panjang dan membandingkannya dengan PDRB Provinsi Sumatera Barat maka dapat ditemukan hasil analisis sebagai berikut :

**Tabel 2.115**  
**Analisis Lapangan Usaha Unggulan Kota Padang Panjang 2018-2022**

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	BU	BU	BU	BU	BU
B. Pertambangan dan Penggalian	BU	BU	BU	BU	BU
C. Industri Pengolahan	U	U	BU	BU	BU
D. Pengadaan Listrik dan Gas	BU	BU	BU	BU	BU

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	U	U	U	U	U
F. Konstruksi	U	BU	BU	BU	BU
G. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil dan Spd Motor	U	U	U	U	U
H. Transportasi dan Pergudangan	U	U	U	U	U
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	U	U	U	U	U
J. Informasi dan Komunikasi	U	U	U	U	U
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	U	U	U	U	U
L. Real Estate	U	U	U	U	U
M, N Jasa Perusahaan	BU	BU	BU	BU	BU
O. Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	U	U	U	U	U
P. Jasa Pendidikan	U	U	U	U	U
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	BU	BU	BU	BU	BU
Jasa Lainnya	U	U	U	U	U

Keterangan : U=Unggul dan BU=Belum Unggul jika dibandingkan secara aggregate Sumatera Barat

Tabel di atas memperlihatkan bahwa jika dibandingkan dengan agregasi nilai tambah masing-masing sektor di Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2018-2022, status Lapangan Usaha Unggul di Kota Padang Panjang tidak banyak mengalami perubahan, kecuali Lapangan Usaha Industri Pengolahan. Lapangan Usaha Industri Pengolahan sempat menjadi Lapangan Usaha unggul pada tahun 2019, namun kembali menjadi Bukan Unggulan sejak tahun 2020. Begitu juga dengan Lapangan Usaha Konstruksi yang sejak sebelum pandemi Covid-19 telah keluar dari keunggulan dibandingkan dengan kondisi yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

#### 4) Analisis Pertumbuhan Regional

Analisis pertumbuhan ekonomi regional dilakukan dengan menggunakan model *shift share* yang merupakan sebuah model yang dapat menganalisis faktor penentu pertumbuhan ekonomi regional melalui metode *decomposition* (penguraian) terhadap peningkatan nilai tambah produksi masing-masing Lapangan Usaha. Model ini dibangun oleh 3 komponen utama yaitu:

- Regional Share*: pertumbuhan ekonomi daerah karena pengaruh faktor luar baik karena pertumbuhan ekonomi nasional dan antar daerah;
- Proportional Shift*: pertumbuhan ekonomi karena daerah memprioritaskan pada sektor yang bertumbuh cepat (unggul); dan
- Differential Shift*: pertumbuhan ekonomi yang terjadi karena daerah

mempunyai potensi ekonomi khusus seperti sumberdaya alam dan sebagainya. Berdasarkan hasil analisis ditemukan hal-hal sebagai berikut:

**Tabel 2.116**  
**Analisis Pertumbuhan Regional Kota Padang Panjang**

Sektor Ekonomi	Komponen Pertumbuhan Proporsional	Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Tumbuh Lambat	Memiliki Daya Saing
B. Pertambangan dan Penggalian	Tumbuh Lambat	<b>Belum Berdaya Saing</b>
C. Industri Pengolahan	Tumbuh Lambat	<b>Belum Berdaya Saing</b>
D. Pengadaan Listrik dan Gas	Tumbuh Lambat	Memiliki Daya Saing
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Tumbuh Lambat	Memiliki Daya Saing
F. Konstruksi	<b>Tumbuh Cepat</b>	<b>Belum Berdaya Saing</b>
G. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil dan Spd Motor	<b>Tumbuh Cepat</b>	<b>Belum Berdaya Saing</b>
H. Transportasi dan Pergudangan	Tumbuh Lambat	Memiliki Daya Saing
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Tumbuh Lambat	Memiliki Daya Saing
J. Informasi dan Komunikasi	<b>Tumbuh Cepat</b>	<b>Belum Berdaya Saing</b>
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	<b>Tumbuh Cepat</b>	Memiliki Daya Saing
L. Real Estate	<b>Tumbuh Cepat</b>	<b>Belum Berdaya Saing</b>
M, N Jasa Perusahaan	Tumbuh Lambat	<b>Belum Berdaya Saing</b>
O. Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	<b>Tumbuh Cepat</b>	<b>Belum Berdaya Saing</b>
P. Jasa Pendidikan	<b>Tumbuh Cepat</b>	Memiliki Daya Saing
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	<b>Tumbuh Cepat</b>	Memiliki Daya Saing
Jasa Lainnya	<b>Tumbuh Cepat</b>	Memiliki Daya Saing

Sumber : Data diolah

Kesimpulan dari analisis dari model *shift share* di atas adalah :

- Lapangan Usaha dengan pertumbuhan cepat dan memiliki daya saing adalah Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya .
- Lapangan Usaha dengan pertumbuhan lambat namun memiliki daya saing adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Transportasi dan Pergudangan; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
- Lapangan Usaha dengan pertumbuhan cepat namun belum memiliki daya saing adalah Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor; Informasi dan Komunikasi; Real Estate; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib.

- Lapangan Usaha dengan pertumbuhan lambat dan belum memiliki daya saing adalah Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; dan Jasa Perusahaan.

#### 5) Analisis Komprehensif dan Analisis Kebutuhan Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi sektor dalam PDRB Kota Padang Panjang dan setelah dilakukan perbandingan yang sama terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Barat dalam menentukan Lapangan Usaha prima, berkembang, potensial dan tertinggal (Analisis Tipologi Klassen), Lapangan Usaha Unggulan (LQ), Lapangan Usaha Tumbuh dan Berdaya Saing (Shift Share) maka didapat rangkuman sebagai berikut:

**Tabel 2.117**  
**Kompilasi Hasil Analisis Model Tipologi Klassen, LQ dan Shift Share**  
**Kota Padang Panjang**

Lapangan Usaha	Klassen	LQ	KPP	KPPW	Catatan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Sektor Potensial	Belum Unggul	Tumbuh Lambat	Memiliki Daya Saing	
B. Pertambangan dan Penggalian	Sektor Tertinggal	Belum Unggul	Tumbuh Lambat	Belum Berdaya Saing	<b>Perlu Perhatian Khusus</b>
C. Industri Pengolahan	Sektor Tertinggal	Belum Unggul	Tumbuh Lambat	Belum Berdaya Saing	<b>Perlu Perhatian Khusus</b>
D. Pengadaan Listrik dan Gas	Sektor Tertinggal	Belum Unggul	Tumbuh Lambat	Memiliki Daya Saing	
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Sektor berkembang	Unggulan	Tumbuh Lambat	Memiliki Daya Saing	
F. Konstruksi	Sektor Tertinggal	Belum Unggul	Tumbuh Cepat	Belum Berdaya Saing	
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Sektor berkembang	Unggulan	Tumbuh Cepat	Belum Berdaya Saing	



Lapangan Usaha	Klassen	LQ	KPP	KPPW	Catatan
H. Transportasi dan Pergudangan	Sektor maju	Unggulan	Tumbuh Lambat	Memiliki Daya Saing	
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Sektor berkembang	Unggulan	Tumbuh Lambat	Memiliki Daya Saing	
J. Informasi dan Komunikasi	Sektor berkembang	Unggulan	Tumbuh Cepat	Belum Berdaya Saing	
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	Sektor berkembang	Unggulan	Tumbuh Cepat	Memiliki Daya Saing	
L. Real Estate	Sektor berkembang	Unggulan	Tumbuh Cepat	Belum Berdaya Saing	
M,N Jasa Perusahaan	Sektor Tertinggal	Belum Unggul	Tumbuh Lambat	Belum Berdaya Saing	<b>Perlu Perhatian Khusus</b>
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Sektor berkembang	Unggulan	Tumbuh Cepat	Belum Berdaya Saing	
P. Jasa Pendidikan	Sektor maju	Unggulan	Tumbuh Cepat	Memiliki Daya Saing	<b>Luar Biasa</b>
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Sektor Tertinggal	Belum Unggul	Tumbuh Cepat	Memiliki Daya Saing	
R,S,T,U Jasa Lainnya	Sektor maju	Unggulan	Tumbuh Cepat	Memiliki Daya Saing	<b>Luar Biasa</b>

Keterangan: Data diolah

Tabel diatas menggambarkan tentang Lapangan Usaha-Lapangan Usaha yang ada di Kota Padang Panjang dibandingkan dengan kondisi *aggregate* Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat.

Meskipun Kota Padang Panjang dari segi luas wilayah tergolong kecil dibandingkan dengan Kota lain di Provinsi Sumatera Barat, namun Kota ini memiliki keunggulan komparatif wilayah yang belum teroptimalkan dengan baik dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan kebijakan pembangunan kota yang berbasis kepada ciri kota pada umumnya dengan fokus kebijakan yang mengarah kepada perubahan perekonomian global. Perubahan perekonomian global ini mengisyaratkan bahwa perekonomian kota sudah semestinya berbasis digital dan berbasis system informasi yang handal.

Berdasarkan analisis dengan 3 pendekatan analisis di atas, ditambah dengan pertimbangan demografis, sosiologis, dan politis maka terdapat 3

lapangan usaha unggulan yang layak dikembangkan lebih jauh dan pada gilirannya diharapkan dapat menggerakkan perekonomian Kota Padang Panjang dalam beberapa tahun ke depan. Berikut lapangan usaha unggulan Kota Padang Panjang yang bisa dijadikan pedoman dalam pengambilan kebijakan.

**a) Pertanian, Kehutanan, peternakan dan Perikanan**

Lapangan Usaha ini pada dasarnya bukan menjadi penciri bagi sebuah kota dengan luas lahan yang sangat terbatas. Namun Kota Padang Panjang memiliki lahan yang subur dan berada pada iklim yang sejuk sehingga bagaimanapun sektor ini tetap pantas dipertimbangkan. Kebutuhan kebijakan yang diperlukan untuk pengembangan Lapangan Usaha ini adalah:

- Intensifikasi pertanian, peternakan dan perikanan wilayah secara konsisten.
- Membatasi dan menetapkan aturan untuk melarang konversi lahan pertanian menjadi kebutuhan lahan non pertanian lainnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Meningkatkan nilai tukar petani dan peternak terhadap produk masing-masing agar tetap berusaha di sektor bersangkutan.

**b) Lapangan Usaha Industri Olahan**

Lapangan Usaha ini merupakan salah satu penciri dari daerah perkotaan. Kota dianggap memiliki kehidupan apabila memiliki industri di wilayahnya. Berdasarkan hasil temuan yang ada dalam kajian ini Lapangan Usaha Industri Kota Padang Panjang dalam 5 tahun terakhir dikategorikan turun peringkat dari prima menjadi berkembang. Selanjutnya, lapangan usaha ini teridentifikasi belum unggul dengan pertumbuhan lambat dan belum memiliki daya saing ekonomi. Dengan demikian Lapangan Usaha ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dalam rangka mengembalikan ciri daerah perkotaan. Kebutuhan kebijakan yang diperlukan untuk pengembangan Lapangan Usaha ini adalah :

- Menyusun Roadmap Lapangan Usaha Industri Pengolahan dalam mengelola sumberdaya pertanian yang ada di wilayah Kota Padang Panjang dan wilayah sekitar kota untuk melakukan pengembangan Lapangan Usaha Industri yang berbasis Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
- Menaikan kelas Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kota Padang Panjang dari tertinggal menjadi berkembang dalam 3 tahun ke depan.
- Membangun system informasi UMKM Kota Padang Panjang berbasis digital agar dapat diakses secara real time bagi pengambil kebijakan daerah.

**c) Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**

Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan penciri utama dari sebuah kota termasuk Kota Padang

Panjang. Kontribusi lapangan usaha ini sampai tahun 2021 adalah yang tertinggi di dibandingkan lapangan usaha lain, yaitu 17,51%, namun mengalami penurunan kontribusi terhadap perekonomian Kota Padang Panjang dari tahun ke tahun. Mencermati kondisi Lapangan Usaha yang berstatus berkembang dan belum memiliki daya saing maka diperlukan beberapa kebijakan sebagai berikut:

- Menyediakan fasilitas perdagangan yang melayani kebutuhan internal masyarakat kota dan wilayah sekitar serta kebutuhan masyarakat yang melintasi Kota Padang Panjang untuk dapat melakukan transaksi perdagangan di Kota Padang Panjang.
- Meningkatkan kolaborasi Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dengan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan dan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum agar memiliki kontribusi yang saling menunjang satu sama lainnya.

**d) Lapangan Usaha Pendidikan**

Kota Padang Panjang memiliki nilai tambah Lapangan Usaha Pendidikan yang cukup mapan dalam 10 tahun terakhir. Namun permasalahan yang ditemukan adalah kontribusi Lapangan Usaha ini belum dominan terhadap PDRB Kota Padang Panjang (9,89% pada tahun 2022). Guna meningkatkan peran Lapangan Usaha Pendidikan ini semakin baik di Kota Padang Panjang diperlukan beberapa kebijakan strategis antara lain adalah:

- Kolaborasi Lapangan Usaha Pendidikan dengan Lapangan Usaha Industri Pengolahan untuk menghasilkan dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi Lapangan Usaha Pendidikan dan Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang melibatkan dunia Pendidikan.
- Membangun kolaborasi Lapangan Usaha Pendidikan dan Lapangan Usaha Perdagangan.
- Membangun kolaborasi Lapangan Usaha Pendidikan dan pertanian masyarakat.
- Membangun kolaborasi Lapangan Usaha Pendidikan dan Lapangan Usaha Transportasi.
- Membangun kolaborasi Lapangan Usaha Pendidikan dan Lapangan Usaha Komunikasi dan Informasi.

**e) Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan**

Berkembangnya Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan di Kota Padang Panjang tidak terlepas dari kebutuhan dan tingkat layanan yang diberikan Lapangan Usaha ini yang berbasis digital kepada masyarakat. Tumbuh dan berkembangnya Lapangan Usaha ini perlu dimanfaatkan secara optimal oleh sektor ekonomi potensial dan berkembang lainnya di Kota Padang Panjang. Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang berkembang di Kota

Padang Panjang adalah Lapangan Usaha Transportasi Jasa Layanan Kendaraan baik roda dua maupun roda empat untuk pengangkutan orang. Guna bisa mengembangkan Lapangan Usaha penciri kota lainnya seperti perdagangan, dan industri pengolahan, maka Lapangan Usaha ini perlu berkolaborasi dengan kebutuhan kebijakan sebagai berikut:

- Membangun kolaborasi Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan dengan Lapangan Usaha Perdagangan.
- Membangun kolaborasi Lapangan Usaha Transportasi dengan sector Industri pengolahan dalam menyediakan saja layanan mobilitas input dan output produksi.
- Membangun kolaborasi Lapangan Usaha Transportasi dengan sector akomodasi dan penyediaan jasa makan minum melalui pengantaran makanan, minuman, dan sebagainya.

#### **f) Lapangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**

Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan salah satu penciri dari daerah perkotaan. Kota dianggap memiliki kehidupan apabila memiliki Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di wilayahnya, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kota Padang Panjang dalam 5 tahun terakhir dikategorikan Maju dari daerah lain di Sumatera Barat, memiliki daya saing, keunggulan, dengan pertumbuhan yang lambat. Dengan demikian lapangan usaha ini berpotensi dikembangkan lebih lanjut sehingga mencerminkan ciri daerah perkotaan, khususnya Kota Padang Panjang yang merupakan kota perlintasan, kota perdagangan dan jasa, serta Kota Wisata.

Kebijakan yang diperlukan di lapangan usaha ini adalah:

- Pengaturan tata ruang yang jelas.
- Penyederhanaan regulasi perizinan.
- Fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha.

Menaikan pertumbuhan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dari tumbuh lambat menjadi tumbuh cepat dalam 5 tahun ke depan dengan cara mengkolaborasikan dengan Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Lapangan Transportasi dan Pergudangan, dan Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi.

#### **B. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur**

Fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di suatu daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat daya saing daerah.

### 1) Ketersediaan Fasilitas listrik

Ketersediaan daya listrik Kota Padang Panjang sangat memadai untuk pengembangan. Hal ini terlihat dari masih cukup tingginya *idle capacity* (berkisar diangka lebih kurang 30 persen) bahkan sampai dengan tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.118**  
**Ketersediaan Daya Listrik di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi Listrik (KWH)	66.839.892	69.064.661	69.927.768	72.927.075	74.471.013
2	Daya listrik terpasang (KWH)	45.908.825	46.431.800	48.906.850	51.573.200	53.072.212
3	Idle capacity	20.931.067	22.632.861	21.020.918	21.353.875	21.398.800

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2022

### 2) Ketersediaan fasilitas perdagangan dan jasa

Sebagai salah satu Kota yang berada koridor utama Padang-Pekanbaru, Padang Panjang memiliki berbagai fasilitas yang memiliki daya tarik bagi orang/wisatawan untuk berkunjung, baik untuk sekedar mampir atau pun menginap. Adapun beberapa fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.119**  
**Perkembangan Fasilitas Akomodasi dan Makan Minum di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah akomodasi	36	37	53	44	44
2	Jumlah kamar	397	411	481	450	450
3	Jumlah tempat tidur	371	447	516	506	506
4	Jumlah rumah makan dan restoran	81	81	81	85	88

Sumber : BPS, Tahun 2023

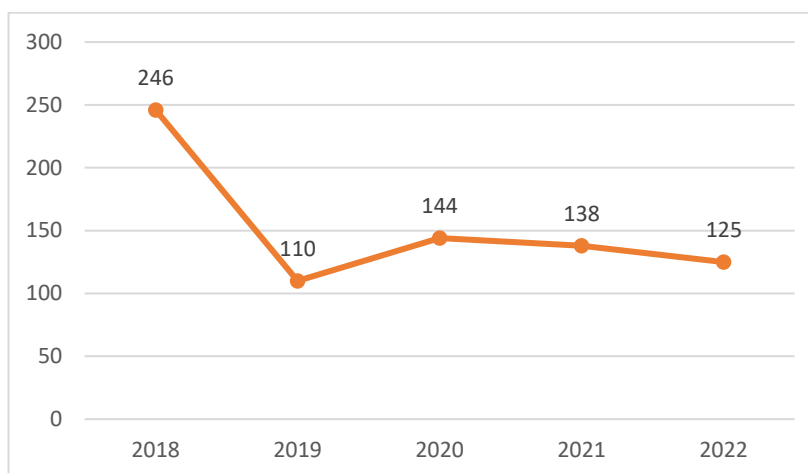
## C. Fokus Iklim Investasi

### 1) Angka Kriminalitas

Stabilitas keamanan menjadi salah satu aspek penting daya saing daerah. Daerah dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang lebih baik akan memiliki daya saing ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini karena faktor keamanan menjadi prasyarat bagi dunia usaha dan masyarakat pada umumnya untuk menjalankan

aktivitas ekonomi dan sosial. Berdasarkan data lima tahun terakhir, jumlah kejahatan yang dilaporkan yang terjadi di wilayah Kota Padang Panjang menunjukkan angka yang cenderung turun kecuali pada tahun 2020. Tahun 2018, jumlah kejahatan yang dilaporkan mencapai 246 kasus, tahun 2019 turun menjadi 110 kasus. Namun di tahun 2020 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat menjadi 144 dan kembali turun di tahun 2021 berkurang menjadi 138 kasus dan 2022 menjadi 125 kasus (Sumber: BPS, PPDA Tahun 2022).

**Gambar 2.35**  
**Perkembangan Jumlah Kejahatan yang dilaporkan terjadi di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**



Sumber : Satpol PP Damkar, 2023 diolah

## 2) Jumlah Demonstrasi

Kota Padang Panjang adalah kota yang relatif aman. Selama tahun 2021 tidak ada gejolak sosial kemasyarakatan yang mengganggu aktifitas pembangunan dan investasi. Ini mengindikasikan beberapa hal. Pertama, penyelenggaraan layanan publik sudah relatif mampu memberikan kepuasan pada tingkat yang memadai kepada masyarakat. Kedua, media penyampaian keluhan, kritik dan masukan dari masyarakat sudah tersedia cukup, dapat diakses dengan baik, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari seluruh lapisan dan mendapat respon yang cukup memuaskan dari unsur Pemerintah termasuk DPRD Kota Padang Panjang. Ketiga, hal ini juga mencerminkan bahwa penegakan hukum berjalan cukup baik dan transparan di Kota Padang Panjang. Hasilnya adalah tingkat kepercayaan masyarakat kepada Lembaga yang ada cukup tinggi, sehingga jika terdapat hal-hal yang menyinggung rasa keadilan masyarakat tidak perlu disampaikan dengan cara demonstrasi yang beresiko mengganggu ketertiban umum dan mengurangi kepercayaan investor.

### 3) Perizinan dan Pelayanan untuk Investasi

Investasi merupakan salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan output dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mengingat pentingnya peran investasi maka Pemerintah Kota Padang Panjang terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif untuk menarik minat investor. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Selama periode Tahun 2018-2022 perkembangan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.119**  
**Perkembangan Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Menurut**  
**Skala Usaha di Kota Padang Panjang, 2018 - 2022**

Tahun	Skala Usaha			Jumlah
	Kecil	Menengah	Besar	
2018	127	5	1	133
2019	187	1	-	188
2020	45	54	2	101
2021	36	16	2	54
2022	1013	-	-	1013

Sumber : DPMPSTSP Kota Padang Panjang, 2023

Pada tahun 2020 dan 2021 realisasi investasi di Kota Padang Panjang menunjukkan angka yang cukup menggembirakan dan cenderung meningkat. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.220**  
**Nilai Investasi dan Jumlah Investor di Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai Investasi (milyar)	3,85	17,567	26.590	14.381	30.200
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	4	26	10	24	20

Sumber : DPMPSTSP Kota Padang Panjang, 2023

Pada tanggal 26 September 2017 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Sesuai dengan peraturan tersebut, setiap pengusaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang juga berfungsi sebagai Tanda Daftar

Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan akses kepabeanan. Dengan adanya Perpres ini, sistem pendaftaran atau permohonan perizinan usaha lebih disederhanakan, Pengusaha bisa mengajukan pembuatan NIB dengan sistem *Online Single Submission* (OSS). Hingga Desember Tahun 2022 ini sudah terdapat 1155 perusahaan di Kota Padang Panjang yang memiliki NIB. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.221**  
**Jumlah Perusahaan menurut Skala Resiko yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sd. Desember 2022**

No	Skala Resiko	Jumlah Perusahaan
1	Rendah	875
2	Menengah Rendah	126
3	Menengah Tinggi	112
4	Sedang	42
	TOTAL	1155

Sumber : DPMPSTSP Kota Padang Panjang, 2022

#### **D. Fokus Sumber Daya Manusia**

##### **1) Kualitas Tenaga Kerja**

Kualitas tenaga kerja mencakup keahlian atau kemampuan yang dimiliki tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya yang salah satu indikatornya dapat dilihat dari pendidikan formal yang dimiliki masyarakatnya. Persentase penduduk lulusan SLTA ke atas di Kota Padang Panjang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa daya saing penduduk Kota Padang Panjang terus meningkat dari waktu ke waktu.

**Tabel 2.222**  
**Persentase Angkatan Kerja Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang ditamatkan Tahun 2018-2022**

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Angkatan Kerja</b>					
<= SD	3815	3458	3701	3974	4205
SMP	3310	4109	4863	4064	3347
SMA	10742	11399	11103	10671	10179
PT	6413	6897	7952	7802	8441
<b>Angkatan Kerja Bekerja</b>					
<= SD	3685	3347	3414	3826	4205
SMP	3171	4008	4624	4064	3151
SMA	10091	10800	10147	9959	9683



Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2018	2019	2020	2021	2022
PT	6052	6584	7440	7363	7865
<b>Persentase</b>					
<= SD	96,59	96,79	92,25	96,28	100,00
SMP	95,80	97,54	95,09	100,00	94,14
SMA	93,94	94,75	91,39	93,33	95,13
PT	94,37	95,46	93,56	94,37	93,18

Sumber: BPS Kota Padang Panjang, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata Angkatan kerja yang bekerja berdasarkan tingkat Pendidikan yang ditamatkan hampir 100 persen bekerja, yakni mencapai angka 90 persen. Artinya bahwa Angkatan kerja di Kota Padang Panjang cukup merata pada tiap jenjang Pendidikan.

## 2) Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dependency ratio Kota Padang Panjang menunjukkan tren menurun sejak tahun 2018 yang berarti bahwa beban yang ditanggung penduduk produktif semakin kecil dari tahun ketahun. Rasio ketergantungan adalah sebesar 57,850 persen di tahun 2022, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 58 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

## 2.2 Evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja RPJMD

Secara makro, pembangunan di Kota Padang Panjang tahun 2022 dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja dari 65 (enam puluh lima) indikator yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan daerah, yang terdiri dari 11 (sebelas) indikator makro, 24 (dua puluh empat) indikator kinerja utama, dan 30 (tiga puluh) indikator kinerja tujuan dan sasaran, dengan capaian 10,77 persen indikator berhasil mencapai target (=100%), 63,08 persen indikator berhasil melewati target (>100%), dan 26,15 persen tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan (<100%).

Capaian indikator kinerja RPJMD Kota Padang Panjang pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

**Tabel 2.223**  
**Capaian Kinerja Indikator Makro Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2022**  
 Error! Not a valid link. Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2023

**Tabel 2.224**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (2023)	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Rasio Capaian Akhir Periode RPJMD (%)
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Misi 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan</b>							

<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)</b>		<b>%</b>	<b>4.40</b>	<b>3.11</b>	<b>4.39</b>	<b>141.16</b>	<b>99.77</b>
1	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	3.41	2.74	5.54	202.19	162.46
2	Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran	%	4.17	3.00	5.28	176.00	126.62
3	Laju pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan	%	1.24	0.97	2.40	247.42	193.55
4	Laju pertumbuhan ekonomi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	%	4.75	3.87	10.47	270.54	220.42
5	Persentase kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	%	1.50	1.39	-0.03	-2.16	-2.00
6	IKLH	Indeks	72.87	72.65	66.61	91.69	91.41
7	PDRB Per Kapita (ADHK)	Rp. (juta)	44.26	44.07	47.49	107.76	107.30
8	Indeks Gini	Indeks	0.307	0.308	0.296	96.10	103.72
9	Tingkat Kemiskinan	%	5.65	5.79	5.14	88.77	109.92
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6.80	6.98	4.84	144.21	140.50
11	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat)	ribu rupiah	11.11	10.92	11.153	102.13	100.39
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (2023)	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Rasio Capaian Akhir Periode RPJMD (%)
1	2	3	4	Target	Realisasi	7	8
<b>MISI 2 : Meningkatkan Pemerataan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya</b>							
<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>		<b>Indeks</b>	<b>78.97</b>	<b>78.54</b>	<b>78.78</b>	<b>100.31</b>	<b>99.76</b>
12	Rata-rata lama sekolah	Tahun	12.28	12.11	11.92	98.43	97.07
13	Harapan lama sekolah	Tahun	15.09	15.08	15.07	99.93	99.87
14	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	72.94	72.9	73.02	100.16	100.11

15	Prevalensi stunting	%	13.98	15.51	16.80	108.32	120.17
16	Indeks Rasa Aman	%	Aman (92,57)	Aman (86,04)	88,78 (aman)	103.18	95.91
17	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100.00	100.00	100.00
18	Angka PPKS	Angka	5.56	5.85	5.68	97.09	102.16
18	Persentase aktivitas kegiatan keagamaan di Mesjid	%	100	90.79	100.00	110.14	100.00
20	Persentase pemajuan kebudayaan	%	78	67	65.45	97.69	83.91
<b>MISI 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif</b>							
<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>		<b>Indeks</b>	<b>56.42</b>	<b>55.22</b>	<b>59.40 (CC)</b>	<b>107.57</b>	<b>105.28</b>
21	Predikat sistem akuntabilitas kinerja pemerintah	%	B (63,10)	B (62,30)	62.91 (B)	100.98	99.70
22	Opini BPK	%	WTP	WTP	WTP	100	100
23	Indeks inovasi daerah	Indeks	Sangat inovatif (66)	Sangat inovatif (65)	Sangat Inovatif (62,04)	95.45	94.00
24	Indeks kepuasan masyarakat	%	90,02 (sangat baik)	89,52 (Sangat Baik)	96,53 (sangat baik)	107.83	107.23
<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (2023)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>Target</b>   <b>Realisasi</b>		<b>Capaian Kinerja (%)</b>	<b>Rasio Capaian Akhir Periode RPJMD (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan</b>			<b>4.59</b>	<b>4.58</b>	<b>4.6</b>	<b>100.44</b>	<b>100.22</b>
25	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100	100	96.67	96.67	96.67
26	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	70.84	69.44	69.44	100.00	98.02

Evaluasi dan penilaian terhadap capaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2022 diukur dengan melihat capaian kinerja dari 6

(enam) indikator kinerja tujuan dan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja sasaran pembangunan.

Dari 6 (enam) indikator tujuan, 4 (empat) indikator berhasil mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, 2 (dua) indikator lainnya tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk capaian kinerja dari indikator sasaran strategis, dari 24 (dua puluh empat) indikator kinerja, sebanyak 9 (sembilan) indikator atau sebanyak 37,50 persen tidak mencapai target, 3 (tiga) atau sebesar 12,50 persen indikator berhasil mencapai target, dan 12 (dua belas) indikator atau sebesar 50 persen berhasil melebihi target yang telah ditetapkan.

Untuk pelaksanaan program prioritas pada tahun 2022, dari 89 (delapan puluh sembilan) indikator, sebanyak 26 (dua puluh enam) indikator program prioritas tahun 2022 tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Realisasi kinerja RKPD secara keseluruhan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebesar **94,42 persen (Sangat Tinggi)**, dengan realisasi keuangan mencapai 88,42 persen atau sebesar Rp. 545.209.090.060,57 dari anggaran APBD.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam pencapaian target program dan kegiatan pada Triwulan IV Tahun 2022 secara umum antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan fisik pada beberapa OPD mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, sehingga kegiatan fisik tersebut tidak bisa selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Masih belum optimalnya Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan sampai dengan Triwulan IV, sehingga menyebabkan tingkat capaian kinerja pada beberapa Perangkat Daerah tidak maksimal.
3. Belum optimalnya realisasi anggaran belanja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, terutama untuk kegiatan fisik dan pengadaan barang/jasa, sehingga sampai dengan Triwulan IV serapan anggaran untuk belanja secara keseluruhan hanya mencapai 88,42% dari pagu APBD.
4. Masih kurangnya kepedulian Perangkat Daerah untuk melaporkan hasil pelaksanaan Renja ke Bappeda, sehingga penilaian kinerja terhadap Perangkat Daerah tersebut tidak bisa dilakukan dan pada akhirnya akan mengurangi penilaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota.

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.225**

**Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang**

Tahun 2022

Error! Not a valid link.Error! Not a valid link.Tabel 2.226

Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan RKPD Tahun 2022

KODE	URAIAN	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran (Target s/d Triwulan yang Di Evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi			Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
		K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	% (Rp.)	
1.	URUSAN WAJIB	-	1.392.872.675.324,43	-	381.642.456.800,00	41,89%	127.221.735.066,31	93,96%	350.529.164.082,71	91,85%	Sangat Tinggi
1.01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	-	1.212.524.622.884,38	-	332.749.933.530	46,67%	111.929.485.682,31	92,45%	304.910.985.120,21	91,63%	Tinggi
1.01.01	PENDIDIKAN	-	353.708.361.982,76	-	107.362.830.438	63,17%	34.614.565.492,37	87,71%	98.252.015.692,81	91,51%	Tinggi
1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	353.708.361.982,76	-	107.362.830.438	63,17%	34.614.565.492,37	87,71%	98.252.015.692,81	91,51%	Tinggi
1.01.02	KESEHATAN	-	593.207.126.690,72	-	146.351.768.548	45,00%	44.056.051.696,26	95%	134.033.182.873,81	91,58%	Tinggi
1.01.02.01	DINAS KESEHATAN	-	593.207.126.690,72	-	146.351.768.548	45,00%	44.056.051.696,26	95,00%	134.033.182.873,81	91,58%	Sangat Tinggi
1.01.03	PEKERJAAN UMUM	-	73.601.940.096,00	-	24.646.324.718	58,80%	12.210.643.488,35	95,20%	22.386.160.523,06	90,83%	Tinggi
1.01.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	73.601.940.096,00	-	24.646.324.718	58,80%	12.210.643.488,35	95,20%	22.386.160.523,06	90,83%	Sangat Tinggi

KODE	URAIAN	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan renja PD tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran (Target s/d Triwulan yang Di Evaluasi)		K
		K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
1.	URUSAN WAJIB	-	1.392.872.675.324,43	95,74%	#####	#####	#####	12,67%
1.01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	-	1.212.524.622.884,38	95,44%	#####	-	332.749.933.530	11,24%
1.01.01	PENDIDIKAN	-	353.708.361.982,76	96,63%	99.717.172.737,15	-	107.362.830.438	2,71%
1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	353.708.361.982,76	96,63%	99.717.172.737,15	-	107.362.830.438	2,71%
1.01.02	KESEHATAN	-	593.207.126.690,72	96,00%	#####	-	146.351.768.548	10,00%

1.01.02.01	DINAS KESEHATAN		593.207.126.690,72	96,00%	#####	-	146.351.768.548	10,00%
<b>1.01.03</b>	<b>PEKERJAAN UMUM</b>	-	<b>73.601.940.096,00</b>	<b>93,82%</b>	<b>23.477.186.504,62</b>	-	<b>24.646.324.718</b>	<b>6,68%</b>
1.01.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		73.601.940.096,00	93,82%	23.477.186.504,62	-	24.646.324.718	6,68%
<b>1.01.04</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT</b>	-	<b>94.311.742.157,90</b>	<b>93,25%</b>	<b>15.502.205.312,00</b>	-	<b>25.684.358.078</b>	<b>15,65%</b>
1.01.04.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		94.311.742.157,90	93,25%	15.502.205.312,00	-	25.684.358.078	15,65%
<b>1.01.05</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	-	<b>47.567.783.934,00</b>	<b>95,45%</b>	<b>10.624.360.522,00</b>	-	<b>11.314.957.648</b>	<b>23,33%</b>
1.01.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		47.567.783.934,00	95,45%	10.624.360.522,00	-	11.314.957.648	23,33%

KODE	URAIAN	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran (Target s/d Triwulan yang Di Evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi			Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	% (Rp.)	
5.	KEWILAYAHAN	-	158.803.776.077,78	-	39.931.474.757	29,74%	12.229.959.388,00	96,52%	38.578.619.578,00	96,61%	Sangat Tinggi
5.XX	KEWILAYAHAN	-	158.803.776.077,78	-	39.931.474.757	29,74%	12.229.959.388,00	96,52%	38.578.619.578,00	96,61%	Sangat Tinggi
5.XX.01	KECAMATAN	-	158.803.776.077,78	-	39.931.474.757	29,74%	12.229.959.388,00	96,52%	38.578.619.578,00	96,61%	Sangat Tinggi
5.XX.01.01	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR		75.837.207.750,20	-	19.003.336.695	30,08%	5.596.460.248,00	95,83%	18.304.456.255,00	96,32%	Sangat Tinggi
5.XX.01.02	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT		82.966.568.327,58	-	20.928.138.062	29,40%	6.633.499.140,00	97,20%	20.274.163.323,00	96,88%	Sangat Tinggi
6.	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	30.470.700.611,00	-	9.077.077.604	37,14%	3.339.553.713,00	98,57%	8.806.736.104	97,02%	Sangat Tinggi
6.XX	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	30.470.700.611,00	-	9.077.077.604	37,14%	3.339.553.713,00	98,57%	8.806.736.104,00	97,02%	Sangat Tinggi
6.XX.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	30.470.700.611,00	-	9.077.077.604	37,14%	3.339.553.713,00	98,57%	8.806.736.104,00	97,02%	Sangat Tinggi
6.XX.01.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK		30.470.700.611,00	-	9.077.077.604	37,14%	3.339.553.713,00	98,57%	8.806.736.104,00	97,02%	Sangat Tinggi
JUMLAH			2.317.975.076.917,90	-	616.638.674.470	40,51%	193.160.311.813,31	94,42%	545.209.090.060,57	88,42%	

Sedangkan untuk capaian kinerja RKPD dan realisasi keuangan yang berasal dari capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini. tabel berikut ini :



EVALUASI TERHADAP HASIL RPKD  
KOTA PADANG PANJANG  
TRIWULAN IV TAHUN 2022

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RPKD Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV		13		14=7+13						15=14/6 x 100%			
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.
<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>						-	2.317.975.076.917,90	95,20%	555.719.900.371,67	-	616.638.674.470,00	12,78%	73.003.630.929,81	18,74%	141.534.559.523,43	22,39%	137.510.587.794,02	40,51%	193.160.311.813,31	94,42%	545.209.090.060,57	94,81%	#####	47,50%			
1.			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		353.708.361.982,76	96,63%	99.717.172.737,15	107.362.830.438,00	2,71%	11.443.631.621,00	10,92%	24.283.417.727,38	10,92%	27.910.400.852,06	63,17%	34.614.565.492,37	87,71%	98.252.015.692,81	92,17%	197.969.188.429,96	55,97%						
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					107.006.792.318,00	2,92%	11.443.631.621,00	4,33%	24.256.895.827,38	4,33%	27.904.540.352,06	83,83%	34.334.106.992,37	95,42%	97.939.174.792,81									
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			100,00%	70.736.485.908,00	0,00%	73.717.615.450,00	25,00%	10.650.556.643,00	27,00%	19.259.182.100,00	25%	18.979.742.882,00	23%	21.101.787.638,00	100,00%	69.991.269.263,00	100,00%	140.727.755.171,00						
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan Perangkat Daerah			69.314.428.409,00	0,00%	71.590.332.840,00	25,00%	10.467.339.680,00	25,00%	18.908.774.094,00	25,00%	18.529.485.143,00	25,00%	20.436.332.192,00	100,00%	68.341.931.109,00		137.652.877.268,00				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	12 bulan	69.310.946.159,00		71.590.332.840,00	580 orang	10.467.339.680,00	580 orang	18.908.774.094,00		18.529.485.143		20.436.332.192,00	580 orang	68.341.931.109,00		137.652.877.268,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan			259.763.079,00	0,00%	402.852.150,00	0,00%	19.242.548,00	25,00%	45.978.472,00	25,00%	100.107.505,00	50,00%	130.099.058,00	100,00%	295.427.583,00		555.190.662,00						
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 bulan	7.833.400,00		20.670.650,00			7 jenis	4.311.000,00		-		8.611.887,00	7 jenis	12.922.887,00		20.756.287,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (ATK dan alat /bahan kebersihan)	4 jenis	72.853.200,00		109.049.800,00			2 jenis	14.720.600,00		32.732.000		50.674.300,00	2 jenis	98.126.900,00		170.980.100,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 jenis	38.986.500,00		76.986.700,00			2 jenis	1.955.000,00		4.518.000		29.120.750,00	2 jenis	35.593.750,00		74.580.250,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti SKPD	1 tahun	140.089.979,00		196.145.000,00	3 bulan	19.242.548,00	3 bulan	24.991.872,00	3 bulan	62.857.505	3 bulan	41.692.121,00	1 tahun	148.784.046,00		288.874.025,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			82.092.000,00	0,00%	99.168.750,00	0,00%	0,00	25,00%	1.014.750,00	25,00%	34.650.000,00	50,00%	53.114.000,00	100,00%	88.778.750,00		170.870.750,00						
			Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan			99.168.750,00				3 jenis	1.014.750,00		34.650.000		53.114.000,00		88.778.750,00		88.778.750,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Selesai Dilaksanakan			882.196.395,00	0,00%	1.184.701.460,00	25,00%	163.974.415,00	25,00%	270.820.084,00	25,00%	252.149.460,00	25,00%	326.861.188,00	100,00%	1.013.805.147,00		1.896.001.542,00						
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	2 jenis	4.100.000,00		10.030.000,00			2 jenis	250.000,00		6.250.000		250.000,00	2 jenis	6.750.000,00		10.850.000,00							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	74.246.607,00		141.452.260,00	4 rekening	27.970.247,00	4 rekening	25.928.344,00		25.111.648		27.903.512,00	4 rekening	106.913.751,00		181.160.358,00							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN (THU) dibayarkan dan ditingkatkan kapasitasnya	29 orang	803.849.788,00		1.033.219.200,00	32 orang	136.004.168,00	32 orang	244.641.740,00		220.787.812		298.707.676,00	32 orang	900.141.396,00		1.703.991.184,00							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang Selesai dilaksanakan			196.938.900,00	0,00%	440.560.250,00	0,00%	0,00	20,00%	32.594.700,00	25,00%	63.350.774,00	55,00%	155.381.200,00	100,00%	251.326.674,00		448.265.574,00						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	13 unit R2 dan 4 unit R4	94.676.900,00		162.472.250,00			17 unit	32.594.700,00		34.605.774		75.603.200,00	17 unit	142.803.674,00		237.480.574,00							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara			20.260.000,00							521.000,00		3.200.000,00	0	3.721.000,00		3.721.000,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	70 unit, 1 unit TI	34.960.000,00		67.910.000,00						3.650.000,00		14.174.000,00	0	17.824.000,00		52.784.000,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	67.302.000,00		99.918.000,00						15.045.000,00		60.554.000,00	0	75.599.000,00		142.901.000,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi			90.000.000,00							9.529.000,00		1.850.000,00		11.379.000,00		11.379.000,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka melanjutkan SD	100%	59.499.733.723,00	100,60	28.488.546.429,15	33.289.176.868,00	10,00%	793.074.978,00	25,00%	4.997.713.727,38	27%	8.924.797.470,06	100,00%	13.232.319.354,37	100,00%	27.947.905.529,81	50,80	56.436.451.958,96	50,50%	94,85%				
				Angka melanjutkan SMP	100%		134,20									100,00%		100,00%		67,60		50,37%					
				Persentase Sekolah Dasar dengan peringkat akreditasi A	95%		82,05									92,00%		100,00%		41,49		50,56%					
				Persentase SMP dengan peringkat akreditasi A	53%		87,50									48,00%		48,00%		43,99		50,27%					
				Persentase pemenuhan kebutuhan dasar SPM	100%		100,00									100,00%		100,00%		50,50		50,50%					
				APK PAUD (5-6 tahun)	100%		96,38									100,00%		100,00%		48,69		50,52%					

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu (n-2 = 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.		K		Rp.	
						K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.		K		Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
				Persentase lembaga PAUD yang memenuhi kebutuhan dasar SPM pendidikan	100%	96,61					100,00%	100,00%	48,81	50,52%												
				Rasio lembaga PAUD terakreditasi (diatas 1 Tahun)	98%	98,25					95,00%	95,00%	49,60	50,48%												
				Rasio PAUD holistik integratif	60%	40,00					50,00%	50,00%	20,25	50,63%												
				Angka kelulusan pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C)	98%	96,00					98,00%	98,00%	48,49	50,51%												
				Persentase satuan pendidikan non formal yang memenuhi kebutuhan dasar SPM pendidikan (usia 7 s.d 18 tahun)	100%	100,00					100,00%	100,00%	50,50	50,50%												
				<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>			15.455.749.064,49	0,00%	18.942.204.018,00	5,00%	524.346.082,00	15,00%	2.586.807.924,38	27%	5.253.632.305,69	13%	7.056.536.758,19	60,00%	15.421.323.070,26	30.877.072.134,75						
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			1.120.599.922,72	0	1.929.910.582,00		4 sekolah	137.497.598,38	734.233.785,73	4 sekolah	798.922.547,53	4 sekolah	1.670.653.931,64	2.791.253.854,36			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			38 SD dan 14 SMP	6.236.451.306,00		2 sekolah	29.096.600,00	1.955.562.469,96	2 sekolah	2.966.319.636,66	2 sekolah	4.950.978.706,62	4.950.978.706,62			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah			875.888.500,00	1.103.685.680,00		8 paket	27.931.200,00	915.360.000,00	8 paket	40.354.864,00	8 paket	983.646.064,00	1.859.534.564,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			38 sekolah	83.918.350,00	45.421.800,00				15.191.875,00	7.284.500,00	0	22.476.375,00	106.394.725,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			3 kegiatan	44.664.450,00	90.733.850,00		8 keg	5.697.500,00	18.461.850,00	8 keg	28.124.126,00	8 keg	52.283.476,00	96.947.926,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					3.431.311.800,00	115 orang	522.284.932,00	115 orang	885.012.412,00	747.280.256,00	115 orang	1.042.801.444,00	3.197.379.044,00	3.197.379.044,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			1.323.896.493,00	4 kategori lomba mapel	225.000.000,00				126.500.000,00	0	126.500.000,00	1.450.396.493,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			38 sekolah, honor 78 orang THL	2.337.404.302,00	3 cabang peringkat 3 besar provinsi	30.703.000,00		1.380.750,00	0,00	39 sekolah	300.000,00	39 sekolah	1.680.750,00	2.339.085.052,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			32 sekolah	5.061.366.858	80 orang	5.828.500.000,00		32 sekolah	1.499.509.364,00	867.171.944,00	32 sekolah	2.045.304.640,00	4.411.985.948,00	9.473.352.806,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					20.486.000,00	117 orang	2.061.150,00	682.500,00	370.125	117 orang	625.000,00	117 orang	3.738.775,00	3.738.775,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
				a) 38 SD dan 14 SMP b) 1 Diklat Kompetensi Pengawas c) 1 MP berbasis TIK d) 10 Sekolah Inklusi																						
				<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>			7.550.967.513,36	0,00%	8.024.424.930,00	5,00%	268.728.896,00	20,00%	1.433.350.803,00	20%	1.753.034.969,37	4%	3.048.152.278,18	49,00%	6.503.266.946,55	14.054.234.459,91						
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			3 paket	446.501.430,00	0	368.915.000,00	2 sekolah	650.000,00	2 sekolah	0,00	-0,00	2 sekolah	354.712.470,00	2 sekolah	355.362.470,00	801.863.900,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			-	1.424.573.960,00				324.471.480,37	2 sekolah	947.810.657,18	2 sekolah	1.272.282.137,55	1.272.282.137,55			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			-	15.000.000,00				5.000.000,00	3 orang	10.000.000,00	3 orang	15.000.000,00	15.000.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			13 paket	839.410.710,00	29.090.000,00				1 paket	26.640.000,00	1 paket	26.640.000,00	866.050.710,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			14 sekolah	115.150.250,00	58.207.820,00			4.255.400,00	15 sekolah	23.241.500,00	15 sekolah	27.496.900,00	142.647.150,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
								I		II		III		IV				13			14=7+13		15=14/6 x 100%				
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan pembinaan dan apresiasi Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		3 kegiatan	122.697.503,00	0	89.928.750,00	8 keg	1.651.650,00		17.252.675,00	8 keg	41.530.430,00	8 keg	60.434.755,00		183.132.258,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	Jumlah Non ASN pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang pekerjiaan dan guru non ASN yang		0	1.959.326.300,00	64 orang	267.396.396,00	64 orang	454.386.568,00		387.410.568	64 orang	580.569.300,00	64 orang	1.689.762.832,00		1.689.762.832,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah kegiatan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMP yang dilaksanakan		3 kegiatan, honor Guru THL 38 orang	1.078.431.696,00	0	45.911.100,00					1 keg	39.626.200,00	1 keg	39.626.200,00		1.118.057.896,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang Dibina Kelembagaan dan Manajemennya		14 sekolah,	672.109.504,00	0	18.643.000,00					0	0	0	0,00		672.109.504,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah yang menerima dan Mengelola Dana BOS		6 sekolah	3.616.792.674,00		3.999.500.000,00	6 sekolah	977.025.935,00		1.014.440.096,00	6 sekolah	1.022.321.721,00	6 sekolah	3.013.787.752,00		6.630.580.426,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pengelola Dana BOS yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15.329.000,00	45 orang	682.500,00	45 orang	286.650,00		204.750,00	45 orang	1.700.000,00	45 orang	2.873.900,00		2.873.900,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD (5-6 tahun)			5.481.829.851,30	88,80%	5.744.944.900,00	0,00%	0,00	17,00%	974.283.000,00	20%	1.727.200.695,00	3%	2.982.173.245,00	40,00%	5.683.656.940,00	11.165.486.791,30							
				Persentase lembaga PAUD yang memenuhi kebutuhan dasar SPM pendidikan.				70,00%	0,00%	0,00%	0,00%				100,00%		100,00%										
				Rasio Lembaga PAUD Terakreditasi (diatas 1 Tahun)				74,00%							90,00%		90,00%										
				Rasio PAUD Holistik integratif				70,00%							40,00%		40,00%										
			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang direhabilitasi Sedang/ Berat		1 paket	121.283.151,30		20.000.000,00					1 paket	20.000.000,00	1 paket	20.000.000,00		141.283.151,30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah proses belajar PAUD (bimbingan teknis) yang		253 orang	3.900.100.000,00		66.349.900,00				34.659.275,00	1 keg	28.812.500,00	1 keg	63.471.775,00		3.963.571.775,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik di Satuan PAUD yang diberi insentif			4.087.385.000,00			253 orang	942.900.000,00		1.064.548.000,00	253 orang	2.029.577.550,00	253 orang	4.037.025.550,00		4.037.025.550,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		0,07	118.835.000,00			59 lembaga	3.150.000,00		18.615.000,00	59 lembag	90.601.140,00	59 lembag	112.366.140,00		112.366.140,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Kelembagaan dan Manajemen PAUD (ormit) yang dibina		3 organisasi	32.515.500,00	11,80%	106.375.500,00		4 ormit	24.348.000,00		0,00	4 ormit	57.514.375,00	4 ormit	81.862.375,00		114.377.875,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan dan mengelola Dana BOP PAUD dan oemenuhan SPM		56 lembaga	1.265.059.200,00		1.332.600.000,00				607.824.420,00	50 lembag	749.155.580,00	50 lembag	1.356.980.000,00		2.622.039.200,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP PAUD				13.399.500,00		1 keg	3.885.000,00		1.554.000,00	1 keg	6.512.100,00	1 keg	11.951.100,00		11.951.100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Kelulusan Pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C)			337.830.400,00		577.603.020,00	0,00%	0,00	5,00%	3.272.000,00	28%	190.929.500,00	63%	145.457.073,00	96,00%	339.658.573,00	677.488.973,00							
				Persentase satuan pendidikan non formal yang memenuhi kebutuhan dasar SPM pendidikan (usia 7 s.d 18 tahun).											100%		100,00%										
			Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang			49.875.000,00							0	0	0	0,00		0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah layanan di satuan Pendidikan non formal			74.254.000,00							3 jenis	61.367.650,00	3 jenis	61.367.650,00		61.367.650,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah nonformal yang dibina kelembagaan dan manajemennya		3 lembaga	537.950,00		32.040.020,00						0	0	0,00		537.950,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang dikelola dan oemenuhan SPM pendidikan		3 lembaga	337.292.450,00		416.700.000,00				190.929.500,00	3 sekolah	83.739.773,00	3 sekolah	274.669.273,00		611.961.723,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengelola dana BOP sekolah Nonformal/ kesetaraan yang ditingkatkan kapasitasnya				4.734.000,00		3 sekolah	3.272.000,00		0,00	3 sekolah	349.650,00	3 sekolah	3.621.650,00		3.621.650,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>						<b>356.038.120,00</b>	<b>2,50%</b>	<b>0,00</b>	<b>17,50%</b>	<b>26.521.900,00</b>	<b>17,50%</b>	<b>5.860.500,00</b>	<b>42,50%</b>	<b>280.458.500,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>312.840.900,00</b>	<b>312.840.900,00</b>							
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Persentase Capaian Objek Pemajuan Kebudayaan</b>	<b>#####</b>		<b>785.255.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>154.310.000,00</b>				<b>236.050.000,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00%</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>20%</b>	<b>5.860.500,00</b>	<b>35%</b>	<b>219.392.250,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>228.132.750,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>382.442.750,00</b>	<b>48,70%</b>	
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat pengelola kebudayaan yang dibina			77.606.500,00		82.150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	50	80.021.875,00	50	80.021.875,00		157.628.375,00							
			Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan (pendokumentasian, pembinaan /pelatihan)		3 jenis	77.606.500,00		57.150.000,00					4 objek	56.884.375,00	4 objek	56.884.375,00		134.490.875,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV						13		14=7+13		15=14/6 x 100%	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah SDM, lembaga dan pranata kebudayaan yang dibina melalui kegiatan bimtek dan workshop		75 orang	76.703.500,00	20	25.000.000,00					50 orang	23.137.500,00	50 orang	23.137.500,00	99.841.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional Masyarakat yang dilestarikan				21.200.000,00		0,00	0,00		0,00	4 lembaga	17.242.500,00	4 lembaga	17.242.500,00	17.242.500,00							
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah SDM, lembaga dan pranata tradisional yang dibina melalui sosialisasi dan bimtek			21.200.000,00							75 orang	17.242.500,00	75 orang	17.242.500,00	17.242.500,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang dibina		76.703.500,00	1 Nagari	132.700.000,00	0,00%	0,00	48,00%	2.880.000,00	5.860.500,00	3 lembaga	122.127.875,00	3 lembaga	130.868.375,00	207.571.875,00							
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah lembaga adat yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan (sinkronisasi kegiatan dengan lembaga adat)			1 Nagari	40.000.000,00						3 lembaga	39.946.875,00	3 lembaga	39.946.875,00	39.946.875,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah SDM, lembaga dan pranata adat yang dibina (bimtek dan rebug pemangku adat)			80.700.000,00					2.740.500,00	75 orang	76.181.000,00	75 orang	78.921.500,00	78.921.500,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat (KAN) yang disediakan			12.000.000,00					3 lembaga	2.880.000,00	3.120.000,00	3 lembaga	6.000.000,00	3 lembaga	12.000.000,00	12.000.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
			<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan</b>			119.988.120,00	0,00%	0,00	15,00%	23.641.900,00	15%	0,00	50%	61.066.250,00	80,00%	84.708.150,00	84.708.150,00							
			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan tingkat kota			30.000.000,00	0	0,00	0	0,00				0,00	0	0,00	0,00							
			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan tingkat kota			30.000.000,00								0	0	0,00	0,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga cagar budaya yang dikelola dan dikembangkan tingkat kota			89.988.120,00	0,00%	0,00	32,00%	23.641.900,00		0,00	14 objek	61.066.250,00	14 objek	84.708.150,00	84.708.150,00							
			Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi dengan pendokumentasian WBTB dan WBB			35.000.000,00							14 objek	32.431.250,00	14 objek	32.431.250,00	32.431.250,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
			Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan dengan tetap mempertahankan kekhasannya			29.988.120,00							14 objek	28.635.000,00	14 objek	28.635.000,00	28.635.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
			Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dimanfaatkan untuk fasilitas studi pembelajaran masyarakat			25.000.000,00			14 objek	23.641.900,00			14 objek	0,00	14 objek	23.641.900,00	23.641.900,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
<b>2.</b>			<b>DINAS KESEHATAN</b>		<b>593.207.126.690,72</b>	<b>96,00%</b>	<b>150.175.144.448,25</b>		<b>146.351.768.548,00</b>	<b>10,00%</b>	<b>16.793.034.803,00</b>	<b>15,00%</b>	<b>37.374.384.716,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>35.809.711.658,55</b>	<b>45,00%</b>	<b>44.056.051.696,26</b>	<b>95,00%</b>	<b>134.033.182.873,81</b>	<b>284.208.327.322,06</b>	<b>47,91%</b>				
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																						
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>																						
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>			<b>100,00%</b>	<b>117.958.030.893,70</b>		<b>118.103.864.474,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>16.161.700.380,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>30.934.289.669,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>27.128.715.868,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>38.154.947.863,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>112.379.653.780,26</b>	<b>230.337.684.673,96</b>					
			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja dan Iktisar yang disusun			245.900,00		0,00		0,00		0,00		245.900,00		245.900,00	245.900,00							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Iktisar yang disusun			245.900,00	1 Laporan	245.900,00	1 Laporan	0,00				245.900,00	1 Laporan	245.900,00	245.900,00		Dinas Kesehatan					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		56.334.451.981,00	61.045.641.615,00	18,00%	11.271.977.469,00	12,13%	16.691.105.811,00	16.777.543.987,00	15.782.435.745,00	30,13%	60.523.063.012,00	116.857.514.993,00									
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		1	56.333.758.481,00	500 Orang	61.044.903.915,00	486 Orang	11.271.977.469,00	486 orang	16.691.105.811,00	486 Orang	16.777.543.987,00	486 Orang	15.781.698.045,00	486 Orang	60.523.325.312,00	116.856.083.793,00		Dinas Kesehatan			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun		1	213.500,00	3 Laporan	245.900,00	1 Laporan	0,00				245.900,00	1 Laporan	245.900,00	459.400,00		Dinas Kesehatan					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan bulanan ,triwulan dan semester yang disusun		3	240.000,00	17 Laporan	245.900,00	3 Laporan	0,00	4 Laporan	4 Laporan		245.900,00	7 Laporan	245.900,00	485.900,00		Dinas Kesehatan					
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis yg disusun		1	240.000,00	1 Laporan	245.900,00		0,00				245.900,00		245.900,00	485.900,00		Dinas Kesehatan					
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		256.168.399,00	404.880.850,00	25,00%	76.639.000,00	20,00%	97.372.023,00	73.996.522,00	141.489.986,00	45,00%	389.497.531,00	645.665.930,00									
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			25.552.400,00	5 Jenis	25.552.400,00	5 Jenis	9.030.700,00	5 Jenis	3.332.000,00	5 jenis	7.533.000,00	5 jenis	4.994.810,00	5 Jenis	24.890.510,00	24.890.510,00		Dinas Kesehatan			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pembelian materi, jumlah dokumen yang dicetak/ digandakan dan alat tulis kantor vane disediakan		1	86.504.300,00	4 Jenis	122.498.300,00	4 Jenis	33.619.850,00	4 Jenis	36.766.500,00	4 jenis	19.043.040,00	4 jenis	24.977.000,00	4 Jenis	114.406.390,00	200.910.690,00		Dinas Kesehatan			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		1	29.732.050,00	4 Jenis	58.024.150,00	4 Jenis	16.444.750,00	4 Jenis	8.946.000,00	4 jenis	9.374.750,00	4 jenis	19.691.625,00	4 Jenis	54.457.125,00	84.189.175,00		Dinas Kesehatan			

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
								I		II		III		IV						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	1	139.932.049,00	300 Kali	198.806.000,00	25 Kali	17.543.700,00		48.327.523,00		38.045.732,00		91.826.551,00	25 Kali	195.743.506,00	335.675.555,00		Dinas Kesehatan						
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai		16.069.000,00	52.140.000,00	25,00%	10.545.000,00	6,00%	2.180.000,00		0,00		30.770.000,00	31,00%	43.495.000,00	59.564.000,00									
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya(Pemeliharaan alat-alat kantor)	Jumlah perlengkapan dan alat-alat kantor yang diadakan	1	16.069.000,00	3 Jenis	52.140.000,00	3 Jenis	10.545.000,00	0	2.180.000,00		-	3 Jenis	30.770.000,00	3 Jenis	43.495.000,00	59.564.000,00		Dinas Kesehatan						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah honor pegawai harian yang disediakan		1.158.735.734,00	1.405.163.733,00	25,00%	206.462.561,00	25,00%	351.587.019,00		308.402.759,00		395.615.691,00	50,00%	1.262.068.030,00	2.420.803.764,00									
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	1	3.982.000,00	1266 Lembar	6.290.000,00	454 Lembar	2.850.000,00		950.000,00		870.000,00		1.150.000,00	54 Lembar	5.820.000,00	9.802.000,00		Dinas Kesehatan						
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan serta jumlah komponen listrik yang disediakan	1	160.513.594,00	1206 Tagihan	223.021.733,00	152 Tagihan	42.859.033,00		46.528.549,00		46.002.837,00		48.487.587,00	52 Tagihan	183.878.006,00	344.391.600,00		Dinas Kesehatan						
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor pegawai harian yang dibayarkan	1	994.240.140,00	37 Orang	1.175.852.000,00	37 Orang	160.753.528,00		304.108.470,00		37 orang	261.529.922	37 orang	345.978.104,00	37 Orang	1.072.370.024,00	2.066.610.164,00		Dinas Kesehatan					
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	1	23.944.200,00	1 Unit	33.000.000,00	1 Unit	5.288.500,00	1 Unit	7.556.500,00	1 Unit	3.916.800	1 unit	7.924.500,00	1 Unit	24.686.300,00	48.630.500,00		Dinas Kesehatan						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Labahan	Jumlah kendaraan dinas roda 2, 3 dan 4 yang terpelihara	1	331.047.535,00	60 Unit	527.763.130,00	23 Unit	71.942.950,00		119.740.269,00		23 unit	102.026.212	23 unit	177.958.008,00	23 Unit	471.667.439,00	802.714.974,00		Dinas Kesehatan					
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya dipelihara	1	36.780.000,00	7 Gedung	56.683.500,00	4 Gedung	5.280.000,00	7 Gedung	20.859.500,00	7 gedung	5.420.000	7 gedung	20.319.000,00	7 Gedung	51.878.500,00	88.658.500,00		Dinas Kesehatan						
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Pemenuhan operasional pelayanan rumah sakit	1	59.800.834.044,70	54.578.345.746,00	25,00%	4.513.564.900,00	25,00%	13.643.888.547,00	1	9.857.409.588,00	1	21.598.189.033,26	50,00%	49.613.052.068,26	1	109.413.886.112,96	109.413.886.112,96		Dinas Kesehatan					
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penurunan jumlah kematian ibu	25%	70.284.022.603,00	100,00%	31.320.331.954,55		27.965.575.624,00	25,00%	596.767.223,00		6.255.143.297,00	8,30%	5.863.375.258,00	33,30%	21.381.109.568,55	66,65%	52.701.441.523,10	74,98%						
				Penurunan jumlah kematian bayi	20%										18,20%		18,20%										
				Persentase balita pendek (Stunting)	15,50%										15,51%		15,51%										
				Indeks keluarga sehat	0,45										44%		44,00%										
				Cakupan Puskesmas dan Rumah Sakit yang ditingkatkan mutu melalui akreditasi	100%										0%		0,00%										
				TBC succes rate	60										87,60%		87,60%										
				Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (n1)	90%										78,50%		78,50%										
				Cakupan deteksi dini Faktor resiko TBM	60%										32,40%		32,40%										
				Persentase kelengkapan sarana prasarana, alat kesehatan (SPA)	60%										75,52%		75,52%										
				Cakupan UHC	95%										98,90%		98,90%										
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)		11.020.018.570,55	8.758.016.400,00	6,00%	22.946.900,00	15,00%	32.549.050,00	25%	3.640.659.028,55		463.241.355,00	46,00%	4.159.396.333,55	15.179.414.904,10									
			Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah sarana yg diadakan		7.512.390.075,00	7 Unit	1.514.038.000,00				1.200.000.000		-	0	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00										
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana yg diadakan		7.512.390.075,00	7 Unit	1.514.038.000,00				1.311.333.500	7 Unit	130.000.000,00	7 Unit	1.441.333.500,00	8.953.723.575,00										
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan RSUD	Persentase ketersediaan sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) di Puskesmas dan RSUD		715.000.000,00	4 Puskesmas	1.047.953.000,00				649.229.130	4	-	4	649.229.129,55	1.364.229.129,55										
			Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah pengadaan obat dan vaksin pelayanan	1	437.499.658,00	4 Paket	367.941.271,00		4		144.977.926	4	214.007.360,00	4 Paket	358.985.286,00	796.484.944,00										
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah penyediaan bahan medis habis pakai, bahan kimia labor dan penunjang perbekalan kesehatan lainnya	1	510.472.504,00	3 Paket	408.936.729,00		3		317.734.473,00	3	90.084.951,00	3 Paket	407.819.424,00	918.291.928,00										
			Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yg terpelihara	6	117.725.734,00	4 Puskesmas	103.147.400,00	4 Puskesmas	22.946.900,00		32.549.050,00	4	17.384.000	4	29.149.044,00	102.028.994,00	219.754.708,00									
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal		20.300.313.384,00	19.153.249.224,00	17,57%	573.820.323,00	10,71%	6.213.564.247,00	25%	5.003.989.137,00		5.377.635.778,00	53,28%	17.169.009.485,00	37.469.322.869,00									
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan ibu Hamil		99.704.850,00	50 Orang	49.662.050,00	35 Orang		55	29.343.550,00	55	-	-	55 Orang	29.343.550,00	129.048.400,00									

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV						13		14=7+13		15=14/6 x 100%	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
				Jumlah Pemantauan dan pendampingan teknis pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			80 Kegiatan								0										
				Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			1170 Orang		268 Orang					918		268 Orang									
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan kesehatan Ibu Bersalin		34.150.000,00	40 Orang	15.595.950,00				40	11.766.700,00	40	-	80	11.766.700,00		45.916.700,00			Dinas Kesehatan			
				Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan			1135 Orang		200 Orang					893		200 Orang	0,00								
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir		12.850.000,00	60 Orang	31.332.000,00				60	21.133.500,00	60	372.000,00	120	21.505.500,00		34.355.500,00			Dinas Kesehatan			
				Jumlah Pemantauan dan pendampingan teknis pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			30 Kegiatan								0										
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan			715 Bayi		205 Bayi					848		205 Bayi	0,00								
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan kesehatan Balita		77.726.925,00	48 Orang	18.391.900,00						7.255.247,00	0	7.255.247,00		84.982.172,00				Dinas Kesehatan			
				Jumlah Pemantauan dan pendampingan teknis pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Balita			50 Kegiatan								0	0,00									
				Jumlah Balita mendapatkan pelayanan sesuai standar			4590 Orang		598 Orang					3053		3651	0,00								
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Guru yang dilatih dan sekolah yang dimonev		30.586.500,00	13 Sekolah	27.057.900,00	45 Sekolah			25.609.000,00	25	-	45 Sekolah	25.609.000,00		56.195.500,00				Dinas Kesehatan			
				Jumlah anak Usia Pendidikan Dasar mendapatkan pelayanan sesuai standar			12620 Orang		0				10851		10851	0,00									
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan kesehatan pada Usia Produktif		20.375.250,00	60 Orang	95.170.850,00				1.290.375,00	18.656.275,00		13.272.687,00	0	33.219.337,00		53.594.587,00			Dinas Kesehatan			
				Jumlah Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			35290 Orang						10478		10478	0,00									
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		381.450.000,00	4739 Orang	355.561.900,00	1128 Orang			104.700.000,00	74.700.000,00	4650	170.319.762,00	5778	349.719.762,00		731.169.762,00			Dinas Kesehatan			
				Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			50 Orang								0										
				Jumlah Pemantauan dan pendampingan teknis pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			16 Kali						16		16										
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi		26.265.975,00	35 Orang	10.997.800,00	0			35	9.991.775,00		0,00	35	9.991.775,00		36.257.750,00			Dinas Kesehatan			
				Jumlah Pemantauan dan Pendampingan Teknis Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			16 Kegiatan		4 Kegiatan						4 Kegiatan										
				Jumlah Penderita Hipertensi usia 15 Tahun keatas yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar			11493 Orang		962 Orang			1179	3757		5898										
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus		1.000.000,00	40 Orang	12.553.250,00	0			35	9.876.500,00		0,00	35	9.876.500,00		10.876.500,00			Dinas Kesehatan			
				Jumlah Pemantauan dan pendampingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus			16 Kegiatan		4			4	16		24										
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar			722 Orang		407 Orang			361	950		950 Orang										
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		170	1.200.000,00	70 Orang	9.723.000,00	0		8.125.000,00	35	75.000,00	412.800,00	35	8.612.800,00		9.812.800,00			Dinas Kesehatan			
				Jumlah Pemantauan dan pendampingan teknis pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			16 Kali		4 Kali			4	4		12 Kali	0,00									

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RPKD Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV						13		14=7+13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.
				Jumlah Penderita Gangguan jiwa berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar			114 Orang	57 Orang			6	125		188	0,00								
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah peserta sosialisasi orang terduga Tuberkulosis	80	43.225.750,00	62 Orang	11.639.000,00	0		4.281.250,00	75	6.545.450		75	10.826.700,00		54.052.450,00	Dinas Kesehatan				
				Jumlah Penderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar			148 Orang	209 Orang			264			209 Orang									
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		29.076.150,00	100 Orang	25.754.000,00	0		100.000,00			20.458.500,00	0	20.558.500,00		49.634.650,00					
				Jumlah Pemantauan dan pendampingan teknis pelaksanaan pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			24 Kegiatan	4 Kegiatan			4			4 Kegiatan	0,00								
				Jumlah Penderita HIV yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar			56 Orang	284 Orang						284 Orang	0,00								
				Jumlah penemuan Penderita baru HIV			28 Orang							0	0,00								
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah pemantauan, pemeriksaan, pengawasan, dan pengobatan pada penderita covid 19		382.559.000,00		302 Orang			0			302 Orang	0,00		382.559.000,00		Dinas Kesehatan				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah balita dan bumil kurang Gizi yang diberikan PMT	12	292.143.095,00	10 Bumil	134.295.550,00			26.128.750,00	12	20.437.880	74.225.485,00	12	120.792.115,00		412.935.210,00	Dinas Kesehatan				
				Jumlah Sekolah yang mendapatkan PMT AS			20 Sekolah								0	0,00							
				Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan program gizi	20		80 Orang					75			75	0,00							
				Jumlah pelaksanaan kegiatan surveilans			2 Kegiatan								0	0,00							
				Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			80 Orang			68					68	0,00							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Peserta Sosialisasi dan pemeriksaan Kebugaran CJH		50.782.375,00	150 Orang	23.728.000,00	0	39	2.630.500,00		16.884.800	3.800.000,00	39	23.315.300,00		74.097.675,00	Dinas Kesehatan				
				Jumlah Peserta Sosialisasi dan pemeriksaan Kebugaran ASN			60 Orang	0							0	0,00							
				Jumlah Peserta Sosialisasi POS UKK			40 Orang	0							0	0,00							
				Jumlah peserta Sosialisasi Kes ker pada pekerja informal			40 Orang	0							0	0,00							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Pemusnahan obat kadaluarsa	0	239.999.875,00	200 Kg	130.567.700,00			12.750.000,00		65.868.920	51.574.040,00	0	130.192.960,00		370.192.835,00	Dinas Kesehatan				
				Jumlah Penyemprotan	4		50 Kali	6 Kali				9			18 kali	0,00							
				Jumlah sampah medis yang di bakar			500 Kg								0	0,00							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah kelompok asuhan mandiri yang dibina			10 Kelompok	19.765.650,00	10 Kelompok	17.134.500,00	0	0,00		2.250.000,00	0	19.384.500,00		19.384.500,00	Dinas Kesehatan				
				Jumlah kader asuhan mandiri yang dibina			40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang					40 Orang	0,00							
			Pengelolaan Surveilans kesehatan	Persentase pemantauan penyakit menular dan tidak menular		5.200.000,00	100 Kasus	5.504.500,00	302 Kasus		4.484.375,00			27.500,00	302 Kasus	4.456.875,00		9.656.875,00	Dinas Kesehatan				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa Berat (ODMK)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	28	19.986.500,00	0								0	0,00		19.986.500,00	Dinas Kesehatan				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah pemantauan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza di wilayah kerja	20	9.800.000,00	15		15						15	0,00		9.800.000,00	Dinas Kesehatan				
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah calon jemaah haji yang mendapat pembinaan	196	394.427.696,00	120 Orang	445.705.775,00	97 orang	49.096.936,00	97 Orang	136.525.827,00	97	79.973.764	146.346.342,00	97 orang	411.942.869,00		806.370.565,00	Dinas Kesehatan			
				Jumlah pelaksanaan kegiatan P3K	3		5 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	100,00%	1	3	1	1	1	100,00%							
				Persentase masyarakat yang terlayani oleh dokter warga dan pagudayan yang tertangani											200,00%								
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya Pelayanan Kesehatan Penyakit menular dan Tidak Menular		602.043.538,00	80,00%	470.394.750,00	0,00%		145.972.500,00		62.080.650	129.524.750,00	0,00%	337.577.900,00		939.621.438,00	Dinas Kesehatan				
				Jumlah Posbindu PTM yang dilaksanakan			27 Posbindu	27 Posbindu	27 Posbindu			27			27 Posbindu								





No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV				13			14=7+13		15=14/6 x 100%			
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
								6		7		8		9				10			11		12		16	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan masyarakat dengan PHBS	80%	943.844.100,00	90,00%	450.709.975,00	240.925.000,00	15,00%	34.567.200,00	15,00%	184.951.750,00	35%	3.150.000,00	19,47%	10.034.800,00	84,47%	232.703.750,00	87,24%	683.413.725,00	72,41%				
				Persentase Upaya Promosi Kesehatan	60%										66%		66,00%									
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Jumlah Kegiatan Advokasi, Kemitraan, Pemberdayaan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor			297.115.500,00	240.925.000,00	11,00%	34.567.200,00	25,00%	184.951.750,00	35%	3.150.000,00		10.034.800,00	71,00%	232.703.750,00		529.819.250,00						
			Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah guru UKS yang ikut sosialisasi			297.115.500,00	240.925.000,00	45 Sekolah	34.567.200,00		184.951.750,00	0	3.150.000,00		10.034.800,00	45 Sekolah	232.703.750,00		529.819.250,00						
				Jumlah lembaga yang menerima hibah					1 Lembaga			1					1									
				Jumlah sekolah yang dilatih SBH					10 Sekolah								10 Sekolah									
				Jumlah kelurahan yang dilakukan monev					16 Kelurahan								4 Kelurahan									
				Jumlah masyarakat yang diberikan KIE Keamanan Pangan					50 Sekolah				30				30									
				Jumlah kader/ petugas yang ikut sosialisasi					50 Orang								0									
				Jumlah masyarakat yang diberi KIE Pangan					270 Orang								0									
3.			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			73.601.940.096,00	93,82%	23.477.186.504,62	24.646.324.718,00	6,68%	1.237.753.234,00	11,51%	3.249.150.919,00	18,21%	5.688.612.881,71	58,80%	12.210.643.488,35	95,20%	22.386.160.523,06	94,51%	45.863.347.027,68	62,31%				
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						24.618.901.318,00	8,36%	1.237.753.234,00	13,02%	3.247.350.919,00	21,43%	5.686.732.881,71	35,60%	12.206.893.488,35	78,40%	22.378.730.523,06							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang yang dipenuhi			100,00%	6.400.922.468,00	90,00%	6.515.480.668,00	25,00%	1.173.502.418,00	27,00%	1.700.617.078,00	30%	1.664.625.662,00	8%	1.696.680.970,00	90,00%	6.235.426.128,00	95,00%	12.636.348.596,00				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan keuangan Perangkat Daerah			5.381.919.287,00	90,00%	5.429.457.338,00	25,00%	1.039.144.948,00	25,00%	1.513.554.992,00	25,00%	1.455.632.771,00		1.337.026.820,00	75,00%	5.345.359.531,00		10.727.278.818,00					
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan			48 orang	5.381.919.287,00	47 orang	5.427.959.738,00	47 orang	1.039.144.948,00	47 orang	1.513.554.992,00	1.454.135.171	48 orang	1.337.026.820,00	48 orang	5.343.861.931,00		10.725.781.218,00			Dinas PUPR		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun yang disusun			1 Laporan	499.200,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	1 Laporan	499.200,00	1 Laporan	-	1 Laporan	499.200,00		499.200,00		499.200,00			Dinas PUPR		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran yang disusun			15 Laporan	499.200,00	3 Laporan	0,00	3 Laporan	3 Laporan	499.200,00	3 Laporan	-	15 Laporan	499.200,00		499.200,00		499.200,00			Dinas PUPR		
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Laporan Prognosis yang disusun			2 Laporan	499.200,00	0	0,00		1 Laporan	499.200,00	1 Laporan	-	1 Laporan	499.200,00		499.200,00		499.200,00			Dinas PUPR		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran			146.956.658,00	90,00%	292.801.550,00	25,00%	35.386.973,00	30,00%	45.270.370,00	25,00%	67.414.235,00		69.529.950,00	80,00%	217.601.528,00		364.558.186,00					
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan			17 Jenis	5.859.650,00	17 Jenis	6.985.650,00	0	0,00	5 jenis	1.049.950,00	5 jenis	1.691.500	5 jenis	3.888.950,00	17 jenis	6.630.400,00		12.490.050,00			Dinas PUPR	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan			6 jenis	43.949.400,00	6 jenis	54.938.200,00	2 jenis	1.983.000,00	2 jenis	3.572.200,00	2 jenis	8.593.000	2 jenis	28.601.100,00	6 jenis	42.749.300,00					Dinas PUPR	
				Jumlah jenis retribusi sampah yang dibayarkan					2 jenis	2 jenis							2 jenis	0,00								
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan			9 jenis	20.421.950,00	9 jenis	42.831.000,00	2 jenis	3.778.900,00	2 jenis	3.269.300,00	2 jenis	10.164.000	2 jenis	9.659.600,00	9 jenis	26.871.800,00		47.293.750,00			Dinas PUPR	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti			328 kali	76.725.658,00	128 kali	188.046.700,00	44 kali	29.625.073,00	97 kali	37.378.920,00	97 kali	46.965.735	97 kali	27.380.300,00	128 kali	141.350.028,00		218.075.686,00			Dinas PUPR	
				Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan			607 ok		22 kali	2 kali		6 kali			14 kali		22 kali									
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			77.555.000,00	90,00%	6.600.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		6.600.000,00	0,00%	6.600.000,00		84.155.000,00					
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan			3 unit	77.555.000,00	3 unit	6.600.000,00	0	0,00				3 unit	6.600.000,00	3 unit	6.600.000,00		84.155.000,00			Dinas PUPR		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah			327.813.966,00	90,00%	379.831.780,00	25,00%	53.536.247,00	25,00%	86.543.366,00	25,00%	78.899.306,00		98.128.050,00	75,00%	317.106.969,00		644.920.935,00					
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat-menyurat yang disediakan			967 lembar	3.495.000,00	350 lembar	3.500.000,00	87 lembar	1.000.000,00	125 lembar	250.000,00	246 lembar	750.000	246 lembar	1.500.000,00	246 lembar	3.500.000,00		6.995.000,00			Dinas PUPR	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan			3 rekening	22.813.038,00	3 rekening	40.830.180,00	3 rekening	5.257.751,00	3 rekening	4.825.622,00	3 rekening	4.981.562	3 rekening	4.698.194,00	3 rekening	19.763.129,00		42.576.167,00			Dinas PUPR	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan			11 orang	301.505.928,00	11 orang	335.501.600,00	11 orang	47.278.496,00	11 orang	81.467.744,00	11 orang	73.167.744	11 orang	91.929.856,00	11 orang	293.843.840,00		595.349.768,00			Dinas PUPR	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV						13		14=7+13		15=14/6 x 100%	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah		466.677.557,00	90,00%	406.790.000,00	25,00%	45.434.250,00	25,00%	55.248.350,00	25,00%	62.679.350,00	185.396.150,00	75,00%	348.758.100,00	815.435.657,00							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labanean	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1 unit	31.763.151,00	1 unit	37.614.000,00	1 unit	6.653.000,00	1 unit	4.437.000,00	1 unit	4.545.500	19.605.900,00	1 unit	35.241.400,00	67.004.551,00		Dinas PUPR					
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Labanean	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	30 unit	320.136.756,00	30 unit	278.356.000,00	30 unit	34.081.250,00	30 unit	48.856.350,00	30 unit	27.175.850	135.561.250,00	32 unit	245.674.700,00	565.811.456,00		Dinas PUPR					
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	3 unit	22.158.000,00	6 unit	28.500.000,00	3 unit	4.700.000,00	3 unit	1.955.000,00		3 unit	8.720.000,00	6 unit	15.375.000,00	37.533.000,00		Dinas PUPR					
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah kapling tanah yang disewa	0	2.700.000,00	1 Kapling	9.000.000,00	0	0,00	0		1 Kapling	2.730.000,00		1 kapling	2.730.000,00	5.430.000,00		Dinas PUPR					
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Baneuan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan baneuan lainnya yang terpelihara	1 unit	89.919.650,00	1 unit	53.320.000,00	0	0,00	0	1 unit	28.228.000,00	1 unit	21.509.000,00	1 unit	49.737.000,00	139.656.650,00		Dinas PUPR					
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	89%	4.802.378.844,00	66,00%	843.557.832,52	87,00%	1.940.921.700,00	5,00%	1.525.000,00	15,00%	56.536.000,00	20%	148.659.679,17	37,91%	1.529.384.951,84	77,91%	1.736.105.631,01	71,96%	2.579.663.463,53	53,72%		
				Persentase panjang sungai yang dikonservasi	70%														40,78%		40,78%				
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah/panjang jaringan irigasi yang dipelihara		0,00	265 m	408.360.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%	248.460.250,00	93,32%	248.460.250,00	248.460.250,00							
			Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah Panjang DAM sungai yang terpelihara		265 m	408.360.000,00	0	0,00	0				47,3 mete	248.460.250,00	47,3 mete	248.460.250,00	248.460.250,00		Dinas PUPR					
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah/panjang jaringan irigasi yang dipelihara		843.557.832,52	2500 m	1.532.561.700,00	0,00%	1.525.000,00	8,00%	56.536.000,00	15%	148.659.679,17	25,38%	1.280.924.701,84	8,00%	1.487.645.381,01	2.331.203.213,53						
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah/panjang jaringan irigasi yang dipelihara		2000 m	780.120.000,00	0	0,00	0				12,8 mete	772.455.850,00	12,8 mete	772.455.850,00	772.455.850,00		Dinas PUPR					
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah/panjang jaringan irigasi yang direhab		1500 m	752.441.700,00	60 m	1.525.000,00	125 m	56.536.000,00	175 m	148.659.679	75,4 mete	508.468.851,84	75,4 mete	715.189.531,01	715.189.531,01		Dinas PUPR					
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase cakupan pelayanan air minum	92%	3.005.658.879,00	90,00%	367.545.228,00	282.000.000,00	5,00%	0,00	15,00%	0,00	45%	0,00	22%	198.490.400,00	87,00%	198.490.400,00	88,50%	566.035.628,00	18,83%			
				Persentase cakupan pelayanan air limbah																					
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaringan sambungan rumah yang dibangun		367.545.228,00	282.000.000,00	5,00%	0,00	15,00%	0,00	6 ruas	0,00	175,00%	198.490.400,00	175,00%	198.490.400,00	566.035.628,00							
			Peningkatan SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah jaringan sambungan rumah yang dibangun		100 SR	282.000.000,00	0	0,00	0				175 SR	198.490.400,00	175 SR	198.490.400,00	198.490.400,00		Dinas PUPR					
Meningkatnya cakupan layanan pencegahan stunting urusan dari sektor Air minum dan Air Limbah			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Persentase Cakupan Pelayanan Air Limbah	94,00%	2.135.312.368,00	81,00%	1.525.445.000,00	2,00%	4.799.556.200,00	15,00%	15.814.936,00	25,21%	1.065.094.954,00	35%	1.980.215.204,00	12,00%	1.575.685.152,00	87,21%	4.636.810.246,00	84,11%	6.162.255.246,00	288,59%		
				Jumlah penambahan sambungan rumah jaringan air limbah yang dibangun di kota Padang Paniane	25 SR	1.525.445.000,00	3 SR	4.799.556.200,00	0,00%	15.814.936,00	1.065.094.954,00	1.980.215.204,00	1.575.685.152,00	0,00%	4.636.810.246,00	6.162.255.246,00									
			Jumlah septitank/MCK yang diadakan			1 unit	0					1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit								
			Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan			2 orang	2 orang	2 orang				2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang							
			Jumlah unit pengelolaan limbah yang dikelola			1 unit	1 unit					1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit								
			Jumlah sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang dibangun di kota padang naniane			3 unit	3 unit	0								0									
			Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan sambungan rumah jaringan air limbah yang dibangun di kota Padang Panjang	25 SR	152.000.000,00	100 SR	465.000.000,00	0	0,00	0	57.500.000,00	264.500.000,00	65 SR	143.000.000,00	65 SR	465.000.000,00	617.000.000,00		Dinas PUPR					
			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah septitank/MCK yang diadakan		1 unit	204.360.000,00	1 unit	0,00	0		1	2.040.000,00	1	200.887.000,00	1 unit	202.927.000,00	202.927.000,00		Dinas PUPR					
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan		2 orang	192.731.200,00	2 orang	14.743.936,00	2 orang	18.294.704,00	2 orang	20.160.704	2 orang	32.438.402,00	2 orang	85.637.746,00	85.637.746,00		Dinas PUPR					
			Jumlah unit pengelolaan limbah yang dikelola			1 unit	1 unit				1 unit		1 unit												
			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang dibangun di kota padang panjang	3 unit	1.373.445.000,00	3 unit	3.937.465.000,00	0	1.071.000,00	0	989.300.250,00	0	1.693.514.500	1.199.359.750,00	3.883.245.500,00	5.256.690.500,00		Dinas PUPR						

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
								I		II		III		IV						13		14=7x13		15=14/6 x 100%			
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
								1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12	13	14=7x13	15=14/6 x 100%	16
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	92%	3.005.658.879,00	90,00%	367.545.228,00	91,00%	2.092.665.000,00	5,00%	21.335.680,00	15,00%	140.347.520,00	45%	554.051.020,00	32,88%	1.351.911.860,00	97,88%	2.067.646.080,00	93,94%	2.435.191.308,00	81,02%				
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah panjang drainase / gorong-gorong yang dipelihara			367.545.228,00	14 ruas	2.092.665.000,00	5,00%	21.335.680,00	15,00%	140.347.520,00	6 ruas	554.051.020,00	92,86%	1.351.911.860,00	13 ruas	2.067.646.080,00		2.435.191.308,00						
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah ruas / panjang drainase / gorong-gorong yang dibangun				2 ruas	351.720.000,00	0	0,00	0	2	338.753.000,00	4 ruas	9.720.000,00	4 ruas	348.473.000,00		348.473.000,00				Dinas PUPR			
			Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah panjang drainase / gorong-gorong yang dipelihara			300 m	367.545.228,00	4 ruas	1.740.945.000,00	0	21.335.680,00	0	140.347.520,00	4	215.298.020	13 ruas	1.342.191.860,00	13 ruas	1.719.173.080,00		2.086.718.308,00				Dinas PUPR	
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan ber IMB per satuan bangunan	44,50%	789.542.750,00	77,00%	383.785.180,00	44,20%	125.542.000,00	35,00%	800.000,00	5,00%	12.248.200,00	15%	15.932.850,00	37,82%	75.321.800,00	37,82%	104.302.850,00	57,41%	488.088.030,00	61,82%				
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	Jumlah dokumen advice yang diberikan oleh Tim ahli bangunan gedung			383.785.180,00	6 dokumen	125.542.000,00	2 dokumen	800.000,00	2 dokumen	12.248.200,00	2 dokumen	15.932.850,00	100%	75.321.800,00	5 dokumen	104.302.850,00		104.302.850,00					Dinas PUPR	
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan			Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi UMCG	Jumlah dokumen advice yang diberikan oleh Tim ahli bangunan gedung				6 dokumen	125.542.000,00	2 dokumen	800.000,00	2 dokumen	12.248.200,00	2 dokumen	15.932.850	5 dokumen	75.321.800,00	5 dokumen	104.302.850,00		104.302.850,00					Dinas PUPR	
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase ketersediaan sarana publik	100%	5.493.184.546,00	65,00%	3.368.222.992,00	88,00%	1.179.905.300,00	5,00%	0,00	25,00%	139.338.200,00	40,00%	48.196.550,00	24%	798.719.550,00	94,00%	986.254.300,00	79,50%	4.354.477.292,00	79,27%				
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan prasarana umum yang dibangun (Tourist Information Centre/TIC)			383.785.180,00	1 kota	1.179.905.300,00	0	0,00	25,00%	139.338.200,00	35%	48.196.550,00	40%	798.719.550,00	1 kota	986.254.300,00		1.370.039.480,00						
			Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah RTH dan sarana umum yang terpelihara			1 kota	2.367.836.892,00	1 kota	820.814.800,00	0	0,00	139.338.200,00		48.196.550,00	1 kota	576.913.000,00	1 kota	764.447.750,00		3.132.284.642,00					Dinas PUPR	
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	94,50%	22.840.535.823,00	92,00%	8.841.098.689,10	93,50%	6.823.875.550,00	10,00%	22.425.200,00	15,00%	63.053.100,00	25%	1.176.723.908,54	93,50%	4.562.775.964,51	93,50%	5.824.978.173,05	92,75%	14.666.076.862,15	64,21%				
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase Trotoar Jalur Utama yang ramah disabilitas					100,00%							44,66%			44,66%								
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	Persentase Penerangan Jalan Umum (Pemasangan PJU setiap 50 m dibagi panjang jalan lingkungan dan jalan kota)				80,00%									0,00%										
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Trotoar Jalur Utama yang ramah disabilitas				83,00%								53,81%			53,81%								
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah panjang trotoar kawasan pasar yang dibangun			8.841.098.689,10	11 ruas	6.823.875.550,00	10,00%	22.425.200,00	15,00%	63.053.100,00	8 ruas	1.176.723.908,54		4.562.775.964,51	8 ruas	5.824.978.173,05		14.666.076.862,15						
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah jalan dalam kota yang dipelihara secara periodik				1,2 km			0,00	-	0,00	-				0	0,00								
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan			Pembangunan Jalan	Jumlah jalan dalam kota yang terpelihara				100 m				100 m						100 m									
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah panjang trotoar yang terpelihara				500 m				100 m		100 m					100 m								
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan			Pembangunan Jalan	Jumlah panjang trotoar kawasan pasar yang dibangun			147 m	1.742.131.600,00	11 ruas	1.056.955.200,00	0	0,00	0	8 ruas	1.372.232,00		992.377.275,00	8 ruas	993.749.507,00		2.735.881.107,00				Dinas PUPR		
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah jalan dalam kota yang terpelihara				3.539.080.575,28	1,2 km	5.123.510.350,00		2.008.200,00	-	704.100,00	5 km	926.868.995	2,66 km	3.261.909.889,76	2,66 km	4.191.491.184,80		7.730.571.760,08				Dinas PUPR	
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan			Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah jalan dalam kota yang terpelihara			3.559.886.513,82	100 m	643.410.000,00	100 m	20.417.000,00	100 m	62.349.000,00	100 m	248.482.682	052 mete	308.488.799,75	052 mete	639.737.481,25		4.199.623.995,07				Dinas PUPR		
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah panjang trotoar yang terpelihara				500 m			100 m		100 m		100 m			100 m		0,00							
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Proporsi Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat	#####	417.822.900,00	61,00%	9.552.850,00	81,00%	226.087.550,00	5,00%	1.250.000,00	25,00%	48.802.800,00	25%	13.810.950,00	61%	95.409.025,00	61,00%	159.272.775,00	61,00%	168.825.625,00	40,41%				
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Trampil Konstruksi	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan				3 kali	143.931.750,00	5,00%	1.250.000,00	5,00%	47.492.800,00	15%	7.650.000,00	66,67%	55.150.750,00	91,67%	111.543.550,00		111.543.550,00						
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan			9.552.850,00	76 buku	69.380.800,00	0	0,00	13,00%	1.310.000,00	25%	4.507.200,00	100,00%	35.873.225,00	76 buku	41.690.425,00		51.243.275,00						
			Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Buku Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang dicetak			45 buku	9.552.850,00	76 buku	58.356.000,00	0	0,00		1.310.000,00		2.329.500	76 buku	33.598.225,00	76 buku	37.237.725,00		46.790.575,00				Dinas PUPR	
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan			Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah dokumen pra perencanaan dan pendampingan konstruksi yang dilaksanakan				10 dokumen	10.974.800,00	0	0,00		4 dokumen	6 dokumen	2.177.700,00	8 dokumen	2.275.000,00	8 dokumen	4.452.700,00		4.452.700,00				Dinas PUPR		

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I				II				III								IV			
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.
			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembinaan dalam hal pelaksanaan kegiatan serta terpenuhinya			10 Laporan	12.825.000,00	0	0,00	13,00%	0,00	6 laporan	1.653.750,00		4.385.050,00	6 laporan	6.038.800,00	6.038.800,00								
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembinaan dalam hal pelaksanaan kegiatan serta terpenuhinya			10 Laporan	12.825.000,00	0	0,00	4 laporan		6 laporan	1.653.750	10 laporan	4.385.050,00	10 laporan	6.038.800,00	6.038.800,00			Dinas PUPR					
	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	82,50%	2.221.956.450,00	81,00%	301.633.665,00	82,00%	632.867.350,00	7,00%	1.100.000,00	15,00%	21.313.067,00	20%	84.517.058,00	30%	322.513.815,00	72,00%	429.443.940,00	76,50%	731.077.605,00	32,90%				
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR)	Jumlah dokumen dalam rangka per substansi RTRW ke Kemen ATR			1 dokumen	358.440.350,00	1 dokumen	1.100.000,00	1 dokumen	11.913.317,00	1 dokumen	76.459.783,00		127.766.015,00	1 dokumen	217.239.115,00	430.054.480,00								
			Pelaksanaan Peretujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi dan Penetapan RTRW	Jumlah dokumen dalam rangka per substansi RTRW ke Kemen ATR	1 dokumen	212.815.365,00	1 dokumen	358.440.350,00	1 dokumen	1.100.000,00	1 dokumen	11.913.317,00	1 dokumen	76.459.783	1 dokumen	127.766.015,00	1 dokumen	217.239.115,00	430.054.480,00			Dinas PUPR					
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Data Digital			4 unit	66.700.000,00	1 unit	164.950.500,00	0	0,00	0			1.295.000,00		150.819.700,00	0	152.114.700,00	218.814.700,00		Dinas PUPR				
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan			96 kali	109.476.500,00	24 kali	0,00	0,00	9.399.750,00	60 kali	6.762.275,00	96 kali	43.928.100,00	96 kali	60.090.125,00	82.208.425,00								
			Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan	96 kali	22.118.300,00	96 kali	63.064.800,00	24 kali	0,00	30 kali	5.400.000,00	60 kali	4.937.900	36 kali	39.455.300,00	96 kali	49.793.200,00	71.911.500,00			Dinas PUPR					
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah rakor penataan ruang yang dilaksanakan	2 kali	3.215.100,00	4 kali	46.411.700,00	1 kali	0,00	2 kali	3.999.750,00	2 kali	1.824.375	4 kali	4.472.800,00	4 kali	10.296.925,00	13.512.025,00			Dinas PUPR					
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>						<b>27.423.400,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00%</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>15,00%</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>82,00%</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>112,00%</b>	<b>7.430.000,00</b>								
	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang		Program Penatagunaan Tanah	Persentase Luas Rencana penggunaan tanah/Luas wilayah Kota Padang Panjang		0,00	82,00%	27.423.400,00	5,00%	0,00	10,00%	1.800.000,00	15%	1.880.000,00	82%	3.750.000,00	82,00%	7.430.000,00	7.430.000,00								
			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi perencanaan penggunaan tanah yang dilakukan			5 kali	27.423.400,00	0,00%	0,00	45,00%	1.800.000,00		1.880.000,00	5 kali	3.750.000,00	5 kali	7.430.000,00	7.430.000,00								
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Koordinasi perencanaan penggunaan tanah yang dilakukan			44 Sertifikat		0	0,00	0			189 sertifikat		189 sertifikat	0,00										
				Jumlah sertifikat infrastruktur ke-PU an yang diterbitkan			5 kali	27.423.400,00	0	0,00	0	1.800.000,00		1.880.000	5 kali	3.750.000,00	#VALUE!	7.430.000,00	7.430.000,00			Dinas PUPR					
				Jumlah sertifikat infrastruktur ke-PU an yang diterbitkan			44 Sertifikat		0	0,00	200 Sertifikat			189 sertifikat		200 Sertifikat	0,00										
4.			DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		94.311.742.157,90	93,25%	15.502.205.312,00		25.684.358.078,00	15,65%	2.624.105.730,00	20,02%	4.767.536.638,00	22,50%	5.950.165.826,43	35,00%	11.054.544.345,33	93,17%	24.396.352.539,76	93,21%	39.898.557.851,76	42,30%					
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																								
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						<b>13.895.152.810,00</b>	<b>19,00%</b>	<b>1.088.096.477,00</b>	<b>22,50%</b>	<b>1.877.519.590,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>3.689.068.026,43</b>	<b>30,00%</b>	<b>6.520.840.465,33</b>	<b>96,50%</b>	<b>13.175.524.558,76</b>								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		90,00%	6.112.095.207,00	100,00%	5.827.689.346,00	25,00%	992.515.153,00	25,00%	1.505.001.511,00	25,00%	1.525.997.803,00	25%	1.586.710.790,00	100,00%	5.610.225.257,00	95,00%	11.722.320.464,00						
			Kegiatan Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan ASN, Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun, Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran			37 orang, 15 laporan	4.572.607.000,00	37 orang, 13 laporan	816.280.293,00	36 orang, 4 laporan	1.218.806.087,00	36 orang, 1 laporan	1.230.580.440,00	36 orang, 4 laporan	1.201.648.989,00	36 orang	4.465.968.009,00	8.694.503.732,00			Dinas Perkim LH					
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yg dibayarkan Gaji dan tunjangan	14 bulan	4.228.535.723,00	37 orang	4.570.957.000,00	37 orang	816.280.293,00	36 orang	1.218.057.087,00	36 orang	1.230.288.640	36 orang	1.201.341.989,00	36 orang	4.465.968.009,00	8.694.503.732,00			Dinas Perkim LH					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		672.500,00	1 laporan	850.000,00	1 laporan	0,00	1 laporan	749.000,00			1 laporan	749.000,00		1.421.500,00			Dinas Perkim LH						
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	13 laporan	387.000,00	13 laporan	500.000,00	3 laporan	0,00	3 laporan	0,00	3 laporan	4 laporan	307.000,00	13 laporan	307.000,00	694.000,00			Dinas Perkim LH						
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Laporan Prognosis	1 laporan	273.000,00	1 laporan	300.000,00		0,00		1 laporan		291.800	1 laporan	291.800,00		564.800,00			Dinas Perkim LH						
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik, air, dan komunikasi yang disediakan, jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan, Jumlah jenis barang cetakan dan jumlah pengadaan yang disediakan, Jumlah makan dan minum yang disediakan, Jumlah rapat-rapat		224.240.095,00	21 jenis, 58 jenis, 2 gedung kantor, 12 jenis dan 997 lembar, 1033 ok	305.216.326,00	2 jenis, 7 jenis, 2 jenis, 2 gedung kantor, 7 jenis dan 997 lembar, 165 ok	3 jenis, 21 jenis, 2 gedung kantor, 3 jenis dan 1231 lembar, 187 ok	30.773.800,00	3 jenis, 2 jenis, 2 jenis, 2 gedung kantor, 3 jenis dan 1231 lembar, 187 ok	66.827.535,00	9 jenis, 24 jenis, 9 jenis dan 6518 lembar, 143 ok	62.316.646,00	126.668.782,00	286.586.763,00	510.826.858,00									
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik, air, dan komunikasi yang disediakan		8.224.500,00	21 jenis	8.320.000,00	2 jenis	673.000,00	3 jenis	455.000,00	9 jenis	1.982.000	4 jenis	4.133.000,00	18 jenis	7.243.000,00	15.467.500,00			Dinas Perkim LH					

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								I		II		III		IV				13	14=7+13		15=14/6 x 100%		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K		Rp.	K	Rp.
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan		58 jenis 73.235.450,00	58 jenis 72.267.600,00	7 jenis 5.979.900,00	21 jenis 11.184.300,00	24 jenis 17.891.550	20 jenis 25.021.250,00	72 jenis 60.077.000,00		133.312.450,00			Dinas Perkim LH						
				Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan		2 gedung kantor 0,00	2 gedung kantor	2 gedung kantor	2 gedung kantor	2 gedung kantor	2 gedung kantor	2 gedung kantor 0,00											
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan jumlah penggandaan yang disediakan		11 jenis dan 771 12.298.750,00	12 jenis dan 9976 15.489.400,00	7 jenis dan 1065	3 jenis dan 1231 1.877.350,00	9 jenis dan 6518 4.229.900	2 jenis dan 6.218.650,00	12 jenis dan 2296 12.325.900,00		24.624.650,00			Dinas Perkim LH						
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum yang disediakan		56 ok 130.481.395,00	1033 ok 209.139.326,00	165 ok 24.120.900,00	187 ok 53.310.885,00	143 ok 38.213.196	514 ok 91.295.882,00	1009 ok 206.940.863,00		337.422.258,00			Dinas Perkim LH						
				Jumlah rapat-rapat koordinasi yang diikuti luar daerah		23 ok	150 ok	36 ok	83 ok		86 ok	288 ok 0,00											
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas diadakan, Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia		97.465.000,00	6 unit, 3 unit 68.725.870,00	6 unit, 3 unit 19.850.000,00	0,00	4 unit 35.850.000,00	3 unit 11.170.000,00	4 unit, 3 unit 66.870.000,00		164.335.000,00									
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia		3 jenis 97.465.000,00	6 unit 36.369.070,00		0,00	4 unit 35.850.000,00		4 unit 35.850.000,00		133.315.000,00			Dinas Perkim LH						
			Pengadaan Pengadaan sarana dan perasarana pendukung gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia			3 unit 32.356.800,00	3 unit 19.850.000,00	0,00		3 unit 11.170.000,00	3 unit 31.020.000,00		31.020.000,00			Dinas Perkim LH						
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah tagihan jasa air, listrik, telepon yang dibayarkan, Jumlah tenaga harian lepas yang tersedia		465.372.782,00	36 reke ning, 11 orang 618.000.400,00	36 reke ning, 11 orang 91.952.310,00	36 reke ning, 29 orang 159.381.779,00	6 rekening, 29 orang 136.060.047,00		195.820.069,00	583.214.205,00	1.048.586.987,00									
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa air yang dibayarkan		6 rekening 37.001.262,00	24 reke ning 66.934.000,00	6 reke ning 11.918.230,00	6 reke ning 12.107.699,00	6 rekening 11.457.327	4 rekening 16.714.629,00	4 reke nin 52.197.885,00		89.199.147,00			Dinas Perkim LH						
				Jumlah tagihan jasa listrik yang dibayarkan		6 rekening	24 reke ning	6 reke ning	6 reke ning	6 rekening	6 rekening	24 reke nin 0,00		0,00									
				Jumlah tagihan jasa telepon yang dibayarkan		3 rekening	12 reke ning	3 reke ning	3 reke ning	3 reke ning	3 reke ning	12 reke nin 0,00		0,00									
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas yang tersedia			23 orang 551.066.400,00	23 orang 80.034.080,00	29 orang 147.274.080,00	29 orang 124.602.720	29 orang 179.105.440,00	29 orang 531.016.320,00		531.016.320,00			Dinas Perkim LH						
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara, Jumlah jenis alat-alat kantor yang terpelihara, Jumlah gedung kantor yang terpelihara		428.371.520,00	3 unit, 6 jenis, 2 gedung kantor 263.139.750,00	1 unit, 3 unit, 26 jenis 33.658.750,00	1 unit, 6 jenis, 1 gedung kantor 59.986.110,00	1 unit, 4 jenis, 1 gedung kantor 61.190.670,00	3 unit 51.402.950,00	1 unit, 3 unit, 26 jenis 206.238.480,00		634.610.000,00									
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang terpelihara		28 unit, 2 jenis, 1 gedung kantor 1.094.683.607,00	1 unit 32.724.000,00	1 unit 6.688.500,00	1 unit 4.360.500,00	1 unit 6.572.500		8.883.700,00	1 unit 26.505.200,00		1.121.188.807,00			Dinas Perkim LH					
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Layanan	Jumlah kendaraan dinas / operasional dan lapangan yang terpelihara		28 unit 849.775.550,00	5 unit 119.075.750,00	3 unit 26.890.250,00	6 unit 17.513.950,00	4 unit 29.076.750	4 unit 27.292.250,00	9 unit 100.773.200,00		950.548.750,00			Dinas Perkim LH						
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis alat-alat kantor yang terpelihara		2 jenis 19.631.500,00	6 jenis 34.720.000,00	2 jenis 80.000,00	2 jenis 650.000,00	4 jenis 2.626.000	2.522.000,00	6 jenis 5.878.000,00		25.509.500,00			Dinas Perkim LH						
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		1 gedung kantor 225.276.557,00	2 gedung kantor 76.620.000,00		1 gedung kantor 37.461.660,00	1 gedung kantor 22.915.420	1 gedung kantor 12.705.000,00	2 gedung kantor 73.082.080,00		298.358.637,00			Dinas Perkim LH						
	Meningkat Ketersediaan Rumah layak Huni Bagi Masyarakat		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio rumah layak huni	97,10%	1.034.550.404	100,00%	212.877.436,00	96,21%	342.560.984,00	20,00%	36.418.324,00	25%	60.127.816,00	25%	45.787.224,00	95,22%	222.073.746,00	97,61%	434.951.182,00	42,04%		
			Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Pembangunan Rumah Korban Bencana atau Rehabilitasi Perumahan	Jumlah Rumah Korban Bencana yang di Rehab dan Di Bangun			5 Unit 50.509.000,00	5,00%	250.000,00	5,00%	580.000,00	10%	0,00	0,00	20,00%	830.000,00							
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana yang di Rehab dan di Bangun			5 Unit 50.509.000,00		250.000,00	5 Unit 580.000,00			5 Unit 830.000,00		830.000,00			830.000,00			Dinas Perkim LH		
			Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Hunian Rusunawa yang di Kelola		212.877.436,00	72 Hunian, 6 Orang 292.051.984,00	25,00%	36.168.324,00	25,00%	59.547.816,00	25,00%	45.787.224,00	25%	79.740.382,00	100,00%	221.243.746,00						
			Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghun Rumah Susun	Jumlah Hunian Rusunawa yang di Kelola dan Jumlah Tenaga Harian Lepas yang Dibayarkan		72 hunian 212.877.436,00	72 Hunian, 6 Orang 292.051.984,00	72 Hunian, 6 Orang 36.168.324,00	72 Hunian, 6 Orang 59.547.816,00	72 Hunian, 6 Orang 45.787.224	72 Hunian, 6 Orang 79.740.382,00	72 Hunian, 6 Orang 221.243.746,00		434.121.182,00			Dinas Perkim LH						
	Meningkat nya kualiti tas Lingkungan permukiman		PROGRAM PERMUKIMAN KAWASAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh	40,00%	3.695.951.750,00	20,00%	1.194.719.800,00	73,59%	1.045.063.480,00	15,00%	1.150.000,00	15,00%	20.854.950,00	4.012.250,00	37,97%	873.036.553,00	73,97%	899.053.753,00	46,99%	2.093.773.553,00	56,65%	
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh			1 Doku men 57.304.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.334.250,00	0,00%	37.334.250,00								
			Penyusunan/Reviu/Legalisasi/Kebijakan Bidang PKP	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan			10 Kali 57.304.100,00	0,00	0,00	0,00		37.334.250,00		37.334.250,00							Dinas Perkim LH		
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah yang direhab (APBD dan DAK)		1.092.984.650,00	85 unit, 10 kali 987.759.380,00	12,00%	1.150.000,00	12,00%	20.854.950,00	30%	4.012.250,00	835.702.303,00	54,00%	861.719.503,00							
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah yang direhab (APBD dan DAK)		36 unit 1.092.984.650,00	43 unit 900.000.000,00		0,00			40 unit 829.528.440,00		829.528.440,00								Dinas Perkim LH	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV				13	14=7+13		15=14/6 x 100%				
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan		12 kali	87.759.380,00	3 kali	1.150.000,00	3 kali	20.854.950,00	3 kali	4.012.250,00	1 kali	6.173.863,00	10 kali	32.191.063,00		32.191.063,00			Dinas Perkim LH		
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard	91,00%	16.351.562.808,00	70,00%	412.593.000,00	88,00%	6.679.839.000,00	25,00%	58.013.000,00	25,00%	291.535.313,00	25,00%	2.113.270.749,43	13%	3.981.352.740,33	88,00%	6.444.171.802,76	79,00%	6.856.764.802,76	41,93%	
				Urusan Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman (jalan lingkungan, dam dan saluran, Jumlah lokasi permukiman yang dilengkapi dengan bangunan pengaman, Jumlah ruas jalan lingkungan yang sesuai standar (dengan perkerasan), Persentase saluran drainase/teknis/bersih/tertutup)		412.593.000,00		2 keca matan,15 lokasi sarana Jalan setapak, 10 DAM, 7 Drainase	6.679.839.000,00	25,00%	58.013.000,00	25,00%	291.535.313,00	25,00%	2.113.270.749,43	13%	3.981.352.740,33	88,00%	6.444.171.802,76		6.856.764.802,76			
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1. Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman (jalan lingkungan, dam dan saluran)		412.593.000,00	2 kecamatan	2 keca matan,15 lokasi sarana Jalan setapak, 10 DAM, 7	6.679.839.000,00	2 kecamatan	58.013.000,00	keca mata	291.535.313,00	2 kecamata n,9 lokasi sarana Jalan setapak, 8 DAM, 2	2.113.270.749	2 keca matan,2 lokasi sarana Jalan setapak, 5	3.981.352.740,33	2 kecamatan	6.444.171.802,76		6.856.764.802,76			Dinas Perkim LH
				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>						11.789.205.268,00	12,30%	1.536.009.253,00	17,54%	2.890.017.048,00	20,00%	2.261.097.800,00	40,00%	4.533.703.880,00	89,84%	11.220.827.981,00					
	Meningkatnya Kualiti Air, Udara dan Tutupan Lahan			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan		0,00	233.149.052,00	100%	233.149.052,00	100,00%	24.562.000,00	25,00%	1.359.750,00	26,22%	6.439.000,00	30%	5.256.350,00	18,78%	10.363.050,00	100,00%	23.418.150,00	100,00%	256.567.202,00	
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, Jumlah dokumen DODD		18.247.250,00	1 dokumen	24.562.000,00	1.359.750,00		6.439.000,00		5.256.350,00		10.363.050,00	0,00%	23.418.150,00		41.665.400,00				Dinas Perkim LH	
				Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup		18.247.250,00	1 dokumen	24.562.000,00	1.359.750,00		6.439.000,00	1 dokumen	5.256.350	dokumen	10.363.050,00		23.418.150,00		41.665.400,00				Dinas Perkim LH	
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemaran ringan	14,29%	1.336.289.220,00	77,78%	412.161.413,00	28,57%	350.779.400,00	12,50%	13.354.912,00	25,00%	88.401.752,00	30%	90.329.650,00	28,57%	124.194.592,00	28,57%	316.280.906,00	53,17%	728.442.319,00	54,51%	
				Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jenis hasil Uji, Jumlah kampung iklim yg di bina		385.268.938,00	2 jenis,6 kampung iklim	312.319.400,00	25,00%	13.354.912,00	25,00%	88.401.752,00	25,00%	71.734.400,00		108.735.404,00	75,00%	282.226.468,00		667.495.406,00				
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Kampung Iklim yang dibina		45.619.030,00	6 kampung iklim	32.637.000,00	6 kampung iklim	352.800,00	6 kampung iklim	832.000,00	6 kampung iklim	10.108.350	8 kampung iklim	20.319.188,00	6 kampung iklim	31.612.338,00		77.231.368,00				Dinas Perkim LH
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Jenis hasil uji		279.682.400,00	2 jenis	13.002.112,00	2 jenis	87.569.752,00	2 jenis	61.626.050	2 jenis	88.416.216,00	2 jenis	250.614.130,00		250.614.130,00		250.614.130,00				Dinas Perkim LH
				Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Data kualitas lingkungan, Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya		26.892.475,00	2 Data sungai,	38.460.000,00	0,00%	0,00	25,00%	0,00	30,00%	18.595.250,00		15.459.188,00	55,00%	34.054.438,00		60.946.913,00				
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Data kualitas lingkungan		26.892.475,00	1 data	38.460.000,00	0,00	0,00	1 Sungai	0,00	18.595.250	2 data	15.459.188,00		34.054.438,00		60.946.913,00		0,00			Dinas Perkim LH
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ketersediaan Dokumen KEHATI		2.584.082.200,00	66,00%	2.584.082.200,00	25,00%	244.960.984,00	20,00%	458.633.548,00	15%	404.481.445,00	6%	1.422.354.213,00	66,00%	2.530.430.190,00		2.530.430.190,00				
				Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Mutu Air pada Tingkat Cemaran Ringan		2.584.082.200,00	2 Kecamatan, 2 Data	244.960.984,00	2 Kecamatan, 2 Data	244.960.984,00	25,00%	458.633.548,00	kecamatan	404.481.445,00		1.422.354.213,00	2 Kecamatan, 2	2.530.430.190,00		2.530.430.190,00				
				Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Kehati, dan Jumlah Dokumen Data Monitoring KAHATI		77.341.000,00	1 Dokumen Monitoring	0,00	1.050.000,00	13.975.500	1 Dokumen Monitoring, 1 Dokumen Rencana Pemanfaatan KEHATI	56.395.501,00	1 Dokumen Monitoring, 1 Dokumen Rencana Pemanfaatan KEHATI	71.421.001,00	1 Dokumen Monitoring, 1 Dokumen Rencana Pemanfaatan KEHATI	71.421.001,00		71.421.001,00		71.421.001,00				Dinas Perkim LH
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah taman yg dibangun dan jumlah taman yg terpelihara		2.506.741.200,00	4 lokasi dan 2	244.960.984,00	2 kecamatan	244.960.984,00	kecamatan	457.583.548,00	kecamatan	390.505.945	2 kecamatan	2.459.009.189,00		2.459.009.189,00		2.459.009.189,00				Dinas Perkim LH

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV						13		14=7+13		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.	K
	Meningkatnya Cakupan Layanan Pencegahan Stunting dari Urusan Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAM BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DALAM 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes ( Jmlh Fasyankes yg mengelola Limbah/Penghasil Limbah)		20,00%	75.139.625,00	26-30	22.701.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,00%	512.100,00	23%	19.534.975,00	28,00%	20.047.075,00	24,00%	95.186.700,00			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, dan Penanganan Limbah/atau	Jumlah Limbah B3 yang dikelola		20 Fasyan kes	75.139.625,00	10 Fasyan kes	22.701.000,00	0,00	0,00	0,00	512.100,00	10 Fasyan kes	19.534.975,00	10 Fasyan kes	20.047.075,00	95.186.700,00				Dinas Perkim LH		
	Meningkatnya Kualiti tas Air, Udara, dan Tutupan lahan		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USHAH DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat ketepatan penerapan izin lingkungan	65,00%	87.445.600,00	40,00%	12.285.850,00	60,00%	14.044.050,00	7,62%	1.165.500,00	16,19%	4.800.600,00	15%	250.000,00	21,72%	6.728.875,00	60,53%	12.944.975,00	50,26%	25.230.825,00	28,85%	
			Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi		100 kegiatan	12.285.850,00	105 Kegiatan	14.044.050,00	8 Kegiatan	1.165.500,00	16,19%	4.800.600,00	50%	250.000,00	6.728.875,00	73,81%	12.944.975,00	25.230.825,00				Dinas Perkim LH	
			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi		100 kegiatan	12.285.850,00	105 Kegiatan	14.044.050,00	8 Kegiatan	1.165.500,00	16,19%	4.800.600,00	51 kegiatan	250.000,00	105 kegiatan	6.728.875,00	05 kegiatan	12.944.975,00	25.230.825,00				Dinas Perkim LH
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluhan dan Informasi Lingkungan Hidup		100,00%	108.961.100,00	100,00%	133.798.200,00	25,00%	0,00	25,00%	54.846.500,00	25,00%	8.698.250,00	25%	61.100.475,00	100,00%	124.645.225,00	100,00%	233.606.325,00			
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan kader lingkungan, Jenis Data dan Informasi Lingkungan yang disajikan		5 kali pertemuan	108.961.100,00	4 kali pertemuan, 2 Jenis	133.798.200,00	1 kali pertemuan	0,00	1 Jenis Data Informasi dan 1 kali	54.846.500,00	1 kali pertemuan	8.698.250,00	61.100.475,00	1 kali pertemuan	124.645.225,00	233.606.325,00					
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pertemuan kader lingkungan		5 kali pertemuan	108.961.100,00	4 kali pertemuan	114.399.700,00	1 kali pertemuan	0,00	1 kali pertemuan	50.846.500,00	1 kali pertemuan	5.698.250	3 kali pertemuan	48.701.975,00	1 kali pertemuan	105.246.725,00	214.207.825,00				Dinas Perkim LH
			Penyelenggaraan Penyuluhan Kampanye Lingkungan Hidup	Jenis Data dan Informasi Lingkungan yg di sajikan		2 jenis Data dan Informasi Lingkungan	19.398.500,00	1 jenis Data dan Informasi Lingkungan	4.000.000,00	3.000.000	2 jenis Data dan Informasi Lingkungan	12.398.500,00	19.398.500,00										Dinas Perkim LH	
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penghargaan di bidang lingkungan hidup		30,00%	40.395.450,00	2 jenis	81.512.300,00	0	0,00	35,00%	26.170.000,00	5%	2.587.725,00	10%	50.297.175,00	50,00%	79.054.900,00	40,00%	119.450.350,00			
			Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Penilaian kebersihan lingkungan, Jumlah sekolah Adiwiyata		40.395.450,00	2 Jenis, 3 kali Koordinasi, 40 kali	81.512.300,00	0,00%	0,00	35,00%	26.170.000,00	50%	2.587.725,00	50.297.175,00	85,00%	79.054.900,00	119.450.350,00						
			Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Jenis Penilaian kebersihan lingkungan 2. Jumlah sekolah Adiwiyata		45 kali Pembinaan	81.512.300,00	2 Jenis 3 kali Koordinasi, 40 kali Pembinaan	0,00	2 kali Koordinasi, 35 kali Pembinaan	2 kali Koordinasi, 5 kali Pembinaan	2.587.725	1 jenis 4 kali Koordinasi, 85 kali Pembinaan	50.297.175,00	1 jenis 4 kali Koordinasi, 85 kali Pembinaan	79.054.900,00	0,00	119.450.350,00						Dinas Perkim LH
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Presentase Pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	72,00% 28,00%	22.703.362.615,00	74,00%	6.687.827.379,00	73,00% 26,00%	8.577.726.118,00	25,00%	1.275.168.107,00	28,00%	2.250.725.648,00	20%	1.748.982.280,00	9,72% 15,17%	2.839.130.525,00	82,72%	8.114.006.560,00	78,36%	14.801.833.939,00	65,20%	
			Pengelolaan Sampah	-Jumlah laporan pelaksanaan Jakstrada -Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan -Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat - Jenis sarana prasarana persampahan Jumlah TPA yang dipelihara Jumlah lokasi penyediaan lahan untuk pengolahan sampah		6.687.827.379,00	2 laporan, 183 orang, 3 kali, 1 TPA	8.577.726.118,00	25,00%	1.275.168.107,00	24,45%	2.250.725.648,00	25%	1.748.982.280,00	2.839.130.525,00	183 orang, 1 TPA	8.114.006.560,00	14.801.833.939,00						
			Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Jastrada		2 laporan	15.639.950,00		815.850,00	792.750	2 laporan	6.169.687,00	2 laporan	7.778.287,00	7.778.287,00								Dinas Perkim LH	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPJ Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPJ Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								I				II				III				IV					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPJ yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPJ Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)			
								K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.					K		Rp.	
								K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.					K		Rp.	
				Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota	Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan,		183 orang	6.183.610.600,00	183 orang	1.099.095.858,00	178 orang	1.668.753.587,00	175 orang	1.377.044.012	177 orang	1.812.739.209,00	177 orang	5.957.632.666,00	0,00				Dinas Perkim LH							
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah petugas kebersihan yang dilihat				1 jenis	144.911.955,00							0,00				144.911.955,00		Dinas Perkim LH							
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Sampah bagi Masyarakat		3 kali	20.000.000,00				0,00			3 kali	19.434.300,00	3 kali	19.434.300,00				19.434.300,00		Dinas Perkim LH						
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan di TPAT/PT/SPA	Jumlah TPA yg terpelihara		1 TPA	2.358.475.568,00	1 TPA	176.072.249,00	1 TPA	581.156.211,00	1 TPA	371.145.518	1 TPA	1.000.787.329,00	1 TPA	2.129.161.307,00				2.129.161.307,00		Dinas Perkim LH						
5.				<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>			<b>47.567.783.934,00</b>	<b>95,45%</b>	<b>10.624.360.522,00</b>			<b>11.314.957.648,00</b>	<b>23,33%</b>	<b>1.816.619.044,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>2.938.543.568,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>2.798.252.105,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>3.216.980.777,00</b>	<b>98,33%</b>	<b>10.770.395.494,00</b>	<b>96,89%</b>	<b>21.394.756.016,00</b>	<b>44,98%</b>					
				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																										
				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>								<b>11.314.957.648,00</b>	<b>23,33%</b>	<b>1.816.619.044,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>2.938.543.568,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>2.798.252.105,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>3.216.980.777,00</b>	<b>98,33%</b>	<b>10.770.395.494,00</b>								
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</b>		<b>33,33%</b>	<b>6.204.054.056,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>5.841.409.368,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>983.701.444,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>1.497.001.388,00</b>	<b>25%</b>	<b>1.514.339.945,00</b>	<b>10%</b>	<b>1.496.886.097,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>5.491.928.874,00</b>	<b>59,17%</b>	<b>11.695.982.930,00</b>								
				Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan		252.500,00	1 laporan	294.500,00		0,00		0,00	1 laporan	269.000,00		0,00		269.000,00			521.500,00								
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	252.500,00	1 laporan	294.500,00	0	0	0	1 laporan	269.000,00		-	0	269.000,00				521.500,00			Satpol PP & Damkar					
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>Persentase layanan keuangan perangkat daerah</b>		<b>4.591.046.475,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>4.808.590.862,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>919.990.242,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>1.308.820.255,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>1.296.222.222,00</b>			<b>1.223.015.034,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>4.748.047.753,00</b>			<b>9.339.094.228,00</b>							
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	41 orang	4.590.437.475,00	41 orang	4.807.638.362,00	41 Orang	919.990.242,00	41 orang	1.308.820.255,00	41 orang	1.296.046.222	41 orang	1.222.432.034,00	41 Orang	4.747.288.753,00			9.337.726.228,00			Satpol PP & Damkar					
				Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	469.000,00	1 laporan	752.500,00	0	0	0	1 laporan	583.000,00		583.000,00	0	583.000,00				1.052.000,00			Satpol PP & Damkar					
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/ Semesteran	1 laporan	70.000,00	1 laporan	100.000,00	0	0	0	1 laporan	88.000	1 laporan	-	2 laporan	88.000,00				158.000,00			Satpol PP & Damkar					
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 laporan	70.000,00	1 laporan	100.000,00	0	0	0	1 laporan	88.000,00	1 laporan	-	2 laporan	88.000,00				158.000,00			Satpol PP & Damkar					
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran</b>		<b>915.792.099,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>275.443.500,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>22.126.650,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>40.379.750,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>31.548.025,00</b>			<b>79.458.575,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>173.513.000,00</b>			<b>1.089.305.099,00</b>							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	14 jenis	2.810.000,00	1 paket	3.099.000,00	1 Paket	485.500,00	1 paket	480.000,00	1 paket	304.000	1 paket	1.723.500,00	1 Paket	2.993.000,00			5.803.000,00			Satpol PP & Damkar					
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 jenis	9.798.500,00	1 paket	16.822.000,00	1 Paket	882.000,00	1 paket	2.146.500,00	1 paket	1.782.500	1 paket	11.148.000,00	1 Paket	15.959.000,00			25.757.500,00			Satpol PP & Damkar					
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 jenis	9.329.000,00	3 paket	15.373.500,00	1 Paket	1.496.600,00	1 paket	2.706.900,00	1 paket	1.479.100	1 paket	6.440.600,00	1 Paket	12.123.200,00			21.452.200,00			Satpol PP & Damkar					
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		893.854.599,00	15 laporan	240.149.000,00	5 Laporan	19.262.550,00	5 laporan	35.046.350,00	5 laporan	27.982.425	3 laporan	60.146.475,00	18 Laporan	142.437.800,00			1.036.292.399,00			Satpol PP & Damkar					
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	<b>Persentase pemenuhan barang milik daerah</b>		<b>10.775.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>120.827.940,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>5.282.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>23.702.500,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>55.837.000,00</b>			<b>24.641.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>109.462.500,00</b>			<b>120.237.500,00</b>							
				Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15 jenis	10.775.000,00	5 unit	120.827.940,00	0	5.282.000,00	3 unit	23.702.500,00	2 unit	55.837.000		24.641.000,00	2 unit	109.462.500,00			120.237.500,00			Satpol PP & Damkar					
				Penyediaan Jasa Penunjang Usuran pemerintahan Daerah	<b>Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah</b>		<b>121.481.682,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>125.997.816,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>21.468.302,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>32.488.983,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>28.350.723,00</b>			<b>40.504.338,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>122.812.346,00</b>			<b>244.294.028,00</b>							
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	2 jenis	59.575.062,00	11 laporan	59.891.200,00	2 Laporan	8.532.620,00	2 laporan	15.582.620,00	2 laporan	14.132.620	5 laporan	21.032.620,00	11 Laporan	59.280.480,00			118.855.542,00			Satpol PP & Damkar					
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 rekening	24.643.090,00	36 laporan	26.786.016,00	9 Laporan	7.115.372,00	9 laporan	5.786.053,00	9 laporan	5.623.793	9 laporan	6.534.408,00	36 Laporan	25.059.626,00			49.702.716,00			Satpol PP & Damkar					
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 orang	37.263.530,00	11 laporan	39.320.600,00	2 Laporan	5.820.310,00	2 laporan	11.120.310,00	2 laporan	8.594.310	5 laporan	12.937.310,00	11 Laporan	38.472.240,00			75.735.770,00			Satpol PP & Damkar					



No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
								I		II		III		IV						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
								9		10		11		12													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7*13	15=14/6 x 100%	16												
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah		389.022.200,00	90,00%	510.254.750,00	25,00%	14.834.250,00	25,00%	91.609.900,00	25,00%	102.112.975,00		129.267.150,00	90,00%	337.824.275,00	726.846.475,00								
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	26 unit	325.094.200,00		433.990.750,00	4 Unit	14.834.250,00	4 unit	78.748.900,00	4 unit	57.373.350	4 unit	116.589.150,00	4 Unit	267.545.650,00	592.639.850,00		Satpol PP & Damkar						
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	63.928.000,00		76.264.000,00	0	0,00	2 unit	12.861.000,00	2 unit	44.739.625	2 unit	12.678.000,00	2 unit	70.278.625,00	134.206.625,00		Satpol PP & Damkar						
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100%	11.500.144.400,00	100,00%	3.294.744.396,00	90,00%	3.942.924.700,00	20,00%	608.468.370,00	25,00%	1.067.697.640,00	25,00%	857.925.370,00	20%	1.278.592.140,00	90,00%	3.812.683.520,00	95,00%	7.107.427.916,00	61,80%				
			Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum		3.173.878.396,00		3.860.925.700,00	1 operasi	585.831.370,00	1 operasi	1.051.122.640,00	4 kasus	857.925.370,00	1 Operasi	1.243.587.140,00	1 Operasi	3.738.466.520,00	6.912.344.916,00								
			Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli	Jumlah kasus gangguan ketertarikan dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan	80 kasus	3.173.878.396,00		3.829.063.200,00	80 Kasus	585.831.370,00	36 kasus	1.020.066.140,00	4 kasus	857.925.370	30 kasus	1.243.587.140,00	121 Kasus	3.707.410.020,00	6.881.288.416,00		Satpol PP & Damkar						
			Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka ketertarikan dan ketertiban umum				31.862.500,00	0	0,00	1 dokumen	31.056.500,00		-		1 dokumen	31.056.500,00		31.056.500,00		Satpol PP & Damkar						
			Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan	Jumlah operasi penegakan Perda		120.866.000,00	90,00%	81.999.000,00	90,00%	22.637.000,00	90,00%	16.575.000,00		0,00		35.005.000,00	90,00%	74.217.000,00	195.083.000,00								
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24 laporan			81.999.000,00	6 laporan	22.637.000,00	6 laporan	16.575.000,00		-	12 laporan	35.005.000,00	24 laporan	74.217.000,00	74.217.000,00		Satpol PP & Damkar						
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN	Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah	100,00%	1.125.562.070,00		1.530.623.580,00	25,00%	224.449.230,00	25,00%	373.844.540,00	25,00%	425.986.790,00	25%	441.502.540,00	10 menit	1.465.783.100,00	100,00%	2.591.345.170,00							
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	1	1.125.562.070,00		1.485.015.400,00	1 kegiatan	216.195.230,00	1	370.004.540,00		394.729.540,00		441.502.540,00	1 kegiatan	1.422.431.850,00	2.547.993.920,00								
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadam an kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 laporan	1.125.562.070,00		1.407.835.400,00	9 laporan	216.195.230,00	4 laporan	370.004.540,00	6 laporan	320.954.540	2 laporan	441.502.540,00	21 laporan	1.348.656.850,00	2.474.218.920,00		Satpol PP & Damkar						
			Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	2 unit	77.180.000,00		0	0,00	0	0,00	2 unit	73.775.000,00		-	2 unit	73.775.000,00	73.775.000,00		Satpol PP & Damkar							
			Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Jumlah kegiatan pemberdayaan	1	32.516.500,00		0	0,00	0	0,00		31.257.250,00		0,00	0	31.257.250,00	31.257.250,00									
			Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	50 orang	32.516.500,00		0	0,00	0	0,00	49 orang	31.257.250,00		-	49 orang	31.257.250,00	31.257.250,00									
			Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	1	13.091.680,00		8.254.000,00	1	8.254.000,00	1	3.840.000,00		0,00		0,00	1	12.094.000,00	12.094.000,00								
			Pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan keselamatan manusia	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	7 unit	13.091.680,00		8.254.000,00	6 unit	8.254.000,00	1 unit	3.840.000,00		-		-	7 unit	12.094.000,00	12.094.000,00								
6.			DINAS SOSIAL PPKB PPPA		50.127.668.023,00	97,50%	10.238.534.161,00		17.389.694.100,00	9,05%	1.939.590.566,00	10,15%	3.023.978.223,00	13,06%	3.332.609.324,77	53,04%	6.776.699.883,00	85,30%	15.072.877.996,77	91,40%	25.311.412.157,77	50,49%					
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																								
			Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / penunjang yang dipenuhi	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		90,00%	5.727.286.403,00	90,00%	5.644.568.200,00	25,00%	1.076.428.674,00	25,00%	1.571.580.548,00	25,00%	1.483.642.466,00	15%	1.410.684.447,00	90,00%	5.542.336.135,00	35,21%	11.269.622.538,00						
			Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan	100%	500.000,00	0,00%	0,00	100,00%	500.000,00	0	0,00		0,00		0,00	100,00%	500.000,00	500.000,00								
			Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi	Jumlah laporan yang disusun	4	500.000,00		0	0,00	4	500.000,00		-		4	500.000,00		1.000.000,00			Dinas Sosial PPKB PPPA						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RPKD Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
								I			II			III			IV							K	Rp.	K	Rp.	14=7+13		15=14/6 x 100%	
								K	Rp.	%	K	Rp.	%	K	Rp.	%	K	Rp.	%									K	Rp.	K	Rp.
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah		4.405.228.543,00	90,00%	4.412.737.200,00	32,00%	829.016.919,00	32,00%	1.229.590.817,00	25%	1.192.504.429,00		1.069.829.431,00	89,00%	4.320.941.596,00		8.726.670.139,00										
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	33	4.404.231.543,00	33	4.411.238.000,00	33 orang	828.517.219,00	0	1.229.090.817,00	33 orang	1.192.004.929	33 orang	1.069.829.431,00	33 orang	4.319.442.396,00		8.723.673.939,00		Dinas Sosial PPKB PPPA								
				Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang di susun	1	500.000,00	1	499.700,00	1 laporan	499.700,00	0	0,00				1 laporan	499.700,00		999.700,00		Dinas Sosial PPKB PPPA									
				Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang di susun	18	500.000,00	6	500.000,00	0	0,00	6	500.000,00				6	500.000,00		1.000.000,00		Dinas Sosial PPKB PPPA									
				Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi	Jumlah laporan prognosis yang di susun	1	497.000,00	1	499.500,00	0	0,00	0	0,00	1	499.500		0	499.500,00		996.500,00		Dinas Sosial PPKB PPPA									
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi		288.848.596,00	90%	266.211.300,00	25%	71.140.773,00	25%	73.018.777,00	25%	57.135.050,00		64.269.050,00	75,00%	265.563.650,00		554.412.246,00										
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat listrik yang disediakan	10	8.265.350,00	10	6.837.400,00	2 jenis	1.946.000,00	0	1.880.000,00	4	1.170.500		1.832.500,00	2 jenis	6.829.000,00		15.094.350,00		Dinas Sosial PPKB PPPA								
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor dan pelatan kebersihan kantor yang disediakan	20	70.068.500,00	20	75.142.500,00	5 jenis	17.962.000,00	0	17.721.500,00	10	17.387.500		20.006.000,00	5 jenis	73.077.000,00		143.145.500,00		Dinas Sosial PPKB PPPA								
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5	34.790.100,00	5	26.680.000,00	1 jenis	13.034.500,00	0	4.526.300,00	2	3.522.000		7.204.000,00	1 jenis	28.286.800,00		63.076.900,00		Dinas Sosial PPKB PPPA								
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti	70	175.724.646,00	70	157.551.400,00	0	38.198.273,00	0	48.890.977,00		35.055.050		35.226.550,00	0	157.370.850,00		333.095.496,00		Dinas Sosial PPKB PPPA								
					Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	800		800		0		0						0													
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah		716.848.596,00	100%	692.564.700,00	25%	108.142.009,00	25%	196.465.554,00	25%	170.560.886,00		213.510.316,00	75,00%	688.678.765,00		1.405.260.159,00										
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	5	66.526.894,00	5	42.265.500,00	5 rekening	10.911.509,00	0	9.093.054,00		10.679.886		10.162.316,00	5 rekening	40.846.765,00		107.373.659,00		Dinas Sosial PPKB PPPA								
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	23	650.054.500,00	23	650.299.200,00	23 orang	97.230.500,00	0	187.372.500,00		159.881.000		203.348.000,00	23 orang	647.832.000,00		1.297.886.500,00		Dinas Sosial PPKB PPPA								
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah		315.627.870,00	90%	272.555.000,00	25%	68.128.973,00	25%	72.005.400,00	25%	63.442.101,00		63.075.650,00	75,00%	266.652.124,00		582.279.994,00										
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		196.279.620,00	48	162.341.000,00	4 unit	40.686.973,00	5	42.133.500,00	5	43.511.101		30.906.650,00	4 unit	157.238.224,00		353.517.844,00		Dinas Sosial PPKB PPPA								
					Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua yang Dipelihara	35				5		5		10				10													
					Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat yang Dipelihara	5				0		5						5													
					Jumlah Kendaraan Dinas Roda Enam yang Dipelihara	1				0		1						1													
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Perorangan dan Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	15	20.408.850,00	8	21.200.000,00	2 unit	6.222.000,00	2	6.622.400,00	2	7.290.000		500.000,00	2 unit	20.634.400,00		41.043.250,00		Dinas Sosial PPKB PPPA								
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	34	23.968.000,00	10	24.020.000,00	2 jenis	6.315.000,00	2	6.265.000,00	2	4.815.000		6.404.000,00	2 jenis	23.799.000,00		47.767.000,00		Dinas Sosial PPKB PPPA								
					Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	10				2 jenis		2		2				2 jenis													
				Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	6	74.971.400,00	6	64.994.000,00	1 unit	14.905.000,00	2	16.984.500,00	1	7.826.000		25.265.000,00	1 unit	64.980.500,00		139.951.900,00		Dinas Sosial PPKB PPPA								
				Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Kelembagaan sosial yang aktif	#####	5.467.327.600,00	75,00%	1.304.619.560,00	100,00%	1.729.778.350,00	5,00%	326.257.217,00	25,00%	475.725.616,00	30%	480.499.454,00	36,66%	437.099.328,00	96,66%	1.719.581.615,00	85,83%	3.024.201.175,00	55,31%							
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS dan kelembagaan sosial yang dibina		1.304.619.560,00	5	1.729.778.350,00	20,00%	326.257.217,00	25,00%	475.725.616,00	30%	480.499.454,00	5	437.099.328,00	5	1.719.581.615,00												
				Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM dan TSKS yang dibina	94	310.468.810,00	92	386.866.350,00	92 Orang	84.107.000,00	0	83.631.950,00		127.922.450		90.623.800,00	92 Orang	386.285.200,00		696.754.010,00		Dinas Sosial PPKB PPPA								
					Jumlah peserta pelatihan Peningkatan SDM PSM	50				0		0					0	0,00													
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah galeri PKK yang dibuat		848.013.350,00	1	1.184.670.100,00	0	215.026.317,00	0	349.844.316,00		319.485.204		292.406.928,00	0	1.176.762.765,00		2.024.776.115,00		Dinas Sosial PPKB PPPA								
					Jumlah DPD LPM yang difasilitasi pelaksanaannya	1				1 Lembaga		0			1 Lembaga		1 Lembaga														
					Jumlah Inovasi TTG yang Dibuat	6				0		0			0		0														
					Jumlah karang taruna yang dibina	19				19 Kelompok		0					19 Kelompo														
					Jumlah kelompok dasawisma aktif	685				685 Kelompok		0					685 Kelompo														



No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I			II			III			IV								
								K	Rp.	%	K	Rp.	%	K	Rp.	%	K	Rp.	%					K	Rp.
				Penyediaan Makanan	Jumlah Lansia Terlantar yang Menerima Bantuan Makanan		280	278.156.700,00	0	5.681.450,00	280	92.879.880,00		118.845.420	90	60.003.190,00	90	277.409.940,00		277.409.940,00		Dinas Sosial PPKB PPPA			
					Jumlah penyandang Disabilitas yang Menerima Bantuan		254		0		254			390	390										
				Penyediaan Sandang	Jumlah Lansia Terlantar yang Menerima Bantuan Sandang		16	191.767.800,00	0	7.373.000,00	16	137.978.900,00		36.802.250	211	9.345.000,00	211	191.499.150,00		191.499.150,00		Dinas Sosial PPKB PPPA			
				Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Alat Bantu yang Disediakan		1	26.300.000,00	0	0,00	0	1.474.200,00		15.450.000	10	9.320.000,00	10	26.244.200,00		26.244.200,00		Dinas Sosial PPKB PPPA			
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penurunan rumah tangga miskin	4,00%	5.467.327.600,00	3,00%	114.525.400,00	3,50%	5.391.647.800,00	5,00%	19.587.650,00	0,00%	49.116.382,00	0%	34.201.700,00	13,17%	3.521.791.500,00	13,17%	3.624.697.232,00	22,22%	3.739.222.632,00	68,39%	
				Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		114.525.400,00	4	5.391.647.800,00	5,00%	19.587.650,00	20,00%	49.116.382,00	20,00%	34.201.700,00		3.521.791.500,00	45,00%	3.624.697.232,00		3.739.222.632,00				
				Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku DTKS dan PMKS yang dibuat		114.525.400,00	30	84.097.500,00	0	5.897.900,00	0	24.323.882,00		2.042.250		51.114.000,00	0	83.378.032,00		197.903.432,00		Dinas Sosial PPKB PPPA		
					Jumlah aplikasi yang dibuat		1		1 Aplikasi		0					1 Aplikasi									
					Jumlah Unit Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang dikembangkan		3		1 Unit		0					1 Unit									
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Graduasi		7	5.295.642.000,00	0	13.689.750,00	0	21.017.500,00		32.159.450		3.463.230.500,00	0	3.530.097.200,00		3.530.097.200,00		Dinas Sosial PPKB PPPA			
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok KUBE yang Dibina		13	11.908.300,00	0	0,00	0	3.775.000,00				7.447.000,00	0	11.222.000,00		11.222.000,00		Dinas Sosial PPKB PPPA			
					Jumlah Kelompok KUBE e-WARONG yang Dibina		4		0		0					0	0,00								
				Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani		100,00%	160.035.819,00	100,00%	172.388.000,00	25,00%	13.815.000,00	25,00%	93.194.750,00	25,00%	16.762.300,00	25,00%	44.763.218,00	100,00%	168.535.268,00	16,67%	328.571.087,00			
				Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		160.035.819,00	44	172.388.000,00	25,00%	13.815.000,00	25,00%	93.194.750,00	25%	16.762.300,00		44.763.218,00	75,00%	168.535.268,00		328.571.087,00				
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan	Persentase penanganan korban bencana		160.035.819,00	100,00%	172.388.000,00	25,00%	13.815.000,00	25,00%	93.194.750,00		16.762.300		44.763.218,00	25,00%	168.535.268,00		328.571.087,00		Dinas Sosial PPKB PPPA		
					Persentase pemenuhan kebutuhan makanan bagi masyarakat yang terkena bencana pada dapur umum lansia dan disabilitas			100,00%		25,00%		0,00%					25,00%	0,00							
					Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang didampingi			0		0		0					0	0,00							
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola		100,00%	43.146.530,00	100,00%	21.250.000,00	25,00%	5.245.775,00	25,00%	2.887.000,00	25,00%	8.116.000,00	25%	4.598.000,00	100,00%	20.846.775,00	50,00%	63.993.305,00			
				Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara		43.146.530,00	100,00%	21.250.000,00	25,00%	5.245.775,00	25,00%	2.887.000,00	25,00%	8.116.000,00		4.598.000,00	75,00%	20.846.775,00		63.993.305,00				
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara		2	43.146.530,00	1	21.250.000,00	1 Unit	5.245.775,00	0	2.887.000,00		8.116.000		4.598.000,00	1 Unit	20.846.775,00		63.993.305,00		Dinas Sosial PPKB PPPA	
					Jumlah hari besar nasional yang diorganisasi		2		0		0					0									
				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>																					
				Program Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG terhadap APBD	11,00%	615.000.000,00		200.000.000,00	5,00%	199.999.750,00	0,00%	26.916.650,00		33.753.770,00		45.099.800,00	8,75%	92.753.168,00	8,75%	198.523.388,00	41,15%	398.523.388,00	64,80%	
					Persentase organisasi perempuan aktif				73,00%							100,00%									
				Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil gender yang dibuat		50.000.000,00	1	50.000.000,00	50,00%	16.547.100,00	5,00%	393.750,00	10,00%	28.985.050,00		4.021.375,00	65,00%	49.947.275,00		99.947.275,00				
				Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peserta Sosialisasi PUG		101	50.000.000,00	101	50.000.000,00	101 Orang	16.547.100,00	0	393.750,00		28.985.050		4.021.375,00	101 Orang	49.947.275,00		99.947.275,00		Dinas Sosial PPKB PPPA	
					Jumlah peserta bimtek Tim PPRG		118		118		118 Orang		0					118 Orang	0,00						
					Jumlah dokumen profil gender yang dibuat		30		30		0		0				0	0,00							
				Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang dibina		150.000.000,00	26	149.999.750,00	25,00%	10.369.550,00	27,00%	33.360.020,00	15%	16.114.750,00		88.731.793,00	67,00%	148.576.113,00		298.576.113,00				
				Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah organisasi perempuan yang aktif		150.000.000,00	28	149.999.750,00	8 Organisasi	10.369.550,00	0	33.360.020,00		16.114.750		88.731.793,00	8 Organisasi	148.576.113,00		298.576.113,00		Dinas Sosial PPKB PPPA		
					Jumlah pertemuan rutin yang dilaksanakan			12		3 Kegiatan		0					3 Kegiatan								
					Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Hari Besar yang Dilaksanakan			3		0		0					0								
					Jumlah pengurus dan anggota organisasi perempuan yang mengikuti bimtek peningkatan kapasitas pengurus organisasi			78		0		0					0								

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV						13	14=7*13	15=14/6 x 100%		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								K	Rp.
			Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih		100,00%	22.500.000,00	100,00%	22.500.000,00	5,00%	1.899.000,00	10,00%	2.785.000,00	10%	5.314.725,00	75%	12.350.525,00	100,00%	22.349.250,00	8,33%	44.849.250,00			
			Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan perempuan yang terselesaikan		22.500.000,00	10000,00%	22.500.000,00	5,00%	1.899.000,00	10,00%	2.785.000,00	10%	5.314.725,00		12.350.525,00	25,00%	22.349.250,00		44.849.250,00				
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan		22.500.000,00	4	22.500.000,00	1 Kegiatan	1.899.000,00	1	2.785.000,00		5.314.725		12.350.525,00	1 Kegiatan	22.349.250,00		44.849.250,00	Dinas Sosial PPKB PPPA			
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan			90		0		0						0	0,00						
			Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	73,00%	443.844.000,00	100,00%	207.830.000,00	70,00%	207.829.650,00	14,75%	29.055.600,00	10,00%	18.973.175,00	30%	90.128.602,00	79,85%	67.534.270,00	79,85%	205.691.647,00	33,19%	413.521.647,00	93,17%	
				Persentase forum anak yang aktif	57,89%		100,00%		47,40%								47,40%							
			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang menginisiasi SRA			16	81.755.000,00	17,00%	27.029.000,00	15,00%	13.738.600,00	0,00%		0,00	40.803.500,00	32,00%	81.571.100,00		163.326.100,00				
				Jumlah fasilitasi kesehatan yang menginisiasi PRA			4		0		0					0	0,00							
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi yang Dilaksanakan (KLA, PRA, SRA)		81.755.000,00	3	81.754.750,00	1 Kegiatan	27.029.000,00	0	13.738.600,00				40.803.500,00	1 Kegiatan	81.571.100,00		163.326.100,00	Dinas Sosial PPKB PPPA			
				Jumlah Gugus Tugas KLA yang Mengikuti Bimtek			30		30 Orang		0					30 Orang								
				Jumlah Pertemuan Gugus KLA yang Dilaksanakan			4		1 Kegiatan		0					1 Kegiatan								
				Jumlah peserta Desiminiasi informasi tentang pola asuh anak pada pengasuhan alternatif di boarding school			60		0		0					0								
				Jumlah peserta pelatihan SRA			50		0		0					0								
			Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga SRA Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang menginisiasi SRA		126.075.000,00	19	126.074.900,00	12,50%	2.026.600,00	5,00%	5.234.575,00	50,00%	90.128.602,00		26.730.770,00	67,50%	124.120.547,00		250.195.547,00				
				Jumlah fasilitasi kesehatan yang menginisiasi PRA													0,00							
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PRA Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah faskes yang mengembangkan PRA		126.075.000,00	6	126.074.900,00	6 faskes	2.026.600,00	0	5.234.575,00		90.128.602		26.730.770,00	6 faskes	124.120.547,00		250.195.547,00	Dinas Sosial PPKB PPPA			
				Jumlah sekolah yang mengembangkan SRA			20		0		0					0								
				Jumlah PATBM yang dibina			2		2 Lembaga		0					2 Lembaga								
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang terselesaikan	100%	82.801.000,00	100,00%	30.150.000,00	100,00%	30.150.000,00	10,00%	1.500.000,00	15,00%	1.571.500,00	15%	7.872.750,00	60%	18.575.050,00	100,00%	29.519.300,00		29.519.300,00	35,65%	
			Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih			100,00%	30.150.000,00	10,00%	1.500.000,00	15,00%	1.571.500,00	10%	7.872.750,00		18.575.050,00	35,00%	29.519.300,00		29.519.300,00				
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluaran Anti Kekerasan perempuan dan anak yang Terbentuk			2	30.150.000,00	0	1.500.000,00	0	1.571.500,00		7.872.750		18.575.050,00	0	29.519.300,00		29.519.300,00	Dinas Sosial PPKB PPPA			
				Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan			4		0		0					0								
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Pencegahan Terhadap Anak			90		0		0					0								
				Jumlah PATBM yang terbantuk			0		16 Lembaga		0					16 Lembaga								
				Jumlah kader PATBM yang dibina			0		0		0					0								
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>									<b>2.608.137.350,00</b>	<b>11,65%</b>	<b>374.253.250,00</b>	<b>9,95%</b>	<b>398.908.466,00</b>	<b>15,00%</b>	<b>907.931.057,77</b>	<b>48,07%</b>	<b>607.275.898,00</b>	<b>84,67%</b>	<b>2.288.368.671,77</b>					
			Program Pengendalian Penduduk	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk		100,00%	901.928.750,00	100,00%	135.464.500,00	35,00%	18.899.700,00	30,00%	26.078.800,00	15%	22.786.150,00	20%	53.195.698,00	100,00%	120.960.348,00	15,00%	1.022.889.098,00			
				Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB			40,00%		50,00%							50%		50,00%						
			Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah OPD yang memanfaatkan data basis bangsa kencana sebagai acuan perencanaan		834.450.350,00	24	22.656.000,00	50,00%	10.034.900,00	30,00%	8.780.550,00	0,00%	281.250,00		3.298.000,00	80,00%	22.394.700,00		856.845.050,00				
			Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluaran (BKBK) Kabupaten/Kota	Jumlah penilaian KKG PKK KB Kes yang dilaksanakan		3	834.450.350,00	0	0	0,00	0	0,00				0	0,00		834.450.350,00		Dinas Sosial PPKB PPPA			
				Jumlah kader KB/KS yang dibina			311		0		0					0	0,00							
				Jumlah peserta Rakor Bangsa Kencana			50		0		0					0	0,00							
			Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal	Jumlah Guru yang Mengikuti Orientasi Pembentukan Sekolah Peduli Kependudukan		20	22.656.000,00	20 Orang	10.034.900,00	0	8.780.550,00		281.250		3.298.000,00	20 Orang	22.394.700,00		22.394.700,00		Dinas Sosial PPKB PPPA			
				Jumlah Sekolah Peduli Kependudukan yang Terbentuk			6		0		0					0	0,00							

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV						13		14=7+13		15=14/6 x 100%	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16										
			Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR		67.478.400,00	70	112.808.500,00	20,00%	8.864.800,00	30,00%	17.298.250,00	15,00%	22.504.900,00	49.897.698,00	65,00%	98.565.648,00	166.044.048,00							
			Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KB di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data yang Terbentuk			5	42.028.500,00	4 Unit	8.864.800,00	0	12.798.250,00		2.546.250	17.569.000,00	4 Unit	41.778.300,00	41.778.300,00							
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Laporan yang Dibuat			12	69.600.000,00	0	0,00	4	3.320.000,00		19.958.650	32.328.698,00	0	55.607.348,00	55.607.348,00		Dinas Sosial PPKB PPPA					
			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Operator Statistik rutin			2		0	0	0				0	0,00				Dinas Sosial PPKB PPPA					
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Unmet Need	11,00%	2.932.154.750,00	38,00%	602.633.243,00	22,80%	1.074.614.200,00	3,25%	40.228.800,00	5,00%	171.879.900,00	25,42%	369.595.941,77	25,42%	864.653.841,77	2,08%	1.467.287.084,77	50,04%				
			Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Lokal	Jumlah kampung KB yang difasilitasi			4	180.100.400,00	5,00%	3.428.800,00	28,00%	68.530.650,00	25%	61.301.500,00	74.101.675,00	58,00%	207.362.625,00	387.463.025,00							
			Sub kegiatan penyediaan dan distribusi sarana KIE program KB	Jumlah Media KIE yang Disediakan		73.989.450,00	4		0	0,00	0	0,00			0	0,00	73.989.450,00			Dinas Sosial PPKB PPPA					
			Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB	Jumlah Pertemuan Operasional Lini Lapangan		106.110.950,00	6	81.000.000,00	0	3.428.800,00	0	7.178.900,00		23.903.050	41.501.675,00	0	76.012.425,00	182.123.375,00		Dinas Sosial PPKB PPPA					
				Jumlah Pertemuan Pokja Kampung KB			12		0		0				0										
				Jumlah Pertemuan Poktan Kampung KB			13		0		0				0										
			Advokasi Program KB kepada Stakeholder dan Mitra Kerja					4.375.000,00	0,00	25	3.471.250,00		-	-	3.471.250,00		3.471.250,00	3.471.250,00		Dinas Sosial PPKB PPPA					
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB sesuai Kearifan Budaya Lokal					25.000.000,00	0,00	2	23.575.000,00		800.000	-	24.375.000,00		24.375.000,00	24.375.000,00		Dinas Sosial PPKB PPPA					
			Promosi dan KIE Program KIE Program KB Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					70.620.000,00	0,00	2	22.847.500,00		13.800.000	5.000.000,00	41.647.500,00		41.647.500,00	41.647.500,00		Dinas Sosial PPKB PPPA					
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KB melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Babudesa), dan					31.200.000,00		6	11.458.000,00		4.160.550	7.760.000,00	23.378.550,00		23.378.550,00	23.378.550,00		Dinas Sosial PPKB PPPA					
			Pengendalian Program KB					40.000.000,00	0,00	0	0,00	1	18.637.900	19.840.000,00	38.477.900,00		38.477.900,00	38.477.900,00		Dinas Sosial PPKB PPPA					
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB	Jumlah PKB yang dibina		42.600.000,00	8	260.800.000,00	8,00%	36.800.000,00	20,00%	57.300.000,00	10,00%	84.000.000,00	78.200.000,00	38,00%	256.300.000,00	298.900.000,00							
			Pembinaan IMP dan Program PLKB di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Pertemuan Kader IMP dan PLKB yang Dilaksanakan			12	184.000.000,00	3 Kegiatan	36.800.000,00	0	55.200.000,00		55.200.000	36.800.000,00	3 Kegiatan	184.000.000,00	184.000.000,00		Dinas Sosial PPKB PPPA					
				Jumlah kader IMP yang mengikuti kegiatan refertalisasi Program Bangga Kencana dan pencegahan stunting					0		0				0										
			Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Data Wilayah yang Dimutakhirkan		42.600.000,00	0	76.800.000,00	0	0,00	0	2.100.000,00		28.800.000	41.400.000,00	0	72.300.000,00	114.900.000,00		Dinas Sosial PPKB PPPA					
			Pengendalian Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PUS yang dilayani		299.149.643,00		345.513.300,00	0,00%	0,00	5,00%	12.527.200,00	50,00%	139.031.291,77	45.471.600,00	55,00%	197.030.091,77	496.179.734,77							
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan	Jumlah Faskes yang Difasilitasi Alokon		15.342.600,00	6	10.050.100,00	0	0,00	0	900.000,00		1.572.500	5.371.250,00	0	7.843.750,00	23.186.350,00		Dinas Sosial PPKB PPPA					
			Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) yang dilayani		22.745.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0	0,00		22.745.600,00			Dinas Sosial PPKB PPPA					
			Peningkatan Kesertian Penggunaan Metode Kontrasepsi Janaka Paniane (MKIP)	Jumlah PUS yang Dilayani		80.797.640,00		169.693.000,00	0	0,00	0	9.075.900,00		-	16.400.000,00	0	25.475.900,00	106.273.540,00		Dinas Sosial PPKB PPPA					
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang KB yang diadakan		180.263.803,00	0	165.770.200,00	0	0,00	0	2.551.300,00		137.458.792	23.700.350,00	0	163.710.441,77	343.974.244,77		Dinas Sosial PPKB PPPA					
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah	Persentase organisasi masyarakat peduli KB yang aktif		80.783.200,00		216.105.900,00	0,00%	0,00	20,00%	33.522.050,00	25%	85.263.150,00	85.175.925,00	45,00%	203.961.125,00	284.744.325,00							
			Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Jumlah Kegiatan Pelayanan KB yang dilaksanakan dalam Momen-momen Strategis				164.355.900,00	0	0,00	0	33.522.050,00		78.926.400	43.206.780,00	0	155.655.230,00	155.655.230,00		Dinas Sosial PPKB PPPA					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV				13	14=7+13		15=14/6 x 100%			
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							K	Rp.	K
			Pelaksanaan dan Pengolahan Program KKBPB di Kampung KB	Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan di kampung KB		80.783.200,00	0	51.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.336.750,00	41.969.145,00	0	48.305.895,00	129.089.095,00		Dinas Sosial PPKB PPPA			
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga sasaran tribina yang ber-KB Persentase kelompok PIK-R yang aktif	56,71% 91,00%	1.444.594.700,00	57,00% 85,71%	1.398.058.650,00	20,00% 0,00%	315.124.750,00	14,77% 0,00%	200.949.766,00	40% 0,00%	515.548.966,00	44,93% 100,00%	271.131.000,00	44,93% 100,00%	1.302.754.482,00	11,67% 100,00%	1.465.782.332,00	101,47%			
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok Tribina yang dibina dan penilaian Tribina berprestasi		163.027.850,00		1.398.058.650,00	20,00%	315.124.750,00	14,77%	200.949.766,00	45,00%	515.548.966,00		271.131.000,00	79,77%	1.302.754.482,00	1.465.782.332,00					
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah kelompok tribina yang dibina Jumlah kelompok UPPKS yang dibina melalui monitoring dan lomba kelompok UPPKS berprestasi		133 25	163.027.850,00	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.027.850,00		Dinas Sosial PPKB PPPA			
				Jumlah gelar dagang yang diikuti Jumlah jinalis yang mengikuti pemilihan Duta Genre Jumlah pengurus PIK R yang mengikuti jambore		0 60 300	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00						
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi)					312.007.800,00					0	0,00	1	305.783.700	1.750.000,00	307.533.700,00	307.533.700,00		Dinas Sosial PPKB PPPA			
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi)	Jumlah Kader Ketahanan Keluarga yang Diberikan insentif			1440	535.287.000,00	360 orang	133.800.000,00	0	133.800.000,00		128.800.000		138.300.000,00	360 orang	534.700.000,00	534.700.000,00		Dinas Sosial PPKB PPPA			
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)					264.900.000,00		35.050.000,00		34.650.000,00		40.968.000		64.924.000,00		175.592.000,00	175.592.000,00		Dinas Sosial PPKB PPPA			
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Finalisasi Duta Genre Tk. Kota Jumlah Gelar Dagang yang Diikuti Jumlah Kegiatan GenRe yang Difasilitasi Jumlah Lomba Bangsa Kencana yang Dilaksanakan Jumlah Peserta JAK GenRe Tingkat Kota			40 Orang	285.863.850,00	40 orang	146.274.750,00	0	32.499.766,00		39.997.266		66.157.000,00	40 orang	284.928.782,00	284.928.782,00		Dinas Sosial PPKB PPPA			
7.			<b>DINAS PANGAN DAN PERTANIAN</b>			<b>44.973.527.849,00</b>	<b>94,85%</b>	<b>10.430.207.838,20</b>		<b>12.157.493.438,00</b>	<b>15,48%</b>	<b>1.713.027.557,00</b>	<b>21,78%</b>	<b>3.201.139.252,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>3.028.595.788,50</b>	<b>34,05%</b>	<b>3.183.459.105,00</b>	<b>96,31%</b>	<b>11.126.221.702,50</b>	<b>95,58%</b>	<b>21.556.429.540,70</b>	<b>47,93%</b>	
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																					
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>					<b>9.231.956.838,00</b>	<b>13,33%</b>	<b>1.544.843.598,00</b>	<b>18,33%</b>	<b>2.537.511.385,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>2.423.044.939,00</b>	<b>51,85%</b>	<b>2.225.130.163,00</b>	<b>108,51%</b>	<b>8.730.530.085,00</b>	<b>54,26%</b>					
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang yang Dipenuhi			90,00%	8.369.755.729,00		8.824.930.638,00	25,00%	1.537.800.942,00	25,00%	2.381.289.477,00	25,00%	2.271.581.906,00	25%	2.151.685.319,00	100,00%	8.342.357.644,00	220,69%	16.712.113.373,00		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah			6.882.000.579,00		7.153.163.934,00		1.316.489.212,00		2.017.030.604,00		1.957.054.717,00		1.712.436.077,00		7.003.010.610,00	13.885.011.189,00				
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangan		58 orang	6.880.807.579,00	58 Orang	7.151.519.534,00	58 Orang	1.316.489.212,00		2.016.812.854,00	56 orang	1.956.909.967	58 Orang	1.711.617.577,00	58 Orang	7.001.829.610,00	13.882.637.189,00		Dinas Pangan dan Pertanian		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun		3 laporan	758.500,00	1 Laporan	494.950,00	1 Laporan	0,00		217.750,00	1 laporan	-	1 laporan	103.600,00	1 Laporan	321.350,00	1.079.850,00		Dinas Pangan dan Pertanian		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran yang Disusun		36 laporan	192.500,00	14 Laporan	999.950,00	14 Laporan	0,00		0,00	4 laporan	67.250,00	4 laporan	714.900,00	14 Laporan	782.150,00	974.650,00		Dinas Pangan dan Pertanian		
			Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anegaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		3 laporan	242.000,00	1 Laporan	149.500,00	1 Laporan	0,00		0,00	1 laporan	77.500,00		-	1 Laporan	77.500,00	319.500,00		Dinas Pangan dan Pertanian		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kepegawaian			222.501.373,00	90%	349.259.450,00		55.179.613,00		63.808.800,00		52.081.825,00		82.280.100,00		253.350.338,00	475.851.711,00				
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik yang Disediakan		23 jenis	15.381.100,00	21 Jenis	20.889.500,00	5 Jenis	4.300.000,00		6.552.500,00	3 jenis	-	3 jenis	6.808.000,00	21 Jenis	17.660.500,00	33.041.600,00		Dinas Pangan dan Pertanian		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RPKD Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV				13			14=14/6 x 100%				
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Jenis Alat Tulis Kantor dan Peralatan Kebersihan Kantor yang Disediakan	7 jenis	85.739.100,00	7 Jenis	115.862.600,00	7 Jenis	16.714.000,00		17.569.500,00	7 jenis	17.876.000	7 jenis	34.270.450,00	7 Jenis	86.429.950,00		172.169.050,00			Dinas Pangan dan Pertanian	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 jenis	16.765.550,00	3 Jenis	23.611.700,00	3 Jenis	1.464.500,00		3.819.250,00	3 jenis	3.048.250	3 jenis	5.600.750,00	3 Jenis	13.932.750,00		30.698.300,00			Dinas Pangan dan Pertanian	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dikuti Jumlah Makan dan Minum Rapat yang Disediakan	229 kali 705 kali	104.615.623,00 0,00	196 Kali 466 kali	188.895.650,00 266 kali	82 Kali 266 kali	32.701.113,00 266 kali		35.867.550,00 41 kali	63 kali 41 kali	31.157.575		35.600.900,00 266 kali	82 Kali 0,00	135.327.138,00 0,00		239.942.761,00			Dinas Pangan dan Pertanian	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	37.445.150,00		3.125.000,00		32.400.000,00		0,00		0,00		35.525.000,00		35.525.000,00			Dinas Pangan dan Pertanian	
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan			4 Jenis	37.445.150,00	0	3.125.000,00		32.400.000,00	4 jenis	-		-	0	35.525.000,00		35.525.000,00			Dinas Pangan dan Pertanian	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan		771.645.810,00	90%	711.817.054,00		103.323.967,00		161.679.573,00		139.222.564,00		179.296.392,00		583.522.496,00		1.355.168.306,00				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan			3 Jenis	4.000.000,00	3 Jenis	1.250.000,00		250.000,00	3 jenis	250.000	3 jenis	1.350.000,00	3 Jenis	3.100.000,00		3.100.000,00			Dinas Pangan dan Pertanian	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan	44 tagihan	123.880.342,00	3 Jenis	200.916.254,00	3 Jenis	32.312.643,00		27.631.477,00	3 jenis	25.299.892	3 jenis	27.243.064,00	3 Jenis	112.487.076,00		236.367.418,00			Dinas Pangan dan Pertanian	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas yang Dibayarkan	25 orang	647.765.468,00	17 Orang	506.900.800,00	17 Orang	69.761.324,00		133.798.096,00	17 orang	113.672.672	17 orang	150.703.328,00	17 Orang	467.935.420,00		1.115.700.888,00			Dinas Pangan dan Pertanian	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah		493.607.967,00	90%	573.245.050,00		59.683.150,00		106.370.500,00		123.222.800,00		177.672.750,00		466.949.200,00		960.557.167,00			Dinas Pangan dan Pertanian	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Operasional yang terpelihara	61 unit	259.190.600,00	61 Unit	429.629.800,00	17 Unit	57.408.150,00		89.589.000,00	8 unit	72.913.100	8 unit	149.703.250,00	61 Unit	369.613.500,00		628.804.100,00			Dinas Pangan dan Pertanian	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	10 jenis	50.507.000,00	7 Jenis	66.815.250,00	1 Jenis	1.575.000,00		9.181.000,00	1 jenis	6.438.500	1 jenis	22.548.000,00	7 Jenis	39.742.500,00		90.249.500,00			Dinas Pangan dan Pertanian	
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	3 unit	183.910.367,00	7 Unit	70.000.000,00	0	0,00		7.500.500,00	4 unit	43.871.200	4 unit	5.421.500,00	7 Unit	56.793.200,00		240.703.567,00			Dinas Pangan dan Pertanian	
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Tanah	Jumlah Sertifikat Tanah yang Tersedia	2 Sertifikat	6.800.000,00	0	700.000,00				100.000,00	2 sertifikat	-	2 sertifikasi	-	2 Sertifikat	800.000,00		800.000,00			Dinas Pangan dan Pertanian	
	Menurunnya Prevelensi Stunting dari Sektor Ketahanan Pangan			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	#####	517.581.268,00	102,30%	38.160.998,00	100,00%	407.026.200,00	15,00%	7.042.656,00	30,00%	156.221.908,00	35%	151.463.033,00	20,54%	73.444.844,00	100,54%	388.172.441,00		426.333.439,00	82,37%	
				Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Harga dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk				1845 kkal/ kap/ hr	37.185.600,00	40%	4.044.908,00	45%	15.026.829,00		6.740.704,00		9.376.772,00	0%	35.189.213,00		35.189.213,00			
				Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen NBM (Neraca Bahan Makanan) dan Buku Database Ketahanan Pangan				10 Buku	31.985.600,00	0	3.624.908,00		10.431.329,00		6.740.704	5 buku	9.376.772,00	5 buku	30.173.713,00		30.173.713,00			Dinas Pangan dan Pertanian
				Sub Kegiatan Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pemantauan Harga Pangan Pokok Kota Padang Panjang				1 Orang							1 orang			0,00		0,00				
				Sub Kegiatan Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pemantauan Harga Pangan Pokok Kota Padang Panjang				350 kali	5.200.000,00	90 kali	420.000,00		4.595.500,00		-	92 kali	-	92 kali	5.015.500,00		5.015.500,00			Dinas Pangan dan Pertanian
				Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah				10 Buku							10 Buku									
				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah				3000 Kg	33.000.000,00	0%	0,00	10%	0,00	0,00	0,00		32.577.000,00	0%	32.577.000,00		32.577.000,00			Dinas Pangan dan Pertanian
				Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi (AKE)				1845 kkal/ kapita/ hari	336.840.600,00	5%	2.997.748,00	35%	141.195.079,00		144.722.329,00		31.491.072,00	0%	320.406.228,00		320.406.228,00			
				Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Jumlah Buku Pola Pangan Harapan yang Disusun				57 gram/ kapita/ hari		0%							0%	0,00						
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pelatihan yang dilakukan Jumlah Keikutsertaan HPS Tk. Nasional Jumlah Keikutsertaan HPS Tk. Lokal Jumlah Petugas Pengelola Toga				10 Buku	3.325.000,00	0	0,00		0,00	2.793.750,00	5 Buku	232.500,00	5 Buku	3.026.250,00		3.026.250,00				Dinas Pangan dan Pertanian
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pelatihan yang dilakukan Jumlah Keikutsertaan HPS Tk. Nasional Jumlah Keikutsertaan HPS Tk. Lokal Jumlah Petugas Pengelola Toga				2 Kali	333.515.600,00	0	2.997.748,00		141.195.079,00		141.928.579	1 Kali	31.258.572,00	1 Kali	317.379.978,00		317.379.978,00			Dinas Pangan dan Pertanian



No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I			II			III			IV					14=7x3		
								K			K			K			K					K		
								Rp.			Rp.			Rp.			Rp.					Rp.		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>																								
	Meningkatnya Produksi Perikanan dan Perikanan		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Budidaya Perikanan		3,19%	779.863.453,00	5,00%	675.537.400,00	24,90%	42.537.093,00	26,05%	169.098.028,00	30,00%	142.162.028,00	5%	249.887.742,00	5,00%	603.684.891,00	83,33%	1.383.548.344,00			
			Kegiatan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan			779.863.453,00	735 Ton/ Tahun	675.537.400,00	183 Ton/ Tahun	42.537.093,00	191,5 Ton/	169.098.028,00	175 Ton/ Tahun	142.162.028,00		249.887.742,00	175 Ton/ Tahun	603.684.891,00	83%	1.383.548.344,00			
			Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan yang disediakan (Operasional BBI)		6 jenis	703.349.253,00	6 Jenis	675.537.400,00	3 Jenis	42.537.093,00	169.098.028,00	6 jenis	142.162.028,00	6 jenis	249.887.742,00	6 jenis	603.684.891,00	0,5	1.307.034.144,00		Dinas Pangan dan Pertanian		
				Jumlah Tenaga Penunjang Operasional BBI				7 Orang		7 Orang		7 Orang	7 Orang		7 Orang		7 Orang		1					
				Jumlah Petugas Tenaga Administrasi Sekretariat/ Bidang/ Program/ Kegiatan (Bidang Perikanan dan Pemuliharaan perikanan LIPTD BBI)				3 Orang		3 Orang		3 Orang	3 Orang		3 Orang		3 Orang		1					
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pendapatan Pembudidayaan Ikan		184,77%	19.687.500,00	19936618 Rp/ Tahun/	35.658.700,00	5,00%	138.600,00	27,37%	87.500,00	40,00%	21.475.500,00	32,59%	10.531.000,00	2095441 6 Rp/	32.232.600,00		51.920.100,00			
			Kegiatan Penertiban Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Mikro dan	Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (FORIKAN) di Kota Padang Panjang dan			19.687.500,00	3 Kali	35.658.700,00	26%	138.600,00	27%	87.500,00	25,01%	21.475.500,00		10.531.000,00	0%	32.232.600,00		51.920.100,00			
			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Forikan yang Diaksanakan		3 kali	19.687.500,00	3 Kali	35.658.700,00	0	138.600,00		87.500,00	2 kali	21.475.500		10.531.000,00	2 kali	32.232.600,00		51.920.100,00		Dinas Pangan dan Pertanian	
				Jumlah Data Profil Perikanan Kota Padang Panjang		1 dokumen		1 Dokumen		0				1 dokume			1 dokume							
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>																								
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	87,5%	1.726.992.250,00	65,00%	516.436.916,00	75,00%	1.315.865.750,00	25,00%	57.718.446,00	25,00%	318.913.530,00	10%	78.231.160,00	15%	495.024.155,00	75,00%	949.887.291,00	57,88%	1.466.324.207,00	84,91%	
				Persentase Ketersediaan Sarana Peternakan	100%		60,00%		75,00%		25,00%		25,00%	10,00%		15,00%		75,00%		25,00%				
			Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang Tersedia			10.454.700,00	2 Jenis	218.600.000,00	0%	1.554.000,00	25%	5.545.500,00	25%	4.102.500,00		7.102.500,00	0%	18.304.500,00		28.759.200,00			
			Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Kegiatan Forikan yang Diaksanakan		38 kali	19.184.000,00	12 kali	218.600.000,00	3 kali	1.554.000,00	5.545.500,00	3 kali	4.102.500	3 kali	7.102.500,00	12 kali	18.304.500,00		37.488.500,00			Dinas Pangan dan Pertanian	
			Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Produksi Tanaman Hias		184.744.000,00	83060 Tangkai	492.743.000,00	20%	14.711.414,00	67%	182.522.910,00		12.151.408,00	24935 tangkai	184.824.444,00	882 Tangkai	394.210.176,00		578.954.176,00				
				Produksi Padi			7216 Ton	2919,6 Ton							2399,4 ton		2919,6 Ton		0,00					
				Luas Lahan Pertanian Organik			1 Ha	0%							1 Ha		0%		0,00					
			Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Labor Kultur Jaringan yang Beroperasional		2 unit	70.075.389,00	1 Unit	492.743.000,00	1 Unit	14.711.414,00		182.522.910,00	1 unit	12.151.408	1 unit	184.824.444,00	1 Unit	394.210.176,00		464.285.565,00		Dinas Pangan dan Pertanian	
				Luas Lahan Pembibitan Tanaman Hias yang dilaksanakan				1 Ha		1 Ha	1 Ha		1 Ha		1 Ha		1 Ha		1 Ha					
				Jumlah Peserta Pelatihan Budidaya Tanaman yang Dilaksanakan				20 Orang		0	20 Orang						20 Orang							
				Jumlah Petugas Screen House dan Tanaman Hias/ Labor Kultur Jaringan				2 Orang		2 Orang	2 Orang		2 Orang		2 Orang		2 Orang		2 Orang					
				Jumlah Peserta Studi Kompratif ke Daerah Potensi Pertanian				10 Orang		0	10 Orang						10 Orang							
			Kegiatan Peningkatan Mutu dan Pederaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah	Jumlah Produk Olahan Susu yang Masuk ke Pasar Formal			427.177.527,00	1 Produk	514.928.000,00	25%	41.453.032,00	30%	127.670.370,00		59.791.002,00	1 Produk	219.667.211,00	1 Produk	448.581.615,00		875.759.142,00			
				Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan				11 Ekor		11 Ekor					19 Ekor		19 Ekor		0,00					
			Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Produk Olahan Susu yang Masuk ke Pasar Formal		1 produk	427.177.527,00	1 Produk	514.928.000,00	1 Produk	41.453.032,00	1 Produk	127.670.370,00	1 Produk	59.791.002	1 Produk	219.667.211,00	1 Produk	448.581.615,00		875.759.142,00		Dinas Pangan dan Pertanian	
				Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan		19 ekor		11 Ekor		11 Ekor		10 Ekor		19 Ekor		19 Ekor		19 Ekor						
				Jumlah Petugas Kandang Pembibitan				4 Orang		4 Orang	4 Orang		4 Orang		4 Orang		4 Orang		4 Orang					
				Jumlah Tenaga Pengawas Mutu Pakan ternak				1 Orang		1 Orang	1 Orang		1 Orang		1 Orang		1 Orang		1 Orang					
			Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah KK Miskin yang Dibantu			89.594.750,00	2 KK	89.594.750,00	0%	0,00		3.174.750,00		2.186.250,00	2 KK	83.430.000,00	2 KK	88.791.000,00		88.791.000,00			
			Sub Kegiatan Pengadaan Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah KK Miskin yang Dibantu			89.594.750,00	2 KK	89.594.750,00	0	0,00	2 KK	3.174.750,00	2 KK	2.186.250	2 KK	83.430.000,00	2 KK	88.791.000,00		88.791.000,00		Dinas Pangan dan Pertanian	



No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPJ Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPJ Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPJ yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPJ Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I			II			III			IV					13			14=7+13		15=14/6 x 100%	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
				Kegiatan Pernerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Livestock Expo yang diikuti		114.682.899,00	1 Kali	152.584.800,00	15%	14.832.554,00	20%	43.422.780,00		43.811.030,00		36.803.518,00	0%	138.869.882,00		253.552.781,00							
					Jumlah Sertifikasi Produk Susu			1 Sertifikat		0%								0%	0,00									
				Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Livestock Expo yang diikuti	0	750.000,00	1 Kali		0	0,00		0,00					0	0,00		750.000,00			Dinas Pangan dan Pertanian				
					Jumlah Sertifikasi Produk Susu	1 sertifikat		1 Sertifikat		0								0										
				Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran	Jumlah Pemeriksaan Hewan Qurban	1.859 ekor	113.932.899,00	600 Ekor	152.584.800,00	0	14.832.554,00		43.422.780,00	629 ekor	600 Ekor	43.811.030		36.803.518,00	0	138.869.882,00		252.802.781,00			Dinas Pangan dan Pertanian			
					Jumlah Uji Sampel	460 sampel		200 Sampel		26 Sampel		174 Sampel		300 Sampel		161 Sampel		661 Sampel										
					Jumlah Petugas Teknis (Petugas Operator Hoist, Petugas Penyembelih Hewan, Petugas Bongkar Muat Daging)			3 Orang		3 Orang		3 Orang		3 Orang		3 Orang		3 Orang										
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertanam		40,00%	6.886.800,00	27,00%	12.620.000,00	10,00%	0,00	25,00%	1.942.500,00	20%	2.695.600,00	5%	1.352.800,00	60,00%	5.990.900,00	16,67%	12.877.700,00						
				Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)		6.886.800,00	150 Ha	12.620.000,00	10%	0,00	25%	1.942.500,00		2.695.600,00		1.352.800,00	0%	5.990.900,00		12.877.700,00							
					Jumlah Sosialisasi AUTP			150 Orang	12.620.000,00	50 Orang	0,00	12	1.942.500,00		2.695.600		1.352.800,00	50 Orang	5.990.900,00		5.990.900,00				Dinas Pangan dan Pertanian			
					Jumlah Premi Asuransi AUTP			295 Ha		0		44 ha		25,6 ha		34,8 ha		104,4 ha										
	Meningkatnya Pendapatan Petani			Program Penyuluhan Pertanian	Adopsi Inovasi Teknologi Pertanian	#####	569.339.850,00	59,00%	32.084.250,00	67,80%	102.690.400,00	17,09%	23.292.400,00	17,09%	52.577.500,00	17,09%	5.188.500,00	16,81%	8.902.000,00	68,08%	89.960.400,00	33,33%	122.044.650,00	21,44%				
				Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan		32.084.250,00	20 Kelatan	102.690.400,00	10%	23.292.400,00	25%	52.577.500,00		5.188.500,00		8.902.000,00	10 Kelatan	89.960.400,00		122.044.650,00							
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Peserta Pertemuan Kelompok Tani	1700 OH	21.159.250,00	250 Oh	63.905.000,00	0	0,00		45.320.000,00	365 Oh	441,00	55 Oh	6.767.000,00	500 eh	52.528.000,00		73.687.250,00				Dinas Pangan dan Pertanian			
					Jumlah PENAS Tani Tingkat Nasional			1 Kali		0								0										
					Jumlah Field Day Kelembagaan Tani			1 Kali		1 Kali								1 Kali										
					Jumlah Penilaian Kelompok Tani Berprestasi			3 Kelompok		0								0										
				Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Jenis Teknologi yang akan diterapkan	2 jenis	10.925.000,00	2 jenis	38.785.400,00	1 jenis	23.292.400,00		7.257.500,00	1 jenis	4.747.500	1 jenis	2.135.000,00	1 jenis	37.432.400,00		48.357.400,00				Dinas Pangan dan Pertanian			
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Pangan Segar		100,00%	10.454.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00		0,00	0,00%	0,00		10.454.700,00						
				Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Uji Sampel Keamanan Pangan		10.454.700,00	3 Kali	0,00	0%	0,00		0,00		0,00		0,00	0%	0,00		10.454.700,00							
				Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Jumlah Sosialisasi Kemaman Pangan yang Dilaksanakan	2 kali	4.842.000,00	1 Kali	0,00	0	0,00		0,00					0	0,00		4.842.000,00				Dinas Pangan dan Pertanian			
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Jumlah Uji Sampel Keamanan Pangan Segar	4 kali	5.612.700,00	3 Kali	0,00	0	0,00		0,00					0	0,00		5.612.700,00				Dinas Pangan dan Pertanian			
8.				<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>		15.641.261.167,30	96,26%	4.053.990.220,00		4.343.566.293,00	15,00%	697.186.261,00	26,20%	1.132.948.106,00	32,00%	1.051.110.310,00	24,79%	1.230.417.137,00	97,99%	4.111.661.814,00	97,12%	8.167.652.034,00	52,22%					
				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																								
				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>																								
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		100%	3.119.265.992,00	90,00%	3.572.302.370,00	25,00%	631.062.479,00	25,00%	909.662.801,00	25,00%	958.732.005,00	15,00%	903.108.942,00	90,00%	3.402.566.227,00	33,53%	6.521.832.219,00						
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan dan dilaksanakan tepat waktu		100%	377.500,00	0%	0,00	0%	0,00		0,00		0,00		327.500,00	0%	327.500,00								
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun			3 laporan	377.500,00		0,00		0,00			3 laporan	327.500,00	6 laporan	327.500,00		327.500,00				Disdukcapil			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah		2.620.888.404,00	100%	2.864.389.858,00	25%	528.199.817,00	25%	763.164.561,00	25%	771.344.418,00		697.317.665,00	75%	2.760.026.461,00		5.380.914.865,00							
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan ASN	14 (bulan)	2.620.660.404,00	14 bulan	2.863.531.058,00	3 bulan	528.199.817,00	3 bulan	763.164.561,00	4 bulan	771.344.418	4 bulan	696.508.865,00	14 bulan	2.759.217.661,00		5.379.878.065,00				Disdukcapil			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	3 (laporan)	76.000,00	3 laporan	277.400,00	1 laporan	0,00	1 (laporan)	0,00	1 laporan	0,00	3 laporan	277.400,00	1 laporan	277.400,00		353.400,00				Disdukcapil			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran yang disusun	3 (laporan)	76.000,00	3 laporan	377.500,00		0,00		0,00		3 laporan	327.500,00	3 laporan	327.500,00		403.500,00					Disdukcapil			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV						13	14=7+13	15=14/6 x 100%	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								K
			Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis yang disusun		3 (laporan)	76.000,00	3 laporan	203.900,00	0,00	0,00	3 laporan	-	3 laporan	203.900,00	3 laporan	203.900,00	279.900,00			Disdukcapil		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran			101.535.529,00	100%	189.985.600,00	25%	30.803.650,00	25%	50.609.746,00	25%	54.637.477,00	25%	25.966.472,00	75%	162.017.345,00	263.552.874,00			
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan		10 (jenis)	2.193.000,00	10 jenis	3.023.250,00	0	0,00	10 jenis	971.500,00	10 jenis	1.295,00	10 jenis	-	10 jenis	2.266.500,00	4.459.500,00			Disdukcapil
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat		1 (jenis)	14.589.600,00	1 jenis	15.931.700,00	1 jenis	5.200.000,00	1 jenis	5.405.600,00	1 jenis	1.760.000,00	1 jenis	250.000,00	1 jenis	12.615.600,00	27.205.200,00			Disdukcapil
				Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan		1 (unit)	0,00	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit					Disdukcapil
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan pengandaan yang disediakan		2 jenis	18.675.650,00	2 jenis	27.167.000,00	2 jenis	1.716.000,00	2 jenis	11.221.750,00	2 jenis	2.655,00	2 jenis	9.789.100,00	2 jenis	25.381.850,00	44.057.500,00			Disdukcapil
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum rapat dinas yang disediakan		344 (ok)	66.077.279,00	344 ok	143.863.650,00	86 ok	23.887.650,00	86 ok	33.010.896,00	86 ok	48.927.477	86 ok	15.927.372,00	258 ok	121.753.395,00	187.830.674,00			Disdukcapil
				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti		20 (kali)	0,00	20 kali		5 kali		5 kali					40 kali		0,00				Disdukcapil
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			92.508.700,00	100%	123.460.000,00	25%	0,00	25%	4.578.000,00	25%	60.930.000,00		54.680.000,00	75%	120.188.000,00	212.696.700,00			
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan		4 jenis	92.508.700,00	6 jenis	123.460.000,00	0,00	0,00	1 jenis	4.578.000,00	1 jenis	60.930.000,00	3 jenis	54.680.000,00	7 jenis	120.188.000,00	212.696.700,00			Disdukcapil
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah			170.729.459,00	100%	196.653.912,00	25%	27.645.762,00	25%	47.260.494,00	25%	42.537.810,00		52.648.305,00	75%	170.092.371,00	340.821.830,00			
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan		48 (tagihan)	16.229.062,00	48 tagihan	32.020.312,00	12 tagihan	5.092.948,00	12 tagihan	4.106.273,00	12 tagihan	4.703.589	12 tagihan	4.092.679,00	96 tagihan	17.995.489,00	34.224.551,00			Disdukcapil
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan		6 orang	154.500.397,00	6 orang	164.633.600,00	6 orang	22.552.814,00	6 orang	43.154.221,00	6 orang	37.834.221	6 orang	48.555.626,00	6 orang	152.096.882,00	306.557.279,00			Disdukcapil
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah			133.603.900,00	100%	197.435.500,00	25%	44.413.250,00	25%	44.050.000,00	25%	29.282.300,00		72.169.000,00	75%	189.914.550,00	323.518.450,00			
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		3 (roda 4), 6 (roda 2)	81.417.000,00	3 (Roda 4), 6 (Roda 2)	104.647.500,00	3 (Roda 4), 6 (Roda 2)	24.253.250,00	3 (Roda 4), 6 (Roda 2)	25.585.000,00	3 (Roda 4), 6 (Roda 2)	10.573.500	3 (Roda 4), 6 (Roda 2)	37.868.000,00	3 (Roda 4), 6 (Roda 2)	98.279.750,00	179.696.750,00			Disdukcapil
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara		17 (jenis)	52.186.900,00	17 jenis	92.788.000,00	0	20.160.000,00	0	18.465.000,00		18.708.800,00		34.301.000,00	0	91.634.800,00	143.821.700,00			Disdukcapil
				Jumlah gedung kantor yang terpelihara		1 (Unit)	0,00	1 unit		1 unit		1 unit			1 unit		1 unit						Disdukcapil
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk		95,04%	667.492.327,00	96,00%	404.467.273,00	15,00%	17.066.950,00	20,00%	118.714.500,00	25,00%	19.527.054,00	39,99%	231.732.151,00	99,99%	387.040.655,00	1.054.532.982,00			
			Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang terlayani terhadap dokumen pendaftaran penduduk			667.492.327,00	96%	404.467.273,00	15%	17.066.950,00	20%	118.714.500,00	25%	19.527.054,00		231.732.151,00	60%	387.040.655,00	1.054.532.982,00			
			Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah jenis peralatan yang digunakan					7.053.000,00		3.345.000,00		0,00			2.910.000,00		6.255.000,00	6.255.000,00			Disdukcapil	
				Jumlah arsip yang didokumentasikan				2.500 (Arsip)	750 arsip		750		0,00	500	4681		4.681 arsip						Disdukcapil
			Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk		73856	667.492.327,00	10000	397.414.273,00	3508 dokumen	13.721.950,00	3989	118.714.500,00	5743	19.527.054	16972	228.822.151,00	90828 dokumen	380.785.655,00	1.048.277.982,00			Disdukcapil
				Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek		34 orang	0,00	35 (orang)	0	0,00	0		0		34 (orang)		34 (orang)						Disdukcapil
				Jumlah dokumen adminduk online yang diterbitkan		2536	0,00	8.000 (dokumen)	0		139		99		7174		7174						Disdukcapil
				Jumlah bidang DAK yang dilaksanakan		1 (bidang)	0,00	0	0	0,00	0		0		1 bidang		1 bidang						Disdukcapil
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil		99,98%	150.235.039,00	96,00%	154.619.850,00	20,00%	25.054.176,00	30,00%	40.566.946,00	30,00%	37.196.335,00	19,99%	45.015.182,00	99,99%	147.832.639,00	298.067.678,00			
			Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase layanan terhadap penduduk yang belum mendapatkan layanan dokumen akta pencatatan sipil			150.235.039,00	96%	154.619.850,00	20%	25.054.176,00	30%	40.566.946,00	30%	37.196.335,00		45.015.182,00	80%	147.832.639,00	298.067.678,00			
			Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan akta pencatatan sipil		4125	150.235.039,00	2000 (Akta)	154.619.850,00	395 akta	25.054.176,00	613 (akta)	40.566.946,00	619	37.196.335	2.103 akta	45.015.182,00	6.228 akta	147.832.639,00	298.067.678,00			Disdukcapil
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		7,08%	80.655.712,00	17	178.862.300,00	15,00%	24.002.656,00	21,00%	57.618.259,00	30,00%	25.239.916,00	34,00%	43.767.662,00	100,00%	150.628.493,00	231.284.205,00			
			Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database	Jumlah data kependudukan yang tersaji secara berkala				12	6.747.500,00	5,00%	0,00	17,00%	815.850,00	20%	570.000,00		3.360.830,00	42,00%	4.746.680,00	4.746.680,00			Disdukcapil
			Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah validitas elemen data golongan darah				3000 Orang	6.747.500,00	155 Orang	0,00	507 Orang	815.850,00	2338	570.000	3000	3.360.830,00	3000 Oran	4.746.680,00	4.746.680,00			Disdukcapil

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I			II			III			IV							
								Rp.			Rp.			Rp.			Rp.							
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan		80.655.712,00	15 (kali)	172.114.800,00	25%	24.002.656,00	25%	56.802.409,00	25%	24.669.916,00		40.406.832,00	3 kali	145.881.813,00	226.537.525,00					
			Sub Kegiatan Fasilitas Terikat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Lama waktu penyelenggaraan fasilitas			1 tahun	28.319.000,00	3 (bulan)	0,00	3 (bulan)	3.501.900,00	3 (bulan)	5.202.575	3 (bulan)	16.068.210,00	12 (bulan)	24.772.685,00	24.772.685,00		Disdukcapil			
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan			5 OPD	23.605.000,00	0	971.250,00	2 OPD	16.626.650,00	10 OPD	4.158.800	9 OPD	-	19 OPD	21.756.700,00	21.756.700,00		Disdukcapil			
			Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah media untuk publikasi Jumlah inovasi yang kualitasnya ditingkatkan Jumlah inovasi baru		80.655.712,00	4 (media) 7 (inovasi) 5 (inovasi)	120.190.800,00	1 (media)	23.031.406,00		36.673.859,00	3 (media)	15.308.541	3 (media)	24.338.622,00	5 (media)	99.352.428,00	180.008.140,00		Disdukcapil			
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Keakuratan data</b>		<b>90,00%</b>	<b>38.341.150,00</b>	<b>99,91%</b>	<b>33.314.500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00%</b>	<b>6.385.600,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>10.415.000,00</b>	<b>14,95%</b>	<b>6.793.200,00</b>	<b>99,95%</b>	<b>23.593.800,00</b>	<b>61.934.950,00</b>				
			Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan dan Agregat Kependudukan yang tersaji	Jumlah dokumen profil Kependudukan dan Agregat Kependudukan yang tersaji		38.341.150,00		33.314.500,00	0%	0,00	1 dokumen (50)	6.385.600,00	1 (dokumen) 100	10.415.000,00	1 dokumen (150)	6.793.200,00	2 dokumen (450)	23.593.800,00	61.934.950,00					
			Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Lainnya	Jumlah dokumen profil/ agregat kependudukan		38.341.150,00		0,00	0,00	0,00	2 (dokumen) 150 (buku)	0,00	0,00	2 (dokumen) 300 (buku)	-	0,00	0,00	0,00	38.341.150,00		Disdukcapil			
			Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kab/Kota	Jumlah dokumen profil/ agregat kependudukan				33.314.500,00	0	0,00	1 (dokumen) 50	6.385.600,00	1 (dokumen) 100	10.415.000	1 (dokumen) 150	6.793.200,00	1 (dokumen) 100	23.593.800,00	23.593.800,00		Disdukcapil			
9.			<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>			<b>37.393.799.062,00</b>	<b>96,36%</b>	<b>7.940.486.571,50</b>		<b>12.621.307.201,00</b>	<b>10,18%</b>	<b>1.933.686.910,00</b>	<b>10,27%</b>	<b>3.056.321.512,00</b>	<b>20,93%</b>	<b>2.922.677.969,00</b>	<b>52,42%</b>	<b>3.971.492.824,00</b>	<b>93,79%</b>	<b>11.884.179.215,00</b>	<b>95,08%</b>	<b>19.824.665.786,50</b>	<b>53,02%</b>	
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																					
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>																					
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		90,00%	5.727.286.403,00	6.822.155.501,00	21,67%	1.199.816.621,00	25%	1.791.454.467,00	25%	1.756.442.210,00	25%	1.847.351.201,00	96,67%	6.595.064.499,00	36,17%	12.322.350.902,00				
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		868.300,00	100%	2.816.200,00	25%	0,00		1.800.000,00		0,00		274.500,00	25%	2.074.500,00	2.942.800,00					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	15	868.300,00	15	2.816.200,00	5 laporan	0,00	3	1.800.000,00		-		274.500,00	5 laporan	2.074.500,00	2.942.800,00		Dinas Perhubungan			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah		5.126.459.995,00	100%	5.661.721.200,00	25%	1.007.182.741,00		1.537.667.062,00		1.526.410.125,00		1.466.902.469,00	25%	5.538.162.397,00	10.664.622.392,00					
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan yang di bayarkan gaji dan tunjangan	12	5.125.344.095,00	14	5.660.240.000,00	3 bulan	1.007.182.741,00	4	1.537.667.062,00		1.526.201.925		1.466.398.469,00	3 bulan	5.537.450.197,00	10.662.794.292,00		Dinas Perhubungan			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	0	676.200,00	1	890.500,00		0,00	1	0,00		208.200,00		193.000,00		401.200,00	1.077.400,00		Dinas Perhubungan			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan / Triwulan / Semesteran yang disusun	0	263.600,00	17	384.400,00		0,00	3	0,00		-		252.000,00		252.000,00	515.600,00		Dinas Perhubungan			
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah laporan prognosis yang disusun	0	176.100,00	1	206.300,00	0	0,00	0	0,00		-		59.000,00	0	59.000,00	235.100,00		Dinas Perhubungan			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		225.981.912,00	100%	259.051.350,00	25%	61.502.415,00	0%	29.370.250,00		19.807.000,00		119.514.383,00	25%	230.194.048,00	456.175.960,00					
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah jenis komponen alat listrik yang di sediakan	36	3.676.000,00	15	8.672.000,00	4 jenis	3.068.000,00	2	1.503.000,00		-		1.520.000,00	6 jenis	6.091.000,00	9.767.000,00		Dinas Perhubungan			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	5	26.972.300,00	6	46.485.500,00	5 jenis	9.362.300,00	3	3.007.000,00		6.104.900		11.113.200,00	5 jenis	29.587.400,00	56.559.700,00		Dinas Perhubungan			
				Jumlah unit gedung kantor yang dijaga	2		2		2 unit		2					2 unit								
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengasahan	Jumlah Jenis cetak dan pengasahan	6	77.594.000,00	2	21.373.350,00	2 jenis	2.987.800,00	2	900.000,00		4.350.200		4.950.050,00	2 jenis	13.188.050,00	90.782.050,00		Dinas Perhubungan			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan, jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti	0	117.739.612,00	600	182.520.500,00	46.084.315,00	0	23.960.250,00		9.351.900		101.931.133,00		181.327.598,00		299.067.210,00		Dinas Perhubungan			
					1		1		1															
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		4.000.000,00	100%	19.300.000,00	5%	0,00		0,00		17.871.000,00		0,00	5%	17.871.000,00	21.871.000,00					
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang disediakan Jumlah kendaraan yang diadakan Jumlah meubeler yang diadakan	1	4.000.000,00	3	19.300.000,00	0,05	0,00	0	0,00		17.871.000		-	0,05	17.871.000,00	21.871.000,00		Dinas Perhubungan			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah		28.640.132,20	100%	485.066.901,00	25%	73.107.365,00		131.052.105,00		112.319.385,00		147.315.031,00	25%	463.793.886,00	492.434.018,20					
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	3	10.452.765,00	3	61.737.301,00	0	13.527.365,00	3	14.460.313,00		13.532.685		14.871.011,00	3	56.391.374,00	66.844.139,00		Dinas Perhubungan			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas	15	18.187.367,20	15	423.329.600,00	15 orang	59.580.000,00	16	116.591.792,00		98.786.700		132.444.020,00	15 orang	407.402.512,00	425.589.879,20		Dinas Perhubungan			

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah		105.667.100,00	100%	394.199.850,00	25%	58.024.100,00		91.565.050,00		80.034.700,00		113.344.818,00	25%	342.968.668,00	448.635.768,00				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas labatan.	Jumlah Kendaran Dinas Perorangan/kendaran jabatan yang dipelihara	11	12.598.500,00	11	81.050.000,00	11 unit	15.105.500,00	0	18.049.750,00		28.274.250		14.284.000,00	11 unit	75.713.500,00	88.312.000,00		Dinas Perhubungan	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Labangan	Jumlah Kendaran Operasional atau lapangan yang terpelihara	3	13.193.150,00	5	124.480.500,00	3 unit	25.579.400,00	0	22.361.500,00		26.315.800		30.008.250,00	3 unit	104.264.950,00	117.458.100,00		Dinas Perhubungan	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat besar yang terpelihara	1	26.177.600,00	1	105.816.000,00	1 unit	10.756.200,00	0	19.204.000,00		20.550.850		42.736.168,00	1 unit	93.247.218,00	119.424.818,00		Dinas Perhubungan	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung dan perlengkapan kantor yang dijaga dan diberikan	2	53.697.850,00	2	75.153.350,00	2 unit	6.583.000,00	2	31.949.800,00	2	4.893.800		24.811.400,00	2 unit	68.238.000,00	121.935.850,00		Dinas Perhubungan	
					Jumlah rehab sedang/berat gedung kantor								2				2 unit						
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara			0	7.700.000,00							1.505.000,00		1.505.000,00	1.505.000,00		Dinas Perhubungan		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase rata-rata fasilitas keselamatan yang berkualitas	84,78%	13.246.207.350,00	79,59%	1.925.747.331,50	5,79%	733.870.289,00	23,17%	1.264.867.045,00	20%	1.166.235.759,00	12,23%	2.124.141.623,00	91,20%	5.289.114.716,00	21,32%	7.214.862.047,50	54,47%	
					Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64%		95,00%								96,01%		96,01%					
					Persentase Penerangan Jalan Umum	90,00%		80,00%								87%		87,00%					
				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RIJ LLAJ			2	28.386.000,00	0	0,00		19.599.050,00		0,00		0,00	19.599.050,00	19.599.050,00				
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RIJ LLAJ			2	28.386.000,00	0	0,00	0	19.599.050,00		-		-	19.599.050,00	19.599.050,00		Dinas Perhubungan		
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah unit sarana dan prasarana yang tersedia		795.776.530,50	2	3.553.950.900,00	20,00%	548.134.664,00	1	685.683.769,00		711.413.023,00		1.365.543.992,00	20,00%	3.310.775.448,00	4.106.551.978,50			
				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis rambu-rambu dan fasilitas keselamatan lalu lintas	1	22.781.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		-		0	0,00	22.781.000,00		Dinas Perhubungan		
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis rambu-rambu dan fasilitas keselamatan	3	702.721.530,50	1	3.450.950.900,00	0	548.134.664,00	0	660.169.309,00		695.781.836	1 jenis	1.303.946.642,00	1 jenis	3.208.032.451,00	3.910.753.981,50		Dinas Perhubungan	
					Jumlah jenis alat Pengamanan lalu lintas	16	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0				
					Jumlah Lokasi Parkir		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0				
					jumlah penambahan jaringan tiang dan lampu jalan dalam kota	1500	0	0	0	0	0	0,00				0	0	0					
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah jenis sarana prasarana keselamatan lalu lintas	5	70.274.000,00	5	103.000.000,00	1 jenis	0,00	2	25.514.460,00		15.631.187		61.597.350,00	3 jenis	102.742.997,00	173.016.997,00		Dinas Perhubungan	
				Pengelolaan terminal Penumpang Tipe C	Jumlah ketersediaan fasilitas terminal berdasarkan SPM		29.878.125,00		47.395.000,00	10%	3.071.250,00	12%	3.937.500,00		4.764.375,00		34.493.675,00	5 fasilitas	46.266.800,00	76.144.925,00			
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Dokumen yang disusun	10	29.878.125,00	10	47.395.000,00	0	3.071.250,00	0	3.937.500,00		4.764.375	10	34.493.675,00	10	46.266.800,00	76.144.925,00		Dinas Perhubungan	
					Jumlah hari razia penertiban angkutan	8		15		0					1		1						
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi Parkir tepi jalan umum	16	572.769.600,00	16 lokasi	79.389.375,00		164.831.602,00		121.794.190,00		168.767.514,00	16 lokasi	534.782.681,00		534.782.681,00	534.782.681,00			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi parkir tepi jalan umum	16	572.769.600,00	16 lokasi	79.389.375,00	16	164.831.602,00	16	121.794.190	16	168.767.514,00	16 lokasi	534.782.681,00		534.782.681,00			Dinas Perhubungan	
					jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	16		16 orang		16		16		16	16 orang							Dinas Perhubungan	
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan terlayani uji keur		38.205.000,00		122.000.000,00	0%	0,00		0,00		59.000.000,00		58.124.400,00	0%	117.124.400,00	155.329.400,00			
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan	Jumlah kartu bukti lulus uji elektronik (BLUe)	2000	50.000.000,00		0,00	2000	50.000.000,00		0,00		-	2000	50.000.000,00		50.000.000,00	50.000.000,00		Dinas Perhubungan	
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat penguji kendaraan bermotor yang di pelihara	10	38.205.000,00	10	72.000.000,00		0,00		9.000.000,00	9	58.124.400,00	9	67.124.400,00		105.329.400,00			Dinas Perhubungan	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			437.689.322,00	0,00	0%	0,00		0,00		0,00		0,00	0%	0,00	437.689.322,00				
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan dijalan raya	3	437.689.322,00	0	0,00		0,00		0,00				0,00		437.689.322,00		Dinas Perhubungan		
				Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan jalan kab/kota	W/C ratio lalu lintas		13.975.000,00	30%	721.738.600,00	0,3 ratio	46.629.375,00		247.923.542,00		128.127.865,00		276.220.239,00	0,3 ratio	698.901.021,00	712.876.021,00			
				Penataan manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab/kota	Jumlah Survei	10	12.000.000,00	1 kali	984.375,00	2	3.937.500,00	3	1.968.750	5	4.921.875,00	12 kali	11.812.500,00		11.812.500,00			Dinas Perhubungan	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV						13	14=7+13	15=14/6 x 100%	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								K
			Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah jenis fasilitas keselamatan lalu lintas			2	225.440.000,00		0,00	1	96.369.050,00		23.976.000	2	98.616.245,00	3	218.961.295,00		218.961.295,00		Dinas Perhubungan	
			Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota	Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas jalan jumlah tenaga bantuan lalu lintas			3	445.821.600,00	1 kegiatan	45.645.000,00	1	133.816.992,00		102.183.115	2	156.113.369,00	2 kegiatan	437.758.476,00		437.758.476,00	0,00	Dinas Perhubungan	
			Forum lalu lintas angkutan jalan kab/kota	Jumlah Pertemuan forum LLAJ kab/kota		1	13.975.000,00	2	38.477.000,00	0	0,00	1	13.800.000,00		-	16.568.750,00	0	30.368.750,00		44.343.750,00		Dinas Perhubungan	
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah	Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang			610.223.354,00	1215	752.911.600,00	56.645.625,00		142.891.582,00		141.136.306,00		220.991.803,00		561.665.316,00		1.171.888.670,00			
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antara kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Angkutan Mudik Jumlah kegiatan pengelolaan terminal/pangkalan Jumlah pangkalan truk terpelihara Jumlah portal TPR Jumlah tenaga pemungut retribusi		0	610.223.354,00	2	752.911.600,00	0	56.645.625,00	1	142.891.582,00		141.136.306	1	220.991.803,00	0	561.665.316,00		1.171.888.670,00		Dinas Perhubungan
10.			<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			45.236.828.097,75	97,79%	8.903.873.828,00	9.395.158.526,00	6,00%	1.339.292.085,00	8,50%	2.562.838.692,00	30,60%	1.620.786.897,00	49,77%	3.652.680.059,00	94,87%	9.175.597.733,00	96,33%	18.079.471.561,00	39,97%	
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																				
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						9.370.203.526,00	12,00%	1.339.292.085,00	17,00%	2.562.838.692,00	16,20%	1.615.618.147,00	55,54%	3.633.648.209,00	27,77%	9.151.397.133,00				
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				3.309.160.906,00		3.884.518.326,00	25,00%	696.533.587,00	25,00%	1.000.347.427,00	25,00%	197.302.109,00	25%	1.885.476.611,00	100,00%	3.779.659.734,00	39,64%	7.088.820.640,00		
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				748.000,00		748.000,00		0,00				169.000,00		579.000,00	0%	748.000,00		1.496.000,00		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja yang di susun Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		22	748.000,00	16	748.000,00	8 laporan	0,00	3	169.000,00		-	5	579.000,00	16 laporan	748.000,00		1.496.000,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.670.165.996,00	25%	3.152.220.000,00	25%	571.326.828,00	25%	860.238.741,00	25%	470.003,00	25%	1.656.529.153,00	700%	3.088.564.725,00		5.758.730.721,00		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tambahan penhasilan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14	2.668.917.996,00	14	3.150.972.000,00	3 bulan	571.326.828,00	4	859.958.741,00	4		3	1.656.031.153,00	14 bulan	3.087.316.725,00		5.756.234.721,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun yang di susun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	750.000,00	1	750.000,00	1 laporan		0	280.000,00	0	470.000,00	1	0,00	1 laporan	750.000,00		1.500.000,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan dan semesteran yang di susun Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran		13	249.000,00	18	249.000,00	3	0,00	4	0,00	6	0,00	4	249.000,00	18 laporan	249.000,00		498.000,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis yang di susun Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1	249.000,00	0	249.000,00	0	0,00	0	0,00		0,00	1	249.000,00	1 laporan	249.000,00		498.000,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				163.046.136,00		243.543.226,00		55.227.162,00		47.588.475,00		67.965.024,00		72.184.690,00		242.965.351,00		406.011.487,00		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang diadakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4	8.148.430,00	4	8.147.826,00	4 jenis	1.357.556,00	4 jenis	2.707.500,00	4 jenis	1.356.000	4 jenis	2.718.500,00	4 jenis	8.139.556,00		16.287.986,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat tulis Kantor yang disediakan Jumlah jenis bahan pendukung penyelesaian surat menyurat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6	22.985.500,00	6 uni	21.112.000,00	6 unit	5.257.000,00	6 unit	5.477.500,00	6 unit	5.060.000	6 unit	5.285.500,00	6 unit	21.080.000,00		44.065.500,00		Dinas Komunikasi dan Informatika





No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							8		9		10		11		12						13		14=7+13		15=14/6 x 100%	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
				Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan			5	2.064.614.800,00	5	373.975.596,00		575.262.291,00		425.241.777		684.595.234,00	5	2.059.074.898,00		2.059.074.898,00		Dinas Komunikasi dan Informatika				
			Layanan Hubungan Media	Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah			2		2		2		2		2		2									
				Jumlah pertemuan jumpa pers																						
				Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah																						
				Jumlah Layanan Hubungan Media																						
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	indeks implementasi tata kelola SPBE	2,15	9.075.314.075,00	1,80	2.879.869.002,00	2,12	2.745.905.400,00	25,00%	192.158.479,00	35,00%	829.822.292,00	20%	857.667.914,00	103,77%	804.745.313,00	2,20	2.684.393.998,00	33,33%	5.564.263.000,00	61,31%			
				indeks implementasi layanan SPBE	3,55		2,70		3,55							94,93%		3,37								
			Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi			23	2.745.905.400,00	23	192.158.479,00	20%	829.822.292,00		857.667.914,00		804.745.313,00	23	2.684.393.998,00		5.564.263.000,00						
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi			2 layanan	289.423.800,00	2	47.494.190,00		69.414.210,00		64.178.040		95.634.540,00	2 layanan	276.720.980,00		612.178.944,00		Dinas Komunikasi dan Informatika				
				Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan																						
				Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan																						
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang dikelola	6	2.544.411.038,00	7	2.456.481.600,00	7 jenis	144.664.289,00	0	760.408.082,00		793.489.874		709.110.773,00	7 jenis	2.407.673.018,00		4.952.084.056,00		Dinas Komunikasi dan Informatika				
				Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan																						
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasikan		100,00%	23.162.000,00	83,00%	34.408.000,00	10,00%	0,00	25,00%	1.401.750,00	36%	189.000,00	12%	24.257.500,00	83,00%	25.848.250,00		49.010.250,00					
			Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan			23.162.000,00	3 dokumen	34.408.000,00	0%	0,00	200%	1.401.750,00		189.000,00		24.257.500,00	0%	25.848.250,00		49.010.250,00					
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	2	23.162.000,00	2 dokumen	26.008.000,00	0	0,00	2	1.401.750,00		189.000	1	20.295.000,00	3 dokumen	21.885.750,00		45.047.750,00		Dinas Komunikasi dan Informatika				
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																						
			Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah pelatihan statistik sektoral yang diadakan			1	8.400.000,00	0					1	3.962.500,00	1	3.962.500,00		3.962.500,00		Dinas Komunikasi dan Informatika					
				Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang			24							24		24										
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					24.955.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	45%	5.168.750,00	44%	19.031.850,00	89,00%	24.200.600,00								
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	% sistem elektronik/layanan SPBE yang telah menerapkan tanda tangan digital		67,00%	8.040.000,00	89,00%	24.955.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	45%	5.168.750,00	44%	19.031.850,00	89,00%	24.200.600,00		32.240.600,00					
			Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan			8.040.000,00	0%	24.955.000,00	0%	0,00	0%	0,00		5.168.750,00		19.031.850,00	0%	24.200.600,00		32.240.600,00					
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan Non Elektronik	Jumlah pelatihan	1	8.040.000,00	0	24.955.000,00			0	0,00	1	5.168.750		19.031.850,00		24.200.600,00		32.240.600,00		Dinas Komunikasi dan Informatika				
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																						
11.			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		15.758.399.937,00	96,19%	4.201.844.790,00		5.192.080.462,00	18,61%	659.809.411,00	23,33%	1.027.078.162,00	28,27%	1.261.534.860,00	26,39%	1.421.652.325,00	96,60%	4.370.074.758,00	96,40%	8.571.919.548,00	54,40%				
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KERJA																							
			Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	93,33%	459.861.718,00	1 Tahun	3.354.919.512,00	25,00%	588.389.048,00	25,00%	831.979.367,00	25,00%	835.841.805,00	25%	825.822.825,00	100,00%	3.082.033.045,00	30,84%	3.541.894.763,00						
			Administrasi Keuangan perangkat daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100,00%	2.746.437.322,00		2.667.161.462,00		493.847.055,00	-	723.760.683,00		704.433.671,00		600.459.519,00		2.522.500.928,00		5.268.938.250,00						
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji yang dibayarkan	1 tahun	2.746.437.322,00		2.667.161.462,00	3 bulan	493.847.055,00	4 bin	723.760.683,00	3 bin	704.433.671,00	3 bin	600.459.519,00	3 bulan	2.522.500.928,00		5.268.938.250,00		DPMPTSP				
			Administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	3 jenis	136.083.238,00		236.351.750,00	3 jenis	30.748.450,00	0,00%	42.035.000,00		36.203.699,00		104.057.599,00	3 jenis	213.044.748,00		349.127.986,00						
			Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan dan dekorasi yang disediakan	4 jenis	19.121.200,00	11 jenis	27.475.000,00	3 jenis	5.750.300,00	2 jenis	1.913.800,00	3 jenis	5.767.400,00	3 jenis	4.289.700,00	3 jenis	17.721.200,00		36.842.400,00		DPMPTSP				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								I		II		III		IV						13	14=7+13	15=14/6 x 100%
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik		5 jenis 5.939.650,00	1 tahun 6.005.000,00	3 bulan 1.600.000,00	2 jenis 450.000,00			1 jenis 3.955.000,00	3 bulan 6.005.000,00		11.944.650,00		DPMPTSP					
			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia selama 1 tahun		5 jenis 16.965.000,00	1 tahun 35.396.500,00	3 bulan 8.859.200,00	13 jenis 9.077.300,00		5.830.000,00	15 jenis 10.025.000,00	3 bulan 33.791.500,00		50.756.500,00		DPMPTSP					
			Penyelenggaraan rapat kooordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah makan minum yang disediakan   jumlah perjalanan dinas yang dilakukan		200 oh dan 1 tahun 94.057.388,00	200 oh dan 1 tahun 150.628.000,00	200 oh dan 1 tahun 14.538.950,00		24.630.400,00	200 oh dan 1 tahun 22.358.499,00	200 oh dan 1 tahun 80.505.399,00	200 oh dan 1 tahun 142.033.248,00		236.090.636,00		DPMPTSP					
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang tertata		1 tahun 16.847.250,00	1 tahun 16.847.250,00	0,00	2 jenis 5.963.500,00		2.247.800,00		5.282.500,00		13.493.800,00		DPMPTSP					
			Penyediaan jasa penunjang umum pemerintahan daerah	Pengamanan arsip		168.050.805,00	211.869.000,00	29.632.443,00	47.765.584,00		42.529.235,00		50.088.207,00		170.015.469,00		338.066.274,00					
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tenaga kebersihan, penjaga kantor dan alat kebersihan yang tersedia		198 buah 1.980.000,00	48 rekening 48.575.000,00	48 rekening 8.554.923,00	4 org dan 3 BLN/Or	7.910.069,00	4 org dan 1 tahun (Orang)	8.960.721,00	9.008.693,00	48 rekening 34.434.406,00		36.414.406,00		DPMPTSP				
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang disediakan		27 jenis dan 5 131.722.178,00	1 tahun 3.000.000,00	0,00		250.000,00		-		250.000,00		131.972.178,00		DPMPTSP				
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Pembelian alat kebersihan		34.348.627,00	1 tahun, 4 orang 160.294.000,00	1 tahun, 4 orang 21.077.520,00	1 tahun, 4 orang 39.605.515,00		33.568.514,00	4 jenis rekening selama 12 bln, 10	41.079.514,00	1 tahun, 4 orang 135.331.063,00		169.679.690,00		DPMPTSP				
			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		67.060.075,00	1 jenis 29.700.000,00	1 jenis 0,00	0,00%	0,00		0,00		28.496.000,00	1 jenis 28.496.000,00		95.556.075,00					
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin		67.060.075,00	8 jenis 29.700.000,00	1 jenis 0,00				-	3 jenis 28.496.000,00	3 jenis 28.496.000,00		95.556.075,00		DPMPTSP				
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah tagihan rekening telepon,air, listrik dan internet		88.667.600,00	1 tahun 209.837.300,00	1 tahun 34.161.100,00	0,00%	18.418.100,00		52.675.200,00	42.721.500,00	1 tahun 147.975.900,00		236.643.500,00						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara roda 2 dan roda 4		7 unit dan 2 unit 54.488.000,00	2 unit roda 4, 7 unit roda 2 dan 2 orang 131.712.300,00	7 unit dan 2 unit 31.806.100,00	7 unit dan 2 unit 12.468.000,00		7 unit dan 2 unit 39.003.600,00	7 unit dan 2 unit 19.324.500,00	7 unit dan 2 unit 102.602.200,00		157.090.200,00		DPMPTSP					
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan jumlah sopir		1 tahun 14.745.000,00	2 unit roda 4, 7 unit 48.125.000,00	1 tahun 2.355.000,00	1 tahun 2.530.000,00		1 tahun 2.980.000,00	1 tahun 7.650.000,00	1 tahun 15.515.000,00		30.260.000,00		DPMPTSP					
			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara		1 gedung 19.434.600,00	1 gedung 30.000.000,00	1 gedung 0,00		3.420.100,00	1 unit 10.691.600,00	1 unit 15.747.000,00	1 gedung 29.858.700,00		49.293.300,00		DPMPTSP					
			Program Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	persentase pencari kerja yang dilatih		100,00%	201.405.400,00	16 orang 507.900.200,00	25,00%	10.098.251,00	30,00%	100.948.985,00	20%	139.698.368,00	25%	208.806.419,00	1,96%	459.552.023,00	75,00%	660.957.423,00		
			Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Jumlah pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan		201.405.400,00	16 orang 507.900.200,00	16 orang 10.098.251,00	-	100.948.985,00		139.698.368,00	208.806.419,00	16 orang 459.552.023,00		660.957.423,00						
			Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih		16 orang 201.405.400,00	32 orang 76.876.000,00	16 orang 3.852.547,00	32 orang 867.300,00	32 orang 35.339.596,00		20.523.118,00	32 orang 60.582.561,00		261.987.961,00		DPMPTSP					
			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga	Jumlah peserta pelatihan yang dilatih oleh Lembaga Pelatihan Kerja		30 orang 431.024.200,00	30 orang 6.245.704,00	30 Orang 100.081.685,00	30 orang 104.358.772,00		188.283.301,00	30 orang 398.969.462,00		398.969.462,00		DPMPTSP						
			Program penempatan tenaga kerja	Jumlah penambahan kesempatan kerja		5,00%	199.619.500,00	30 orang 31.653.000,00	5,00%	0,00	20,00%	657.000,00	0%	0,00	75%	19.126.350,00	535 orang 19.783.350,00	33,33%	219.402.850,00	33,33%		
			Pelayanan antar kerja di daerah kab/kota	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		199.619.500,00	30 orang 31.653.000,00	30 orang 0,00	-	657.000,00		0,00	19.126.350,00	30 orang 19.783.350,00		219.402.850,00						
			Penyuluhan dan Bimbingan labatan bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta sosialisasi Bursa Tenaga Kerja		30 orang 31.653.000,00	30 orang 0,00	32 orang 657.000,00		-		19.126.350,00	32 orang 19.783.350,00		19.783.350,00		DPMPTSP					
			Pelayanan Antar Kerja	Jumlah dokumen informasi ketenagakerjaan		30 orang 199.619.500,00	0,00	0,00		-		0	0,00	199.619.500,00		DPMPTSP						
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>					827.808.950,00	25,00%	50.400.000,00	25,00%	12.600.000,00	25,00%	26.695.000,00	25,00%	287.222.800,00	12,50%	376.917.800,00				
			Program Hubungan Industrial	Jumlah peserta sosialisasi yang diberikan stimulan BPJS Ketenagakerjaan		100,00%	102.053.200,00	6000 keputusan keputusaa n walikota 827.808.950,00	25,00%	50.400.000,00	25,00%	12.600.000,00	25%	26.695.000,00	100,00%	287.222.800,00	50,00%	478.971.000,00				
			Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu)	Jumlah tenaga kerja sektor informal yang diberikan stimulan BPJS Ketenagakerjaan		102.053.200,00	1000 orang 827.808.950,00	1000 orang 50.400.000,00		12.600.000,00		26.695.000,00	6000 keputusaa n walikota 287.222.800,00	1000 orang 376.917.800,00		478.971.000,00		DPMPTSP				
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>					469.798.800,00	12,50%	10.922.112,00	20,00%	80.892.810,00	44,81%	259.299.687,00	12,50%	80.673.931,00		431.788.540,00				
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP		0,00%	0,00	100,00%	114.562.800,00	25,00%	10.922.112,00	25%	29.765.487,00	25%	39.631.581,00	100,00%	111.151.990,00	50,00%	111.151.990,00			

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								I		II		III		IV						13	14=7*13	15=14/6 x 100%
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan		Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP			35 jenis 114.562.800,00	- 10.922.112,00	- 30.832.810,00	- 29.765.487,00	- 39.631.581,00	- 111.151.990,00	- 111.151.990,00									
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah sosialisasi dialog interaktif peraturan yang dilaksanakan, Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan, Jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan (2021), Jumlah dialog interaktif, jumlah Sosialisasi dan			4x dialog interaktif 4 hari 24 siaran 114.562.800,00	4x dialog interaktif 4 hari 24 siaran 10.922.112,00	50 orang 30.832.810,00	29.765.487,00		39.631.581,00	4x dialog interaktif 4 hari 24 siaran 111.151.990,00	111.151.990,00			DPMPTSP					
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah sosialisasi dialog interaktif peraturan yang dilaksanakan dan jumlah sosialisasi saran peraturan yang dilaksanakan			12 orang 15 layanan 75 buku 77 izin 0,00	0,00		-	0	0,00	0,00	0,00			DPMPTSP					
			Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Tingkat Kepatuhan perusahaan			90,00% 355.236.000,00	182 perusahaan 355.236.000,00	0,00% 0,00	15,00% 50.060.000,00	65% 229.534.200,00	41.042.350,00	79,61% 320.636.550,00	675.872.550,00								
	Meningkatnya nilai investasi		Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	Jumlah perusahaan melakukan pelaporan LKPM			182 perusahaan 355.236.000,00	0 0,00	0,00	0,00	50.060.000,00	229.534.200,00	41.042.350,00	0,00	320.636.550,00	675.872.550,00						
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang difasilitasi dalam pelaksanaan penanaman modal			182 perusahaan 287.567.500,00	182 perusahaan 287.567.500,00	0,00	14.060.000,00	200.992.000,00	182 perusahaan 41.042.350,00	182 perusahaan 256.094.350,00	543.661.850,00			DPMPTSP					
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang difasilitasi dalam pelaksanaan penanaman modal			182 perusahaan 67.668.500,00	182 perusahaan 67.668.500,00	0,00	36.000.000,00	182 perusahaan 28.542.200,00	-	182 perusahaan 64.542.200,00	132.210.700,00			DPMPTSP					
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang telah dilakukan pemantauan			182 perusahaan 0,00	182 perusahaan 0,00	0,00		-	0	0,00	0,00			DPMPTSP					
12.			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		21.344.236.327,00	94,83%	4.736.879.204,00	5.182.917.350,00	19,38%	754.797.808,00	19,38%	1.228.816.763,00	19,25%	1.134.281.235,00	35,25%	1.832.547.934,00	93,25%	4.950.443.740,00	94,04%	9.687.322.944,00	45,39%	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					5.001.228.280,00	17,50%	730.100.712,00	20,00%	1.209.283.910,00	17,50%	1.081.643.119,00	33,00%	1.756.000.819,00	88,00%	4.777.028.560,00				
	Meningkatnya pelayanan administrasi dan meningkatnya disiplin, sarana dan prasarana anasarub		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase aparat internal OPD menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran		95,00%	893.969.874,00	3.714.993.480,00	25,00%	683.987.673,00	25,00%	972.562.176,00	25,00%	964.496.376,00	25%	1.008.128.611,00	100,00%	3.629.174.836,00	37,84%	4.523.144.710,00		
			Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tambahan benehasilan ASN			2.870.181.444,00	2.817.734.840,00	519.423.910,00	761.361.297,00	739.648.020,00	727.959.677,00	2.748.392.904,00	5.618.574.348,00								
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan ASN			2.870.181.444,00	2.817.734.840,00	3 bulan	519.423.910,00	3 bulan	761.361.297,00	4 bulan	739.648.020,00	4 bulan	727.959.677,00	14 bulan	2.748.392.904,00	5.618.574.348,00			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis bahan dan alat untuk pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia			197.638.446,00	192.894.450,00	44.397.125,00	39.360.828,00	63.609.297,00	45.341.505,00	192.708.755,00	390.347.201,00								
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan kantor			5 jenis 5.948.000,00	5 jenis 6.003.500,00	3 jenis 959.000,00	2 jenis 716.000,00	5 jenis 2.656.000,00	5 jenis 1.672.500,00	5 jenis 6.003.500,00	11.951.500,00								Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan dan jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan			22 jenis 32.790.000,00	22 jenis 30.000.000,00	5 jenis 7.890.300,00	4 jenis 5.531.500,00	6 jenis 8.802.500,00	22 jenis 7.715.105,00	22 jenis 29.939.405,00	62.729.405,00								Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan			5 jenis 20.995.850,00	6 jenis 18.895.650,00	3 jenis 5.337.000,00	2 jenis 2.565.000,00	3 jenis 7.229.000,00	6 jenis 3.758.500,00	6 jenis 18.889.500,00	39.885.350,00								Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan koordinasi dan konsultasi yang diikuti			366 ok 137.904.596,00	6 jenis 137.995.300,00	2 jenis (35 ok, 64)	30.210.825,00	2 jenis (194 ok)	44.921.797,00	6 jenis 32.195.400,00	6 jenis 137.876.350,00	275.780.946,00							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penunjang lancarnya administrasi perkantoran yang tersedia			33.771.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.771.350,00								
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan			33.771.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.771.350,00									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penunjang lancarnya administrasi perkantoran yang tersedia			548.125.728,00	579.263.190,00	105.029.138,00	146.940.651,00	136.081.809,00	180.636.429,00	568.688.027,00	1.116.813.755,00								
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat			2 jenis 1.472.000,00	2 jenis 2.750.000,00	1 jenis 250.000,00	0,00	1 jenis 250.000,00	2 jenis 2.250.000,00	2 jenis 2.750.000,00	4.222.000,00								Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan			60 tagihan 45.017.182,00	5 rekening 46.082.790,00	5 rekening (15)	24.689.198,00	5 rekening (15)	6.552.044,00	5 rekening (15)	43.888.810,00	88.905.992,00							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi yang dikerahkan			16 orang 501.636.546,00	16 orang 530.430.400,00	16 orang 80.089.940,00	16 orang 142.379.765,00	16 orang 129.279.765,00	16 orang 170.299.747,00	16 orang 522.049.217,00	1.023.685.763,00								Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara dan jumlah gedung yang diadakan			114.434.350,00	125.101.000,00	15.137.500,00	24.899.400,00	25.157.250,00	54.191.000,00	119.385.150,00	233.819.500,00								
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Labahan.	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara			6 unit 91.209.850,00	6 unit 95.101.000,00	6 unit 8.973.500,00	6 unit 22.443.400,00	5 unit 13.959.250,00	6 unit 44.138.000,00	11 unit 89.514.150,00	180.724.000,00								Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara			46 unit 13.232.000,00	46 unit 20.000.000,00	7 unit 4.765.000,00	5 unit 1.120.000,00	8 unit 7.279.000,00	8 unit 6.835.000,00	48unit 19.999.000,00	33.231.000,00								Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV						13	14=7+13	15=14/6 x 100%	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								K
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara, jumlah gedung kantor yang direhabilitasi		3 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	3 unit					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
	Meningkatnya minat baca masyarakat		Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah anggota pustaka	3025	3.274.351.100,00	97,00%	814.672.262,00	1.286.234.800,00	10,00%	46.113.039,00	15,00%	236.721.734,00	10,00%	117.146.743,00	41,00%	747.872.208,00	41,00%	1.147.853.724,00	20,83%	1.962.525.986,00	59,94%	
			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan ke perpustakaan					286.948.800,00	25,00%	39.244.539,00	25,00%	118.204.598,00		53.096.093,00		68.810.661,00		279.355.891,00		279.355.891,00		
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang diadakan		207.596.937,00	8 jenis	286.948.800,00	3 jenis (lupah tenaga pengolah bahan pustaka, tenaga penerjemah dan sopir)	39.244.539,00	3 jenis (lupah tenaga pengolah bahan pustaka, tenaga penerjemah dan sopir)	118.204.598,00	2 jenis bahan bacaan, Upah 2 org tenaga pengolah bahan pustaka, 2 org tenaga penerjemah, 1 org tenaga penerjemah dan sopir	2 jenis bahan bacaan, Upah 2 org tenaga pengolah bahan pustaka, 2 org tenaga penerjemah, 1 org tenaga penerjemah dan sopir	68.810.661,00	3 jenis (lupah tenaga pengolah bahan pustaka, tenaga penerjemah dan sopir)	279.355.891,00		486.952.828,00				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Pustaka		607.075.325,00		999.286.000,00	12,00%	6.868.500,00	20,00%	118.517.136,00		64.050.650,00		679.061.547,00		868.497.833,00		1.475.573.158,00			
			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lomba yang diadakan		115.603.900,00	7 jenis	869.850.500,00		2.236.500,00	1 kali lomba	108.953.886,00	1 kali lomba pengembangan minat	9.273.600,00		628.535.297,00		748.999.283,00		864.603.183,00			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Frekuensi layanan perpustakaan keliling						1 jenis (6 kali)						1 jenis (6 kali)							
				Frekuensi pemutaran film bertema edukasi							3 kali pemutar												
				Jumlah kegiatan pameran, borang dossier dan temu penyair																			
			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	DEO Pembangunan LKC		491.471.425,00	3 jenis	129.435.500,00		4.632.000,00		9.563.250,00		54.777.050,00		50.526.250,00		119.498.550,00		610.969.975,00			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Frekuensi kegiatan kelas kreatif						1 jenis (12 kelas kreatif)		12 kelas kreatif		12 kelas kreatif		13 kelas kreatif		48 kelas kreatif					
				Jumlah lomba bunda literasi												3 kali							
				Jumlah lomba Taman Bacaan Masyarakat (TBM)																			
				Jumlah kegiatan bina fasilitator							16 kegiatan fasilitator												
				Jumlah pelaksanaan koordinasi forum pengembangan literasi																			
				Jumlah insentif pengelola TBM																			
				Jumlah pengurusan akte notaris TBM																			
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>																				
	Meningkatnya penyelamatan, pembinaan dan penataan arsip secara baku		Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku		96,00%	56.271.350,00	42,00%	59.521.350,00	20,00%	2.460.250,00	25,00%	2.054.000,00	22,00%	22.935.475,00	20,00%	29.768.624,00	87,00%	57.218.349,00	16,67%	113.489.699,00		
			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan pengolahan arsip dinamis					30.000.050,00		853.000,00		1.554.000,00		12.861.075,00		13.297.684,00		28.565.759,00		28.565.759,00		
			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melakukan pengolahan arsip dinamis dengan baik			3 jenis	30.000.050,00	1 jenis (sosialisasi)	853.000,00	12 kali pengawasan ke	1.554.000,00	6 kali pengawasan ke	12.861.075,00	10 OPD	13.297.684,00	10 OPD	28.565.759,00		28.565.759,00			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah arsip statis yang telah tersedia di JIKN		56.271.350,00		29.521.300,00		1.607.250,00		500.000,00		10.074.400,00		16.470.940,00		28.652.590,00		84.923.940,00			
			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah menduplikasikan arsip ke aplikasi arsip (TAMBO)		56.271.350,00	3 OPD	29.521.300,00		1.607.250,00	-	500.000,00	2 OPD	10.074.400,00	3 OPD, 600 dokume	16.470.940,00	3 OPD, 600 dokume	28.652.590,00		84.923.940,00			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah arsip statis yang terselamatkan (Jumlah arsip yang tersimpan pada LKD)	5000	488.243.524	93,00%	101.784.274,00	122.167.720,00	22,50%	22.236.846,00	12,50%	17.478.853,00	20%	29.702.641,00	55%	46.778.491,00	55,00%	116.196.831,00	20,08%	217.981.105,00	44,65%	
			Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berakala Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang diselamatkan					24.193.620,00	20,00%	10.861.000,00	0,00%	0,00		4.644.000,00		8.281.000,00		23.786.000,00		23.786.000,00		
			Pemulihan dan Penyelamatan arsip akibat bencana	Jumlah arsip yang terpelihara			15 dokumen	24.193.620,00	3 dokumen	10.861.000,00	-	0,00		4.644.000,00	15 dokume	8.281.000,00	15 dokume	23.786.000,00		23.786.000,00			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I		II		III		IV		13		14=7+13						15=14/6 x 100%	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.
			Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Aih Media Kabupaten/Kota	Persentase Autentikasi Arsip statis dan Arsip alihmedia Kota		101.784.274,00	97.974.100,00	25,00%	11.375.846,00	25,00%	17.478.853,00		25.058.641,00	38.497.491,00	92.410.831,00	194.195.105,00									
			Penilaian dan Penetapan autentitas arsip statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	Jumlah penetapan autentitas arsip statis		101.784.274,00	1000 berkas	97.974.100,00	200 berkas (2 orang tenaga operator dan penata arsip)	11.375.846,00	200 berkas (2 orang tenaga operator dan penata arsip 3 bulan)	17.478.853,00	2 orang tenaga operator dan penata arsip	25.058.641,00	1000 berkas (2 orang tenaga operator dan penata arsip 3 bulan)	38.497.491,00	1000 berkas (2 orang tenaga operator dan penata arsip 3 bulan)	92.410.831,00	194.195.105,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
13.			DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		163.592.745.075,65	80,32%	38.989.537.585,96	43.042.857.524,00	2,50%	1.526.404.545,00	19,73%	2.446.798.770,00	18,21%	2.461.602.931,00	45,41%	13.685.783.083,00	85,86%	20.120.589.329,45	59,95%	42.962.740.900,96	26,26%				
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				41.079.026.374,00	5,00%	1.526.404.545,00	20,71%	2.136.119.295,00	6,43%	2.222.307.731,00	39,57%	12.601.766.540,00	71,71%	18.486.598.111,40								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%	5.302.187.766,00	100,00%	5.778.731.050,00	25,00%	991.607.885,00	25,00%	1.591.880.376,00	25,00%	1.463.132.521,00	25%	1.608.570.835,00	100,00%	5.655.191.617,00		7.885.676.027,00					
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan dan dikumpulkan tepat waktu		595.000,00	100,00%	595.000,00	0,00		595.000,00		0,00		0,00	595.000,00		1.190.000,00							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang dibuat	1 laporan	595.000,00	1 laporan	595.000,00	0,00	1	595.000,00		-		-	595.000,00		1.190.000,00			Disporapar				
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah		3.735.962.627,00	100,00%	3.977.738.900,00	729.752.921,00	1.117.654.787,00	1.067.315.197,00	974.034.667,00	3.888.757.572,00	7.624.720.199,00											
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	29 orang	3.734.177.627,00	30 orang	3.975.953.900,00	30 orang	729.752.921,00	30	1.117.059.787,00	28	1.067.315.197,00	28	972.844.667,00	28	3.886.972.572,00	7.621.150.199,00			Disporapar			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun		595.000,00	1 laporan	595.000,00	0	0,00	1	595.000,00		-		1	595.000,00	1.190.000,00			Disporapar				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran yang disusun	17 laporan	595.000,00	17 laporan	595.000,00	0	0,00	0	0,00		-	17 laporan	595.000,00	17 laporan	595.000,00	1.190.000,00			Disporapar			
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah laporan prognosis yang disusun	1 laporan	595.000,00	1 laporan	595.000,00	0	0,00	0	0,00		-	1 laporan	595.000,00	1 laporan	595.000,00	1.190.000,00			Disporapar			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		202.047.878,00	185.906.000,00	29.141.250,00	56.603.750,00	36.118.334,00	55.612.961,00	177.476.295,00	379.524.173,00												
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	20 jenis	12.351.600,00	20 jenis	12.525.000,00	6	4.894.000,00	3	3.100.000,00		-	4.448.000,00	3	12.442.000,00	24.593.600,00			Disporapar				
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan yang	43 jenis	26.300.100,00	43 jenis	32.082.400,00	14	3.500.500,00	15	7.992.000,00		2.380.000,00	18.158.250,00	15	32.030.750,00	58.330.850,00			Disporapar				
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 jenis	11.252.600,00	8 jenis	13.808.250,00	4	5.638.000,00	2	1.899.300,00	1	240.000,00	1	2.206.350,00	1	9.983.650,00	21.236.250,00			Disporapar			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum rapat dinas yang disediakan	487 orang	152.343.578,00	700 orang	127.490.350,00	120	15.108.750,00	190	43.612.450,00	220	33.498.334,00	170	30.800.361,00	700	123.019.895,00	275.363.473,00			Disporapar			
				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	122 kali		225 kali		27		54		33		45	159									
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		51.100.000,00	40.730.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	37.430.000,00	37.430.000,00	88.530.000,00									
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	14 unit	51.100.000,00	1 unit	40.730.000,00	0	0,00	0	0,00		-	37.430.000,00	37.430.000,00	88.530.000,00			Disporapar					
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah		1.214.888.911,00	1.399.972.200,00	215.618.214,00	385.191.839,00	335.282.490,00	448.105.132,00	1.384.197.675,00	2.599.086.586,00												
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan	1 jenis	1.870.000,00	1 jenis	3.000.000,00	1	1.250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	1.250.000,00	1	3.000.000,00	4.870.000,00			Disporapar			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	120 rekening	76.355.380,00	120 rekening	93.540.000,00	30	17.928.631,00	30	23.792.307,00	30	22.802.961,00	30	21.440.603,00	30	85.964.502,00	162.319.882,00			Disporapar			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	34 orang THL   3	1.136.663.531,00	39 orang THL   3	1.303.432.200,00	42	396.439.583,00	42	361.149.532,00	42	312.229.529,00	42	425.414.529,00	42	1.295.233.173,00	2.431.896.704,00			Disporapar			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah		97.593.350,00	100,00%	173.788.950,00	17.095.500,00	31.835.000,00	24.416.500,00	93.388.075,00	166.735.075,00	264.328.425,00											
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	7 unit	67.573.650,00	7 unit	88.288.450,00	2	16.920.500,00	4	22.555.750,00	4	21.091.500,00	4	23.957.500,00	4	84.525.250,00	152.098.900,00			Disporapar			
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	32 unit	30.019.700,00	unit	44.914.500,00	4 unit	175.000,00		9.279.250,00	3.325.000,00	29.229.000,00	4 unit	42.008.250,00		72.027.950,00				Disporapar			
			Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan				40.586.000,00		0,00		0,00		-	40.201.575,00	40.201.575,00	40.201.575,00					Disporapar				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								I		II		III		IV				13	14=7+13		15=14/6 x 100%		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K		Rp.	K	Rp.
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing	Persentase peningkatan organisasi kepemudaan (OKP) yang dibina	80%	3.024.539.050	714.099.100,00	914.903.750,00	10,00%	9.000.000,00	20,00%	100.504.000,00	20%	515.951.320,00	25%	131.986.156,00	75,00%	757.441.476,00					
			Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda pelopor yang dibina			462.773.550,00	763.847.750,00		9.000.000,00		22.206.500,00		493.905.070,00		120.930.156,00		646.041.726,00		1.108.815.276,00			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda	Jumlah bidang pelatihan kepemimpinan yang dilaksanakan				1 bidang	51.879.800,00		0,00	1	525.000,00		3.000.000,00		33.787.376,00	1	37.312.376,00		37.312.376,00	Disorapar	
			Peningkatan Kepemimpinan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah bidang pelatihan kepemimpinan yang dilaksanakan			462.773.550,00	10.584.050,00	0	0,00	1	414.250,00		4.900.000,00		-	1	5.314.250,00		468.087.800,00		Disorapar	
			Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1. Jumlah siswa hasil seleksi untuk pelatihan Paskibraka 2. Jumlah pemuda pelopor yang dibina 3. Jumlah wirausaha muda dilakuk untuk	65 orang		701.383.900,00		9.000.000,00	65		21.267.250,00	65	486.005.070,00		87.142.780,00	65	603.415.100,00		603.415.100,00		Disorapar	
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan			251.325.550,00	151.056.000,00		0,00		78.297.500,00		22.046.250,00		11.056.000,00		111.399.750,00		362.725.300,00			
			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah OKP yang dibina			1 organisasi	251.325.550,00	10 OKP	151.056.000,00	1 organisasi	1 organisasi	78.297.500,00	1	22.046.250,00		11.056.000,00	1	111.399.750,00		362.725.300,00	Disorapar	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peringkat Kota Padang Panjang pada Porprov Sumbar	5	106.016.057.212	25.403.083.170,00	Peringkat 5 besar	34.185.391.574,00	0,00%	525.796.660,00	0,00%	243.734.919,00	0%	243.223.890,00	0%	10.862.321.422,00	0,00	11.875.076.891,00		37.278.160.061,00		
				Jumlah atlet Padang Panjang yang lolos pada tingkat Nasional	7			5 Nasional								100%		14 Provinsi/ 1 Nasional					
				Persentase Pembangunan Sport center	100%			65,00%								27,00%		27,00%					
				Persentase pemeliharaan Sarpras Olahraga	100%			100,00%								100%		100,00%					
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan dan Menjadi Keunggulan Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sport centre			2.972.258.142,00	32.454.139.174,00	5,00%	24.196.660,00	10,00%	62.274.702,00		74.679.890,00		10.165.211.950,00		10.326.363.202,00		13.298.621.344,00		Disorapar	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase pembangunan sport centre			2.972.258.142,00	32.454.139.174,00	0,65	24.196.660,00		62.274.702,00		74.679.890,00		10.165.211.950,00		10.326.363.202,00		13.298.621.344,00		Disorapar	
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompetensi olahraga yang diselenggarakan			90.252.975,00	245.770.000,00		0,00		62.007.992,00		32.558.500,00		70.906.250,00		165.472.742,00		255.725.717,00			
			Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1. Jumlah cabang olahraga yang diselenggarakan dalam pekan olahraga Kota 2. Jumlah jenis olahraga Kota 3. Jumlah jenis olahraga Kota			90.252.975,00	245.770.000,00	1.5 cabang   2. 2 jenis	245.770.000,00		62.007.992,00		32.558.500,00	1.2 cabang   2. 2 jenis	70.906.250,00	1.2 cabang   2. 2 jenis	165.472.742,00		255.725.717,00		Disorapar	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah cabang yang dibina			21.684.591.875,00	30 cabang olahraga	520.000.000,00	75,00%	500.000.000,00	0,00%	0,00		20.000.000,00		-27.147.221,00		492.852.779,00		22.177.444.654,00		
			Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina			905.378.925,00	1 lembaga	520.000.000,00	1 lembaga	500.000.000,00		0,00	1 lembaga	20.000.000,00	1 lembaga	27.147.221,00	1 lembaga	492.852.779,00		1.398.231.704,00	Disorapar	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah jenis event olahraga rekreasi dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi			32.397.100,00	3 kegiatan	220.482.400,00	1 kegiatan	1.600.000,00	2 kegiatan	63.194.500,00		62.054.000,00		19.880.700,00	3 kegiatan	146.729.200,00		179.126.300,00	Disorapar	
			Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang disediakan/dikembangkan	3 objek		623.583.078,00	1	745.000.000,00		0,00	56.257.725,00		53.931.500,00		633.469.743,00		743.658.968,00		1.367.242.046,00		Disorapar	
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase lembaga pramuka yang aktif			100,00%	200.000.000,00	0,00%	0,00	100,00%	200.000.000,00	0%	0,00	0%	-1.111.873,00	100,00%	198.888.127,00		198.888.127,00			
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah kelembagaan pramuka yang dibina			200.000.000,00	1 lembaga	200.000.000,00		0,00	200.000.000,00		0,00		-1.111.873,00		198.888.127,00		198.888.127,00			
			Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kelembagaan pramuka yang dibina			200.000.000,00	1 kegiatan	200.000.000,00		0,00	1 kegiatan	200.000.000,00		-	1 kegiatan	1.111.873,00	1 kegiatan	198.888.127,00		198.888.127,00	Disorapar	
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPARISWISATAAN</b>						<b>1.963.831.150,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>18,75%</b>	<b>310.679.475,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>239.295.200,00</b>	<b>51,25%</b>	<b>1.084.016.543,00</b>	<b>48,75%</b>	<b>1.633.991.218,00</b>				
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rasio Lama kunjungan wisata	1,2	5.749.689.258,00	0,00%	5.478.372.381,96	1,50	1.093.082.100,00	0,00%	0,00	35,00%	255.575.425,00	25%	163.035.200,00	40%	578.356.550,00	1,50	996.967.175,00		5.733.947.806,96	99,73%
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan kawasan strategis pariwisata			130.100.100,00	0,00%	0,00		0,00	29.997.175,00		7.927.950,00		81.680.300,00		119.605.425,00		119.605.425,00			
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku wisata yang dibina	8 kelompok		130.100.100,00	0	0,00	0,00	8 kelompok	29.997.175,00	8 kelompok	7.927.950,00	8 kelompok	81.680.300,00	8 kelompok	119.605.425,00		119.605.425,00		Disorapar	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV						13	14=7+13	15=14/6 x 100%	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								K
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1. Jumlah jenis destinasi wisata yang dikelola (fisik) 2. Jumlah jenis destinasi wisata yang dikelola (non fisik)		2.747.515.128,48	4 objek wisata 962.982.000,00	0,00%	0,00	25,00%	225.578.250,00	155.107.250,00	496.676.250,00	877.361.750,00	3.624.876.878,48								
			Pengadaan / Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang diadakan/dipelihara dan direhab		1.556.370.009,48	4 objek wisata 244.547.700,00			0,00	2 objek	43.955.500,00	2 objek	165.855.650,00	2 objek	209.811.150,00	1.766.181.159,48	Disorapar					
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola destinasi pariwisata yang dibina		154.770.559,00	8 pokdarwis 718.434.300,00			225.578.250,00	111.151.750,00	8 pokdarwis 1240	330.820.600,00	8 pokdarwis 1240	667.550.600,00	822.321.159,00	Disorapar						
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase penambahan PAD pariwisata	25%	494.348.500,00	133,33%	127.771.250,00	2,00%	194.138.500,00	0,00%	0,00	10,00%	13.000.000,00	15%	20.050.000,00	75%	10.497.500,00	2,00%	43.547.500,00	140.771.250,00	28,48%	
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata		127.771.250,00	194.138.500,00		0,00		13.000.000,00	20.050.000,00	10.497.500,00	43.547.500,00	171.318.750,00								
			Fasilitas kegiatan pemasaran Pariwisata Baik dalam dan luar negeri Pariwisata kabupaten/kota	Jumlah even promosi pariwisata yang dilaksanakan			2 even 90.908.500,00			0,00		550.000,00	2.997.500,00	3.547.500,00	3.547.500,00	Disorapar							
			Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri	Jumlah dokumen profil kepariwisataan			1 dokumen 18.230.000,00			0,00		-	0	0,00	0,00	Disorapar							
			Peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah kerjasama		4 even	127.771.250,00	5 even	85.000.000,00	1 even	13.000.000,00	19.500.000,00	7.500.000,00	1 even	40.000.000,00	167.771.250,00	Disorapar						
			Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Jumlah produk ekraf yang memiliki HAKI			2 produk 57.258.250,00	0,00%	0,00	15,00%	8.895.000,00	65%	35.800.000,00	20%	3.406.608,00	100,00%	48.101.608,00	48.101.608,00					
			Pengembangan Ekosistem ekonomi kreatif	Jumlah produk ekraf yang memiliki HAKI			40 produk 57.258.250,00		0,00	40 produk	8.895.000,00	40 produk	35.800.000,00	40 produk	3.406.608,00	40 produk	48.101.608,00	48.101.608,00	Disorapar				
			Perindungan Hasil Kreativitas	Jumlah produk ekraf yang memiliki HAKI			40 produk 57.258.250,00		0,00	15,00%	33.209.050,00	15%	20.410.000,00	70%	491.755.885,00	14 sub sektor	545.374.935,00	1.139.235.170,00	77,97%				
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina (17 sub sektor)	14 sub sektor	1.461.113.300,00	66,67%	1.106.026.120,00	14 sub sektor	619.352.300,00	0,00%	0,00	15,00%	33.209.050,00	15%	20.410.000,00	70%	491.755.885,00	14 sub sektor	545.374.935,00	1.139.235.170,00	77,97%	
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah pembinaan terhadap pelaku ekraf		553.013.060,00	569.352.600,00	0,00%	0,00	20,00%	33.209.050,00	20.410.000,00	462.669.110,00	516.288.160,00	1.069.301.220,00								
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan	Jumlah kemitraan		153.075.100,00	1 komunitas	50.000.000,00	0,00	1 komunitas	20.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	1 komunitas	50.000.000,00	203.075.100,00	Disorapar						
			Fasilitasi Proses Kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang mendapatkan pengembangan kompetensi SDM			2 even/festival	519.352.600,00	0,00	1 festival	13.209.050,00	10.410.000,00	1 festival	442.669.110,00	1 festival	466.288.160,00	466.288.160,00	Disorapar					
			Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Jumlah pelatihan dan pengembangan terhadap SDM para pelaku ekonomi kreatif			4 pelatihan	49.999.700,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	29.086.775,00	29.086.775,00	29.086.775,00	29.086.775,00	Disorapar					
14.			DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		70.545.739.304,24	95,12%	15.202.550.287,30	18.352.791.018,00	8,61%	2.525.472.227,00	21,56%	4.376.545.124,00	22,33%	3.722.197.909,00	35,04%	5.702.238.737,00	87,54%	16.326.453.997,00	62,98%	22.104.567.638,30	31,33%		
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					9.752.875.215,00	10,83%	1.467.650.937,00	24,17%	2.486.640.065,00	20,00%	2.375.663.888,00	54,74%	2.924.242.301,00	109,74%	9.254.197.191,00					
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase aparatur internal opd yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran		94,92%	7.900.503.268,00	8.136.717.875,00	25,00%	1.340.684.633,00	25,00%	2.139.637.149,00	25%	2.115.119.428,00	100%	2.238.817.933,00	100,00%	7.834.259.143,00	11.380.825.050,00				
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			370.000,00	405.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	766.000,00									
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	370.000,00	405.000,00	396.000,00	0,00	-	-	-	396.000,00	766.000,00	Dinas Perdagkop UMKM								
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah			6.326.021.764,00	6.779.320.900,00	1.211.163.847,00	1.840.174.353,00	1.825.159.496,00	1.780.815.622,00	6.657.313.318,00	12.983.335.082,00										
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.325.344.464,00	6.778.174.000,00	1.211.063.847,00	1.840.174.353,00	1.825.159.496,00	1.780.418.122,00	6.656.815.818,00	12.982.160.282,00	Dinas Perdagkop UMKM									
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			105.000,00	373.800,00	100.000,00	0,00	-	-	100.000,00	205.000,00	Dinas Perdagkop UMKM									
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD			335.500,00	482.250,00	0,00	0,00	-	202.500,00	202.500,00	538.000,00	Dinas Perdagkop UMKM									
			Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi			236.800,00	290.850,00	0,00	0,00	-	195.000,00	195.000,00	431.800,00	Dinas Perdagkop UMKM									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								I		II		III		IV						13	14=1+2+3+4	15=14/6 x 100%
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			243.978.391,00	417.244.900,00	28.880.061,00	70.885.751,00	82.458.080,00	194.313.510,00	376.537.402,00	620.515.793,00									
			Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan gedung kantor		25.982.450,00	22.928.250,00	0,00	5.701.000,00	6.324.000,00	8.718.000,00	20.743.000,00	46.725.450,00		Dinas Perdagkop UMMK								
			Penyediaan bahan logistik kantor		91.507.000,00	129.596.700,00	16.147.000,00	1.400.000,00	28.388.500,00	67.277.500,00	113.213.000,00	204.720.000,00		Dinas Perdagkop UMMK								
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		22.205.250,00	36.804.950,00	2.736.600,00	300.000,00	6.008.400,00	9.472.000,00	18.517.000,00	40.722.250,00		Dinas Perdagkop UMMK								
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		104.283.691,00	227.915.000,00	9.996.461,00	63.484.751,00	41.737.180,00	108.846.010,00	224.064.402,00	328.348.093,00		Dinas Perdagkop UMMK								
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah enunjang Urusan Pemerintahan Daerah		29.230.000,00	42.400.000,00	0,00	15.631.000,00	0,00	22.600.000,00	38.231.000,00	67.461.000,00										
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		29.230.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	-	14.600.000,00	14.600.000,00	43.830.000,00		Dinas Perdagkop UMMK								
			Pengadaan mebel			26.800.000,00		10	15.631.000,00	-	8.000.000,00	23.631.000,00	23.631.000,00	Dinas Perdagkop UMMK								
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		1.045.605.768,00	599.989.825,00	96.646.025,00	159.744.595,00	135.950.602,00	172.649.401,00	564.990.623,00	1.610.596.391,00										
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4.701.000,00	6.000.000,00	500.000,00	750.000,00	500.000,00	1.100.000,00	2.850.000,00	7.551.000,00		Dinas Perdagkop UMMK								
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik		123.738.928,00	86.730.625,00	19.362.825,00	16.891.795,00	19.444.402,00	19.655.801,00	75.354.823,00	199.093.751,00		Dinas Perdagkop UMMK								
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		917.165.840,00	507.259.200,00	76.783.200,00	142.102.800,00	116.006.200,00	151.893.600,00	486.785.800,00	1.403.951.640,00		Dinas Perdagkop UMMK								
			Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		255.297.345,00	297.357.250,00	3.598.700,00	53.201.450,00	71.551.250,00	68.439.400,00	196.790.800,00	452.088.145,00										
			Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		165.314.345,00	42.141.000,00	3.598.700,00	7.534.000,00	4.189.500,00	14.763.750,00	30.085.950,00	195.400.295,00		Dinas Perdagkop UMMK								
			Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional			119.244.750,00		18.554.350,00	16.511.250,00	22.497.050,00	57.562.650,00	57.562.650,00		Dinas Perdagkop UMMK								
			Pemeliharaan mebel			15.000.000,00			12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00		Dinas Perdagkop UMMK								
			Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya		89.983.000,00	60.971.500,00	0,00	8.686.250,00	8.562.500,00	20.424.500,00	37.673.250,00	127.656.250,00		Dinas Perdagkop UMMK								
			Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya			60.000.000,00		18.426.850,00	30.288.000,00	10.754.100,00	59.468.950,00	59.468.950,00		Dinas Perdagkop UMMK								
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang di lakukan pengawasan	100,00%	72.037.500,00	72.769.600,00	10,00%	17.475.527,00	25,00%	19.848.400,00	35%	8.373.600,00	22%	18.474.200,00	22,00%	64.171.727,00	109.361.427,00				
			Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase penurunan koperasi yang bermasalah		72.037.500,00	72.769.600,00	10,00%	17.475.527,00	25,00%	19.848.400,00	8.373.600,00	18.474.200,00	64.171.727,00	136.209.227,00							
			Pengawasan Kelautan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Koperasi yang diberi reward dan jumlah koperasi yang dibina	6	72.037.500,00	72.769.600,00	17.475.527,00	19.848.400,00	8.373.600,00	18.474.200,00	64.171.727,00	136.209.227,00		Dinas Perdagkop UMMK							
			Program Pendidikan dan Latihan Koperasi	Persentase pengurus dan Pengawas yang mengikuti pelatihan pembiayaan syariah	50%	420.304.000,00	265.242.712,00	44,00%	428.787.500,00	5,00%	15.488.043,00	15,00%	109.636.405,00	10%	132.340.200,00	44%	118.746.345,00	44,00%	376.210.993,00	390.367.160,00	92,88%	
			Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkeroperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah pengurus dan pengawas koperasi yang melaksanakan pembiayaan syariah		265.242.712,00	199.404.000,00	5,00%	3.159.000,00	25,00%	44.912.800,00	63.780.000,00	63.265.750,00	175.117.550,00	440.360.262,00							
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan perkeroperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Bimtek/Sosialisasi yang dilaksanakan	4 kali	265.242.712,00	199.404.000,00	3.159.000,00	1	44.912.800,00	63.780.000,00	63.265.750,00	175.117.550,00	440.360.262,00		Dinas Perdagkop UMMK						
			Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM usaha mikro dalam 1 (satu) daerah			90.194.600,00	229.383.500,00	5,00%	12.329.043,00	28,00%	64.723.605,00	68.560.200,00	55.480.595,00	201.093.443,00	291.288.043,00							
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha Mikro		2	90.194.600,00	229.383.500,00	12.329.043,00	64.723.605,00	68.560.200,00	55.480.595,00	201.093.443,00	291.288.043,00		Dinas Perdagkop UMMK							



No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
								I		II		III		IV						13	14=7+13	15=14/6 x 100%				
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
								9	10	11	12															
	Meningkatnya koperasi aktif berpola Syariah		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi berpola syariah	76%	187.878.000,00	95,00%	44.241.250,00	72,00%	176.789.000,00	10,00%	11.746.900,00	50,00%	104.704.200,00	10%	4.364.275,00	75%	51.914.250,00	75,00%	172.729.625,00		160.692.350,00	85,33%			
			Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil RAT koperasi yang setuju untuk berpola syariah				44.241.250,00		176.789.000,00	10,00%	11.746.900,00	50,00%	104.704.200,00		4.364.275,00		51.914.250,00		172.729.625,00		216.970.875,00				
			Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi	Jumlah pendampingan koperasi syariah	15 koperasi			44.241.250,00	15	176.789.000,00		11.746.900,00	15	104.704.200,00	20	4.364.275,00		51.914.250,00	20	172.729.625,00		216.970.875,00			Dinas Perdagkop UMKM	
	meningkatnya Skala UMK		Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase peningkatan omset usaha mikro menjadi usaha kecil	1,48%	2.193.098.000,00	1,34%	541.465.760,00		597.248.240,00	10,00%	82.255.834,00	25,00%	112.813.911,00	35%	115.466.385,00	51,42%	206.512.573,00	51,42%	517.048.703,00		736.535.505,00		33,58%		
			Kegiatan Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Mekanisme Bina Bermanfaat	Jumlah usaha mikro yang diberikan bantuan				541.465.760,00		597.248.240,00		82.255.834,00	15,00%	112.813.911,00		115.466.385,00		206.512.573,00		517.048.703,00		1.058.514.463,00				
			Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang di bantu permodalan				386.223.470,00		424.165.500,00		44.643.434,00		88.160.019,00		85.153.885,00		141.525.623,00		359.482.961,00		745.706.431,00			Dinas Perdagkop UMKM	
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang diberikan coaching klinik wirausaha, jumlah pendampingan wirausaha dan jumlah umkm yang difasilitasi	40 UMK			155.242.290,00	40	173.082.740,00		37.612.400,00	15	24.653.892,00		30.312.500,00		64.986.950,00		157.565.742,00		312.808.032,00			Dinas Perdagkop UMKM	
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat disektor UMK		Program Pengembangan UMKM	Persentase kenaikan pendapatan UMKM yang di bantu	40%	895.643.000,00	100,00%	218.575.782,30	35,00%	340.563.000,00	5,00%	0,00	5,00%	0,00	5%	0,00	36%	289.777.000,00	36,00%	289.777.000,00		218.575.782,30		24,40%		
			Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi usaha kecil	Jumlah UMKM yang dibina melalui rumah wirausaha				218.575.782,30		340.563.000,00		0,00		0,00		0,00		289.777.000,00		289.777.000,00		508.352.782,30				
			Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, gerobak dan isi untuk Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang di bantu sarana dan prasarana berupa gerobak dan isi untuk pengembangan usaha mikro, jumlah usaha mikro yang dibantu sarana dan prasarana berupa perbaikan warung dan isi untuk pengembangan usaha mikro, jumlah usaha mikro yang dibantu sarana dan prasarana berupa perbaikan	50 UMK			218.575.782,30	50	340.563.000,00		0,00		0,00		0,00	50	289.777.000,00		289.777.000,00		508.352.782,30			Dinas Perdagkop UMKM	
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>								7.693.897.160,00	10,00%	984.566.890,00	28,00%	1.728.747.238,00	22,00%	1.165.976.396,00	33,00%	2.359.496.622,00	93,00%	6.238.787.146,00					
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usaha di bidang perdagangan				28.125.100,00		30.645.600,00	5,00%	0,00	25,00%	8.987.250,00	45%	6.767.000,00	25%	6.902.600,00	25,00%	22.656.850,00		37.112.350,00				
			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin usaha toko swalayan	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usaha di bidang perdagangan					12.080.600,00	0,00%	0,00	0,00%	976.000,00		5.060.000,00		4.426.350,00		10.462.350,00		10.462.350,00					
			Fasilitasi pemenuhan komitmen perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha	Jumlah rekomendasi izin usaha yang dikeluarkan dan jumlah pengawasan perizinan yang dilaksanakan	4				12.080.600,00				976.000,00	50	5.060.000,00		4.426.350,00	50	10.462.350,00		10.462.350,00					Dinas Perdagkop UMKM
			Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang diawasi perizinan usahanya				28.125.100,00		18.565.000,00	0,00%	0,00	25,00%	8.011.250,00		1.707.000,00		2.476.250,00		12.194.500,00		40.319.600,00				
			Pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2)	Jumlah pengawasan bahan berbahaya	4 kali			28.125.100,00		18.565.000,00		0,00	1	8.011.250,00		1.707.000,00		2.476.250,00		12.194.500,00		40.319.600,00				Dinas Perdagkop UMKM
	Meningkatnya Produktifitas sektor perdaeanan		Program Peningkatan Distribusi Perdagangan	Persentase pasar ber-SNI	85%	18.398.518.601,00	75,00%	5.508.867.117,00	80,00%	6.210.525.650,00	15,00%	904.780.223,00	35,00%	1.564.428.786,00	10%	1.079.905.897,00	80%	1.935.877.000,00	80,00%	5.484.991.906,00		7.978.076.126,00		43,36%		
			Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan dan jumlah unit pasar yang di kelola				5.508.867.117,00		6.210.525.650,00	15,00%	904.780.223,00		1.564.428.786,00		1.079.905.897,00		1.935.877.000,00		5.484.991.906,00		10.993.859.023,00				
			Penyediaan Sarana Distribusi perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana pasar yang diadakan	6 jenis			3.008.441.987,00	4	3.407.227.600,00		459.121.154,00		618.263.258,00	3	544.402.410,00	3	1.203.592.677,00	3	2.825.379.499,00		5.833.821.486,00			Dinas Perdagkop UMKM	
			Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah unit pasar yang di kelola	2 unit			2.500.425.130,00	2	2.803.298.050,00		445.659.069,00		946.165.528,00	1	535.503.487,00	1	732.284.323,00	1	2.659.612.407,00		5.160.037.537,00			Dinas Perdagkop UMKM	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV						13	14=14/6 x 100%		16		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						K	Rp.		K	Rp.
								6		7		8		9							10			11	
			Program Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang nonpoko	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok			30,00%	260.903.000,00	5,00%	0,00	25,00%	3.534.000,00	35%	3.700.000,00	7%	42.370.000,00	7,00%	49.604.000,00							
			Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok			12000,00%	260.903.000,00	5,00%	0,00	20,00%	3.534.000,00		3.700.000,00		42.370.000,00		49.604.000,00							
			Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang jumlah Pengawasan ketersediaan stok kebutuhan pokok dan penting			260.903.000,00					3.534.000,00	180	3.700.000,00		42.370.000,00	180	49.604.000,00			Dinas Perdagkop UMKM				
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah		100,00%	95.435.398,00	288.892.260,00	10,00%	18.686.867,00	25,00%	43.404.453,00	5%	44.893.899,00	50%	130.282.414,00	50,00%	237.267.633,00	157.526.718,00						
			Kegiatan Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera,tera ulang dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah			95.435.398,00	288.892.260,00	7,00%	18.686.867,00	25,00%	43.404.453,00		44.893.899,00		130.282.414,00		237.267.633,00	332.703.031,00						
			Pelaksanaan metrologi legal berupa tera,tera ulang	Jumlah Alat UTTP yang di tera,tera ulang dan sarana dan prasarana yang diadakan	6 kali		95.435.398,00	288.892.260,00		18.686.867,00	4	43.404.453,00	5	44.893.899,00		130.282.414,00	5	237.267.633,00	332.703.031,00			Dinas Perdagkop UMKM			
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase IKM yang dapat meningkatkan akses pemasaran produknya	8%	1.128.247.700	98,37%	246.805.785	3%	902.930.650,00	15,00%	61.099.800,00	30,00%	108.392.749,00	15%	30.709.600,00	3%	244.064.608,00	3,00%	444.266.757,00	332.194.674,00	29,44%			
			Kegiatan Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah Produk IKM yang di promosikan			246.805.785,00	902.930.650,00	15,00%	61.099.800,00	25,00%	108.392.749,00		30.709.600,00		244.064.608,00		444.266.757,00							
			Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dekranasda yang difasilitasi	1 kegiatan		162.702.125,00	785.614.000,00		51.635.000,00	2	54.895.549,00	4	10.418.800,00		219.540.008,00	4	336.489.357,00	499.191.482,00			Dinas Perdagkop UMKM			
			Pemasaran dan Peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	Jumlah IKM yang di fasilitasi desain kemasan	120 IKM		84.103.660,00	117.316.650,00		9.464.800,00	40	53.497.200,00	40	20.290.800,00		24.524.600,00	40	107.777.400,00	191.881.060,00			Dinas Perdagkop UMKM			
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>						906.018.643,00	5,00%	73.254.400,00	12,50%	161.157.821,00	25,00%	180.557.625,00	17,39%	418.499.814,00	59,89%	833.469.660,00						
Pengembangan Wirausahawan			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah peningkatan IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikat dan standarisasi produk industri (Sertifikat halal,MD,GMP,SNI dan merk)	33%	1.109.395.803,00	98,00%	191.056.015,00	25,00%	891.012.643,00	10,00%	73.254.400,00	25,00%	161.157.821,00	35%	179.557.625,00	30%	414.001.689,00	100,00%	827.971.535,00	425.468.236,00	38,35%			
			Kegiatan penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikat dan standarisasi produk industri (Sertifikat halal, MD, GMP, SNI dan merk)			191.056.015,00	891.012.643,00		73.254.400,00		161.157.821,00		179.557.625,00		414.001.689,00		827.971.535,00	1.019.027.550,00						
			Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber daya Industri	Jumlah unit pengelolaan penyamakan kulit yang dikelola	1		191.056.015,00	557.613.193,00		73.254.400,00		144.203.195,00		133.273.750,00		174.386.450,00		525.117.795,00	716.173.810,00			Dinas Perdagkop UMKM			
			Koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Terlaksananya pembinaan IKM baik melalui workshop, pendampingan maupun pembinaan lainnya			333.399.450,00					16.954.626,00	50	46.283.875,00		239.615.239,00	50	302.853.740,00	302.853.740,00			Dinas Perdagkop UMKM			
			Program Pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Peningkatan IKM yang memiliki perizinan perindustrian			0,00	15.006.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15%	1.000.000,00	4,78%	4.498.125,00	4,78%	5.498.125,00	5.498.125,00						
			Penerbitan izin usaha industri (IUI),izin Perluasan Usaha (IPUI), izin Usaha kawasan Industri (IUKI) dan izin perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan kabupaten/kota	Peningkatan IKM yang memiliki perizinan perindustrian			15.006.000,00					0,00		1.000.000,00		4.498.125,00		5.498.125,00	5.498.125,00						
			Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI,IPUI,IUKI	Jumlah pemantauan dan pengawasan perizinan industri			15.006.000,00					0,00		1.000.000,00		4.498.125,00		5.498.125,00	5.498.125,00			Dinas Perdagkop UMKM			
15.			<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>		21.527.189.173,00	97,33%	5.267.752.761,00	6.138.614.750,00	15,63%	1.126.215.396,00	19,00%	1.533.956.930,00	16,25%	1.511.952.430,00	46,63%	1.590.469.142,00	97,50%	5.762.593.898,00	71,75%	7.927.925.087,00	36,83%				
			<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>																						
			<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>						6.138.614.750,00	15,63%	1.126.215.396,00	19,00%	1.533.956.930,00	16,25%	1.511.952.430,00	46,63%	1.590.469.142,00	47,50%	5.762.593.898,00						
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		100,00%	4.989.660.378,00		5.417.630.900,00	25,00%	978.092.946,00	25,00%	1.381.293.390,00	25%	1.375.668.446,00	25%	1.349.780.668,00	100,00%	5.084.835.450,00	41,71%	7.349.046.714,00					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan tambahan penghasilan yang dibayarkan tepat waktu			4.288.063.300,00	4.616.050.000,00		821.570.443,00		1.221.793.165,00		1.200.917.361,00		1.114.213.996,00		4.358.494.965,00	8.646.558.265,00						
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan yang Selesai di Bayarkan	14		4.288.063.300,00	4.616.050.000,00		821.570.443,00	4	1.221.793.165,00	3	1.200.917.361,00	3	1.114.213.996,00	14 bulan	4.358.494.965,00	8.646.558.265,00			Inspektorat			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai			112.406.505,00	107.445.900,00		15.451.500,00		33.962.320,00		1.697.100,00		52.768.182,00		103.879.102,00	216.285.607,00						
			Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur Pemeriksa yang terlatih dan studi Komparatif	38		62.198.000,00	60.229.900,00	0	0,00	31	3.200.000,00	31	1.697.100,00		52.768.182,00	31	57.665.282,00	119.863.282,00			Inspektorat			

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV				13	14=7+13		15=14/6 x 100%			
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K		Rp.	K	Rp.	K
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur Pemeriksa yang tuntas mengikuti Diklat/Bimtek	5	50.208.505,00	3 orang	47.216.000,00	2 orang	15.451.500,00	2	30.762.320,00			4		4 orang	46.213.820,00	96.422.325,00		Inspektorat			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			131.339.427,00	278.612.700,00	48.104.150,00	59.957.594,00	69.835.970,00	87.021.480,00	264.919.194,00	396.258.621,00											
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Jumlah Jenis Komponen Listrik yang tersedia	5	4.072.000,00	5 jenis	4.716.000,00	5 jenis	4.129.000,00	5	554.000,00			5		5 jenis	4.683.000,00	8.755.000,00		Inspektorat			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat kebersihan yang tersedia	20	25.203.100,00	5 jenis	23.463.000,00	5 jenis	8.826.300,00	5	6.701.500,00	5	5.505.000,00	5	470.000,00	5 jenis	21.502.800,00	46.705.900,00		Inspektorat			
				Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	36		10 jenis	10 jenis		10		10		10		10 jenis					Inspektorat			
			Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Persentase Jumlah Barang Cetak dan Jumlah Fotocopy	1	19.578.750,00	0,15	20.230.000,00	0,15	3.876.000,00	0,2	5.924.500,00	20%	3.546.250,00		4.505.750,00	20%	17.852.500,00	37.431.250,00		Inspektorat			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Keikutsertaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Didalam dan Luar Daerah	225	82.485.577,00	15 kali	230.203.700,00	34 kali	31.272.850,00	11	46.777.594,00	22	60.784.720,00	22	82.045.730,00	67 kali	220.880.894,00	303.366.471,00		Inspektorat			
				Jumlah Makan dan Minum Rapat yang Tersedia	225		50 ok	80 ok	70	72	10	289 ok									Inspektorat			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD yang selesai diadakan		111.540.000,00		44.617.700,00		44.198.900,00		0,00		0,00		0,00		44.198.900,00	155.738.900,00					
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli	3	111.540.000,00	1 unit	44.617.700,00	2 unit	44.198.900,00	1	0,00	2	-		-	2 unit	44.198.900,00	155.738.900,00		Inspektorat			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			182.709.646,00		208.544.600,00		30.099.453,00		51.859.561,00		45.570.015,00		59.202.240,00		186.731.269,00	369.440.915,00					
			Penyediaan Jasa surat menyurat	Persentase Jasa Surat Menyurat yang selesai Dilaksanakan	1	1.730.000,00	0,3	1.027.000,00	0,3	0,00	0,5	0,00	20%	750.000,00		0,00	20%	750.000,00	2.480.000,00		Inspektorat			
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening Telepon/Air dan Listrik	9	15.125.544,00	9 rekening	22.604.000,00	9 rekening	4.316.017,00	9	3.956.863,00	9	4.265.345,00	9	4.222.680,00	9 rekening	16.760.905,00	31.886.449,00		Inspektorat			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Honoror yang Mendapatkan upah	1	165.854.102,00	1 orang	184.913.600,00	1 orang	25.783.436,00	1	47.902.698,00	1	40.554.670,00	1	54.979.560,00	1 orang	169.220.364,00	335.074.466,00		Inspektorat			
				Jumlah Tenaga Keamanan yang Tersedia	2		2 orang	2 orang	2	2	2	2	2	2	2	2 orang	0,00							
				Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia	2		2 orang	2 orang	2 orang	2	2	2	2	2	2 orang									
				Jumlah Tenaga Sopir yang tersedia	1		1 orang	1 orang	1 orang	1	1	1	1	1	1 orang									
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah			163.601.500,00		162.360.000,00		18.668.500,00		13.720.750,00		57.648.000,00		36.574.770,00		126.612.020,00	290.213.520,00					
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dioperasikan	14	115.190.500,00	14 unit	112.070.000,00	14 unit	12.707.500,00	14	13.200.750,00	14	24.568.000,00	14	31.915.270,00	14 unit	82.391.520,00	197.582.020,00		Inspektorat			
			Pemeliharaan/Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan yang Dipelihara	1	48.411.000,00	4 unit	13.450.000,00	4 unit	5.961.000,00	4	520.000,00	4	1.295.000,00	4	3.110.000,00	4 unit	10.886.000,00	59.297.000,00		Inspektorat			
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan	Jumlah Gedung Kantor yang selesai Direhab	1		1 unit	36.840.000,00	1 unit	0,00	1	0,00	1	31.785.000,00	1	1.549.500,00	1 unit	33.334.500,00	33.334.500,00		Inspektorat			
	Meningkatnya Kinerja perangkat Daerah		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Maturitas SPIP	Level 3	1.363.287.850	100,00%	407.079.900,00	Level 2	423.950.150,00	17,50%	78.037.500,00	21,00%	110.160.800,00	25%	83.688.550,00	36,50%	124.231.400,00	Level 2	396.118.250,00	76,67%	214.247.250,00		
				Kapabilitas APIP	Level 3				Level 3							100%		Level 3						
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Pengawasan Internal yang tuntas dilaksanakan		370.315.950,00		371.530.150,00	25,00%	69.362.500,00	25,00%	96.240.800,00		74.143.550,00		108.228.800,00		347.975.650,00	153,33%	718.291.600,00				
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Audit Kinerja yang Tuntas Dilaksanakan	6	15.785.000,00	1	35.775.000,00	2	6.515.000,00	1	6.770.000,00	1	948.150,00	1	21.490.000,00	3	35.723.150,00	2	51.508.150,00		Inspektorat		
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Audit, Reviu, Evaluasi, Monitoring dan Pengawasan Keuangan Lainnya yang Tuntas	165	298.019.400,00	10	216.940.000,00	35	48.875.000,00	32	50.605.000,00	37	60.625.000,00	27	56.630.000,00	104	216.735.000,00	3,5	514.754.400,00		Inspektorat		
			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu yang Tuntas dilaksanakan	1	5.225.000,00	1	8.900.000,00	1	0,00	1	8.900.000,00		-	1	-	1	8.900.000,00	1	14.125.000,00		Inspektorat		
			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu yang Tuntas dilaksanakan	1	13.201.850,00	1	28.663.150,00	1	11.250.000,00	1	17.249.050,00		-	1	-	1	28.499.050,00	1	41.700.900,00		Inspektorat		
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	Jumlah Tindak Lanjut yang Tuntas Dilaksanakan	0,66	38.084.700,00	6	81.252.000,00	1 kali	2.722.500,00	2	12.716.750,00		12.570.400,00	3	30.108.800,00	3 kali	58.118.450,00	0,16667	96.203.150,00		Inspektorat		
			Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			36.763.950,00		52.420.000,00	10,00%	8.675.000,00	17,00%	13.920.000,00		9.545.000,00		16.002.600,00		48.142.600,00	84.906.550,00					
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/daerah	Jumlah TGR yang Tuntas ditindaklanjuti		1.145.000,00	6	1.465.000,00	0	0,00	0	0,00	2	1.145.000,00	2	1.145.000,00	2	1.145.000,00	11.408.950,00		Inspektorat			
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Kasus Pengaduan dan Pemeriksaan Khusus yang Telah Selesai Ditindaklanjuti	1	26.500.000,00	1	50.955.000,00	1	8.675.000,00	1	13.920.000,00	100%	8.400.000,00	100%	16.002.600,00	1	46.997.600,00	73.497.600,00		Inspektorat			
	Meningkatnya penerapan Zona Integritas dan Pengendalian Gratifikasi		Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Capaian MCP (Monitoring Center For Prevention)	89,50%	955.329.800	92,00%	252.043.433,00	20,00%	70.084.950,00	30,00%	42.502.740,00	15%	52.595.434,00	25%	116.457.074,00	90,00%	281.640.198,00	55,45%	364.631.123,00	38,17%			
			Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilaksanakan		251.812.033,00		297.033.700,00	25,00%	70.084.950,00	25,00%	42.502.740,00		52.595.434,00		116.457.074,00		281.640.198,00	533.452.231,00					

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPJ Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPJ Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPJ yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPJ Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
								I		II		III		IV				K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15=14/6 x 100%
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang Selesai Dievaluasi SAKIPnya	24	54.965.800,00	0	42.110.000,00	0	3.498.600,00	24	19.990.000,00		15.856.100,00	24 OPD	2.660.000,00	24 OPD	42.004.700,00		96.970.500,00	Inspektorat						
				Jumlah Wajib Lapoe E-LHKPN dan E-LHKASN yang Telah Melaporkan Harta Kekayaan	1929		400 Wajib Lapoe	400	400		400			400		400											
				Jumlah OPD yang Level Mutu/Integritas Meningkatkan			0,1	0,1	0,1		10			10		10%											
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi	Jumlah Pendampingan PMPRB yang Dilaksanakan		10.787.700,00	1 kali	8.490.000,00	1 kali	0,00	1	8.465.000,00	1	-	1	-	1 kali	8.465.000,00		19.252.700,00	Inspektorat						
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Aksi PPK yang Tuntas 100% Dilaksanakan	1	118.794.258,00	0	202.713.700,00	0	66.586.350,00	0	14.047.740,00	1		1	92.960.974,00	1 aksi	194.518.398,00		313.312.656,00	Inspektorat						
				Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Selesai Ditindaklanjuti	100,00%		1	1	1		1			100%	100%	100%	100%										
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD yang Dijadikan Pilot Project Zona Integritas	4	67.264.275,00	5 OPD	43.720.000,00	5 OPD	0,00	5			15.816.000,00	5 OPD	20.836.100,00	5 OPD	36.652.100,00		103.916.375,00	Inspektorat						
				Jumlah Laporan Gratifikasi yang selesai Ditindaklanjuti	100,00%		1	1	1		1		100%	100%	100%	100%											
				Jumlah Laporan Pungli yang Selesai Ditindaklanjuti	100,00%		1	1	1		1		100%	100%	100%	100%											
16.			<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>		<b>23.663.914.388,00</b>	<b>76,67%</b>	<b>5.783.536.231,00</b>	<b>6.443.037.790,00</b>	<b>7,50%</b>	<b>1.123.770.183,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>1.574.605.465,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>1.404.996.282,00</b>	<b>32,50%</b>	<b>1.925.182.557,00</b>	<b>95,00%</b>	<b>6.028.554.487,00</b>	<b>59,83%</b>	<b>8.481.911.879,00</b>	<b>35,84%</b>						
			<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																								
			<b>PERENCANAAN</b>					<b>6.259.008.340,00</b>	<b>10,00%</b>	<b>1.121.471.933,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>1.563.167.015,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>1.386.112.182,00</b>	<b>35,00%</b>	<b>1.797.361.796,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.868.112.926,00</b>									
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%	4.796.948.223,00	98,40%	5.285.107.440,00	25,00%	964.409.133,00	25,00%	1.357.400.700,00	27%	1.288.496.052,00	21,40%	1.457.164.714,00	98,40%	5.067.470.599,00	64,65%	2.547.286.657,00							
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah		4.141.424.338,00	98,40%	4.271.440.000,00		795.419.488,00		1.180.437.055,00		1.135.663.259,00		1.076.077.948,00		4.187.597.750,00		8.329.022.088,00							
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan		4.141.424.338,00	36 orang	4.271.440.000,00	36 orang	795.419.488,00	36 orang	1.180.437.055,00	36 orang	1.135.663.259,00	36 orang	1.076.077.948,00	36 orang	4.187.597.750,00		8.329.022.088,00	BAPPEDA						
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		332.403.880,00	100,00%	356.186.950,00		43.295.800,00		45.102.210,00		85.975.837,00		135.470.080,00		309.843.927,00		642.247.807,00							
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia		4.528.250,00	7 jenis	4.616.000,00	0	0,00	7 jenis	1.955.000,00		-	6 jenis	2.553.000,00	7 jenis	4.508.000,00		9.036.250,00	BAPPEDA						
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan pelatn kebersihan kantor		107.055.550,00	2 jenis	71.515.700,00	2 jenis	16.310.500,00	2 jenis	4.783.000,00	2 jenis	15.303.000,00	2 jenis	21.810.500,00	2 jenis	58.207.000,00		165.262.550,00	BAPPEDA						
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak fotocopy dan spanduk yang disediakan		43.724.900,00	3 jenis	20.093.250,00	3 jenis	1.683.500,00	3 jenis	1.669.000,00	3 jenis	3.521.000,00	3 jenis	3.628.500,00	3 jenis	10.502.000,00		54.226.900,00	BAPPEDA						
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah; Jumlah makanan dan minuman disajikan		177.095.180,00	300 orang/kali; 1150 porsi	259.962.000,00	63 orang/kali; 335 porsi	25.301.800,00		36.695.210,00	342 orang/kali; 1.356	67.151.837,00	342 orang/kali; 1.356	107.478.080,00	342 orang/kali; 1.356	236.626.927,00		413.722.107,00	BAPPEDA						
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		172.966.300,00	100,00%	129.421.600,00		59.900.000,00		0,00		0,00		62.080.000,00		121.980.000,00		294.946.300,00							
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan		172.966.300,00	5 unit	129.421.600,00	5 unit	59.900.000,00	5 unit	0,00	5 unit	-	5 unit	62.080.000,00	5 unit	121.980.000,00		294.946.300,00	BAPPEDA						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah		212.339.995,00	100,00%	217.158.940,00		36.619.246,00		58.250.775,00		44.526.859,00		63.338.391,00		202.735.271,00		415.075.266,00							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pembelian materi 10.000 yang disediakan		2.012.000,00	450 lbr	3.620.000,00	100 lbr	1.000.000,00	175 lbr	750.000,00	175 lbr	-	275 lbr	1.000.000,00	450 lbr	2.750.000,00		4.762.000,00	BAPPEDA						
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening telpon, rekening air, rekening listrik, faksimili, TV berlangganan dan jasa publikasi yang dibayarkan		37.062.850,00	5 rekening	37.154.140,00	4 rekening	10.149.298,00	4 rekening	8.700.879,00	4 rekening	5.521.937,00	4 rekening	5.333.469,00	4 rekening	29.705.583,00		66.768.433,00	BAPPEDA						
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan		173.265.145,00	8 orang	176.384.800,00	7 orang	25.469.948,00	7 orang	48.799.896,00	7 orang	39.004.922,00	7 orang	57.004.922,00	7 orang	170.279.688,00		343.544.833,00	BAPPEDA						
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah		110.780.010,00	100,00%	310.899.950,00		29.174.599,00		73.610.660,00		22.330.097,00		120.198.295,00		245.313.651,00		356.093.661,00							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara roda 4 (3 unit), roda 2 (23 unit)		110.780.010,00	2 jenis	135.608.000,00	2 jenis	26.797.649,00	3 jenis	18.358.300,00	3 jenis	22.330.097,00	3 jenis	34.726.835,00	3 jenis	102.212.881,00		212.992.891,00	BAPPEDA						
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		52.510.524,00	8 jenis	62.226.550,00	2 jenis	2.376.950,00	5 jenis	5.656.000,00	5 jenis	-	5 jenis	35.214.000,00	8 jenis	43.246.950,00		95.757.474,00	BAPPEDA						
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara			1 unit	113.065.400,00	0	0,00		49.596.360,00		-	1 unit	50.257.460,00	1 unit	99.853.820,00		99.853.820,00	BAPPEDA						

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV						13	14=7*13	15=14/6 x 100%			
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								K	Rp.	K
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	80%	1.979.690.900	70,00%	479.981.560,00	70,00%	742.379.650,00	25,00%	142.739.150,00	25,00%	194.666.565,00	15%	61.465.030,00	10%	234.269.635,00	75,00%	633.140.380,00	41,67%	817.387.275,00			
			Penyusunan Perencanaan dan Pendaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun			314.506.500,00	3 dokumen	551.602.500,00		122.059.730,00		170.220.075,00		32.578.600,00		166.109.180,00		490.967.585,00		805.474.085,00				
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen	Jumlah laporan investigasi pembangunan			74.445.750,00	1 dokumen	89.039.900,00	1 dokumen	76.657.200,00	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	4.844.550,00	1 dokumen	81.501.750,00		155.947.500,00		BAPPEDA		
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah forum lintas PD yang dilaksanakan			37.062.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-	-	0	0,00		37.062.350,00		BAPPEDA		
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan musrenbang yang dilaksanakan			86.125.300,00	1 kegiatan	53.215.000,00	1 kegiatan	14.646.900,00	1 kegiatan	24.475.650,00	1 kegiatan	-	1 kegiatan	8.950.000,00	1 kegiatan	48.072.550,00		134.197.850,00		BAPPEDA		
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah OPD yang dikordinir dalam penyusunan dokumen perencanaan			116.873.100,00	24 OPD	409.347.600,00	24 OPD	30.755.630,00	24 OPD	145.744.425,00	24 OPD	32.578.600,00	24 OPD	152.314.630,00	24 OPD	361.393.285,00		478.266.385,00		BAPPEDA		
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Tingkat ketersediaan data OPD dalam sistem informasi pembangunan daerah			118.337.900,00	75,00%	141.157.200,00		19.885.620,00		23.618.490,00		22.307.805,00		39.468.355,00		105.280.270,00		223.618.170,00				
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah modul aplikasi perencanaan yang dikembangkan			105.807.000,00	3 aplikasi	128.320.200,00	3 aplikasi	19.885.620,00	3 aplikasi	23.618.490,00	3 aplikasi	22.131.405,00	3 aplikasi	33.400.855,00	3 aplikasi	99.036.370,00		204.843.370,00		BAPPEDA		
			Pembiinan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah data dan perencanaan yang dikelola			12.930.900,00	41 data	12.837.000,00	0	0,00	0	0,00		176.400,00	41 aplikasi	6.067.500,00	41 aplikasi	6.243.900,00		18.774.800,00		BAPPEDA		
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah			47.137.160,00	5 Dokumen	49.619.950,00		793.800,00		828.000,00		6.578.625,00		28.692.100,00		36.892.525,00		84.029.685,00				
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD 2018-2023; Jumlah dokumen rencana kerja kegiatan dana DAK fisik; - Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan DAK; - Jumlah laporan hasil evaluasi			47.137.160,00	1 dokumen; 1 dokumen; 4 laporan; 4 laporan	49.619.950,00	0	793.800,00	0	828.000,00	0	6.578.625,00	1 dokumen n; 1 dokumen n; 4 laporan; 4	28.692.100,00	1 dokumen n; 1 dokumen n; 4 laporan; 4	36.892.525,00		84.029.685,00		84.029.685,00		BAPPEDA
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembaneunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan vane baik	83%	671.321.200,00	75,00%	88.267.800,00	67% (16 OPD)	231.521.250,00	12,00%	14.323.650,00	20,00%	11.099.750,00	20%	36.151.100,00	8%	105.927.447,00	60,00%	167.501.947,00	25,00%	143.645.000,00	21,40%		
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia			88.267.800,00	83,00%	143.223.800,00		8.887.800,00		7.904.500,00		28.508.850,00		54.725.860,00		100.027.010,00		188.294.810,00				
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah PUG OPD yang dievaluasi			44.417.200,00	24 OPD	44.573.850,00	24 OPD	8.887.800,00	24 OPD	2.650.750,00	24 OPD	3.892.850,00	24 OPD	20.071.010,00	24 OPD	35.502.410,00		79.919.610,00		BAPPEDA		
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen SKPD 2019-2023 dan aporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LPZKD)			43.850.600,00	1 dokumen	98.649.950,00	0	0,00	1 dokumen	5.253.750,00		24.616.000,00	1 dokumen	34.654.850,00	1 dokumen	64.524.600,00		108.375.200,00		BAPPEDA		
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan			19.545.850,00	72,00%	39.993.500,00		0,00		1.173.250,00		3.386.250,00		24.799.271,00		29.358.771,00		48.904.621,00				
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah aplikasi yang dikembangkan/update; Jumlah pelatihan yang dilaksanakan; Jumlah Pemegang Serambi Geoportal; dan Jumlah monitoring pembinaan			19.545.850,00	1 aplikasi; 3 pemenang; 4 kali ; 2 kali	39.993.500,00	0	0,00	0	1.173.250,00		3.386.250,00	1 aplikasi; 3 pemena ng; 4 kali ; 2 kali	24.799.271,00	1 aplikasi; 3 pemena ng; 4 kali ; 2 kali	29.358.771,00		48.904.621,00		48.904.621,00		BAPPEDA
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase koordinasi perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA			10.407.950,00	73,00%	48.303.950,00		5.435.850,00		2.022.000,00		4.256.000,00		26.402.316,00		38.116.166,00		48.524.116,00				
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Rapat Koordinasi dan Penyelenggaraan Perumahan dan Sanitasi			10.407.950,00	4 kali	48.303.950,00	1 kali	5.435.850,00	2 kali	2.022.000,00	2 kali	4.256.000,00	4 kali	26.402.316,00	4 kali	38.116.166,00		48.524.116,00		BAPPEDA		
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>																									
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase inovasi pelayanan publik yang dihasilkan	70%	579.530.000	40,00%	162.908.024,00	50,00%	184.029.450,00	5,00%	2.298.250,00	25,00%	11.438.450,00	30,00%	18.884.100,00	30,00%	127.820.761,00	90,00%	160.441.561,00	50,00%	176.644.724,00	30,48%		
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen keltbangan daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang disusun			0,00	1 dokumen	59.999.950,00		0,00		2.606.950,00		3.481.500,00		49.559.550,00		2.606.950,00		2.606.950,00				
			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen kajian yang disusun			0,00	1 dokumen	59.999.950,00	0	0,00	1 dokumen	2.606.950,00	0	3.481.500,00	1 dokumen	49.559.550,00	1 dokumen	55.648.000,00		55.648.000,00		BAPPEDA		
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Capaian indeks inovasi daerah			162.908.024,00	Sangat Inovatif (> 100)	124.029.500,00		2.298.250,00		8.831.500,00		15.402.600,00		78.261.211,00		11.129.750,00	100,00%	174.037.774,00				
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah OPD yang difasilitasi dalam penguatan inovasi daerah			162.908.024,00	24 OPD	124.029.500,00	24 OPD	2.298.250,00	24 OPD	8.831.500,00	24 OPD	15.402.600,00	24 OPD	78.261.211,00	24 OPD	104.793.561,00	1	267.701.585,00		BAPPEDA		

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV						13	14=7+13	15=14/6 x 100%			
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							K	Rp.	K	Rp.
								6		7		8		9								10		11	
17.			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		54.195.758.210,67	90,96%	11.842.573.637,02	13.686.646.739,00	17,50%	2.972.539.693,81	22,50%	2.499.235.169,00	27,50%	2.565.739.588,00	27,49%	3.222.311.147,00	94,99%	11.259.825.597,81	65,48%	17.314.348.499,83	31,95%				
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
			KEUANGAN				13.686.646.739,00	17,50%	2.972.539.693,81	22,50%	2.499.235.169,00	27,50%	2.565.739.588,00	27,49%	3.222.311.147,00	67,50%	11.259.825.597,81								
			Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase aparat internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi		7.623.090.297,00	8.441.375.739,00	25,00%	1.378.731.908,00	25,00%	2.049.257.016,00	25%	2.052.530.198,00	25%	2.482.545.838,00	100,00%	7.963.064.960,00								
			Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah			6.249.226.817,00	6.697.486.000,00		1.150.710.201,00		1.745.749.334,00		1.759.595.381,00		1.902.410.392,00		6.558.465.308,00								
			Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		6.249.226.817,00	6.697.486.000,00	50 orang	1.150.710.201,00	50 orang	1.745.749.334,00	50 orang	1.759.595.381,00	50 orang	1.902.410.392,00	50 orang	6.558.465.308,00						BPKD		
			Kegiatan administrasi umum perangkat daerah			323.320.429,00	449.792.750,00		50.193.300,00		81.076.163,00		84.843.835,00		153.006.802,00		369.120.100,00								
			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		106.988.500,00	131.433.500,00	45 paket	13.084.200,00	11 paket	22.443.500,00	39 jenis	20.415.000,00	39 jenis	48.556.500,00	39 jenis	104.499.200,00						BPKD		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan		28.077.500,00	44.623.500,00	2 paket	3.162.500,00	1 paket	3.817.500,00	2 jenis	7.747.500,00	2 jenis	10.507.000,00	2 jenis	25.234.500,00						BPKD		
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		9.525.000,00	9.014.300,00	7 paket	0,00	2 paket	2.489.000,00	7 jenis	1.753.000,00	7 jenis	2.720.000,00	7 jenis	6.962.000,00						BPKD		
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi		178.729.429,00	264.721.450,00	229 laporan	33.946.600,00	57 laporan	52.326.163,00	275 orang	54.928.335,00	275 orang	91.223.302,00	275 orang	232.424.400,00						BPKD		
				Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan		59 org/kali	550 ok	138 ok	138 ok	57 org/kali	57 org/kali	57 org/kali	57 org/kali	57 org/kali	57 org/kali	57 org/kali							BPKD		
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah			132.646.000,00	57.059.000,00		12.240.000,00		2.180.000,00		0,00		38.220.000,00		52.640.000,00						BPKD		
			Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		132.646.000,00	57.059.000,00	2 unit printer multifungsi, 1 unit printer laser jet, 1 bh kursi kerja	12.240.000,00	-	2.180.000,00		-		38.220.000,00		52.640.000,00						BPKD		
			Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah			623.027.128,00	734.440.000,00		107.342.974,00		169.952.365,00		155.441.077,00		195.644.364,00		628.380.780,00						BPKD		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		4.951.000,00	10.700.000,00	3 laporan	500.000,00	1 laporan	1.189.000,00	3 jenis	811.000,00	3 jenis	800.000,00	3 jenis	3.300.000,00						BPKD		
			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan		133.383.060,00	168.013.600,00	60 laporan	31.770.320,00	15 laporan	32.270.693,00	15 rekening	35.237.411,00	15 rekening	35.651.710,00	15 rekening	134.930.134,00						BPKD		
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		484.693.068,00	555.726.400,00	2 laporan	75.072.654,00	1 laporan	136.492.672,00	18 orang	119.392.666,00	18 orang	159.192.654,00	18 orang	490.150.646,00						BPKD		
			Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah			294.869.923,00	502.597.989,00		58.245.433,00		50.299.154,00		52.649.905,00		193.264.280,00		354.458.772,00						BPKD		
			Penyediaan jasa pemeliharaan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (roda dua)	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (roda dua)		208.337.123,00	402.887.989,00	26 unit roda 4, 26 unit roda 2	44.400.433,00	8 unit roda 4, 13 unit roda 2	43.148.154,00	8 unit roda 4, 13 unit roda 2	44.499.905,00	8 unit roda 4, 13 unit roda 2	182.258.780,00	8 unit roda 4, 13 unit roda 2	314.307.272,00						BPKD		
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		28.960.000,00	57.070.000,00	66 unit	13.095.000,00	15 unit	5.480.000,00	15 unit	4.010.000,00	15 unit	5.970.000,00	15 unit	28.555.000,00						BPKD		
			Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		57.572.800,00	42.640.000,00	1 unit	750.000,00	-	1.671.000,00		4.140.000,00	1 unit	5.035.500,00	1 unit	11.596.500,00						BPKD		
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyusunan APBD dan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan	tepat waktu	13.039.768.610	1.960.522.691,00		2.976.639.724,00	10,00%	180.579.750,00	20,00%	291.467.239,00	30%	333.548.948,00	40%	401.442.851,00	100,00%	1.207.038.788,00					18,66%	
			Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	Penyusunan APBD/APBDP Kota Padang Panjang yang tepat waktu		851.936.883,00	1.121.729.450,00		158.773.300,00	25,00%	167.449.600,00		182.734.850,00		345.175.856,00		854.133.606,00								
			Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		461.521.912,00	608.661.950,00	6 dokumen	158.773.300,00	2 dokumen	63.849.600,00		13.432.950,00		229.850.856,00	2 dokumen	465.906.706,00						BPKD		
			Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		153.951.021,00	252.643.500,00	4 dokumen	0,00	-	0,00	2 dokumen	51.800.000,00		97.378.050,00	2 dokumen	149.178.050,00						BPKD		
			Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun		119.808.900,00	139.195.050,00	2 dokumen	103.600.000,00	-	0,00		9.557.900,00		6.993.450,00		120.151.350,00						BPKD		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																				
								I				II				III				IV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			14=7x13		
								15=14/6 x 100%		16																		
				Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan Kegiatan Koordinasi dan pengendalian perbendaharaan	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPA5 yang disusun	2 dokumen	116.655.050,00	2 dokumen	121.228.950,00	-	0,00	-	0,00	2 dokumen	107.944.000,00	10.953.500,00	2 dokumen	118.897.500,00	235.552.550,00				BPKD					
				Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK			388.182.968,00		72.806.250,00	0,00%	0,00	17,00%	9.359.689,00		16.860.198,00	13.055.600,00		39.275.487,00	427.458.455,00									
				Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemotongan dan jumlah rekonsiliasi pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan	2 dokumen	13.089.650,00		47.096.250,00	-	0,00	1 dokumen	4.359.689,00		16.860.198,00	8.055.600,00		1 dokumen	29.275.487,00	42.365.137,00				BPKD				
				Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	1 dokumen	375.093.318,00		25.710.000,00	-	-	-	5.000.000,00		-	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	385.093.318,00				BPKD				
				Kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat waktu dan sesuai SAP		138.000.790,00		194.341.650,00	20,00%	21.806.450,00	25,00%	24.407.600,00		31.557.900,00	68.254.795,00		146.026.745,00	284.027.535,00									
				Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	8 dokumen	18.975.532,00	4 laporan	25.501.450,00	1 laporan	1.279.950,00	1 laporan	1.101.500,00	2 dokumen	5.518.100,00	10.936.200,00	2 dokumen	18.835.750,00	37.811.282,00					BPKD				
				Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	1 dokumen	2.802.500,00	1 dokumen	14.909.500,00	-	0,00	-	0,00	1.164.750,00	1 dokumen	5.755.400,00	6.920.150,00	9.722.650,00					BPKD					
				Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah yang	-	88.322.108,00	1 laporan	107.924.000,00	-	20.526.500,00	1 laporan	19.380.050,00	1 laporan	6.429.400,00	38.629.345,00	84.965.295,00	173.287.403,00					BPKD					
				Koordinasi dan penyusunan ramperta tentang pelaksanaan APBD Kota dan Ranper Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab / Kota	Jumlah ramperta tentang pelaksanaan APBD Kab / Kota dan Ranper Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab / Kota	-	27.900.650,00	2 dokumen	46.006.700,00	-	0,00	0	3.926.050,00	2 dokumen	18.445.650,00	12.933.850,00	2 dokumen	35.305.550,00	63.206.200,00					BPKD				
				Kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen perwako tentang sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah	100,00%	582.402.050,00	500,00%	1.587.762.374,00	5,00%	0,00	5,00%	90.250.350,00		102.396.000,00	-25.043.400,00		167.602.950,00	750.005.000,00									
				Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kajian yang disusun	2 dokumen	65.015.550,00	-	30.450.000,00	-	0,00	-	0,00		1 dokumen	29.852.600,00	1 dokumen	29.852.600,00	94.868.150,00					BPKD				
				Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak		517.386.500,00	1 tahun	1.557.312.374,00	-	0,00	-	0,00	90.250.350,00	102.396.000,00	54.896.000,00	137.750.350,00	655.136.850,00					BPKD					
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pelaporan penyajian data barang milik daerah tepat waktu	5.231.109.733	1.297.524.652,02		1.580.039.376,02	12,00%	1.316.129.985,81	20,00%	27.601.000,00	25%	76.396.920,00	43%	43.692.250,00	100,00%	1.463.820.155,81	1.343.730.985,81	25,69%							
				Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.956.720.150,00	12,00%	1.316.129.985,81	20,00%	27.601.000,00						1.343.730.985,81										
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang milik daerah		9.023.850,00	2 laporan	10.693.000,00	-	0,00	1 laporan	1.053.000,00	966.200,00	3.905.200,00	1 laporan	5.924.400,00	14.948.250,00						BPKD				
				Optimalisasi pemanfaatan, pemindahan, pemusnahan dan penebasan barang	Jumlah dokumen hasil optimalisasi pemanfaatan, pemindahan, pemusnahan dan penebasan Barang Milik		50.327.550,00	4 dokumen	86.732.500,00	-	4.125.000,00	2 dokumen	6.002.500,00	44.555.830,00	2 dokumen	8.356.750,00	63.040.080,00	113.367.630,00						BPKD				
				Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah		30.195.700,00	2 laporan	24.984.000,00	1 laporan	5.300.000,00	-	3.984.750,00	1 laporan	367.200,00	1 laporan	2.175.000,00	11.826.950,00	42.022.650,00					BPKD				
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah		20.794.400,00	2 dokumen	23.798.700,00	-	2.207.000,00	-	1.420.250,00	1 dokumen	5.145.000,00	1 dokumen	5.044.000,00	13.816.250,00	34.610.650,00					BPKD				
				Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang disusun		45.059.750,00	2 dokumen	1.582.000,00	-	0,00	-	0,00	8.436.750,00	1 dokumen	20.393.500,00	30.412.250,00	30.412.250,00						BPKD				
				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah		1.187.383.152,02	4 polis	1.388.771.426,00	4 polis	1.302.915.985,81	-	15.140.500,00	16.925.940,00	3.817.800,00	1.338.800.225,81	2.525.983.377,83							BPKD				
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah		961.435.997,00		688.591.900,00	23,00%	97.098.050,00	25,00%	130.909.914,00	30%	103.263.522,00	1,94%	294.630.208,00	1,94%	625.901.694,00	1.189.443.961,00								
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah pencapaian pendapatan daerah dari pajak dan retribusi		961.435.997,00		688.591.900,00	23,00%	97.098.050,00	25,00%	130.909.914,00	30%	103.263.522,00	20,00%	294.630.208,00	625.901.694,00	1.587.337.691,00									
				Penilaian PBB-P2 serta BPHTB	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NIOP nya		179.785.800,00	1400 objek pajak	141.890.800,00	1400 objek	33.931.800,00	-	23.651.900,00	1400 objek	20.226.450,00	1400 objek	62.873.600,00	140.683.750,00	320.469.550,00					BPKD				
				Pendaftaran dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah laporan hasil pendaftaran dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah		144.815.949,00	2 laporan	235.462.650,00	-	21.443.000,00	1 laporan	57.329.714,00	16 Kelurahan	22.372.950,00	16 Kelurahan	105.686.206,00	206.831.870,00	351.647.819,00					BPKD				
				Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah		432.238.358,00	9 dokumen	111.833.000,00	3 dokumen	26.874.250,00	3 dokumen	9.411.750,00	9 jenis pajak	28.987.472,00	9 jenis pajak	28.579.800,00	93.853.272,00	526.091.630,00					BPKD				
				Pengendalian pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah objek pajak yang dioptimalisasi dan OPD yang		204.595.890,00	72 dokumen	199.405.450,00	18 dokumen	14.849.000,00	18 dokumen	40.516.550,00	3 Opd dan 12	31.676.650,00	3 Opd dan 12	97.490.602,00	184.532.802,00	389.128.692,00					BPKD				

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I				II				III								IV			
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.
18			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		53.460.817.583,24	68,63%	11.161.232.243,00	10.951.469.736,00	12,75%	1.595.429.680,00	13,50%	2.305.339.807,00	14,50%	2.763.062.138,00	56,75%	3.571.509.623,00	97,50%	10.235.341.248,00	56,37%	15.062.001.730,00	28,17%						
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																								
			KEPEGAWAIAN																								
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100,00%	9.855.811.261,00	90,00%	8.708.651.786,00	22,00%	913.082.786,00	25,00%	1.865.751.229,00	25,00%	2.595.309.328,00	18%	3.072.921.919,00	90,00%	8.447.065.262,00	32,65%	12.634.645.276,00						
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pembayaran gaji yang terpenuhi			9.126.402.640,00	1400,00%	7.651.291.591,00	30,00%	827.907.971,00	40,00%	1.690.096.545,00		2.471.905.318,00		2.515.504.929,00	700,00%	7.505.414.763,00		16.631.817.403,00						
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan ASN yang dibayarkan gaji dan tambahan penghasilannya		14	9.126.230.640,00	14	7.651.291.591,00	3	827.907.971,00	4	1.690.096.545,00	3	2.471.905.318,00	4	2.515.504.929,00	14	7.505.414.763,00		16.631.645.403,00		BKPSDM				
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan kasidatan			228.605.143,00	90,00%	288.672.550,00	22,00%	25.087.025,00	25,00%	48.267.272,00		25.633.836,00		150.320.155,00	47,00%	249.308.288,00		477.913.431,00						
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah komponen listrik yang disediakan		20	11.018.400,00	20	8.685.500,00	8	0,00	0	0,00			12	7.231.750,00	20	7.231.750,00		18.250.150,00		BKPSDM				
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan		8	101.346.550,00	40	99.615.300,00	10	5.130.000,00	10	18.780.000,00	2	4.637.300,00	2	60.640.800,00	8	89.188.100,00		190.534.650,00		BKPSDM				
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak penggandaan yang disediakan		20	40.294.450,00	20	53.035.500,00	5	6.471.500,00	5	5.850.000,00	5	4.542.500,00	5	17.978.700,00	20	34.842.700,00		75.137.150,00		BKPSDM				
			Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan		520	75.945.743,00	400	127.336.250,00	150	13.485.525,00	100	23.637.272,00	50	16.454.036,00	100	64.468.905,00	400	118.045.738,00		193.991.481,00		BKPSDM				
				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti		98		50		20		10				14		54									
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terpenuhi			228.982.600,00	90,00%	255.598.800,00	0,00%	0,00	50,00%	14.057.010,00		0,00		220.890.000,00	50,00%	234.947.010,00		234.947.010,00						
			Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan				15	255.598.800,00	0	0,00	1	14.057.010,00			7	220.890.000,00	8	234.947.010,00		234.947.010,00		BKPSDM				
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah materai, jumlah tagihan rekening dan jumlah unit gedung yang disediakan			271.820.878,00	90,00%	252.872.895,00	22,00%	40.425.290,00	25,00%	63.062.352,00		59.916.124,00		70.874.810,00	47,00%	234.278.576,00		506.099.454,00						
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan				300	3.000.000,00	0	0,00	75	750.000,00	150	1.500.000,00	75	750.000,00	300	3.000.000,00		3.000.000,00		BKPSDM				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan		36	74.036.160,00	36	85.199.295,00	9	18.505.290,00	9	18.507.552,00	9	20.648.124,00	9	21.718.410,00	36	79.379.376,00		153.415.536,00		BKPSDM				
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan		1	197.784.718,00	1	164.673.600,00	1	21.920.000,00	1	43.804.800,00	1	37.768.000,00	1	48.406.400,00	1	151.899.200,00		349.683.918,00		BKPSDM				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD yang terpenuhi			228.982.600,00	90,00%	260.215.950,00	22,00%	19.662.500,00	25,00%	50.268.050,00		37.854.050,00		115.332.025,00	47,00%	223.116.625,00		452.099.225,00						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Labatan	Jumlah kendaraan dinas yang diperelihara		17	115.177.800,00	17	140.936.950,00	17	19.662.500,00	17	28.329.500,00	17	27.907.050,00	17	43.952.625,00	17	119.851.675,00		235.029.475,00		BKPSDM				
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara		41	10.460.000,00	30	29.280.000,00	0	0,00	8	1.050.000,00	10	1.530.000,00	8	13.504.000,00	26	16.084.000,00		26.544.000,00		BKPSDM				
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara		1	103.344.800,00	1	89.999.000,00	1	0,00	1	20.888.550,00	1	8.417.000,00	0	57.875.400,00	1	87.180.950,00		190.525.750,00		BKPSDM				
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi		98,89%	785.287.825,00	100,00%	1.066.919.050,00	25,00%	123.920.319,00	25,00%	68.144.539,00	25%	98.333.514,00	25%	421.748.599,00	100,00%	712.146.971,00	38,44%	977.352.683,00						
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah usulan ASN Per tahun				72	393.036.250,00	0	10.829.943,00	0	43.918.609,00		33.099.724,00		111.107.764,00	0	198.956.040,00		198.956.040,00						
				Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik				400		100		100					300										
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah kebutuhan ASN per-tahun		81	260.254.743,00	72	368.188.150,00	0	9.367.518,00	0	42.631.284,00	0	29.680.499,00	137	96.059.067,00	137	177.738.368,00		437.993.111,00		BKPSDM				
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pegawai yang tertata dengan baik dan		400	36.702.828,00	400	24.848.100,00	100	1.462.425,00	100	1.287.325,00	100	3.419.225,00	100	15.048.697,00	400	21.217.625,00		57.920.500,00		BKPSDM				
			Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan			410.728.063,00	100,00%	466.882.250,00	25,00%	101.164.358,00	25,00%	13.623.280,00		31.236.378,00		236.822.475,00	50,00%	382.846.491,00		793.574.554,00						
			Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS yang dimutasi (jabatan struktural dan jabatan fungsional)		343.520.301,00		150	379.587.500,00	24	82.525.058,00	6	10.163.380,00	82	21.016.700,00	28	205.224.479,00	140	318.929.617,00		662.449.918,00		BKPSDM				
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase berkas usulan KP yang telah diproses		67.207.762,00		1	87.294.750,00	1	18.639.300,00	1	3.459.900,00	100%	10.219.678,00	1	31.597.996,00	1	63.916.874,00		131.124.636,00		BKPSDM				
				Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian iazah				50		0		0			50		0	0,00									
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik			77.602.191,00	100,00%	207.000.550,00	25,00%	11.926.018,00	25,00%	10.602.650,00		33.997.412,00		73.818.360,00	50,00%	130.344.440,00		207.946.631,00						
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pembinaan terhadap penyusunan SKP PNS			37.796.397,00	80%	54.231.150,00	80%	2.026.250,00	80%	696.000,00	80%	1.493.250,00	0,8	24.117.006,00	80%	28.332.506,00		66.128.903,00		BKPSDM				
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN berprestasi yang memperoleh penghargaan			9.380.400,00	9	95.121.800,00	0	8.562.768,00	0	8.932.900,00	0	24.310.847,00	5	24.388.196,00	5	66.194.711,00		75.575.111,00		BKPSDM				
			Pembinaan Disiplin ASN	Persentase kasus pelanggaran disiplin sedang dan berat yang			30.425.394,00	100%	57.647.600,00	100%	1.337.000,00	100%	973.750,00	100%	8.193.315,00	100%	25.313.158,00	100%	35.817.223,00		66.242.617,00		BKPSDM				







No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
								I		II						III		IV		
								K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16					
			Administrasi tata pemerintahan			0,6667	178.554.716,00													
			Penataan administrasi pemerintahan	Jumlah orang yang mendapatkan gelar kehormatan dan penghargaan daerah -Jumlah peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kota Padang Panjang yang dilaksanakanyang diberi penghargaan		10 orang 1 kegiatan	60.094.000,00	2 dokumen	112.238.000,00			7.193.500,00	87.240.850,00	2 Dokume	94.434.350,00	154.528.350,00			Sekretariat Daerah	
			Pengelolaan administrasi kewilayahan	Jumlah Camat dan Lurah yang dinilai kompetensinya - Jumlah dokumen pembentukan koordinat titik batas antar wilayah yang di susun		0	6.162.700,00	2 dokumen	17.870.000,00		1.072.000,00	3.194.000,00	5.278.000,00	2 Dokume	9.544.000,00	15.706.700,00			Sekretariat Daerah	
			Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Jumlah bidang fasilitasi pencapaian SPM - Jumlah Buku LKPJ - Jumlah dokumen laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPD) yang disusun		6 Bidang 1 buku 1 dokumen	112.298.016,00	3 dokumen	200.925.700,00	55.732.250,00	114.037.420,00	4.929.625,00	3 Dokume	174.699.295,00	286.997.311,00			Sekretariat Daerah		
			Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat			90,12%	22.112.388.279,44		12.670.972.030,00	875.797.282,00	5.667.461.989,05	2.157.057.969,00	3.462.792.008,00		12.163.109.248,05	34.275.497.527,49				
			Fasilitasi pengelolaan Bina Mental Spriritual	Jumlah cabang MTQ yang diselenggarakan - Jumlah kafilah yang mengikuti MTQ - Jumlah kafilah yang mengikuti TC MTQ Propinsi Sumbar - Jumlah kampung Tahfihz Qur'an - Jumlah Kegiatan Subuh Mubarakah Yang dilaksanakan - Jumlah Masjid Yang Dikunjungi tim ramadhan - Jumlah masjid yang menyelenggarakan kegiatan majelis taklim - Jumlah mesjid yang menyelenggarakan kegiatan Remaja		11 cabang -78 orang 150 orang -6 kampung -0 16 Mesjid -34 kelompok 12 Mesjid 3 kegiatan	13.995.717.259,44	7 dokumen	2.376.375.880,00	106.138.642,00	490.484.920,00	319.584.015,00	1.279.335.867,00		2.195.543.444,00	16.191.260.703,44			Sekretariat Daerah	
			Pelaksanaan kebijakan, Evaluasi, dan Capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	- Jumlah Masjid, Mushalla, Lembaga Keagamaan yang diberi hibah - Jumlah masyarakat yang diberi bantuan sosial - Jumlah UKS se Kota Padang		34 penerima	1.896.700.520,00	3 dokumen	783.669.400,00	3.908.640,00	554.329.060,00	57.215.704,00	110.015.996,00		725.469.400,00	2.622.169.920,00			Sekretariat Daerah	
			Pelaksanaan kebijakan, Evaluasi, dan Capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Garin Masjid/ Petugas kebersihan yang difasilitasi honor - Jumlah Guru TPQ/TPSQ yang di beri honor - Jumlah Imam masjid yang difasilitasi honor - Jumlah jemaah haji yang difasilitasi keberangkatan dan penjemputannya - Jumlah Lembaga Didikan Shubuh Yang Dinilai - Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa - Jumlah sekolah, lembaga pendidikan yang diberi hibah - Jumlah TPQ/TPSQ Yang Mengikuti Khatam Bersama - khatib cadangan yang difasilitasi		1 dokumen	6.219.970.500,00		9.510.926.750,00	765.750.000,00	4.622.648.009,05	1.780.258.250,00	2.073.440.145,00		9.242.096.404,05	15.462.066.904,05			Sekretariat Daerah	
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			148,48%	151.803.329,00		630.969.850,00	832.000,00	124.168.190,00	45.172.150,00	317.908.277,00		488.080.617,00	639.883.846,00				
			Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Jumlah Peraturan Daerah Jumlah peraturan kepala daerah yang difasilitasi		- 2 Perda	54.441.460,00	35 dokumen	78.950.250,00	15 dokumen	832.000,00	8.806.450,00	7.251.800,00	30.874.665,00	0 Dokume	47.764.915,00	102.206.375,00			Sekretariat Daerah
			Fasilitasi bantuan hukum	Jumlah Laporan permasalahan hukum Pemerintahan Daerah dan Masyarakat yang difasilitasi, serta perkara dibidang perdata dan TUN yang diselesaikan		2 laporan	73.552.350,00	1 dokumen	498.425.000,00		112.533.240,00	24.838.750,00	274.296.162,00	1 Dokume	411.668.152,00	485.220.502,00			Sekretariat Daerah	
			Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Jumlah buku lembaran Daerah dan Berita Daerah yang diterbitkan - Jumlah Produk Hukum yang diupload dalam Web IDH 200 Buku		1 Dokumen	23.809.419,00	2 dokumen	53.594.600,00		2.828.500,00	13.081.600,00	12.737.450,00	2 Dokume	28.647.550,00	52.456.969,00			Sekretariat Daerah	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								I			II			III			IV							13		14=7*13		15=14/6 x 100%	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
			Program Perekonomian Pembangunan	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan Pembangunan Kota Padang Pariaman		76.639.600,00	90%	892.190.800,00	39.461.400,00	10%	164.961.472,00	25%	117.168.065,00	90%	343.472.448,00	90%	665.063.385,00		741.702.985,00										
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		71,33%	63.225.850,00		193.583.700,00	8.581.000,00		50.252.276,00		18.318.350,00		68.770.315,00		145.921.941,00		209.147.791,00										
			Koordinasi,Sinkronisasi,Monitoring dan Evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah monitoring dan evaluasi kebijakan bidang sarana dan kelembagaan ekonomi daerah yang dilaksanakan	1 kali	49.000.050,00	1 dokumen	109.019.400,00	5.202.000,00		27.755.276,00		11.601.100,00		53.634.415,00		98.192.791,00		147.192.841,00		Sekretariat Daerah								
			Pengendalian dan distribusi perekonomian	Jumlah monitoring pengendalian laju inflasi daerah di Kota Padang	2 kali	14.225.800,00	1 dokumen	61.530.400,00	2.269.000,00		16.948.000,00		5.644.000,00		15.135.900,00		39.996.900,00		54.222.700,00		Sekretariat Daerah								
			Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil				1 dokumen	23.033.900,00	1.110.000,00		5.549.000,00		1.073.250,00				7.732.250,00		7.732.250,00		Sekretariat Daerah								
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		75,00%	249.679.820,00		371.879.400,00	27.767.400,00		94.337.246,00		56.032.750,00		82.638.559,00		260.775.955,00		510.455.775,00										
			Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah OPD yang dimonitoring dan dievaluasi pembangunan - Jumlah rapat koordinasi percepatan pembangunan	12 laporan	249.679.820,00		371.879.400,00	3 Laporan	27.767.400,00	3	94.337.246,00		56.032.750,00		82.638.559,00		260.775.955,00		510.455.775,00		Sekretariat Daerah							
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		70,00%	58.654.000,00		273.384.200,00	2.114.000,00		13.672.200,00		33.601.465,00		181.191.874,00		230.579.539,00		289.233.539,00										
			Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan		15.250.000,00	250	47.029.400,00	35	2.114.000,00	111	4.494.950,00		1.316.000,00		28.334.785,00	250	36.259.735,00		51.509.735,00		Sekretariat Daerah							
			Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Jumlah pengadaan yang dilayani melalui aplikasi LPSE	210 paket	43.404.000,00	90	87.399.250,00	35		111	1.528.000,00		7.109.090,00		77.028.074,00	253	85.665.164,00		129.069.164,00		Sekretariat Daerah							
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				110	138.955.550,00				7.649.250,00		25.176.375,00		75.829.015,00	170	108.654.640,00		108.654.640,00		Sekretariat Daerah							
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		25,00%	13.413.750,00		53.343.500,00	999.000,00		6.699.750,00		9.215.500,00		10.871.700,00		27.785.950,00		41.199.700,00										
			Koordinasi,Sinkronisasi,dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan	Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan umum lingkungan hidup	1 kali	13.413.750,00	1 dokumen	53.343.500,00	999.000,00		6.699.750,00		9.215.500,00		10.871.700,00		27.785.950,00		41.199.700,00		Sekretariat Daerah								
20.			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		162.356.574.071,56	93,75%	30.120.071.279,17	41.912.677.202,00	18,50%	6.098.187.083,00	26,00%	9.099.331.295,00	25,00%	8.898.940.903,00	26,94%	10.989.852.299,00	96,44%	35.086.311.580,00	69,13%	45.317.589.657,17	27,91%								
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																										
			SEKRETARIAT DPRD					41.912.677.202,00	18,50%	6.098.187.083,00	26,00%	9.099.331.295,00	25,00%	8.898.940.903,00	26,94%	10.989.852.299,00	96,44%	35.086.311.580,00											
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabugaten/ Kota	Persentase kualitas tata kelola sekretariat DPRD	84,43%	15.284.632.390,17	88,63%	17.801.008.552,00	25,00%	3.047.437.037,00	25,00%	4.040.519.844,00	25%	3.945.088.644,00	13,88%	5.164.113.162,00	88,88%	16.197.158.687,00	35,71%	22.372.589.271,17									
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100,00%	2.905.857.268,00		2.759.600.000,00	523.287.756,00		761.306.588,00		746.555.001,00		675.058.838,00		2.706.208.183,00		5.612.065.451,00										
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 bln	2.905.857.268,00	14 bln	2.759.600.000,00	3 bln	523.287.756,00	3 bulan	761.306.588,00	4 bulan	746.555.001,00	4 bulan	675.058.838,00	14 bln	2.706.208.183,00		5.612.065.451,00		Sekretariat DPRD							
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum sekretariat DPRD yang terpenuhi		492.313.002,00	88,00%	794.406.577,00	106.179.567,00		150.359.284,00		144.506.563,00		238.170.150,00		639.215.564,00		1.131.528.566,00										
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Jumlah alat/ bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik Jumlah pemeliharaan jaringan listrik	30 jenis 1 tahun	31.573.700,00	30 jenis 1 tahun	25.790.150,00	21 jenis 2 bulan	4.387.000,00	23 jenis 3 bulan	5.057.500,00	24 jenis 3 bulan	9.734.250,00	30 jenis 3 bulan	1.860.000,00	30 jenis 1 tahun	21.038.750,00		52.612.450,00		Sekretariat DPRD							
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat/bahan untuk ATK-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya Jumlah alat/bahan untuk ATK-bahan komputer Jumlah alat/bahan untuk ATK-perabot kantor Jumlah alat/bahan untuk ATK-kertas dan cover	41 jenis 22 jenis 6 jenis 46 jenis 5 jenis	74.024.650,00	41 jenis 22 jenis 6 jenis 46 jenis 5 jenis	142.951.215,00	19 jenis 18 jenis 6 jenis 13 jenis 3 jenis	32.287.000,00	25 jenis 19 jenis 4 jenis 25 jenis 4 jenis	23.764.650,00	23 jenis 17 jenis 5 jenis 28 jenis 5 jenis	16.906.100,00	41 jenis 22 jenis 6 jenis 46 jenis 5 jenis	38.695.000,00	41 jenis 22 jenis 6 jenis 46 jenis 5 jenis	111.652.750,00		185.677.400,00									
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang diadakan Jumlah penggandaan yang diadakan	14 jenis 95.500 lbr	50.269.500,00	14 jenis 85.000 lbr	43.797.500,00	10 jenis 18.000 lbr	8.874.625,00	11 jenis 20.000 lembar	3.847.550,00	13 jenis 32.000 lbr	22.301.600,00	11 jenis 14.700 lbr	4.740.900,00	13 jenis 84.700 lbr	39.764.675,00		90.034.175,00		Sekretariat DPRD							
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan tamu jumlah penyediaan keb bahan makan minum ruang pimpinan	1105 orang 380 orang 37 jenis	80.128.900,00	1000 org 1246 Org 37 jenis	127.461.712,00	230 org 300 org 28 jenis	14.774.850,00	170 orang 250 orang 30 jenis	11.680.000,00	250 org 310 org 35 jenis	26.865.200,00	325 org 329 org 35 jenis	35.687.300,00	975 org 1.189 org 37 jenis	89.007.350,00		169.136.250,00		Sekretariat DPRD							
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan/minum rapat yang disediakan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	1270 Org/keg 920 kali	256.316.252,00	1680 org 1050 kali	454.406.000,00	135 orang 225 kali	45.856.092,00	125 orang 232 kali	106.009.584,00	120 org 220 kali	68.699.413,00	489 org 326 kali	157.186.950,00	1027 orang 1003 kali	377.752.039,00		634.068.291,00		Sekretariat DPRD							

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV						K	Rp.	K	Rp.
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.134.504.900,00	1.116.870.000,00	0,00		101.200.000,00		366.499.260,00		538.767.000,00	1.006.466.260,00	2.140.971.160,00							
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Roda 4)	1 unit	535.200.000,00	35.000.000,00	0,00	1 unit	30.500.000,00		-		0,00	30.500.000,00	565.700.000,00		Sekretariat DPRD					
			Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel kantor yang diadakan	3 jenis	295.480.000,00	756.290.000,00	0,00	1 jenis	70.700.000,00	2 jenis	365.549.260,00		285.390.000,00	721.639.260,00	1.017.119.260,00		Sekretariat DPRD					
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang diadakan	9 Jenis	303.824.900,00	325.580.000,00				1 jenis	950.000,00		253.377.000,00	254.327.000,00	558.151.900,00		Sekretariat DPRD					
			Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase jasa penunjang urusan sekretariat DPRD yang terpenuhi		1.444.236.460,00	88,00%	1.992.947.400,00	72,53%	271.208.900,00		483.121.217,00		419.766.280,00	679.058.021,00	72,53%	1.853.154.418,00	3.297.390.878,00					
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pembelian materiail 10.000 yang disediakan	375 lbs	4.421.000,00	700 lbs	8.750.000,00	200 lbs	2.250.000,00	135 lembar	2.250.000,00	140 lbs	1.000.000,00	125 lbs	2.000.000,00	600 lbs	7.500.000,00	11.921.000,00	Sekretariat DPRD			
				jumlah pembelian tera/ buku cek	15 buku		15 buku	1 buku			2 buku		1 buku		2 buku								
			Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rekening telp, air, fax,langganan TV dan listrik yang dibayarkan	60 tagihan	99.169.598,00	205.935.000,00	15 tagihan	34.152.290,00	15 tagihan	34.230.336,00	15 tagihan	30.539.026,00	15 tagihan	75.792.313,00	15 tagihan	174.713.965,00	273.883.563,00		Sekretariat DPRD			
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jh uran jaminan asuransi kegiatan	1 Tahun	1.340.645.862,00	1 tahun	1.778.262.400,00	1 tahun	234.806.610,00	1 tahun	446.640.881,00	1 tahun	388.227.254,00	1 tahun	601.265.708,00	1 tahun	1.670.940.453,00	3.011.586.315,00	Sekretariat DPRD			
				jh jasa THL yg dipekerjakan di kantor	48 orang		45 orang	54 org			54 orang		54 org		54 org								
				Retribusi sampah yg dibayarkan	1 Tahun		1 tahun	1 tahun			1 tahun		1 tahun		1 tahun								
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpeliharanya BMD sekretariat DPRD		998.215.159,17	88,00%	1.155.645.500,00		90.898.306,00		142.580.100,00		171.529.171,00	394.016.321,00	64,06%	799.023.898,00	1.797.239.057,17					
			Penyediaan jasa pemeliharaan, kendaraan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan (Roda 4)	12 unit	272.850.748,00	14 unit	395.155.500,00	16 unit	61.399.558,00	10 unit	79.968.950,00	7 unit	101.120.180,00	14 unit	106.895.321,00	14 unit	349.384.009,00	622.234.757,00	Sekretariat DPRD			
				jumlah kendaraan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara (Roda 4)	11 unit		12 unit	8 unit			7 unit		8 unit		12 unit		12 unit						
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas dipelihara	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan operasional yang dipelihara	4 unit	260.474.248,00	5 unit	294.300.000,00	4 unit	15.111.348,00	4 unit	18.533.850,00	3 unit	18.168.191,00	5 unit	191.703.000,00	5 unit	243.516.389,00	503.990.637,00	Sekretariat DPRD			
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pelengkapan kantor yg dilakukan pemeliharaan	8 jenis	30.551.450,00	8 jenis	139.590.000,00	4 Jenis	4.455.000,00	5 jenis	17.451.950,00	6 jenis	46.985.800,00	8 jenis	24.181.000,00	8 jenis	93.073.750,00	123.625.200,00	Sekretariat DPRD			
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunannya	Jumlah gedung kantor yg dilakukan pemeliharaan	1 unit	434.338.713,17	1 unit	326.600.000,00	1 unit	9.932.400,00	1 unit	26.625.350,00	1 unit	5.255.000,00	1 unit	71.237.000,00	1 unit	113.049.750,00	547.388.463,17	Sekretariat DPRD			
			Pelaksanaan Protokol dan komunikasi pimpinan	Jumlah sidang paripurna istimewa yang terselenggara pada peringatan Hari Jadi Kota		413.993.235,00	100,00%	490.749.250,00	0,00		0,00		0,00		436.662.080,00	436.662.080,00	850.655.315,00						
			Fasilitas Keprotokolan	Jumlah sidang paripurna istimewa yang terselenggara pada peringatan Hari Jadi Kota	1 kegiatan	413.993.235,00	1 kegiatan	490.749.250,00					1 kegiatan	436.662.080,00	1 kegiatan	436.662.080,00	850.655.315,00		Sekretariat DPRD				
				Jumlah jasa pelayanan pimpinan																			
			Kegiatan layanan keuangan dan kesejahteraan	persentase terfasilitasinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD		7.196.110.505,00	85,00%	8.382.259.000,00	1.907.588.874,00	2.191.325.094,00	1.882.943.604,00	1.930.023.229,00	33,33%	7.911.880.801,00	15.107.991.306,00								
			Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD	Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang dibayarkan uang representatif dan tunjangan lainnya	20 orang	6.980.412.205,00	20 Orang	8.117.112.000,00	20 Orang	1.907.588.874,00	20 orang	1.996.343.604,00	20 orang	1.882.943.604,00	20 orang	1.921.046.529,00	20 orang	7.707.922.611,00	14.688.334.816,00	Sekretariat DPRD			
			Penyediaan pakaian Dinas dan atribut DPRD	Jumlah pakaian Dinas Pimpinan dan anggota DPRD yang terfasilitasi	100 stel	208.392.500,00	100 stel	239.580.000,00			20 stel	194.981.490,00	20 orang	-	20 orang	2.180.000,00	20 orang	197.161.490,00	405.553.990,00	Sekretariat DPRD			
			Pelaksanaan medical check up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan medical Check Up	8 orang	7.305.800,00	20 orang	25.567.000,00			2 orang	-	2 orang	6.796.700,00	2 orang	6.796.700,00	14.102.500,00		Sekretariat DPRD				
			Layanan Administrasi DPRD	persentase layanan administrasi dan rumah tangga DPRD yang		699.401.861,00	75,00%	1.108.530.825,00	148.273.634,00	210.627.561,00	213.288.765,00	272.357.523,00	33,33%	844.547.483,00	1.543.949.344,00								
			Penyelenggaraan administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Berita Acara serah terima anggota DPRD Kota Padang Panjang	1 dokumen	45.811.100,00	1 dokumen	75.400.000,00				-		0,00		0,00	45.811.100,00		Sekretariat DPRD				
			Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat-rapat DPRD yang dilaksanakan	38 kali	105.194.300,00	40 kali	296.435.000,00	4 kali	7.575.750,00	14 kali	25.696.650,00	15 kali	59.451.450,00	17 kali	60.963.000,00	40 kali	153.686.850,00	258.881.150,00	Sekretariat DPRD			
			Penyediaan Kebutuhan Rumah tangga DPRD	Jumlah rumah dinas DPRD yg dipenuhi kebutuhan rumah tangga	1 unit	548.396.461,00	1 unit	736.695.825,00	1 unit	140.697.884,00	1 unit	184.930.911,00	1 unit	153.837.315,00	1 unit	211.394.523,00	1 unit	690.860.633,00	1.239.257.094,00	Sekretariat DPRD			
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi		87,50%	14.835.438.889,00	88,67%	24.111.668.650,00	12,00%	3.050.750.046,00	27,00%	5.058.811.451,00	25%	4.953.852.259,00	40%	5.825.739.137,00	104,00%	18.889.152.893,00	17,71%	22.945.000.386,00		
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase pencapaian Peraturan daerah dan peraturan DPRD		14.226.500,00	80,00%	121.675.000,00	0,00%	0,00	5,00%	796.950,00		1.942.500,00	1.557.500,00	4.296.950,00	18.523.450,00						
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda	Jumlah Propempera yang ditetapkan	1 keputusan	5.827.500,00	5 Ranperda	6.070.000,00				-		0,00		0,00	5.827.500,00		Sekretariat DPRD				
			Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah rancangan perda yang dibahas	1 keputusan	5.109.000,00	5 Ranperda	40.350.000,00			0	796.950,00	0	1.942.500,00	1 keputusan	1.557.500,00	1 keputusan	4.296.950,00	9.405.950,00	Sekretariat DPRD			

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RPKD Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								I		II		III		IV								
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
			Penyelenggaraan kajian perundangundangan	Jumlah hasil kajian permasalahan hukum di DPRD	1 dokumen	70.000,00	0,00					0,00		70.000,00		Sekretariat DPRD						
			fasilitasi Penyusunan penjelasan/keterangan dan/ atau inisiatif yang dihasilkan naskah akademik	Jumlah naskah akademik raperda	1 dokumen		58.755.000,00					0,00		0,00		Sekretariat DPRD						
			Penyusunan tata tertib DPRD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	3.220.000,00	16.500.000,00					0,00		3.220.000,00		Sekretariat DPRD						
			<b>Pembahasan Kebijakan Kegiatan Anggaran</b>	<b>Persentase pembahasan kebijakan anggaran</b>		<b>150.287.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>169.685.350,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>49.710.600,00</b>	<b>109.596.375,00</b>	<b>159.306.975,00</b>	<b>309.594.875,00</b>						
			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS yang ditandatangani	2 dokumen	33.287.600,00	35.408.600,00			1 dokumen	3.960.500,00	30.400.000,00	2 dokumen	34.360.500,00	67.648.100,00	Sekretariat DPRD						
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang ditandatangani	2 dokumen	30.791.250,00	25.814.750,00			1 dokumen	25.009.250,00	0,00	1 dokumen	25.009.250,00	55.800.500,00	Sekretariat DPRD						
			Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen APBD yang ditandatangani	1 dokumen	23.466.800,00	51.241.500,00				1 dokumen	44.383.000,00	1 dokumen	44.383.000,00	67.849.800,00	Sekretariat DPRD						
			Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen APBD Perubahan yang ditandatangani	1 dokumen	29.781.700,00	35.813.500,00				1 dokumen	34.813.375,00	1 dokumen	34.813.375,00	64.595.075,00	Sekretariat DPRD						
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen dokumen Pertanggungjawaban APBD yang ditandatangani	1 dokumen	32.960.550,00	21.407.000,00			1 dokumen	20.740.850,00	0,00	1 dokumen	20.740.850,00	53.701.400,00	Sekretariat DPRD						
			<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah</b>	<b>Jumlah dokumen yang dihasilkan</b>		<b>27.361.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.716.450,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>16.345.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.345.950,00</b>	<b>43.707.250,00</b>						
			Pembahasan LKPJ	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	27.361.300,00	16.716.450,00			1 dokumen	16.345.950,00		1 dokumen	16.345.950,00	43.707.250,00	Sekretariat DPRD						
			<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD</b>		<b>1.942.735.711,00</b>	<b>82,00%</b>	<b>4.555.483.000,00</b>	<b>17,00%</b>	<b>157.377.100,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>1.084.859.100,00</b>	<b>30%</b>	<b>808.194.990,00</b>	<b>1.329.715.060,00</b>	<b>77,00%</b>	<b>3.380.146.250,00</b>	<b>5.322.881.961,00</b>				
			Bimtek DPRD/ Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis yg diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD baik dalam maupun luar daerah	2 kali/orang	1.238.154.061,00	3 kali	3.660.072.500,00	1 kali	75.315.100,00	1 kali	917.803.900,00	2 kali	583.975.590,00	3 kali	1.043.804.060,00	6 kali	2.620.898.650,00	3.859.052.711,00	Sekretariat DPRD		
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah penyebarluasan informasi kegiatan DPRD	80 kali	308.569.650,00	90 kali	390.760.500,00	5 kali	34.326.000,00	20 kali	61.157.200,00	25 kali	97.197.400,00	36 kali	103.447.000,00	86 kali	296.127.600,00	604.697.250,00	Sekretariat DPRD		
			Penyediaan tenaga ahli fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang terfasilitasi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Anggota DPRD	5 orang	165.000.000,00	5 orang	216.000.000,00	5 orang	30.000.000,00	5 orang	54.000.000,00	5 orang	51.000.000,00	5 orang	75.000.000,00	5 orang	210.000.000,00	375.000.000,00	Sekretariat DPRD		
			Penyelenggaraan hubungan masyarakat	Jumlah publikasi dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat	365 buah	231.012.000,00	400 bh	288.650.000,00	25 bh	17.736.000,00	150 buah	51.898.000,00	170 bh	76.022.000,00	142 bh	107.464.000,00	393 buah	253.120.000,00	484.132.000,00	Sekretariat DPRD		
			<b>Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat</b>	<b>persentase aspirasi masyarakat yang terhimpun</b>		<b>3.003.929.674,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>2.631.210.450,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>429.073.450,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>1.360.377.313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.953.350,00</b>	<b>41,66%</b>	<b>2.259.404.113,00</b>	<b>5.263.333.787,00</b>					
			Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yg dilakukan oleh Anggota DPRD	9 kali/orang	2.484.231.574,00	6 kali	1.862.788.000,00	3 kali/ org	266.879.050,00	3 kali/org	1.161.647.663,00		1 kali/org	239.864.100,00	7 kali/ org	1.668.390.813,00	4.152.622.387,00	Sekretariat DPRD			
			Pelaksanaan Reses	Jumlah aspirasi masyarakat dan terlaksananya sosialisasi program kegiatan yang dilaksanakan DPRD	3 kali	519.698.100,00	3 kali	768.422.450,00	1 kali	162.194.400,00	1 kali	198.729.650,00			230.089.250,00	1 kali	591.013.300,00	1.110.711.400,00	Sekretariat DPRD			
			<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>persentase terfasilitasnya tugas pimpinan dan anggota DPRD</b>		<b>9.696.897.804,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>16.616.898.400,00</b>	<b>28,00%</b>	<b>2.464.299.496,00</b>	<b>48,57%</b>	<b>2.596.432.138,00</b>	<b>4.094.004.169,00</b>	<b>3.914.916.852,00</b>	<b>28,00%</b>	<b>13.069.652.655,00</b>	<b>22.766.550.459,00</b>					
			Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah Kunjungan Kerja Luar Daerah yg dilakukan oleh Anggota DPRD	21 kali	7.981.452.254,00	20 kali	13.208.971.750,00	6 kali	1.969.698.468,00	7 kali	1.836.734.538,00	7 kali	3.794.547.647,00	7 kali	3.201.795.875,00	27 kali	10.802.776.528,00	18.784.228.782,00	Sekretariat DPRD		
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah konsultasi dan koordinasi yg dilaksanakan Pimpinan DPRD dalam dan luar daerah	15 kali	1.715.445.550,00	15 kali	3.407.926.650,00	4 kali	494.601.028,00	10 kali	759.697.600,00	9 kali	299.456.522,00	8 kali	713.120.977,00	24 kali	2.266.876.127,00	3.982.321.677,00	Sekretariat DPRD		
21.			<b>KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR</b>			<b>75.837.207.750,20</b>	<b>80,41%</b>	<b>17.492.923.876,00</b>	<b>19,00%</b>	<b>3.339.373.333,00</b>	<b>22,80%</b>	<b>4.724.720.104,00</b>	<b>28,45%</b>	<b>4.743.902.570,00</b>	<b>30,08%</b>	<b>5.596.460.248,00</b>	<b>95,83%</b>	<b>18.304.456.255,00</b>	<b>61,36%</b>	<b>25.457.272.313,00</b>	<b>33,57%</b>	
			<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																			
			<b>KECAMATAN</b>					<b>19.003.336.695,00</b>	<b>14,50%</b>	<b>3.239.373.333,00</b>	<b>22,80%</b>	<b>4.724.720.104,00</b>	<b>28,45%</b>	<b>4.743.902.570,00</b>	<b>30,08%</b>	<b>5.596.460.248,00</b>	<b>95,83%</b>	<b>18.304.456.255,00</b>				
	Meningkatnya kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel di kecamatan dan		<b>PENUNJANG URUSAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</b>		<b>90,00%</b>	<b>11.031.729.441,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>11.955.260.795,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>2.179.173.941,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>3.094.859.390,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>3.039.549.176,00</b>	<b>25%</b>	<b>3.220.955.017,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.534.537.524,00</b>	<b>62,26%</b>	<b>16.305.762.772,00</b>	
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>100,00%</b>	<b>9.124.560.918,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>9.852.691.312,00</b>	<b>19,36%</b>	<b>1.814.475.486,00</b>	<b>2.609.166.376,00</b>	<b>2.645.980.641,00</b>	<b>2.583.016.454,00</b>	<b>19,36%</b>	<b>9.652.638.957,00</b>	<b>18.777.199.875,00</b>					
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	14 bulan	9.124.560.918,00	76	9.852.691.312,00	79 orang	1.814.475.486,00	79	2.609.166.376,00	79	2.645.980.641,00	79	2.583.016.454,00	79 orang	9.652.638.957,00	18.777.199.875,00	Kecamatan PPT		
			<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran</b>		<b>465.912.817,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>511.669.850,00</b>	<b>23,00%</b>	<b>72.413.450,00</b>	<b>115.281.352,00</b>	<b>81.055.766,00</b>	<b>180.653.025,00</b>	<b>23,00%</b>	<b>449.403.593,00</b>	<b>915.316.410,00</b>						
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	10	33.625.900,00	32.621.700,00	10 jenis	5.806.350,00	10	5.429.200,00	10	8.338.200,00	10	12.085.750,00	10 jenis	31.659.500,00	65.285.400,00	Kecamatan PPT			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	40	159.679.700,00	40	175.804.400,00	40 jenis	36.715.000,00	40	33.895.250,00	40	42.199.950,00	40	53.593.950,00	40 jenis	166.404.150,00	326.083.850,00	Kecamatan PPT		
				Jumlah Retribusi sampah yang dibayarkan di kecamatan dan kelurahan			12		3 bulan		3		3		3							

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RPKD Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
								I		II		III		IV						13	14=7*13	15=14/6 x 100%				
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								K	Rp.		
				Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6	46.021.750,00	6	50.862.250,00	3 jenis	7.808.750,00	6	4.365.450,00	6	6.665.250,00	6	19.382.250,00	6 jenis	38.221.700,00		84.243.450,00			Kecamatan PPT		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti	40	226.585.467,00	20	252.381.500,00	13 kali	22.083.350,00	10	71.591.452,00	22	23.852.366,00	22	95.591.075,00	23 kali	213.118.243,00		439.703.710,00			Kecamatan PPT		
					Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	1973		1770		360 kali		443		465		427		803 kali								
				KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG LURUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			100,00%	68.000.000,00	100,00%	67.320.000,00	5,00%	680.000,00		0,00		0,00	100,00%	68.000.000,00		68.000.000,00					
					Pengadaan Peralatan dan Mesin			8	68.000.000,00	8 unit	67.320.000,00	8	680.000,00		-		-	8 unit	68.000.000,00		68.000.000,00				Kecamatan PPT	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah		1.038.019.975,00	100,00%	1.144.355.033,00	90,00%	172.217.405,00		295.698.449,00		257.240.619,00		343.925.498,00	90,00%	1.069.081.971,00		2.107.101.946,00					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan	1	4.837.000,00	1	6.290.000,00	1 jenis	1.641.000,00	1	887.000,00	1	830.000,00	1	1.290.000,00	1 jenis	4.648.000,00		9.485.000,00					Kecamatan PPT
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	31	57.977.278,00	31	84.029.033,00	27 rekening	13.646.253,00	27	14.502.001,00	27	15.161.171,00	27	17.043.938,00	27 rekening	60.353.363,00		118.330.641,00					Kecamatan PPT
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan, Jumlah Tenaga Honorer yang dibayarkan	34	975.205.697,00	38	1.054.036.000,00	35 orang	156.930.152,00	35	280.309.448,00	35	241.249.448,00	35	325.591.560,00	35 orang	1.004.080.608,00		1.979.286.305,00					Kecamatan PPT
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah		403.235.731,00	90,00%	378.544.600,00	43,00%	52.747.600,00		74.033.213,00		55.272.150,00		113.360.040,00	43,00%	295.413.003,00		698.648.734,00					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	12	76.049.876,00	55	200.822.100,00	55 unit	36.361.100,00	55	32.471.650,00	55	42.459.150,00	55	56.653.900,00	55 unit	167.945.800,00		243.995.676,00					Kecamatan PPT
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (untuk 2021 termasuk 7 unit gedung yg dipelihara di 7 kel)	114	169.329.300,00	100	87.952.500,00	15 unit	8.477.500,00	30	9.680.000,00	55	4.618.000,00	8	35.559.000,00	108	58.334.500,00		227.663.800,00					Kecamatan PPT
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara (utk thn 2021 gdg yg dipelihara 2 unit kec + 1)	2	83.069.655,00	9	89.770.000,00	1 unit	7.909.000,00	2	31.881.563,00	2	8.195.000,00	2	21.147.140,00	2	69.132.703,00		152.202.358,00					Kecamatan PPT
				PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan		90,28%	2.508.580.560,00	100,00%	3.780.676.250,00	25,00%	557.573.042,00	30,00%	931.453.514,00	25%	867.345.464,00	20%	1.280.472.975,00	100,00%	3.636.844.995,00	37,28%	3.997.607.116,00	37,28%			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan		840.599.400,00	700,00%	2.167.856.200,00	5 urusan	307.898.300,00		481.197.250,00		483.670.550,00		778.305.443,00	5 urusan	2.051.071.543,00		2.891.670.943,00					Kecamatan PPT
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Forum Komunikasi Kecamatan dan Pokja Sehat		840.599.400,00	9	2.167.856.200,00	1 lembaga	307.898.300,00	2 (Kec+Ng)	481.197.250,00	9	483.670.550,00	9	778.305.443,00	1 lembaga	2.051.071.543,00		2.891.670.943,00					Kecamatan PPT
					Jumlah Lembaga PKK yang diberdayakan (2021 terletak di sub keg Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan)			9		9 lembaga	0,00	9		9		9	9 lembaga									
					Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan			9		2 kegiatan		4		9		4	2 kegiatan									
					Jumlah Kader Posyandu yang dibayarkan honorinya			190		9 orang		9		190		190	9 orang									
					Jumlah Kader Dasawisma yang dibayarkan honorinya (2021 terletak di sub keg Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan)			281		9 orang		9		282		285	9 orang									
					Jumlah Tingkatan Sekolah yang dibina dan pemenang LSS tingkat			4, 12		0		0					0									
					Jumlah kegiatan yang diperlombakan KKG PKK KB Kes (2021 terletak di sub keg Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan)			3		0		0					0									
					Jumlah Pemenang KUBE FM			0		0		0					0									
					Jumlah kegiatan Forum Anak yang terfasilitasi			0		0		0					0									
					Jumlah kegiatan Forum Literasi yang terfasilitasi			0		0		0					0									
					Jumlah Himpaudi yang difasilitasi			0		0		0					0									
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan/Kelurahan			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan		21,78%	3.764.708.125,00	21,78%	2.814.103.200,00	17,50%	500.977.850,00	0,00%	654.548.700,00	32,25%	630.322.700,00	39,40%	966.385.131,00	39,40%	2.752.234.381,00	40,74%	4.920.489.675,00				
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan		1.437.710.500,00	600,00%	645.362.200,00	9 kegiatan	142.245.350,00		111.063.450,00		92.138.250,00		243.848.331,00		589.295.381,00		2.027.005.881,00					
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah musrenbang yang dilaksanakan (utk 2021 hanya musren kecamatan)	1	35.275.400,00	9	121.181.400,00	9 kegiatan	116.699.400,00	9	0,00	9	-	9	9 kegiatan	116.699.400,00		151.974.800,00						Kecamatan PPT

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (n-2 = 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.			15=14/6 x 100%	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan sarana prasarana yang dilaksanakan (untuk 2021 keg pengadaan alat studio ganteng TV)		1	28.135.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			Kecamatan PPT		
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah peserta yang dilatih		160	1.374.300.100,00	150	524.180.800,00	0	25.545.950,00	119	111.063.450,00	50	92.138.250,00		243.848.331,00	0	472.595.981,00		1.846.896.081,00		Kecamatan PPT	
				Jumlah Lembaga LPM yang diberdayakan (2021 LPM terletak di sub keg Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan)		9		9	9 lembaga	0	0,00	9	0	9	0	9 lembaga	0	0						
				Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian BBGRM yang dilaksanakan				3	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
				Jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi				3	0	0	0,00	3	0	3	0	3	0	0						
				Jumlah Lembaga Posyantek yang diberdayakan		2		2	0	0,00	2	0	2	0	9	0	9	0	0					
				Jumlah Lembaga Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) yg dilaksanakan				0	0	0	0,00			1	0	1	0	0						
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Jumlah RT (thn 2021 termasuk LPM)			2.254.052.025,00	10600,00%	2.168.741.000,00	106 RT	358.732.500,00	10,00%	543.485.250,00	538.184.450,00	722.536.800,00	106 RT	2.162.939.000,00		4.416.991.025,00					
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis kegiatan RT yang dilaksanakan (untuk 2021 termasuk LPM)			2.254.052.025,00	6	2.168.741.000,00	6 kegiatan	358.732.500,00	6	543.485.250,00	6	538.184.450,00	6	722.536.800,00	6 kegiatan	2.162.939.000,00		4.416.991.025,00		Kecamatan PPT	
			KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Angka Tingkat Pelanggaran Ketertarikan dan Ketertiban Umum			155.794.300,00	15 laporan	26.675.000,00	5,00%	1.648.500,00	25,00%	3.027.000,00	30%	1.467.000,00	30%	16.844.950,00	10 laporan	22.987.450,00	2,56%	160.469.800,00			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi			155.794.300,00	200,00%	26.675.000,00	2 jenis	1.648.500,00	200,00%	3.027.000,00	1.467.000,00	16.844.950,00	2 jenis	22.987.450,00		178.781.750,00					
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat-rapat FKPM yang dilaksanakan di kecamatan dan kelurahan		12	155.794.300,00	13	26.675.000,00	2 kali	1.648.500,00	1 X (NG)	3.027.000,00	5	1.467.000,00	88	16.844.950,00	96	22.987.450,00		178.781.750,00		Kecamatan PPT	
				Jumlah Monev yg dilaksanakan oleh FKPM		6	0,00	20	0	0	0	5 X (KP, KK, S)	8	36	49	0	0	0						
				Jumlah Posko Satgas Covid-19 yang di fasilitasi tahun 2021		9	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
			PENYELenggaraan URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan		100,00%	32.111.450,00	100,00%	426.621.450,00	0,00%	0,00	34,00%	40.831.500,00	30%	205.218.230,00	36%	111.802.175,00	100,00%	357.851.905,00		72.942.950,00			
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan		100,00%	1.460.305.360,00	4800,00%	1.612.820.050,00	12 kali	249.674.742,00	25,00%	450.256.264,00	383.674.914,00	502.167.532,00	12 kali	1.585.773.452,00		3.046.078.812,00					
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (THL, lapangan)	Jumlah kelurahan yang menerima layanan persampahan		7	1.460.305.360,00	8	1.612.820.050,00	8 Kelurahan	249.674.742,00	8	450.256.264,00	8	383.674.914,00	8	502.167.532,00	8 Kelurahan	1.585.773.452,00		3.046.078.812,00		Kecamatan PPT	
				Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya		48		48	48 orang	48 orang	48	48	48	48	48	48	48 orang							
				Jumlah sarana persampahan yg dipelihara		8		8	8 unit	8 unit	8	8	8	8	8	8 unit								
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penuasan Kenala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penerusan kenala daerah			32.111.450,00	400,00%	426.621.450,00	0,00%	0,00	40.831.500,00	205.218.230,00	111.802.175,00	0,00%	357.851.905,00		389.963.355,00						
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas dan NasionalKeamanan Lokal, Regional	Jumlah Mushalla yang dikunjungi oleh Tim Ramadhan Kecamatan			23.245.000,00	8	365.261.450,00	0	0,00	8	38.666.000,00	8	188.979.930,00	8	87.730.800,00	8	315.376.730,00		338.621.730,00		Kecamatan PPT	
				Jumlah cabang MTQ yang diperlombakan				8	0	0	0	0	8	8	16									
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat yang dilaksanakan oleh Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Kecamatan			8.866.450,00	4	61.360.000,00	0	0,00	1	2.165.500,00	2	16.238.300,00	1	24.071.375,00	4	42.475.175,00		51.341.625,00		Kecamatan PPT	
				Jumlah Peringatan Hari Besar yang dilaksanakan (HUT RI dan HUT Kota)				2	0	0	0	0	1	1	2									
22.			KECAMATAN PADANG PANJIANG BARAT			82.966.568.327,58	80,45%	1.465.106.935,00	20.928.138.062,00	21,00%	3.351.818.199,00	21,20%	4.925.467.092,00	25,60%	5.363.378.892,00	29,40%	6.633.499.140,00	97,20%	20.274.163.323,00	61,82%	9.742.392.226,00	11,74%		
			UNSUR KEWILAYAHAN																					
			KECAMATAN						20.928.138.062,00	21,00%	3.351.818.199,00	21,20%	4.925.467.092,00	25,60%	5.363.378.892,00	29,40%	6.633.499.140,00	97,20%	20.274.163.323,00					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				96,67%	10.927.012.094,54	11.487.728.612,00	25,00%	1.987.287.911,00	25,00%	2.929.444.319,00	28%	2.929.561.377,00	22%	3.335.636.829,00	100,00%	11.181.930.436,00	68,84%	15.843.744.324,54			
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan			8.793.779.927,00	3 bulan	9.322.073.000,00	3 bulan	1.697.045.710,00	6 bulan	2.513.632.810,00	2.536.669.818,00	2.416.456.238,00	3 bulan	9.163.804.576,00		17.957.584.503,00					
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan		3 bulan	8.793.779.927,00	3 bulan	9.293.801.000,00	3 bulan	1.689.911.360,00	3 bulan	2.508.893.110,00	3 bulan	2.529.165.518,00	3 bulan	2.408.151.788,00	14 bulan	9.136.121.776,00		17.929.901.703,00		Kecamatan PPB	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun		1 Laporan	3.302.000,00	1 Laporan	2.066.300,00	1 Laporan	2.066.300,00	1 Laporan	0,00	850.000,00	1 Laporan	2.916.300,00		2.916.300,00				Kecamatan PPB		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan		17 Laporan	24.970.000,00	3 Laporan	5.068.050,00	6 Laporan	4.739.700,00	6 Laporan	6.654.300,00	6 Laporan	8.304.450,00	6 Laporan	24.766.500,00		24.766.500,00				Kecamatan PPB	



No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 14=7*13)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%) 15=14/6 x 100%	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II		III		IV					
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		515.276.020,00	639.780.410,00	94.668.550,00	6 bulan	74.497.100,00	101.870.251,00	327.059.123,00	598.295.024,00	1.113.571.044,00					
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik yang diadakan		41.496.200,00	30.800.060,00	6.505.500,00	3 bulan	3.200.500,00	12.711.000,00	3 bulan	4.456.000,00	12 bulan	26.873.000,00	68.369.200,00	Kecamatan PPB		
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang diserahkan		159.785.800,00	157.159.200,00	45.354.300,00	3 bulan	7.927.450,00	36.460.500,00	3 bulan	55.294.500,00	12 bulan	145.036.750,00	304.822.550,00	Kecamatan PPB		
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang diadakan		72.776.725,00	75.506.150,00	10.099.850,00	3 bulan	9.342.500,00	13.950.100,00	3 bulan	30.235.750,00	12 bulan	63.628.200,00	136.404.925,00	Kecamatan PPB		
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan		241.217.295,00	376.315.000,00	32.908.900,00	3 bulan	54.026.650,00	38.748.651,00	3 bulan	237.072.873,00	12 bulan	362.757.074,00	603.974.369,00	Kecamatan PPB		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			146.381.513,54	5.980.100,00	0,00	6 bulan	0,00	0,00	5.625.000,00	5.625.000,00	152.006.513,54					
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Barang yang diadakan		146.381.513,54	5.980.100,00	0,00	6 bulan				5.625.000,00	6 bulan	5.625.000,00	152.006.513,54	Kecamatan PPB		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.008.185.211,00	1.111.582.102,00	161.840.651,00		279.805.909,00	248.618.658,00	342.670.578,00	1.032.935.796,00	2.041.121.007,00					
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangk, materi yang diadakan		6.225.000,00	7.170.000,00	2.850.000,00	3 bulan	1.400.000,00	1.650.000,00	3 bulan	400.000,00	12 bulan	6.300.000,00	12.525.000,00	Kecamatan PPB		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan		59.399.066,00	81.101.702,00	12.181.517,00	3 bulan	13.999.952,00	14.088.527,00	3 bulan	19.470.127,00	12 bulan	59.740.123,00	119.139.189,00	Kecamatan PPB		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan		942.561.145,00	1.023.310.400,00	146.809.134,00	10 orang	264.405.957,00	232.880.131,00	10 orang	322.800.451,00	10 orang	966.895.673,00	1.909.456.818,00	Kecamatan PPB		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			463.389.423,00	408.313.000,00	33.533.000,00		61.508.500,00	42.402.650,00	243.825.890,00	381.270.040,00	844.659.463,00					
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara		137.532.450,00	160.983.000,00	27.429.000,00	2 orang, 47 Unit Kendaraan Roda 2, 2 Unit Kendaraan Roda 4	33.811.000,00	30.664.650,00	2 orang, 47 Unit Kendaraan Roda 2, 2 Unit Kendaraan Roda 4	55.127.350,00	147.032.000,00	284.564.450,00	Kecamatan PPB			
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara, jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara		294.082.973,00	112.030.000,00	6.104.000,00	12 gedung, 1 th	27.697.500,00	12 gedung, 1 th	11.738.000,00	12 gedung, 1 th	55.185.000,00	100.724.500,00	394.807.473,00	Kecamatan PPB		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhab		31.774.000,00	135.300.000,00	0,00				9 unit	133.513.540,00	9 unit	133.513.540,00	165.287.540,00	Kecamatan PPB		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase tingkat layanan	56,00%	2.702.368.058,00	4.556.441.950,00	25,00%	688.772.038,00	20,00%	1.153.155.373,00	10%	1.093.921.571,00	45%	1.464.014.159,00	100,00%	4.399.863.141,00	100,00%	4.544.295.469,00
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan		1.097.159.014,00	1 Forum	2.938.928.600,00	1 Forum	428.787.703,00	1 Forum	715.133.376,00	707.144.925,00	959.227.160,00	1 Forum	2.810.293.164,00	3.907.452.178,00		
	Kecamatan Padang Panjang Barat		Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan Jumlah Honor Kader Posyandu yang dibayarkan Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	1 Forum 391 Kader 9 Lembaga	1.097.159.014,00 391 Kader 9 Lembaga	1 Forum 391 Kader 9 Lembaga	1 Forum 391 Kader 9 Lembaga	1 Forum 391 Kader 9 Lembaga	1 Forum 391 Kader 9 Lembaga	1 Forum 391 Kader 9 Lembaga	1 Forum 391 Kader 9 Lembaga	959.227.160,00	1 Forum 391 Kader 9 Lembaga	2.810.293.164,00	3.907.452.178,00	Kecamatan PPB		
			Kegiatan Koordinasi dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah keluhan pelayanan Persampahan yang dilakukan Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan jumlah sarana persampahan yang disediakan		1.605.209.044,00	8 Kelurahan	1.617.513.350,00	8 Kelurahan	259.984.335,00	8 Kelurahan	438.021.997,00	386.776.646,00	504.786.999,00	8 Kelurahan	1.589.569.977,00	3.194.779.021,00		
	Kecamatan Padang Panjang Barat		Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah keluhan pelayanan Persampahan yang dilakukan Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan jumlah sarana persampahan yang disediakan	8 Kelurahan	1.605.209.044,00	8 Kelurahan	1.617.513.350,00	8 Kelurahan	259.984.335,00	8 Kelurahan	438.021.997,00	386.776.646,00	8 Kelurahan	504.786.999,00	1.589.569.977,00	3.194.779.021,00	Kecamatan PPB	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	49,56%	4.876.612.025,00	4.220.964.600,00	25,00%	666.918.750,00	25,00%	773.938.000,00	25%	981.797.194,00	11%	1.671.690.952,00	86,00%	4.094.344.896,00	88,89%	6.317.468.775,00
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan		1.966.932.450,00	1.458.220.300,00	209.768.000,00		84.664.100,00	293.941.444,00	749.604.477,00	1.337.978.021,00	3.304.910.471,00					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV						13	14=7+13	15=14/6 x 100%	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
	Kecamatan Padang Panjang Barat		Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 Kegiatan	155.703.150,00	1 Kegiatan	186.294.050,00	1 Kegiatan	182.757.100,00	1 Kegiatan	0,00			1 Kegiatan	182.757.100,00	338.460.250,00			Kecamatan PPB			
			Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi pembangunan yang dilaksanakan	1 Kegiatan		686.521.800,00	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	63.243.504,00	1 Kegiatan	574.474.212,00	1 Kegiatan	637.717.716,00	637.717.716,00		Kecamatan PPB			
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Posyantik yang difasilitasi	1 Kegiatan		585.404.450,00	1 Kegiatan	27.010.900,00	1 Kegiatan	84.664.100,00	1 Kegiatan	230.697.940,00	1 Kegiatan	175.130.265,00	1 Kegiatan	517.503.205,00	517.503.205,00		Kecamatan PPB			
				Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	8 lokasi			8 lokasi		8 lokasi		8 lokasi		8 lokasi		8 lokasi							
				Jumlah PKK yang diberdayakan	9 Lembaga			9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga							
				Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	387 Kader			387 Kader		387 Kader		387 Kader		387 Kader		387 Kader							
			Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah RT yang difasilitasi	133 RT	2.909.679.575,00	133 RT	2.762.744.300,00	133 RT	457.150.750,00	133 RT	689.273.900,00	687.855.750,00	922.086.475,00	133 RT	2.756.366.875,00	5.666.046.450,00						
	Kecamatan Padang Panjang Barat		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	133 RT	2.909.679.575,00	133 RT	2.762.744.300,00	133 RT	457.150.750,00	133 RT	689.273.900,00	687.855.750,00	133 RT	922.086.475,00	133 RT	2.756.366.875,00	5.666.046.450,00			Kecamatan PPB		
				Jumlah lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang diberdayakan	9 Lembaga		9 Lembaga	9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga							
			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Presentase tingkat koordinasi</b>	<b>100,00%</b>	<b>270.964.125,00</b>	<b>9 Forum</b>	<b>68.382.500,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>3.931.500,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>6.047.800,00</b>	<b>15%</b>	<b>11.305.500,00</b>	<b>35%</b>	<b>35.808.850,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>57.093.650,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.943.425,00</b>			
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah jenis kegiatan koordinasi	9 Forum		68.382.500,00	9 Forum	3.931.500,00	9 Forum	6.047.800,00		11.305.500,00		35.808.850,00	9 Forum	57.093.650,00	280.943.425,00					
	Kecamatan Padang Panjang Barat		Sub Kegiatan Sinergritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah rapat dan monev yang dilaksanakan	9 Forum		68.382.500,00	9 Forum	3.931.500,00	9 Forum	6.047.800,00	9 Forum	11.305.500,00	9 Forum	35.808.850,00	9 Forum	57.093.650,00	280.943.425,00			Kecamatan PPB		
			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Fasilitas dan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan umum</b>	<b>100,00%</b>	<b>55.861.100,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>594.620.400,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>4.908.000,00</b>	<b>11,00%</b>	<b>62.881.600,00</b>	<b>50%</b>	<b>346.793.250,00</b>	<b>34%</b>	<b>126.348.350,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>540.931.200,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>123.650.700,00</b>			
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah jenis penugasan		55.861.100,00		594.620.400,00		4.908.000,00		62.881.600,00		346.793.250,00		126.348.350,00		540.931.200,00	123.650.700,00				
	Pegawai dan Masyarakat Penerima Raskin		Sub Kegiatan Pembinaan Ke rukunan antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah kegiatan ramadhan	2 kegiatan	47.762.100,00	2 kegiatan	519.220.400,00	0,00		58.141.600,00		304.264.400,00		114.640.250,00	2 kegiatan	477.046.250,00	524.808.350,00			Kecamatan PPB		
	Kecamatan Padang Panjang Barat		Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Tentang Masalah Kedinasan Kantibmas di Kecamatan yang dijalankan	1 forum	8.099.000,00	1 forum	75.400.000,00	1 forum	4.908.000,00	1 forum	4.740.000,00	1 forum	42.528.850,00	1 forum	11.708.100,00	1 forum	63.884.950,00	71.983.950,00			Kecamatan PPB	
23.			<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESBANGPOL</b>			<b>30.470.700.611,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>7.481.076.244,00</b>		<b>9.077.077.604,00</b>	<b>14,29%</b>	<b>1.304.708.422,00</b>	<b>25,71%</b>	<b>2.468.677.444,00</b>	<b>21,43%</b>	<b>1.693.796.525,00</b>	<b>37,14%</b>	<b>3.339.553.713,00</b>	<b>98,57%</b>	<b>8.806.736.104,00</b>	<b>66,99%</b>	<b>11.254.462.110,00</b>	<b>36,94%</b>
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																				
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						<b>9.077.077.604,00</b>	<b>14,29%</b>	<b>1.304.708.422,00</b>	<b>25,71%</b>	<b>2.468.677.444,00</b>	<b>21,43%</b>	<b>1.693.796.525,00</b>	<b>37,14%</b>	<b>3.339.553.713,00</b>	<b>98,57%</b>	<b>8.806.736.104,00</b>				
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kebencanaan		Program Penunjang Urusan Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang dipenuhi		5.853.973.826,00	100,82%	4.038.662.028,00	0,00%	4.610.898.085,00	25,00%	841.609.640,00	25,00%	1.229.414.852,00	30%	1.143.903.362,00	10%	1.292.819.754,00	90,00%	4.507.747.608,00	29,82%	6.109.686.520,00	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ASN	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah		3.479.514.361,00	0,00%	3.811.280.192,00	0,00%	720.031.695,00		1.050.623.129,00		1.029.416.884,00		952.927.080,00	0,00%	3.752.998.788,00		7.232.513.149,00			
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	32 orang	3.478.917.361,00	32 orang	3.810.635.492,00	29 orang	720.031.695,00	29 orang	1.050.623.129,00		1.028.988.884,00		952.712.180,00	29 orang	3.752.355.888,00		7.231.273.249,00		BPBD Kesbangpol	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang di susun	1 Laporan	199.000,00	1 Laporan	214.900,00							214.900,00		214.900,00		413.900,00		BPBD Kesbangpol		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester yang disusun	1 Laporan	199.000,00	32 Laporan	214.900,00						214.000,00		0,00	214.000,00		413.000,00		BPBD Kesbangpol		
			Sub Kegiatan Penyusunan pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis yang di susun	1 Laporan	199.000,00	1 Laporan	214.900,00						214.000,00		0,00	214.000,00		413.000,00		BPBD Kesbangpol		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi Perkantoran		174.604.601,00	0,00%	231.109.733,00	0,00%	64.018.498,00		62.275.663,00		20.190.200,00		79.854.135,00	0,00%	226.338.496,00		400.943.097,00			
			Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang tersedia	1 Jenis	10.400.000,00	1 Jenis	10.400.000,00		1 jenis	10.400.000,00		0,00			1 jenis	10.400.000,00		10.400.000,00		BPBD Kesbangpol		
			Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik yang di sediakan	10 Jenis	3.404.000,00	10 Jenis	4.998.500,00	7 jenis	1.147.000,00		1.869.500,00				1.185.000,00	7 jenis	4.201.500,00		7.605.500,00		BPBD Kesbangpol	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu (n-2 = 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						7		8		9		10				11			12		13		14+13		16	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		15=14/6 x 100%
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor dan Peralatan Kebersihan Kantor yang di sediakan		28 Jenis	16.407.500,00	60 Jenis	17.675.050,00	34 jenis	4.936.000,00	10 jenis	3.807.000,00		1.069.000,00		5.963.800,00	44 jenis	15.775.800,00		32.183.300,00			BPBD Kesbangpol		
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		2 Jenis	11.787.950,00	2 Jenis	15.225.000,00	4 jenis	3.760.000,00	2 Jenis	3.036.800,00	1 jenis	2.010.900,00		4.585.200,00	4 jenis	13.392.900,00		25.180.850,00			BPBD Kesbangpol		
			Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang di ikuti Jumlah Rapat yang dilaksanakan		121 Kali	143.005.151,00	200 kali	182.811.183,00	71 kali	43.775.498,00	41 kali	53.562.363,00	41 kali	17.110.300,00		68.120.135,00	41 kali	182.568.296,00		325.573.447,00			BPBD Kesbangpol		
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						86.896.000,00								83.600.000,00		83.600.000,00							
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						86.896.000,00		0,00		0,00				83.600.000,00		83.600.000,00							
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				142.620.273,00		156.924.100,00		23.822.434,00		40.616.869,00		33.920.957,00		46.740.093,00		145.100.353,00		287.720.626,00					
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Jasa Surat Menyurat yang disediakan		1 Jenis	1.845.000,00	1 Jenis	2.000.000,00			1 Jenis	1.250.000,00	1 Jenis	250.000,00		500.000,00	1 Jenis	2.000.000,00		3.845.000,00			BPBD Kesbangpol		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang dibayarkan		36 rekening	17.990.383,00	36 rekening	22.295.000,00	3 rekening	4.388.810,00	3 rekening	4.405.933,00	3 rekening	6.383.021,00		6.402.271,00	3 rekening	21.580.035,00		39.570.418,00			BPBD Kesbangpol		
			Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Umum kantor	Jumlah tenaga harian Lepas Yang di bayarkan		4 orang	122.784.890,00	4 Orang	132.629.100,00	4 orang	19.433.624,00	4 Orang	34.960.936,00	4 Orang	27.287.936,00		39.837.822,00	4 orang	121.520.318,00		244.305.208,00			BPBD Kesbangpol		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Persentase Capaian pemeliharaan barang milik daerah	100%		232.922.793,00	0,00%	324.688.060,00	0,00%	33.737.013,00		75.899.191,00		60.375.321,00		129.698.446,00	0,00%	299.709.971,00		532.632.764,00					
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara		13 unit	226.594.793,00	20 Unit	303.771.100,00	3 unit	32.317.013,00	10 Unit	74.013.191,00	9 unit	57.218.321,00		119.992.446,00	3 unit	283.540.971,00		510.135.764,00			BPBD Kesbangpol		
			Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang di pelihara		11 unit	5.513.000,00	33 Unit	9.685.000,00	2 unit	1.420.000,00	3 unit	840.000,00	2 unit	700.000,00		2.925.000,00	2 unit	5.885.000,00		11.398.000,00			BPBD Kesbangpol		
			Sub kegiatan pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan lainnya yang di pelihara		1 gedung	815.000,00	1 gedung	11.231.960,00			1 gedung	1.046.000,00	1 gedung	2.457.000,00		6.781.000,00	1 gedung	10.284.000,00		11.099.000,00			BPBD Kesbangpol		
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Bencana yang Tertangani	100%		4.878.405.000,00	73,89%	1.327.982.836,00	0,00%	1.522.234.762,00	15,00%	227.216.482,00	25,00%	356.721.148,00	35%	236.932.148,00	100,00%	1.433.286.463,00	55,71%	1.911.920.466,00		39,19%			
			Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100,00%	1.208.177.386,00	0,00%	1.087.926.412,00	0,00%	176.763.282,00		325.531.848,00		211.737.648,00		302.853.014,00	0,00%	1.016.885.792,00		2.225.063.178,00			
			Sub Kegiatan Pelatihan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta KSB kota padang panjang		22 orang	1.205.561.886,00	160 orang	113.315.000,00	160 orang	30.427.600,00	160 orang	79.117.000,00				2.099.000,00	160 orang	111.643.600,00		1.317.205.486,00			BPBD Kesbangpol		
			Sub Kegiatan Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Operasional		-	0,00	22 org	917.518.200,00	22 orang	146.335.682,00	22 org	246.414.848,00	22 org	203.437.648,00		266.076.514,00	22 orang	862.264.692,00		862.264.692,00			BPBD Kesbangpol		
			Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Kerusakan yang di verifikasi		1 Laporan	0,00		57.093.212,00			0	0,00	1 Laporan/	8.300.000,00		34.677.500,00	1 Laporan/	42.977.500,00		42.977.500,00			BPBD Kesbangpol		
			Kegiatan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah sarana dan prasarana evakuasi penduduk dan ancaman/korban bencana alam		47,78%	119.805.450,00		393.828.350,00		50.453.200,00		31.189.300,00		25.194.500,00		270.563.671,00		377.400.671,00		497.206.121,00					
			Sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah kejadian ditangani		43 kejadian	119.805.450,00	85 kejadian	336.928.350,00	33 kejadian	22.893.200,00	6 kejadian	31.189.300,00	16 kali	25.194.500,00		250.763.671,00	33 kejadian	330.040.671,00		449.846.121,00			BPBD Kesbangpol		
			Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelapangan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan logistik evaluasi bencana					56.900.000,00	3 jenis	27.560.000,00		0,00				19.800.000,00	3 jenis	47.360.000,00		47.360.000,00			BPBD Kesbangpol		
			Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Benar-benar atau						40.480.000,00	jenis	0,00		0,00				39.000.000,00	jenis	39.000.000,00		39.000.000,00					
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi membahayakan Manusia / Benar-benar atau	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia					40.480.000,00	1 jenis			0,00				39.000.000,00	1 jenis	39.000.000,00		39.000.000,00			BPBD Kesbangpol		
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEANGSAAN						25.000.200,00	0,00%	0,00	5,00%	0,00	10,00%	0,00	85%	15.865.300,00	100,00%	15.865.300,00							

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV						13	14=7*13	15=14/6 x 100%		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								K	Rp.
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				25.000.200,00		0,00		0,00		0,00		15.865.300,00		15.865.300,00		15.865.300,00					
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaharuan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta yang dilatih			40 org	25.000.200,00	0,00		0,00		-		15.865.300,00		15.865.300,00		15.865.300,00		BPBD Kesbangpol			
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1. Pendidikan dan pelatihan pengelolaan bantuan keuangan partai politik 2. Persentase pelaksanaan bimtek bagi pengurus partai		100,00%	1.862.042.530,00	0,00%	2.308.434.707,00	25,00%	77.421.450,00	35,00%	756.276.684,00	30%	222.232.700,00	10%	1.204.861.554,00	100,00%	2.260.792.388,00	50,00%	2.695.740.664,00			
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik ,Peningkatan Demokrasi ,fasilitasi Kelembagaan kegiatan perwalian dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Jumlah peraturan tentang juknis pedoman pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol			1.862.042.530,00		2.308.434.707,00		77.421.450,00		756.276.684,00		222.232.700,00		1.204.861.554,00		2.260.792.388,00		4.122.834.918,00			
			Sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwalian dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, Serta pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah partai yang dapat Bantuan keuangan		8 partai	682.641.430,00	8 partai	2.308.434.707,00	8 partai	77.421.450,00	8 partai	756.276.684,00		222.232.700,00		1.204.861.554,00	8 partai	2.260.792.388,00		2.943.433.818,00		BPBD Kesbangpol	
				Jumlah Pertemuan Forum koordinasi Yang di laksanakan				10 kali				4 kali								0,00		BPBD Kesbangpol		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				68.404.250,00	10,00%	16.000.500,00	25,00%	7.034.300,00	25%	16.589.800,00	40%	20.111.000,00	100,00%	59.735.600,00		59.735.600,00		59.735.600,00			
			Kegiatan Perumusan kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				68.404.250,00		16.000.500,00		7.034.300,00		16.589.800,00		20.111.000,00		59.735.600,00		59.735.600,00		59.735.600,00			
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas Aktive ri Daerah				68.404.250,00	1 kali	16.000.500,00	1 kali	7.034.300,00	0	16.589.800,00		20.111.000,00	1 kali	59.735.600,00		59.735.600,00		59.735.600,00		BPBD Kesbangpol	
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase Konflik yang tertangani		100,00%	139.920.000,00	49.732.500,00	0,00%	69.450.000,00	0,00%	0,00	40,00%	31.875.050,00	10%	0,00	50%	31.854.500,00	100,00%	63.729.550,00		81.607.550,00		
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahan Ekonomi, Sosial dan budaya	Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi, masalah sosial dan budaya di kalangan masyarakat			69.450.000,00		69.450.000,00		0,00		31.875.050,00		0,00		31.854.500,00		63.729.550,00		63.729.550,00			
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayatan Kenevranean Di Daerah	Jumlah Pertemuan FKUB yang di adakan			69.450.000,00		69.450.000,00		0,00	2 kali	31.875.050,00		-		31.854.500,00		63.729.550,00		63.729.550,00		BPBD Kesbangpol	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Pertemuan/ koordinasi tim yang dilaksanakan		95,24%	202.656.350,00	3 kali	472.655.600,00	25,00%	142.460.350,00	25,00%	87.355.410,00	20%	74.138.515,00	30%	161.624.920,00	100,00%	465.579.195,00	34,17%	432.472.110,00			
			Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik Sosial				202.656.350,00		472.655.600,00		142.460.350,00		87.355.410,00		74.138.515,00		161.624.920,00		465.579.195,00		668.235.545,00			

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RPKD Tahun Lalu (n-2 = 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV						13		14=7+13		15=14/6 x 100%	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16										
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan GNRM		1 kali	202.656.350,00	3 kali	472.655.600,00		142.460.350,00	0	74.138.515,00	161.624.920,00	465.579.195,00	668.235.545,00		BPBD Kesbangpol							
				Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan Tim Kewaspadaan Dini Daerah				5 kali		2 kali	1 kali	3 kali		5 kali											
				Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan Tim P4GN				4 kali		1 kali	4 kali	0 kali		1 kali											
				Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan Tim Pakem				3 kali			1 kali	1 Kali		2 kali											
				Jumlah orang asing (NGO) yang di awasi		11 orang /LSM / 1 kali		11 orang/LSM		11 orang/LSM	1 kali	11 org/LSM		11 orang/LSM											
				Jumlah pertemuan yang dilaksanakan Konflik				5 kali		2 kali	1 kali	0 kali		3 kali											



# **BAB III**

## **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Pada Bab 3 ini dijelaskan arah kebijakan ekonomi dan arah kebijakan keuangan daerah untuk tahun 2024. Rumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2024 tentu dengan memperhatikan pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun sebelumnya, dan proyeksi tahun 2023. Dengan demikian pembahasan pada bagian ini diawali dengan penjelasan kondisi ekonomi Kota Padang Panjang 2022, selanjutnya tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2023 dan 2024 serta arah kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2024.

### **3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang tahun 2024 mengacu kepada RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 dan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, serta RPJMD Propinsi Sumatera Barat 2021-2026. Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun pertama RPD Kota Padang Panjang tahun 2024-2026. Dengan memperhatikan fokus dan tema pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2024 yakni **“Peningkatan Perekonomian dan Kualitas SDM Berkarakter dan Berdaya Saing”**, serta tema pembangunan nasional **“Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”**, maka pembangunan ekonomi Kota Padang Panjang diarahkan pada Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Lapangan Usaha yang terkait dengan kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi) sesuai dengan potensi yang ada di Kota Padang Panjang. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga perlu mendapatkan prioritas untuk ditingkatkan lebih lanjut karena terbukti memiliki ketahanan tersendiri dan mampu tumbuh positif di saat krisis pandemi Covid-19. Sedangkan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan tetap harus dipertahankan sebagai salah satu ikonnya Kota Padang Panjang.

#### **3.1.1 Kondisi Ekonomi Tahun 2021, 2022 dan perkiraan 2023**

Berikut gambaran kondisi ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2021, 2022 dan perkiraan tahun 2023.

##### **a. Pertumbuhan Ekonomi**

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang tumbuh di angka 3,46 persen setelah mengalami kontraksi sampai pada angka -1,44 persen di tahun 2020 sebagai akibat terjadinya Pandemi Covid-19. Pasca meredanya pandemi covid 19, aktifitas perekonomian daerah mulai kembali bergerak dimana beberapa lapangan usaha unggulan di Kota Padang Panjang yakni Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Lapangan Usaha yang terkait dengan kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi); Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan kembali tumbuh positif.

Di awal tahun 2022, mobilitas orang mulai mengalami lonjakan, baik untuk tujuan pekerjaan, urusan keluarga, wisata, keagamaan, dan lain sebagainya. Berbagai even keramaian yang selama ini tidak dapat terlaksana sudah mulai diagendakan kembali. Hal ini mempengaruhi percepatan proses pemulihan ekonomi daerah, sehingga pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang mampu tumbuh pada angka 4,39 persen. Berdasarkan kinerja tersebut selanjutnya dapat diprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2023 diharapkan mampu mencapai angka di atas 5 persen.

Jila dilihat dari sisi pertumbuhan, terdapat beberapa lapangan usaha utama yang memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi, antara lain lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dengan pertumbuhan rata-rata 7,44 persen, sektor Jasa Pendidikan dengan pertumbuhan rata-rata 5,97 persen, dan sektor Jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan pertumbuhan sebesar 5,91 persen. Disamping beberapa sektor PDRB seperti di atas, sektor PDRB lain yang juga memiliki potensi dan prospek yang cerah untuk dikembangkan dimasa mendatang adalah sektor Jasa Lainnya dengan pertumbuhan rata-rata 5,01 persen, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan rata-rata 4,07 persen serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,64 persen, seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 (%)**

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	Rerata
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,35	3,65	1,29	4,99	5,54	3,36
B. Pertambangan dan Penggalian	0,35	0,54	-2,64	2,23	2,20	0,54
C. Industri Pengolahan	1,63	-2,75	-2,41	2,44	2,40	0,26
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,16	2,36	-6,84	2,94	2,98	1,12
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,87	4,64	1,36	4,43	4,24	3,11
F. Konstruksi	6,93	6,04	-3,25	1,02	2,45	2,64
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,57	5,23	-1,01	3,20	5,28	3,65
H. Transportasi dan Pergudangan	6,99	7,05	-11,12	4,19	3,19	2,06



Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	Rerata
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,30	7,23	-12,04	7,38	10,47	4,07
J. Informasi dan Komunikasi	8,63	8,28	8,33	5,42	6,53	7,44
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,62	2,19	0,97	8,72	4,52	3,40
L. Real Estate	4,68	5,45	0,11	2,17	5,42	3,57
M,N Jasa Perusahaan	4,87	5,11	-4,45	1,05	6,30	2,58
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,41	6,60	-0,72	0,73	-1,05	2,39
P. Jasa Pendidikan	7,90	9,33	5,91	1,51	5,21	5,97
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,26	6,49	7,14	5,22	4,43	5,91
R,S,T,U Jasa Lainnya	7,60	9,27	-9,66	6,80	11,02	5,01
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>5,71</b>	<b>5,56</b>	<b>-1,44</b>	<b>3,46</b>	<b>4,39</b>	<b>3,54</b>

Sumber : BPS, 2023

Secara struktur ekonomi Kota Padang Panjang selama periode 2018-2022 didominasi oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; Jasa Pendidikan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Banyak hal yang mempengaruhi lapangan usaha utama ini, di antaranya dampak dari posisi Kota Padang Panjang yang berada pada persimpangan, serta iklim yang kondusif untuk penyelenggaraan berbagai aktifitas Pendidikan, MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition) ataupun wisata di Kota Padang Panjang sehingga Lapangan Usaha – Lapangan Usaha tersebut memiliki kontribusi yang lebih dominan dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya. Adapun kontribusi masing-masing Lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.2**  
**Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB ADHB Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2021-2022 (%)**

Lapangan Usaha	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,12	5,14
B. Pertambangan dan Penggalian	0,27	0,26
C. Industri Pengolahan	8,48	8,31
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	0,25
F. Konstruksi	9,62	9,51
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,51	18,14
H. Transportasi dan Pergudangan	11,82	11,94
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,75	2,82
J. Informasi dan Komunikasi	9,65	9,78
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,46	4,42
L. Real Estate	3,53	3,50

Lapangan Usaha	2021	2022
M, N Jasa Perusahaan	0,08	0,08
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,28	9,60
P. Jasa Pendidikan	9,89	9,89
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,59	1,55
R, S, T, U Jasa Lainnya	4,65	4,76
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS, 2023

### b. Tingkat Pengangguran

Tahun 2021 tingkat pengangguran di Kota Padang Panjang mengalami penurunan yang sangat tajam yakni dari angka 7,22 persen tahun 2020 menjadi 4,9 persen ditahun 2021. Selanjutnya tahun 2022 turun pada angka 4,84 persen dimana angka ini melampaui target yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2018-2023. Kondisi yang cukup baik ini merupakan salah satu dampak dari mulai membaiknya pergerakan aktifitas masyarakat termasuk aktifitas ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh positif.

Penurunan tingkat pengangguran dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya peningkatan kesempatan kerja melalui perusahaan yang ada di Kota Padang Panjang meskipun perusahaan yang ada di Kota Padang Panjang masih didominasi oleh usaha mikro dan menengah yang tidak begitu banyak menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2021 jumlah perusahaan di Kota Padang Panjang berjumlah 675 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 1494 orang, artinya rata-rata tiap perusahaan mempekerjakan 3 orang pekerja. Tahun 2022 jumlah perusahaan bertambah menjadi 716 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 1258 orang. Artinya 1 (satu) perusahaan mempekerjakan 2 orang. Berdasarkan hal tersebut perlu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan UMKM untuk dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat lebih banyak menampung tenaga kerja.

Disamping itu juga dilakukan peningkatan skill pencari kerja serta peningkatan program padat karya dan teknologi tepat guna dalam rangka upaya menyerap tenaga kerja, terutama sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang yang juga cukup berpengaruh pada penurunan tingkat pengangguran di Kota Padang Panjang. Dengan demikian maka tahun 2023 tingkat pengangguran diharapkan dapat ditekan sampai pada angka 4,47 persen.

### c. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kota Padang Panjang pada tahun 2021 berada pada angka 5,92 persen, kemudian mengalami penurunan tahun 2022 mencapai angka 5,79 persen. Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 memberikan dampak positif terhadap sektor informal dan swasta yang sehingga dapat Kembali menyerap tenaga kerja. Hal ini juga berdampak terhadap tingkat

kemiskinan di Kota Padang Panjang terlihat bahwa tahun 2022 terjadinya penurunan angka kemiskinan. Untuk tahun 2023 ini diperkirakan tingkat kemiskinan akan dapat ditekan sesuai dengan harapan, yaitu di angka 5,36 persen. Hal ini mengingat semakin meningkatnya aktifitas ekonomi masyarakat serta pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan yang sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang merupakan program prioritas pemerintah daerah maupun nasional yang dilaksanakan melalui APBD maupun non APBD.

#### **d. PDRB Per Kapita**

Seiring dengan mulai membaiknya kondisi ekonomi pasca Pandemi Covid-19, sehingga cukup berdampak pada PDRB per kapita baik ADHK maupun ADHB di Kota Padang Panjang. PDRB perkapita ADHK mengalami peningkatan dari 46,19 juta rupiah pada tahun 2021 menjadi 47,19 juta rupiah pada Tahun 2022. Sedangkan PDRB perkapita ADHB sebesar 64,09 juta rupiah meningkat mencapai angka 70,64 juta rupiah pada tahun 2022. Dengan meningkatnya mobilitas penduduk yang terus meningkat pasca pandemi Covid-19, maka tahun 2023 diperkirakan akan berdampak pada semakin menggeliatnya perekonomian. Oleh karena itu maka PDRB per kapita tahun 2023 diharapkan akan pulih sepenuhnya dan akan mencapai angka 48,01 juta rupiah (ADHK) dan 66,09 juta rupiah (ADHB).

#### **e. Indeks Gini**

Indeks Gini (Gini Ratio) merupakan indeks yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Pada tahun 2021 Indeks Gini di Kota Padang Panjang adalah 0,306 dan tahun 2022 turun menjadi 0,296. Diharapkan penurunan ketimpangan ini dapat berlanjut hingga tahun 2023, sehingga indeks gini Kota Padang Panjang diharapkan dapat turun pada angka 0,290, seiring dengan membaiknya ekonomi masyarakat.

#### **f. Laju Inflasi**

Inflasi merupakan satu kondisi dimana terjadi peningkatan harga barang-barang secara umum dan terus menerus dalam waktu tertentu sehingga menimbulkan penurunan nilai mata uang yang berlaku di masyarakat. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Inflasi di Kota Padang Panjang mengacu pada inflasi Kota Bukittinggi, dimana selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2021 inflasi Kota Bukittinggi berada pada angka 1,69 persen, namun pada tahun 2022 terjadi

lonjakan inflasi hingga mencapai angka 7,76 persen. Melalui pengendalian inflasi, diharapkan pada tahun 2023 inflasi dapat ditekan pada angka 3,0 ± 1 persen sesuai dengan target nasional.

Untuk melihat bagaimana perkembangan indikator makro Kota Padang Panjang selama tahun 2021 dan 2022 serta perkiraan tahun 2023 sebagaimana disusun pada perencanaan awal dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Perkembangan Indikator Makro Kota Padang Panjang**

No.	INDIKATOR	REALISASI		Target 2023
		2021	2022	
1.	PDRB (Rp. juta)			
	ADHB	3.850,70	4.086,55	4.283,95*
	ADHK	2.631,52	2.747,11	2.876,68
2.	Pertumbuhan ekonomi (%)	3,46	4,36	4,91
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,92	5,14	5,36
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,90	4,84	3,24
5.	PDRB Perkapita (Rp. Juta)			
	ADHK	46,19	47,47	48,01
	ADHB	64,09	70,64	73,11*
6.	Laju Inflasi (%)	1,69	7,76	1,33
7.	IPM	77,97	78,78	78,97*
8.	Indeks Gini	0,306	0,296	0,294*

Sumber : BPS Sumbar, RKPD Kota Padang Panjang 2023

\*outlook

### 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

#### 3.1.2.1 Analisa Kondisi Internal dan Eksternal terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah.

Analisis atas kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi eksternal (peluang dan ancaman) terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2022, realisasi RPJMD, dan kondisi ekonomi daerah tahun 2022 dan perkiraan pencapaian tahun 2023 meliputi :

#### A. Kondisi internal

##### a. Faktor Kekuatan

##### 1) Potensi iklim dan kondisi alam.

Iklim Kota Padang Panjang berhawa sejuk sangat kondusif untuk aktifitas Pendidikan, kuliner, MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition) ataupun wisata. Kondisi alam yang memiliki pemandangan indah sangat bagus untuk pariwisata dan lahan yang subur sangat cocok untuk pertanian.

##### 2) Aspek demografi.

Aspek demografi di Kota Padang Panjang cenderung mengalami penambahan pada setiap tahunnya. Jumlah penduduk Kota Padang Panjang pada tahun 2022 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang adalah sebanyak 60.449 jiwa, dengan didukung oleh sumber daya manusia usia angkatan kerja yang cukup besar maka diharapkan menjadi kekuatan untuk menggerakkan perekonomian Kota Padang Panjang.

3) Heterogenitas Budaya Masyarakat

Heterogenitas Budaya Masyarakat di Kota Padang Panjang merupakan modal sosial yang akan mempercepat proses pembangunan, dimana karakteristik masyarakat Kota Padang Panjang yang heterogen dapat mendorong terciptanya kondisi yang kondusif untuk pembangunan.

4) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kota Padang Panjang sejak tahun 2020 mengalami tren peningkatan dan selalu berada di atas Provinsi Sumatera Barat dan merupakan peringkat ketiga tertinggi dari 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Dengan demikian tingkat kesejahteraan penduduk Kota Padang Panjang sudah relative baik yang dapat menjadi modal untuk meningkatkan perekonomian Kota Padang Panjang.

5) Investasi.

Investasi di Kota Padang Panjang memang belum maksimal, hal ini disebabkan karena keterbatasan lahan dan potensi di Kota Padang Panjang. Namun demikian Pemerintah Kota Padang Panjang terus melakukan upaya-upaya antara lain kemudahan pelayanan dan perizinan dan penyediaan infrastruktur yang memadai serta iklim keamanan dan ketertiban di Kota Padang Panjang yang relatif kondusif diharapkan menjadi daya tarik bagi investor.

6) Kekuatan birokrasi.

Tahun 2022 Pemerintah Kota Padang Panjang mendapatkan kategori Sangat Baik dalam Penilaian Sistem Merit yang diselenggarakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan Birokrasi di Kota Padang Panjang cukup handal untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan politik yang berupa kebijakan- kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah.

**b. Faktor kelemahan**

1) Keterbatasan lahan.

Keterbatasan lahan yang ada di Kota Padang Panjang membuat industri yang berkembang adalah industri skala kecil. Akibatnya sulit untuk melakukan produksi skala besar. Keterbatasan lahan juga menjadi kendala dalam pengembangan investasi.

- 2) Nilai tambah Produk-Produk Pertanian Rendah  
Nilai tambah produk-produk pertanian di Kota Padang Panjang masih belum dimanfaatkan menjadi bahan-bahan olahan secara optimal sehingga keragaman hasil produk hortikultura belum memungkinkan memiliki nilai tambah (added values).
- 3) Tingginya angka kemiskinan dan indeks Gini  
Relatif tingginya angka kemiskinan di Kota Padang Panjang membutuhkan upaya ekstra untuk pengentasannya. Ditambah lagi dengan indeks Gini yang masih tergolong tinggi membuat kesenjangan di Kota Padang Panjang masih harus menjadi perhatian serius.

## **B. Kondisi eksternal**

### **a. Faktor peluang**

- 1) Meningkatnya mobilitas orang pasca pandemi Covid-19.  
Melandainya pandemi Covid-19 di awal tahun 2022 menyebabkan mobilitas orang meningkat tajam untuk berbagai tujuan. Hal ini merupakan peluang bagi Kota Padang Panjang yang merupakan Kota perlintasan utama di jalur darat Sumatera Bagian Tengah. Pemerintah dan masyarakat Kota Padang Panjang harus bisa memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan perekonomian daerah.
- 2) Sudah berjalannya proses digitalisasi ekonomi di Kota Padang Panjang akan dapat membuat perekonomian lebih mampu dan siap bersaing.
- 3) Pelaksanaan pemilu serentak pada Tahun 2024 juga merupakan peluang yang harus bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah dan masyarakat Kota Padang Panjang untuk menggenjot perekonomian daerah.

### **b. Faktor ancaman**

- 1) Perang Rusia-Ukraina dan lonjakan inflasi  
Masih berlangsungnya Perang Rusia-Ukraina memiliki dampak yang besar pada perekonomian. Konflik tersebut menimbulkan krisis energi dan pangan dunia sehingga menyebabkan lonjakan inflasi. Indonesia termasuk Kota Padang Panjang juga tidak terlepas dari tekanan inflasi tersebut walaupun dengan berbagai upaya yang dilakukan secara nasional tidak setinggi negara-negara seperti Argentina, Turki, Pakistan, Jerman dan Inggris. Namun fakta bahwa konflik dan ancaman inflasi tinggi masih menunjukkan tanda-tanda akan berlanjut sangat perlu diwaspadai oleh Pemerintah Kota Padang Panjang.
- 2) Masih belum lancarnya distribusi komoditi pangan dan pembatasan alokasi pupuk dan pestisida bersubsidi  
Ketidaklancaran produksi dan distribusi komoditi pangan, khusus minyak goreng, sangat berpengaruh pada dunia usaha di Padang Panjang yang banyak membutuhkan bahan baku minyak goreng. Di sisi lain, Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pembatas alokasi pupuk bersubsidi.

Akibatnya, petani Kota Padang Panjang mengalami kesulitan dalam membiayai produksi karena jumlah pupuk bersubsidi yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu harga pupuk non-subsidi juga belum menunjukkan perbaikan.

- 3) Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam perekonomian  
Pemanfaatan teknologi informasi yang sangat pesat sejak pandemi COVID-19 merambah berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk aspek ekonomi. Eksistensi pasar digital (marketplace) dimana Indonesia secara umum dan Kota Padang Panjang secara khusus adalah pasar yang sangat potensial untuk pemasaran produk-produk dalam dan luar negeri. Hal ini menjadi ancaman bagi keberlanjutan produk-produk lokal padang Panjang yang didominasi oleh usaha berskala kecil dan mikro.
- 4) Relatif lambatnya pertumbuhan pendapatan daerah  
Pada saat pandemi Covid-19 maka pendapatan daerah Kota Padang Panjang mengalami refocusing, khususnya tahun 2020 dan 2021. Pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat juga tidak mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini tentunya mempengaruhi pelaksanaan program prioritas daerah.
- 5) Perubahan iklim.  
Perubahan iklim akibat pengaruh pemanasan global memberikan multiplier effect pada dunia. Kecenderungan perubahan iklim yang tidak menentu mengganggu pola tanam para petani, sehingga mengganggu kerja para petani dan mengakibatkan kerugian finansial.
- 6) Tingkat kerusakan lingkungan dan bencana alam.  
Tingkat kerusakan lingkungan dan bencana alam di Kota Padang Panjang termasuk tinggi. Kerusakan itu, misalnya, terlihat dari semakin tidak subur nya lahan-lahan yang ditanami para petani. Hal ini tidak lepas dari pola tanam yang tidak bagus dan penggunaan pupuk serta obat-obatan kimia yang berlebihan. Konsekuensinya, produktivitas lahan di Kota Padang Panjang mengalami penurunan setiap tahun. Selain itu, Kota Padang Panjang termasuk bagian dari jalur yang rawan bencana alam, karena kedudukan wilayah Kota Padang Panjang yang merupakan dataran tinggi menjadikan rawan terhadap bencana tanah longsor.

### **3.1.2.2 Identifikasi Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024**

Tantangan dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian tahun 2024 meliputi :

1. Meningkatnya mobilitas masyarakat pasca pandemi yang disebabkan pelonggaran pembatasan masyarakat akan meningkatkan demand terhadap barang dan jasa secara drastis. Untuk itu sedangkan upaya peningkatan penyediaan barang dan jasa tidak bisa dilakukan secepat naiknya permintaan.

2. Meningkatnya implementasi e-commerce yang merubah pola perilaku masyarakat dalam bertransaksi sehingga berpengaruh terhadap peran pasar tradisional. E-commerce juga meningkatkan persaingan produk UMKM dengan produk lain dari berbagai belahan dunia.
3. Penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2024.
4. Peningkatan inovasi dan upaya mendapatkan investasi dalam pelaksanaan pembangunan.
5. Optimalisasi posisi strategis Kota Padang Panjang sebagai Kota Perlintasan dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana perdagangan dan jasa (Pendidikan, Kesehatan, MICE, kuliner, dll).

### **3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Padang Panjang**

Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan di atas, maka Kebijakan ekonomi Kota Padang Panjang tahun 2023 diarahkan pada :

- a. Peningkatan lapangan usaha unggulan Kota Padang Panjang, khususnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Lapangan Usaha yang terkait dengan kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi); Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan. Lapangan usaha-lapangan usaha ini pada dasarnya adalah pendukung kepariwisataan yang didalamnya juga terdapat banyak UMKM yang menjadi basis perekonomian Kota Padang Panjang. Sedangkan sektor pertanian yang terbukti tetap tumbuh baik selama masa pandemi dan krisis tetap dioptimalkan, dengan harapan sektor pertanian ini dapat meningkatkan nilai tambahnya sehingga dapat mendukung sektor industri pengolahan.
- b. Penataan destinasi wisata, pemberdayaan kelompok sadar wisata dan pelaku wisata lainnya serta peningkatan promosi wisata dalam rangka menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota yang tidak hanya menjadi kota perlintasan persinggahan namun juga sebagai kota tujuan..
- c. Intensifikasi Kota Padang Panjang sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition).
- d. Mendorong peningkatan usaha kecil menengah (UKM), baik dari segi produksi, pemasaran maupun manajemen usaha, sehingga dapat meningkatkan kapasitasnya yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB dan penciptaan lapangan kerja, termasuk meningkatkan produk UKM yang memperoleh sertifikasi halal.
- e. Mendorong pelaku ekonomi di Kota Padang Panjang untuk terus mampu menyesuaikan dengan tren digitalisasi pasar.



- f. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi. Mengembangkan pasar pusat Padang Panjang menjadi pasar rakyat dengan konsep wisata belanja (ke pasar tidak sekadar berbelanja kebutuhan, tapi sekaligus berwisata dan jalan jalan).
- g. Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat, fokus di lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan lapangan usaha yang berkaitan dengan kepariwisataan (kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, industri pengolahan, transportasi dan perdagangan, informasi dan komunikasi).
- h. Mendorong inovasi daerah dalam pengelolaan potensi daerah dan mendorong investasi dari PMDN maupun PMA di berbagai sektor.
- i. Optimalisasi koperasi syariah dan mendorong koperasi untuk bergerak di sektor riil.

Dengan memperhatikan tantangan makro yang dipengaruhi oleh perkembangan internal dan eksternal Kota Padang Panjang, arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 serta dengan memperhatikan target pembangunan daerah sebagaimana sudah disesuaikan dalam RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, maka prospek perekonomian daerah Kota Padang Panjang diprediksi sebagaimana yang terlihat pada tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.2**  
**Target Indikator Makro Ekonomi dan Proyeksi sesuai RKPD Provinsi Sumbar untuk Kota Padang Panjang Tahun 2024**

No.	Indikator	RKPD Kota Padang Panjang	Target sesuai RKPD Provinsi Sumbar
1	PDRB (Rp. juta)	-	-
	ADHB	4.499,42	
	ADHK	3.028,38	
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,20	4,93
3	Tingkat Kemiskinan (%)	4,24	4,72
	Jumlah Penduduk miskin (ribu) jiwa	2,52	2,81
4	Tingkat Pengangguran (%)	4,60	4,38
5	PDRB Perkapita (Rp. Juta)	-	-
	ADHK	50,87	50,64
	ADHB	75,58	83,03
6	Laju Inflasi (%)	3 ± 1	-
7	IPM	79,02	79,49
8	Indeks Gini	0,292	0,297

Dalam mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan provinsi dan kabupaten/ kota, Pemerintah Provinsi Sumatera barat menetapkan arahan target indikator kinerja makro bagi kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Barat. Penetapan proyeksi target indikator makro kabupaten/ kota tersebut adalah untuk mendukung pencapaian target Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Berdasarkan

tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat sedikit perbedaan terhadap target indikator makro Kota Padang Panjang dengan proyeksi target indikator makro sebagaimana ditetapkan untuk Kota Padang Panjang.

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,20 persen, angka ini lebih tinggi dari target pada RKPD Provinsi Sumbar yang memproyeksikan sebesar 4,93 persen. Proyeksi optimis dilakukan berdasarkan histori angka realisasi pertumbuhan ekonomi beberapa tahun sebelumnya, serta memperhatikan aktifitas perekonomian yang sudah mulai tumbuh pasca terjadinya Pandemi Covid-19, dimana pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi sudah dapat tumbuh hingga mencapai angka 4,39 persen.

Adapun untuk target indikator tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran juga terdapat sedikit perbedaan angka proyeksi dimana Pemerintah Provinsi Sumbar menetapkan target pada angka 4,72 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebesar 2810 jiwa, sedangkan Pemerintah Kota Padang Panjang memproyeksi tingkat kemiskinan pada angka 4,24 persen dengan jumlah penduduk miskin diperkirakan berjumlah 2520 jiwa. Penetapan angka ini berdasarkan pada keberhasilan menekan angka kemiskinan tahun 2022 yang cukup signifikan dan prospek perekonomian tahun 2024 yang cukup menggembirakan.

Begitu juga dengan tingkat pengangguran, serta PDRB per kapita yang ditargetkan sedikit berbeda dengan perkiraan Provinsi, dimana tingkat pengangguran adalah 4,60 persen dan PDRB Perkapita sebesar 50,87 juta rupiah, terdapat perbedaan perkiraan pada RKPD Provinsi Sumbar yakni pada angka 4,38 persen untuk angka pengangguran dan 50,64 juta rupiah untuk angka PDRB Perkapita (ADHK). Perbedaan ini cukup signifikan, namun dengan analisa terhadap kemampuan serta potensi yang terbatas di Kota Padang Panjang tetap diarahkan dalam upaya mendukung pencapaian target Provinsi Sumatera Barat.

IPM Kota Padang Panjang tahun 2024 diharapkan dapat mencapai angka 79,02, angka ini sedikit lebih rendah dari perkiraan Provinsi yakni pada angka 79,49. Deviasi ini didasarkan pada masih berkuatatnya Kota Padang Panjang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pasca pandemi Covid-19 dan masih adanya bayang-bayang ancaman inflasi tinggi di tahun 2024. Sedangkan Gini rasio diperkirakan dapat mencapai angka 0,292 yang sedikit lebih optimis dari angka perkiraan Provinsi Sumbar yakni 0,297.

### **3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang

cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya khususnya dalam bidang keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
2. Fungsi APBD antara lain yakni otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
3. Prinsip-prinsip penganggaran diantaranya terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Dengan memperhatikan hal di atas, maka dirumuskan kebijakan keuangan daerah tahun 2024 sebagai berikut :

### **3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. Dana Perimbangan yang meliputi : dana alokasi umum, dana alokasi khusus dana bagi hasil, dan;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah.

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya :

- a. Kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional.
- b. Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM;
- c. Kebijakan transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah
- d. Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya;
- e. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD;
- f. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Pendapatan daerah Kota Padang Panjang pada tahun 2023 sebagaimana dialokasikan pada APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023 diharapkan mengalami pertumbuhan sebesar 1,13 persen dari tahun 2022 yakni dari realisasi sebesar Rp.538.394.280.649.03 pada Tahun Anggaran 2022 naik hingga menjadi Rp.544.463.225.681,00 pada tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh makin membaiknya kondisi ekonomi secara umum sehingga berdampak pada pertumbuhan PAD meskipun Pendapatan Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Transfer antar Daerah menurun.

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah lebih banyak berasal dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Sejenisnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2023 pergerakan ekonomi masyarakat sudah bangkit pasca terjadinya kemunduran akibat Covid-19. Tahun 2023 dialokasikan pajak daerah dapat sebesar Rp.10.250.000.000,-, artinya naik 4,76 persen dari realisasi tahun 2022 dengan angka Rp.9.607.630.952,-. Berdasarkan trend tersebut serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian Pasca Pandemi Covid-19 yang mulai menunjukkan kondisi yang lebih baik, maka tahun 2024 Pendapatan dari Pajak Daerah dapat diperkirakan naik 2 persen atau diperkirakan dapat mencapai angka Rp.10.250.000.000,-. Komponen utama dari pendapatan pajak daerah adalah dari

pajak bumi dan bangunan serta Pajak Restoran dan rumah makan serta Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Disamping itu pendapatan dari Retribusi Daerah pada 2023 dialokasikan naik dari realisasi 2022, yakni sebesar Rp4.527.723.404,00 di tahun 2022 naik menjadi Rp5.865.200.000,00 tahun 2023. Peningkatan ini terjadi pada hampir seluruh jenis retribusi daerah. Seiring dengan mulai membaiknya pergerakan aktifitas ekonomi diharapkan tahun 2024 pendapatan dari Retribusi Daerah akan naik dari asumsi tahun 2023.

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah tumbuh -56,67 persen pada tahun 2023, yakni dari Rp65.012.556.589,03 tahun 2022 naik menjadi Rp74.704.000.200,00 tahun 2023. Sumber peningkatan terbesar pendapatan ini adalah dari pendapatan jasa giro, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah dan pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan. Tahun 2024 pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah diperkirakan dapat Kembali tumbuh sehingga diproyeksikan pada angka Rp.76.200.000.000,00.

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada 2023 mengalami penurunan sebesar 3,17 persen, yakni dari Rp6.565.068.670,00 tahun 2022 turun menjadi Rp6.356.882.481,00 tahun 2023. Namun untuk tahun 2024 diasumsikan meningkat hingga dapat diperkirakan sebesar Rp.6.500.000. 000,-.

Selanjutnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2023 mengalami pengurangan 1,4 persen yakni dari Rp450.760.096.758,00 menjadi Rp444.460.643.000,00 tahun 2023. Pengurangan ini disebabkan karena berkurangnya pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Untuk proyeksi tahun anggaran 2024, penerimaan dana transfer antar pemerintah daerah diproyeksikan naik sebesar 2 persen dari target tahun anggaran 2023, yakni naik menjadi Rp25.000.000.00,00. Sementara untuk transfer dari pemerintah pusat, dari Pos Dana Alokasi Umum diproyeksikan naik sebesar 1 persen dan dari DID diproyeksikan sama dengan Tahun Anggaran 2023. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 belum dimasukkan dalam perhitungan karena akan sangat tergantung pada menu DAK yang akan tersedia untuk masing-masing daerah pada tahun 2024 nantinya

Berdasarkan penjelasan diatas, perkembangan realisasi pendapatan Tahun 2021 dan 2022 serta target pendapatan daerah Kota Padang Panjang pada Tahun 2023 dan proyeksi 2024 dan 2025, disajikan pada tabel 3.3 di bawah ini.

**Tabel 3.3**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2021 s.d 2025**

URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET 2023	PROYEKSI TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN 2025
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>570.435.613.984,15</b>	<b>538.394.280.649,03</b>	<b>544.463.225.681,00</b>	<b>508.931.375.000,00</b>	<b>515.928.871.000,00</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>93.078.598.622,15</b>	<b>85.712.979.615,03</b>	<b>96.992.582.681,00</b>	<b>98.932.504.000,00</b>	<b>100.930.000.000,00</b>
Pajak Daerah	8.690.622.734,00	9.607.630.952,00	10.066.500.000,00	10.250.000.000,00	10.500.000.000,00
Retribusi Daerah	5.110.089.222,00	4.527.723.404,00	5.865.200.000,00	5.982.504.000,00	6.100.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.356.882.481,00	6.565.068.670,00	6.356.882.481,00	6.500.000.000,00	6.630.000.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	73.921.004.185,15	65.012.556.589,03	74.704.000.200,00	76.200.000.000,00	77.700.000.000,00
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>469.578.642.449,00</b>	<b>450.760.096.758,00</b>	<b>444.460.643.000,00</b>	<b>406.748.871.000,00</b>	<b>411.498.871.000,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	437.252.759.204,00	421.985.012.110,00	419.960.643.000,00	381.748.871.000,00	385.748.871.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.325.883.245,00	28.775.084.648,00	24.500.000.000,00	25.000.000.000,00	25.750.000.000,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>7.778.372.913,00</b>	<b>1.921.204.276,00</b>	<b>3.010.000.000,00</b>	<b>3.250.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.778.372.913,00	1.921.204.276,00	3.010.000.000,00	3.250.000.000,00	3.500.000.000,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2023

Berdasarkan uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Padang Panjang hanya 17,37 persen. Artinya penyelenggaraan keuangan pemerintahan Kota Padang Panjang masih sangat tergantung pada transfer dari Pemerintah Pusat.

Kebijakan pendapatan daerah Kota Padang Panjang untuk tahun anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur yang diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan, dengan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Melakukan kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah dalam meningkatkan pengawasan pemungutan pajak melalui *system monitoring online*.
- 2) Melaksanakan kerjasama dengan Direktorat Jendral Pajak Sumatera Barat dan Jambi dalam Pengoptimalan Penerimaan Pajak, Dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah dan Layanan Perizinan melalui *Joint Analysis, Joint Audit, Secondment* sekaligus Pemanfaatan Data dan Informasi Perpajakan dan Retribusi, juga pemanfaatan bersama fasilitas, sarana/prasarana, Teknologi Informasi dalam bidang layanan Perpajakan dan Retribusi.

- 3) Melakukan kegiatan yang inovatif untuk menumbuhkan animo dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak seperti pelaksanaan Pekan Pajak Daerah.
- 4) Menerapkan sistem informasi pada proses pemungutan pajak.
- 5) Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan menetapkan standar prosedur pelayanan sehingga masyarakat memiliki kapasitas atas layanan yang diterima
- 6) Melakukan pemutakhiran data objek pajak dan wajib pajak daerah melalui pemantauan ke lapangan secara berkala dengan updating peta dan dokumen lain bagi objek pajak baru dan menerbitkan NPWPD bagi wajib pajak baru yang ditetapkan.
- 7) Melakukan tindakan yang lebih tegas terhadap pelanggaran dalam penerapan pajak daerah dan retribusi.
- 8) Melakukan koordinasi secara berkala dengan OPD pengelola retribusi secara berkala dan mencari solusi atas setiap kendala yang ada.
- 9) Melakukan Kajian atas potensi pajak daerah yang belum teroptimalkan.
- 10) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
- 11) Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam hal pemenuhan penyampaian data data keuangan secara rutin secara tepat waktu sebagai salah satu prasyarat pencairan dan perimbangan
- 2) Meningkatkan akurasi data sebagai dasar perhitungan alokasi dana perimbangan.

Selanjutnya Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dari Kelompok Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah:

- 1) Mengoptimalkan data pendukung perhitungan potensi bagi hasil propinsi dan
- 2) Pengawasan secara komprehensif terhadap perizinan pendapatan daerah.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut.

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
  - a. penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;

- b. pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengenaan sanksi atas wajib pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
  - c. peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
  - d. melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui aplikasi perbankan ataupun aplikasi pembayaran non tunai lainnya
  - e. penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
  - f. revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan; dan
  - g. optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah
2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:
- a. Koordinasi dengan KP2KP Padang Panjang secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
  - b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
  - c. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK, DID dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).

### **3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Dengan memperhatikan proyeksi Pendapatan ditambah pembiayaan netto yang diperkirakan turun pada tahun 2024 dibandingkan dengan Pendapatan dan pembiayaan netto pada Tahun Anggaran 2023, maka dapat dipastikan untuk komponen belanja yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah juga mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023.

#### **a. Belanja Operasi**

Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Pemerintah Kota Padang Panjang akan memenuhi maksud Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 secara bertahap



mengurangi belanja pegawai untuk memenuhi batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total belanja dikurangi belanja sertifikasi guru dan belanja tunjangan guru PNSD paling lambat pada tahun anggaran 2025. Belanja pegawai diprioritaskan untuk pemenuhan belanja Gaji dan sebagainya serta belanja Tambahan Penghasilan Pegawai yang dihitung berdasarkan kondisi rill per Maret 2023 dengan acress 1,0%. Dengan melakukan beberapa penyesuaian dalam pengatiran tambahan penghasilan pegawai Kota Padang Panjang untuk tahun 2024 belanja ini diperkirakan turun ke angka Rp275.500.000.000,00. Pada belanja pegawai ini sudah mencakup belanja Gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, belanja honorarium, serta belanja pegawai BLUD

Seiring dengan penurunan jumlah belanja pada tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023, maka belanja Barang dan jasa adalah jenis belanja yang akan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Penghematan belanja akan terjadi pada jenis belanja ini dengan mengurangi volume barang habis pakai, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya sehingga pada jenis belanja ini dapat diproyeksikan anggarannya sebesar Rp198.600.000.000,00

Selanjutnya pada komponen belanja Hibah juga diasumsikan berkurang, untuk lebih memprioritaskan pemenuhan belanja pokok dan prioritas pembangunan. Belanja hibah di tahun anggaran 2024 diproyeksikan untuk menampung beberapa hibah yang berulang setiap tahun anggaran seperti Hibah untuk KONI, PMI, Pramuka. Disamping itu belanja bantuan keada Partai Politik juga dialokasikan di pos belanja Hibah

#### **b. Belanja Modal**

Pada jenis belanja modal, untuk belanja infrastruktur Pemerintah Kota Padang Panjang tetap berusaha mempertahankan alokasi anggaran belanja modal sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk belanja Modal tahun anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp24.731.375.000,00,00

#### **c. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga yang akan digunakan untuk pendanaan belanja kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya maka belanja ini diproyeksikan untuk tahun 2023 yaitu Rp2.000.000.000,00

Untuk lebih jelasnya gambaran realisasi dan proyeksi belanja daerah tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini :

**Tabel 3.4**  
**Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2021 s/d Tahun 2025**

URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET 2023	PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>555.719.900.371,67</b>	<b>545.279.349.579,57</b>	<b>600.963.225.681,00</b>	<b>512.931.375.000,00</b>	<b>524.928.871.000,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>497.085.255.883,51</b>	<b>501.010.034.129,19</b>	<b>534.005.021.624,00</b>	<b>486.200.000.000,00</b>	<b>479.165.000.000,00</b>
Belanja Pegawai	277.397.396.272,00	274.857.484.130	288.387.086.322,00	274.500.000.000,00	277.245.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa	211.448.725.752,21	215.736.970.906	230.678.802.922,00	198.600.000.000,00	188.670.000.000,00
Belanja Subsidi			73.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00
Belanja Hibah	6.530.264.177,00	5.560.242.093	12.426.632.380,00	10.500.000.000,00	10.605.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	1.708.869.682,30	4.855.337.000	2.439.500.000,00	2.500.000.000,00	2.525.000.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>58.117.257.988,16</b>	<b>44.131.565.100,38</b>	<b>64.958.204.057,00</b>	<b>24.731.375.000,00</b>	<b>43.763.871.000,00</b>
Belanja Modal Tanah	20.617.652.200,00				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.046.108.011,44	8.625.333.039	8.034.833.806,00		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.230.551.413,04	19.894.170.109	47.578.267.251,00		
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.721.942.992,68	14.267.020.507	8.460.802.200,00		
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.501.003.371,00	1.345.041.446	884.300.800,00		
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>517.386.500,00</b>	<b>137.750.350,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>
Belanja Tidak Terduga	517.386.500,00	137.750.350	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2023

### 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan daerah Kota Padang Panjang pada beberapa tahun 2023 yang bersumber dari SiLPA 2022 menunjukkan tren menurun yang mengindikasikan sudah membaiknya serapan OPD terhadap anggaran pada masing-masing OPD dan menunjukkan proses penganggaran yang sudah membaik pula. Dengan berkaca pada APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023, dimana penganggaran belanja untuk kegiatan OPD sudah disusun seefisien mungkin, maka penerimaan pembiayaan daerah yang seluruhnya bersumber dari proyeksi SiLPA ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00

Sementara itu untuk pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 hanya merencanakan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00,- karena sangat terbatasnya pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2021 s.d Tahun 2025**

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	50.810.925.556,00	65.526.639.168,47	57.500.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.810.925.556,00	65.526.639.168,47	57.500.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAN</b>	-	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	50.810.925.556,00	65.526.639.168,47	56.500.000.000,00	4.000.000.000,00	9.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2023

# **BAB IV**

## **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

### **4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024**

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditunjukkan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

#### **4.1.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024**

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2023 mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu

**"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".** Secara visual, kerangka pikir tema dimaksud ditunjukkan sebagai berikut

**Gambar 4.1**  
**Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024**



Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020- 2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian targettarget pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

- 1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024.

#### 4.1.2 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu “**Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan**”, dengan penjabaran misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat**

Misi	Tujuan	Sasaran
<b>Misi 1:</b> Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Menurunnya prevalensi stunting
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
<b>Misi 2:</b> Meningkatkan Tata kehidupan kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara’-Syara’ Basandi Kitabullah	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatnya Budaya Literasi
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
<b>Misi 3:</b> Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan

Misi	Tujuan	Sasaran
<b>Misi 4:</b> Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/ Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
		Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
		Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
		Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor
		Meningkatnya pertumbuhan Investasi
		Meningkatnya peran ekonomi digital
<b>Misi 5:</b> Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
<b>Misi 6:</b> Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
		Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
<b>Misi 7:</b> Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yaitu: **“Transformasi Sektor Strategis yang Inklusif dan Berkelanjutan”**

#### **4.1.3 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024**

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta nantinya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 mengacu pada RPD Kota Padang Panjang 2024-2026,

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diterjemahkan kedalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah maupun perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Target dari tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 dirumuskan dengan berdasarkan sasaran RPD 2024-2026, hasil evaluasi pembangunan tahun 2022, serta kebijakan pembangunan nasional tahun 2024. Berikut dijelaskan penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024.



**Tabel 4.2**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2024**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing		<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>78,78</b>	<b>78,64</b>	<b>79,02</b>
		1 Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	11,92	11,93	11,94
			Harapan Lama Sekolah	15,07	15,08	15,09
		2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	73,02	73,03	73,04
			Prevelansi Stunting	14,76	13,98	11,05
		3 Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayan Gender	69,44	70,84	71,44
			Predikat Kota Layak Anak	nindya	nindya	utama
		4 Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Status Kota layak Pemuda			Menuju Pratama
			Rasio capaian prestasi keolahragaan		0,10	0,20
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>56,22</b>	<b>56,42</b>	<b>57,62</b>
		5 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	62,30	63,10	63,98
			IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah)	70,61	70,85	71,00
			Indeks Sistem Merit	Sangat Baik (325)	Sangat Baik (328)	Sangat Baik (330)
			Maturitas SPIP	2+	2+	3 (3.1)
			Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	85	88	90
			Indeks SPBE	2,09	2,40	2,70
3	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan		<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>4,75</b>	<b>5,13</b>	<b>5,52</b>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TARGET 2023	TARGET 2024			
		6	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah	LPE sektor Perdagangan	3,73	4,26	4,8		
				LPE sektor pertanian	5,04	5,08	5,13		
				LPE sektor penyediaan makan dan minum	7,62	7,86	8,09		
		7	Meningkatnya investasi	Persentase pertumbuhan nilai investasi	6	6	6		
		8	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Tingkat kemiskinan	5,14	5,06	4,99		
				Tingkat Pengangguran Terbuka	4,84	4,69	4,72		
		9	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengeluaran per Kapita	11,15	11,228	11,328		
		<b>4</b>	<b>Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis</b>		<b>Indeks Rasa Aman</b>	<b>Aman (86,04)</b>	<b>Aman (92,57)</b>	<b>Aman (86,39)</b>	
				10	Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase Pemajuan Kebudayaan			53,00
Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	75					80	85		
11	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum			Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100		
12	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial			Angka PPKS	5,43%	5,15%	5,25%		
<b>5</b>	<b>Terwujudnya infrastruktur dan Lingkungan hidup yang berkualitas</b>		<b>Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)</b>	<b>90,13</b>	<b>90,33</b>	<b>90,53</b>			
				<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	<b>66,61</b>	<b>66,80</b>	<b>67-68</b>		
				13	Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	IKLI kePUan	89,66	89,86	90,06
						IKLI perkim	96,8	96,85	96,90
						IKLI perhubungan	96,62	96,69	96,76
				14	Meningkatnya konsistensi penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	82	82,5	83

NO	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
		15	Meningkatnya kualitas udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	46,07	46,5	46-48
				Indeks Kualitas Udara	91,29	91,5	91-92
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,18	56,18	56,18

Disamping itu juga perumusan target sasaran pembangunan Kota Padang Panjang juga memperhatikan target sasaran pembangunan Sumatera Barat dan Nasional. Berikut dijelaskan sinkronisasi target sasaran pembangunan tahun 2024 Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

**Tabel 4.3**  
**Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang Tahun 2024**

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	TARGET RKP TAHUN 2024	TARGET RKPD PROVINSI SUMBAR TAHUN 2024	TARGET RKPD KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,7	4,36	5,52
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5	5,62	4,99
3	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,0-5,7	5,70	4,72
4	Indeks Gini (Ratio)	0,374-0,377	0,290	0,292
5	Indek Pembangunan Manusia	73,99-74,02	74,23	79,02

Sumber: Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat dan RKP Tahun 2024

## 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun keempat, identifikasi permasalahan di daerah maupun nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Disamping itu, perumusan prioritas pembangunan Kota Padang Panjang juga mempertimbangkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sesuai RKP Tahun 2024, prioritas pembangunan provinsi Sumatera Barat sesuai RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, serta arah kebijakan tahun pertama RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

### 4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Sesuai dengan tema pembangunan nasional tahun 2024 yakni ***“Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”*** dilaksanakan sebagai upaya akselerasi dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta dimanifestasikan dalam sasaran dan arah kebijakan pembangunan. Pada tahun 2024, sasaran dan arah kebijakan dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN). Setiap penggambaran PN mencakup pendahuluan dengan muatan isu strategis/tantangan yang menjadi dasar penentuan sasaran capaian PN, arah kebijakan, serta strategi perwujudan kebijakan terkait. Penjelasan PN dilanjutkan dengan penjelasan Program Prioritas (PP) dan Proyek

Prioritas Strategis/Major Project (MP). Adapun Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**1. Prioritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

Prioritas Nasional ini diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor energi, pertanian, perikanan dan kelautan, UMKM, industri pengolahan, dan pariwisata, didukung penguatan reformasi fiskal, dan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi, ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; digitalisasi, dan ekonomi hijau

**2. Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

Pengembangan wilayah diarahkan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada tahun 2024 diarahkan pada upaya mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah

**3. Prioritas Nasional 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**

Pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu modal dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan SDM tahun 2024 akan difokuskan pada percepatan pencapaian target RPJMN Tahun 2024 melalui keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, percepatan pemulihan pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

**4. Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan telah menjadi instrumen penting untuk membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan mampu mendayagunakan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

**5. Prioritas Nasional 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

Pembangunan infrastruktur tahun 2024 difokuskan sebagai pilar pendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut.

**6. Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan upaya mengantisipasi perubahan iklim pada tahun 2024 difokuskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan sumber daya alam, pengurangan risiko dan tangguh bencana, guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan

**7. Prioritas Nasional 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya dilakukan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, maupun global, termasuk kerja sama pembangunan internasional. Percepatan transformasi ekonomi juga didukung dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan yang responsif, penguatan pengawasan sistem merit dan netralitas ASN, pemindahan ASN ke IKN, serta fokus pada peningkatan kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024, ditetapkan strategi pembangunan yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**  
**Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan**  
**Pembangunan Nasional Tahun 2024**

NO	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
I	Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1	Memanfaatkan dan memuktahirkan data registrasi social ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan social
		2	Konfergensi pelaksanaan program-program perlindungan social
		3	Intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan
		4	Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan
		5	Peningkatan kualitas konsumsi pangan
II	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	1	Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan
		2	Reformasi system perlindungan social
		3	Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
		4	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
		5	Meningkatkan kualitas anak,perempuan dan pemuda
		6	Meningkatkan produktivitas dan daya saing
III	Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan	1	Meningkatkan daya saing dan kompleksitas industry yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok
		2	Menyediakan iklim yang kondusif dalam penyusunan riset nasional
IV	Penguatan daya saing usaha	1	Meningkatkan kualitas teknologi informasi
		2	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi
		3	Mewujudkan investasi yang berkualitas melalui penciptaan iklim investasi yang rama dan kondusif
		4	Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi
		5	Meningkatkan moderenisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan
V	Pembangunan rendah karbon dan transisi energi	1	Melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sector prioritas (energy berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industry hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular,serta karbon biru dan pesisir)
		2	Koservasi lahan produktif
		3	Menguatkan transisi energi melalui pemerataan akses energi ber keadilan
		4	Meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dab berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan

NO	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
VI	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	1	Meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh
		2	Meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan simpan air, jaga air, dan hemat air
		3	Meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pemabangunan sekonomi dan meningkatkan ketahan kebencanaan di setiap wilayah
		4	Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi
		5	Meingkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah 3TP (tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan)
VII	Percepatan pembangunan ibukota nusantara	1	Membangun gedung pemerintahan dan hunian
		2	Membangun infrastruktur utama
VIII	Pelaksanaan pemilu 2024	1	Mendorong terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal
		2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan
		3	Mengamankan penyelenggaraan pemilu tahun 2024
		4	Mendukung penyelenggaraan pemilu diluar negeri

#### 4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien guna mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan melalui tujuh Misi. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan terhadap aspek yang memberikan dampak besar dan mempunyai daya ungkit untuk pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Strategi umum yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pembangunan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung pembangunan pada semua aspek kehidupan, baik sebagai pelaku maupun sebagai penerima manfaat atau tujuan pembangunan yang dilakukan.



- b. Mendayagunakan nilai-nilai gotong royong dan kerjasama yang melibatkan semua komponen masyarakat baik di daerah maupun di rantau dengan pendekatan pembangunan terpadu yang bersifat holistik dan integratif.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk pembangunan ekonomi yang semakin terbuka di bidang pertanian, pariwisata, industri kelautan dan komunikasi serta energi dan potensi lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- d. Menekan kesenjangan pembangunan antar wilayah untuk pemerataan pembangunan dan hasilnya baik di bidang infrastruktur maupun di bidang sosial dan ekonomi.
- e. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan guna menjaga keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sesuai dengan RPJMD 2021-2026 akan difokuskan pada peningkatan ekonomi daerah hal juga mendukung pencapaian Tema RKP tahun 2024 dalam **Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan** maka Pembangunan tahun 2024 akan difokuskan juga pada Transformasi Sektor Strategis yang Inklusif dan Berkelanjutan, adapun Prioritas dan arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 4.5**  
**Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Daerah**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024**

NO	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	1	Efektifitas dan efesiensi pemanfaatan alokasi anggaran Pendidikan dan Kesehatan.
		2	Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial
		3	Optimalisasi Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan Kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari Ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intrevensi secara kontinue (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif
		4	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral dengan pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
		5	Percepatan penurunan prevalensi stunting melalui pelaksanaan Aksi Konvergensi dengan pelibatan semua pihak secara intensif dan berkelanjutan serta peningkatan komitmen Pemerintah daerah, desa dan nagari.

NO	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
		6	Fokus pada intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan serta Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 guna pencegahan balita stunting
		7	Melakukan Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum dalam penanganan stunting.
		8	Meningkatkan akses serta optimalisasi perbaikan sarana dan prasana Pendidikan SMA/SMK/SLB guna mendukung proses pembelajaran yang kondusif dan nyaman bagi siswa dan tenaga pendidik.
		9	Peningkatan kapasitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta distribusi tenaga pendidik secara merata
		10	Meningkatkan akses Pendidikan bagi penduduk dengan penyandang disabilitas dengan memberikan layanan penuh terutama disabilitas dalam Panti Sosial
		11	Meningkatkan kompetensi dan keterampilan Angkatan Kerja terutama berpendidikan menengah keatas sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri serta berbasiskan potensi daerah.
II	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	1	Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbunlinmas (Sub bidang Trantib dan Damkar)
		2	Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek Pemajuan Kebudayaan terutama dalam penciptaan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari pemanfaatan Objek Pemajuan kebudayaan.
		3	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan ekspresi budaya untuk mendukung penciptaan karya budaya oleh masyarakat.
		4	Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah serta pelibatan aktif peran serta masyarakat dalam pelestarian objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar Budaya
		5	Meningkatkan ketahanan keluarga, kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan dan pemenuhan hak anak
		6	Menjadikan perpustakaan daerah menjadi pusat kegiatan literasi masyarakat
		7	Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta kerukunan antar umat beragama.
		8	Menguatkan perencanaan dan penganggaran responsive gender dan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari Pengarusutamaan Pembangunan Untuk Semua

NO	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
III	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	1	Mengalokasikan belanja daerah untuk sektor pertanian sebesar 10% dari APBD
		2	Menyiapkan benih/bibit bermutu (pertanian, kelautan perikanan dan peternakan)
		3	Meningkatkan pengawasan agroinput dan atau sumber daya kelautan, perikanan dan hutan
		4	Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian, peternakan dan kelautan dan perikanan
		5	Peningkatan upaya minimalisasi resiko kerugian usaha tani terutama kegagalan panen atau produksi baik oleh hama penyakit dan bencana alam
		6	Meningkatkan efisiensi usaha pasca panen pengolahan hasil dan peningkatan mutu dan nilai tambah produksi pertanian, peternakan kelautan dan perikanan serta kehutanan
		7	Diversifikasi pangan dan usaha produktif yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi
		8	Meningkatkan kelancaran akses distribusi pangan dan aksesibilitas produksi pangan
		9	Optimalisasi penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian
		10	Mempertahankan produksi padi sebagai lumbung nasional
		11	Meningkatkan produksi jagung, ternak unggas dan kambing
		12	Meningkatkan kualitas SDM Pertanian terutama dalam kemampuan dalam penguasaan teknologi serta hilirisasi produk pertanian.
		13	Meningkatkan akses pemasaran produk hasil pertanian dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMDes dalam pemasaran hasil pertanian serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran hasil pertanian
IV	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	1	Mengembangkan UMKM di sekitar Kawasan ekowisata secara masif sesuai potensi masing-masing daerah.
		2	Menjaga tingkat inflasi tetap pada batas wajar.
		3	Penciptaan iklim investasi dan kemudahan berinvestasi.
		4	Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian
		5	Mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif.
		6	Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula.

NO	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
		7	Meningkatkan metode pemasaran produk UMKM melalui digitalisasi dengan memanfaatkan ecommerce yang telah ada.
		8	Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
<b>V</b>	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	1	Membangun industri pariwisata melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana destinasi wisata unggulan
		2	Meningkatkan atraksi seni dan budaya serta membangun suasana festival yang meriah pada pusat keramaian dan obyek wisata unggulan
		3	Meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan domestic
		4	Penguatan Brand Image Pariwisata di Sumatera Barat
		5	Memperjelas segmentasi Wisatawan pada masing-masing daerah
		6	Melakukan Strategi promosi efektif yang terpadu melalui public campaign dan promosi besar-besaran untuk membangun awareness masyarakat
		7	Mendorong semua pelaku usaha pariwisata Sumbar (terutama obyek wisata unggulan) agar segera memenuhi sertifikasi CHSE, sertifikasi Halal serta sertifikasi/ standar internasional lainnya
		8	Meningkatkan investasi pada bidang Pariwisata
		9	Pengembangan Kawasan pariwisata secara terintegrasi, terpadu dan menyeluruh
		10	Pemberdayaan para pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan potensi daerah
<b>VI</b>	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	1	Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman.
		2	Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantumbulinmas (Sub bidang kebencanaan)
		3	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi ke Kawasan sentra pertanian, industry dan pariwisata.
		4	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi ke Kawasan daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan.
		5	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan
		6	Peningkatan rasio elektrifikasi untuk kelompok masyarakat tidak mampu dan daerah listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan
		7	Peningkatan bauran energy dan pengembangan Energi Terbarukan

NO	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
		8	Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana dalam mitigasi dan kesiapsiagaan
		9	Pengendalian pencemaran, sampah dan limbah dan perusakan lingkungan hidup
		10	Percepatan capaian sanitasi layak
		11	Percepatan pembangunan gedung strategis provinsi
		12	Penyediaan PSU kawasan pemukiman dan pengurangan luasan kawasan kumuh
		13	Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, bangunan konservasi dan bangunan pengendali daya rusak air
		14	Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang
VII	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	1	Meningkatkan kualitas ASN dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah melalui peningkatan kompetensi ASN dan stakeholder melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
		2	Meningkatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan Kelas Jabatan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
		3	Mengoptimalkan penerapan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi.
		4	Meningkatkan kinerja Indeks SPBE dengan menyusun dan menetapkan kebijakan yang mengatur tentang Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
		5	Melakukan sosialisasi dan komunikasi serta advokasi dengan Perangkat Daerah dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
		6	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
		7	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.
		8	Meningkatkan Optimalisasi penggunaan dan pengamanan aset daerah.
		9	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
		10	Optimalisasi penerimaan pajak daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah.

NO	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
		11	Implementasi Inovasi dan digitalisasi pada Unit kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi Sumatera Barat.
		12	Dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024.

#### 4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024

Tahun 2024 adalah tahun pertama pelaksanaan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Oleh sebab itu, maka tahun 2024 arah kebijakan yang dilaksanakan adalah penuntasan pencapaian target pembangunan yang belum tercapai dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dan pencapaian target RPD Tahun 2024-2026. Adapun program prioritas pembangunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Prioritas dan Fokus Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024**

NO	PRIORITAS		FOKUS
I	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	1	Meningkatkan produktifitas sektor perdagangan
		2	Meningkatkan produktifitas sektor pertanian
		3	Meningkatkan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif
II	Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	1	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin
		2	Meningkatkan kompetensi pencari kerja
		3	Meningkatkan kesempatan kerja
III	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	1	Permemuhan sarana dan prasarana Pendidikan sesuai standar
		2	Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
		3	Peningkatan daya saing kepemudaan dan olahraga
IV	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Percepatan penurunan stunting
		2	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
		3	Peningkatan mutu pelayanan Kesehatan
V		1	Penanganan banjir
		2	Penanganan sampah

NO	PRIORITAS		FOKUS
	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	3 4	Penanganan air limbah Peningkatan infrastruktur kota
VI	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)	1 2 3	Peningkatan kompetensi ASN Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik
VII	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	1 2 3 4 5	Meningkatkan trantibum Percepatan penanganan bencana Peningkatan kegiatan keagamaan di masyarakat Peningkatan kegiatan kebudayaan di masyarakat Penanganan masalah kesejahteraan social

Disamping itu, untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2024 juga memperhatikan keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah. Sinkronisasi prioritas dan tema pembangunan nasional, provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel dan gambar berikut :

**Tabel 4.7**  
**Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Barat**  
**dan Kota Padang Panjang Tahun 2024**

Prioritas Nasional	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat	Prioritas RKPD Kota Padang Panjang
PN 1 Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim	PP 3 Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	PD 2 Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
PN 2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	PP1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing  PP 2 Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	PD 3 Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing  PD 4 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat  PD 7 Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis
PN 3 Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan	PP 4 Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/	PD 1 Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah

Prioritas Nasional	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat	Prioritas RKPD Kota Padang Panjang
	menengah serta ekonomi berbasis digital	
PN 4 Penguatan daya saing usaha	PP 5 Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	PD 1 Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah
PN 5 Pembangunan rendah karbon dan transisi energi	PP 6 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PD 5 Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
PN 6 Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	PP 6 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PD 5 Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
PN 7 Percepatan pembangunan ibukota nusantara.	PP 6 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PD 5 Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
PN 8 Pelaksanaan pemilu 2024	PP 7 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	PD 6 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)

Berdasarkan rumusan permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026 serta sinergitas pembangunan nasional, Provinsi dan Kota Padang Panjang, maka tema pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah:

**“Peningkatan Perekonomian dan Kualitas SDM Berkarakter dan Berdaya Saing”**

**Gambar 4.2**  
**Sinkronisasi Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Sumbang dan Kota Padang Panjang 2024**





Untuk dapat melaksanakan prioritas pembangunan tersebut serta dengan mempertimbangkan kemampuan daerah, maka dirumuskan program yang lebih konkrit, yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang. Berikut dijabarkan prioritas serta rencana program pembangunan daerah tahun 2024.

**Tabel 4.6**  
**Program Prioritas Pembangunan Daerah pada**  
**RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024**

N O	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET	OPD PELAKSANA
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilindungi, Dikembangkan, Dimanfaatkan Dan Dibina	2 Objek	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kinerja UKP Dan UKM Pada Fasilitas Kesehatan	88 Persen	Dinas Kesehatan
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	65%	Dinas Kesehatan
5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Indeks Pembinaan Dan Pengawasan Izin Dan Sertifikasi Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makan Minum	76.70%	Dinas Kesehatan
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat Yang Aktif	96.25%	Dinas Kesehatan
7	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Jaringan Irigasi Dengan Kondisi Baik	76,83 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Persentase Panjang Sungai Yang Dikonservasi	22,42 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
8	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak	86,57 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Dengan Bersanitasi Layak	90%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
10	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	87,34 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
11	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Ber IMB	46,10 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
12	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Infrastruktur Trotoar Dalam Kondisi Baik	85,67 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Persentase Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	93,74 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
13	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	61%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
14	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Per Tahun	0,21 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

N O	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET	OPD PELAKSANA
15	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Sertifikat Aset Tanah Dan Bangunan Pemko	81%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Persentase Sertifikat Aset Tanah Dan Bangunan Pemko	77%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
16	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Pemerintah Yang Tertangani	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan
17	Program Kawasan Permukiman	Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh	89,36 %	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan
18	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase Ketersediaan PSU Kawasan Permukiman Dalam Kondisi Baik	86,24 %	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan
19	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	96,62 %	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan
20	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
21	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
22	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Luas RTH Publik	4,23 %	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
23	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pembinaan/Verifikasi Lapangan Terhadap Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara Dan Pengumpulan Limbah B3	32%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
24	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan Yang Memiliki Persetujuan Lingkungan Terhadap Dokumen Persetujuan Lingkungan	55%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
25	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Persentase Cakupan Fasilitasi MHA Terkait PPLH	50%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
26	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
27	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1 Jenis	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
28	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Yang Tertangani	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
29	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah	98%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup

N O	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET	OPD PELAKSANA
30	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara Yang Terlindungi Dari Dampak Pelanggaran Perda Dan Trantibum	100%	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
32	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Waktu Tanggap (Respon Time Rate ) Daerah	10 Menit	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
33	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS Yang Tertangani	80%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
34	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat Miskin Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	86,98 %	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
35	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	100%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
36	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP Yang Dipelihara	100%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
37	Program Pemberdayaan Sosial	Persentasi Sumber Kesejahteraan Sosial Dan Kelembagaan Sosial Yang Aktif	75%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
38	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	100%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD	20%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
39	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Dan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalm Unit Pelayanan Terpadu	100 BTJ	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET	OPD PELAKSANA
40	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Indikator KLA Yang Terpenuhi	80%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
41	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Dan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalm Unit Pelayanan Terpadu	100 BTJ	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
42	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kegiatan Ketahanan Keluarga	62%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
43	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan Sebagai Bahan Perencanaan	100%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
44	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase CPR	62%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
45	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Dilatih	0.32%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
46	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	0.04%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
47	Program Hubungan Industrial	Persentase Peningkatan Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Yang Aktif	32%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
48	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Capaian Fasilitas Pengembangan Iklim Penanaman Modal	10%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
49	Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi Per Tahun	35.000.000.000 Rupiah	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
50	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Izin Yang Dikeluarkan Sesuai SOP	96,86 %	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
51	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat Kepatuhan Perusahaan	1 %	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
52	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	100%	Dinas Pangan Dan Pertanian
		Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	100%	Dinas Pangan Dan Pertanian
53	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Pangan Segar	100%	Dinas Pangan Dan Pertanian

N O	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET	OPD PELAKSANA
54	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Budidaya Ikan	751 Ton/Tahun	Dinas Pangan Dan Pertanian
55	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan	1 Jenis	Dinas Pangan Dan Pertanian
56	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Budidaya Ikan	751 Ton/Tahun	Dinas Pangan Dan Pertanian
57	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan	1 Jenis	Dinas Pangan Dan Pertanian
58	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	77%	Dinas Pangan Dan Pertanian
		Persentase Pemenuhan Sarana Peternakan	75%	Dinas Pangan Dan Pertanian
59	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	77%	Dinas Pangan Dan Pertanian
		Persentase Pemenuhan Prasarana Peternakan	75%	Dinas Pangan Dan Pertanian
60	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus	8,5 %	Dinas Pangan Dan Pertanian
61	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Yang Tertangani	75%	Dinas Pangan Dan Pertanian
62	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani Yang Mendapatkan Penyuluhan Inovasi Teknologi Pertanian	13,8 %	Dinas Pangan Dan Pertanian
63	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	77%	Dinas Pangan Dan Pertanian
		Persentase Pemenuhan Sarana Peternakan	75%	Dinas Pangan Dan Pertanian
64	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	77%	Dinas Pangan Dan Pertanian
		Persentase Pemenuhan Sarana Peternakan	75%	Dinas Pangan Dan Pertanian
65	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	77%	Dinas Pangan Dan Pertanian
		Persentase Pemenuhan Prasarana Peternakan	75%	Dinas Pangan Dan Pertanian
66	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus	8,5 %	Dinas Pangan Dan Pertanian
67	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Yang Tertangani	75%	Dinas Pangan Dan Pertanian
68	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan	100%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
69	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil Usia 0-18 Tahun	100%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
70	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

N O	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET	OPD PELAKSANA
71	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Dan Agregat Kependudukan	3 Dokumen	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
72	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase Kepemilikan Keur Kendaraan Bermotor	68.00%	Dinas Perhubungan
		Persentase Layanan Angkutan Darat	0.06%	Dinas Perhubungan
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0.003700 Angka	Dinas Perhubungan
73	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik	44%	Dinas Komunikasi Dan Informatika
74	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3,60 Indeks	Dinas Komunikasi Dan Informatika
75	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral Yang Berkualitas	35%	Dinas Komunikasi Dan Informatika
76	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks KAMI	456 Indeks	Dinas Komunikasi Dan Informatika
77	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi Sehat	22%	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
78	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengawas Dan Pengurus Yang Mengikuti Pelatihan	56%	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
79	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Memiliki Usaha/Jumlah Koperasi Yang Ada	18,00 %	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
80	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengawas Dan Pengurus Yang Mengikuti Pelatihan	56%	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
81	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase Peningkatan Omset Usaha	10%	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
82	Program Pengembangan Umkm	Persentase Kenaikan Pendapatan UMKM Yang Di Bantu	40%	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
83	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Yang Memiliki Izin Usaha Di Bidang Perdagangan	34%	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
84	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok	6%	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
85	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pengawasan Alat UTP Yang Bertanda Tera Sah	60%	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
86	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Ber-SNI	90%	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
87	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase IKM Yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya Melalui Digital	15%	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
88	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM Yang Difasilitasi Mendapatkan Sertifikat Dan Standarisasi Produk Industri (Sertifikat	5%	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

N O	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET	OPD PELAKSANA
		Halal,MD,GMP.SNI Dan Merk)		
89	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Peningkatan IKM Yang Memiliki Perizinan Perindustrian	45 Ikm	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
90	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemenuhan Indikator Kota Layak Pemuda	3 Indikator	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
91	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina	44 Cabang	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
92	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Yang Dibina	1 Organisasi	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
93	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rasio Lama Kunjungan Wisata	1,15 -	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
94	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	600000 Orang	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
95	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	70 Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
96	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Sudah Dibina	14 Sub Sektor	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
97	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Anggota Pustaka	3200 Orang	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
98	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Peningkatan Koleksi Naskah Kuno	0%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
99	Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD Yang Menerapkan Arsip Secara Barku	50%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
100	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Jumlah Arsip Statis Yang Terselamatkan/Jumlah Arsip Yang Tersimpan Pada LKD	5000 Dokumen	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
101	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terselenggaranya Kebijakan / Kegiatan Sektor Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100%	SEKRETARIAT DAERAH
102	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Terselenggaranya Kebijakan /Kegiatan Pada Bagian Perekonomian Dan Pembangunan	60%	SEKRETARIAT DAERAH
103	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP Setdako	- Nilai	SEKRETARIAT DAERAH
104	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Terasilinasinya Tugas Dan Fungsi DPRD Secara Kelembagaan Sebagai Fungsi Anggaran, Fungsi Pengawasan Dan Fungsi Legislasi	90%	SEKRETARIAT DPRD
105	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Tata Kelola Sekretariat DPRD	100%	SEKRETARIAT DPRD

N O	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET	OPD PELAKSANA
10 6	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	82%	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
10 7	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Memiliki Dokumen Perencanaan Yang Baik	85%	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
10 8	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dihasilkan	6 Dokumen	
		Persentase Inovasi Daerah Yang Memiliki Nilai Kematangan Di Atas 90	72%	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
10 9	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	Tepat Waktu -	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Penyusunan Produk Anggaran Yang Tertib Efisien Dan Tepat Waktu	Tepat Waktu -	Badan Pengelola Keuangan Daerah
11 0	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyajian Laporan Barang Milik Daerah Secara Akurat Dan Tepat Waktu	Tepat Waktu -	Badan Pengelola Keuangan Daerah
11 1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	2%	Badan Pengelola Keuangan Daerah
11 2	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Sistem Merit	330 Nilai	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11 3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN Yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi Melalui Diklat, Bimtek, Dan Sosialisasi	7,6 %	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11 4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan Yang Tuntas Dilaksanakan	88%	Inspektorat Daerah
11 5	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Capaian Aksi Pada Aplikasi MCP	91%	Inspektorat Daerah
11 6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan Pada Kecamatan Padang Panjang Timur	39.98%	Kecamatan Padang Panjang Timur
11 7	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Layanan Pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100%	Kecamatan Padang Panjang Timur
11 8	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Trantibum Pada Kecamatan Padang Panjang Timur	10 Laporan	Kecamatan Padang Panjang Timur
11 9	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanakan Pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100%	Kecamatan Padang Panjang Timur
12 0	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	26%	Kecamatan Padang Panjang Barat



N O	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET	OPD PELAKSANA
		Pada Kecamatan Padang Panjang Barat		
12 1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Layanan Pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100%	Kecamatan Padang Panjang Barat
12 2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Ketentraman Ketertiban Umum Pada Kecamatan Padang Panjang Barat	10 Laporan	Kecamatan Padang Panjang Barat
12 3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanakan Pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100%	Kecamatan Padang Panjang Barat
12 4	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Yang Mendapat Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik
12 5	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemahaman Terhadap Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	80%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik
12 6	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik
12 7	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pencegahan Terhadap Aktivitas Ormas Yang Bertentangan Dengan Peraturan Yang Berlaku	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik
12 8	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik
12 9	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kewaspadaan Nasional Yang Tertangani Di Daerah	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik

### 4.3 Inovasi Daerah

Inovasi biasanya berkaitan erat dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang. Inovasi juga merupakan salah satu parameter dari daya saing daerah dalam mewujudkan kesejahteraan yang tinggi, berkelanjutan dan tangguh dalam persaingan domestik maupun global. Meskipun demikian, budaya birokrasi pemerintahan sering kali dalam pelaksanaannya sangat berbeda dengan semangat inovasi. Hambatan fundamental yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif adalah struktur dan

budaya yang cenderung statis, kaku, dan memegang erat mekanisme status quo serta tidak menyukai perubahan.

Pada hakikatnya, urgensi inovasi bagi pemerintah daerah sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang sejatinya mendorong nilai-nilai perubahan dalam menciptakan budaya organisasi publik menjadi lebih berkualitas. Hal ini sejalan pula dengan semangat reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara. Oleh karena itu, dengan adanya kreativitas serta inovasi di dalam pemerintahan daerah diharapkan memiliki kepentingan strategis dalam memacu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kinerja pembangunannya optimal, berdaya saing dan berdaya tahan.

Penguatan inovasi daerah dipromosikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah didorong untuk memanfaatkan dan mengelola kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional secara keseluruhan. Secara khusus pasal 386 menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi.

Penyelenggaraan inovasi daerah tersebut secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Peraturan tersebut menetapkan tujuan inovasi daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Artinya, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan nilai tambah dan kualitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya melalui inovasi daerah. Kinerja pembangunan yang berkualitas ditandai dengan membaiknya indikator perekonomian daerah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, inovasi daerah merupakan variabel yang semestinya inheren dan menjadi budaya kerja aparatur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Pemerintah Kota Padang Panjang melalui misi III RPJMD periode 2018-2023, menyatakan bahwa salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan Padang Panjang yang berjaya adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inovatif dan partisipatif. Manifestasi dari pemerintah yang inovatif tersebut adalah meningkatnya kinerja pemerintah daerah dan perbaikan produktivitas perekonomian daerah. Oleh sebab itu diperlukan kemauan dan kemampuan dari seluruh perangkat daerah untuk berinovasi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, agenda inovasi daerah mesti berubah dari hanya sekedar hegemoni melahirkan produk namun juga mesti

didukung usaha-usaha yang berkesinambungan untuk ekosistem positif inovasi daerah. Untuk mewujudkannya diperlukan motivasi dari seluruh personil ASN Kota Padang Panjang. Motivasi tersebut harus ditumbuhkembangkan melalui mekanisme penyelenggaraan inovasi daerah yang sistematis dan terukur, serta dengan memberikan dukungan insentif dan penghargaan dalam berinovasi.

Penyelenggaraan inovasi daerah yang sistematis dan terukur diwujudkan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi inovasi yang telah disusun oleh perangkat daerah. Monitoring inovasi daerah merupakan tahapan Laboratorium Inovasi Daerah dalam kerangka kerja Deliver, atau tahapan D yang ke-4. Dalam hal ini, deliver terbagi menjadi dua, yaitu *deliver-launching*, dan *deliver monitoring*. *Deliver-launching* merupakan permulaan pelaksanaan inovasi yang ditandai dengan penandatanganan komitmen antara Walikota Padang Panjang dengan Kepala OPD, yang sudah diselenggarakan pada Desember 2020 saat momen Hari Jadi Kota. Selanjutnya adalah *deliver-monitoring* yang berbasis pada hasil dan bukti inovasi.

*Deliver-monitoring* merupakan tahapan utama dan menentukan dari keberlanjutan sebuah inovasi. Hal tersebut mengingat D1 (drum-up) baru sebatas perubahan mindset untuk menginspirasi, sehingga baru berwujud abstrak berupa semangat dan kemauan untuk berinovasi. Selanjutnya D2 (diagnose) dan D3 (desain) berkaitan dengan aspek teknis terkait penguasaan pengetahuan manajerial dan substantif inovasi, yang berwujud rencana aksi inovasi. *Deliver-monitoring* berada pada ranah aktualisasi dari inovasi yang telah direncanakan. Artinya, inovasi tersebut mulai diimplementasikan untuk memberikan kontribusi dan solusi terhadap permasalahan yang telah dipetakan oleh OPD.

Melalui *deliver-monitoring*, konsistensi OPD dalam mengimplementasikan inovasi dipantau berdasarkan instrumen monitoring. Instrumen tersebut mengidentifikasi pelaksanaan inovasi berdasarkan hasil dan bukti dukung implementasi inovasi. Dari hasil instrumen tersebut akan terlacak perkembangan inovasi beserta kendala dan hambatannya. Dari perkembangan tersebut selanjutnya tim monitoring akan memberikan kontrol berupa saran dan rekomendasi pengendalian inovasi agar sesuai dengan yang telah direncanakan.

Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Padang Panjang, mengoordinasikan dan memfasilitasi peningkatan penyelenggaraan kinerja pemerintahan melalui budaya kreatif dan berinovasi dengan melakukan pengukuran indeks inovasi daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang tahun 2022. Bentuk inovasi daerah yang diukur ditinjau dari aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Aspek Kuantitas, seberapa banyak Pemerintah Daerah melakukan Inovasi Daerah baik dari bentuk Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- 2) Aspek Kualitas, sejauh mana kualitas Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan (efektivitas, efisiensi dan keberlanjutan).
- 3) Aspek Kemanfaatan, seberapa besar manfaat Inovasi Daerah baik bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat, seperti menambah pendapatan asli daerah (PAD), menghemat belanja daerah, meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah, meningkatkan mutu pelayanan publik.

Rincian inovasi daerah yang diimplementasikan pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.7**  
**Rekapitulasi Inovasi OPD yang Diimplementasikan pada Tahun 2023**

No	Judul Inovasi	OPD	Tingkat Kematangan
1	Pena Kerja ASN	BKPSDM	111
2	RUMAH HEALING	Dinsos, PPKBPPPA	108
3	Smart Water Management System (SWMS)	Setda	108
4	Poin of Sales	BPKD	107
5	Padang Panjang TV	Diskominfo	106
6	RUMAH ASPIRASI	Inspektorat Daerah	106
7	Dokumentasi Kota (DOKTA)	Diskominfo	106
8	visual 360 Objek pajak Daerah PBB dan BPHTB	BPKD	106
9	Sistem informasi Publik pajak Bumi dan Bangunan ( SIP PBB)	BPKD	106
10	PARAM (Pusat Restorasi Arsip Masyarakat)	DPK	105
11	TRC Rescue	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	105
12	Resfour (Radio Edukasi SMP Negeri 4 Padang Panjang)	Disdikbud	105
13	ALIBATA (Alih media Bahan Pustaka)	DPK	105
14	PADUKO versi 4.0 - Pelayanan Administrasi Kependudukan Online	Disdukcapil	105
15	Aplikasi Sistem Informasi Geografis Pajak Bumi dan Bangunan ( ASIG PBB)	BPKD	105
16	DONGKRAK (Dongeng Radio Kreatif)	DPK	105
17	Semarak Desa Wisata Kubu Gadang	Dinas Porapar	104
18	SAUNG JAMUR REZEKI BAROKAH (kelurahan Busur)	Kec. Padang Panjang Barat	104
19	Sapilin: Sadar dan Peduli Berinovasi	BAPPEDA	103
20	Studio SPENFIVE.tv SMPN 5 Padang Panjang	Disdikbud	103
21	Canting Buana	Kec. Padang Panjang Barat	103

No	Judul Inovasi	OPD	Tingkat Kematangan
22	Layanan Kelurahan Kecamatan Online (LAKON VERSI 2)	Kec. Padang Panjang Barat	103
23	KLINIK PELAYANAN KONSULTASI PENGAWASAN TERPADU OPD(KLIK LAPTOP)	Inspektorat Daerah	103
24	Smart Hospital "Satu Jam Saja"	RSUD	102
25	PELAYANAN PERIZINAN ONLINE TANPA TATAP MUKA (PPO-TTM)	DPMPTSP	102
26	LASKAR DUKCAPIL versi 2.0	Disdukcapil	102
27	WARUNG BACA	DPK	102
28	PADANG PANJANG ABADI (Padang Panjang Ayo Baca Digital)	DPK	102
29	MAS CANTIK (Masyarakat Cinta Statistik)	DPK	102
30	GELITA MESRA ( Gerakan Literasi Kota Menuju Masyarakat Sejahtera )	DPK	102
31	INTIM ( Integrasi Sistem Informasi Rumah Sakit )	RSUD	102
32	SIRAMAH ( Sistem Informasi Antar Obat Sampai Rumah )	RSUD	102
33	Check IN	RSUD	102
34	Rumah Isolasi Berbasis Kaum	BPBD Kesbangpol	102
35	Manajemen Redaksi Berita ( MARITA)	Diskominfo	102
36	TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA SICANTIK CLOUD (TATA CANTIK)	DPMPTSP	101
37	SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN (SIFONA)	DPMPTSP	101
38	Serambi Geoportal Award	BAPPEDA	101
39	Satimisake Award	BAPPEDA	101
40	DATARU BERDIGIT	Dinas PU dan Penataan Ruang	100
41	Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA)	BPBD Kesbangpol	100
42	DRAGON ( Data Rendering Application Geospacial on Drone )	BPKD	100
43	PERKUMPULAN MAKRAMA KREATIF	Kec. Padang Panjang Barat	100
44	MANDIRI (Kelurahan Bukit Surungan)		
45	"DIGILI (Digital Library) SPENFOUR" SMP NEGERI 4 PADANG PANJANG	Disdikbud	100
46	ASINAN SPENSA (Asesmen Berbasis Android) SMP N 1 Padang Panjang	Disdikbud	100
47	APLIKASI SIMBANGDA	Setda	99

No	Judul Inovasi	OPD	Tingkat Kematangan
48	Siuni Tangkas	BKPSDM	99
49	Go Saronolah	Dinas Perkimlh	99
50	Layanan Datuks	Dinsos, PPKBPPPA	99
51	Serambi Plan	BAPPEDA	99
52	Eyes of PAPA	Diskominfo	99
53	Ultimate Daily Application of Padang Panjang	Diskominfo	99
54	Cakrawala Serambi (Cegah Kekerasan Terhadap Wanita dan Anak)	Dinsos, PPKBPPPA	99
55	Investigasi Bang Pokir	BAPPEDA	99
56	Pojok Pajak Daerah	BPKD	99
57	Gumala Kreatif	Kec. Padang Panjang Timur	99
58	Kepuasan Layanan Informasi Publik (KLIP)	Diskominfo	99
59	TBM (TAMAN BACAAN MASYARAKAT) LEMBAH SANI	Kec. Padang Panjang Barat	99
60	SIKEDAR	RSUD	98
61	SIKEREN PAPA	Dishub	98
62	Diet Kemasan Plastik	Dinas Perkimlh	98
63	Shuttle Bus RSUD Kota Padang Panjang	RSUD	98
64	K-Jar ASN	BKPSDM	98
65	SMASH - SMS Masal Sampaikan Himbauan	Disdukcapil	98
66	TRANSISWA	Dishub	98
67	POUSTER ( POJOK UKUR TENSI GANG ASTER)	Kec. Padang Panjang Barat	98
68	NIGHT SERVICE	Kec. Padang Panjang Barat	98
69	BAKO SYPAPA: Pengembangan Koperasi Syariah Padang Panjang	Disdagkop UMKM	97
70	APLIKASI PALITO	Setda	97
71	CETAK SENDIRI DOKUMEN KEPENDUDUKAN	Disdukcapil	97
72	Festival PDIKM	Dinas Porapar	97
73	JEMPOL KATEPEL KIA - Jemput Bola Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Identitas Anak	Disdukcapil	97
74	Studio Spen3TV Pembelajaran dan Seni SMPN 3 Padang Panjang	Disdikbud	97
75	PENTAS PAPA BARAT ( OPTIMALISASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT )	Kec. Padang Panjang Barat	97

No	Judul Inovasi	OPD	Tingkat Kematangan
76	MASJID 5 RAMAH : RAMAH MUSAFIR, LANSIA, ANAK, DISABILITAS, DAN REMAJA	Kec. Padang Panjang Barat	97
77	(Masjid Jami' Nurul Huda Kelurahan Silaing Bawah)		
78	SIMAK (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN) V.2	BKPSDM	97
79	Gatra: Olahraga Tradisional	Dinas Porapar	96
80	Kompos PAPA	Diskominfo	96
81	KOMIK - Komputer Informasi Kependudukan	Disdukcapil	96
82	Canang Kebaikan	Diskominfo	96
83	Smart Young Community	Dinas Porapar	96
84	SIKEMAS	RSUD	96
85	Basis Data Pariwisata Ekonomi Kreatif (BAPER)	Dinas Porapar	96
86	MAMA PAPA MUDIK	Dishub	96
87	DOKTER DUKCAPIL	Disdukcapil	96
88	PELANDU versi 2 - Pelayanan Terpadu	Disdukcapil	96
89	PETIR (PROGRAM PEDULI PENDIDIKAN DAN PRESTASI) KELURAHAN PASAR USANG	Kec. Padang Panjang Barat	96
90	CAFLAN ( CAFE KELURAHAN BUKIT SURUNGAN )	Kec. Padang Panjang Barat	96
91	E-Buletin Kominfo	Diskominfo	95
92	Khadim Serambi	DKK Padang Panjang	95
93	PAPA BARAT PINTAR	Kec. Padang Panjang Barat	95
94	BRIGADE PERLINDUNGAN TANAMAN (BRILIAN)	Dispangtan	94
95	KLINIK IMB (Izin Mendirikan Bangunan)	Dinas PU dan Penataan Ruang	94
96	SAYANG PELAJAR	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	94
97	SALIMAH (SATPOL PP MUSLIMAH)	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	94
98	POS PETRA ( POS PENGENDALIAN TRANTIBUM)	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	94
99	TEMBANG INDAH: Tera Timbangan Insya Allah Membawa Berkah	Disdagkop UMKM	94
100	Takgit: Tata Laksana Kasus Gigitan Terpadu	Dispangtan	94
101	SMPN 6 RACHEL (Belajar Tanpa kuota Internet dan didampingi oleh TV Analog komunitas 471,25MHz)	Disdikbud	94
102	Kelas Ayah Bunda	Dinsos, PPKBPPPA	94

No	Judul Inovasi	OPD	Tingkat Kematangan
103	Rumah Susu (RS)	Dispangtan	93
104	Tiger-C	Dishub	93
105	Rearing Unit	Dispangtan	93
106	Si Abang: Digitalisasi Arsip Bagian Persidangan	Setwan	93
107	DOA SELAMAT - Dokumen Langsung Ada Setelah Melaksanakan Pemberkatan	Disdukcapil	93
108	Rumah Data	Diskominfo	93
109	SELALU SAMAWA - Setelah Melaksanakan Akad, Semua Dokumen Langsung Dibawa	Disdukcapil	93
110	MENDUNG SESAAT - Dokumen Kependudukan Langsung Selesai Setelah Putusan	Disdukcapil	93
111	PARADE DUKCAPIL - Pemberian Reward and Punishment personil Dukcapil	Disdukcapil	93
112	INOVASI DAMPING KONSTRUKSI	Dinas PU dan Penataan Ruang	92
113	KLINIK KONSTRUKSI	Dinas PU dan Penataan Ruang	92
114	JUM'AT BERBAGI ILMU (JBI)	Dinas PU dan Penataan Ruang	92
115	Tetangga Peduli Adminduk	Disdukcapil	92
116	POL PP MERAYAP	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	92
117	STA	Dispangtan	92
118	Graficio PAPA	Diskominfo	92
119	TANDUK - Tanya Dukcapil	Disdukcapil	92
120	Polisi Lintas	DKK Padang Panjang	82



# BAB V

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan merupakan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mewujudkan tercapainya tujuan, sasaran pembangunan daerah, serta memenuhi standar pelayanan minimal serta pemenuhan pelayanan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan dan disusunlah program dan kegiatan yang lebih konkrit yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, sesuai Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar serta urusan pilihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Untuk mencapai target prioritas pembangunan tahun 2024, direncanakan 133 program dengan 305 kegiatan dan 683 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang. Rekapitulasi kebutuhan dana/pagu indikatif berdasarkan prioritas pembangunan Kota Padang Panjang serta rencana kerja pemerintah daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 berdasarkan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut

**Tabel 5.1**  
**Rekapitulasi Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2024**

NO	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	%	OPD
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	2	9	87	84.547.061.208	16,56%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	5	16	52	140.943.151.119	27,48%	Dinas Kesehatan
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9	20	49	14.607.043.850	2,85%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	5	13	24	6.369.347.475	1,24%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	4	1 7	41	11.313.743.748	2,21%	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

NO	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	%	OPD
7	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	6	13	35	7.418.910.537	1,45%	Dinas Sosial P2KBP3A
8	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	4	8	19	3.851.339.740	0,75%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4	11	12	762.984.000	0,15%	Dinas Sosial P2KBP3A
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	3	10	24	7.697.753.602	1,50%	Dinas Pangan Dan Pertanian
11	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
12	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	10	14	26	8.596.703.941	1,68%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
13	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	13	20	3.814.026.223	0,74%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3	7	14	990.440.000	0,19%	Dinas Sosial P2KBP3A
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2	13	28	10.458.834.550	2,04%	Dinas Perhubungan
16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	3	8	18	6.849.620.985	1,34%	Dinas Komunikasi Dan Informatika
17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	5	9	20	7.919.134.933	1,54%	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	3	3	5	138.200.000	0,03%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	4	13	30	6.367.224.700	1,24%	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1	1	1	30.000.000	0,01%	Dinas Komunikasi Dan Informatika
21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1	1	1	11.950.000	0,002%	Dinas Komunikasi Dan Informatika
22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	1	3	6	119.776.000	0,023%	Dinas Pendidikan Dan

NO	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	%	OPD
							Kebudayaan
23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2	4	7	721.274.000	0,14%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	3	8	15	3.776.935.882	0,74%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
26	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	2	2	3	568.998.800	0,11%	Dinas Pangan Dan Pertanian
27	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	4	9	14	910.000.000	0,18%	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
28	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	5	11	17	893.378.000	0,17%	Dinas Pangan Dan Pertanian
29	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	5	6	8	4.759.810.413	0,93%	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
30	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	2	2	3	631.299.800	0,12%	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
31	Sekretariat Daerah	3	16	43	32.281.880.535	6,29%	Sekretariat Daerah
32	Sekretariat DPRD	2	16	49	52.615.477.325	10,26%	Sekretariat Dprd
33	Perencanaan	2	7	10	25.538.200.000	4,98%	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
34	Keuangan	4	12	35	11.065.718.352	2,16%	Badan Pengelola Keuangan Daerah
35	Kepegawaian	2	9	22	20.785.818.391	4,05%	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
36	Pendidikan Dan Pelatihan	1	2	2	1.520.000.000	0,30%	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
37	Penelitian Dan Pengembangan	2	10	18	4.890.232.566	0,95%	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
38	Inspektorat Daerah	3	10	32	5.405.702.960	1,05%	Inspektorat Daerah

NO	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	%	OPD
39	Kecamatan	5	12	22	16.185.939.809	3,16%	Kecamatan Padang Panjang Timur
40	Kecamatan	5	12	21	16.776.080.562	3,27%	Kecamatan Padang Panjang Barat
41	Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	11	23	15.584.365.495	3,04%	BPBD dan Kesbangpol
	<b>JUMLAH</b>	<b>138</b>	<b>361</b>	<b>856</b>	<b>512.931.375.001</b>	<b>100%</b>	

Selanjutnya Rencana Program dan kegiatan Kota Padang Panjang Tahun 2024 menurut Bidang Urusan dapat diuraikan pada tabel 5.2 berikut :

Tabel 5.2  
Rencana Program dan Kegiatan Kota Padang Panjang Tahun 2024 Menurut Bidang Urusan

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			CAPAIAN RKPD	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
			TAHUN 2022	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	<b>TOTAL PAGU</b>				<b>512.931.375.001</b>		<b>#####</b>	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>				<b>84.497.061.208</b>		<b>74.090.896.163</b>	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>24.341.346.997</b>	<b>100%</b>	<b>20.503.165.252</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola</b>	<b>38 Satuan Pendidikan</b>	<b>38 Satuan Pendidikan</b>	<b>10.457.760.047</b>	<b>38 Satuan Pendidikan</b>	<b>8.849.357.252</b>	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0 Orang	190 Orang	30.000.000	190 Orang	30.000.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta Didik	380 Peserta Didik	456.000.000	380 Peserta Didik	456.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	3 Ruang	250.000.000	3 Ruang	250.000.000	
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	0 Ruang	2 Ruang	300.000.000	2 Ruang	445.288.000	
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	32 Unit	300.000.000	32 Unit	300.000.000	
	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	32 Unit	326.900.000	32 Unit	326.900.000	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0 Unit	1000 Unit	400.000.000	1000 Unit	750.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0 Paket	-	2 Paket	250.000.000	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	0 Paket	0 Paket	-	2 Paket	120.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	3 Ruang	150.000.000	0 Ruang	-	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	3 Ruang	250.000.000	0 Ruang	-	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	1 Ruang	200.000.000	2 Ruang	500.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	0 Unit	3 Unit	349.850.000	3 Unit	300.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	3 Ruang	200.000.000	0 Ruang	-	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	16.275.000	38 Satuan Pendidikan	20.000.000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	100.000.000	38 Satuan Pendidikan	100.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0 Orang	104 Orang	2.017.840.000	104 Orang	2.019.169.252	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	400 Orang	645.822.000	400 Orang	675.000.000	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	150.000.000	1000 Peserta Didik	150.000.000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	0 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	30.000.000	38 Satuan Pendidikan	30.000.000	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	2 Unit	2.285.073.047	2 Unit	400.000.000	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	3 Ruang	200.000.000	3 Ruang	227.000.000	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	3 Ruang	800.000.000	0 Ruang	-	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	4 Ruang	200.000.000	4 Ruang	500.000.000	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang	4 Ruang	800.000.000	4 Ruang	1.000.000.000	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola</b>	<b>15 Satuan Pendidikan</b>	<b>15 Satuan Pendidikan</b>	<b>8.924.450.300</b>	<b>15 Satuan Pendidikan</b>	<b>7.127.328.000</b>	
	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	650 Paket	15.000.000	650 Paket	15.000.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta Didik	350 Peserta Didik	30.000.000	350 Peserta Didik	30.000.000	
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	6 Unit	100.000.000	6 Unit	100.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	0 Paket	500 Paket	300.000.000	500 Paket	375.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket	2 Paket	300.000.000	2 Paket	300.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	2 Ruang	300.000.000	2 Ruang	600.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	3 Ruang	300.000.000	2 Ruang	400.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	3 Ruang	300.000.000	2 Ruang	250.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	3 Ruang	300.000.000	3 Ruang	300.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	3 Unit	300.000.000	3 Unit	1.000.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	2 Ruang	300.000.000	2 Ruang	300.000.000	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	20.000.000	15 Satuan Pendidikan	20.000.000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	0 Peserta Didik	15 Peserta Didik	25.000.000	15 Peserta Didik	25.000.000	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0 Orang	56 Orang	977.328.000	56 Orang	977.328.000	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0 Orang	75 Orang	30.000.000	75 Orang	30.000.000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	350 Orang	233.177.300	350 Orang	300.000.000	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket	3 Paket	300.000.000	2 Paket	300.000.000	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	0 Paket	2 Paket	28.000.000	2 Paket	30.000.000	
	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	6 Unit	190.000.000	6 Unit	300.000.000	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	160.000.000	1000 Peserta Didik	160.000.000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	0 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	15.000.000	15 Satuan Pendidikan	15.000.000	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	2 Unit	700.945.000	2 Unit	300.000.000	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	1 Ruang	200.000.000	0 Ruang	-	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	1 Ruang	800.000.000	0 Ruang	-	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	1 Ruang	400.000.000	0 Ruang	-	
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 Ruang	1 Ruang	300.000.000	0 Ruang	-	
	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	1 Unit	2.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola</b>	<b>60 Satuan Pendidikan</b>	<b>62 Satuan Pendidikan</b>	<b>4.192.430.000</b>	<b>62 Satuan Pendidikan</b>	<b>4.021.480.000</b>	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	0 Paket	2 Paket	20.000.000	2 Paket	20.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	0 Paket	150 Paket	20.000.000	150 Paket	20.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	0 Paket	2 Paket	20.000.000	2 Paket	20.000.000	
	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	0 Paket	2 Paket	30.000.000	2 Paket	30.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	2 Unit	148.540.000	0 Unit	-	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	30.000.000	61 Satuan Pendidikan	30.000.000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	0 Peserta Didik	500 Peserta Didik	80.000.000	500 Peserta Didik	80.000.000	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	0 Orang	250 Orang	3.396.480.000	250 Orang	3.396.480.000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	300 Orang	322.410.000	325 Orang	300.000.000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	75.000.000	61 Satuan Pendidikan	75.000.000	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang dikelola</b>	<b>3 Satuan Pendidikan</b>	<b>3 Satuan Pendidikan</b>	<b>766.706.650</b>	<b>3 Satuan Pendidikan</b>	<b>505.000.000</b>	
	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	0 Paket	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	
	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	0 Paket	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	
	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian	0 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	20.000.000	3 Satuan Pendidikan	20.000.000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	0 Peserta Didik	60 Peserta Didik	200.000.000	60 Peserta Didik	200.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0 Orang	30 Orang	15.000.000	30 Orang	15.000.000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	30 Orang	20.000.000	30 Orang	20.000.000	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0 Orang	4 Orang	49.500.000	4 Orang	50.000.000	



KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	1 Unit	80.000.000	1 Unit	80.000.000	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	0 Paket	1 Paket	25.000.000	0 Paket	-	
	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	1 Unit	49.000.000	0 Unit	-	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibanqun	0 Unit	1 Unit	188.206.650	0 Unit	-	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>60.155.714.211</b>	<b>100%</b>	<b>53.587.730.911</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>51.778.305.561</b>	<b>100%</b>	<b>51.978.305.561</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	553 Orang/bulan	51.778.305.561	553 Orang/bulan	51.978.305.561	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>309.720.650</b>	<b>100%</b>	<b>526.707.350</b>	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	150.000.000	30 Laporan	300.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	5 Paket	10.000.000	5 Paket	76.986.700	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	129.050.000	4 Paket	129.050.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	20.670.650	4 Paket	20.670.650	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>7.050.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	20.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	7.000.000.000	0 Unit	-	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>862.688.000</b>	<b>100%</b>	<b>862.718.000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	15 Laporan	6.000.000	15 Laporan	6.030.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	150.000.000	3 Laporan	150.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	706.688.000	12 Laporan	706.688.000	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>155.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	13 Unit	15.000.000	13 Unit	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit	140.000.000	17 Unit	190.000.000	
	<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				<b>140.943.151.119</b>		<b>#####</b>	
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	-	<b>88%</b>	<b>15.046.206.717</b>	<b>91%</b>	<b>15.358.638.017</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kesehatan</b>
	<b>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	<b>75 Persen</b>	<b>75 Persen</b>	<b>1.180.000.000</b>	<b>80 Persen</b>	<b>670.000.000</b>	
	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	4 Unit	4 Unit	80.000.000	4 Unit	80.000.000	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	200.000.000	1 Paket	290.000.000	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000	
	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	600.000.000	1 Unit	-	
	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	<b>90 Persen</b>	<b>82 Persen</b>	<b>13.866.206.717</b>	<b>82 Persen</b>	<b>14.688.638.017</b>	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	922.247.697	1 Unit	900.000.000	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	4 Unit	4 Unit	30.000.000	4 Unit	49.999.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48 Dokumen	48 Dokumen	120.000.000	48 Dokumen	240.000.000	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	100.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RPKD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	60 Dokumen	60 Dokumen	10.667.394.720	60 Dokumen	11.478.311.617	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	434.400.000	12 Dokumen	354.400.000	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	8 Dokumen	8 Dokumen	480.064.300	8 Dokumen	440.064.300	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000	12 Dokumen	40.265.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	15 Dokumen	15 Dokumen	300.000.000	15 Dokumen	280.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1533 Orang	1533 Orang	30.000.000	1533 Orang	35.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2331 Orang	2331 Orang	35.000.000	2331 Orang	35.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	117 Orang	117 Orang	15.000.000	117 Orang	18.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	950 Orang	950 Orang	20.000.000	950 Orang	40.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12234 Orang	12234 Orang	35.000.000	12234 Orang	40.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4928 Orang	4928 Orang	372.100.000	4928 Orang	372.100.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41185 Orang	41185 Orang	30.000.000	41185 Orang	30.670.650	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12241 Orang	12241 Orang	35.000.000	12241 Orang	31.042.200	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3957 Orang	3957 Orang	25.000.000	3957 Orang	31.042.200	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1026 Orang	1026 Orang	35.000.000	1026 Orang	43.493.700	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1077 Orang	1077 Orang	20.000.000	1077 Orang	28.372.800	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1129 Orang	1129 Orang	20.000.000	1129 Orang	35.876.550	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	<b>65</b>	<b>30.000.000</b>	<b>68,75</b>	<b>32.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kesehatan</b>
	<b>Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pemberian rekomendasi izin praktik Tenaga Kesehatan	<b>90 Persen</b>	<b>90 Persen</b>	<b>10.000.000</b>	<b>92,5 Persen</b>	<b>12.000.000</b>	
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	37 Dokumen	37 Dokumen	10.000.000	37 Dokumen	12.000.000	
	<b>Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	<b>40 Persen</b>	<b>40 Persen</b>	<b>20.000.000</b>	<b>45 Persen</b>	<b>20.000.000</b>	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 Orang	50 Orang	20.000.000	50 Orang	20.000.000	
	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum	-	<b>76,7</b>	<b>38.000.000</b>	<b>83,3</b>	<b>38.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kesehatan</b>
	<b>Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	Persentase pemberian rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	<b>85 persen</b>	<b>85 persen</b>	<b>15.000.000</b>	<b>90 persen</b>	<b>15.000.000</b>	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30 Dokumen	30 Dokumen	15.000.000	30 Dokumen	15.000.000	
	<b>Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	Persentase Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	<b>85 Persen</b>	<b>75 Persen</b>	<b>8.000.000</b>	<b>80 Persen</b>	<b>8.000.000</b>	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	30 Dokumen	30 Dokumen	8.000.000	30 Dokumen	8.000.000	
	<b>Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Produk dan Sarana Produk Makanan minuman Industri Rumah Tangga	<b>70 persen</b>	<b>70 persen</b>	<b>15.000.000</b>	<b>80 persen</b>	<b>15.000.000</b>	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30 Unit	30 Unit	15.000.000	30 Unit	15.000.000	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	-	<b>96,25%</b>	<b>420.000.000</b>	<b>98,13%</b>	<b>460.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kesehatan</b>
	<b>Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota	<b>2 Kegiatan</b>	<b>5 Kegiatan</b>	<b>385.000.000</b>	<b>5 Kegiatan</b>	<b>375.000.000</b>	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	385.000.000	12 Dokumen	375.000.000	
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kelurahan yg mengikuti Germas	<b>16 Kelurahan</b>	<b>16 Kelurahan</b>	<b>35.000.000</b>	<b>16 Kelurahan</b>	<b>85.000.000</b>	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	85.000.000	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>125.408.944.402</b>	<b>100%</b>	<b>#####</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kesehatan</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>56.818.248.402</b>	<b>100%</b>	<b>56.818.248.402</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	493 Orang/bulan	493 Orang/bulan	56.818.248.402	500 Orang/bulan	56.818.248.402	
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	2 Paket	150.000.000	2 Paket	150.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>467.661.550</b>	<b>100%</b>	<b>417.661.550</b>	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	300.000.000	100 Laporan	250.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	38.829.050	5 Paket	38.829.050	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	99.758.200	5 Paket	99.758.200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	29.074.300	5 Paket	29.074.300	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	<b>80 Persen</b>	<b>80 Persen</b>	<b>250.000.000</b>	<b>80 Persen</b>	<b>200.000.000</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	100.000.000	6 Unit	50.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>1.124.699.553</b>	<b>100 persen</b>	<b>1.124.989.553</b>	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	898.189.440	12 Laporan	898.189.440	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	220.510.113	12 Laporan	220.510.113	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.290.000	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>685.000.000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>599.188.474</b>	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100.000.000	3 Unit	60.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	50.000.000	50 Unit	40.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	75 Unit	500.000.000	75 Unit	464.188.474	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	35.000.000	1 Unit	35.000.000	
	<b>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	<b>1 BLUD</b>	<b>1 BLUD</b>	<b>65.913.334.897</b>	<b>1 BLUD</b>	<b>66.206.856.423</b>	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	65.913.334.897	1 Unit Kerja	66.206.856.423	
	<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				<b>14.607.043.850</b>		<b>34.153.868.850</b>	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	67,83% *	70,40%	350.000.000	72,96%	500.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
		Persentase panjang sungai yang dikonservasi	22,42% *	22,42%		22,82%		
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0 km	0 km	50.000.000	0,2 km	250.000.000	
	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0 KM	0 KM	-	0,2 KM	250.000.000	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	-	
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Irigasi yang Dipelihara	0 km	2,5 km	300.000.000	2,5 km	250.000.000	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0 KM	2,5 KM	250.000.000	2,5 KM	250.000.000	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	-	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak</b>	<b>86,00%</b>	<b>86,57%</b>	<b>350.000.000</b>	<b>87,15%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang</b>
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Tangga dari Unit Spam yang dibangun	0 SR	100 SR	350.000.000	100 SR	150.000.000	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	0 SR	100 SR	150.000.000	100 SR	150.000.000	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	0 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	0 Dokumen	-	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			CAPAIAN RKPD	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
			TAHUN 2022	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase Rumah Tinggal yang bersanitasi Layak</b>	<b>87,00%</b>	<b>90,00%</b>	<b>416.407.200</b>	<b>90,70%</b>	<b>416.407.200</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang</b>
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah Dilayani dengan sistem pengelolaan air limbah domestik	0 Rumah Tangga	20 Rumah Tangga	416.407.200	20 Rumah Tangga	416.407.200	
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	0 M <sup>3</sup> /Hari	5 M <sup>3</sup> /Hari	150.000.000	5 M <sup>3</sup> /Hari	150.000.000	
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	0 Rumah Tangga	20 Rumah Tangga	100.000.000	20 Rumah Tangga	100.000.000	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	166.407.200	1 Unit	166.407.200	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik</b>	<b>85,00%</b>	<b>87,34%</b>	<b>5.890.776.650</b>	<b>87,92%</b>	<b>589.824.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang</b>
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang drainase perkotaan yang ditingkatkan dan dipelihara	85.510,00 meter	1500 meter	5.890.776.650	500 meter	589.824.000	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 M	50 M	150.000.000	50 M	189.824.000	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	0 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	150.000.000	
	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	0 M	550 M	5.540.776.650	50 M	250.000.000	
	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase Bangunan Ber IMB</b>	<b>37,82%</b>	<b>46,10%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>46,39%</b>	<b>16.100.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung serta Pemberian PBG sesuai dengan standar yang berlaku	0 unit	50 unit	100.000.000	50 unit	16.100.000.000	
	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	0 Unit	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	



KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	16.000.000.000	
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	0 Dokumen	50 Dokumen	50.000.000	50 Dokumen	50.000.000	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik</b>	<b>91,50% *</b>	<b>93,74%</b>	<b>650.000.000</b>	<b>95,87%</b>	<b>9.857.375.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang</b>
		<b>Persentase infrastruktur trotoar dalam kondisi baik</b>	<b>83,00%</b>	<b>85,67%</b>		<b>90,33%</b>		
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Panjang Jalan dan Trotoar yang Dibangun dan Dipelihara</b>	<b>0 km</b>	<b>30 km</b>	<b>650.000.000</b>	<b>25,1 km</b>	<b>9.857.375.000</b>	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	0 KM	35 KM	600.000.000	30 KM	500.000.000	
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	0 KM	0 KM	-	0,1 KM	500.000.000	
	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	0 KM	0,5 KM	-	0,5 KM	857.375.000	
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	0 KM	0 KM	-	0 KM	-	
	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	0 M <sup>2</sup>	0 M <sup>2</sup>	-	13000 M <sup>2</sup>	8.000.000.000	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	-	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat</b>	<b>61%</b>	<b>61%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>66%</b>	<b>92.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang</b>
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>Jumlah tenaga kerja terampil konstruksi tersertifikasi</b>	<b>0 orang</b>	<b>0 orang</b>	<b>-</b>	<b>22 orang</b>	<b>50.000.000</b>	
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	0 Orang	0 Orang	-	60 Orang	25.000.000	
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	0 Orang	0 Orang	-	100 Orang	25.000.000	
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi</b>	<b>0 dokumen</b>	<b>0 dokumen</b>	<b>10.000.000</b>	<b>81 dokumen</b>	<b>30.000.000</b>	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	0 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000	6 Dokumen	5.000.000	
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	0 Dokumen	0 Dokumen	-	80 Dokumen	22.000.000	
	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	0 Laporan	0 Laporan	-	1 Laporan	3.000.000	
	<b>Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi</b>	<b>0 dokumen</b>	<b>8 dokumen</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10 dokumen</b>	<b>12.000.000</b>	
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	0 Laporan	8 Laporan	10.000.000	10 Laporan	12.000.000	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Rasio ketaatan terhadap RTRW per tahun</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,21%</b>	<b>475.000.000</b>	<b>0,23%</b>	<b>280.402.650</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang</b>
	<b>Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen dalam rangka per Substansi RTRW dan RDTR ke KemenATR</b>	<b>0 dokumen</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>175.000.000</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>130.402.650</b>	
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	55.402.650	
	<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen RRTR yang disusun</b>	<b>0 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>250.000.000</b>	<b>0 dokumen</b>	<b>-</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	0 Dokumen	-	
	<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah data dan informasi yang dihasilkan sistem informasi tata ruang</b>	<b>0 dokumen</b>	<b>0 dokumen</b>	<b>-</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>50.000.000</b>	
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000	
	<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan</b>	<b>0 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>50.000.000</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>100.000.000</b>	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	0 Dokumen	0 Dokumen	-	2 Dokumen	50.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>6.354.860.000</b>	<b>100%</b>	<b>6.167.860.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan</b>	<b>44 orang</b>	<b>47 orang</b>	<b>5.423.000.000</b>	<b>47 orang</b>	<b>5.350.000.000</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	47 Orang/bulan	5.423.000.000	47 Orang/bulan	5.350.000.000	
	[ KEGIATAN ] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-		-	
	<b>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut</b>		44 Orang/bulan	47 Orang/bulan	-	47 Orang/bulan	-	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Urusan Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>216.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>207.000.000</b>	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	155 Laporan	150.000.000	155 Laporan	130.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	9 Paket	20.000.000	9 Paket	20.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	6 Paket	40.000.000	6 Paket	50.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	17 Paket	6.500.000	17 Paket	6.500.000	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>0 unit</b>	<b>2 unit</b>	<b>50.000.000</b>	<b>1 unit</b>	<b>20.000.000</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	2 Unit	50.000.000	1 Unit	20.000.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya urusan penunjang</b>	<b>3 jenis</b>	<b>3 jenis</b>	<b>306.360.000</b>	<b>3 jenis</b>	<b>289.860.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	13 Laporan	282.360.000	13 Laporan	265.360.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	20.000.000	3 Laporan	20.500.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12 Laporan	4.000.000	12 Laporan	4.000.000	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Peralatan Kantor</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>359.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>301.000.000</b>	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	7 Unit	40.000.000	7 Unit	41.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	4.000.000	1 Unit	4.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	25.000.000	30 Unit	26.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit	240.000.000	30 Unit	180.000.000	
	<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				<b>6.369.347.475</b>		<b>6.490.857.475</b>	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani</b>	-	<b>100%</b>	<b>300.435.280</b>	<b>100%</b>	<b>300.435.280</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman</b>
	<b>Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah data penyediaan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah</b>	- dokumen	<b>2 dokumen</b>	<b>10.000.000</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>10.000.000</b>	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	- Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	
	<b>Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah</b>	- unit	<b>4 unit</b>	<b>90.000.000</b>	<b>4 unit</b>	<b>90.000.000</b>	
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	- Unit Rumah	2 Unit Rumah	50.000.000	2 Unit Rumah	50.000.000	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	- Unit Rumah	2 Unit Rumah	40.000.000	2 Unit Rumah	40.000.000	
	<b>Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun</b>	- dokumen	<b>1 dokumen</b>	<b>200.435.280</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>200.435.280</b>	
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	- Laporan	1 Laporan	200.435.280	1 Laporan	200.435.280	
	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase pengurangan kawasan kumuh</b>	<b>73,98%</b>	<b>89,36%</b>	<b>185.000.000</b>	<b>95,74%</b>	<b>110.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman</b>

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	75.000.000	- dokumen	-	
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	- Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	- Dokumen	-	
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	- Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	- Dokumen	-	
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	- laporan	1 laporan	110.000.000	1 laporan	110.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	- Laporan	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	110.000.000	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik</b>	<b>84,51% *</b>	<b>86,24%</b>	<b>95.040.000</b>	<b>87,11%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman</b>
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	2 kecamatan	2 kecamatan	95.040.000	2 kecamatan	200.000.000	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 Lokasi	2 Lokasi	95.040.000	2 Lokasi	200.000.000	
	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>Persentase Rumah Layak Huni</b>	<b>96,63%</b>	<b>96,62%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>97,26%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman</b>
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	40 unit	70 unit	50.000.000	70 unit	50.000.000	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	40 Unit Rumah	70 Unit Rumah	50.000.000	70 Unit Rumah	50.000.000	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>	<b>5.738.872.195</b>	<b>90%</b>	<b>5.830.422.195</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman</b>
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	100 persen	100 persen	4.707.571.395	100 persen	4.707.571.395	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	47 Orang/bulan	4.707.571.395	47 Orang/bulan	4.707.571.395	
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>- persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>-</b>	<b>100 persen</b>	<b>-</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Paket	47 Paket	-	47 Paket	-	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran</b>	<b>90 persen</b>	<b>90 persen</b>	<b>238.500.000</b>	<b>90 persen</b>	<b>310.050.000</b>	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Laporan	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	195.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	10.000.000	15 Paket	13.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	21 Paket	8.500.000	21 Paket	11.050.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	60 Paket	70.000.000	60 Paket	91.000.000	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>- persen</b>	<b>90 persen</b>	<b>50.000.000</b>	<b>90 persen</b>	<b>70.000.000</b>	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Unit	3 Unit	-	3 Unit	50.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Unit	3 Unit	50.000.000	3 Unit	20.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Unit	3 Unit	-	3 Unit	-	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>90 persen</b>	<b>90 persen</b>	<b>511.372.000</b>	<b>90 persen</b>	<b>511.372.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Laporan	1 Laporan	459.840.000	1 Laporan	459.840.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	51.532.000	1 Laporan	51.532.000	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>90 persen</b>	<b>90 persen</b>	<b>231.428.800</b>	<b>90 persen</b>	<b>231.428.800</b>	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3 Unit	100.000.000	3 Unit	100.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	20.000.000	5 Unit	20.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	100.000.000	9 Unit	100.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	11.428.800	1 Unit	11.428.800	
	<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>11.313.743.748</b>		<b>11.044.511.500</b>	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3.308.840.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.091.489.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat</b>
	<b>Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum</b>	<b>2 operasi</b>	<b>3 operasi</b>	<b>3.253.840.000</b>	<b>3 operasi</b>	<b>2.933.840.000</b>	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	0 Laporan	8 Laporan	30.000.000	8 Laporan	30.000.000	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	0 Unit	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	0 Kasus	2 Kasus	90.000.000	1 Kasus	20.000.000	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	172 Kasus	60 Kasus	2.803.840.000	55 Kasus	2.803.840.000	
	<b>Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Jumlah operasi penegakan Perda</b>	<b>1 operasi</b>	<b>2 operasi</b>	<b>35.000.000</b>	<b>1 operasi</b>	<b>137.649.000</b>	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	24 Laporan	24 Laporan	20.000.000	24 Laporan	107.649.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	0 Laporan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	30.000.000	
	<b>Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>0 kegiatan</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>20.000.000</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>20.000.000</b>	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	0 Laporan	2 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	
	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Waktu tanggap (Respon Time Rate ) Daerah</b>	<b>10 menit</b>	<b>10 menit</b>	<b>1.349.780.400</b>	<b>10 menit</b>	<b>1.458.780.400</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat</b>
	<b>Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran</b>	<b>2 kegiatan</b>	<b>4 kegiatan</b>	<b>1.243.780.400</b>	<b>3 kegiatan</b>	<b>1.278.780.400</b>	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0 Keluarga	16 Keluarga	20.000.000	32 Keluarga	40.000.000	
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	0 Orang	2 Orang	20.000.000	2 Orang	40.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	2 Unit	65.000.000	15 Unit	60.000.000	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Laporan	15 Laporan	1.138.780.400	15 Laporan	1.138.780.400	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>Jumlah kegiatan pemberdayaan</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>2 kegiatan</b>	<b>80.000.000</b>	<b>2 kegiatan</b>	<b>80.000.000</b>	
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	0 Desa/Kelurahan	16 Desa/Kelurahan	45.000.000	16 Desa/Kelurahan	45.000.000	



KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	49 Orang	50 Orang	35.000.000	50 Orang	35.000.000	
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>26.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	7 Unit	0 Unit	-	5 Unit	75.000.000	
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	0 Laporan	12 Laporan	26.000.000	12 Laporan	25.000.000	
	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.488.321.248</b>	<b>100%</b>	<b>1.288.440.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat</b>
	<b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>40.000.000</b>	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	- Orang	160 Orang	40.000.000	160 Orang	40.000.000	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	- Dokumen	1 Dokumen	260.000.000	- Dokumen	-	
	<b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang dilegalisasi</b>	<b>0 dokumen</b>	<b>0 dokumen</b>	<b>-</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>10.000.000</b>	
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	10.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	<b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	- orang	212 orang	1.016.738.760	198 orang	1.052.440.000	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	- Unit	1 Unit	100.000.000	1 Unit	30.000.000	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0 Orang	40 Orang	44.298.760	200 Orang	130.000.000	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	- Dokumen	22 Dokumen	872.440.000	22 Dokumen	872.440.000	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	0 Kawasan	0 Kawasan	-	16 Kawasan	20.000.000	
	<b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	100%	100%	100.000.000	100%	90.000.000	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	0 Dokumen	90 Dokumen	100.000.000	85 Dokumen	90.000.000	
	<b>Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>jumlah kerusakan yang tertangani</b>	0 kerusakan	25 kerusakan	71.582.488	25 kerusakan	96.000.000	
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	53.480.000	
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	0 Dokumen	1 Dokumen	71.582.488	1 Dokumen	42.520.000	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</b>	90%	100%	5.166.802.100	100%	5.205.802.100	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan keuangan perangkat daerah</b>	90%	90%	4.388.495.330	90%	4.388.495.330	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	4.388.495.330	41 Orang/bulan	4.388.495.330	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	0%	0%	-	0%	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	-	0 Paket	-	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	90%	90%	153.356.650	90%	223.356.650	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	100.000.000	15 Laporan	165.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5 Paket	10.000.000	5 Paket	15.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	40.000.000	4 Paket	40.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.356.650	1 Paket	3.356.650	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	90%	90%	50.000.000	90%	20.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2 Unit	50.000.000	1 Unit	20.000.000	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah</b>	90%	90%	105.498.120	90%	104.498.120	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	26.538.120	36 Laporan	26.538.120	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11 Laporan	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	12 Laporan	72.960.000	12 Laporan	72.960.000	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah</b>	90%	90%	469.452.000	90%	469.452.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	70.212.000	2 Unit	70.212.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	30 Unit	50.000.000	30 Unit	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	349.240.000	26 Unit	349.240.000	
	<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>				<b>7.418.910.537</b>		<b>7.692.893.781</b>	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase PPKS yang tertangani	90%	90%	873.252.656	90%	873.711.400	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial
	<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti</b>	<b>526 orang</b>	<b>750 orang</b>	<b>499.541.256</b>	<b>750 orang</b>	<b>500.000.000</b>	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	22 Orang	80.000.000	22 Orang	80.000.000	
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	507 Orang	507 Orang	150.000.000	507 Orang	150.000.000	
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	459 Orang	459 Orang	200.000.000	459 Orang	200.000.000	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	150 Orang	20.000.000	165 Orang	20.000.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	50 Orang	49.541.256	50 Orang	50.000.000	
	<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>*Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti</b>	<b>3285 orang</b>	<b>2628 orang</b>	<b>373.711.400</b>	<b>2710 orang</b>	<b>373.711.400</b>	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	5 Orang	10.000.000	5 Orang	10.000.000	
	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	75 Orang	75.000.000	75 Orang	75.000.000	
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	75 Orang	75.000.000	75 Orang	75.000.000	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	6 Dokumen	8 Dokumen	93.711.400	10 Dokumen	93.711.400	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Orang	30 Orang	120.000.000	30 Orang	120.000.000	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	<b>85,00%</b>	<b>86,98%</b>	<b>228.029.600</b>	<b>87,97%</b>	<b>228.029.600</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota</b>	<b>3 layanan</b>	<b>8 layanan</b>	<b>228.029.600</b>	<b>17 layanan</b>	<b>228.029.600</b>	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	130 Orang	15.000.000	130 Orang	15.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1300 Keluarga	1300 Keluarga	133.709.600	1271 Keluarga	133.709.600	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2169 Orang	2169 Orang	79.320.000	2169 Orang	79.320.000	
	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Persentase korban bencana yang tertangani	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>153.503.319</b>	<b>100%</b>	<b>153.503.319</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial</b>
	<b>Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>'Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100 persen</b>	<b>80.000.000</b>	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	20.000.000	2300 Orang	20.000.000	
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	30.000.000	300 Orang	30.000.000	
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	30.000.000	300 Orang	30.000.000	
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>'Jumlah anggota TAGANA yang dibina</b>	<b>25 orang</b>	<b>30 orang</b>	<b>73.503.319</b>	<b>30 orang</b>	<b>73.503.319</b>	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	30 Orang	73.503.319	30 Orang	73.503.319	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Persentase TMP yang dipelihara	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	'Jumlah makam yang dipelihara	98 Makam	98 Makam	25.000.000	98 Makam	25.000.000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	98 Makam	98 Makam	25.000.000	98 Makam	25.000.000	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Persentase sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	85%	75%	1.069.679.700	80%	1.269.679.700	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial
	<b>Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina	144 lembaga	146 lembaga	1.069.679.700	148 lembaga	1.269.679.700	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	5 Sertifikat	93.816.900	5 Sertifikat	93.816.900	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Keluarga	60 Keluarga	700.000.000	60 Keluarga	900.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Orang	92 Orang	8.640.000	92 Orang	8.640.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Orang	92 Orang	267.222.800	92 Orang	267.222.800	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90%	100%	5.069.445.262	100%	5.142.969.762	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	'Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	4.055.930.882	100 persen	4.055.930.882	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4.055.930.882	37 Orang/bulan	4.055.930.882	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	230.391.700	100 persen	333.916.200	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	150.000.000	80 Laporan	239.025.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.000.000	4 Paket	24.499.500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	65.000.000	7 Paket	65.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5.391.700	5 Paket	5.391.700	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100 persen</b>	<b>20.000.000</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	10 Unit	50.000.000	10 Unit	20.000.000	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>522.181.680</b>	<b>100 persen</b>	<b>522.181.680</b>	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	468.288.000	4 Laporan	468.288.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	53.893.680	3 Laporan	53.893.680	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>210.941.000</b>	<b>100 persen</b>	<b>210.941.000</b>	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	40.000.000	6 Unit	40.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	55 Unit	23.900.000	55 Unit	23.900.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit	35.516.000	27 Unit	35.516.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21 Unit	111.525.000	21 Unit	111.525.000	
	<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>				<b>3.851.339.740</b>		<b>4.004.509.740</b>	
	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>persentase pencari kerja yang dilatih</b>	<b>1,96%</b>	<b>0,32%</b>	<b>331.109.200</b>	<b>0,40%</b>	<b>331.109.200</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang tenaga kerja</b>
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Jumlah pelatihan berbasis komputer yang dilaksanakan</b>	<b>112 orang</b>	<b>112 orang</b>	<b>331.109.200</b>	<b>148 orang</b>	<b>331.109.200</b>	
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	2 Lembaga	2 Lembaga	175.000.000	3 Lembaga	175.000.000	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	80 Orang	80 Orang	156.109.200	100 Orang	156.109.200	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			CAPAIAN RKPD	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
			TAHUN 2022	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)</b>	-	0,04%	325.000.000	0,08%	325.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
	<b>Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah penambahan kesempatan kerja</b>	145 orang	145 orang	225.000.000	235 orang	225.000.000	
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	10 Orang	10 Orang	200.000.000	20 Orang	200.000.000	
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	100 Orang	25.000.000	150 Orang	25.000.000	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah Job Fair yang Dilaksanakan</b>	1 Job Fair	1 Job Fair	100.000.000	1 Job Fair	100.000.000	
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1 Orang	1 Orang	100.000.000	1 Orang	100.000.000	
	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif</b>	32,00%	32,00%	280.000.000	32,00%	280.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
	<b>Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah tenaga Kerja sektor informal yang diberikan perlindungan BPJS Kesehatan</b>	8078 orang	8289 orang	280.000.000	8500 orang	280.000.000	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	10 Perkara	10 Perkara	30.000.000	15 Perkara	30.000.000	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	8000 Orang	8000 Orang	250.000.000	8000 Orang	250.000.000	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</b>	100%	100%	2.915.230.540	100%	3.068.400.540	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan keuangan perangkat daerah</b>	100%	100%	2.415.293.540	100%	2.415.293.540	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.415.293.540	23 Orang/bulan	2.415.293.540	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	100%	100%	166.000.000	100%	300.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	3.000.000	8 Paket	3.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	33.000.000	3 Paket	33.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	20.000.000	8 Paket	34.000.000	



KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	220.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>160.848.000</b>	<b>100%</b>	<b>177.848.000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	50 Laporan	6.000.000	50 Laporan	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	50.000.000	48 Laporan	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	104.848.000	12 Laporan	124.848.000	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>173.089.000</b>	<b>100%</b>	<b>175.259.000</b>	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	30.000.000	5 Unit	32.170.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	113.089.000	11 Unit	113.089.000	
	<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				<b>762.984.000</b>		<b>711.869.000</b>	
	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20%	20%	209.580.000	20%	219.580.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Persentase organisasi perempuan yang aktif	100%	100%		100%		
	<b>Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>1. Jumlah OPD yang memiliki data terpilah 2. Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS</b>	<b>24 OPD</b>	<b>24 OPD</b>	<b>30.000.000</b>	<b>24 OPD</b>	<b>40.000.000</b>	
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Perangkat Daerah	24 Perangkat Daerah	30.000.000	24 Perangkat Daerah	40.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	50 Persen	50 Persen	30.000.000	50 Persen	30.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Organisasi	26 Organisasi	30.000.000	26 Organisasi	30.000.000	
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	100 Persen	100 Persen	149.580.000	100 Persen	149.580.000	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Dokumen	15 Dokumen	149.580.000	15 Dokumen	149.580.000	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu</b>	<b>100 BTJ</b>	<b>100 BTJ</b>	<b>164.502.000</b>	<b>100 BTJ</b>	<b>149.532.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</b>
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan	8 Lembaga	8 Lembaga	40.000.000	8 Lembaga	30.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	6 Dokumen	40.000.000	6 Dokumen	30.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	104.502.000	100 Persen	104.502.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan	10 Layanan	104.502.000	12 Layanan	104.502.000	
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000		15.030.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	15 Dokumen	20.000.000	15 Dokumen	15.030.000	
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Persentase indikator KLA yang terpenuhi</b>	<b>79,85%</b>	<b>80,00%</b>	<b>111.765.000</b>	<b>83,00%</b>	<b>120.620.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</b>
	<b>Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA</b>	<b>25 Lembaga</b>	<b>30 Lembaga</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35 Lembaga</b>	<b>43.855.000</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	15 Dokumen	35.000.000	15 Dokumen	43.855.000	
	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase forum anak aktif</b>	<b>46 Persen</b>	<b>50 Persen</b>	<b>76.765.000</b>	<b>70 Persen</b>	<b>76.765.000</b>	
		<b>Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan SRA</b>						
		<b>Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan PRA</b>						
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	35 Orang	76.765.000	35 Orang	76.765.000	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu</b>	<b>100 BTJ</b>	<b>100 BTJ</b>	<b>277.137.000</b>	<b>100 BTJ</b>	<b>222.137.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</b>
	<b>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kasus yang ditindak lanjuti</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>62.137.000</b>	<b>100 persen</b>	<b>62.137.000</b>	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	22.137.000	10 Perangkat Daerah	22.137.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	40.000.000	6 Dokumen	40.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	100 Persen	100 Persen	140.000.000	100 Persen	120.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan	10 Layanan	140.000.000	10 Layanan	120.000.000	
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan bagi anak yang mendukung perlindungan perempuan	8 lembaga	8 lembaga	75.000.000	8 lembaga	40.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	8 Dokumen	75.000.000	8 Dokumen	40.000.000	
	[ OPD ] DINAS PANGAN DAN PERTANIAN				9.160.130.402		9.542.332.402	
	[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				7.697.753.602		7.821.953.602	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	100,54%	100,00%	177.640.000	100,00%	207.840.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pangan
		Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	110,00%	100,00%		100,00%		
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk	2820,34 Kkal/kap/hr	2400 Kkal/kap/hr	82.640.000	2400 Kkal/kap/hr	127.840.000	
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	- Unit	1 Unit	20.000.000	1 Unit	50.000.000	
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	5.200.000	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	50.000.000	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Laporan	2 Laporan	22.640.000	2 Laporan	22.640.000	
	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	3 ton	3 ton	35.000.000	0 ton	20.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	3 Ton	3 Ton	35.000.000	- Ton	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	- Laporan	- Laporan	-	1 Laporan	20.000.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi (AKE)	1850 kkal/kapita/hari	1852 kkal/kapita/hari	60.000.000	1853 kkal/kapita/hari	60.000.000	
		Angka Kecukupan Protein (AKP)	62,7 gram/kapita/hari	62.9 gram/kapita/hari		63 gram/kapita/hari		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	- Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	
	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>Persentase Pengawasan Pangan Segar</b>	-	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pangan</b>
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	- laporan	1 laporan	30.000.000	1 laporan	30.000.000	
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	- Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>7.490.113.602</b>	<b>100%</b>	<b>7.584.113.602</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pangan</b>
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>6.130.489.602</b>	<b>90%</b>	<b>6.130.489.602</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Orang/bulan	54 Orang/bulan	6.130.489.602	54 Orang/bulan	6.130.489.602	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Kepegawaian</b>	<b>90%</b>	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Paket	- Paket	-	- Paket	-	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>266.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>392.000.000</b>	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Laporan	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	240.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	16.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RPKD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Paket	1 Paket	120.000.000	1 Paket	120.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Paket	1 Paket	16.000.000	1 Paket	16.000.000	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Unit	3 Unit	50.000.000	4 Unit	20.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Unit	- Unit	-	- Unit	-	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>606.624.000</b>	<b>90%</b>	<b>604.624.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Laporan	5 Laporan	400.624.000	5 Laporan	400.624.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Laporan	3 Laporan	200.000.000	3 Laporan	200.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Laporan	3 Laporan	6.000.000	3 Laporan	4.000.000	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>437.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>437.000.000</b>	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	- Ha	0,5 Ha	5.000.000	0,5 Ha	5.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Unit	7 Unit	80.000.000	7 Unit	80.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Unit	5 Unit	45.000.000	5 Unit	45.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Unit	55 Unit	307.000.000	55 Unit	307.000.000	
	<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>				-		<b>50.000.000</b>	
	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Persentase Sertifikat Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota</b>	<b>77%</b>	-	-	<b>85%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pertanahan</b>
	<b>Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>				-		<b>50.000.000</b>	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	0 Laporan	-	5 Laporan	50.000.000	
	<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>8.596.703.941</b>		<b>8.366.703.941</b>	
	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>280.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>70.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup</b>
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	<b>2 dokumen</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>280.000.000</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>70.000.000</b>	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000	- Dokumen	-	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000	- Dokumen	70.000.000	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>328.864.040</b>	<b>100%</b>	<b>338.864.040</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup</b>
	<b>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan	<b>2 jenis</b>	<b>2 jenis</b>	<b>308.864.040</b>	<b>2 jenis</b>	<b>308.864.040</b>	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	273.864.040	2 Dokumen	253.864.040	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	- Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	30.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	- Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	
	<b>Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan</b>	<b>1 jenis</b>	<b>1 jenis</b>	<b>20.000.000</b>	<b>1 jenis</b>	<b>30.000.000</b>	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	- Laporan	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	30.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	Persentase pengelolaan RTH Publik	4,23%	4,23%	1.779.878.101	4,23%	1.779.878.101	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
	<b>Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola	2 kecamatan	2 kecamatan	1.779.878.101	2 kecamatan	1.779.878.101	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	- Orang	40 Orang	20.000.000	40 Orang	20.000.000	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Ha	53 Ha	1.759.878.101	53 Ha	1.759.878.101	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap Pemenuhan komitmen Peretujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	-	32,00%	35.000.000	32,00%	45.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
	<b>Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3</b>	Jumlah penghasil limbah B3 yang dibina/diverifikasi lapangan	- fasyankes	24 fasyankes	10.000.000	24 fasyankes	20.000.000	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Peretujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	- Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	20.000.000	
	<b>Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3	- kali	2 kali	25.000.000	2 kali	25.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	- Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	60,53%	55,00%	60.000.000	60,00%	60.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	100 persen	100 persen	60.000.000	100 persen	60.000.000	



KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	- Dokumen	5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	20.000.000	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25 Laporan	30 Laporan	20.000.000	35 Laporan	20.000.000	
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	- Orang	2 Orang	20.000.000	4 Orang	20.000.000	
	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>Persentase cakupan fasilitas MHA terkait PPLH</b>	-	<b>50%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup</b>
	Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	- dokumen	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	- Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	- dokumen	- dokumen	-	1 dokumen	20.000.000	
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	- Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	20.000.000	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>70.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup</b>

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RPKD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	- jenis kegiatan	3 jenis kegiatan	100.000.000	3 jenis kegiatan	70.000.000	
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	- Orang	16 Orang	30.000.000	16 Orang	10.000.000	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	- Dokumen	3 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	20.000.000	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	- Lembaga	1 Lembaga	40.000.000	1 Lembaga	40.000.000	
	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat</b>	<b>1 jenis</b>	<b>1 jenis</b>	<b>40.800.000</b>	<b>1 jenis</b>	<b>40.800.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup</b>
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya	- kelompok	1 kelompok	40.800.000	1 kelompok	40.800.000	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	- Entitas	1 Entitas	40.800.000	1 Entitas	40.800.000	
	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>45.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup</b>
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	- dokumen	5 dokumen	40.000.000	5 dokumen	45.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	- Dokumen	5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	25.000.000	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	- Dokumen	5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	20.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase pengelolaan sampah</b>	82,72%	98,00%	5.912.161.800	98,00%	5.877.161.800	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
	<b>Kegiatan Pengelolaan Sampah</b>	<b>Persentase penanganan sampah</b>	82,72 persen	80 persen	5.897.161.800	79 persen	5.852.161.800	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	21 Unit	22 Unit	1.000.000.000	23 Unit	950.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	- Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	35.000.000	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 Kelompok	7 Kelompok	20.000.000	7 Kelompok	20.000.000	
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	14778 Ton	15000-20000 Ton	4.847.161.800	15000-20000 Ton	4.847.161.800	
	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta</b>	<b>Jumlah pihak swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi</b>	<b>1 pihak swasta</b>	<b>1 pihak swasta</b>	<b>15.000.000</b>	<b>1 pihak swasta</b>	<b>25.000.000</b>	
	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	- Laporan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	25.000.000	
	<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				3.814.026.223		3.980.096.723	
	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan</b>	99,99%	100%	467.791.100	100%	638.358.100	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
	<b>Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase penduduk yang terlayani terhadap dokumen pendaftaran penduduk</b>	100,0%	98,0%	172.101.100	99,0%	172.101.100	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	2500 Dokumen	4500 Dokumen	10.350.000	4500 Dokumen	10.350.000	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	13 Laporan	13 Laporan	161.751.100	13 Laporan	161.751.100	
	<b>Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase pendaftaran penduduk yang terlaksana</b>	<b>- %</b>	<b>100%</b>	<b>245.690.000</b>	<b>100%</b>	<b>365.690.000</b>	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	2500 Dokumen	2500 Dokumen	245.690.000	2500 Dokumen	365.690.000	
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Jumlah jenis penyelenggaraan pendaftaran penduduk</b>	<b>- jenis</b>	<b>1 jenis</b>	<b>50.000.000</b>	<b>1 jenis</b>	<b>100.567.000</b>	
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	100.567.000	
	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil usia 0-18 Tahun</b>	<b>99,99%</b>	<b>100%</b>	<b>189.688.100</b>	<b>100%</b>	<b>139.688.100</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</b>
	<b>Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Jumlah kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 Tahun</b>	<b>18734 akta</b>	<b>2000 akta</b>	<b>189.688.100</b>	<b>2000 akta</b>	<b>139.688.100</b>	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2000 Layanan	2000 Layanan	189.688.100	2000 Layanan	139.688.100	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Presentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>188.707.500</b>	<b>100%</b>	<b>200.707.500</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</b>
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Jumlah laporan penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan</b>	<b>- laporan</b>	<b>12 laporan</b>	<b>168.707.500</b>	<b>12 laporan</b>	<b>170.707.500</b>	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Dokumen	12 Dokumen	138.707.500	12 Dokumen	138.707.500	
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	32.000.000	
	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi</b>	<b>- laporan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>20.000.000</b>	<b>1 laporan</b>	<b>30.000.000</b>	
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data			<b>20.000.000</b>		<b>30.000.000</b>	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	2 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000	3 Dokumen	25.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	- dokumen	3 dokumen	25.000.000	3 dokumen	25.000.000	
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	35 Dokumen	35 Dokumen	25.000.000	35 Dokumen	25.000.000	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90%	100%	2.942.839.523	100%	2.976.343.023	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100%	100%	2.294.383.523	100%	2.294.383.523	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.294.383.523	21 Orang/bulan	2.294.383.523	
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	-	100%	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	35 Paket	-	35 Paket	-	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	133.078.000	100%	161.515.900	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	100.000.000	20 Laporan	110.450.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10.000.000	2 Paket	27.987.900	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	19.524.000	2 Paket	19.524.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	3.554.000	10 Paket	3.554.000	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	50.000.000	100%	20.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	3 Unit	50.000.000	2 Unit	20.000.000	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100%	100%	225.024.000	100%	260.089.600	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				95.456.000		95.456.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	129.568.000	6 Laporan	164.633.600	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RPKD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah</b>	100%	100%	240.354.000	100%	240.354.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	60.000.000	2 Unit	60.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	60.000.000	1 Unit	60.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	120.354.000	9 Unit	120.354.000	
	<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				990.440.000		991.440.000	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga</b>	67%	62%	617.560.000	65%	572.560.000	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana</b>
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina</b>	114 kelompok	114 kelompok	597.560.000	114 kelompok	552.560.000	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	223 Orang	223 Orang	522.560.000	223 Orang	522.560.000	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3 Laporan	3 Laporan	75.000.000	3 Laporan	30.000.000	
	<b>Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB</b>	45,8 persen	50 persen	20.000.000	54 persen	20.000.000	
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>140.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana</b>
	<b>Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>60.000.000</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>48.000.000</b>	
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	0 Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	20.000.000	20 Satuan Pendidikan	17.000.000	
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	5 Laporan	5 Laporan	20.000.000	5 Laporan	14.000.000	
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	20 Laporan	20 Laporan	20.000.000	20 Laporan	17.000.000	
	<b>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah rumah dataku yang dikembangkan</b>	<b>16 unit</b>	<b>16 unit</b>	<b>90.000.000</b>	<b>16 unit</b>	<b>92.000.000</b>	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	
	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	0 Unit	4 Unit	30.000.000	4 Unit	30.000.000	
	<b>Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>40.000.000</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>42.000.000</b>	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Persentase CPR</b>	<b>65%</b>	<b>62%</b>	<b>222.880.000</b>	<b>65%</b>	<b>278.880.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana</b>

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	2262 orang	2287 orang	39.000.000	2300 orang	55.000.000	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	7 Dokumen	7 Dokumen	29.000.000	7 Dokumen	40.000.000	
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30 Organisasi	30 Organisasi	10.000.000	30 Organisasi	15.000.000	
	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina	95 orang	99 orang	147.880.000	99 orang	167.880.000	
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	40 Organisasi	40 Organisasi	122.880.000	40 Organisasi	137.880.000	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	88 Orang	88 Orang	25.000.000	88 Orang	30.000.000	
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	45.8 persen	50 persen	36.000.000	54 persen	56.000.000	
	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	24 Organisasi	24 Organisasi	36.000.000	24 Organisasi	56.000.000	
	[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				10.458.834.550		10.544.908.550	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	0,06545%	0.0605 %	4.298.148.450	0.0582 %	4.434.222.450	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perhubungan
Persentase Kepemilikan keur kendaraan bermotor		66,75%	68,00%	69,50%				
Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan		0.003727 angka	0.003700 angka	0.003681 angka				



KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	<b>Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen RIJ</b>	- Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	-	
	<b>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas baik</b>	<b>84.20 persentase</b>	<b>84.30 persentase</b>	<b>2.823.862.450</b>	<b>84.40 persentase</b>	<b>2.823.862.450</b>	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1513 Unit	1513 Unit	2.723.862.450	1533 Unit	2.723.862.450	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Jumlah terminal Tipe C yang di kelola</b>	<b>1 unit</b>	<b>1 unit</b>	<b>88.926.000</b>	<b>1 unit</b>	<b>80.000.000</b>	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1 Unit	1 Unit	88.926.000	1 Unit	80.000.000	
	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Jumlah Lokasi Parkir tepi Jalan Umum</b>	<b>16 Titik</b>	<b>16 Titik</b>	<b>462.960.000</b>	<b>16 Titik</b>	<b>462.960.000</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	462.960.000	12 Laporan	462.960.000	
	<b>Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>persentase kendaraan yang terlayani melakukan pengujian berkala</b>	<b>96.64 Persentase</b>	<b>96.64 Persentase</b>	<b>200.000.000</b>	<b>97.00 Persentase</b>	<b>125.000.000</b>	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	12 Unit	75.000.000	12 Unit	100.000.000	
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3500 Dokumen	3500 Dokumen	25.000.000	1000 Dokumen	25.000.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 unit Unit	1 unit Unit	100.000.000	0 Unit	-	
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas</b>	<b>3 kegiatan</b>	<b>4 kegiatan</b>	<b>440.000.000</b>	<b>4 kegiatan</b>	<b>573.926.000</b>	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	20.000.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	370.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	7 Unit	2 Unit	100.000.000	2 Unit	153.926.000	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	30.000.000	
	<b>Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang</b>	<b>1215 angka</b>	<b>1215 angka</b>	<b>182.400.000</b>	<b>1215 angka</b>	<b>318.474.000</b>	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	182.400.000	12 Laporan	318.474.000	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>6.160.686.100</b>	<b>100%</b>	<b>6.110.686.100</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perhubungan</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan keuangan perangkat daerah</b>	<b>100 Persentase</b>	<b>100 Persentase</b>	<b>5.013.792.100</b>	<b>100 Persentase</b>	<b>5.013.792.100</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	5.013.792.100	14 Orang/bulan	5.013.792.100	
	<b>[ KEGIATAN ] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	<b>0 paket</b>	<b>0 paket</b>	<b>-</b>	<b>0 paket</b>	<b>-</b>	
	<b>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</b>	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	-	0 Paket	-	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran</b>	<b>100 Persentase</b>	<b>100 Persentase</b>	<b>163.530.000</b>	<b>100 Persentase</b>	<b>293.530.000</b>	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	220.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10.000.000	2 Paket	20.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	45.000.000	30 Paket	45.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	25 Paket	8.530.000	25 Paket	8.530.000	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>90 Persentase</b>	<b>90 Persentase</b>	<b>50.000.000</b>	<b>90 Persentase</b>	<b>20.000.000</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Unit	44 Unit	50.000.000	36 Unit	20.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah</b>	<b>100 Persentase</b>	<b>100 Persentase</b>	<b>394.144.000</b>	<b>100 Persentase</b>	<b>394.144.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	334.144.000	12 Laporan	334.144.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	60.000.000	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentase pemeliharaan barang milik daerah yang selesai dilaksanakan</b>	<b>100 Persentase</b>	<b>100 Persentase</b>	<b>539.220.000</b>	<b>100 Persentase</b>	<b>389.220.000</b>	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	15 Unit	15.000.000	15 Unit	15.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	192.320.000	2 Unit	42.320.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	104.600.000	2 Unit	104.600.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	11 Unit	150.300.000	11 Unit	150.300.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	18 Unit	77.000.000	18 Unit	77.000.000	
	<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				<b>6.849.620.985</b>		<b>6.941.473.335</b>	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik</b>	<b>42,00%</b>	<b>44,00%</b>	<b>1.180.471.300</b>	<b>44,50%</b>	<b>1.214.166.300</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah follower pada laman resmi kominfo padang panjang (instagram)</b>	<b>25387 followers</b>	<b>27000 followers</b>	<b>1.180.471.300</b>	<b>28000 followers</b>	<b>1.214.166.300</b>	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.271.250	1 Dokumen	33.695.000	
	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	5 Layanan	5 Layanan	504.776.250	5 Layanan	513.200.000	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	443.266.650	1 Dokumen	451.690.400	
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	207.157.150	1 Dokumen	215.580.900	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Indeks domain tata kelola SPBE</b>	3,37 Indeks	3,60 Indeks	2.154.596.500	3,70 Indeks	2.154.596.500	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	na aplikasi	4 aplikasi	2.154.596.500	6 aplikasi	2.154.596.500	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.876.642.900	1 Dokumen	1.876.642.900	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	277.953.600	1 Dokumen	277.953.600	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</b>	97%	100%	3.514.553.185	100%	3.572.710.535	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	na persen	100 persen	2.859.323.385	100 persen	2.859.323.385	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.859.323.385	25 Orang/bulan	2.859.323.385	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	na persen	100 persen	-	100 persen	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		-	0 Paket	-	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran</b>	na persen	100 persen	203.141.000	100 persen	291.298.350	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	10.000.000	3 Paket	12.053.450	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	75 Laporan	150.000.000	125 Laporan	250.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	35.000.000	9 Paket	21.103.900	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	8.141.000	4 Paket	8.141.000	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	na persen	100 persen	50.000.000	100 persen	20.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RPKD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	50.000.000	3 Unit	20.000.000	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>258.480.000</b>	<b>100 persen</b>	<b>258.480.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	148.480.000	1 Laporan	148.480.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	110.000.000	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>na persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>143.608.800</b>	<b>100 persen</b>	<b>143.608.800</b>	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	26.440.000	7 Unit	26.440.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	87.168.800	7 Unit	87.168.800	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	
	<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>				<b>7.919.134.933</b>		<b>7.614.314.083</b>	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase Kenaikan pendapatan UMKM yang di bantu</b>	<b>35%</b>	<b>40%</b>	<b>75.200.000</b>	<b>45%</b>	<b>75.200.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah</b>
	<b>Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Persentase Kenaikan Pendapatan UMKM yang dibantu</b>	<b>35 persentase</b>	<b>40 persentase</b>	<b>75.200.000</b>	<b>45 persentase</b>	<b>75.200.000</b>	
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	75.200.000	200 Unit Usaha	75.200.000	
	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase penurunan koperasi yang bermasalah</b>	<b>-</b>	<b>31%</b>	<b>35.000.000</b>	<b>27%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah</b>

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengawasan koperasi	10 koperasi	10 koperasi	35.000.000	12 koperasi	40.000.000	
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	- Unit Usaha	20 Unit Usaha	35.000.000	20 Unit Usaha	40.000.000	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi yang dibina</b>	-	<b>18,00%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>26,31 %</b>	<b>50.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah</b>
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dibina	7 koperasi	7 koperasi	50.000.000	10 koperasi	50.000.000	
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Unit Usaha	15 Unit Usaha	50.000.000	15 Unit Usaha	50.000.000	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Persentase peningkatan omset usaha</b>		<b>5,00%</b>	<b>312.600.000</b>	<b>10,00%</b>	<b>250.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah</b>
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	<b>Persentase peningkatan omset usaha</b>	<b>0 persentase</b>	<b>5 persentase</b>	<b>312.600.000</b>	<b>10 persentase</b>	<b>250.000.000</b>	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	0 Unit Usaha	40 Unit Usaha	50.000.000	40 Unit Usaha	50.000.000	
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	0 Unit Usaha	20 Unit Usaha	262.600.000	20 Unit Usaha	200.000.000	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>7.446.334.933</b>	<b>100%</b>	<b>7.199.114.083</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah</b>
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>Persentase administrasi keuangan yang diselesaikan</b>	<b>100 persentase</b>	<b>100 persentase</b>	<b>5.797.722.108</b>	<b>100 persentase</b>	<b>5.804.522.108</b>	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	5.797.722.108	53 Orang/bulan	5.804.522.108	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi umum yang diselesaikan</b>	<b>100 persentase</b>	<b>100 persentase</b>	<b>312.524.950</b>	<b>100 persentase</b>	<b>417.244.900</b>	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	227.915.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10.000.000	2 Paket	36.804.950	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	22.928.250	1 Paket	22.928.250	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	129.596.700	1 Paket	129.596.700	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang di adakan</b>	<b>100 persentase</b>	<b>100 persentase</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100 persentase</b>	<b>40.000.000</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	2 Unit	50.000.000	1 Unit	20.000.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	20.000.000	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase jasa penunjang yang disediakan</b>	<b>100 persentase</b>	<b>100 persentase</b>	<b>548.730.625</b>	<b>100 persentase</b>	<b>599.989.825</b>	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	456.000.000	1 Laporan	507.259.200	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	86.730.625	3 Laporan	86.730.625	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang dipelihara</b>	<b>100 persentase</b>	<b>100 persentase</b>	<b>737.357.250</b>	<b>100 persentase</b>	<b>337.357.250</b>	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	500.000.000	1 Unit	100.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	60.971.500	20 Unit	60.971.500	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit	119.244.750	27 Unit	119.244.750	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	42.141.000	1 Unit	42.141.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				138.200.000		183.200.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase capaian fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal	-		-	12%	75.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang penanaman modal
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pra Studi Kelayakan dan Video Promosi Investasi	1 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	75.000.000	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	75.000.000	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	30.200.000.000 Rupiah	35.000.000.000 Rupiah	30.000.000	37.000.000.000 Rupiah	75.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang penanaman modal
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi yang dilaksanakan	2 dokumen	2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	75.000.000	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	75.000.000	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	96,18%	96,87%	108.200.000	96,88%	108.200.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang penanaman modal
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	100%	100%	108.200.000	100%	108.200.000	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	120 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	15.000.000	140 Pelaku Usaha	15.000.000	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	24.800.000	12 Kegiatan Usaha	24.800.000	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	75 Orang	75 Orang	68.400.000	85 Orang	68.400.000	
	[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLHAHRAGA				6.367.224.700		7.426.008.700	



KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Pemenuhan indikator kota layak pemuda	-	3 indikator	150.000.000	4 indikator	150.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga
	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda	2 kegiatan	2 kegiatan	150.000.000	2 kegiatan	100.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 Orang	30 Orang	64.278.450	30 Orang	50.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 Orang	30 Orang	85.721.550	30 Orang	50.000.000	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah organisasi yang diberdayakan dan dikembangkan</b>	<b>1 OKP</b>	<b>1 OKP</b>	-	<b>1 OKP</b>	<b>50.000.000</b>	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>Jumlah cabang olahraga yang dibina</b>	<b>44 cabang</b>	<b>44 cabang</b>	<b>1.088.216.000</b>	<b>45 cabang</b>	<b>2.150.000.000</b>	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga
	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan</b>	<b>1 -</b>	<b>1 -</b>	<b>100.000.000</b>	<b>1 -</b>	<b>500.000.000</b>	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit	100.000.000	1 Unit	500.000.000	
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan</b>	<b>1 kompetisi/even</b>	<b>1 kompetisi/even</b>	<b>530.000.000</b>	<b>5 kompetisi/even</b>	<b>800.000.000</b>	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	30 Orang	30 Orang	500.000.000	30 Orang	500.000.000	
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	300.000.000	
	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi</b>	<b>1 organisasi</b>	<b>1 organisasi</b>	<b>84.336.000</b>	<b>1 organisasi</b>	<b>120.000.000</b>	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RPKD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	1 Pelatda	-	1 Pelatda	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektor Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektor Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	14.336.000	1 Dokumen	20.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	30 Orang	30 Orang	70.000.000	30 Orang	100.000.000	
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	0 Pelatda	0 Pelatda	-	0 Pelatda	-	
	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan</b>	<b>2 kegiatan</b>	<b>2 kegiatan</b>	<b>373.880.000</b>	<b>2 kegiatan</b>	<b>730.000.000</b>	
	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	2 Unit	3 Unit	300.000.000	3 Unit	200.000.000	
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	0 Laporan	0 Laporan	-	5 Laporan	30.000.000	
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Dokumen	2 Dokumen	73.880.000	2 Dokumen	400.000.000	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina</b>	<b>1 organisasi</b>	<b>1 organisasi</b>	<b>100.000.000</b>	<b>1 organisasi</b>	<b>150.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga</b>
	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan</b>	<b>1 organisasi</b>	<b>1 organisasi</b>	<b>100.000.000</b>	<b>1 organisasi</b>	<b>150.000.000</b>	
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	100.000.000	1 Organisasi	150.000.000	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>5.029.008.700</b>	<b>100%</b>	<b>4.976.008.700</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan keuangan perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3.421.336.700</b>	<b>100%</b>	<b>3.421.336.700</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	3.421.336.700	27 Orang/bulan	3.421.336.700	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	<b>100%</b>	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	0 Paket	-	0 Paket	-	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>206.000.000</b>	<b>1</b>	<b>204.000.000</b>	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	150.000.000	100 Laporan	150.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	11.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	31.000.000	1 Paket	28.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>60.000.000</b>	<b>1</b>	<b>20.000.000</b>	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	12.000.000	0 Unit	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	48.000.000	3 Unit	20.000.000	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah</b>	<b>100 %%</b>	<b>100 %%</b>	<b>1.131.672.000</b>	<b>100 %%</b>	<b>1.131.672.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	43 Laporan	43 Laporan	1.006.672.000	43 Laporan	1.006.672.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	122.000.000	36 Laporan	122.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>210.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>199.000.000</b>	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	80.000.000	2 Unit	70.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	43.000.000	50 Unit	40.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	5 Unit	2.000.000	10 Unit	4.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	85.000.000	7 Unit	85.000.000	
	<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				<b>30.000.000</b>		<b>30.000.000</b>	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	indeks KAMI	365 indeks	456 indeks	30.000.000	500 indeks	30.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang statistik sektoral
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	na dokumen	3 dokumen	30.000.000	3 dokumen	30.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	na Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	
	<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				11.950.000		11.950.000	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Indeks Keamanan Informasi	365	375	11.950.000	385	11.950.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang persandian
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan	na pelatihan	1 pelatihan	11.950.000	1 pelatihan	11.950.000	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	na Laporan	1 Laporan	11.950.000	1 Laporan	11.950.000	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>				119.776.000		444.776.000	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	-	2 Objek	119.776.000	4 Objek	444.776.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kebudayaan
	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebudayaan dengan masyarakat pelakunya yang dikelola	2 Objek	2 Objek	40.000.000	2 Objek	130.000.000	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	0 Objek	2 Objek	40.000.000	4 Objek	130.000.000	
	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional dengan masyarakat pelakunya yang dilestarikan	3 nagari	3 nagari	60.000.000	3 nagari	80.000.000	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	0 Laporan	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	50.000.000	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	0 Objek	3 Objek	30.000.000	3 Objek	30.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat yang dibina	3 lembaga	3 lembaga	19.776.000	3 lembaga	234.776.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	0 Unit	3 Unit	19.776.000	3 Unit	19.776.000	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	0 Orang	0 Orang	-	90 Orang	65.000.000	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	0 Objek	0 Objek	-	3 Objek	150.000.000	
	<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>				<b>721.274.000</b>		<b>691.274.000</b>	
	<b>[ TUJUAN ]</b> Meningkatnya Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat				<b>(3.776.935.882)</b>		<b>(3.835.735.882)</b>	
	<b>[ SASARAN ]</b> Meningkatnya Minat Baca Masyarakat							
	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	Jumlah anggota pustaka	3025 Orang	3200 Orang	696.274.000	3325 Orang	641.274.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perpustakaan
	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan ke Perpustakaan	30600 Orang	31000 Orang	354.388.000	32000 Orang	382.622.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar	500 Eksemplar	276.188.000	700 Eksemplar	299.122.000	
	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	500 Eksemplar	500 Eksemplar	35.000.000	700 Eksemplar	35.000.000	
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	43.200.000	5 Perpustakaan	48.500.000	
	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase minat baca masyarakat	50%	50%	341.886.000	50%	258.652.000	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	74.071.800	6 Perpustakaan	58.652.000	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	68 Lokus	68 Lokus	267.814.200	68 Lokus	200.000.000	
	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	Persentase peningkatan koleksi naskah kuno	-	25%	25.000.000	33%	50.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perpustakaan

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RPKD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi naskah kuno	0 Naskah	8 Naskah	25.000.000	9 Naskah	25.000.000	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	1 Orang	1 Orang	25.000.000	1 Orang	25.000.000	
	Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya etnis Nusantara yang dikembangkan	-	-	-	9 Naskah	25.000.000	
	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	600 Eksemplar	600 Eksemplar	-	700 Eksemplar	25.000.000	
	<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>				<b>3.776.935.882</b>		<b>3.835.735.882</b>	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	87%	50%	25.000.000	60%	50.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kearsipan
	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan pengolahan arsip dinamis	15 OPD	15 OPD	25.000.000	20 OPD	25.000.000	
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Laporan	23 Laporan	25.000.000	23 Laporan	25.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip statis yang telah tersedia di JIKN	40%	50%	-	60%	25.000.000	
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	270 Pengguna	300 Pengguna	-	400 Pengguna	25.000.000	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	Jumlah arsip statis yang terselamatkan/jumlah arsip yang tersimpan pada LKD	5000 dokumen	5000 dokumen	92.471.200	5000 dokumen	92.471.200	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kearsipan
	Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang diperbaiki	40%	50%	22.000.000	60%	22.000.000	
	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	15 Arsip	15 Arsip	22.000.000	15 Arsip	22.000.000	
	Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase autentikasi arsip statis dan arsip alihmedia kota	75%	75%	70.471.200	75%	70.471.200	
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1000 Arsip	1000 Arsip	70.471.200	1000 Arsip	70.471.200	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90%	100%	3.659.464.682	100%	3.693.264.682	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kearsipan

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah bulan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan ASN</b>	<b>14 Bulan</b>	<b>14 Bulan</b>	<b>2.812.779.682</b>	<b>14 Bulan</b>	<b>2.812.779.682</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.812.779.682	26 Orang/bulan	2.812.779.682	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>199.605.000</b>	<b>100%</b>	<b>233.405.000</b>	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176 Laporan	200 Laporan	150.000.000	200 Laporan	172.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	7 Paket	10.000.000	8 Paket	21.800.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket	25 Paket	33.000.000	25 Paket	33.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8 Paket	6.605.000	8 Paket	6.605.000	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase jumlah penunjang lancarnya pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia</b>	<b>0,9</b>	<b>1</b>	<b>502.080.000</b>	<b>1</b>	<b>502.080.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	16 Laporan	448.080.000	16 Laporan	448.080.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	60 Laporan	48.000.000	60 Laporan	48.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	6.000.000	2 Laporan	6.000.000	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase jumlah gedung dan jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>145.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>145.000.000</b>	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	33.000.000	3 Unit	33.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	46 Unit	22.000.000	46 Unit	22.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit	90.000.000	11 Unit	90.000.000	
	<b>3 URUSAN PEMERINTAH PILIHAN</b>							
3.1	<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>568.998.800</b>		<b>592.178.800</b>	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RPKD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Produksi budidaya ikan</b>	<b>735,5 ton/tahun</b>	<b>751 ton/tahun</b>	<b>526.678.800</b>	<b>752 ton/tahun</b>	<b>547.178.800</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Jumlah Pelaku Perikanan yang menerapkan teknologi perikanan</b>	<b>20 orang</b>	<b>20 orang</b>	<b>526.678.800</b>	<b>20 orang</b>	<b>547.178.800</b>	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Unit	1 Unit	15.000.000	1 Unit	35.500.000	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Unit	1 Unit	511.678.800	1 Unit	511.678.800	
	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan</b>	<b>-</b>	<b>1 jenis</b>	<b>42.320.000</b>	<b>1 jenis</b>	<b>45.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan</b>
	<b>Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kota Padang Panjang dan Provinsi</b>	<b>2 kali</b>	<b>2 kali</b>	<b>42.320.000</b>	<b>2 kali</b>	<b>45.000.000</b>	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	- Dokumen	1 Dokumen	42.320.000	1 Dokumen	45.000.000	
3.2	<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>				<b>910.000.000</b>			
	<b>[ TUJUAN ] Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah</b>							
	<b>[ SASARAN ] Meningkatnya PAD Pariwisata</b>							
	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>Rasio lama kunjungan wisata</b>	<b>1,5</b>	<b>1,15</b>	<b>530.000.000</b>	<b>1,2</b>	<b>650.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pengelolaan daya tarik wisata</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80%</b>	<b>100.000.000</b>	
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	2 Lokasi	80.000.000	2 Lokasi	100.000.000	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase cakupan pengelolaan kawasan strategis pariwisata</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>200.000.000</b>	
	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Lokasi	0 Lokasi	-	1 Lokasi	100.000.000	



KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RPKD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	100.000.000	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah destinasi wisata yang dikelola</b>	<b>4 destinasi</b>	<b>4 destinasi</b>	<b>400.000.000</b>	<b>4 destinasi</b>	<b>300.000.000</b>	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	400.000.000	2 Unit	300.000.000	
	<b>Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan</b>	<b>0 unit</b>	<b>0 unit</b>	<b>-</b>	<b>15 unit</b>	<b>50.000.000</b>	
	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	0 Unit Usaha	20 Unit Usaha	-	20 Unit Usaha	50.000.000	
	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>Jumlah kunjungan wisatawan</b>	<b>236511 orang</b>	<b>600000 orang</b>	<b>220.000.000</b>	<b>660000 orang</b>	<b>285.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata</b>
	<b>Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase cakupan pelayanan promosi wisata</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>220.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>285.000.000</b>	
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	55.000.000	
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen	10 Dokumen	30.000.000	15 Dokumen	30.000.000	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Laporan	5 Laporan	140.000.000	7 Laporan	200.000.000	
	<b>[ SASARAN ] Pengembangan Ekonomi Kreatif</b>							
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</b>	<b>44 pelaku usaha Ekonomi kreatif</b>	<b>70 pelaku usaha Ekonomi kreatif</b>	<b>70.000.000</b>	<b>90 pelaku usaha Ekonomi kreatif</b>	<b>80.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata</b>
	<b>Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah prasana kreatif yang disediakan</b>	<b>1 Kreatif Hub</b>	<b>1 Kreatif Hub</b>	<b>40.000.000</b>	<b>1 Kreatif Hub</b>	<b>50.000.000</b>	
	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	0 Unit	10 Unit	40.000.000	10 Unit	50.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI	50 produk	50 produk	30.000.000	50 produk	30.000.000	
	Fasilitas Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	44 Dokumen	40 Dokumen	30.000.000	40 Dokumen	30.000.000	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina</b>	<b>14 Sub sektor</b>	<b>14 Sub sektor</b>	<b>90.000.000</b>	<b>14 Sub sektor</b>	<b>245.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata</b>
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina</b>	<b>14 sub sektor</b>	<b>14 sub sektor</b>	<b>90.000.000</b>	<b>14 sub sektor</b>	<b>195.000.000</b>	
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000	7 Laporan	80.000.000	
	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	0 Orang	0 Orang	-	60 Orang	75.000.000	
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	30 Orang	30 Orang	40.000.000	30 Orang	40.000.000	
	<b>Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	<b>Jumlah pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif</b>	<b>4 kelompok</b>	<b>4 kelompok</b>	<b>-</b>	<b>4 kelompok</b>	<b>50.000.000</b>	
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0 Orang	0 Orang	-	50 Orang	50.000.000	
3.3	<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>				<b>893.378.000</b>		<b>1.128.200.000</b>	
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian</b>	<b>75%</b>	<b>77%</b>	<b>328.874.000</b>	<b>80%</b>	<b>402.854.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pertanian</b>
		<b>Persentase Pemenuhan Sarana Peternakan</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>		<b>80%</b>		
	<b>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang Tersedia</b>	<b>2 jenis</b>	<b>2 jenis</b>	<b>20.000.000</b>	<b>2 jenis</b>	<b>20.000.000</b>	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	- Laporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kelompok Tani Pembudidaya Pertanian Organik</b>	<b>- kelompok</b>	<b>2 kelompok</b>	<b>26.020.000</b>	<b>2 kelompok</b>	<b>100.000.000</b>	
		<b>Produksi Padi</b>	<b>10468 ton</b>	<b>8443,5 ton</b>		<b>8573,4 ton</b>		

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		<b>Produksi Tanaman Hias</b>	<b>80555 tangkai</b>	<b>81555 tangkai</b>		<b>82055 tangkai</b>		
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	- Dokumen	1 Dokumen	26.020.000	1 Dokumen	100.000.000	
	<b>Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan</b>	<b>12 ekor</b>	<b>4 ekor</b>	<b>262.854.000</b>	<b>4 ekor</b>	<b>262.854.000</b>	
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	- Laporan	1 Laporan	262.854.000	1 Laporan	262.854.000	
	<b>Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	<b>Jumlah KK Miskin yang Dibantu</b>	<b>24 kk</b>	<b>2 kk</b>	<b>20.000.000</b>	<b>2 kk</b>	<b>20.000.000</b>	
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	- Ekor	2 Ekor	20.000.000	2 Ekor	20.000.000	
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian</b>	<b>100%</b>	<b>77%</b>	<b>131.700.000</b>	<b>80%</b>	<b>181.700.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pertanian</b>
		<b>Persentase pemenuhan prasarana peternakan</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>		<b>80%</b>		
	<b>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</b>	<b>1 unit</b>	<b>1 unit</b>	<b>131.700.000</b>	<b>1 unit</b>	<b>181.700.000</b>	
		<b>Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani</b>	<b>1 unit</b>	<b>1 unit</b>		<b>1 unit</b>		
		<b>Jumlah Prasarana Peternakan Yang Disediakan</b>	<b>1 unit</b>	<b>1 unit</b>		<b>1 unit</b>		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	- Unit	1 Unit	97.700.000	1 Unit	97.700.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	- Unit	1 Unit	34.000.000	1 Unit	34.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	- Unit	1 Unit	-	1 Unit	50.000.000	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB</b>	<b>57 ekor</b>	<b>40 ekor</b>	<b>14.000.000</b>	<b>41 ekor</b>	<b>14.000.000</b>	
	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	- Laporan	1 Laporan	14.000.000	1 Laporan	14.000.000	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus</b>	<b>39,92% **</b>	<b>8,50%</b>	<b>360.484.000</b>	<b>9,00%</b>	<b>426.884.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pertanian</b>

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Medis Veteriner	1	1	201.984.000	1	241.984.000	
	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Laporan	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	120.000.000	
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	- Laporan	1 Laporan	121.984.000	1 Laporan	121.984.000	
	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	1	1	61.900.000	1	61.900.000	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	- Laporan	1 Laporan	61.900.000	1 Laporan	61.900.000	
	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Livestock Expo yang Diikuti	0 kali	1 kali	96.600.000	1 kali	123.000.000	
		Jumlah Sertifikasi Produk Susu	0 sertifikat	1 sertifikat		1 sertifikat		
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	- Laporan	1 Laporan	76.600.000	1 Laporan	100.000.000	
	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	- Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	23.000.000	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani</b>	<b>60,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>80,00%</b>	<b>16.762.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pertanian</b>
	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)	104,4 ha	147 ha	20.000.000	147 ha	16.762.000	
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	- Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	- Ha	10 Ha	10.000.000	10 Ha	6.762.000	
	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan Inovasi Teknologi Pertanian</b>	<b>-</b>	<b>13,80%</b>	<b>52.320.000</b>	<b>27,60%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pertanian</b>
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan	20 keltan	20 keltan	52.320.000	20 keltan	100.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	- Unit	1 Unit	30.000.000	1 Unit	50.000.000	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	- Unit	1 Unit	22.320.000	1 Unit	50.000.000	
3.4	<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				4.759.810.413		4.917.410.413	
	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usaha di bidang perdagangan</b>	25%	34%	30.000.000	37%	55.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan
	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	<b>Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin usaha</b>	0 pelaku usaha	150 pelaku usaha	20.000.000	200 pelaku usaha	25.000.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	100 Dokumen	20.000.000	100 Dokumen	25.000.000	
	<b>Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Junlah pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi ,pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah kab/kota</b>	0 kali	2 kali	10.000.000	2 kali	30.000.000	
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	200 Laporan	200 Laporan	10.000.000	200 Laporan	30.000.000	
	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok</b>	7%	6%	-	6%	32.600.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan
	<b>Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaksanakan</b>	0 kali	250 kali	-	250 kali	32.600.000	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 Laporan	250 Laporan	-	250 Laporan	32.600.000	
	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Persentase Pengawasan alat UTTP yang bertanda tera sah</b>	50%	60%	193.214.113	65%	193.214.113	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah</b>	na persentase	60 persentase	193.214.113	65 persentase	193.214.113	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1000 Unit	1200 Unit	193.214.113	1400 Unit	193.214.113	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Persentase pasar ber-SNI</b>	<b>80%</b>	<b>90%</b>	<b>4.311.596.300</b>	<b>95%</b>	<b>4.311.596.300</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan</b>
	<b>Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Persentase pasar ber SNI</b>	<b>85 persentase</b>	<b>90 persentase</b>	<b>4.311.596.300</b>	<b>95 persentase</b>	<b>4.311.596.300</b>	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	2 Unit	1.615.919.000	2 Unit	1.615.919.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1 Unit	2.695.677.300	1 Unit	2.695.677.300	
	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital</b>	<b>-</b>	<b>15,00%</b>	<b>225.000.000</b>	<b>5,00%</b>	<b>325.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan</b>
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Jumlah Pelaku usaha yang bertransaksi digital</b>	<b>0 pelaku usaha</b>	<b>75 pelaku usaha</b>	<b>225.000.000</b>	<b>150 pelaku usaha</b>	<b>325.000.000</b>	
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	0 UMKM	60 UMKM	125.000.000	60 UMKM	125.000.000	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0 UMKM	15 UMKM	100.000.000	15 UMKM	200.000.000	
3.5	<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				<b>631.299.800</b>		<b>709.299.800</b>	
	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Persentase IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikat dan standarisasi produk industri (sertifikat halal,MD,GMP,SNI dan Merk)</b>	<b>-</b>	<b>5,0%</b>	<b>631.299.800</b>	<b>8,0%</b>	<b>706.299.800</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perindustrian</b>
	<b>Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya pembinaan IKM nbaik melalui workshop, pendampingan maupun pembinaan lainnya</b>	<b>0 kali</b>	<b>12 kali</b>	<b>631.299.800</b>	<b>12 kali</b>	<b>706.299.800</b>	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	0 Dokumen	1 Dokumen	31.299.800	1 Dokumen	106.299.800	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	0 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000	1 Dokumen	600.000.000	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>Peningkatan IKM yang memiliki perizinan perindustrian</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 ikm</b>	<b>3.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perindustrian</b>



KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RPKD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	0 Dokumen	7 Dokumen	1.345.614.000	7 Dokumen	1.500.000.000	
	<b>Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Persentase terselesaikannya masalah hukum</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>375.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>375.000.000</b>	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	10 Kasus	300.000.000	10 Kasus	300.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	35 Dokumen	35 Dokumen	50.000.000	35 Dokumen	50.000.000	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	0 Dokumen	10 Dokumen	25.000.000	10 Dokumen	25.000.000	
	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan</b>	<b>90%</b>	<b>60%</b>	<b>385.000.000</b>	<b>75%</b>	<b>390.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan sekretariat daerah</b>
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Persentase terselenggaranya kebijakan/kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan</b>	<b>0,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75,0%</b>	<b>75.000.000</b>	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	0 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi pembangunan yang dilaksanakan</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	0 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Persentase pencapaian kegiatan pembangunan</b>	<b>0%</b>	<b>90%</b>	<b>210.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>210.000.000</b>	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0 Dokumen	250 Dokumen	10.000.000	250 Dokumen	10.000.000	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	0 Dokumen	90 Dokumen	100.000.000	90 Dokumen	100.000.000	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	0 Orang	220 Orang	100.000.000	230 Orang	100.000.000	
	<b>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Presentase pemenuhan urusan dipenuhi</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>55.000.000</b>	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	0 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	35.000.000	



KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>23.799.566.535</b>	<b>100%</b>	<b>30.491.886.535</b>	<b>OPD yang menangani urusan sekretariat daerah</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan keuangan perangkat daerah</b>	<b>0%</b>	<b>90%</b>	<b>13.996.784.774</b>	<b>90%</b>	<b>14.344.584.774</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	110 Orang/bulan	13.996.784.774	110 Orang/bulan	14.344.584.774	
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>0%</b>	<b>90%</b>	<b>-</b>	<b>90%</b>	<b>-</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	0 Paket	-	0 Paket	-	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran</b>	<b>0%</b>	<b>90%</b>	<b>2.745.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>5.760.000.000</b>	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	200 Laporan	2.000.000.000	200 Laporan	4.500.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	500 Laporan	500.000.000	500 Laporan	1.000.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	20.000.000	1 Paket	35.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	145.000.000	1 Paket	145.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	3 Paket	30.000.000	3 Paket	30.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan barang milik daerah</b>	<b>0%</b>	<b>80%</b>	<b>-</b>	<b>80%</b>	<b>2.000.000.000</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	-	2 Unit	2.000.000.000	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase peyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>0%</b>	<b>90%</b>	<b>1.590.220.000</b>	<b>90%</b>	<b>1.590.220.000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	313.500.000	1 Laporan	313.500.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	510.000.000	1 Laporan	510.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	756.720.000	1 Laporan	756.720.000	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan barang milik daerah</b>	<b>0%</b>	<b>80%</b>	<b>2.393.241.761</b>	<b>80%</b>	<b>2.403.241.761</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	82 Unit	82 Unit	1.993.241.761	82 Unit	1.993.241.761	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	9 Unit	100.000.000	9 Unit	110.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	300.000.000	4 Unit	300.000.000	
	<b>Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Jumlah Rumah Tangga yang difasilitasi</b>	<b>0 Objek</b>	<b>3 Objek</b>	<b>2.070.480.000</b>	<b>3 Objek</b>	<b>3.270.000.000</b>	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.835.600.000	1 Paket	2.000.000.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	164.880.000	1 Paket	1.200.000.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	70.000.000	1 Paket	70.000.000	
	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>	<b>Persentase penataan organisasi yang tepat</b>	<b>0%</b>	<b>65%</b>	<b>360.000.000</b>	<b>75%</b>	<b>480.000.000</b>	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	150.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	4 Laporan	260.000.000	5 Laporan	260.000.000	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	70.000.000	
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Walikota dan Wakil Walikota</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>643.840.000</b>	<b>100%</b>	<b>643.840.000</b>	
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	0 Laporan	300 Laporan	421.520.000	144 Laporan	421.520.000	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	70.000.000	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan	152.320.000	6 Laporan	152.320.000	
4.2	<b>[ URUSAN ] SEKRETARIAT DPRD</b>				<b>52.615.477.325</b>			
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>11.723.492.250</b>	<b>90%</b>	<b>20.425.268.750</b>	<b>OPD yang menangani urusan sekretariat DPRD</b>

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	<b>Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Persentase fasilitasi peraturan daerah dan peraturan DPRD</b>	- %	<b>90%</b>	<b>86.930.000</b>	<b>90%</b>	<b>95.375.000</b>	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	- Dokumen	1 Dokumen	11.100.000	1 Dokumen	3.500.000	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	- Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	70.000.000	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	- Dokumen	1 Dokumen	8.750.000	1 Dokumen	13.965.000	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	- Dokumen	1 Dokumen	7.080.000	1 Dokumen	7.910.000	
	<b>Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase pembahasan kebijakan anggaran</b>	- %	<b>90%</b>	<b>169.685.350</b>	<b>90%</b>	<b>169.685.350</b>	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	- Dokumen	2 Dokumen	21.407.000	2 Dokumen	21.407.000	
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	- Dokumen	2 Dokumen	35.813.500	2 Dokumen	35.813.500	
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	- Dokumen	2 Dokumen	51.241.500	2 Dokumen	51.241.500	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	- Dokumen	2 Dokumen	25.814.750	2 Dokumen	25.814.750	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	- Dokumen	2 Dokumen	35.408.600	2 Dokumen	35.408.600	
	<b>Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase terfasilitasinya pembahasan dokumen LKPJ dan hearing dengan mitra kerja</b>	- %	<b>90%</b>	<b>31.716.450</b>	<b>90%</b>	<b>31.716.450</b>	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Laporan Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	- Dokumen	2 Dokumen	16.716.450	1 Dokumen	16.716.450	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	- Laporan	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	5.000.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	- Laporan	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	5.000.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	- Laporan	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	5.000.000	
	<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD</b>	- %	<b>90%</b>	<b>2.728.935.000</b>	<b>90%</b>	<b>3.922.266.500</b>	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	- Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	357.000.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	- Orang	6 Orang	216.000.000	6 Orang	216.000.000	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	- Dokumen	1 Dokumen	312.935.000	1 Dokumen	349.266.500	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	- Dokumen	6 Dokumen	1.500.000.000	6 Dokumen	3.000.000.000	
	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	- Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	- Dokumen	-	
	<b>Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase aspirasi masyarakat yang terhimpun</b>	<b>- %</b>	<b>90%</b>	<b>2.206.225.450</b>	<b>90%</b>	<b>3.206.225.450</b>	
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	- Dokumen	60 Dokumen	748.422.450	60 Dokumen	748.422.450	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	- Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	- Laporan	6 Laporan	1.452.803.000	6 Laporan	2.452.803.000	
	<b>Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Persentase terfasilitasinya tugas pimpinan dan anggota DPRD</b>	<b>- %</b>	<b>90%</b>	<b>6.500.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>13.000.000.000</b>	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	- Dokumen	15 Dokumen	1.500.000.000	15 Dokumen	3.000.000.000	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	- Dokumen	23 Dokumen	5.000.000.000	23 Dokumen	10.000.000.000	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>17.445.000.575</b>	<b>100%</b>	<b>17.166.634.400</b>	<b>OPD yang menangani urusan sekretariat DPRD</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>- %</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dokumen	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	50.000.000	
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase capaian pembayaran gaji dan tunjangan ASN</b>	<b>- %</b>	<b>100%</b>	<b>2.759.600.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.411.302.178</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.759.600.000	21 Orang/bulan	2.411.302.178	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan administrasi umum sekretariat DPRD yang terpenuhi</b>	<b>- %</b>	<b>100%</b>	<b>454.807.500</b>	<b>100%</b>	<b>701.312.500</b>	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Laporan	70 Laporan	220.000.000	80 Laporan	440.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Laporan	120 Laporan	92.475.000	130 Laporan	110.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Paket	21 Paket	20.000.000	21 Paket	25.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Paket	140 Paket	80.512.500	140 Paket	80.512.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Paket	30 Paket	41.820.000	30 Paket	45.800.000	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan</b>	<b>- %</b>	<b>100%</b>	<b>2.010.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>120.000.000</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Unit	8 Unit	50.000.000	8 Unit	20.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Unit	4 Unit	110.000.000	8 Unit	100.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Unit	6 Unit	150.000.000	1 Unit	-	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Unit	3 Unit	1.700.000.000	1 Unit	-	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase jasa penunjang urusan Sekretariat DPRD yang terpenuhi</b>	- %	<b>100%</b>	<b>1.663.658.025</b>	<b>100%</b>	<b>1.633.910.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Laporan	108 Laporan	1.447.658.025	108 Laporan	1.414.160.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Laporan	60 Laporan	210.000.000	60 Laporan	210.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Laporan	6 Laporan	6.000.000	6 Laporan	9.750.000	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah</b>	- %	<b>100%</b>	<b>773.138.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.095.000.000</b>	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	1.500.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Unit	8 Unit	58.650.000	8 Unit	75.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Unit	5 Unit	114.488.000	5 Unit	120.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Unit	24 Unit	400.000.000	24 Unit	400.000.000	
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase Fasilitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	- %	<b>100%</b>	<b>208.272.000</b>	<b>100%</b>	<b>300.000.000</b>	
	Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	- Laporan	1 Laporan	208.272.000	1 Laporan	300.000.000	
	<b>Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase Terfasilitasinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	- %	<b>100%</b>	<b>8.389.985.050</b>	<b>100%</b>	<b>8.748.413.897</b>	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	- Orang	20 Orang	25.567.000	20 Orang	25.567.000	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	- Paket	120 Paket	239.000.000	120 Paket	239.000.000	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	- Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	8.125.418.050	20 Orang/Bulan	8.483.846.897	
	<b>Kegiatan Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi</b>	- %	<b>100%</b>	<b>1.135.540.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.106.695.825</b>	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	- Paket	300 Paket	905.540.000	300 Paket	736.695.825	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	- Laporan	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	250.000.000	
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	- Dokumen	3 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	120.000.000	
	<b>5 UNSUR PENUNJANG</b>							
	<b>5.1 [ URUSAN ] PERENCANAAN</b>				<b>30.308.432.566</b>		<b>21.042.668.566</b>	
	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>80%</b>	<b>82%</b>	<b>25.408.200.000</b>	<b>84%</b>	<b>15.507.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan perencanaan</b>
	<b>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>25.268.200.000</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>15.357.000.000</b>	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	25.198.200.000	3 Dokumen	15.252.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000	1 Berita Acara	70.000.000	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	35.000.000	
	<b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Tingkat ketersediaan data perencanaan pembanguinan pada OPD dalam sistem pengelolaan data</b>	<b>85%</b>	<b>86%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>87%</b>	<b>15.000.000</b>	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	15.000.000	
	<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>20.000.000</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>15.000.000</b>	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	10 Laporan	10 Laporan	20.000.000	10 Laporan	15.000.000	
	<b>Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan</b>	<b>5 modul</b>	<b>5 modul</b>	<b>100.000.000</b>	<b>5 modul</b>	<b>120.000.000</b>	
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	41 Dokumen	41 Dokumen	100.000.000	41 Dokumen	120.000.000	
	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik</b>	<b>83%</b>	<b>85%</b>	<b>130.000.000</b>	<b>88%</b>	<b>160.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan perencanaan</b>

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia</b>	83%	85%	60.000.000	88%	75.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	13 Laporan	40.000.000	13 Laporan	40.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	13 Laporan	20.000.000	13 Laporan	35.000.000	
	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang perekonomian dan SDA</b>	83%	85%	20.000.000	88%	35.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	10 Laporan	10 Laporan	20.000.000	10 Laporan	35.000.000	
	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan</b>	83%	85%	50.000.000	88%	50.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	10 Laporan	10 Laporan	50.000.000	10 Laporan	50.000.000	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</b>	98%	100%	4.770.232.566	100%	5.375.668.566	<b>OPD yang menangani urusan penelitian dan pengembangan</b>
	[ KEGIATAN ] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	33 orang	33 orang	3.880.568.566	33 orang	3.880.568.566	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3.880.568.566	33 Orang/bulan	3.880.568.566	
	[ KEGIATAN ] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>Persentase pemenuhan urusan administrasi kepegawaian</b>	0%	0%	-	0%	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	0 Paket	-	0 Paket	-	
	[ KEGIATAN ] Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</b>	100%	100%	329.000.000	100%	549.100.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan	250.000.000	200 Laporan	450.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	10.000.000	3 Paket	27.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	65.000.000	7 Paket	67.500.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	4.000.000	5 Paket	4.100.000	
	<b>[ KEGIATAN ] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>290.000.000</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	6 Unit	50.000.000	6 Unit	20.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	270.000.000	
	<b>[ KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>190.664.000</b>	<b>100%</b>	<b>226.000.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan	147.664.000	7 Laporan	185.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	37.000.000	4 Laporan	38.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	3.000.000	
	<b>[ KEGIATAN ] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>320.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>430.000.000</b>	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	150.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	50.000.000	50 Unit	40.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21 Unit	220.000.000	21 Unit	240.000.000	
5.2	<b>[ URUSAN ] KEUANGAN</b>				<b>11.065.718.352</b>		<b>11.433.247.876</b>	
	<b>[ TUJUAN ] Meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang keuangan daerah</b>				-		-	
	<b>[ SASARAN ] Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang akurat dan berkualitas</b>							
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu</b>	<b>Tepat waktu</b>	<b>Tepat waktu</b>	<b>2.851.000.000</b>	<b>Tepat waktu</b>	<b>2.871.500.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan keuangan</b>



KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	<b>Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Penyusunan APBD APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/ waktu maupun ketentuan lainnya</b>	<b>Tepat Waktu</b>	<b>Tepat Waktu</b>	<b>720.000.000</b>	<b>Tepat Waktu</b>	<b>720.000.000</b>	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	4 Dokumen	130.000.000	4 Dokumen	130.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dokumen	6 Dokumen	350.000.000	6 Dokumen	350.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000	2 Dokumen	120.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000	2 Dokumen	120.000.000	
	<b>Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK</b>	<b>82%</b>	<b>83%</b>	<b>42.000.000</b>	<b>84%</b>	<b>41.500.000</b>	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen	37.000.000	2 Dokumen	37.000.000	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	4.500.000	
	<b>Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu sesuai dan SAP</b>	<b>Tepat Waktu</b>	<b>Tepat Waktu</b>	<b>69.000.000</b>	<b>Tepat Waktu</b>	<b>80.000.000</b>	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	24.000.000	2 Dokumen	24.000.000	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	7 Laporan	30.000.000	7 Laporan	38.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	4 Laporan	7.000.000	4 Laporan	8.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	<b>Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2.020.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.030.000.000</b>	
	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	30.000.000	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000.000	1 Laporan	2.000.000.000	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan tepat waktu</b>	<b>Tepat waktu</b>	<b>Tepat waktu</b>	<b>1.295.000.000</b>	<b>Tepat waktu</b>	<b>1.297.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan keuangan</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.295.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.297.000.000</b>	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	220.000.000	4 Dokumen	220.000.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan	1.000.000.000	3 Laporan	1.000.000.000	
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	7.000.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	40.000.000	2 Laporan	40.000.000	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah</b>	<b>1,94%</b>	<b>2,00%</b>	<b>290.178.476</b>	<b>2,00%</b>	<b>380.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan keuangan</b>
	<b>Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah</b>	<b>9,6 Milyar</b>	<b>9,9 Milyar</b>	<b>290.178.476</b>	<b>10,1 Milyar</b>	<b>380.000.000</b>	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	72 Dokumen	72 Dokumen	70.178.476	72 Dokumen	100.000.000	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	50.000.000	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	14000 Obyek Pajak	400 Obyek Pajak	100.000.000	450 Obyek Pajak	100.000.000	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	90.000.000	9 Dokumen	130.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>6.629.539.876</b>	<b>100%</b>	<b>6.884.747.876</b>	<b>OPD yang menangani urusan keuangan</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan keuangan perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>5.351.456.276</b>	<b>100%</b>	<b>5.351.456.276</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	49 Orang/bulan	5.351.456.276	49 Orang/bulan	5.351.456.276	
	<b>[ KEGIATAN ] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase capaian administrasi perangkat daerah yang dilaksanakan</b>	<b>0 Paket</b>	<b>0 Paket</b>	<b>-</b>	<b>0 Paket</b>	<b>-</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Paket	- Paket	-	- Paket	-	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>338.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>508.000.000</b>	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	462 Laporan	462 Laporan	250.000.000	462 Laporan	400.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10.000.000	2 Paket	30.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	45 Paket	70.000.000	45 Paket	70.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	8.000.000	7 Paket	8.000.000	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan sarana dan prasana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	4 Unit	50.000.000	6 Unit	50.000.000	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>584.392.000</b>	<b>100%</b>	<b>699.600.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	415.392.000	2 Laporan	530.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	60 Laporan	163.000.000	60 Laporan	163.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	3 Laporan	6.000.000	3 Laporan	6.600.000	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>305.691.600</b>	<b>100%</b>	<b>275.691.600</b>	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	56 Unit	50.000.000	56 Unit	20.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RPKD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 Unit	36 Unit	205.691.600	36 Unit	205.691.600	
5.3	<b>[ URUSAN ] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				120.000.000		125.000.000	
	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90</b>	99,2% ***	72%	120.000.000	74%	125.000.000	OPD yang menangani urusan penelitian dan pengembangan
		<b>Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan</b>	1 dokumen	6 dokumen		8 dokumen		
	<b>[ KEGIATAN ] Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun</b>	- dokumen	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	15.000.000	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	- Laporan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	15.000.000	
	<b>[ KEGIATAN ] Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang sosial dan kependudukan yang disusun</b>	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	22.500.000	
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.500.000	
	<b>[ KEGIATAN ] Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun</b>	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	22.500.000	
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.500.000	
	<b>[ KEGIATAN ] Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah</b>	100%	100%	50.000.000	100%	65.000.000	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	23 Dokumen	23 Dokumen	50.000.000	23 Dokumen	65.000.000	
5.4	<b>[ URUSAN ] KEPEGAWAIAN</b>				20.785.818.391		23.060.818.391	
	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Nilai Sistem Merit</b>	325	330	670.000.000	335	745.000.000	OPD yang menangani urusan kepegawaian
	<b>Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik</b>	400 file	400 file	310.000.000	400 file	325.000.000	
		<b>Jumlah usulan ASN Per tahun</b>	0 orang	200 orang		200 orang		
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	25.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	0 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	
	<b>Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>320.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>350.000.000</b>	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	
	<b>Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>70.000.000</b>	
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	0 Orang	12 Orang	30.000.000	10 Orang	40.000.000	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5 Orang	5 Orang	-	5 Orang	20.000.000	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>18.775.818.391</b>	<b>100%</b>	<b>20.825.818.391</b>	<b>OPD yang menangani urusan kepegawaian</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah bulan pembayaran gaji yang terpenuhi</b>	<b>14 bulan</b>	<b>14 bulan</b>	<b>17.969.098.391</b>	<b>14 bulan</b>	<b>17.969.098.391</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	17.969.098.391	14 Orang/bulan	17.969.098.391	
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya</b>	<b>0 paket</b>	<b>0 paket</b>	<b>-</b>	<b>0 paket</b>	<b>-</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	0 Paket	-	0 Paket	-	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan kegiatan perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>290.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>360.000.000</b>	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	250.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	24 Paket	10.000.000	24 Paket	30.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	6 Paket	70.000.000	6 Paket	70.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	18 Paket	10.000.000	18 Paket	10.000.000	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan BMD yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.100.000.000</b>	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	2.000.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	45 Unit	50.000.000	5 Unit	20.000.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	80 Unit	-	10 Unit	80.000.000	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah materai, jumlah tagihan rekening dan jumlah unit gedung yang dijaga</b>	<b>200 lembar</b>	<b>200 lembar</b>	<b>226.720.000</b>	<b>200 lembar</b>	<b>226.720.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	130.720.000	12 Laporan	130.720.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	90.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.000.000	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan BMD yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>240.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>170.000.000</b>	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000	1 Unit	30.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	26 Unit	40.000.000	26 Unit	40.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit	100.000.000	17 Unit	100.000.000	
<b>5.5</b>	<b>[ URUSAN ] PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				<b>1.520.000.000</b>		<b>1.520.000.000</b>	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi</b>	<b>8,0%</b>	<b>7,6%</b>	<b>1.520.000.000</b>	<b>7,6%</b>	<b>1.520.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan pendidikan dan pelatihan</b>
	<b>[ KEGIATAN ] Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi PNS</b>	<b>120 orang</b>	<b>120 orang</b>	<b>800.000.000</b>	<b>120 orang</b>	<b>800.000.000</b>	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	120 Orang	120 Orang	800.000.000	120 Orang	800.000.000	
	<b>[ KEGIATAN ] Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS</b>	<b>132 orang</b>	<b>20 orang</b>	<b>720.000.000</b>	<b>20 orang</b>	<b>720.000.000</b>	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	1 Laporan	720.000.000	1 Laporan	720.000.000	
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWAS</b>							

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
6.1	[ URUSAN ] INSPEKTORAT DAERAH				5.405.702.960		5.420.702.960	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan</b>	85,0%	88,0%	380.000.000	90,0%	475.000.000	OPD yang menangani urusan pengawasan
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Auditor</b>	65%	70%	335.000.000	75%	420.000.000	
	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	0 Kesepakatan	1 Kesepakatan	10.000.000	2 Kesepakatan	20.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000	5 Dokumen	55.000.000	
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	30.000.000	
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	25.000.000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	133 Laporan	120 Laporan	205.000.000	125 Laporan	230.000.000	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Laporan	6 Laporan	50.000.000	6 Laporan	60.000.000	
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tuntas dilaksanakan</b>	100%	100%	45.000.000	100%	55.000.000	
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6 Laporan	6 Laporan	42.500.000	6 Laporan	52.500.000	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.500.000	
	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP</b>	90,0%	91,0%	166.760.000	92,0%	206.760.000	OPD yang menangani urusan pengawasan
	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilakukan</b>	50%	50%	10.000.000	50%	10.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	0 Rekomendasi	1 Rekomendasi	10.000.000	1 Rekomendasi	10.000.000	
	<b>Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilakukan</b>	85%	87%	156.760.000	88%	196.760.000	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	23 perangkat daerah	23 perangkat daerah	50.760.000	23 perangkat daerah	50.760.000	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	23 perangkat daerah	23 perangkat daerah	10.000.000	23 perangkat daerah	10.000.000	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integritas	23 perangkat daerah	23 perangkat daerah	40.000.000	23 perangkat daerah	60.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RPKD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	56.000.000	2 Kegiatan	76.000.000	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>4.858.942.960</b>	<b>93%</b>	<b>4.738.942.960</b>	<b>OPD yang menangani urusan pengawasan</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan yang Dibayarkan Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4.150.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>4.150.000.000</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.150.000.000	45 Orang/bulan	4.150.000.000	
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>66.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>36.000.000</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	40 Paket	40.000.000	40 Paket	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	1 Orang	5.000.000	0 Orang	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	40 Orang	21.000.000	41 Orang	36.000.000	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>243.942.960</b>	<b>100%</b>	<b>198.942.960</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153 Laporan	150 Laporan	160.000.000	130 Laporan	130.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	25.000.000	2 Paket	25.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.100.000	1 Paket	3.100.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.842.960	1 Paket	20.842.960	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	5 Laporan	10.000.000	5 Laporan	10.000.000	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan BMD yang Tuntas Dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2 Unit	30.000.000	0 Unit	-	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas Dilaksanakan</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>219.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>219.000.000</b>	



KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	27.000.000	1 Laporan	27.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	190.000.000	1 Laporan	190.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Kegiatan Pemeliharaan yang Tuntas Dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>135.000.000</b>	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5.000.000	0 Unit	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	95.000.000	8 Unit	85.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000	
	<b>7 UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
	<b>7.1 [ URUSAN ] KECAMATAN</b>				<b>16.185.939.809</b>		<b>16.350.939.809</b>	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan</b>	<b>39,40%</b>	<b>39,98%</b>	<b>3.005.840.000</b>	<b>39,99%</b>	<b>3.005.840.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan kewilayahan</b>
	<b>Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan</b>	<b>3 jenis</b>	<b>3 jenis</b>	<b>706.000.000</b>	<b>3 jenis</b>	<b>706.000.000</b>	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	426.000.000	6 Pokmas / Ormas	426.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	80.000.000	8 Unit	80.000.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000	9 Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Rukun Tetangga (RT)</b>	<b>106 RT</b>	<b>107 RT</b>	<b>2.299.840.000</b>	<b>107 RT</b>	<b>2.299.840.000</b>	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	106 RT Lembaga Kemasyarakatan	107 RT Lembaga Kemasyarakatan	2.299.840.000	107 RT Lembaga Kemasyarakatan	2.299.840.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Tingkat Layanan</b>	100%	100%	2.678.840.000	100%	2.678.840.000	OPD yang menangani urusan kewilayahan
	<b>Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan</b>	12 kali	12 kali	1.328.880.000	12 kali	1.328.880.000	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	8 Dokumen	8 Dokumen	1.328.880.000	8 Dokumen	1.328.880.000	
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan</b>	7 urusan	10 urusan	1.349.960.000	10 urusan	1.349.960.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10 Laporan	10 Laporan	1.349.960.000	10 Laporan	1.349.960.000	
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Jumlah laporan kasus pelanggaran trantibum</b>	10 laporan	10 laporan	10.000.000	9 laporan	20.000.000	OPD yang menangani urusan kewilayahan
	<b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan</b>			10.000.000		20.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	20.000.000	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan</b>	100%	100%	20.000.000	100%	50.000.000	OPD yang menangani urusan kewilayahan
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah</b>	2 urusan	3 urusan	20.000.000	2 urusan	50.000.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200 Orang	300 Orang	10.000.000	200 Orang	40.000.000	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</b>	100%	100%	10.471.259.809	100%	10.596.259.809	OPD yang menangani urusan kewilayahan
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	100%	8.641.923.809	100%	8.641.923.809	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	8.641.923.809	80 Orang/bulan	8.641.923.809	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>persentase pemenuhan layanan kepegawaian</b>	0%	0%	-	0%	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	0 Paket	-	0 Paket	-	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran</b>	100%	100%	427.000.000	100%	517.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29 Laporan	29 Laporan	178.000.000	29 Laporan	238.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	20.000.000	3 Paket	50.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	200.000.000	3 Paket	200.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	29.000.000	10 Paket	29.000.000	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	100%	100%	190.000.000	100%	50.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	28 Unit	190.000.000	10 Unit	50.000.000	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah</b>	100%	100%	752.336.000	100%	752.336.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	616.336.000	1 Laporan	616.336.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	130.000.000	1 Laporan	130.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah</b>	100%	100%	460.000.000	100%	635.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit	60.000.000	100 Unit	60.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	250.000.000	10 Unit	425.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiaik dan Perizinannya	55 Unit	55 Unit	150.000.000	55 Unit	150.000.000	
<b>7.2</b>	<b>[ URUSAN ] KECAMATAN</b>				<b>16.776.080.562</b>		<b>16.973.910.962</b>	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan</b>	24%	26%	3.459.123.900	27%	3.459.123.900	<b>OPD yang menangani urusan kewilayahan</b>
	<b>Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	3 jenis	3 jenis	603.123.900	3 jenis	603.123.900	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RPKD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	323.123.900	8 Pokmas / Ormas	323.123.900	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	- Unit	8 Unit	80.000.000	8 Unit	80.000.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/Kelurahan</b>	<b>1 lembaga</b>	<b>1 lembaga</b>	<b>2.856.000.000</b>	<b>1 lembaga</b>	<b>2.856.000.000</b>	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	- Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	2.856.000.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	2.856.000.000	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Tingkat Layanan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3.481.040.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.481.040.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan kewilayahan</b>
	<b>Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum</b>	<b>680 dokumen</b>	<b>680 dokumen</b>	<b>1.281.040.000</b>	<b>680 dokumen</b>	<b>1.281.040.000</b>	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	- Dokumen	680 Dokumen	1.281.040.000	680 Dokumen	1.281.040.000	
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>8 laporan</b>	<b>8 laporan</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>8 laporan</b>	<b>2.200.000.000</b>	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Laporan	8 Laporan	2.200.000.000	8 Laporan	2.200.000.000	
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Penurunan tingkat pelanggaran ketenteraman ketertiban umum</b>	<b>10 laporan</b>	<b>10 laporan</b>	<b>34.000.000</b>	<b>9 laporan</b>	<b>30.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan kewilayahan</b>
	<b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Terlaksananya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>12 laporan</b>	<b>12 laporan</b>	<b>34.000.000</b>	<b>12 laporan</b>	<b>30.000.000</b>	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Laporan	12 Laporan	34.000.000	12 Laporan	30.000.000	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan kewilayahan</b>
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>2 jenis</b>	<b>2 jenis</b>	<b>30.000.000</b>	<b>2 jenis</b>	<b>50.000.000</b>	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	- Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	- Orang	200 Orang	20.000.000	200 Orang	40.000.000	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>9.771.916.662</b>	<b>100%</b>	<b>9.953.747.062</b>	<b>OPD yang menangani urusan kewilayahan</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>90 Persen</b>	<b>90 Persen</b>	<b>8.014.504.662</b>	<b>90 Persen</b>	<b>8.014.504.662</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Orang/bulan	75 Orang/bulan	8.014.504.662	75 Orang/bulan	8.014.504.662	
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>90 Persen</b>	<b>90 Persen</b>	<b>-</b>	<b>90 Persen</b>	<b>-</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Paket	2 Paket	-	2 Paket	-	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>90 Persen</b>	<b>90 Persen</b>	<b>393.000.000</b>	<b>90 Persen</b>	<b>507.000.000</b>	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Laporan	300 Laporan	198.000.000	300 Laporan	228.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Paket	12 Paket	20.000.000	12 Paket	50.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Paket	12 Paket	146.000.000	12 Paket	200.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Paket	12 Paket	29.000.000	12 Paket	29.000.000	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>90 Persen</b>	<b>90 Persen</b>	<b>190.000.000</b>	<b>90 Persen</b>	<b>50.000.000</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Unit	28 Unit	190.000.000	10 Unit	50.000.000	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 laporan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>846.912.000</b>	<b>1 laporan</b>	<b>1.054.742.400</b>	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Laporan	35 Laporan	762.720.000	35 Laporan	970.550.400	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Laporan	36 Laporan	78.192.000	36 Laporan	78.192.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Laporan	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>327.500.000</b>	<b>90%</b>	<b>327.500.000</b>	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Unit	13 Unit	109.500.000	13 Unit	109.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Unit	1 Unit	80.000.000	1 Unit	80.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Unit	47 Unit	138.000.000	47 Unit	138.000.000	
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>							
<b>8.1</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				<b>15.584.365.495</b>		<b>6.890.249.995</b>	
	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>580.000.000</b>	<b>80%</b>	<b>605.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik</b>
	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>presentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang ideologi radikal dan isu-isu di daerah</b>	<b>- %</b>	<b>80%</b>	<b>580.000.000</b>	<b>80%</b>	<b>605.000.000</b>	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	- Orang	80 Orang	580.000.000	80 Orang	580.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	- Orang	- Orang	-	40 Orang	25.000.000	
	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	<b>Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10.061.635.100</b>	<b>100%</b>	<b>1.072.140.600</b>	<b>OPD yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik</b>
	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>presentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya</b>	<b>- %</b>	<b>23%</b>	<b>10.061.635.100</b>	<b>23%</b>	<b>1.072.140.600</b>	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- Orang	15 Orang	461.635.100	15 Orang	472.140.600	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- Orang	8 Orang	9.600.000.000	8 Orang	600.000.000	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik</b>
	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>				<b>50.000.000</b>		<b>50.000.000</b>	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	- Orang	- Orang	50.000.000	60 Orang	50.000.000	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase Konflik yang tertangani</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>65.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>175.900.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik</b>
	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>presentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi, masalah sosial dan budaya dikalangan masyarakat</b>	<b>- %</b>	<b>100%</b>	<b>65.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>175.900.000</b>	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- Orang	- Orang	35.000.000	50 Orang	45.900.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- Orang	4 Orang	30.000.000	4 Orang	130.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase kewaspadaan nasional yang tertangani di daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>530.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>555.750.000</b>	<b>OPD yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik</b>
	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>presentase pencegahan konflik sosial yang berkembang ditengah masyarakat</b>	<b>- %</b>	<b>100%</b>	<b>530.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>555.750.000</b>	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Orang	5 Orang	500.000.000	5 Orang	500.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Orang	15 Orang	30.000.000	15 Orang	55.750.000	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4.297.730.395</b>	<b>100%</b>	<b>4.431.459.395</b>	<b>OPD yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>tertib administrasi keuangan</b>	<b>- bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>3.556.247.995</b>	<b>12 bulan</b>	<b>3.556.247.995</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	3.556.247.995	14 Orang/bulan	3.556.247.995	
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>presentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Paket	32 Paket	-	34 Paket	-	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>200.890.800</b>		<b>314.619.800</b>	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Laporan	150 Laporan	150.000.000	150 Laporan	280.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Paket	2 Paket	10.000.000	2 Paket	11.729.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Paket	1 Paket	35.893.000	1 Paket	17.893.000	



KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RKPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		PERKIRAAN 2025		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Paket	1 Paket	4.997.800	1 Paket	4.997.800	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>presentase pengadaan BMD yang tuntas dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>70.000.000</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Unit	1 Unit	50.000.000	2 Unit	20.000.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Unit	- Unit	-	1 Unit	50.000.000	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>presentase kegiatan penunjang yang tuntas dilaksanakan</b>	<b>- %</b>	<b>100%</b>	<b>135.010.800</b>	<b>100%</b>	<b>135.010.800</b>	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Laporan	4 Laporan	99.648.000	4 Laporan	99.648.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Laporan	36 Laporan	29.362.800	40 Laporan	29.362.800	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Laporan	3 Laporan	6.000.000	3 Laporan	6.000.000	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>terpelihara barang milik daerah</b>			<b>355.580.800</b>		<b>355.580.800</b>	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Unit	- Unit	20.000.000	- Unit	20.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Unit	- Unit	35.000.000	- Unit	35.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Unit	20 Unit	300.580.800	20 Unit	300.580.800	



# **BAB VI**

## **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang Panjang dalam bentuk kinerja nyata dari seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang target keberhasilan mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

### **6.1 INDIKATOR KINERJA MAKRO**

Indikator Kinerja Makro bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian keberhasilan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Padang Panjang periode 2024-2026. Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah, maka ditetapkan indikator makro pembangunan yang terdiri dari Pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, Indeks gini, Tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia. Indikator kinerja makro menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan Kota Padang Panjang khususnya dan menjadi dukungan keberhasilan indikator kinerja pembangunan propinsi dan nasional. Adapun target indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan, Target capaian indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024 dijabarkan dalam Tabel berikut :

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja Makro Kota Padang Panjang Tahun 2024**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	Indeks	79,02
2	Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	4,24
3	Tingkat Pengangguran (%)	Persen	4,60
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persen	5,20
5	PDRB Perkapita ADHK (Rp/Juta)	Juta	50,87
6	PDRB Perkapita ADHB (Rp/Juta)	Juta	75,58
7	Gini Rasio	Indeks	0,292

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang ditargetkan sebesar 5,20% pada tahun 2024, lebih tinggi 0,41 poin dibandingkan target Tahun, Tingkat Pengangguran ditargetkan menjadi sebesar 4,60% pada tahun 2024, lebih tinggi 1,2 poin dari target Tahun 2023 yang sebesar 4,72%. Seiring dengan penurunan Tingkat Pengangguran, tingkat kemiskinan juga ditargetkan menjadi sebesar 4,24%. Penurunan tingkat kemiskinan didukung oleh target penurunan ketimpangan pendapatan yang menjadi 0,292 Sementara itu, IPM ditargetkan menjadi sebesar dari 79,02 pada tahun 2024

## 6.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran serta merupakan ikhtisar hasil berbagai Program sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Lebih lanjut penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6.2 berikut ini :

**Tabel 6.2**  
**Indikator Kinerja Utama Kota Padang Panjang Tahun 2024**

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2022	TARGET 2023	TARGET TAHUN 2024
I	Indeks Pembangunan Manusia	78,78	78,97	79,02
1	Rata-rata Lama Sekolah	11,92	11,93	11,94
2	Harapan Lama Sekolah	15,07	15,08	15,09
3	Umur Harapan Hidup	73,02	73,03	73,04
4	Prevelansi Stunting	16,80	15,40	14,00
5	Indeks Pemberdayaan Gender	69,44	70,84	71,44
6	Predikat Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	utama
7	Status Kota Layak Pemuda	-	-	Menuju Pratama
8	Rasio capaian prestasi keolahragaan	-	-	0,2
II	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	59,40	60,60	61,80
9	Nilai SAKIP	62,91	63,10	63,98
10	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70,61	70,85	71,00
11	Nilai Sistem Merit	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2022	TARGET 2023	TARGET TAHUN 2024
		-325	-328	-330
12	Maturitas SPIP	2+	2+	3 (3.1)
13	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	85	88	90
14	Indeks SPBE	2,09	2,40	2,70
III	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,39	4,79	5,20
	Gini Rasio	0,296	0,294	0,292
15	LPE sektor Perdagangan	5,28	5,82	6,36
16	LPE sektor pertanian	5,54	5,59	5,64
17	LPE sektor penyediaan makan dan minum	10,47	10,71	10,95
18	Persentase pertumbuhan nilai investasi	6,0	6,0	6,0
19	Tingkat Kemiskinan	5,14	4,69	4,24
20	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,84	4,72	4,60
21	Pengeluaran perkapita	11,153	11,228	11,328
IV	Indeks Rasa Aman	Aman	Aman	Aman (86,39)
		(86,04)	(86,20)	
22	Persentase Pemajuan Kebudayaan	65,45	68	71
23	Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	75	80	85
24	Persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100
25	Angka PPKS	5,68	4,87	4,68
V	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	90,96	91,16	91,36
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,99	65,74	66,16
26	IKLI kePUan	89,66	89,86	90,06
27	IKLI Perkim	96,80	96,85	96,90
28	IKLI perhubungan	96,62	96,69	96,76
29	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	82,00	82,50	83,00
30	Indeks Kualitas Air	44,25	45,00	45,75
31	Indeks Kualitas Udara	89,11	90,00	90,05
32	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,00	56,50	57,00

### 6.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau

kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

RKPD Tahun 2024 merupakan perencanaan tahun Pertama RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2024. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Daerah Kota Padang Panjang secara rinci disajikan pada Tabel 6.3 berikut.

**Tabel 6.3**  
**Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD)**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2024**

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	CAPAIAN 2022	TARGET TAHUN 2024	SUMBER DATA
<b>A</b>	<b>URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
<b>I</b>	<b>Pendidikan</b>				
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	65.539	75.539	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar pertama	%	104.382	104.582	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	154.438	154.638	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	99,40*	99,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Harapan lama sekolah	Tahun	15.07	15.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Rata-rata lama sekolah	Tahun	11.93	11.94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD	%	58.92	60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat	%	99.4	99.6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat	%	97.3	97.4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	APK PAUD (3-6 tahun)	%	47.53	48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	APK SD sederajat	%	106.65	106.2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	APK SMP sederajat	%	107.15	107.5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	CAPAIAN 2022	TARGET TAHUN 2024	SUMBER DATA
14	Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat	%	2,39/2,28/2,1	2,24 dan 1,88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15	Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat	%	2,48/2,4/2,07	2,49/2,41/2,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	Literasi dan Numerasi SD sederajat	%	2,02 dan 1,72	2,03 dan 1,73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	Literasi dan Numerasi SMP sederajat	%	2,23 dan 1,87	2,24 dan 1,88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18	Persentase objek pemajuan kebudayaan	%	33	53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	42	50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan	%	30	54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21	Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari	%	20	60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	40	49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	Rasio guru/ murid sekolah pendidikan dasar	%	18,49*	18.69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	%	12,32*	12.54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>II</b>	<b>Kesehatan</b>				
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	3.029	3.03	Dinas Kesehatan
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	Dinas Kesehatan
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	81.311	83.311	Dinas Kesehatan
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	82.916	83.916	Dinas Kesehatan
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	82.651	84.651	Dinas Kesehatan
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	77.154	77.654	Dinas Kesehatan
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	81.598	82.598	Dinas Kesehatan
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	61.323	64.323	Dinas Kesehatan
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	94.356	94.556	Dinas Kesehatan
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	Dinas Kesehatan
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	CAPAIAN 2022	TARGET TAHUN 2024	SUMBER DATA
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	Dinas Kesehatan
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	Dinas Kesehatan
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	87.671	87.871	Dinas Kesehatan
15	Prevalensi Stunting	%	14.76	11.05	Dinas Kesehatan
16	Umur Harapan Hidup	Tahun	73.02	73.03	Dinas Kesehatan
17	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0.44	0.47	Dinas Kesehatan
18	'Persentase Penurunan Kematian Ibu	%	33	25	Dinas Kesehatan
19	Persentase Penurunan Kematian Bayi	%	18.2	20	Dinas Kesehatan
20	Presentase UHC	%	98.9	99.28	Dinas Kesehatan
21	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan (indikator baru)	%	NA	0,88	Dinas Kesehatan
22	Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (indikator baru)	%	NA	65	Dinas Kesehatan
23	Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum (indikator baru)	%	NA	76,66	Dinas Kesehatan
24	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif (indikator baru)	%	NA	0,9625	Dinas Kesehatan
25	Persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif (indikator baru)	%	NA	96,25	Dinas Kesehatan
26	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk	%	0,27	0,27	Dinas Kesehatan
27	Rasio dokter persatuan penduduk	%	0,84	0,84	Dinas Kesehatan
28	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	%	1,47	1,47	Dinas Kesehatan
29	Indek Keluarga Sehat	indek	0,44	0,47	Dinas Kesehatan
<b>III</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	48.311	48.311	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	86.00	86.57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	CAPAIAN 2022	TARGET TAHUN 2024	SUMBER DATA
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	89.05	90.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Rasio	44.20	46.10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	91,19	92.24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	60.75	61.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Rasio	100.00	100.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	IKLI KePUan	Indeks	90,13	90,53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Persentase kesesuaian tata ruang	%	82	83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Perkotaan dalam Kondisi Baik	%	72,76	72,88	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Indeks Penilaian Pemanfaatan Ruang	%	0	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko	%	77	81	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Persentase trotoar dalam kondisi baik	%	83	83.2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	%	81	81.2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	88*	90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	89.05	90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	%	74.27	76	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	Luas kawasan kumuh	%	18.008	9.05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>IV</b>	<b>Perumahan Rakyat</b>				
1	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	%	73.98	89.36	Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
2	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	3.37	3.38	Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
3	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
4	IKLI Perkim	Indeks	96,80	96,90	Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
5	Persentase permukiman layak huni	%	97,01	98,80	Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
6	Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	%	78	85	Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	CAPAIAN 2022	TARGET TAHUN 2024	SUMBER DATA
7	Indeks kualitas air	Indeks	46,07	45,75	Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
8	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	56,18	57,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
9	Indeks kualitas udara	Indeks	91,29	90,05	Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
10	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	%	0	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
11	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	%	0	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
12	Persentase pengelolaan RTH Publik	%	0,66	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
<b>V</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>				
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	Satuan POL PP dan Pemadam Kebakaran
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	75	80	Satuan POL PP dan Pemadam Kebakaran
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	Satuan POL PP dan Pemadam Kebakaran
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	Satuan POL PP dan Pemadam Kebakaran
5	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	%	100	100	Satuan POL PP dan Pemadam Kebakaran
6	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	2 menit	2 menit	Satuan POL PP dan Pemadam Kebakaran
7	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	Satuan POL PP dan Pemadam Kebakaran
8	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	Satuan POL PP dan Pemadam Kebakaran
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik
10	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik
11	Presentase penanggulangan bencana yang tertangani sesuai SOP-	%	-	100	BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik
12	Respon time tanggap darurat	Menit	10 menit	10 menit	BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>VI</b>	<b>Sosial</b>				

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	CAPAIAN 2022	TARGET TAHUN 2024	SUMBER DATA
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	92.51	92.61	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	
3	Angka PPKS	%	5.43	5.25	
4	Persentase lembaga sosial yang aktif	%	90	100	
5	Persentase PPKS yang tertangani	%	69.82	80	
	Persentase sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	%	79,17	0,75	
<b>B</b>	<b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
<b>VII</b>	<b>Tenaga Kerja</b>				
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	%	1.022	0.04	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	14.48	14.58	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	58.42	58.43	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	%	33.09	33.10	
6	Tingkat Pengangguran	%	4,84	4,72	
7	Persentase Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja	%	NA	64,05	
8	Persentase Peningkatan Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja Sektor Informal Bukan Penerima Upah yang Masuk Kategori Miskin	%	NA	2,5	
<b>VIII</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	8.75	8.751	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	CAPAIAN 2022	TARGET TAHUN 2024	SUMBER DATA
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	<b>26.373</b>	26.273	Perempuan dan Perlindungan Anak
4	IDG	Indeks	-69.44	(71,44)	
5	Predikat KLA	Predikat	Nindya	Utama	
6	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	10%	20%	
<b>IX</b>	<b>Pangan</b>				
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	<b>13.043</b>	13.053	Dinas Pangan dan Pertanian
2	LPE Sektor Pertanian	%	5,04	5,13	Dinas Pangan dan Pertanian
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	87,3	86,1	Dinas Pangan dan Pertanian
4	Produktivitas Padi	Ton/ha	8,04	6,5	Dinas Pangan dan Pertanian
5	Produktivitas Susu Sapi Perah	Liter/hari	11,67	11,80	Dinas Pangan dan Pertanian
6	Persentase penerapan inovasi teknologi	%	-	33,3	Dinas Pangan dan Pertanian
7	Persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos	%	20,15	8,00	Dinas Pangan dan Pertanian
8	Ketersediaan energi dan protein perkapita	gram/kapita/ hari	73.65	74	Dinas Pangan dan Pertanian
<b>X</b>	<b>Pertanahan</b>				
1	Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko	%	80	81	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
<b>XI</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	%	<b>66,6</b>	66.16	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	97.89	98.00	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	54.84	55.00	
4	Indeks Respon Daerah terhadap air	%	-	75-80	
5	Indeks respon daerah terhadap tutupan lahan	%	-	70-75	
6	Persentase pengelolaan sampah	%	0,8272	0,98	
7	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	%	0,6053	0,5	
<b>XII</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	CAPAIAN 2022	TARGET TAHUN 2024	SUMBER DATA
1	Perekaman KTP elektronik	%	97.45	97.65	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	98.24	98.44	
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	99.91	100.00	
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	95.83	96.03	
<b>XIII</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>				
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	<b>3 (2.54)</b>	2.541	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	56.60	56.80	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	<b>27.952</b>	27.932	
4	Indeks Pembangunan keluarga	Indeks	54.13	57.5	
5	Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP Kehidupan	%	66.73	70	
6	Rata rata jumlah anak perkeluarga	orang	2.4	2.35	
7	Ratio akseptor KB	%	56.6	57,5	
<b>XIII</b>	<b>Perhubungan</b>				
1	Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio)	angka	0.339	0.339	Dinas Perhubungan
2	Rasio Konektivitas Kota	%	38.84	38.84	Dinas Perhubungan
3	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan	angka	96.62	96.76	Dinas Perhubungan
<b>XIV</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	54.55	59.55	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	42.00	44.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Indeks domain layanan SPBE	indeks	2,2	2,80	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	indeks	na	3,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	CAPAIAN 2022	TARGET TAHUN 2024	SUMBER DATA
6	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	88.42	88.92	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>XV</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>				
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	77.27	77.67	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	1.23	1.24	
3	Persentase koperasi aktif	%	74.58	75.41	
4	Persentase Peningkatan Koperasi sehat	%	0,18	0,22	
5	jumlah koperasi yang memiliki usaha/jumlah koperasi yang ada	%	0,75	0,18	
6	Persentase peningkatan omset usaha	%	0,5142	0,1	
7	Persentase umkm yang di fasilitasi bantuan usaha	%	0,36	0,1	
8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	%	0	0,09	
9	Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital	%	0,03	0,15	
<b>XVI</b>	<b>Penanaman Modal</b>				
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	-32.22		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Persentase Kenaikan Investasi	%	6	6	
3	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	20 investor	22 investor	
4	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	nilai	85	90	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	96,18	96,87	
<b>XVII</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>				
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0.16	0.17	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0.79	0.80	
3	Rasio daya saing keolahragaan	rasio	0,1	0,2	
4	Jumlah atlit berprestasi tingkat nasional/provinsi	Prestasi	0.00	2 prestasi nasional   15 prestasi provinsi	
5	umlah pemuda berprestasi tingkat nasional/provinsi	Prestasi	0.00	1 prestasi nasional   3	

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	CAPAIAN 2022	TARGET TAHUN 2024	SUMBER DATA
				prestasi provinsi	
6	Status Padang Panjang sebagai Kota Layak Pemuda	Tingkatan	Menuju pratama	Menuju pratama	
<b>XVIII</b>	<b>Statistik</b>				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,61	2,80	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>XIX</b>	<b>Persandian</b>				
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	56.59	7.07	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>XX</b>	<b>Kebudayaan</b>				
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	78.57	78.58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>XXI</b>	<b>Perpustakaan</b>				
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	nilai	16,92	59	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	n'ni	86,54	87.00	
<b>XXII</b>	<b>Kearsipan</b>				
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	%	<b>60.85</b>	61.35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	<b>69.33</b>	69.83	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Nilai LAKE	nilai	80	80,5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Rata-rata Nilai LAKI OPD	%	70	70,5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>C</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>				
<b>XXIII</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>				
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	%	<b>100.068</b>	<b>100</b>	Dinas Pangan dan Pertanian

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	CAPAIAN 2022	TARGET TAHUN 2024	SUMBER DATA
2	Peningkatan Produksi Perikanan	%	500	0,13	Dinas Pangan dan Pertanian
<b>XXIV</b>	<b>Pariwisata</b>				
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	4.56	4.572	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	50.44	50.454	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	Tingkat hunian akomodasi	%	25.73	25.742	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2.82	2.821	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	2.42	2.43	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
6	LPE Sektor akomodasi dan makan minum	%	7,62	8,09	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
7	PAD sektor pariwisata	rupiah	204,500,000	300,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
8	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	%	6	10	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
<b>XXV</b>	<b>Pertanian</b>				
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	%	8.04	6.50	Dinas Pangan dan Pertanian
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	%	-0.40	8.50	Dinas Pangan dan Pertanian
3	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani	%	60	,75	Dinas Pangan dan Pertanian
4	Persentase jumlah Kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan tentang penerapan inovasi teknologi pertanian	%	-	13,8	Dinas Pangan dan Pertanian
<b>XXVI</b>	<b>Perdagangan</b>				
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)diri	%	33.93	34.00	Dinas Perdagangan, Koperasi Usha Kecil dan Menengah
2	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlakua	%	73.02	60.00	Dinas Perdagangan, Koperasi Usha Kecil dan Menengah
3	LPE sektor Perdagangan	%	3.73	4.8	Dinas Perdagangan, Koperasi Usha Kecil dan Menengah



NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	CAPAIAN 2022	TARGET TAHUN 2024	SUMBER DATA
<b>XXVII</b>	<b>Perindustrian</b>				
1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (UI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	Dinas Perdagangan, Koperasi Usha Kecil dan Menengah
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	0.25	0.26	Dinas Perdagangan, Koperasi Usha Kecil dan Menengah
3	Persentase kenaikan omset dan aset pelaku usaha	%	55	60	Dinas Perdagangan, Koperasi Usha Kecil dan Menengah
4	Persentase kenaikan pendapatan pelaku usaha miskin	%	40	45	Dinas Perdagangan, Koperasi Usha Kecil dan Menengah
5	Persentase pengawasan alat UTTP yang bertanda tera sah	%	0	5	Dinas Perdagangan, Koperasi Usha Kecil dan Menengah
6	Persentase pelaku usaha perdagangan yang menggunakan aplikasi digital	%	0	15	Dinas Perdagangan, Koperasi Usha Kecil dan Menengah
7	Kenaikan volume perdagangan	%	25	30	Dinas Perdagangan, Koperasi Usha Kecil dan Menengah
8	Persentase peningkatan produktivitas industri	%	25	30	Dinas Perdagangan, Koperasi Usha Kecil dan Menengah
<b>D</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>XXVII I</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD</b>				
1	Persentase kebijakan pembangunan yang dilaksanakan	%	0	100	Sekretariat Daerah
2	Nilai LPPD	indeks	Tinggi N/A	Sangat Tinggi N/A	Sekretariat Daerah
3	Persentase pemenuhan layanan keuangan perangkat daerah	%	90	90	Sekretariat Daerah
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sektor bidang perekonomian	%	0	100	Sekretariat Daerah
5	Meningkatnya kinerja proses pengadaan barang/jasa pemerintah	%	0	90	Sekretariat Daerah
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	95,33	95,70	Sekretariat Daerah
7	Nilai RB	nilai	0	57,62	Sekretariat Daerah
8	Nilai SAKIP OPD	nilai	0	63,98	Sekretariat Daerah
9	Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	%	0	82,56	Sekretariat Daerah
10	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan Pembangunan	%	0	100	Sekretariat Daerah
11	Persentase pemberian pelayanan	%	0	95	Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	CAPAIAN 2022	TARGET TAHUN 2024	SUMBER DATA
	kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				
12	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	nilai	85	90	Sekretariat Daerah
13	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	39	39.2	Sekretariat Daerah
14	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Padang Panjang Timur	nilai	97.8	97.81	Sekretariat Daerah
15	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	%	39	39.2	Sekretariat Daerah
16	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Barat	%	97	97.85	Sekretariat Daerah
17	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	%	0,8888	1	Sekretariat DPRD
18	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi	%	1,194	0,9	Sekretariat DPRD
19	Persentase perda yang ditetapkan/ dihasilkan	%	NA	75	Sekretariat DPRD
20	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	indek	NA	75	Sekretariat DPRD
21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap DPRD	indek	NA	75	Sekretariat DPRD
22	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	<b>12.8</b>	12.81	Sekretariat Daerah
23	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	<b>4.139</b>	4.149	Sekretariat Daerah
24	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	<b>52.577</b>	52.587	Sekretariat Daerah
25	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	<b>8.714</b>	8.724	Sekretariat Daerah
<b>E</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>XXIX</b>	<b>PERENCANAAN</b>				
	Indeks Kualitas Perencanaan	indeks	NA Indeks	70,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	CAPAIAN 2022	TARGET TAHUN 2024	SUMBER DATA
	Indeks Inovasi Daerah	indeks	Sangat Inovatif Indeks	Sangat Inovatif Indeks	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Dalam SAKIP Kota	nilai	22,80	22,85	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
<b>XXX</b>	<b>KEUANGAN</b>				
1	Rasio PAD	%	<b>15,92</b>		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
2	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures )	%	<b>89.971</b>	89.871	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
3	Opini Laporan Keuangan		<b>Ada (WTP)</b>	<b>Ada (WTP)</b>	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	indeks	0	71,0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	<b>9.102</b>	9.002	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	<b>7.1414</b>	7.1214	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
3	Manajemen Aset	%	<b>100</b>	<b>100</b>	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	<b>11.791</b>	0.98	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
<b>E</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN</b>				
<b>XXXI</b>	<b>PENGAWASAN</b>				
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	%	2 Level	3 (3,1) Level	Inspektorat
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	%	3 Level	3 (3,1) Level	Inspektorat
3	Presentase OPD yang Menyatakan Puas atas Pelayanan Inspektorat	%	95%	96%	Inspektorat
4	Indeks Kualitas Pengawasan	indeks	0	2	Inspektorat
<b>XXXII</b>	<b>Kepegawaian</b>				
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	<b>368.724</b>	368.725	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	<b>20.439</b>	20.449	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	<b>20.172</b>	20.182	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	<b>22.855</b>		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	CAPAIAN 2022	TARGET TAHUN 2024	SUMBER DATA
5	Indeks Profesionalitas ASN	indeks	76,51	76,70	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	Persentase ASN yang mendapatkan perlindungan kepegawaian	%	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8	Indeks Sistem Merit	indeks	0,79	0,83	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>F</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				
<b>XXXII I</b>	<b>Kecamatan</b>				
1	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	%	0	0,26	Kecamatan PPT dan PBB
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	%	39	39,2	Kecamatan PPT dan PBB
3	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan		1	1	Kecamatan PPT dan PBB
<b>G</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>				
<b>XXXI V</b>	<b>Kesatuan Bangsa Dan Politik</b>				
1	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan	%	NA	100	BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	NA	0,8	BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah	%	NA	100	BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Persentase Konflik yang tertangani	%	NA	100	BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam tahapan pelaksanaan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, dengan tema **“Peningkatan Perekonomian dan Kualitas SDM Berkarakter dan Berdaya Saing”**. Penyusunan RKPD Kota Padang Panjang tahun 2024 dilakukan dengan mensinergikan prioritas dan fokus pembangunan nasional dan prioritas Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya RKPD ini menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2024 dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2024, disinergikan dengan pencapaian arah kebijakan pembangunan daerah dan rencana prioritas pembangunan nasional.

Ditetapkan di Kota Padang Panjang  
pada tanggal 2023

**WALIKOTA PADANG PANJANG**

**FADLY AMRAN**